



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 124 /IV.16-WK/HK/2024
TENTANG
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
TAHUN 2024-2029

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
5. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024-2029.
- KESATU : Menetapkan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 19 Agustus 2024



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 124 /V.06-WK/HK/2024
TENTANG
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024-
2029

DOKUMEN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN WAY KANAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Visi SPBE adalah “Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”. Tujuan SPBE adalah: (1) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel; (2) meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan SPBE.

Untuk mewujudkan tata Kelola SPBE perlu menyusun Arsitektur SPBE yaitu kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Arsitektur SPBE terbagi menjadi 6 domain yaitu arsitektur proses bisnis, domain arsitektur layanan, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur aplikasi, domain arsitektur infrastruktur, dan domain arsitektur keamanan.

Arsitektur Proses bisnis merupakan sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Penyusunan proses bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Proses bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Arsitektur layanan merupakan keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Layanan SPBE terdiri atas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Arsitektur data dan informasi merupakan data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan,

penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi. Standar interoperabilitas data dan informasi ditetapkan oleh Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Arsitektur layanan merupakan keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Layanan SPBE terdiri atas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Arsitektur Aplikasi SPBE menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah satu atau sekumpulan program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan informatika yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka, namun apabila dituntut untuk menggunakan kode sumber tertutup, maka Pemerintah Daerah perlu untuk mendapatkan pertimbangan dari Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyebutkan bahwa Aplikasi SPBE dibagi menjadi 2 (dua), yaitu aplikasi umum dan khusus. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagai pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. Sedangkan, aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain

Arsitektur Infrastruktur SPBE merupakan salah satu komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dalam proses penyusunan arsitektur SPBE baik oleh pusat (nasional) ataupun daerah, dikarenakan infrastruktur SPBE memiliki keterikatan lain dengan domain arsitektur lainnya seperti proses bisnis, data, informasi, aplikasi dan lain sebagainya.

Pada Perpres 95 tahun 2018 disebutkan bahwa aplikasi yang dijelaskan dalam Infrastruktur SPBE dibedakan menjadi dua, yaitu Infrastruktur SPBE Nasional, dan Infrastruktur Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah; dan
- b. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE pasal 1 angka 15 menjelaskan bahwa infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

Arsitektur Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE dimana pengguna yang terlibat antara lain instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE. Keamanan merupakan salah satu dari 7 (tujuh) prinsip pelaksanaan SPBE, dimana Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Sesuai dengan Pasal 41, Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.

Diharapkan dengan penerapan Arsitektur SPBE dapat mempercepat terwujudnya agenda pembangunan untuk melakukan transformasi pelayanan publik menuju layanan digital pemerintah terintegrasi, serta mempercepat tersedianya infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar secara komprehensif, menjadikan pemerintah yang bersifat *user-centric* menuju penerapan *Society 5.0*.

Tujuan Pembuatan Arsitektur SPBE Kabupaten Way Kanan tahun 2022- 2026 agar agenda transformasi pelayanan publik menuju layanan digital pemerintah terintegrasi dapat dipercepat dan selaras dengan arah kebijakan strategis Nasional dan Provinsi Lampung serta Kabupaten Way Kanan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum Arsitektur SPBE Kabupaten Way Kanan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE;

14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
17. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Komunikasi Dan Informatika;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
21. Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
25. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
27. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2019, Tentang Penyelenggaraan Sitem Pemrintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
28. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
29. Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: 060/63 /I.11-Wk/Hk/2022 Tentang Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
30. Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: B127/IV.02-WK/HK/2022 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun Anggaran 2022;
31. Keputusan Sekertaris Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor: 130/19.a/IV.16-WK/2019, Tentang Pembentukan Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Arsitektur SPBE Kabupaten Way Kanan adalah memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis (tata laksana), data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE Kabupaten Way Kanan secara terpadu.

1.4 Hasil Penilaian SPBE

Berikut ini adalah nilai indeks SPBE dari hasil penilaian Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada tahun 2022, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1 Penilaian SPBE 2022

Dari gambar di atas dapat kita ketahui bahwa hasil penilaian indeks SPBE pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan memperoleh nilai **2,24** dengan predikat **Cukup**. Indeks Domain Kebijakan SPBE dan aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE memperoleh nilai **1,40** dengan predikat **Kurang** serta indikator Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE memperoleh nilai **Kurang**.

Namun, indeks domain Tata Kelola SPBE memperoleh nilai **1,80** predikat **Kurang**, namun pada indeks aspek Perencanaan Strategis memperoleh nilai **2,50** predikat **Cukup**, serta Indikator Arsitektur SPBE Way Kanan memperoleh nilai **2,24** predikat **Cukup**. Dengan demikian Arsitektur SPBE Way Kanan masih predikat **Kurang** dilakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan Arsitektur SPBE serta penyusunan Arsitektur SPBE sehingga diharapkan peningkatan kualitas serta indeks Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE predikat **Sangat Baik** serta Indeks Indikator Arsitektur SPBE Kabupaten Way Kanan predikat minimal level **4 (empat)** atau **Sangat Baik**.

1.5 Ruang Lingkup

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE) terdapat enam domain, yaitu, Domain Proses Bisnis, Layanan SPBE, Data dan Informasi, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE serta Keamanan SPBE.

Dari keseluruhan domain yang ada, akan di bahas 6 (enam) domain pada buku ini meliputi Domain Proses Bisnis SPBE, Domain Layanan SPBE, Domain Data dan Informasi SPBE, Domain Aplikasi SPBE, Domain Infrastruktur SPBE, dan Domain Keamanan SPBE.

1.6 Struktur Laporan

Agar Laporan Akhir ini dapat sesuai seperti yang diharapkan dalam kerangka acuan kerja, maka konsultan, mencoba menyistematiskannya ke dalam beberapa bagian sebagaimana diuraikan berikut ini;

- a. Bab I **Pendahuluan**, menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, hasil penilaian SPBE, ruang lingkup, dan struktur laporan;
- b. Bab II **Metodologi dan Referensi Arsitektur**, menguraikan tahapan penyusunan Arsitektur Proses Bisnis SPBE, Arsitektur Layanan SPBE, Arsitektur Data dan Informasi SPBE, Arsitektur Infrastruktur SPBE, dan Arsitektur Keamanan SPBE;
- c. Bab III **Arsitektur Proses Bisnis**, menguraikan tentang identifikasi Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Proses Bisnis Saat Ini, Arsitektur Proses Bisnis Target.
- d. Bab IV **Arsitektur Layanan SPBE**, menguraikan tentang Inisiatif Strategis Layanan SPBE, Pemetaan Layanan, Analisis Kesenjangan, Metadata dan Tipe Layanan.
- e. Bab V **Arsitektur Data dan Informasi SPBE**, menguraikan tentang Arsitektur Data dan Informasi Saat Ini, Arsitektur Data dan Informasi To-Be, dan Metadata Arsitektur Data dan Informasi
- f. Bab VI **Arsitektur Aplikasi SPBE**, menguraikan tentang Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE, Arsitektur Aplikasi SPBE Saat Ini, Usulan Arsitektur Aplikasi SPBE dan Analisis Gap Arsitektur Aplikasi SPBE.
- g. Bab VII **Arsitektur Infrastruktur SPBE**, menguraikan tentang Identifikasi Arsitektur Infrastruktur SPBE Saat Ini, Kapabilitas Arsitektur Infrastruktur SPBE, Integrasi Arsitektur Infrastruktur SPBE, Target Arsitektur Infrastruktur SBPE dan Analisis Gap Arsitektur Infrastruktur SPBE.
- h. Bab VIII **Arsitektur Keamanan SPBE**, menguraikan tentang Pemetaan Arsitektur Keamanan SPBE, Analisis Kesenjangan Arsitektur Keamanan SPBE dan kondisi yang diinginkan Arsitektur Keamanan SPBE.
- i. Bab IX **Penutup**, berisi kesimpulan dan saran

BAB II METODOLOGI DAN REFERENSI ARSITEKTUR

Metodologi dan Referensi Arsitektur meliputi metodologi penyusunan Arsitektur Proses Bisnis SPBE, Arsitektur Layanan SPBE, Arsitektur Layanan SPBE, Arsitektur Data dan Informasi SPBE, Arsitektur Infrastruktur SPBE, dan Arsitektur Keamanan SPBE, secara rinci dijelaskan di bawah ini.

2.1 Metodologi Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis SPBE

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang metode penyusunan Arsitektur Proses Bisnis SPBE terdapat 4 tahapan meliputi: Struktur dan Referensi Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Proses Bisnis Eksisting, Arsitektur Proses Bisnis Target, Analisis Gap dan Usulan Arsitektur Proses Bisnis SPBE.

2.2 Metodologi Penyusunan Arsitektur Layanan SPBE

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang metode penyusunan Arsitektur Layanan SPBE terdapat 4 tahapan meliputi Inisiatif Strategis Layanan SPBE, Usulan Layanan SPBE, Detail Usulan Layanan SPBE.

2.3 Metodologi Penyusunan Arsitektur Data dan Informasi SPBE

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang metode penyusunan Arsitektur Data dan Informasi SPBE terdapat 3 tahapan meliputi: Arsitektur Data dan Informasi Saat Ini, Arsitektur Data dan Informasi Target, dan Analisis Gap.

2.4 Metodologi Penyusunan Arsitektur Aplikasi SPBE

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang metode penyusunan Arsitektur Aplikasi SPBE terdapat 4 tahapan meliputi: Pendahuluan, Arsitektur Aplikasi SPBE Saat Ini, Arsitektur Aplikasi SPBE Target, dan Analisis Gap Arsitektur Aplikasi SPBE

2.5 Metodologi Penyusunan Arsitektur Infrastruktur SPBE

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang metode penyusunan Arsitektur Infrastruktur SPBE terdapat 5 tahapan meliputi: Identifikasi Arsitektur Infrastruktur SPBE, Kapabilitas Infrastruktur SPBE, Model Arsitektur Infrastruktur SPBE, Arsitektur Infrastruktur SPBE Target, Analisis Gap Arsitektur Infrastruktur SPBE.

2.6 Metodologi Penyusunan Arsitektur Keamanan SPBE

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang metode penyusunan Arsitektur Keamanan SPBE terdapat 3 tahapan meliputi: Pemetaan Arsitektur Keamanan SPBE, Analisis Kesenjangan Arsitektur Keamanan SPBE, Arsitektur Keamanan SPBE Target.

BAB III ARSITEKTUR PROSES BISNIS SPBE

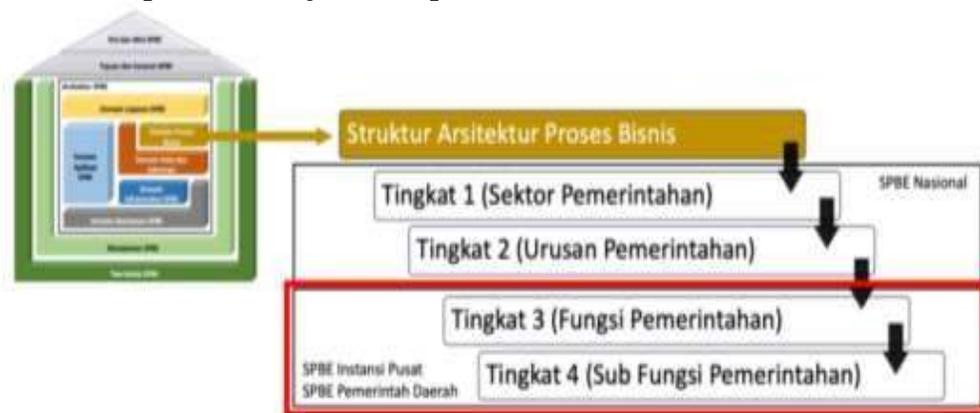
3.1 Struktur dan Referensi Arsitektur Proses Bisnis SPBE

Struktur dan Referensi Arsitektur Proses Bisnis menguraikan Identifikasi Arsitektur Proses bisnis, Referensi Arsitektur Proses bisnis, Keterkaitan Antar Domain, Metadata Proses Bisnis dan Pengodean Proses Bisnis.

3.1.1 Prinsip Arsitektur Proses Bisnis SPBE

Berdasarkan hasil identifikasi referensi arsitektur proses bisnis pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional. Hal ini dikuatkan dengan penjelasan Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB), bahwa RAB digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau tipe dari sebuah bisnis/urusan/fungsi/ proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian RAB ini harus mencakup seluruh aktivitas yang mungkin akan dilakukan. Referensi Arsitektur Proses Bisnis ini disusun dengan menjabarkan fungsi bisnis dari fungsi-fungsi pemerintah berdasarkan standar penamaan bisnis yang umum. Referensi Arsitektur Proses Bisnis dikelompokkan berdasarkan fungsi bisnis, mulai dari fungsi bisnis dari setiap kementerian dan lembaga untuk menggambarkan potensi kolaborasi antar IPPD serta untuk pengintegrasian secara terpadu di setiap elemen-elemen pemerintahan dalam menjalankan fungsi-fungsi yang diemban.

Arsitektur proses bisnis Pemerintah Kabupaten Way Kanan menggambarkan proses bisnis dan tugas utama dari Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan acuan Utama RPJMD No. 02 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2021-2026. Arsitektur proses bisnis juga disusun dengan mengacu pada rancangan Peraturan Presiden tahun 2021 tentang Arsitektur SPBE Nasional, seperti ditunjukkan pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2 Struktur Arsitektur Proses Bisnis

Penyusunan arsitektur proses bisnis ini mengacu pada proses bisnis di tingkat nasional dengan tujuan untuk membentuk layanan SPBE. Seperti ditunjukkan pada Gambar diatas, arsitektur proses bisnis berfokus pada Tingkat 3 (Fungsi Pemerintahan) dan Tingkat 4 (Sub Fungsi Pemerintahan). Fungsi Pemerintahan menjelaskan lebih rinci arsitektur proses bisnis Tingkat 2 (Urusan Pemerintahan) dengan tetap mengacu pada arsitektur Tingkat 1 dan Tingkat 2. Arsitektur proses bisnis Tingkat 3 disusun untuk mengatur fungsi pemerintahan dan dijelaskan lebih rinci pada arsitektur proses bisnis Tingkat 4 (Sub Fungsi Pemerintahan). Arsitektur ini disusun sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang

dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

3.1.2 Referensi Proses Bisnis Tingkat Nasional

Di bidang pemerintahan umum, target Arsitektur SPBE adalah untuk mewujudkan layanan digital pemerintah terintegrasi. Transformasi proses bisnis pada sektor pemerintah diperlukan untuk mewujudkan sistem pemerintahan internal (G2E dan G2G) yang menerapkan konsep *digital working collaboration* serta *smart city* pada *smart government*, yang merupakan arah kebijakan nasional hingga tahun 2024.

3.1.3 Keterkaitan Antar Domain

Arsitektur proses bisnis berinteraksi dengan domain layanan SPBE serta domain data dan informasi. Domain arsitektur proses bisnis mencakup berbagai macam proses bisnis yang akan menghasilkan data dan informasi, serta akan mendefinisikan layanan pemerintah. Domain proses bisnis berelasi langsung dengan domain data dan informasi, untuk menggambarkan data dan informasi apa yang diperlukan atau dihasilkan dalam proses bisnis yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Domain proses bisnis juga harus dapat mengidentifikasi layanan yang dihasilkan dalam urusan pemerintahan yang dilaksanakan dalam fungsi pemerintahan Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Keterkaitan antara domain proses bisnis, data dan informasi, serta layanan ditunjukkan pada Gambar di bawah ini.



Gambar 3 Interaksi domain proses bisnis dengan domain layanan serta domain data dan informasi

Arsitektur proses bisnis disusun berdasarkan tujuan pembangunan nasional, transformasi digital, penyediaan layanan pemerintahan internal, *digital working collaboration*, dan *smart city*. Identifikasi proses bisnis di bidang pemerintahan umum ditujukan untuk mendukung terbentuknya layanan SPBE di bidang layanan administrasi pemerintahan, serta sebagai acuan untuk mengidentifikasi data dan informasi berupa data pokok dan data tematik yang dibutuhkan dan dihasilkan oleh dihasilkan oleh fungsi-fungsi pemerintahan.

3.1.4 Metadata proses Bisnis

Struktur arsitektur proses bisnis berfokus pada SPBE Instansi Pusat dan SPBE Pemerintah Daerah, namun disusun dengan tetap berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional, sesuai dengan Perpres SPBE pasal 11 dan 12. Untuk menjamin struktur dan format baku untuk mengidentifikasi proses bisnis, telah disusun metadata proses bisnis dalam Perpres SPBE. Penggunaan metadata ini juga ditujukan untuk memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan proses

bisnis, serta untuk mendukung kebijakan tata kelola data pemerintah dalam Satu Data Indonesia. Dalam pengumpulan data tentang proses bisnis yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, atribut-atribut metadata yang diterapkan ditunjukkan pada Tabel .

Tabel 1 Atribut Metadata Arsitektur Proses Bisnis

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Bisnis/Urusan	Merupakan urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/ perangkat daerah.
3	Uraian Bisnis/Urusan	Merupakan uraian dari urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/perangkat daerah.
4	Kode Model Referensi	Merupakan kode model referensi SPBE yang sesuai dengan nama bisnis/urusan yang dipilih
5	ID Metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait

3.2 Arsitektur Proses Bisnis SPBE Eksisting

3.2.1 Identifikasi Stakeholder Utama

Berdasarkan visi, misi, dan sasaran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, dilakukan pula identifikasi mitra kerja yang merupakan stakeholders beserta keterlibatan dan aktivitas yang dilakukan dalam kaitannya dengan proses bisnis dalam Pemerintah Kabupaten Way Kanan, yang terdiri atas stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder internal Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat diidentifikasi dari struktur organisasi yang tercantum dalam kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026, Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, dan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: 060/63 /I.11-Wk/Hk/2022 Tentang Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Way Kanan., tata kerja, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah kabupaten Way Kanan, yang terdiri atas enam (6) Unit Perangkat Daerah, yang terdiri atas: (1) Sekretariat Daerah, (2) Sekretariat DRD, (3) Inspektorat, (4) Dinas, (5) Badan, dan (6) Kecamatan. Pada domain Arsitektur Proses Bisnis Kabupaten Way Kanan, pada saat ini menyesuaikan kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026, Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, dan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor: 060/63 /I.11-Wk/Hk/2022 Tentang Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Way Kanan, tata kerja, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah kabupaten Way Kanan. Hasil identifikasi urusan pemerintahan pada Kabupaten Way Kanan

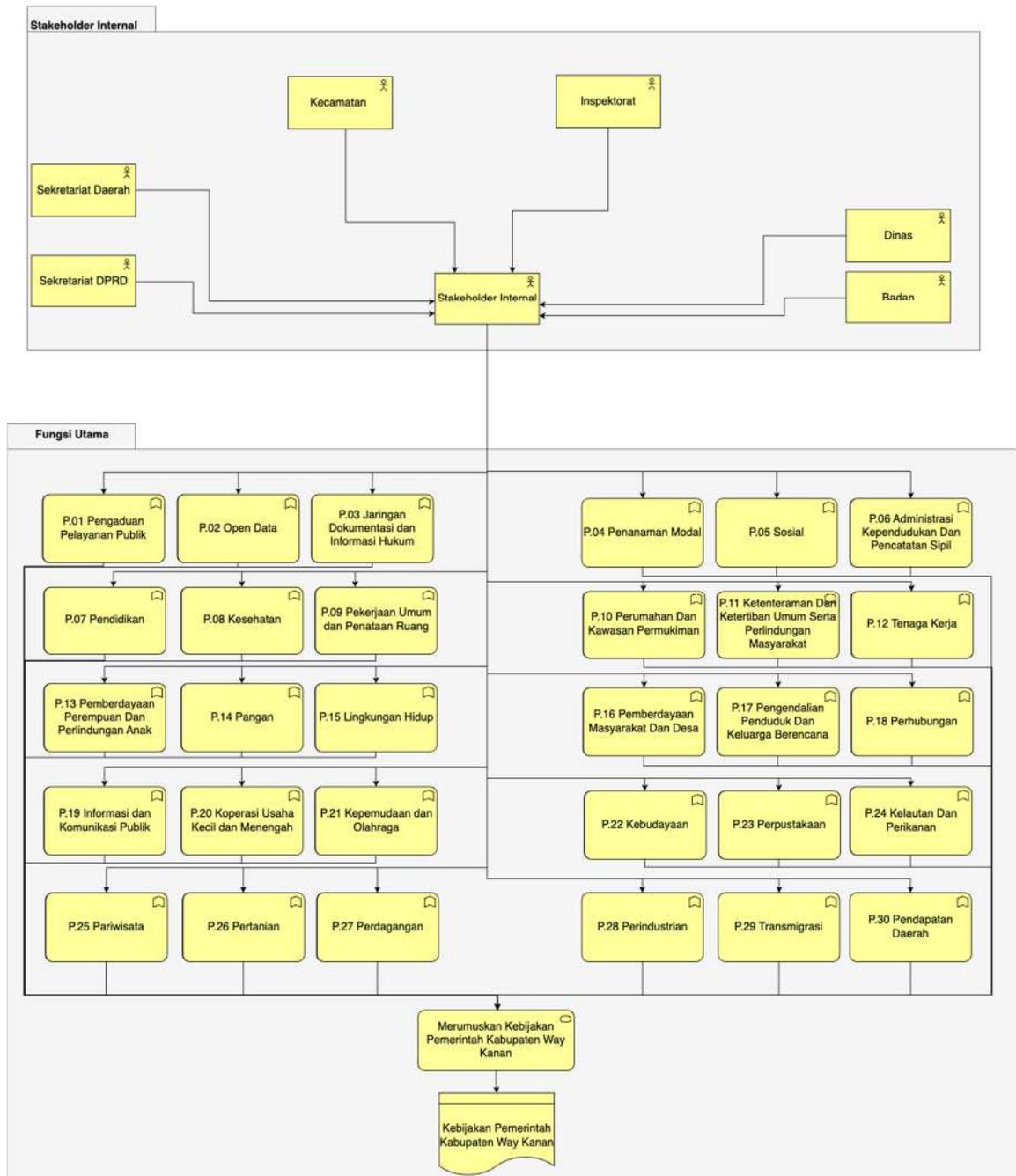
diperoleh hasil 7 (Tujuh) jumlah kelompok urusan dan 34 (tiga puluh empat) nama urusan yang ada. Data tersebut diperoleh dari hasil analisis urusan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Tabel 2 Hasil identifikasi Urusan Pemerintah

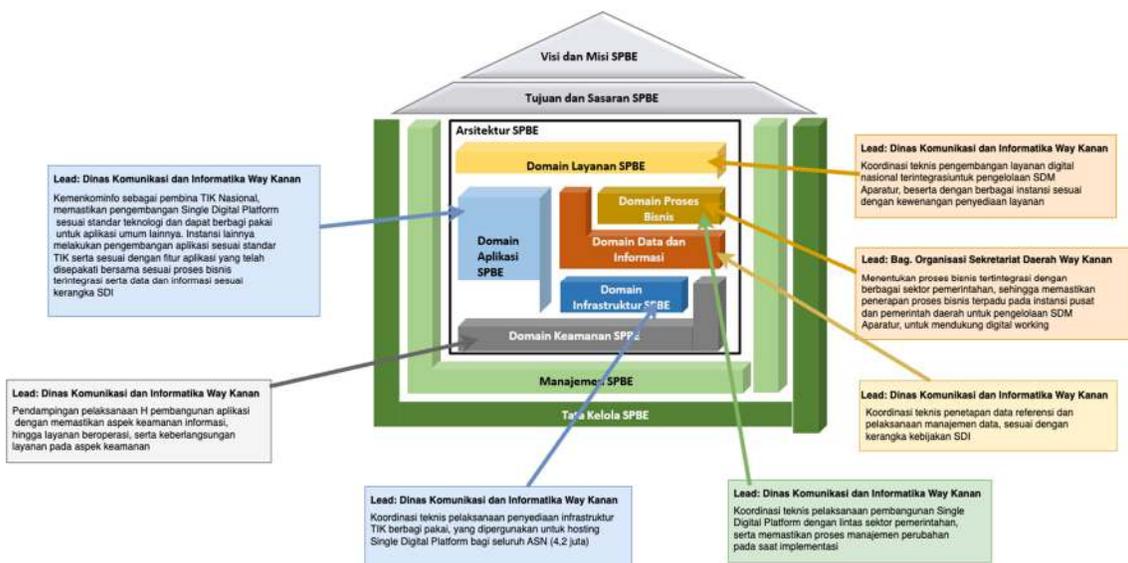
Kelompok Urusan	Nama Urusan	Nama OPD	Kode Referensi	Referensi Arsitektur	
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RB.06.01	Pendidikan	
	Kesehatan	Dinas Kesehatan	RB.04.01	Kesehatan	
	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RB.03.01	Pekerjaan umum	
	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	RB.03.04	Perumahan	
	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	RB.05.02	Keamanan
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RB.04.02	Sosial
		Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	RB.05.02	Kemanan
			Dinas Sosial	RB.04.02	Sosial
Urusan wajib pelayanan non dasar	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	RB.06.02	Ketenagakerjaan	
	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	RB.04.03	Pemberdayaan Perempuan	
	Bidang Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	RB.02.03	Pertanian	
	Pertanahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	RB.03.06	Pertanahan	
	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	RB.07.05	Lingkungan Hidup	
	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	RB.03.07	Kependudukan	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	RB.03.05	Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	RB.03.07	Kependudukan	
	Perhubungan	Dinas Perhubungan	RB.03.03	Transportasi	
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		RB.06.03	Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
				RB.09.03	Informasi
			RB.09.04	Komunikasi	

	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	RB.02.09	Koperasi
	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RB.02.08	Investasi
	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	RB.06.04	Pemuda
			RB.06.05	Olahraga
	Statistik	Dinas Komunikasi Dan Informatika	RB.09.03	Informasi
	Persandian	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RB.08.02	Kebudayaan
	Kebudayaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	RB.08.02	Kebudayaan
	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RB.08.02	Kebudayaan
	Kearsipan			
Urusan Pelayanan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	RB.02.06	Perikanan
	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	RB.02.11	Pariwisata
	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	RB.02.03	Pertanian
			RB.02.02	Perdagangan
	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	RB.02.01	Industri
	Perindustrian			
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RB.09.01	Dalam Negeri
	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	RB.09.02	Keuangan
	kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Diklat	RB.09.06	Aparatur Negara
	Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan Pengembangan	RB.06.03	Badan Penelitian dan Pengembangan
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Inspektorat Daerah	Inspektorat	RB.09.06	Inspektorat
Unsur Kewilayahan	Kecamatan	Kecamatan	RB.09.06	Kecamatan
Unsur Pemerintahan Umum	Satuan bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	RB.09.07	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sedangkan Stakeholder eksternal Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat diidentifikasi berdasarkan dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang disusun oleh Bagian Organisasi. Dalam dokumen tersebut terdapat penjelasan tentang identifikasi stakeholder eksternal Pemerintah Kabupaten Way Kanan, seperti ditunjukkan pada Gambar dibawah ini.



Gambar 4 Peta Proses Bisnis Level 0



Gambar 5 Sumber Identifikasi stakeholder eksternal Pemerintah Kabupaten Way Kanan

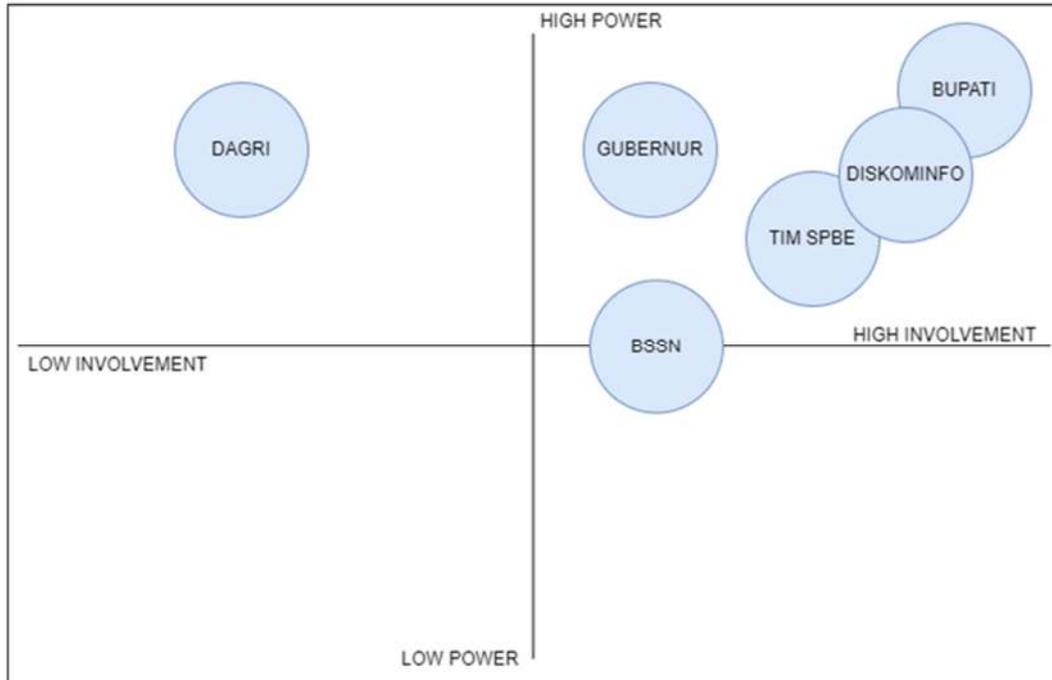
Berdasarkan kedua referensi di atas, dapat diidentifikasi para stakeholders dari internal maupun eksternal yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, yaitu sejumlah 6 stakeholders. Para stakeholders tersebut diberi kode dan diidentifikasi kekuatan pengaruh, keterlibatan, dan dampaknya masing-masing pada proses bisnis Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Hasil Identifikasi ditunjukkan pada table dibawah ini.

Tabel 3 Pemetaan peran dalam Penyusunan EA Pemerintah Kabupaten Way Kanan

Stakeholders	Kode	Power	Involvement	Impact
Menteri Dalam Negeri	Dagri	VH	VL	VH
Kepala BSSN	BSSN	M	H	VH
Gubernur	Gubernur	VH	H	VH
Bupati/Walikota	Walikota	VH	VH	VH
Dinas Kominfo Way Kanan	Kominfo	VH	VH	VH
Tim Koordinasi SPBE Way Kanan	SPBE	H	VH	VH

*VH: Very High, H: High, M: Medium, L: Low, VL: Very Low

Selanjutnya, hasil identifikasi pada Tabel diatas dapat dipetakan dalam stakeholder power map, yang menunjukkan pemetaan para stakeholders utama berdasarkan kekuatan dan keterlibatannya. Gambar dibawah ini menunjukkan stakeholder power map Kabupaten Way Kanan.



Gambar 6 Stakeholder Power Map

3.2.2 Pemetaan Struktur Organisasi ke Proses Bisnis dan SOP

Pada kondisi eksisting arsitektur proses bisnis Pemerintah Kabupaten Way Kanan, diperlukan pemetaan struktur organisasi ke proses bisnis. Pemetaan tersebut berperan penting untuk memastikan keterlibatan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam mendukung pelaksanaan proses bisnis untuk mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Pemetaan struktur organisasi ke proses bisnis dan SOP tersebut dilakukan berdasarkan dokumen Rekapitulasi SOP Utama.

Tabel 4 Ringkasan pemetaan proses bisnis dan SOP berdasarkan unit kerja

Unit	Kode	Proses Bisnis Terkait	Jumlah SOP
Bagian Hukum Sekretariat Daerah	A1	P.01; P.03	0
Dinas Komunikasi dan Informatika	B1	P.02;P.19;AP.13;AP.14	0
Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	C1	C1	0
Dinas Sosial	D1	P.05	0
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	E1	P.06	0
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	F1	P.07;P.22	0
RSUD Zainal Abidin Pagar Alam	G1	P.08	0
Dinas Kesehatan	H1	P.07;P08	0
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	I1	P.09	0
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	J1	P.10	0
Satuan Polisi Pamong Praja	K1	P.11	0
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	L1	P.11	0
Pemadam Kebakaran	M1	P.11	0
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	N1	P.12;P.29	0
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	O1	P.13;P.17	0
Dinas Ketahanan Pangan	P1	P.14	0
Dinas Lingkungan Hidup	Q1	P.15	0
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	R1	P.16	0
Dinas Perhubungan	S1	P.18	0
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	T1	P.20	0
Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	U1	P.21;P.25	0
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	V1	P.23;AP.06	0
Dinas Perikanan	W1	P.24	0
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	X1	P.26	0
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Y1	P.27	0
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Z1	P.30	0
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A2	AP.01	0
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	B2	AP.02;AP.03	0

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	C2	AP.04	0
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	D2	AP.05	0
Inspektorat	E2	AP.08	0
Badan Kesatuan bangsa dan politik	F2	AP.12	0
Sekretariat Daerah	G2	AP.15	0
Sekretariat DPRD	H2	AP.16	0
Total			0

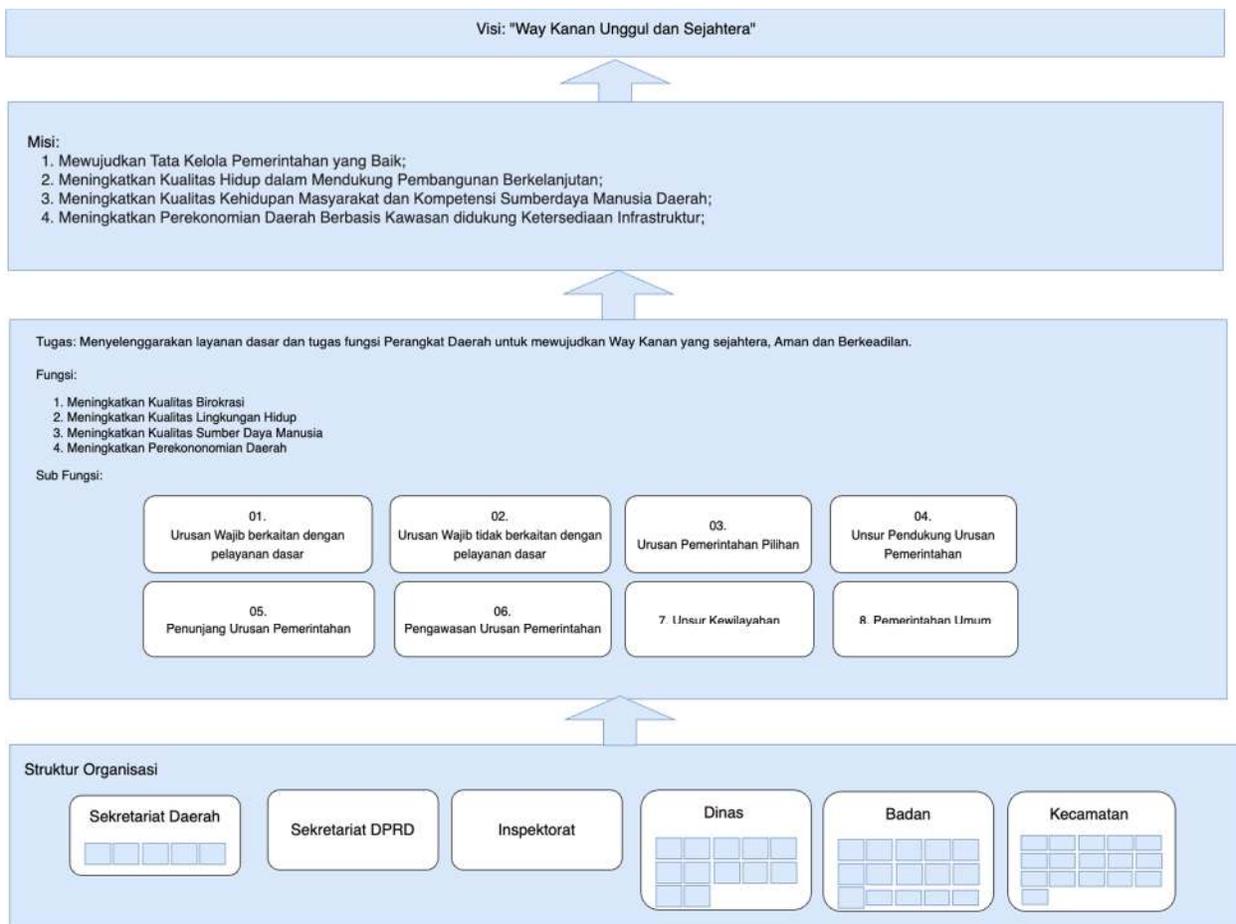
Tabel diatas menunjukkan ringkasan hasil pemetaan proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan perangkat daerah. Secara umum, masing-masing perangkat daerah masih belum memiliki SOP yang dibakukan dalam bentuk Surat Keterangan. Belum adanya SOP yang terdefinisi maupun tercatat sebagai dokumen yang sah dan legal sehingga di lingkungan perangkat daerah pemerintah daerah Way Kanan belum memiliki SOP.

3.3 Arsitektur Proses Bisnis SPBE Target

Arsitektur Proses Bisnis Target terdiri dari Pemetaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Pemetaan Tujuan Organisasi ke *value stream map*, Kerangka Arsitektur Proses Bisnis Target, Metadata Arsitektur Proses Bisnis SPBE Kabupaten Way Kanan dan Identifikasi serta Deskripsi Proses Bisnis Pemerintah Daerah Way Kanan

3.3.1 Pemetaan Visi, Misi dan Sasaran Pemerintah Daerah Way Kanan

Pemetaan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pemerintah Kabupaten Way Kanan ke *value stream map* dilakukan dengan mengacu pada kerangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran reformasi birokrasi (Gambar dibawah ini) dan diskusi dengan tim di Kabupaten Way Kanan.

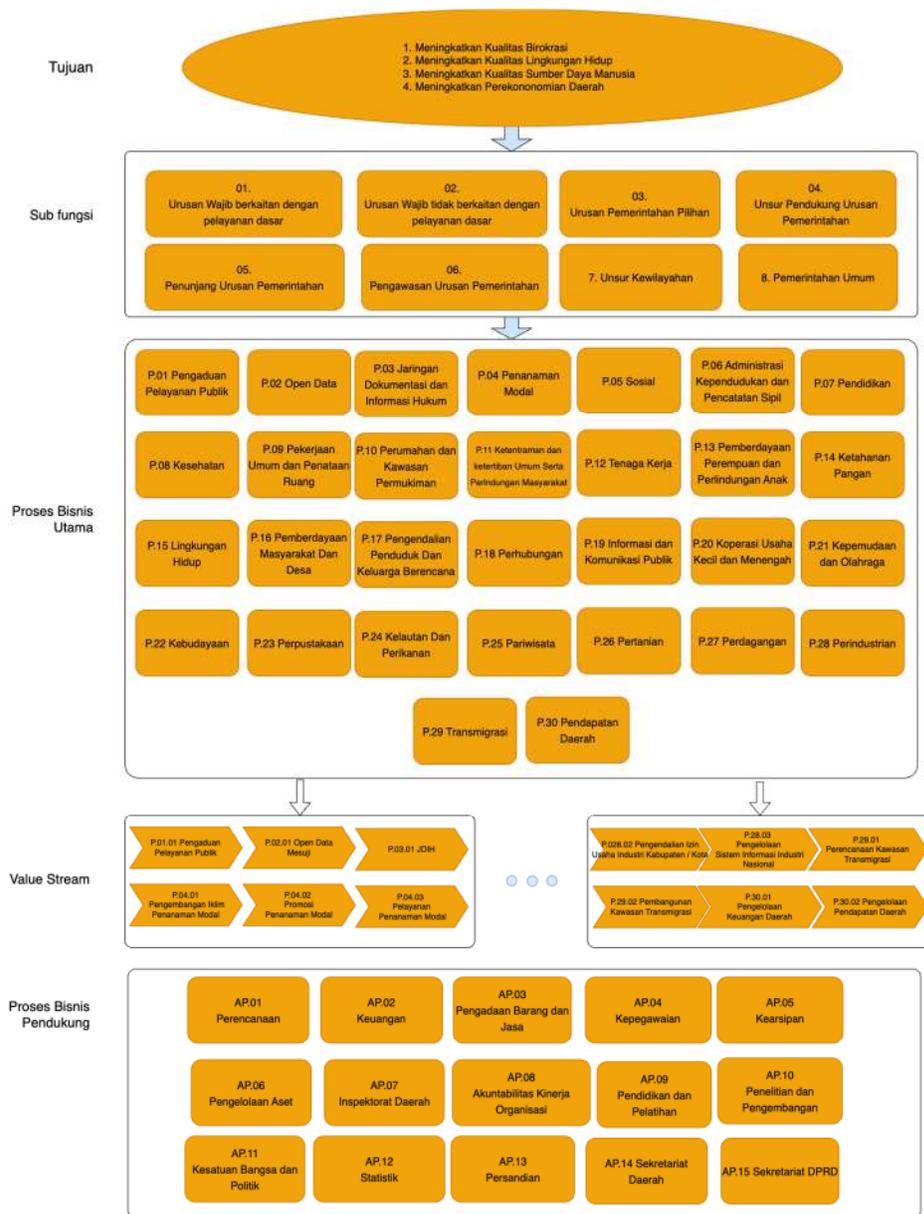


Gambar 7 Kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran

Gambar diatas menunjukkan kerangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Way Kanan. Visi, misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Way Kanan didukung oleh tugas pokok dan fungsi Kabupaten Way Kanan untuk menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Setiap fungsi diturunkan ke dalam beberapa sub fungsi yang mendetailkan fungsi dalam Kabupaten Way Kanan. Pelaksanaan tugas tersebut diturunkan dalam fungsi dan sub fungsi kelembagaan, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas kinerja, pengawasan, pelayanan publik, dan reformasi birokrasi. Dalam struktur organisasi, proses bisnis dilaksanakan oleh Kabupaten Way Kanan dalam empat deputy, empat biro kesekretariatan, dan satu inspektorat.

3.3.2 Pemetaan Tujuan Organisasi ke *value stream map*

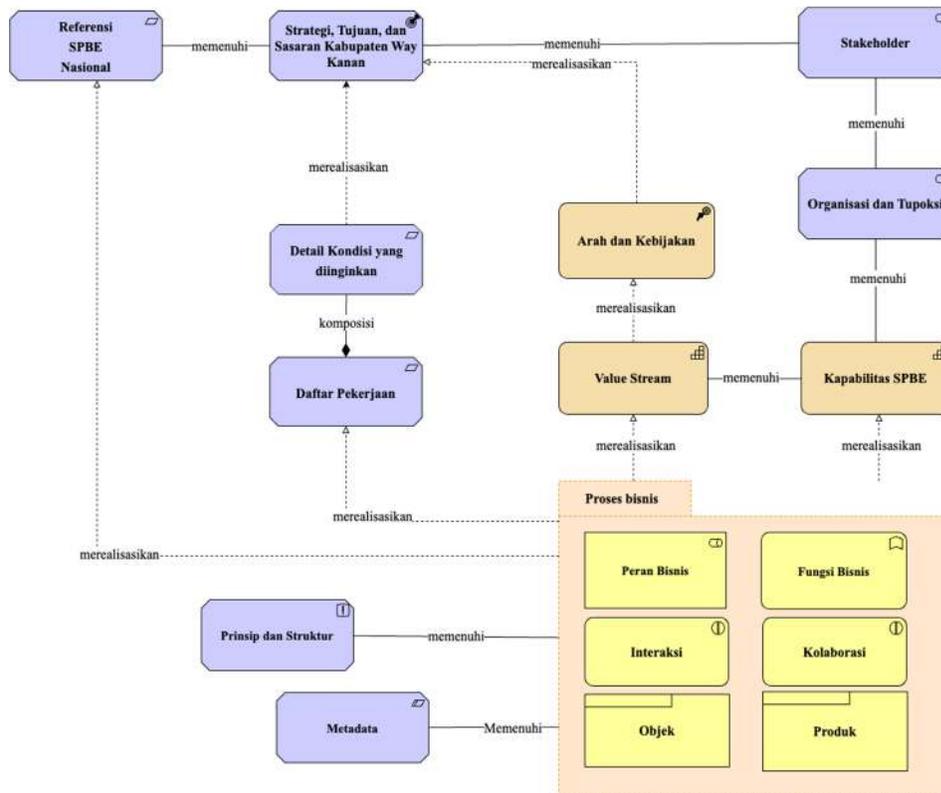
Berdasarkan kerangka tersebut, disusun *value stream map* yang memetakan tujuan Kabupaten Way Kanan ke dalam *values* (sub fungsi) dan *value streams* berupa aliran proses bisnis utama, yang selanjutnya didukung oleh proses bisnis pendukung. Pemetaan tersebut ditunjukkan pada Gambar dibawah ini.



Gambar 8 Pemetaan tujuan organisasi ke dalam value streams yang tersusun dari proses bisnis utama

Gambar diatas menunjukkan keterkaitan antara tujuan yang sudah selaras dengan visi dan misi Kabupaten Way Kanan dan diturunkan ke dalam tugas pokok dan fungsi serta tujuh sub fungsi pemerintahan. Sub fungsi tersebut dilaksanakan dalam tiga puluh dua proses bisnis utama dan enam belas proses bisnis pendukung. Tiga puluh dua proses bisnis utama dapat digambarkan dalam bentuk *value streams* yang mengolah data dan informasi dari masing-masing sub fungsi untuk menghasilkan layanan sebagai keluaran dari proses-proses bisnis tersebut. Misalnya, *value streams* Administrasi Kependudukan (04) meliputi Program Pendaftaran Penduduk, Program pencatatan Sipil dan program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Way Kanan. Selain itu, pelaksanaan setiap tahap dalam *value stream* didukung oleh proses bisnis pendukung berupa Perencanaan, Anggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kepegawaian, Kearsipan, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengawasan Internal, Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Kinerja Pegawai, Penelitian dan Pengembangan, Komunikasi dan Informatika, Statistik Sektoral, Persandian, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

3.3.3 Kerangka Arsitektur Proses Bisnis Target



Gambar 9 Kerangka arsitektur proses bisnis target

Kerangka arsitektur proses bisnis target pada Gambar diatas menunjukkan bahwa Referensi SPBE nasional menjadi acuan utama yang selaras dengan strategi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Way Kanan, yang selanjutnya diturunkan ke dalam arah dan kebijakan, dan diturunkan dalam *value streams*. Selain itu, strategi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Way Kanan juga menjadi acuan dalam penetapan stakeholders, organisasi, dan tupoksi serta kapabilitas SPBE di Kabupaten Way Kanan. Arsitektur proses bisnis meliputi pemetaan peran bisnis, fungsi bisnis, interaksi, kolaborasi, objek dan produk yang berkaitan dengan *value streams*, kapabilitas, serta tetap mengacu pada referensi SPBE nasional, prinsip dan struktur, serta metadata proses bisnis. Kapabilitas SPBE juga harus dapat menggambarkan keselarasan antara *people* (peran dan struktur organisasi), *process* (proses bisnis yang baik sesuai panduan dan pencapaian sasaran organisasi), serta *Technology* (aplikasi dan infrastruktur pendukung).

3.3.4 Metadata Arsitektur Proses Bisnis

Daftar proses bisnis dan metadatanya ditunjukkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 5 Metadata Proses Bisnis Utama

ID Metadata	ID Probis (Lvl 0)	ID Probis	Nama Proses Bisnis	ID Perangkat daerah	Nama Perangkat daerah	Uraian Perangkat daerah
P.01.01.A1	P.01	P.01.01	Pengaduan Pelayanan Publik	A1	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
P.02.01.B1	P.02	P.02.01	Data Terbuka	B1	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
P.03.01.A1	P.03	P.03.01	Jaringan	A1	Bagian Hukum	Bagian Hukum

		1	Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)		Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
P.04.01.C1	P.04	P.04.01	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	C1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
P.04.02.C1	P.04	P.04.02	Program Promosi Penanaman Modal	C1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
P.04.03.C1	P.04	P.04.03	Program Pelayanan Penanaman Modal	C1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
P.04.04.C1	P.04	P.04.04	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	C1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
P.04.05.C1	P.04	P.04.05	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	C1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
P.05.01.D1	P.05	P.05.01	Program Pemberdayaan Sosial	D1	Dinas Sosial	Dinas Sosial
P.05.02.D1	P.05	P.05.02	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	D1	Dinas Sosial	Dinas Sosial
P.05.03.D1	P.05	P.05.03	Program Rehabilitasi Sosial	D1	Dinas Sosial	Dinas Sosial
P.05.04.D1	P.05	P.05.04	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	D1	Dinas Sosial	Dinas Sosial
P.05.05.D1	P.05	P.05.05	Program Pengelolaan Taman Makam	D1	Dinas Sosial	Dinas Sosial
P.05.06.D1	P.05	P.05.06	Program Penanganan Bencana	D1	Dinas Sosial	Dinas Sosial
P.06.01.E1	P.06	P.06.01	Program Pendaftaran Penduduk	E1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
P.06.02.E1	P.06	P.06.02	Program Pencatatan Sipil	E1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
P.06.03.E1	P.06	P.06.03	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	E1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
P.06.04.E1	P.06	P.06.04	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	E1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
P.07.01.F1	P.07	P.07.01	Pengelolaan Pendidikan	F1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
P.07.02.F1	P.07	P.07.02	Pengembangan Kurikulum	F1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

P.07.03.F1	P.07	P.07.03	Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	F1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
P.07.04.F1	P.07	P.07.04	Pengembangan Bahasa Dan Sastra	F1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
P.08.01.G1;H1	P.08	P.08.01	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	G1;H1	Dinas Kesehatan;RSUD Zainal Abidin Pagar Alam	Dinas Kesehatan;RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
P.08.02.G1;H1	P.08	P.08.02	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	G1;H1	Dinas Kesehatan;RSUD Zainal Abidin Pagar Alam	Dinas Kesehatan;RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
P.08.03.H1	P.08	P.08.03	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	H1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
P.08.04.H1	P.08	P.08.04	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	H1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
P.09.01.I1	P.09	P.09.01	Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	I1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
P.09.02.I1	P.09	P.09.02	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	I1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
P.09.03.I1	P.09	P.09.03	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	I1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
P.09.04.I1	P.09	P.09.04	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	I1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
P.09.05.I1	P.09	P.09.05	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	I1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
P.09.06.I1	P.09	P.09.06	Penataan Bangunan Gedung	I1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
P.09.07.I1	P.09	P.09.07	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	I1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
P.09.08.I1	P.09	P.09.08	Penyelenggaraan Jalan	I1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
P.09.09.I1	P.09	P.09.09	Pengembangan Jasa Konstruksi	I1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
P.09.10.I1	P.09	P.09.10	Penyelenggaraan Penataan Ruang	I1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
P.10.01.J1	P.10	P.10.01	Pengembangan Perumahan	J1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
P.10.02.J1	P.10	P.10.02	Kawasan Permukiman	J1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
P.10.03.J1	P.10	P.10.03	Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	J1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

P.10.04.J1	P.10	P.10.0 4	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	J1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
P.10.05.J1	P.10	P.10.0 5	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	J1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
P.10.06.J1	P.10	P.10.0 6	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	J1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
P.10.07.J1	P.10	P.10.0 7	Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	J1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
P.10.08.J1	P.10	P.10.0 8	Penetapan Tanah Ulayat	J1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
P.10.09.J1	P.10	P.10.0 9	Pengelolaan Tanah Kosong	J1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
P.10.10.J1	P.10	P.10.1 0	Pengelolaan Izin Membuka Tanah	J1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
P.10.11.J1	P.10	P.10.1 1	Penatagunaan tanah	J1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
P.11.01.K1	P.11	P.11.0 1	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	K1	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
P.11.02.L1	P.11	P.11.0 2	Penanggulangan Bencana	L1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana
P.11.03.M1	P.11	P.11.0 3	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	M1	Pemadam Kebakaran	Pemadam Kebakaran
P.12.01.N1	P.12	P.12.0 1	Perencanaan Tenaga Kerja	N1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
P.12.02.N1	P.12	P.12.0 2	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	N1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
P.12.03.N1	P.12	P.12.0 3	Penempatan Tenaga Kerja	N1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
P.12.04.N1	P.12	P.12.0 4	Hubungan Industrial	N1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
P.13.01.O1	P.13	P.13.0 1	Pengarusatamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	O1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

					Keluarga Berencana	
P.13.02.O1	P.13	P.13.02	Perlindungan Perempuan	O1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
P.13.03.O1	P.13	P.13.03	Peningkatan Kualitas Keluarga	O1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
P.13.04.O1	P.13	P.13.04	Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	O1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
P.13.05.O1	P.13	P.13.05	Pemenuhan Hak Anak(PHA)	O1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
P.13.06.O1	P.13	P.13.06	Perlindungan Khusus Anak	O1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
P.14.01.P1	P.14	P.14.01	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	P1	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
P.14.02.P1	P.14	P.14.02	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	P1	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
P.14.03.P1	P.14	P.14.03	Penanganan Kerawanan Pangan	P1	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
P.14.04.P1	P.14	P.14.04	Pengawasan	P1	Dinas Ketahanan	Dinas Ketahanan

		4	Keamanan Pangan		Pangan	Pangan
P.15.01.Q1	P.15	P.15.0 1	Perencanaan Lingkungan Hidup	Q1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
P.15.02.Q1	P.15	P.15.0 2	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Q1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
P.15.03.Q1	P.15	P.15.0 3	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Q1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
P.15.04.Q1	P.15	P.15.0 4	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Q1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
P.15.05.Q1	P.15	P.15.0 5	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Q1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
P.15.06.Q1	P.15	P.15.0 6	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Q1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
P.15.07.Q1	P.15	P.15.0 7	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Q1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
P.15.08.Q1	P.15	P.15.0 8	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Q1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
P.15.09.Q1	P.15	P.15.0 9	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Q1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
P.15.10.Q1	P.15	P.15.1 0	Pengelolaan Persampahan	Q1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
P.16.01.R1	P.16	P.16.0 1	Penataan Desa	R1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
P.16.02.R1	P.16	P.16.0 2	Peningkatan Kerja Sama Desa	R1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
P.16.03.R1	P.16	P.16.0 3	Administrasi Pemerintahan Desa	R1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
P.16.04.R1	P.16	P.16.0 4	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat Dan	R1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

			Masyarakat Hukum Adat			
P.17.01.O1	P.17	P.17.01	Pengendalian Penduduk	O1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
P.17.02.O1	P.17	P.17.02	Pembinaan Keluarga Berencana(Kb)	O1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
P.17.03.O1	P.17	P.17.03	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera(KS)	O1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
P.18.01.S1	P.18	P.18.01	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (ILAJ)	S1	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
P.19.01.B1	P.19	P.19.01	Informasi Dan Komunikasi Publik	B1	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
P.19.02.B1	P.19	P.19.02	Aplikasi Informatika	B1	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
P.20.01.T1	P.20	P.20.01	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	T1	Dinas Koperasi Umkm Perindustrian Dan Perdagangan	Dinas Koperasi Umkm Perindustrian Dan Perdagangan
P.20.02.T1	P.20	P.20.02	Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	T1	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
P.20.03.T1	P.20	P.20.03	Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	T1	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
P.20.04.T1	P.20	P.20.04	Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	T1	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
P.20.05.T1	P.20	P.20.05	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	T1	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
P.20.06.T1	P.20	P.20.06	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	T1	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
P.20.07.T1	P.20	P.20.07	Pengembangan Umkm	T1	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

P.21.01.U1	P.21	P.21.0 1	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	U1	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
P.21.02.U1	P.21	P.21.0 2	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	U1	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
P.21.03.U1	P.21	P.21.0 3	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	U1	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
P.22.01.F1	P.22	P.22.0 1	Program Pengembangan Kebudayaan	F1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
P.22.02.F1	P.22	P.22.0 2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	F1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
P.22.03.F1	P.22	P.22.0 3	Program Pembinaan Sejarah	F1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
P.22.04.F1	P.22	P.22.0 4	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	F1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
P.22.05.F1	P.22	P.22.0 5	Pengelolaan Permuseuman	F1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
P.23.01.V1	P.23	P.23.0 1	Program Pembinaan Perpustakaan	V1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
P.23.02.V1	P.23	P.23.0 2	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	V1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
P.24.01.W1	P.24	P.24.0 1	Pengelolaan Perikanan Tangkap	W1	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
P.24.02.W1	P.24	P.24.0 2	Pengelolaan Perikanan Budidaya	W1	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
P.24.03.W1	P.24	P.24.0 3	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	W1	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
P.24.04.W1	P.24	P.24.0 4	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	W1	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
P.25.01.U1	P.25	P.25.0 1	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	U1	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
P.25.02.U1	P.25	P.25.0 2	Pemasaran Pariwisata	U1	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
P.25.03.U1	P.25	P.25.0 3	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	U1	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
P.25.04.U1	P.25	P.25.0 4	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	U1	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
P.26.01.X1	P.26	P.26.0 1	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	X1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan

P.26.02.X1	P.26	P.26.0 2	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	X1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
P.26.03.X1	P.26	P.26.0 3	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	X1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
P.26.04.X1	P.26	P.26.0 4	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	X1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan
P.26.05.X1	P.26	P.26.0 5	Perizinan Usaha Pertanian	X1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
P.26.06.X1	P.26	P.26.0 6	Penyuluhan Pertanian	X1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan
P.27.01.Y1	P.27	P.27.0 1	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Y1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
P.27.02.Y1	P.27	P.27.0 2	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Y1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
P.27.03.Y1	P.27	P.27.0 3	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Y1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
P.27.04.Y1	P.27	P.27.0 4	Pengembangan Ekspor	Y1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
P.27.05.Y1	P.27	P.27.0 5	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Y1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
P.27.06.Y1	P.27	P.27.0 6	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Y1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
P.28.01.Y1	P.28	P.28.0 1	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Y1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
P.28.02.Y1	P.28	P.28.0 2	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Y1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
P.28.03.Y1	P.28	P.28.0 3	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Y1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
P.29.01.N1	P.29	P.29.0 1	Perencanaan kawasan Transmigrasi	N1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
P.29.02.N1	P.29	P.29.0 2	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	N1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
P.30.01.Z1	P.30	P.30.0 1	Pengelolaan Keuangan Daerah	Z1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah

P.30.02.Z1	P.30	P.30.02	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Z1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
------------	------	---------	-------------------------------	----	-----------------------------------	-----------------------------------

Setelah Metadata Proses Bisnis Utama, berikutnya adalah proses bisnis pendukung yang dijabarkan pada table dibawah ini:

Tabel 6 Metadata Proses Bisnis Pendukung

ID Metadata	ID Probis (Lvl 0)	ID Probis	Nama Proses Bisnis	ID Perangkat daerah	Nama Perangkat daerah	Uraian Perangkat daerah
AP.01.01.A2	AP.01	AP.01.01	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	A2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
AP.01.02.A2	AP.01	AP.01.02	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	A2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
AP.02.01.B2	AP.02	AP.02.01	Layanan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	B2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
AP.03.01.B2	AP.03	AP.03.01	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	B2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
AP.04.01.C2	AP.04	AP.04.01	Penyelesaian Pengadaan	C2	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
AP.04.02.C2	AP.04	AP.04.02	Pengadaan Secara Elektronik	C2	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
AP.04.03.C2	AP.04	AP.04.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	C2	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
AP.05.01.D2	AP.05	AP.05.01	Program Kepegawaian Daerah	D2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
AP.06.01.V1	AP.06	AP.06.01	Pengelolaan Arsip	V1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
AP.06.02.V1	AP.06	AP.06.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	V1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
AP.07.01.B2	AP.07	AP.07.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	B2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
AP.08.01.E2	AP.08	AP.08.01	Program Penyelenggaraan Pengawasan	E2	Inspektorat	Inspektorat
AP.08.02.E2	AP.08	AP.08.02	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	E2	Inspektorat	Inspektorat

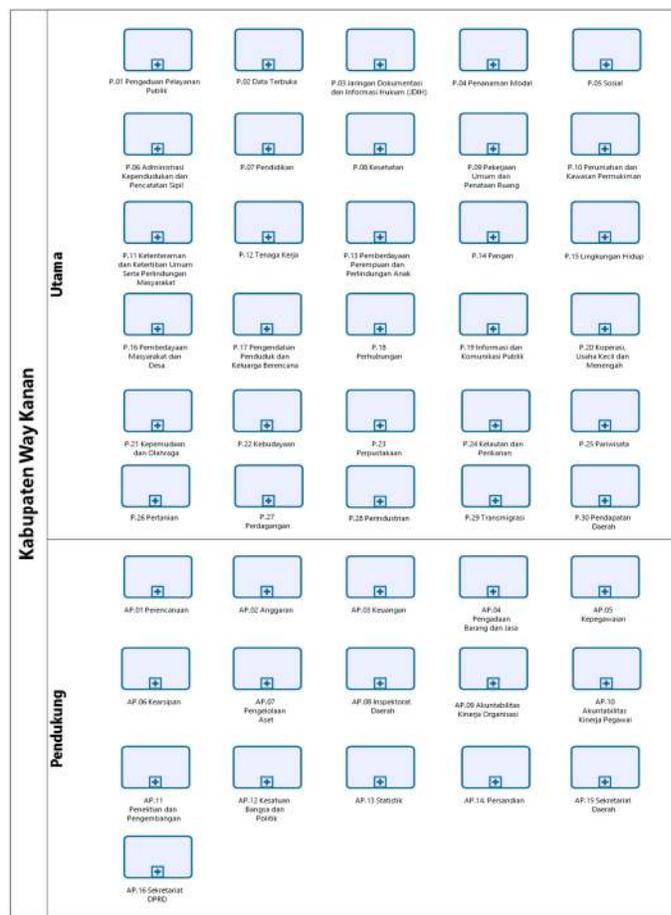
AP.09.01.D2	AP.09	AP.09.01	Akuntabilitas Kinerja Organisasi	D2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
AP.10.01.D2	AP.10	AP.10.01	Pengembangan Sumber Daya Manusia	D2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
AP.11.01.A2	AP.11	AP.11.01	Penelitian dan Pengembangan Daerah	A2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
AP.12.01.F2	AP.12	AP.12.01	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	F2	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Badan Kesatuan bangsa dan politik
AP.12.02.F2	AP.12	AP.12.02	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	F2	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Badan Kesatuan bangsa dan politik
AP.12.03.F2	AP.12	AP.12.03	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	F2	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Badan Kesatuan bangsa dan politik
AP.12.04.F2	AP.12	AP.12.04	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	F2	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Badan Kesatuan bangsa dan politik
AP.12.05.F2	AP.12	AP.12.05	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	F2	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Badan Kesatuan bangsa dan politik
AP.13.01.B1	AP.13	AP.13.01	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	B1	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
AP.14.01.B1	AP.14	AP.14.01	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	B1	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
AP.15.01.G2	AP.15	AP.15.01	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	G2	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
AP.15.02.G2	AP.15	AP.15.02	Program Perekonomian dan Pembangunan	G2	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
AP.15.03.G2	AP.15	AP.15.03	Pengelolaan Izin Lokasi	G2	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

AP.16.01.H2	AP.16	AP.16.01	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	H2	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
-------------	-------	----------	--	----	------------------	------------------

3.3.5 Identifikasi dan Deskripsi Proses Bisnis Pemerintah Daerah Way Kanan

Tahap ini dilakukan untuk menyederhanakan dan meningkatkan pemahaman terhadap peta sub proses bisnis utama dan pendukung Kabupaten Way Kanan, yaitu merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan dalam menghasilkan kebijakan, mulai analisis isu strategis dan kajian kebijakan, penyusunan draf kebijakan, pembahasan yang melibatkan stakeholder, sampai dengan penerbitan kebijakan. Garis keterkaitan antar sub proses menunjukkan perumusan kebijakan yang kolaboratif, di mana konsep kebijakan pada setiap sub proses disampaikan kepada sub proses lainnya. Mekanisme ini akan membuat keterpaduan rumusan antar obyek bidang Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam kerangka reformasi birokrasi (kelembagaan, tata laksana, SDM Aparatur, akuntabilitas kinerja, pengawasan, pelayanan publik dan reformasi birokrasi) serta terhindar dari tumpang tindih atau disharmoni kebijakan bidang Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Dengan demikian Pemerintahan Kabupaten Way Kanan dapat menetapkan kebijakan yang kolaboratif, saling terkait dan komprehensif.

Berikut ini adalah Proses Utama dan Pendukung level 0 yang digambarkan dalam bentuk Visualisasi berdasarkan tabel Identifikasi Proses bisnis.

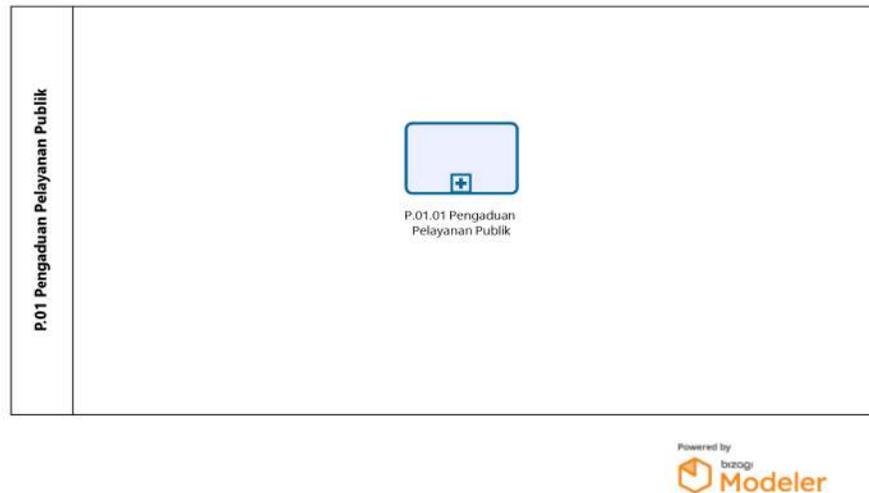


Gambar 10 Peta Proses Bisnis Level 0 Utama dan Pendukung

Rincian Proses Utama level 1 dan level 2 akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengaduan Pelayanan Publik

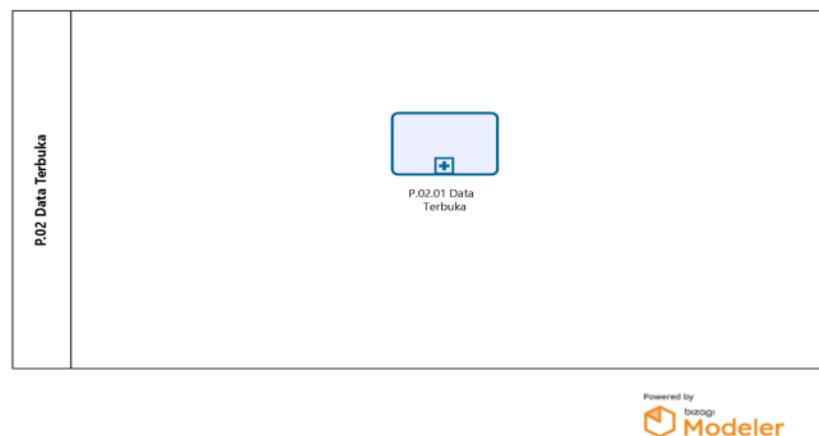
Proses Pengaduan Pelayanan Publik dengan pengkodean P.01 yang menyelenggarakan Pengaduan Pelayanan Publik di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Pengaduan Pelayanan Publik diselenggarakan oleh Bagian hukum Sekretariat Daerah. Proses Utama yang dimiliki Proses Pengaduan Pelayanan Publik yaitu Pengaduan Pelayanan Publik (P.01.01). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini.



Gambar 11 Proses Bisnis Level 0 Pengaduan Pelayanan Publik

2. Data Terbuka

Proses Data Terbuka dengan pengkodean P.02 yang menyelenggarakan Data Terbuka di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Data Terbuka diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Proses Utama yang dimiliki Proses Data Terbuka yaitu Data Terbuka (P.02.01). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini.

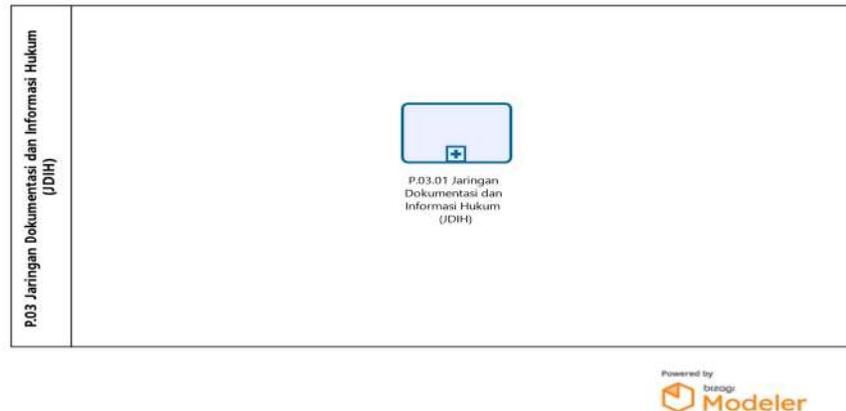


Gambar 12 Proses Bisnis Level 0 Open Data Way Kanan

3. Jaringan dan Dokumentasi Hukum

Proses Jaringan dan Dokumentasi hukum dengan pengkodean P.03 yang menyelenggarakan Jaringan dan Dokumentasi hukum di pemerintah kabupaten Way Kanan.

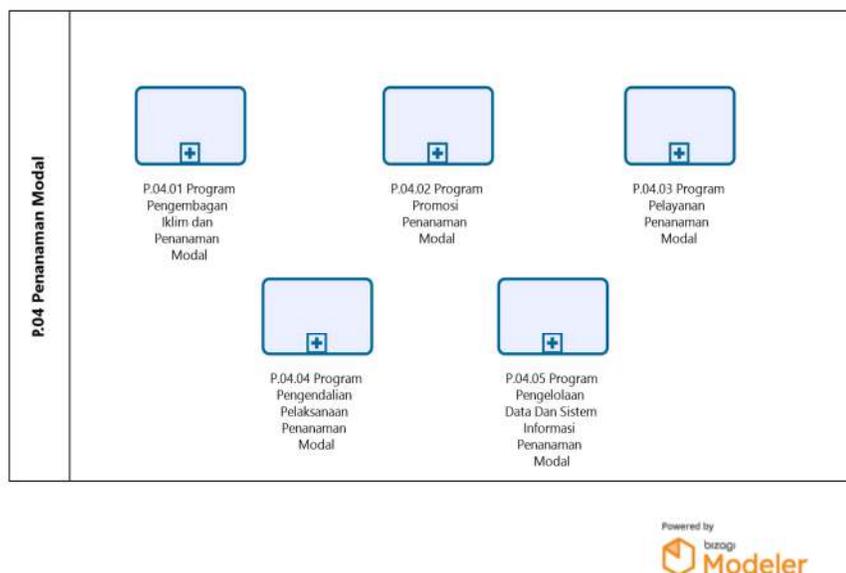
Proses Jaringan dan Dokumentasi hukum diselenggarakan oleh Bagian hukum Sekretariat Daerah. Proses Utama yang dimiliki Proses Jaringan dan Dokumentasi hukum yaitu Jaringan dan Dokumentasi hukum (P.03.01). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini.



Gambar 13 Proses Bisnis Level 0 JDIIH

4. Penanaman Modal

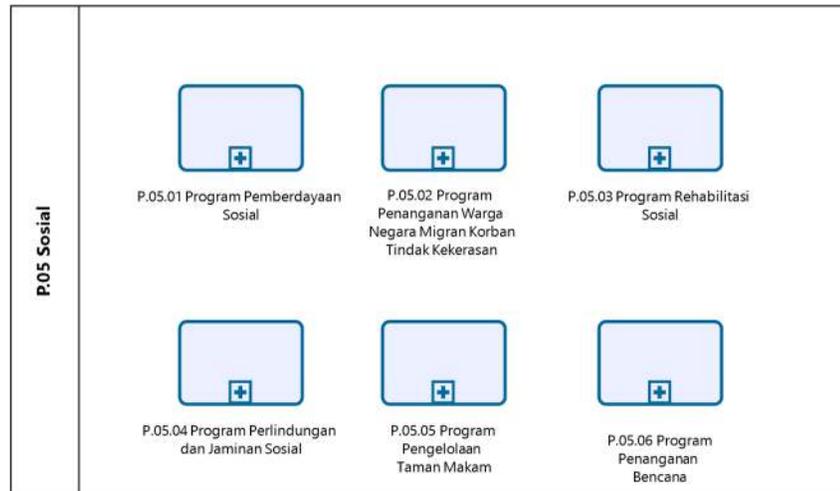
Proses Penanaman Modal dengan pengkodean P.04 yang menyelenggarakan Penanaman Modal di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Penanaman Modal diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu. Proses Utama yang dimiliki Proses Penanaman Modal yaitu Program Pengembangan Iklim dan penanaman Modal (P.04.01), Program Promosi Penanaman Modal (P.04.02), Program Pelayanan Penanaman Modal (P.04.03), Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (P.04.04), dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (P.04.05). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 14 Proses Bisnis Level 0 Penanaman Modal

5. Sosial

Proses Sosial dengan pengkodean P.05 yang menyelenggarakan Sosial di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial. Proses Utama yang dimiliki Proses Penanaman Modal yaitu Program Pemberdayaan Sosial (P.05.01), Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (P.05.02), Program Rehabilitasi Sosial (P.05.03), Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial (P.05.04), Program Pengelolaan Taman Makam (P.05.05), Program Penanganan Bencana (P.05.06). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini

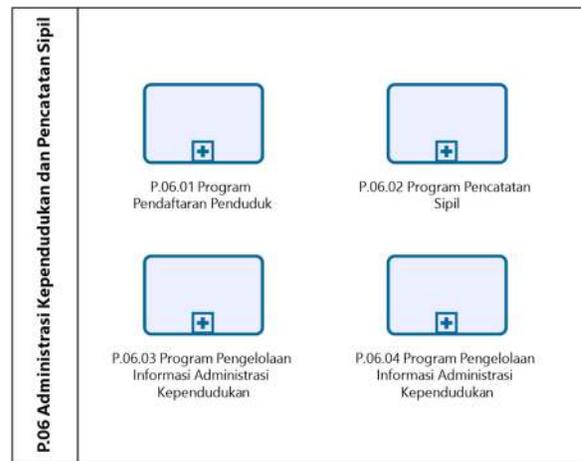


Powered by
bizagi
Modeler

Gambar 15 Proses Bisnis Level 0 Sosial

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Proses Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pengkodean P.06 yang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Proses Utama yang dimiliki Proses Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Program Pendaftaran Penduduk (P.06.01), Program Pencatatan Sipil (P.06.02), Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (P.06.03), dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan (P.06.04). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini

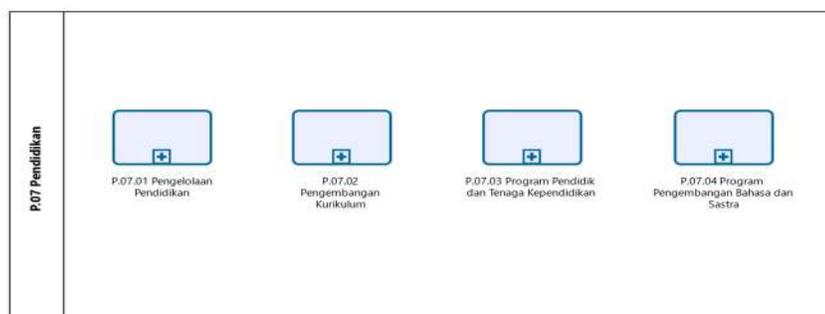


Powered by
bizagi
Modeler

Gambar 16 Proses Bisnis Level 0 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7. Pendidikan

Proses Pendidikan dengan pengkodean P.07 yang menyelenggarakan Pendidikan di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Proses Utama yang dimiliki Proses Pendidikan yaitu Program Pengelolaan Pendidikan (P.07.01), Program Pengembangan Kurikulum (P.07.02), Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P.07.03), dan Program Pengembangan Bahasa dan Sastra (P.07.04). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini

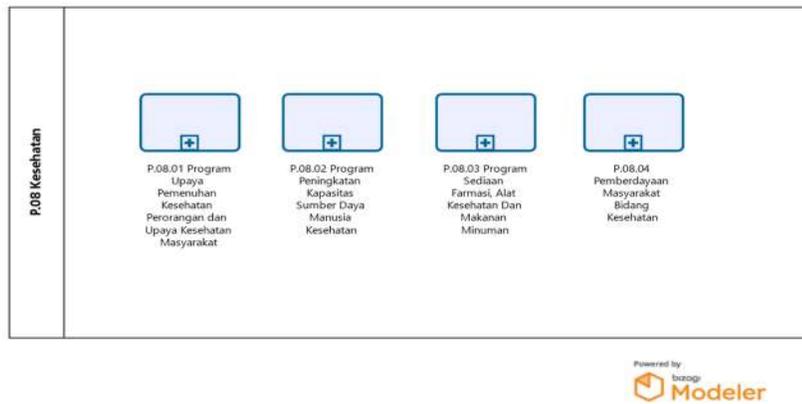


Powered by
bizagi
Modeler

Gambar 17 Proses Bisnis Level 0 Pendidikan

8. Kesehatan

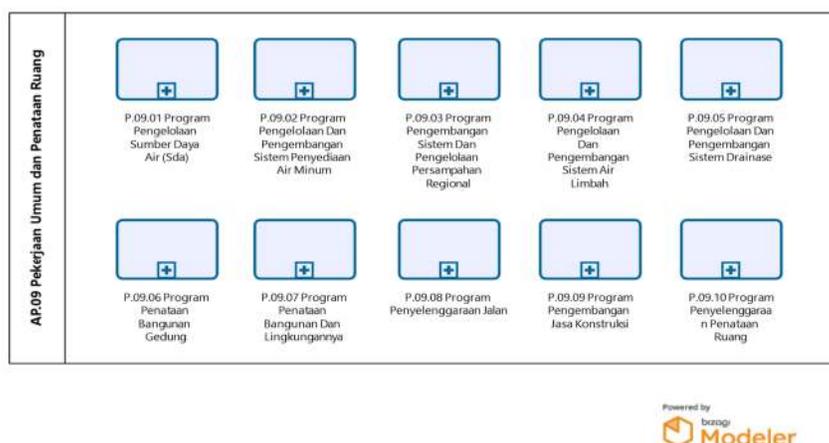
Proses Kesehatan dengan pengkodean P.08 yang menyelenggarakan Kesehatan di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Kesehatan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan. Proses Utama yang dimiliki Proses Kesehatan yaitu Upaya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (P.08.01), Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (P.08.02), Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman (P.08.03), dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (P.08.04). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 18 Proses Bisnis Level 0 Kesehatan

9. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Proses Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan pengkodean P.09 yang menyelenggarakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Proses Utama yang dimiliki Proses Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (P.09.01), Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (P.09.02), Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional (P.09.03), Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah (P.09.04), Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase (P.09.05), Program Penataan Bangunan Gedung (P.09.06), Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya (P.09.07), Program Penyelenggaraan Jalan (P.09.08), Program Pengembangan Jasa Konstruksi (P.09.09), dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (P.09.10). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini

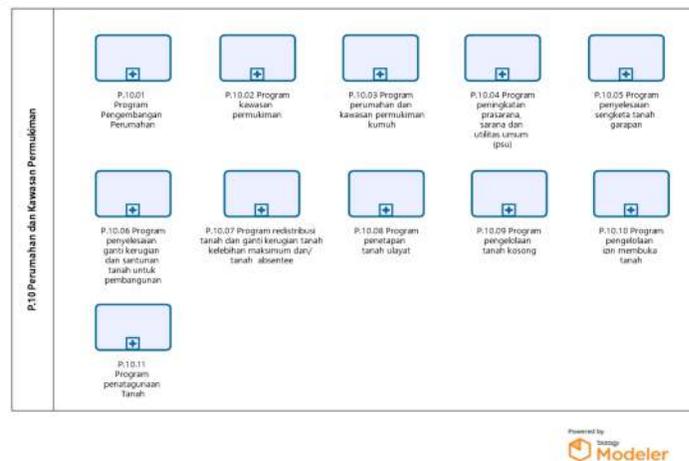


Gambar 19 Proses Bisnis Level 0 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

10. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Proses Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan pengkodean P.10 yang menyelenggarakan Perumahan dan Kawasan Permukiman di pemerintah kabupaten Way Kanan.

Proses Perumahan dan Kawasan Permukiman diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Proses Utama yang dimiliki Proses Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Program Pengembangan Perumahan (P.10.01), Program Kawasan Permukiman (P.10.02), Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh (P.10.03), Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) (P.10.04), Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (P.10.05), Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan (P.10.06), Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee (P.10.07), Program Penetapan Tanah Ulayat (P.10.08), Program Pengelolaan Tanah Kosong (P.10.09), Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah (P.10.10), dan Program Penatagunaan Tanah (P.10.11). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 20 Perumahan dan Kawasan Permukiman

11. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Proses Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dengan pengkodean P.11 yang menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Pemadam Kebakaran. Proses Utama yang dimiliki Proses Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yaitu Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (P.11.01), Program Penanggulangan Bencana (P.11.02), dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (P.11.03). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini

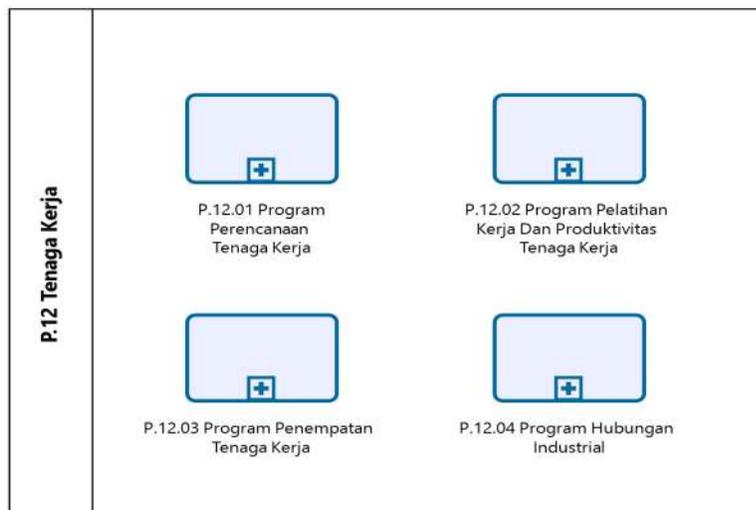


Powered by
bizagi
Modeler

Gambar 21 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

12. Tenaga Kerja

Proses Tenaga Kerja dengan pengkodean P.12 yang menyelenggarakan Tenaga Kerja di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Tenaga Kerja diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Proses Utama yang dimiliki Proses Tenaga Kerja yaitu Program Perencanaan Tenaga Kerja (P.12.01), Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja (P.12.02), Program Penempatan Tenaga Kerja (P.12.03), dan Program Hubungan Industrial (P.12.04). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini



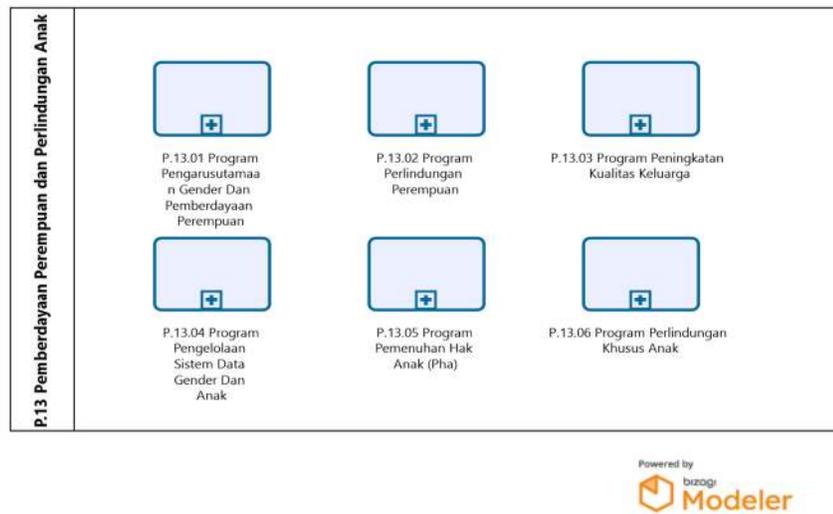
Powered by
bizagi
Modeler

Gambar 22 Proses Bisnis Level 0 Tenaga Kerja

13. Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

Proses Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dengan pengkodean P.13 yang menyelenggarakan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

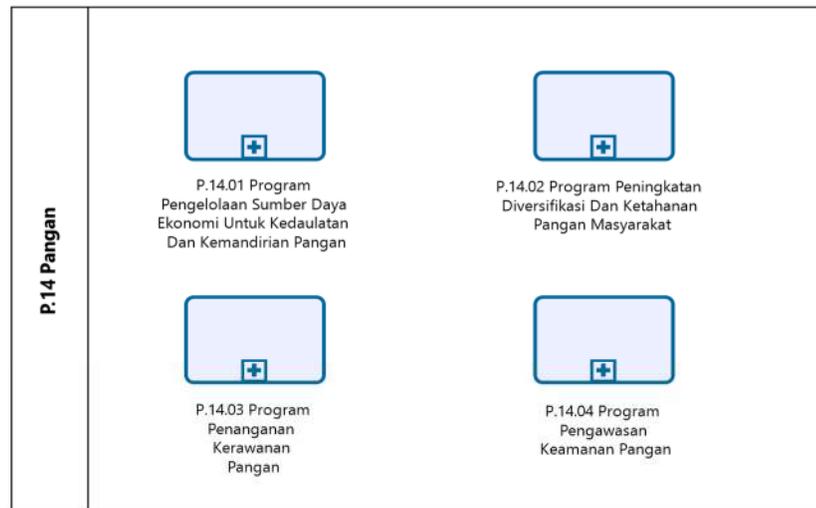
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Proses Utama yang dimiliki Proses Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak yaitu Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan (P.13.01), Program Perlindungan Perempuan (P.13.02), Program Peningkatan Kualitas Keluarga (P.13.03), Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak (P.13.04), Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) (P.13.05), dan Program Perlindungan Khusus Anak (P.13.06). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 23 Proses Bisnis Level 0 Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

14. Pangan

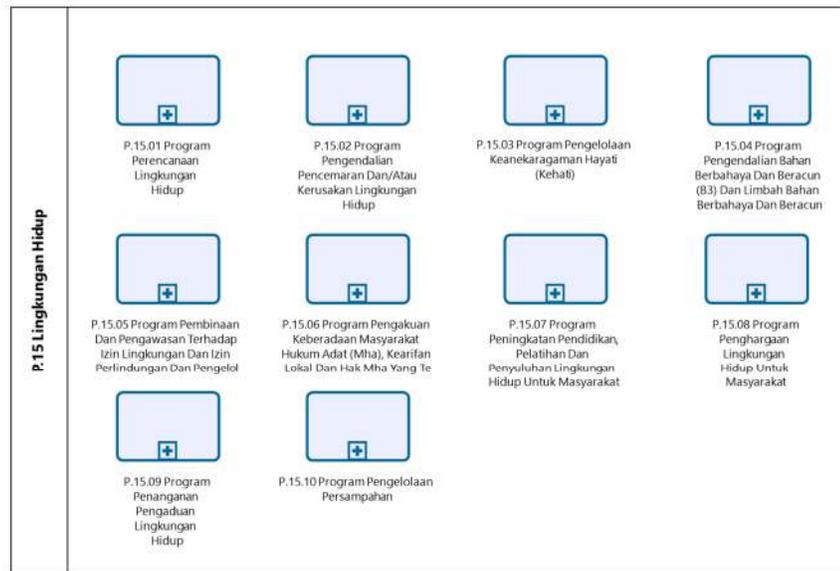
Proses Pangan dengan pengkodean P.14 yang menyelenggarakan Pangan di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Pangan diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Proses Utama yang dimiliki Proses Pangan yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan (P.14.01), Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat (P.14.02), Program Penanganan Kerawanan Pangan (P.14.03), dan Program Pengawasan Keamanan Pangan (P.14.04). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 24 Proses Bisnis Level 0 Pangan

15. Lingkungan Hidup

Proses Lingkungan Hidup dengan pengkodean P.15 yang menyelenggarakan Lingkungan Hidup di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Proses Utama yang dimiliki Proses Lingkungan Hidup yaitu Program Perencanaan Lingkungan Hidup (P.15.01), Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup (P.15.02), Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) (P.15.03), Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) (P.15.04), Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (P.15.05), Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH (P.15.06), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (P.15.07), Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (P.15.08), Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (P.15.09), dan Program Pengelolaan Persampahan (P.15.10). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini

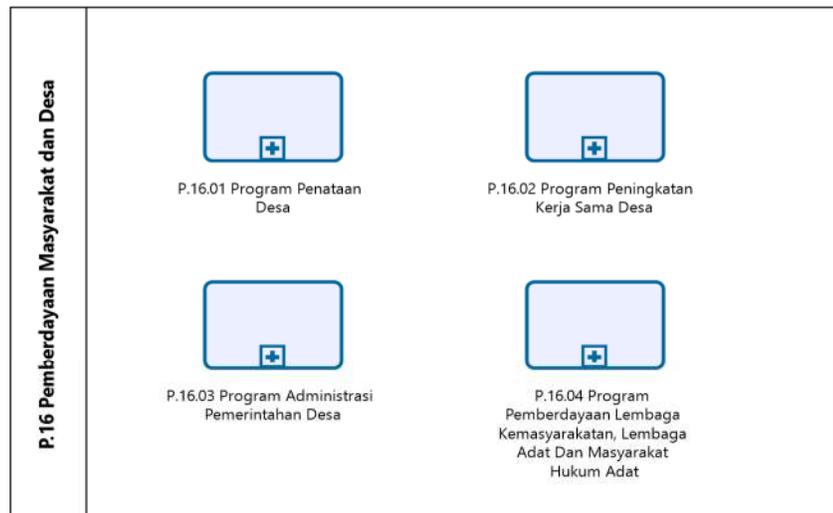


Powered by
b2u2g
Modeler

Gambar 25 Proses Bisnis level 0 Lingkungan Hidup

16. Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Proses Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan pengkodean P.16 yang menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung. Proses Utama yang dimiliki Proses Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yaitu Program Penataan Desa (P.16.01), Program Peningkatan Kerjasama Desa (P.16.02), Program Administrasi Pemerintahan Desa (P.16.03), dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat (P.16.04). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini

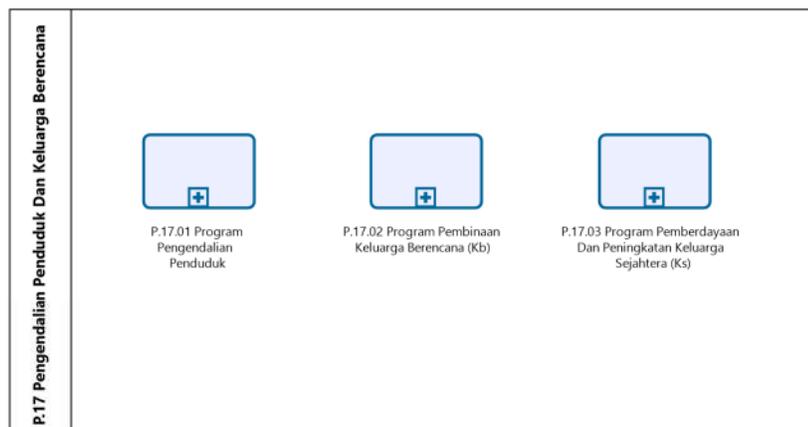


Powered by
bizagi
Modeler

Gambar 26 Proses Bisnis Level 0 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

17. Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

Proses Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana dengan pengkodean P.17 yang menyelenggarakan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Proses Utama yang dimiliki Proses Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana yaitu Program Pengendalian Penduduk (P.17.01), Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (P.17.02), dan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (P.17.03). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini

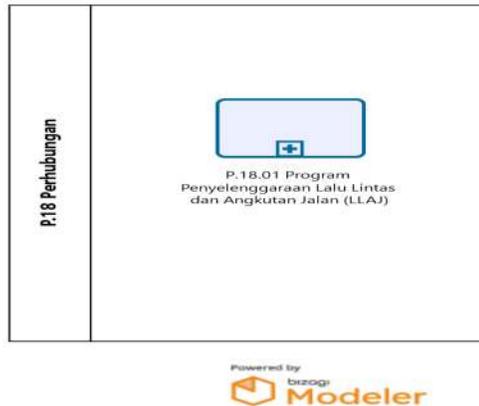


Powered by
bizagi
Modeler

Gambar 27 Proses Bisnis Level 0 Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

18. Perhubungan

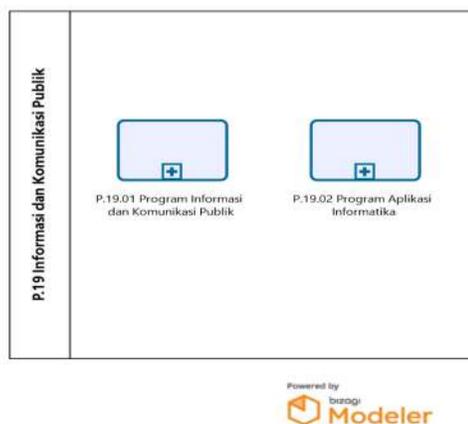
Proses Perhubungan dengan pengkodean P.18 yang menyelenggarakan Perhubungan di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Perhubungan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan. Proses Utama yang dimiliki Proses Perhubungan yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) (P.18.01). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 28 Proses Bisnis Level 0 Perhubungan

19. Informasi dan Komunikasi Publik

Proses Informasi dan Komunikasi Publik dengan pengkodean P.19 yang menyelenggarakan Informasi dan Komunikasi Publik di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Informasi dan Komunikasi Publik diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Proses Utama yang dimiliki Proses Informasi dan Komunikasi Publik yaitu Program Informasi dan Komunikasi Publik (P.19.01), dan Program Aplikasi Informatika (P.19.02). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 29 Proses Bisnis Level 0 Informasi dan komunikasi Publik

20. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Proses Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan pengkodean P.20 yang menyelenggarakan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Umkm Perindustrian Dan Perdagangan. Proses Utama yang dimiliki Proses Koperasi, Usaha Kecil dan

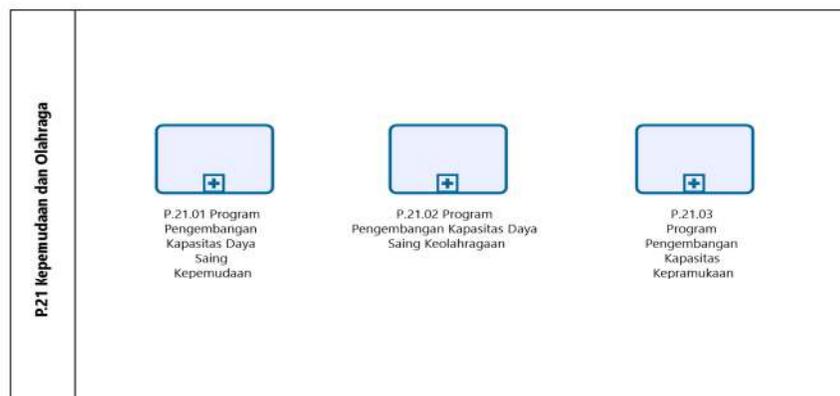
Menengah yaitu Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam (P.20.01), Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi (P.20.02), Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi (P.20.03), Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian (P.20.04), Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi (P.20.05), Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk) (P.20.06), dan Program Pengembangan Umkm (P.20.07). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 30 Proses Bisnis Level 0 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

21. Kepemudaan dan Olahraga

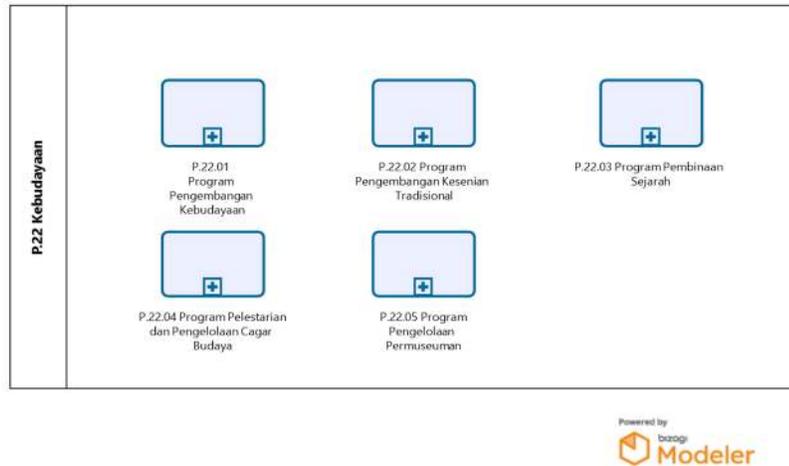
Proses Kepemudaan dan Olahraga dengan pengkodean P.21 yang menyelenggarakan Kepemudaan dan Olahraga di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Kepemudaan dan Olahraga diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata. Proses Utama yang dimiliki Proses Kepemudaan dan Olahraga yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (P.21.01), Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan (P.21.02), dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (P.21.03). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 31 Proses Bisnis Level 0 Kepemudaan dan olahraga

22. Kebudayaan

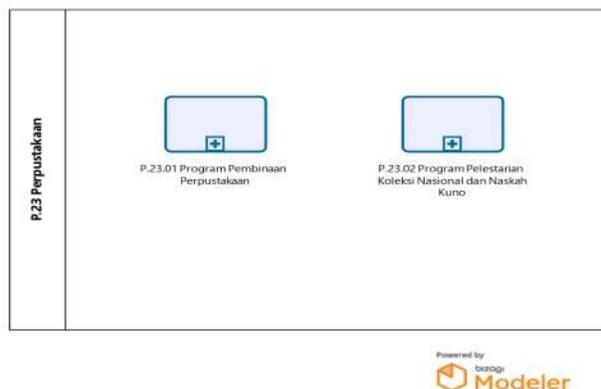
Proses Kebudayaan dengan pengkodean P.22 yang menyelenggarakan Kebudayaan di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Proses Utama yang dimiliki Proses Kebudayaan yaitu Program Pengembangan Kebudayaan (P.22.01), Program Pengembangan Kesenian Tradisional (P.22.02), Program Pembinaan Sejarah (P.22.03), Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya (P.22.04), dan Pengelolaan Permuseuman (P.22.05). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 32 Proses Bisnis Level 0 Kebudayaan

23. Perpustakaan

Proses Perpustakaan dengan pengkodean P.23 yang menyelenggarakan Perpustakaan di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Perpustakaan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Proses Utama yang dimiliki Proses Perpustakaan yaitu Perpustakaan (P.23.01) dan Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno (P.23.02). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 33 Proses Bisnis Level 0 Perpustakaan

24. Kelautan dan Perikanan

Proses Kelautan dan Perikanan dengan pengkodean P.24 yang menyelenggarakan Kelautan dan Perikanan di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Kelautan dan Perikanan diselenggarakan oleh Dinas Perikanan. Proses

Utama yang dimiliki Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (P.24.01), Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (P.24.02), Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (P.24.03), dan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (P.24.04). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini

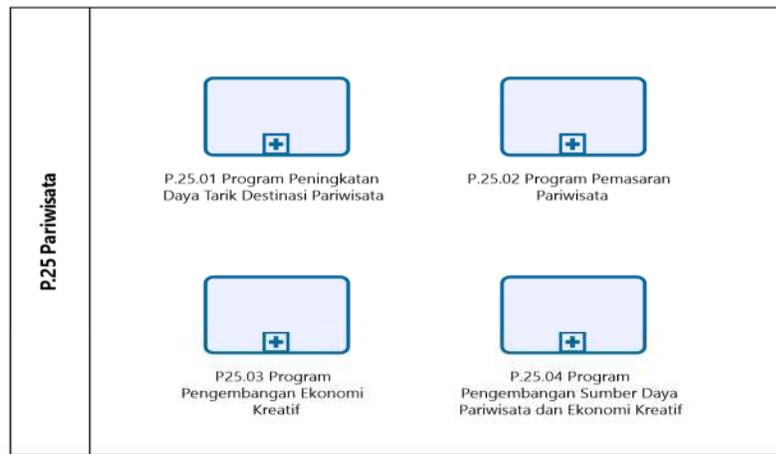


Powered by
bizog
Modeler

Gambar 34 Proses Bisnis Level 0 Kelautan dan Perikanan

25. Pariwisata

Proses Pariwisata dengan pengkodean P.25 yang menyelenggarakan Pariwisata di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Pariwisata diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata. Proses Utama yang dimiliki Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (P.25.01), Program Pemasaran Pariwisata (P.25.02), Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (P.25.03), dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (P.25.04). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini

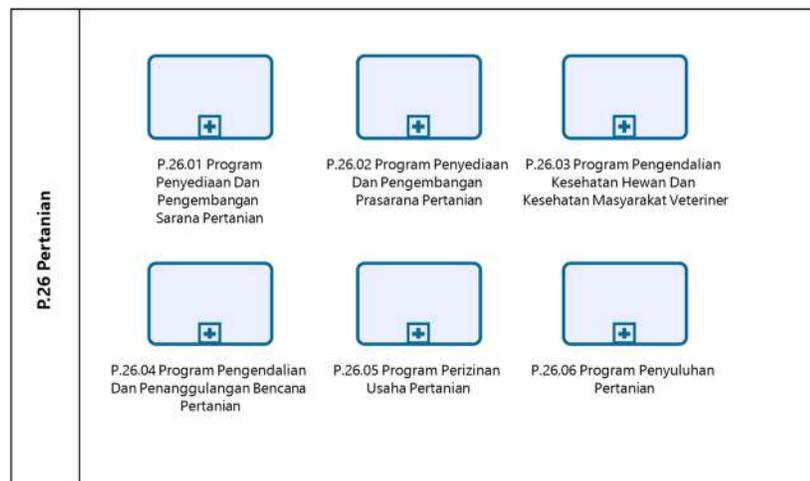


Powered by
bizagi
Modeler

Gambar 35 Proses Bisnis Level 0 Pariwisata

26. Pertanian

Proses Pertanian dengan pengkodean P.26 yang menyelenggarakan Pertanian di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Pertanian diselenggarakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Proses Utama yang dimiliki yaitu Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (P.26.01), Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian (P.26.02), Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (P.26.03), Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian (P.26.04), Program Perizinan Usaha Pertanian (P.26.05), dan Program Penyuluhan Pertanian (P.26.06). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini

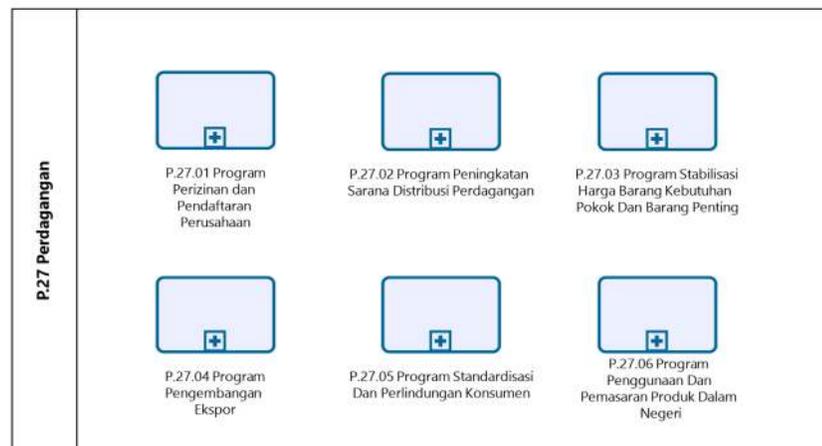


Powered by
bizagi
Modeler

Gambar 36 Proses bisnis Level 0 Pertanian

27. Perdagangan

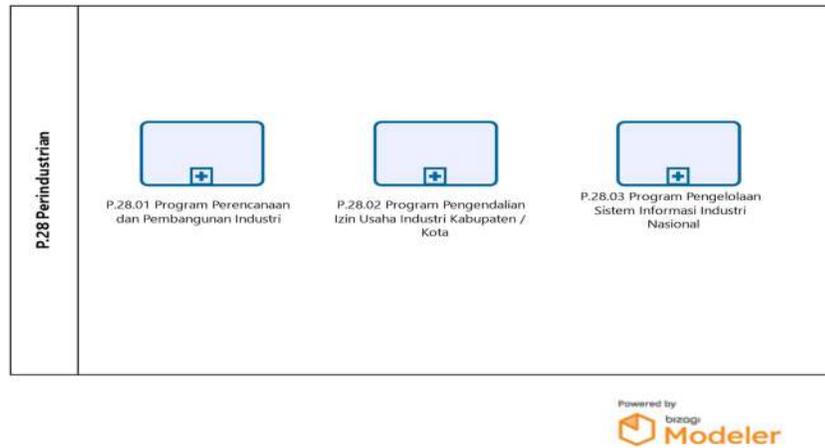
Proses Perdagangan dengan pengkodean P.27 yang menyelenggarakan Perdagangan di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Perdagangan diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Proses Utama yang dimiliki yaitu Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan (P.27.01), Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (P.27.02), Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (P.27.03), Program Pengembangan Ekspor (P.27.04), Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen (P.27.05), dan Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P.27.06). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 37 Proses Bisnis Level 0 Perdagangan

28. Perindustrian

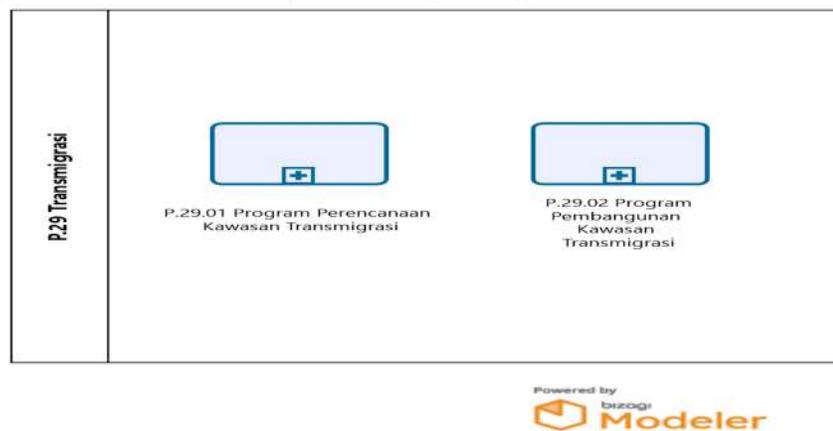
Proses Perindustrian dengan pengkodean P.28 yang menyelenggarakan Perindustrian di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Perindustrian diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Proses Utama yang dimiliki yaitu Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri (P.28.01), Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota (P.28.02), dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (P.28.03). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 38 Proses Bisnis Level 0 Perindustrian

29. Transmigrasi

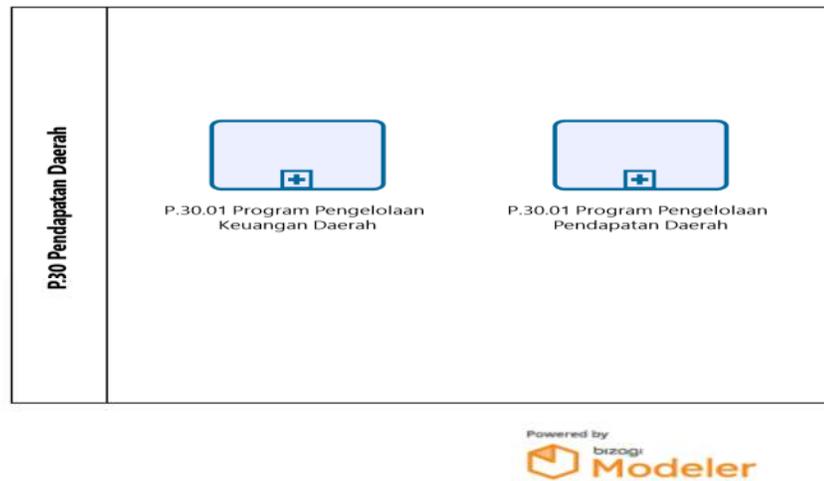
Proses Transmigrasi dengan pengkodean P.29 yang menyelenggarakan Transmigrasi di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Transmigrasi diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Proses Utama yang dimiliki yaitu Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi (P.29.01) dan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P.29.02). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 39 Proses Bisnis level 0 Transmigrasi

30. Pendapatan Daerah

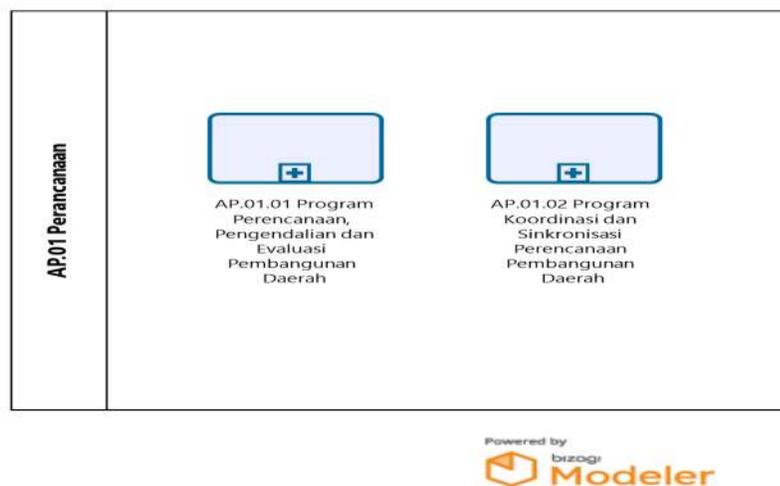
Proses Pendapatan Daerah dengan pengkodean P.30 yang menyelenggarakan Pendapatan Daerah di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Pendapatan Daerah diselenggarakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Proses Utama yang dimiliki yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah (P.30.01) dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (P.30.02). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 40 Proses Bisnis Level 0 pendapatan Daerah

31. Perencanaan

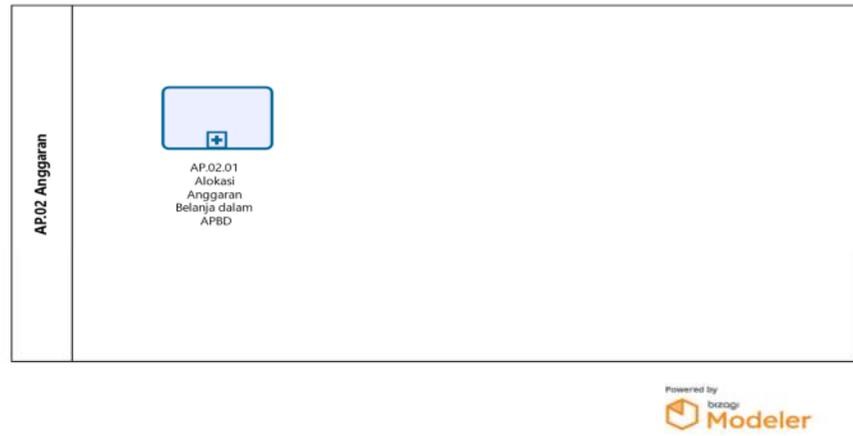
Proses Perencanaan dengan pengkodean AP.01 yang menyelenggarakan Perencanaan di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Perencanaan diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Proses Pendukung yang dimiliki yaitu Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (AP.01.01) dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (AP.01.02). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 41 Proses Bisnis Level 0 Perencanaan

32. Anggaran

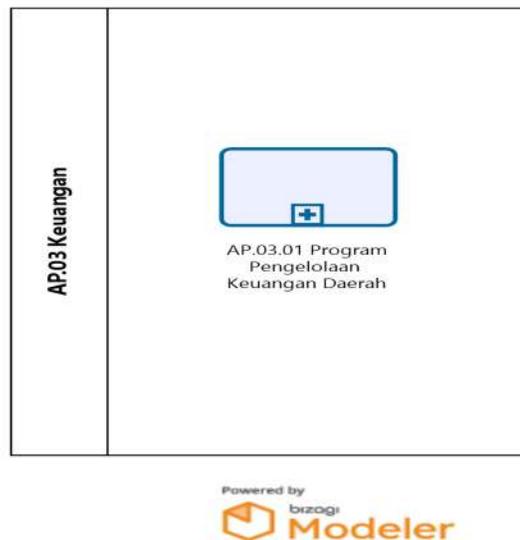
Proses Anggaran dengan pengkodean AP.02 yang menyelenggarakan Anggaran di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Anggaran diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Proses Pendukung yang dimiliki yaitu Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD (AP.02.01). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 42 Proses Bisnis Level 0 Anggaran

33. Keuangan

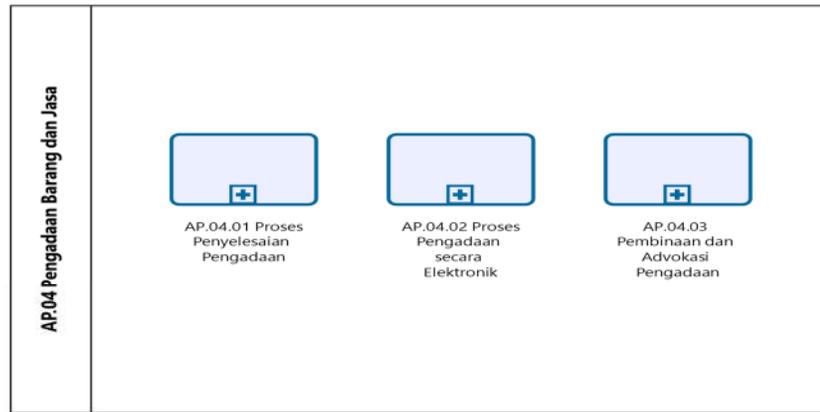
Proses Keuangan dengan pengkodean AP.03 yang menyelenggarakan Keuangan di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Keuangan diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Proses Pendukung yang dimiliki yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah (AP.03.01). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 43 Keuangan

34. Pengadaan Barang dan Jasa

Proses Pengadaan Barang dan Jasa dengan pengkodean AP.04 yang menyelenggarakan Pengadaan Barang dan Jasa di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Pengadaan Barang dan Jasa diselenggarakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Proses Pendukung yang dimiliki yaitu Penyelesaian Pengadaan (AP.04.01), Pengadaan Secara Elektronik (AP.04.02), dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan (AP.04.03). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini

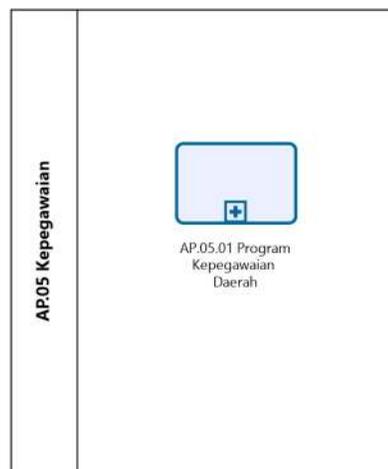


Powered by
bizagi
Modeler

Gambar 44 Proses Bisnis Level 0 Pengadaan Barang dan Jasa

35. Kepegawaian

Proses Kepegawaian dengan pengkodean AP.05 yang menyelenggarakan Kepegawaian di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Kepegawaian diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia. Proses Pendukung yang dimiliki yaitu Program Kepegawaian Daerah (AP.05.01). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini



Powered by
bizagi
Modeler

Gambar 45 Proses Bisnis Level 0 Kepegawaian

36. Kearsipan

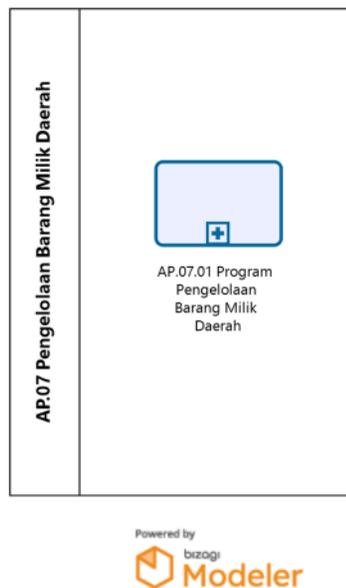
Proses Kearsipan dengan pengkodean AP.06 yang menyelenggarakan Kearsipan di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Kearsipan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Proses Pendukung yang dimiliki yaitu Pengelolaan Arsip (AP.06.01) dan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (AP.06.02). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 46 Proses Bisnis Level 0 Kearsipan

37. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Proses Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan pengkodean AP.07 yang menyelenggarakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Pengelolaan Barang Milik Daerah diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Proses Pendukung yang dimiliki yaitu Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (AP.07.01). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 47 Proses Bisnis Level 0 Pengelolaan Barang Milik Daerah

38. Pengawasan Internal

Proses Pengawasan Internal dengan pengkodean AP.08 yang menyelenggarakan Pengawasan Internal di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Pengawasan Internal diselenggarakan oleh Inspektorat. Proses Pendukung yang dimiliki yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan (AP.08.01) dan Program Perumusan Kebijakan,

Pendampingan, dan Asistensi (AP.08.02). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini

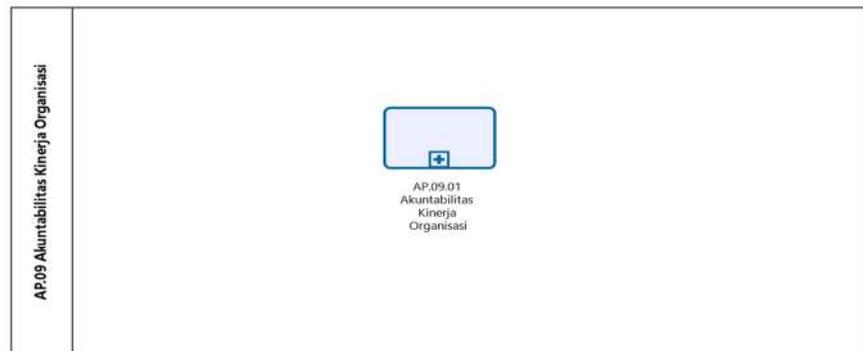


Powered by
bizagi
Modeler

Gambar 48 Proses bisnis Level 0 Pengawasan Internal

39. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Proses Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan pengkodean AP.09 yang menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja Organisasi di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Akuntabilitas Kinerja Organisasi diselenggarakan oleh Inspektorat. Proses Pendukung yang dimiliki yaitu Akuntabilitas Kinerja Organisasi (P.09.01) Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini



Powered by
bizagi
Modeler

Gambar 49 Proses Bisnis Level 0 Akuntabilitas Kinerja Organisasi

40. Kinerja Pegawai

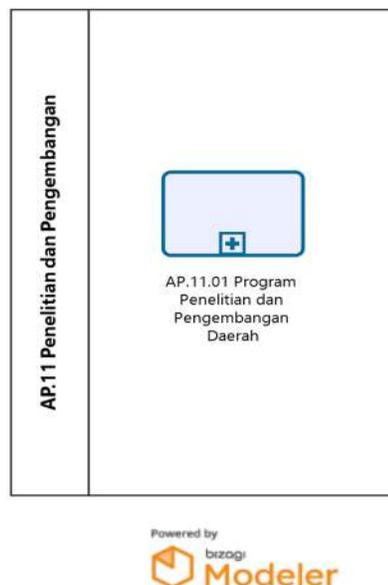
Proses Kinerja Pegawai dengan pengkodean AP.10 yang menyelenggarakan Kinerja Pegawai di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Kinerja Pegawai diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia. Proses Pendukung yang dimiliki yaitu Pengembangan Sumber Daya Manusia (P.10.01) Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 50 Proses Bisnis Level 0 Akuntabilitas Kinerja Pegawai

41. Penelitian dan Pengembangan

Proses Penelitian dan Pengembangan dengan pengkodean AP.11 yang menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Penelitian dan Pengembangan diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Proses Pendukung yang dimiliki yaitu Penelitian dan Pengembangan Daerah (AP.11.01). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini

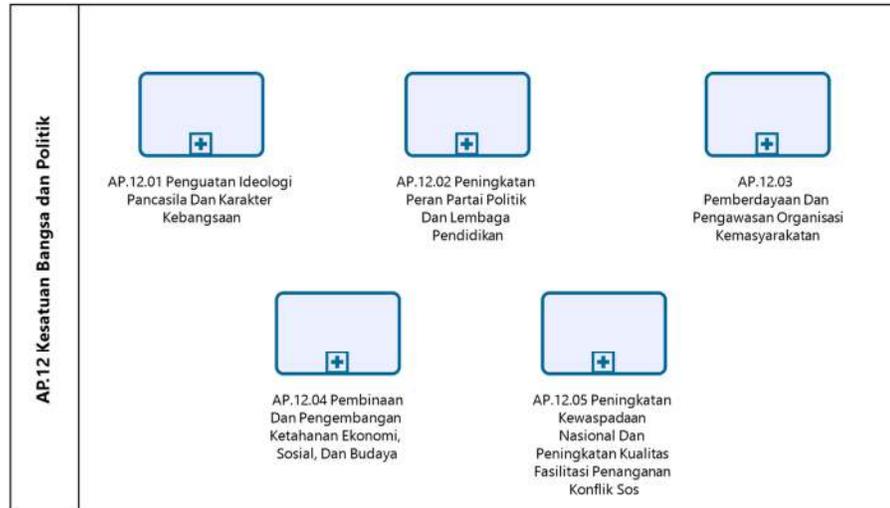


Gambar 51 Proses Bisnis Level 0 Penelitian dan pengembangan

42. Kesatuan Bangsa dan Politik

Proses Kesatuan Bangsa Dan Politik dengan pengkodean AP.12 yang menyelenggarakan Kesatuan Bangsa Dan Politik dengan di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Kesatuan Bangsa Dan Politik dengan diselenggarakan oleh Badan Kesatuan bangsa dan politik. Proses Pendukung yang dimiliki yaitu Penguatan Ideologi Pancasila Dan

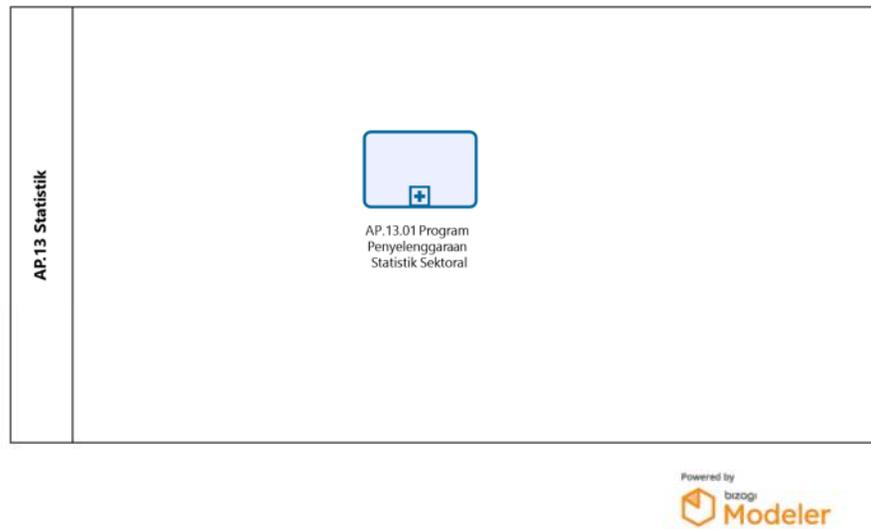
Karakter Kebangsaan (AP.12.01), Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (AP.12.02), Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (AP.12.03), Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya (AP.12.04), dan Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (AP.12.05). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 52 Proses Bisnis Level 0 Kesatuan Bangsa dan Politik

43. Statistik

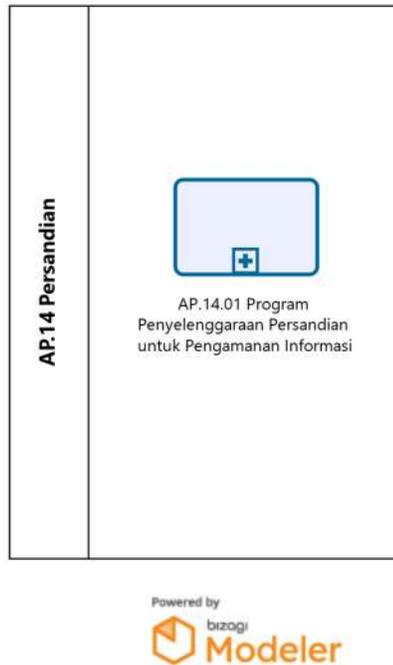
Proses Statistik dengan pengkodean AP.13 yang menyelenggarakan Statistik dengan di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Statistik dengan diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Proses Pendukung yang dimiliki yaitu Program Penyelenggaraan Statistik Sektor (AP.13.01). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 53 Proses Bisnis Level 0 Statistik

44. Persandian

Proses Persandian dengan pengkodean AP.14 yang menyelenggarakan Persandian dengan di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Persandian dengan diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Proses Pendukung yang dimiliki yaitu Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (AP.14.01). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini

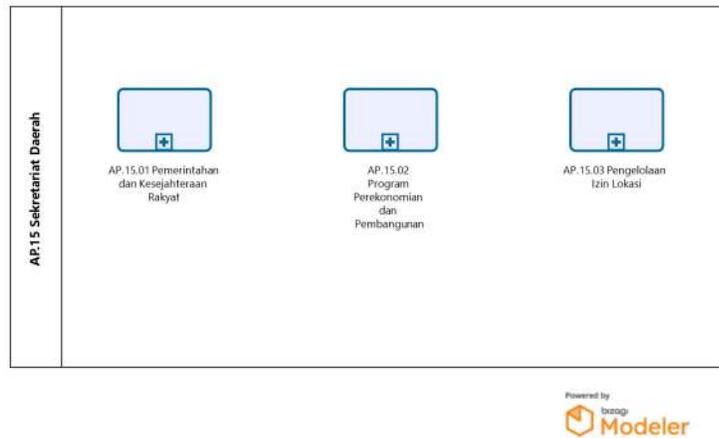


Gambar 54 Proses Bisnis Level 0 Persandian

45. Sekretariat Daerah

Proses Sekretariat Daerah dengan pengkodean AP.15 yang menyelenggarakan Sekretariat Daerah dengan di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Sekretariat Daerah dengan diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah.

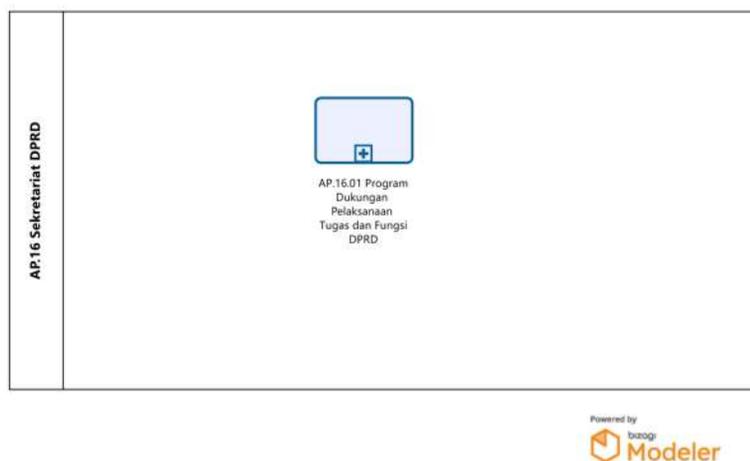
Proses Pendukung yang dimiliki yaitu Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (AP.15.01), Program Perekonomian dan Pembangunan (AP.15.02), dan Pengelolaan Izin Lokasi (AP.15.03). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 55 Proses Bisnis Level 0 Sekretariat Daerah

46. Sekretariat DPRD

Proses Sekretariat DPRD dengan pengkodean AP.16 yang menyelenggarakan Sekretariat DPRD dengan di pemerintah kabupaten Way Kanan. Proses Sekretariat DPRD dengan diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD. Proses Pendukung yang dimiliki yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (AP.16.01). Diagram level 1 ditampilkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 56 Proses Bisnis Level 0 Sekretariat DPRD

3.4 Analisis Gap dan Rekomendasi

Tabel 7 Analisis Gap Proses Bisnis

No	Kondisi Saat Ini	Kondisi Target	Analisis Gap	Rekomendasi
1	1. Pemetaan proses bisnis ke dalam SOP utama menunjukkan adanya aktivitas/ proses bisnis yang serupa dilakukan oleh perangkat daerah yang berbeda. 2. Beberapa SOP terkait proses tertentu belum tersedia.	Seluruh aktivitas/ proses bisnis yang serupa dilakukan oleh perangkat daerah yang berbeda dilaksanakan dengan cara yang sama dengan perbedaan-perbedaan pada detail spesifik yang terdokumentasi.	Peta peran dan fungsi internal dan eksternal perlu di-review dan diselaraskan lagi antara strategi, stakeholders, peran dan fungsi bisnisnya	Penguatan peta peran dan fungsi internal dan eksternal Pemerintah Kabupaten Way Kanan - Stakeholder map - Strategy map - Peta proses bisnis
2	Penggambaran proses bisnis lintas unit (internal) di Pemerintah Kabupaten Way Kanan belum jelas menunjukkan keterhubungan antar unit yang berperan dalam proses bisnis.	Penggambaran harus dapat input, proses, proses bisnis menunjukkan output, serta keterkaitan antara satu unit dengan unit lain yang berkaitan.	Perlu dilakukan diskusi dan penggambaran kembali proses bisnis lintas unit (internal) di Pemerintah Kabupaten Way Kanan.	Penyelarasan proses bisnis lintas unit (internal) di Pemerintah Kabupaten Way Kanan
3	Keterlibatan stakeholder eksternal pada proses bisnis di Pemerintah Kabupaten Way Kanan belum tergambar dengan lengkap misalnya harmonisasi perumusan kebijakan.	Penggambaran proses bisnis harus mengacu pada referensi SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan stakeholder eksternal secara lengkap.	Penggambaran proses bisnis perlu ditinjau ulang untuk menyelaraskan dengan referensi SPBE Nasional dan menunjukkan keterlibatan stakeholder eksternal secara lengkap.	Penyelarasan proses bisnis lintas instansi (eksternal)
4	Proses bisnis utama yang melibatkan banyak unit belum diotomatisasi dengan teknologi pendukung operasional proses bisnis.	Proses bisnis utama yang melibatkan banyak unit sebaiknya dapat diotomatisasi dengan teknologi pendukung operasional proses bisnis.	Perlu dilakukan kajian dan penerapan teknologi pendukung operasional proses bisnis di Pemerintah Kabupaten Way Kanan	Kajian dan penerapan teknologi pendukung operasional proses bisnis, misalnya: - Aplikasi perumusan kebijakan - Aplikasi helpdesk - Aplikasi SDM

5	Proses bisnis utama yang melibatkan banyak unit belum dianalisis dengan dukungan teknologi analisis proses bisnis.	Proses bisnis utama berpotensi untuk dapat ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan teknologi analisis proses bisnis.	Perlu kajian dan penerapan teknologi pendukung analisis proses bisnis di Pemerintah Kabupaten Way Kanan.	Kajian dan penerapan teknologi pendukung analisis proses bisnis, antara lain: <ul style="list-style-type: none">- Dashboard- Business process analytics- Performance
---	--	---	--	--

BAB IV ARSITEKTUR LAYANAN SPBE

Kabupaten Way Kanan memiliki sasaran pokok tercapainya peningkatan kualitas pelayanan umum terkait semua urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah sehingga tercapai suatu standar pelayanan minimal (SPM). Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Pemerintah Daerah Way Kanan. Di dalam Peraturan Bupati tersebut terdapat target standar pelayanan minimum berupa angka indeks atau statistik yang ingin dicapai sampai tahun 2026 di Kabupaten Way Kanan.

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan implementasi dari strategi pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Way Kanan, SPM digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kategori pelayanan dalam standar pelayanan di lingkungan Kabupaten Way Kanan meliputi:

1. Pengaduan Pelayanan publik
2. Layanan Data Terbuka
3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
4. Layanan Penanaman Modal
5. Layanan Sosial
6. Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
7. Layanan Pendidikan
8. Layanan Kesehatan
9. Layanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10. Layanan Perumahan Dan Permukiman
11. Layanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
12. Layanan Tenaga Kerja
13. Layanan Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
14. Layanan Pangan
15. Layanan Lingkungan Hidup
16. Layanan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
17. Layanan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
18. Layanan Perhubungan
19. Layanan Informasi dan Komunikasi Publik
20. Layanan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
21. Layanan Kepemudaan Dan Olahraga
22. Layanan Kebudayaan
23. Layanan Perpustakaan
24. Layanan Kelautan Dan Perikanan
25. Layanan Pariwisata
26. Layanan Pertanian
27. Layanan Perdagangan
28. Layanan Perindustrian
29. Layanan Transmigrasi
30. Layanan Pendapatan Daerah
31. Layanan Perencanaan
32. Layanan Anggaran
33. Layanan Keuangan
34. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
35. Layanan Kepegawaian
36. Layanan Kearsipan

37. Layanan Pengelolaan Aset
38. Layanan Inspektorat Daerah
39. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
40. Layanan Akuntabilitas Kinerja Pegawai
41. Layanan Penelitian dan Pengembangan
42. Layanan Kesatuan Bangsa dan Politik
43. Layanan Statistik
44. Layanan Persandian
45. Layanan Sekretariat Daerah
46. Layanan Sekretariat DPRD

Sementara, penerapan dari setiap kategori pelayanan tersebut melibatkan dan menjadi tanggung jawab dari setiap unsur terkait di lingkungan Kabupaten Way Kanan, yaitu:

- A1 : Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- B1 : Dinas Komunikasi dan Informatika
- C1 : Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
- D1 : Dinas Sosial
- E1 : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- F1 : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- G1 : RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
- H1 : Dinas Kesehatan
- I1 : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- J1 : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- K1 : Satuan Polisi Pamong Praja
- L1 : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- M1 : Pemadam Kebakaran
- N1 : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- O1 : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- P1 : Dinas Ketahanan Pangan
- Q1 : Dinas Lingkungan Hidup
- R1 : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
- S1 : Dinas Perhubungan
- T1 : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- U1 : Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
- V1h : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
- W1 : Dinas Perikanan
- X1 : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
- Y1 : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Z1 : Badan Pengelola Pendapatan Daerah
- A2 : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- B2 : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- C2 : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- D2 : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
- E2 : Inspektorat
- F2 : Badan Kesatuan bangsa dan politik
- G2 : Sekretariat Daerah
- H2 : Sekretariat DPRD

Tabel 8 Pemetaan Kategori Layanan terhadap Penanggung Jawab

No	Kategori Layanan	Penanggung Jawab																																							
		AI	BI	CI	DI	EI	FI	GI	HI	II	JI	KI	LI	MI	NI	OI	PI	QI	RI	SI	TI	UI	VI	WI	XI	YI	ZI	A2	B2	C2	D2	E2	F2	G2	H2						
1	Pengaduan Pelayanan publik	✓																																							
2	Layanan Data Terbuka	✓																																							
3	Jaringan Dokumentasi dan	✓																																							
4	Layanan Penanaman Modal				✓																																				
5	Layanan Sosial					✓																																			
6	Layanan Administrasi						✓																																		
7	Layanan Pendidikan							✓																																	
8	Layanan Kesehatan								✓	✓																															
9	Layanan Pekerjaan Umum dan										✓																														
10	Layanan Perumahan Dan											✓																													
11	Layanan Ketenteraman Dan											✓	✓																												
12	Layanan Tenaga Kerja													✓																											
13	Layanan Urusan Pemberdayaan																✓																								
14	Layanan Pangan																	✓																							
15	Layanan Lingkungan Hidup																		✓																						
16	Layanan Pemberdayaan Masyarakat																			✓																					
17	Layanan Pengendalian Penduduk															✓																									
18	Layanan Perhubungan																																								
19	Layanan Informasi dan Komunikasi			✓																																					
20	Layanan Koperasi Usaha Kecil Dan																				✓																				
21	Layanan Kepemudaan Dan Olahraga																						✓																		
22	Layanan Kebudayaan						✓																																		
23	Layanan Perpustakaan																							✓																	
24	Layanan Kelautan Dan Perikanan																								✓																
25	Layanan Pariwisata																									✓															
26	Layanan Pertanian																										✓														
27	Layanan Perdagangan																										✓														
28	Layanan Perindustrian																										✓														
29	Layanan Transmigrasi															✓																									
30	Layanan Pendapatan Daerah																												✓												
31	Layanan Perencanaan																													✓											
32	Layanan Anggaran																														✓										
33	Layanan Keuangan																															✓									
34	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa																														✓										
35	Layanan Kepegawaian																																	✓							
36	Layanan Kearsipan																								✓																
37	Layanan Pengelolaan Aset																																								
38	Layanan Inspektorat Daerah																																								
39	Layanan Akuntabilitas Kinerja																																								
40	Layanan Akuntabilitas Kinerja Pegawai																																								
41	Layanan Penelitian dan																																								
42	Layanan Kesatuan Bangsa dan Politik																													✓											
43	Layanan Statistik																																								
44	Layanan Persandian																																								
45	Layanan Sekretariat Daerah																																								
46	Layanan Sekretariat DPRD																																								✓

*Keterangan: Penanggung Jawab Layanan

Di dalam Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2021, standar pelayanan dari setiap kategori layanan yang ada telah didefinisikan secara rinci, terdiri dari:

1. Komponen Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan dasar, terdiri dari (a) Pendidikan; (b) Kesehatan; (c) Pekerjaan Umum; (d) Perumahan dan Permukiman; (e) Ketenteraman, Ketertiban dan Pelayanan dasar; dan (f) Sosial;
2. Komponen Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar, terdiri dari (a) Tenaga Kerja; (b) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (c) Pangan; (d) Pertanahan; (e) Lingkungan Hidup; (f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (i) Perhubungan; (j) Komunikasi dan Informatika; (k) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; (l) Penanaman Modal; (m) Kepemudaan dan Olahraga; (n) Statistik; (o) Kebudayaan; (p) Perpustakaan; dan (q) Kearsipan.
3. Komponen Urusan Pemerintahan Pilihan, terdiri dari (a) Kelautan dan Perikanan; (b) Pariwisata; (c) Pertanian; (d) Perdagangan; (e) Perindustrian; dan (f) Transmigrasi.

Komponen Penunjang Urusan Pemerintahan, terdiri dari (a) Perencanaan; (b) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah; (c) Keuangan; (d) Pengadaan Barang dan Jasa; (e) Kepegawaian; (f) Pengelolaan Barang Milik Daerah; (g) Pengawasan; (h) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; dan (i) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;

4.1 Inisiatif Strategis Layanan SPBE

Inisiatif Strategis SPBE adalah pedoman umum terhadap pelaksanaan SPBE yang selanjutnya diuraikan lebih rinci pada Peta Rencana Kabupaten Way Kanan. Dalam konteks layanan SPBE, inisiatif strategis dikembangkan untuk mewujudkan sasaran layanan SPBE sebagai turunan dari sasaran SPBE secara menyeluruh, seperti ditunjukkan pada Gambar dibawah ini.



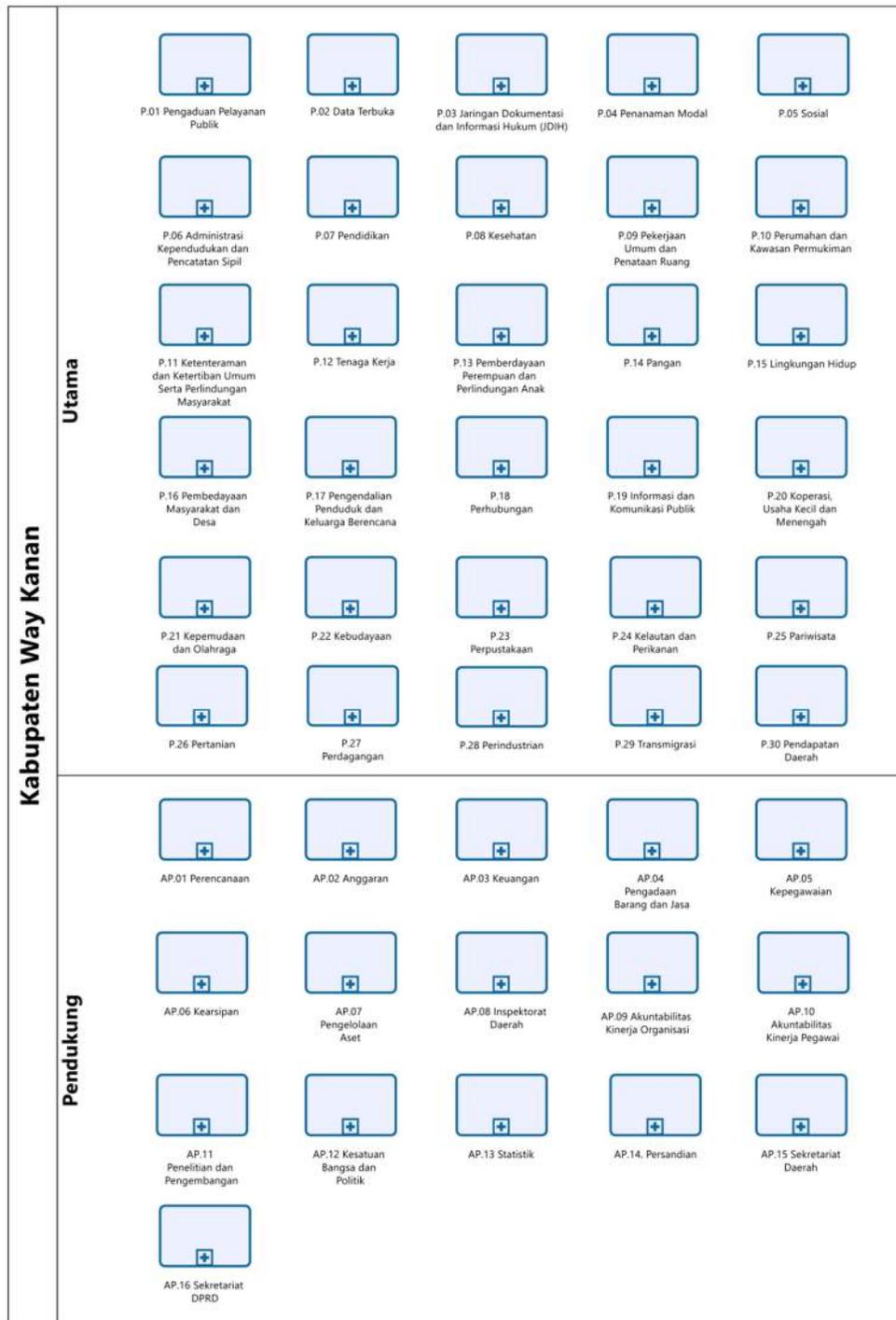
Gambar 57 Inisiatif Sasaran Strategis Layanan SPBE

Inisiatif sasaran strategis layanan SPBE terdiri dari daftar pekerjaan solusi berupa layanan aplikasi pemerintahan yang pelaksanaannya direalisasikan ke dalam tahapan peta jalan dan terkait dengan kapabilitasnya. Daftar pekerjaan solusi adalah kumpulan kapabilitas yang akan datang, yang dapat menjangkau banyak pemangku kepentingan SPBE dan dimaksudkan untuk memajukan solusi dan membangun SPBE. Daftar pekerjaan solusi juga merupakan bagian dari elemen Inisiatif Strategis SPBE, yang mengindikasikan inisiatif strategis bagian dari Layanan Aplikasi Pemerintah. Layanan aplikasi pemerintah di lingkungan Kabupaten Way Kanan telah diterapkan di beberapa proses utama dan pendukungnya, namun untuk menentukan kapabilitas kebutuhan layanan yang akan datang, perlu

diidentifikasi secara rinci dengan melakukan pemetaan terhadap atribut Metadata Arsitektur Layanan SPBE.

4.1.1 Pemetaan Layanan

Pemetaan layanan di Kabupaten Way Kanan berdasarkan proses bisnisnya, seperti dapat dilihat pada Gambar sebelumnya. Hasilnya diperoleh 16 proses pendukung, 30 proses utama. Di dalam 16 proses pendukung terdapat 27 sub proses, sementara di dalam 30 proses utama terdapat 128 sub proses utama. Spesifikasi layanan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang dipetakan terhadap atribut Metadata Arsitektur Layanan SPBE, berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana PermeriPembangunanntah Jangka Menengah Daerah 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini



Gambar 58 Pemetaan Layanan Berdasarkan Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Way Kanan

Tabel 9 Pemetaan Layanan Berdasarkan Proses bisnis Utama Pemerintah Kabupaten Way Kanan

No	Proses Utama	Sub Proses Utama	Perangkat Daerah	Sistem Dukungan	Domain Layanan	Area layanan	Kategori Layanan	Sub kategori Layanan (Rekomendasi)	Penanggung Jawab Layanan	Target Layanan
1.	Pengaduan Pelayanan Publik (P.01)	Pengaduan Pelayanan Publik (P.01.01)	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Span Laporan	Layanan Publik (RL.01)	Informasi (RAL.01.43)	Pelayanan Informasi (RL.01.43.03)	Layanan Pengaduan Pelayanan publik (RL.01.44.02.01)	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Publik
2.	Open Data (P.02)	Data Terbuka (P.02.01)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Open Data Way Kanan	Layanan Publik (RL.01)	Informasi (RAL.01.43)	Pelayanan Informasi (RL.01.43.03)	Layanan Data Terbuka (RL.01.43.03.01)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Publik
3.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (P.03)	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) (P.03.01)	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Way Kanan	Layanan Publik (RL.01)	Informasi (RAL.01.43)	Pelayanan Informasi (RL.01.43.03)	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) (RL.01.43.03.02)	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Publik
4	Penanaman Modal (P.04)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (P.04.01)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Penanaman Modal Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Investasi (RL.01.12)	RL 01.12.03 Pengembangan Sektor Usaha Penanaman Modal	Pengembangan Sektor Usaha Penanaman Modal (RL.01.12.03)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Publik
		Program Promosi Penanaman Modal (P.04.02)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sistem Informasi Manajemen Promosi Penanaman Modal Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Investasi (RL.01.12)	RL 01.12.08 Promosi Penanaman Modal	Promosi Penanaman Modal (RL.01.12.08)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Publik
		Program Pelayanan Penanaman Modal (P.04.03)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sistem Informasi Manajemen Penanaman Modal Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Investasi (RL.01.12)	RL 01.12.04 Penanaman Modal Nasional	Penanaman Modal Nasional (RL.01.12.04)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Publik

		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (P.04.04)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sistem Informasi Pengendalian Penanaman Modal Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Investasi (RL.01.12)	RL 01.12.05 Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (RL.01.12.05)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Publik
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal (P.04.05)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sistem Informasi Penanaman Modal Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Investasi (RL.01.12)	RL 01.12.06 Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal	Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal (RL.01.12.06)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Publik
5	Sosial (P.05)	Program Pemberdayaan Sosial (P.05.01)	Dinas Sosial	Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan Sosial Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Sosial (RL.01.26)	RL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Dinas Sosial	Publik
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (P.05.02)	Dinas Sosial	Sistem Informasi Manajemen Warga Negara Migran korban tindak kekerasan Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Sosial (RL.01.26)	RL 01.26.02 Penanganan Fakir Miskin	Penanganan Fakir Miskin (RL.01.26.02)	Dinas Sosial	Publik
		Program Rehabilitasi Sosial (P.05.03)	Dinas Sosial	Sistem Informasi Manajemen Rehabilitasi Sosial	Layanan Publik (RL.01)	Sosial (RL.01.26)	RL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Dinas Sosial	Publik
		Program Perlindungan Dan Jaminan	Dinas Sosial	Sistem Informasi Perlindungan dan Jaminan	Layanan Publik (RL.01)	Sosial (RL.01.26)	RL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Dinas Sosial	Publik

		Sosial (P.05.04)		Sosial						
		Program Pengelolaan Taman Makam (P.05.05)	Dinas Sosial	Sistem Informasi Manajemen Taman Makam Pahlawan Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	RL 01.40.02 Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem	Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem (RL.01.40.02)	Dinas Sosial	Publik
		Program Penanganan Bencana (P.05.06)	Dinas Sosial	Sistem Informasi Manajemen Penanganan Bencana Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Sosial (RL.01.26)	RL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Dinas Sosial	Publik
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (P.06)	Program Pendaftaran Penduduk (P.06.01)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dashboard Pendaftaran penduduk Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Kependudukan (RL.01.23)	RL 01.23.01 Pengendalian Penduduk	Pengendalian Penduduk (RL.01.23.01)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Publik
		Program Pencatatan Sipil (P.06.02)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Sistem Informasi Pencatatan Sipil Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Kependudukan (RL.01.23)	RL 01.23.03 Pencatatan Sipil	Pencatatan Sipil (RL.01.23.03)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Publik
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (P.06.03)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Sistem Informasi Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Layanan Publik (RL.01)	Kependudukan (RL.01.23)	RL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Kebijakan Kependudukan (RL.01.23.02)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Publik
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan (P.06.04)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Sistem Informasi Pengelolaan Profil Kependudukan dan Catatan Sipil	Layanan Publik (RL.01)	Kependudukan (RL.01.23)	RL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Kebijakan Kependudukan (RL.01.23.02)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Publik

7.	Layanan Pendidikan (P.07)	Pengelolaan Pendidikan (P.07.01)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sistem Informasi Pengelolaan Pendidikan Sekolah (SIPS)	Layanan Publik (RL.01)	Pendidikan (RL.01.31)	RL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Pendidikan Dasar (RL.01.31.03)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Publik
		Pengembangan Kurikulum (P.07.02)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sistem Informasi Manajemen Pembelajaran Pendidikan Sekolah (SIM-PPS)	Layanan Publik (RL.01)	Pendidikan (RL.01.31)	RL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Pendidikan Dasar (RL.01.31.03)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Publik
		Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (P.07.03)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Pendidikan (SIM-PTP)	Layanan Publik (RL.01)	Pendidikan (RL.01.31)	RL 01.31.01 Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (RL.01.31.01)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Publik
		Pengembangan Bahasa Dan Sastra (P.07.04)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Bahasa dan Sastra (SIM-PBS)	Layanan Publik (RL.01)	Pendidikan (RL.01.31)	RL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Pendidikan Dasar (RL.01.31.03)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Publik
8.	Layanan Kesehatan (P.08)	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (P.08.01)	Dinas Kesehatan;RS UD Zainal Abidin Pagar Alam	Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Layanan Publik (RL.01)	Kesehatan (RL.01.25)	RL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat (RL.01.25.02)	Dinas Kesehatan;RSU D Zainal Abidin Pagar Alam	Publik
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan;RS UD Zainal Abidin Pagar Alam	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Layanan Publik (RL.01)	Kesehatan (RL.01.25)	RL 01.25.03 Pemberdayaan Tenaga Kesehatan	Pemberdayaan Tenaga Kesehatan (RL.01.25.03)	Dinas Kesehatan;RSU D Zainal Abidin Pagar Alam	Publik

		Kesehatan (P.08.02)		(SISDMK)						
		Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman (P.08.03)	Dinas Kesehatan	Sistem Informasi Manajemen Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SIMSPA)	Layanan Publik (RL.01)	Kesehatan (RL.01.25)	RL 01.25.01 Farmasi Dan Alat Kesehatan	Farmasi Dan Alat Kesehatan (RL.01.25.01)	Dinas Kesehatan	Publik
		Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (P.08.04)	Dinas Kesehatan	Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Hidup Sehat	Layanan Publik (RL.01)	Kesehatan (RL.01.25)	RL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat (RL.01.25.02)	Dinas Kesehatan	Publik
9.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (P.09)	Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) (P.09.01)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sistem Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	RL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Publik
		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (P.09.02)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sistem Informasi Manajemen Penyediaan Air Minum	Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	RL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Publik
		Pengembangan Dan Pengelolaan Persampahan Regional Terpadu (P.09.03)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sistem Informasi Manajemen Persampahan Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	RL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Publik
		Pengelolaan Dan Pengembangan	Dinas Pekerjaan Umum dan	Sistem Informasi Manajemen	Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	RL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	Sarana Dan Prasarana Strategis	Dinas Pekerjaan Umum dan	Publik

		gan Sistem Air Limbah (P.09.04)	Penataan Ruang	Layanan Pengolahan Air Limbah			(RL.01.17.01)	Penataan Ruang		
		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase (P.09.05)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sistem Informasi Manajemen Drainase	Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	RL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Publik
		Penataan Bangunan Gedung (P.09.06)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sistem Informasi Manajemen Pemukiman Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	RL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Publik
		Penataan Bangunan Dan Lingkungannya (P.09.07)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sistem Informasi Manajemen Bangunan dan Lingkungan	Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	RL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Publik
		Penyelenggaraan Jalan (P.09.08)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sistem Informasi Manajemen Monitoring Jalan	Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	RL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Publik
		Pengembangan Jasa Konstruksi (P.09.09)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sistem Informasi Pengendalian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	RL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Publik
		Penyelenggaraan Penataan Ruang (P.09.10)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Penataan Ruang	Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	RL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Publik

10.	Perumahan dan Kawasan Permukiman (P.10)	Pengembangan Perumahan (P.10.01)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman	Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	RL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Publik
		Kawasan Permukiman (P.10.02)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman	Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	RL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Publik
		Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh (P.10.03)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman	Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	RL 01.20.02 Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Publik
		Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) (P.10.04)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sistem Informasi Prasarana Sarana Utilitas Umum	Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	RL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Publik
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (P.10.05)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sistem Informasi Manajemen Sengketa Tanah Garapan	Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	RL 01.20.02 Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Publik
		Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangun	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sistem Informasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan	Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	RL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Publik

		an (P.10.06)								
		Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee (P.10.07)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah dan Bangunan	Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	RL 01.20.02 Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Publik
		Penetapan Tanah Ulayat (P.10.08)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sistem Informasi Manajemen Tanah Ulayat	Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	RL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Publik
		Pengelolaan Tanah Kosong (P.10.09)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sistem Informasi Penatagunaan Tanah	Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	RL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Publik
		Pengelolaan Izin Membuka Tanah (P.10.10)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah dan Bangunan	Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	RL 01.20.02 Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Publik
		Penatagunaan tanah (P.10.11)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sistem Informasi Penatagunaan Tanah	Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	RL 01.20.02 Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Publik
11.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (P.11)	Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (P.11.01)	Satuan Polisi Pamong Praja	Sistem Informasi Manajemen Ketentraman dan Ketertiban Umum (SIM-KKU)	Layanan Publik (RL.01)	Keamanan (RL.01.29)	RL 01.29.06 Keamanan Dan Ketertiban Umum	Keamanan Dan Ketertiban Umum (RL.01.29.06)	Satuan Polisi Pamong Praja	Publik

		Penanggulangan Bencana (P.11.02)	Badan Penanggulangan Bencana	Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Bencana (SIM-PB)	Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	RL 01.40.06 Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana (RL.01.40.06)	Badan Penanggulangan Bencana	Publik
		Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (P.11.03)	Pemadam Kebakaran	Sistem Informasi Manajemen Kebakaran Terpadu (SIM-KT)	Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	RL 01.40.07 Pencarian Dan Pertolongan	Pencarian Dan Pertolongan (RL.01.40.07)	Pemadam Kebakaran	Publik
12.	Tenaga Kerja (P.12)	Perencanaan Tenaga Kerja (P.12.01)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Tenaga Kerja Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Ketenagakerjaan (RL.01.32)	RL 01.32.02 Pengelolaan Ketenagakerjaan	Pengelolaan Ketenagakerjaan (RL.01.32.02)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Publik
		Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (P.12.02)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Ketenagakerjaan (RL.01.32)	RL 01.32.04 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja (RL.01.32.04)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Publik
		Penempatan Tenaga Kerja (P.12.03)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sistem Informasi Bursa Layanan Kerja Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Ketenagakerjaan (RL.01.32)	RL 01.32.05 Penempatan Tenaga Kerja	Penempatan Tenaga Kerja (RL.01.32.05)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Publik
		Hubungan Industrial (P.12.04)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sistem Informasi Manajemen	Layanan Publik (RL.01)	Ketenagakerjaan (RL.01.32)	RL 01.32.05 Penempatan Tenaga Kerja	Penempatan Tenaga Kerja (RL.01.32.05)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Publik

				Hubungan Industrial Terpadu						
13.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P.13)	Pengarusahaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan (P.13.01)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27)	RAL 01.27.01 Kesetaraan Gender	Kesetaraan Gender (RL.01.27.01)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Publik
		Perlindungan Perempuan (P.13.02)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sistem Informasi Perlindungan Perempuan Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27)	RAL 01.27.03 Perlindungan Hak Perempuan	Perlindungan Hak Perempuan (RL.01.27.03)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Publik
		Peningkatan Kualitas Keluarga (P.13.03)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sistem Informasi Kualitas Keluarga Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27)	RAL 01.27.01 Kesetaraan Gender	Kesetaraan Gender (RL.01.27.01)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Publik
		Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak (P.13.04)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27)	RAL 01.27.02 Perlindungan Anak	Perlindungan Anak (RL.01.27.02)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Publik

		Pemenuhan Hak Anak (PHA) (P.13.05)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sistem Informasi Hak Anak Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27)	RAL 01.27.02 Perlindungan Anak	Perlindungan Anak (RL.01.27.02)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Publik
		Perlindungan Khusus Anak (P.13.06)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sistem Informasi Khusus Anak Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27)	RAL 01.27.02 Perlindungan Anak	Perlindungan Anak (RL.01.27.02)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Publik
14.	Ketahanan Pangan (P.14)	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan (P.14.01)	Dinas Ketahanan Pangan	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Dinas Ketahanan Pangan	Publik
		Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat (P.14.02)	Dinas Ketahanan Pangan	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Dinas Ketahanan Pangan	Publik
		Penanganan Kerawanan	Dinas Ketahanan Pangan	Sistem Informasi Manajemen	Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Dinas Ketahanan Pangan	Publik

		Pangan (P.14.03)		Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu						
		Pengawasan Keamanan Pangan (P.14.04)	Dinas Ketahanan Pangan	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Dinas Ketahanan Pangan	Publik
17.	Lingkungan Hidup (P.15)	Perencanaan Lingkungan Hidup (P.15.01)	Dinas Lingkungan Hidup	Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup	Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	RAL 01.40.02 Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem	Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem (RL.01.40.02)	Dinas Lingkungan Hidup	Publik
		Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup (P.15.02)	Dinas Lingkungan Hidup	Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup	Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Dinas Lingkungan Hidup	Publik
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) (P.15.03)	Dinas Lingkungan Hidup	Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup	Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	RAL 01.40.02 Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem	Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem (RL.01.40.02)	Dinas Lingkungan Hidup	Publik
		Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya	Dinas Lingkungan Hidup	Sistem Informasi Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3)	Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Dinas Lingkungan Hidup	Publik

Dan Beracun (Limbah B3) (P.15.04)								
Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (P.15.05)	Dinas Lingkungan Hidup	Sistem Informasi Manajemen dan Pengawasan Izin Lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Dinas Lingkungan Hidup	Publik
Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH (P.15.06)	Dinas Lingkungan Hidup	Sistem Informasi Manajemen dan Pengawasan Izin Lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Dinas Lingkungan Hidup	Publik
Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Sistem Informasi Manajemen Pelatihan dan Penyuluhan	Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	RAL 01.40.01 Dampak Perubahan Iklim	Dampak Perubahan Iklim (RL.01.40.01)	Dinas Lingkungan Hidup	Publik

		Untuk Masyarakat (P.15.07)								
		Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (P.15.08)	Dinas Lingkungan Hidup	Sistem Informasi Manajemen Penghargaan Lingkungan Hidup	Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Dinas Lingkungan Hidup	Publik
		Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (P.15.09)	Dinas Lingkungan Hidup	Sistem Informasi Manajemen Pengaduan Lingkungan Hidup	Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Dinas Lingkungan Hidup	Publik
		Pengelolaan Persampahan (P.15.10)	Dinas Lingkungan Hidup	Sistem Informasi Manajemen Persampahan Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Dinas Lingkungan Hidup	Publik
16	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P.16)	Penataan Desa (P.16.01)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Sistem Informasi Manajemen dan Penataan Desa	Layanan Publik (RL.01)	Pemerintahan daerah (RL.01.24)	RAL 01.24.02 Otonomi Daerah	Otonomi Daerah (RL.01.24.02)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Publik
		Peningkatan Kerja Sama Desa (P.16.02)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Sistem Informasi Manajemen dan Penataan Desa	Layanan Publik (RL.01)	Pemerintahan daerah (RL.01.24)	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayahan	Administrasi Kewilayahan (RL.01.24.03)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Publik
		Administrasi Pemerintahan Desa (P.16.03)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Sistem Informasi Administrasi Pemerintah Desa	Layanan Publik (RL.01)	Pemerintahan daerah (RL.01.24)	RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RL.01.24.06)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Publik

		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat (P.16.04)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Sistem Informasi Lembaga Masyarakat Desa	Layanan Publik (RL.01)	Pemerintahan daerah (RL.01.24)	RAL 01.24.01 Keikutsertaan Masyarakat	Keikutsertaan Masyarakat (RL.01.24.01)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Publik
17	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P.17)	Pengendalian Penduduk (P.17.01)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Kependudukan (RL.01.23)	RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk	Pengendalian Penduduk (RL.01.23.01)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Publik
		Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) (P.17.02)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Kependudukan (RL.01.23)	RAL 01.23.04 Keluarga Berencana	Keluarga Berencana (RL.01.23.04)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Publik
		Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (P.17.03)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Kependudukan (RL.01.23)	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Kebijakan Kependudukan (RL.01.23.02)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Publik

18	Perhubungan (P.18)	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (ILAJ) (P.18.01)	Dinas Perhubungan	Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Layanan Publik (RL.01)	Transportasi (RL.01.19)	RAL 01.19.02 Pelayanan Transportasi	Pelayanan Transportasi (RL.01.19.02)	Dinas Perhubungan	Publik
19	Komunikasi dan Informatika (P.19)	Informasi Dan Komunikasi Publik (P.19.01)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sistem Informasi Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Layanan Publik (RL.01)	Informasi (RL.01.44)	RAL 01.44.02 Sistem Komunikasi Publik	Sistem Komunikasi Publik (RL.01.44.02)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Publik
		Aplikasi Informatika (P.19.02)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sistem Informasi Pengelolaan Aplikasi Informatika Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Informasi (RL.01.44)	RAL 01.44.02 Sistem Komunikasi Publik	Sistem Komunikasi Publik (RL.01.44.02)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Publik
20	Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah (P.20)	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam (P.20.01)	Dinas Koperasi Umkm Perindustrian Dan Perdagangan	Sistem Informasi Manajemen Simpan Pinjam Koperasi (SIM-SPKOP)	Layanan Publik (RL.01)	Usaha Kecil dan Menengah (RL.01.14)	RAL 01.14.01 Dukungan Bisnis	Dukungan Bisnis (RL.01.14.01)	Dinas Koperasi Umkm Perindustrian Dan Perdagangan	Publik
		Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi (P.20.02)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Layanan Publik (RL.01)	Koperasi (RL.01.13)	RAL 01.13.01 Koperasi Dan Usaha Mikro	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Publik
		Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi (P.20.03)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Sistem Informasi Tingkat Kesehatan Koperasi	Layanan Publik (RL.01)	Koperasi (RL.01.13)	RAL 01.13.01 Koperasi Dan Usaha Mikro	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Publik
		Pendidikan Dan Latihan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Sistem Informasi Manajemen	Layanan Publik (RL.01)	Koperasi (RL.01.13)	RAL 01.13.01 Koperasi Dan Usaha Mikro	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Publik

		Perkoperasian (P.20.04)		Pendidikan dan Pelatihan Koperasi						
		Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi (P.20.05)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Sistem Informasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Layanan Publik (RL.01)	Koperasi (RL.01.13)	RAL 01.13.01 Koperasi Dan Usaha Mikro	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Publik
		Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (P.20.06)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Sistem Informasi Manajemen UMKM (e-UMKM)	Layanan Publik (RL.01)	Usaha Kecil dan Menengah (RL.01.14)	RAL 01.14.01 Dukungan Bisnis	Dukungan Bisnis (RL.01.14.01)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Publik
		Pengembangan Umkm (P.20.07)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Sistem Informasi Manajemen UMKM (e-UMKM)	Layanan Publik (RL.01)	Usaha Kecil dan Menengah (RL.01.14)	RAL 01.14.01 Dukungan Bisnis	Dukungan Bisnis (RL.01.14.01)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Publik
21	Pemuda dan Olahraga (P.21)	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (P.21.01)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan	Layanan Publik (RL.01)	Olahraga (RL.01.35)	RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda	Pemberdayaan Pemuda (RL.01.34.01)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Publik
		Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan (P.21.02)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan	Layanan Publik (RL.01)	Olahraga (RL.01.35)	RAL 01.35.01 Kebijakan Di Bidang Pembudayaan Olahraga	Kebijakan Di Bidang Pembudayaan Olahraga (RL.01.35.01)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Publik
		Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (P.21.03)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan	Layanan Publik (RL.01)	Olahraga (RL.01.35)	RAL 01.35.02 Kebijakan Di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Kebijakan Di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Publik

								(RL.01.35.02)		
22	Kebudayaan (P.22)	Program Pengembangan Kebudayaan (P.22.01)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Layanan Publik (RL.01)	Kebudayaan (RL.01.42)	RAL 01.42.01 Kebijakan Kebudayaan	Kebijakan Kebudayaan (RL.01.42.01)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Publik
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional (P.22.02)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Layanan Publik (RL.01)	Kebudayaan (RL.01.42)	RAL 01.42.02 Perfilman Dan Kesenian	Perfilman Dan Kesenian (RL.01.42.02)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Publik
		Program Pembinaan Sejarah (P.22.03)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Layanan Publik (RL.01)	Kebudayaan (RL.01.42)	RAL 01.42.01 Kebijakan Kebudayaan	Kebijakan Kebudayaan (RL.01.42.01)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Publik
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya (P.22.04)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Layanan Publik (RL.01)	Kebudayaan (RL.01.42)	RAL 01.42.04 Cagar Budaya	Cagar Budaya (RL.01.42.04)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Publik
		Pengelolaan Permuseuman (P.22.05)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Layanan Publik (RL.01)	Kebudayaan (RL.01.42)	RAL 01.42.04 Cagar Budaya	Cagar Budaya (RL.01.42.04)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Publik
23	Perpustakaan (P.23)	Program Pembinaan Perpustakaan (P.23.01)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Sistem Informasi Perpustakaan Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Kebudayaan (RL.01.42)	RAL 01.42.01 Kebijakan Kebudayaan	Kebijakan Kebudayaan (RL.01.42.01)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Publik
		Program Pelestarian Koleksi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sistem Informasi Pelestarian	Layanan Publik (RL.01)	Kebudayaan (RL.01.42)	RAL 01.42.03 Sastra Dan Bahasa Indonesia	Sastra Dan Bahasa Indonesia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Publik

		Nasional Dan Naskah Kuno (P.23.02)	Daerah	Koleksi dan Naskah Terpadu				(RL.01.42.03)	Daerah	
24	Kelautan dan Perikanan (P.24)	Pengelolaan Perikanan Tangkap (P.24.01)	Dinas Perikanan	Sistem Informasi Manajemen Perikanan Tangkap	Layanan Publik (RL.01)	Perikanan (RL.01.10)	RAL 01.10.01 Perikanan Budi Daya	Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)	Dinas Perikanan	Publik
		Pengelolaan Perikanan Budidaya (P.24.02)	Dinas Perikanan	Sistem Informasi Manajemen Perikanan Budidaya	Layanan Publik (RL.01)	Perikanan (RL.01.10)	RAL 01.10.01 Perikanan Budi Daya	Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)	Dinas Perikanan	Publik
		Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (P.24.03)	Dinas Perikanan	Sistem Informasi Manajemen Perikanan Budidaya	Layanan Publik (RL.01)	Perikanan (RL.01.10)	RAL 01.10.01 Perikanan Budi Daya	Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)	Dinas Perikanan	Publik
		Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (P.24.04)	Dinas Perikanan	Sistem Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Layanan Publik (RL.01)	Perikanan (RL.01.10)	RAL 01.10.01 Perikanan Budi Daya	Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)	Dinas Perikanan	Publik
25	Pariwisata (P.25)	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (P.25.01)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Sistem Informasi Pariwisata Terpadu (e-Pariwisata)	Layanan Publik (RL.01)	Pariwisata (RL.01.15)	RAL 01.15.01 Pengembangan Kepariwisata	Pengembangan Kepariwisata (RL.01.15.01)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Publik

		Pemasaran Pariwisata (P.25.02)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Sistem Informasi Pariwisata Terpadu (e-Pariwisata)	Layanan Publik (RL.01)	Pariwisata (RL.01.15)	RAL 01.15.02 Pengembangan Lembaga Kepariwisataaan	Pengembangan Lembaga Kepariwisataaan (RL.01.15.02)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Publik
		Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (P.25.03)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Sistem Informasi Manajemen Ekonomi Kreatif	Layanan Publik (RL.01)	Pariwisata (RL.01.15)	RAL 01.15.03 Pengembangan Objek Wisata	Pengembangan Objek Wisata (RL.01.15.03)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Publik
		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (P.25.04)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Sistem Informasi Manajemen Pelatihan	Layanan Publik (RL.01)	Pariwisata (RL.01.15)	RAL 01.15.03 Pengembangan Objek Wisata	Pengembangan Objek Wisata (RL.01.15.03)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Publik
26	Pertanian (P.26)	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (P.26.01)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan	Layanan Sarana Produksi Pertanian (e-Saprotan)	Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	RAL 01.07.01 Pertanian	Pertanian (RL.01.07.01)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan	Publik

	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian (P.26.02)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Layanan Sarana Produksi Pertanian (e-Saprotan)	Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	RAL 01.07.01 Pertanian	Pertanian (RL.01.07.01)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Publik
	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (P.26.03)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Layanan e-Halo MedikVet	Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	RAL 01.07.01 Pertanian	Pertanian (RL.01.07.01)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Publik
	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian (P.26.04)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan	Layanan Asuransi (e-Asuransi)	Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	RAL 01.07.01 Pertanian	Pertanian (RL.01.07.01)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan	Publik
	Perizinan Usaha Pertanian (P.26.05)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Sistem Informasi Perizinan Usaha Tani (e-SIPUT)	Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	RAL 01.07.01 Pertanian	Pertanian (RL.01.07.01)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Publik

		Penyuluhan Pertanian (P.26.06)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan	Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (Simluhtan)	Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	RAL 01.07.01 Pertanian	Pertanian (RL.01.07.01)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan	Publik
27	Perdagangan (P.27)	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (P.27.01)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sistem Informasi Perizinan Perusahaan Terpadu	Layanan Publik (RL.01)	Perdagangan (RL.01.06)	RAL 01.06.04 Perdagangan Domestik	Perdagangan Domestik (RL.01.06.04)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Publik
		Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (P.27.02)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sistem Informasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Layanan Publik (RL.01)	Perdagangan (RL.01.06)	RAL 01.06.04 Perdagangan Domestik	Perdagangan Domestik (RL.01.06.04)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Publik
		Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (P.27.03)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Perdagangan	Layanan Publik (RL.01)	Perdagangan (RL.01.06)	RAL 01.06.04 Perdagangan Domestik	Perdagangan Domestik (RL.01.06.04)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Publik
		Pengembangan Ekspor (P.27.04)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sistem Informasi Ekspor Way Kanan	Layanan Publik (RL.01)	Perdagangan (RL.01.06)	RAL 01.06.01 Ekspor Dan Impor	Ekspor Dan Impor (RL.01.06.01)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Publik

		Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (P.27.05)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sistem Informasi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	Layanan Publik (RL.01)	Perdagangan (RL.01.06)	RAL 01.06.05 Perlindungan Konsumen	Perlindungan Konsumen (RL.01.06.05)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Publik
		Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P.27.06)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sistem Informasi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	Layanan Publik (RL.01)	Perdagangan (RL.01.06)	RAL 01.06.02 Penggunaan Produk Dalam Negeri	Penggunaan Produk Dalam Negeri (RL.01.06.02)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Publik
28	Perindustrian (P.28)	Perencanaan Dan Pembangunan Industri (P.28.01)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sistem Informasi Perencanaan dan Pembagunan Industri (SIPPI)	Layanan Publik (RL.01)	Industri (RL.01.05)	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri	Pengembangan Industri (RL.01.05.08)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Publik
		Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota (P.28.02)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sistem Informasi Perencanaan dan Pembagunan Industri (SIPPI)	Layanan Publik (RL.01)	Industri (RL.01.05)	RAL 01.05.10 Pengembangan Industri Strategis	Pengembangan Industri Strategis (RL.01.05.10)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Publik
		Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (P.28.03)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Layanan Publik (RL.01)	Industri (RL.01.05)	RAL 01.05.06 Ketahanan Industri	Ketahanan Industri (RL.01.05.06)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Publik

29	Transmigrasi (P.29)	Perencanaan kawasan Transmigrasi (P.29.01)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT)	Layanan Publik (RL.01)	Transmigrasi (RL.01.18)	RAL.01.18.01 Layanan Transmigrasi	Layanan Transmigrasi (RL.01.18.01)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Publik
		Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P.29.02)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT)	Layanan Publik (RL.01)	Transmigrasi (RL.01.18)	RAL.01.18.01 Layanan Transmigrasi	Layanan Transmigrasi (RL.01.18.01)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Publik
30	Pendapatan Daerah (P.30)	Pengelolaan Keuangan Daerah (P.30.01)	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Keuangan (RL.02.02)	RAL 02.02.01 Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara	Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara (RL.02.02.01)	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Publik
		Pengelolaan Pendapatan Daerah (P.30.02)	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIM-PD)	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Keuangan (RL.02.02)	RAL 02.02.01 Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara	Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara (RL.02.02.01)	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Publik

Tabel 10 Pemetaan Layanan Berdasarkan Proses bisnis Pendukung Pemerintah Kabupaten Way Kanan

No	Proses Pendukung	Sub Proses Pendukung	Perangkat Daerah	Sistem Dukungan	Domain Layanan	Area layanan	Kategori Layanan	Sub kategori Layanan (Rekomendasi)	Penanggung Jawab Layanan	Target Layanan
1.	Perencanaan (AP.01)	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (AP.01.01)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Perencanaan Pembangunan Nasional (RL.02.03)	Penyusunan Perencanaan (RL.02.03.02)	Layanan Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (RL.02.03.02.01)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (AP.01.02)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Perencanaan Pembangunan Nasional (RL.02.03)	Koordinasi Perencanaan (RL.02.03.03)	Layanan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RL.02.03.03.01)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah
2.	Anggaran (AP.02)	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD (AP.02.01)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Daerah	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Keuangan (RL.02.02)	Penganggaran (RL.02.02.04)	Layanan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD (RL.02.02.04.01)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah
3.	Keuangan (AP.03)	Pengelolaan Keuangan Daerah (AP.03.01)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Keuangan (RL.02.02)	Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara (RL.02.02.01)	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah (RL.02.02.01.01)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah

4.	Pengadaan Barang dan Jasa (AP.04)	Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa (AP.04.01)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Dukungan operasional organisasi (RL.02.06)	Penyelenggaraa n Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RL.02.02.08)	Layanan Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa (RL.02.02.08.01)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Satuan Kerja Perangkat Daerah
		Pengadaan Secara Elektronik (AP.04.02)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Dukungan operasional organisasi (RL.02.06)	Penyelenggaraa n Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RL.02.02.08)	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (RL.02.02.08.02)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Satuan Kerja Perangkat Daerah
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan (AP.04.03)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sistem informasi Pembinaan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Dukungan operasional organisasi (RL.02.06)	Penyelenggaraa n Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RL.02.02.08)	Layanan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan (RL.02.02.08.03)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Satuan Kerja Perangkat Daerah
5.	Kepegawaian Daerah (AP.05)	Kepegawaian Daerah (AP.05.01)	Badan Kepegawaia n dan Pengembangan Sumberday a Manusia	MySAPK	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Aparatur Negara (RL.02.04)	Manajemen ASN (RL.02.04.01)	Layanan Kepegawaian Daerah (RL.02.04.01.01)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Satuan Kerja Perangkat Daerah
6.	Kearsipan (AP.06)	Pengelolaan Arsip (AP.06.01)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Sistem Informasi Kearsipan Terpadu	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Data dan Informasi Pemerintah (RL.02.09)	Dukungan Kearsipan (RL.02.06.18)	Layanan Pengelolaan Arsip (RL.02.06.18.01)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah
		Perlindungan dan Penyelematan Arsip (AP.06.02)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Sistem Informasi Perizinan Penggunaan Arsip	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Data dan Informasi Pemerintah (RL.02.09)	Dukungan Kearsipan (RL.02.06.18)	Layanan Perlindungan dan Penyelematan Arsip (RL.02.06.18.02)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah

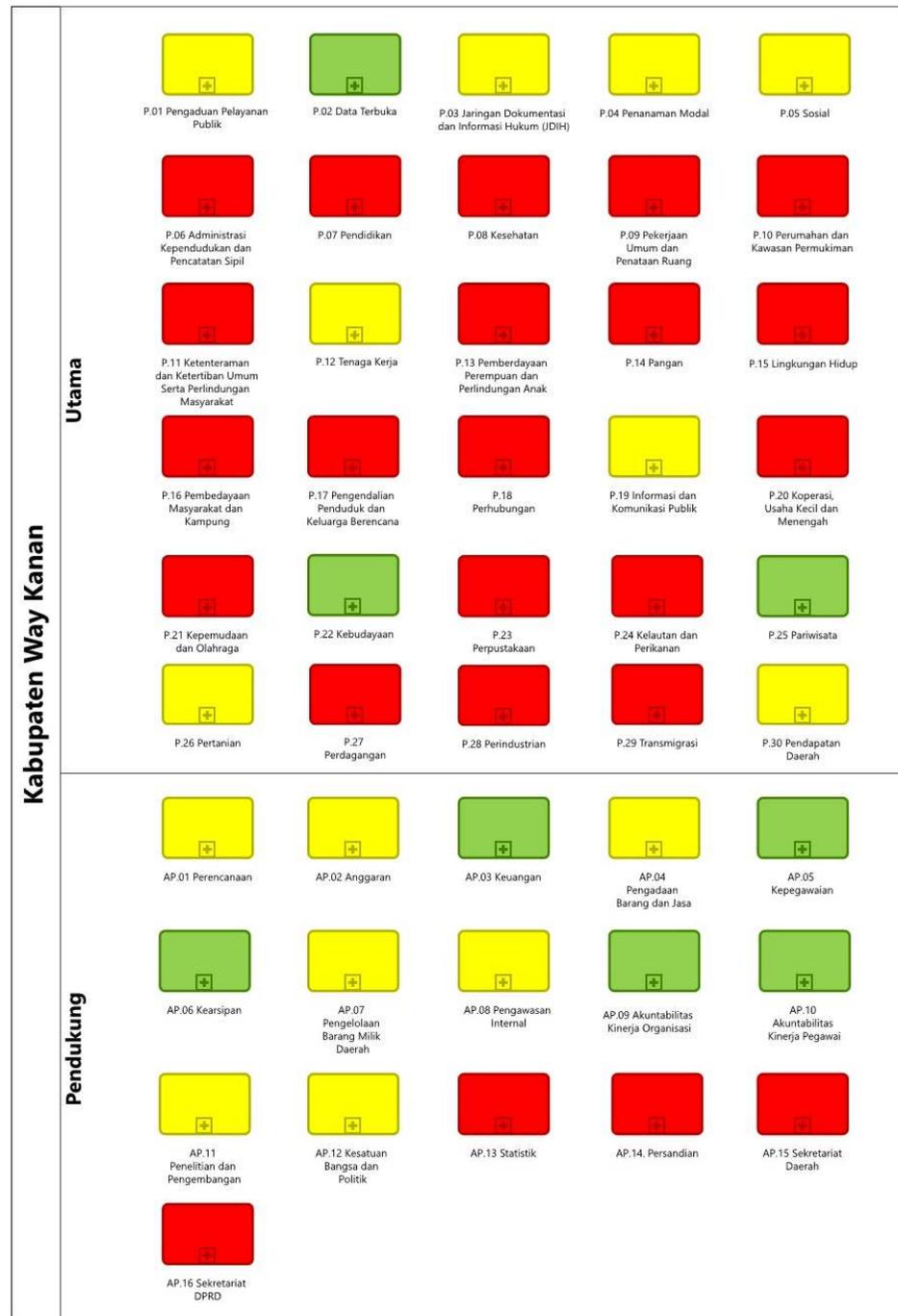
7.	Pengelolaan Barang Milik Daerah (AP.07)	Pengelolaan Barang Milik Daerah (AP.07.01)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Keuangan (RL.02.02)	Pengelolaan Barang Milik Negara (RL.02.02.05)	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah (RL.02.02.05.01)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah
8.	Pengawasan Internal (AP.08)	Penyelenggaraan Pengawasan (AP.08.01)	Inspektorat	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIM-Pengawasan)	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Akuntabilitas Kinerja (RL.02.07)	Pengawasan Kinerja (RL.02.07.02)	Layanan Penyelenggaraan Pengawasan (RL.02.07.02.01)	Inspektorat	Satuan Kerja Perangkat Daerah
		Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi (AP.08.02)	Inspektorat	Sistem Informasi Komunikasi dan Asistensi Pimpinan	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Akuntabilitas Kinerja (RL.02.07)	Pengawasan Kinerja (RL.02.07.02)	Layanan Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi (RL.02.07.02.02)	Inspektorat	Satuan Kerja Perangkat Daerah
9.	Akuntabilitas Kinerja Organisasi (AP.09)	Akuntabilitas Kinerja Organisasi (AP.09.01)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (e-SAKIP)	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Akuntabilitas Kinerja (RL.02.07)	Pengawasan Kinerja (RL.02.07.02)	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (RL.02.07.02.03)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Satuan Kerja Perangkat Daerah
10.	Akuntabilitas Kinerja Pegawai (AP.10)	Pengembangan Sumber Daya Manusia (AP.10.01)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	e-Kinerja	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Aparatur Negara (RL.02.04)	Pendidikan Dan Pelatihan Keahlian (RL.02.04.03)	Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia (RL.02.04.03.01)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Satuan Kerja Perangkat Daerah
11.	Penelitian dan Pengembangan (AP.11)	Penelitian dan Pengembangan Daerah (AP.11.01)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (SIPPD)	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Organisasi dan Tata Kelola (RL.02.08)	Pengendalian Sumber Daya Kerja Sama (RL.02.08.08)	Penelitian dan Pengembangan Daerah (RL.02.08.08.01)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah

12.	Kesatuan Bangsa dan Politik (AP.12)	Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (AP.12.01)	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Publik	Layanan Publik (RL.01)	Kenegaraan (RL.01.03)	Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)	Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (RL.01.03.02.01)	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Satuan Kerja Perangkat Daerah
		Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (AP.12.02)	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Sistem Informasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Layanan Publik (RL.01)	Kenegaraan (RL.01.03)	Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (RL.01.03.02.02)	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Satuan Kerja Perangkat Daerah
		Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (AP.12.03)	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Sistem Informasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Layanan Publik (RL.01)	Kenegaraan (RL.01.03)	Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (RL.01.03.02.03)	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Satuan Kerja Perangkat Daerah
		Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya (AP.12.04)	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Sistem Informasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Layanan Publik (RL.01)	Kenegaraan (RL.01.03)	Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya (RL.01.03.02.04)	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Satuan Kerja Perangkat Daerah
		Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (AP.12.05)	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Layanan Publik (RL.01)	Kenegaraan (RL.01.03)	Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (RL.01.03.02.05)	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Satuan Kerja Perangkat Daerah

13.	Statistik (AP.13)	Statistik Sektoral (AP.13.01)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sistem Informasi Statistik Sektoral	Layanan Publik (RL.01)	Informasi (RL.01.44)	Statistik Sektoral (RL.02.09.06)	Layanan Statistik Sektoral (RL.02.09.06.01)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Satuan Kerja Perangkat Daerah
14.	Persandian (AP.14)	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (AP.14.01)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sistem Informasi Manajemen Persandian Terpadu	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Data dan Informasi Pemerintah (RL.02.09)	Pengelolaan Sistem Informasi (RL.02.09.04)	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (RL.02.09.04.01)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Satuan Kerja Perangkat Daerah
15.	Sekretariat Daerah (AP.15)	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (AP.15.01)	Sekretariat Daerah	Sistem Informasi Kesejahteraan Rakyat Terpadu	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Aparatur Negara (RL.02.04)	Penyelenggaraan Pelayanan Publik (RL.02.04.08)	Layanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (RL.02.04.08.01)	Sekretariat Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah
		Perekonomian dan Pembangunan (AP.15.02)	Sekretariat Daerah	Sistem Informasi Perekonomian dan pembangunan Terpadu	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Aparatur Negara (RL.02.04)	Penyelenggaraan Pelayanan Publik (RL.02.04.08)	Layanan Perekonomian dan Pembangunan (RL.02.04.08.02)	Sekretariat Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah
		Layanan Pengelolaan Izin Lokasi (AP.15.03)	Sekretariat Daerah	Sistem Informasi Pengelolaan Izin	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Aparatur Negara (RL.02.04)	Penyelenggaraan Pelayanan Publik (RL.02.04.08)	Layanan Pengelolaan Izin Lokasi (RL.02.04.08.03)	Sekretariat Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah
16.	Sekretariat DPRD (AP.16)	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (AP.16.01)	Sekretariat DPRD	Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (SIM Petuksi DPRD)	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Aparatur Negara (RL.02.04)	Penyelenggaraan Pelayanan Publik (RL.02.04.08)	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (RL.02.04.08.04)	Sekretariat DPRD	Satuan Kerja Perangkat Daerah

4.1.2 Analisis Kesenjangan

Berdasarkan hasil pemetaan layanan Kabupaten Way Kanan terhadap kebutuhan Metadata Arsitektur SPBE, diperoleh keadaan yang menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa proses bisnis perlu peningkatan optimalisasi dukungan menggunakan aplikasi terintegrasi, diantaranya adalah (a) Pengaduan Pelayanan Publik (P.01.01), (b) Open Data (P.02.01), (c) Alokasi Anggaran Belanja APBD (AP.02.01), (d) Pengadaan Barang dan Jasa (AP.04), Penanaman Modal (P.04), Perlindungan dan Jaminan Sosial (P.05.04), Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (P.06.03), Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P.07.03), Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (P.12.02). Gambar dibawah ini menunjukkan deskripsi keadaan layanan saat ini di lingkungan Kabupaten Way Kanan. Kabupaten Way Kanan baru berfokus pada proses pendukung (AP.03, AP.05, AP.06, AP.09, AP.10) dan proses utama (P.02.01, P.22.04, P.25.01, P.25.02, P.26.03, P.26.04) ditandai dengan warna hijau, sementara memerlukan perhatian dan atau pengembangan pada proses pendukung (AP.01, AP.02, AP.04, AP.07, AP.08, AP.12) dan proses utama (P.01.01, P.03.01, P.05.04, P.12.02, P.19.01, P.26.01, P.26.02, P.26.05, P.26.06, P.30.01, P.30.02) diberi tanda kuning, dan warna merah menandakan area layanan yang belum didukung, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Powered by
 Modeler

Gambar 59 Keadaan Layanan di Pemerintah Kabupaten Way Kanan

Pada proses utama Pengaduan Layanan Publik (P.01) perlu diperbaiki dan ditingkatkan penggunaannya karena proses masih berjalan secara manual melalui Call Center, Sementara pada proses Open Data (P.02) menjadi perhatian khusus karena proses ini menyediakan data dan informasi untuk publik dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) (P.03), yang perlu integrasi antara JDIH Pusat dengan JDIH Provinsi Lampung karena ini adalah sumber masyarakat mencari Dokumentasi Hukum. Pertimbangan ini dilatarbelakangi bahwa proses P.01 dan P.02 termasuk inti proses di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Begitu juga dengan proses pendukung AP.01 sampai dengan AP.16 perlu dilakukan peninjauan untuk penyelarasan dengan kebutuhan pengembangan Arsitektur Layanan SPBE. Pemerintah Kabupaten Way Kanan memiliki sistem pendukung berupa kelompok aplikasi yang difungsikan secara

terpisah. Sistem dan aplikasi-aplikasi tersebut dikembangkan oleh lebih dari satu pengembang, yang meliputi internal maupun oleh pengembang pihak ketiga. Aktivitas pengembangannya dibuat atas dasar kebutuhan atau permintaan masing-masing unit kerja, sehingga berdampak pada sistem dan aplikasi tersebut dibuat dalam berbagai platform, dan belum memiliki sistem penghubung layanan yang berfungsi untuk komunikasi dan interaksi antar aplikasi baik dalam pertukaran data maupun layanan.

Keadaan ini menjadikan berbagai sistem tersebut berdiri sendiri (stove-pipe), sehingga layanan yang diberikan untuk fungsionalitas setiap unit kerja belum terintegrasi. Pengguna layanan harus berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya dengan prosedur dan validasi yang harus dilakukan beberapa kali. Dampak dari kondisi ini juga menyebabkan kesulitan pada saat akan dilakukan pengembangan sistem, dan pada akhirnya sebagian besar proses utama dan pendukung bisnis tidak mendapat dukungan dari penerapan layanan TI. Tabel dibawah ini Pemetaan Layanan Berdasarkan Proses bisnis Utama Pemerintah Kabupaten Way Kanan mendeskripsikan keadaan layanan pada area proses bisnis Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang dipetakan terhadap kebutuhan Metadata arsitektur SPBE.

Tabel 11 Keadaan Layanan Berdasarkan Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Way Kanan

Nama Proses	Nama Sub Proses	Sistem Pendukung	Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Sub Kategori Layanan	Penanggung Jawab Layanan
Pengaduan Pelayanan Publik	Pengaduan Pelayanan Publik						
Data Terbuka	Data Terbuka						
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum						
Layanan Penanaman Modal	Pengembangan Iklim Penanaman Modal						
	Promosi Penanaman Modal						
	Pelayanan Penanaman Modal						
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal						
	Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal						
Layanan Sosial	Pemberdayaan Sosial						
	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan						
	Rehabilitasi Sosial						
	Perlindungan Dan Jaminan Sosial						
	Pengelolaan Taman Makam						
	Penanganan						

	Bencana						
Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pendaftaran Penduduk						
	Pencatatan Sipil						
	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
	Pengelolaan Profil Kependudukan						
Layanan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan						
	Pengembangan Kurikulum						
	Pendidik Dan Tenaga Kependidikan						
	Pengembangan Bahasa Dan Sastra						
Layanan Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						
	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan						
	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman						
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						
Layanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)						
	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum						
	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional						
	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah						
	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase						
	Penataan Bangunan Gedung						
	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya						
	Penyelenggaraan Jalan						
	Pengembangan Jasa Konstruksi						
	Penyelenggaraan Penataan Ruang						

Layanan Perumahan Dan Permukiman	Pengembangan Perumahan							
	Kawasan Permukiman							
	Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh							
	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)							
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan							
	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan							
	Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee							
	Penetapan Tanah Ulayat							
	Pengelolaan Tanah Kosong							
	Pengelolaan Izin Membuka Tanah							
	Penatagunaan tanah							
	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum						
		Penanggulangan Bencana						
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran								
Layanan Tenaga Kerja	Perencanaan Tenaga Kerja							
	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja							
	Penempatan Tenaga Kerja Hubungan Industrial							
Layanan Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Pengarusatamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan							
	Perlindungan Perempuan							
	Peningkatan Kualitas Keluarga							
	Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak							
	Pemenuhan Hak							

	Anak(PHA)						
	Perlindungan Khusus Anak						
Layanan Pangan	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan						
	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat						
	Penanganan Kerawanan Pangan						
	Pengawasan Keamanan Pangan						
Layanan Lingkungan Hidup	Perencanaan Lingkungan Hidup						
	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup						
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)						
	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)						
	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)						
	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH						
	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat						
	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat						
	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup						
	Pengelolaan Persampahan						

Layanan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Penataan Desa						
	Peningkatan Kerja Sama Desa						
	Administrasi Pemerintahan Desa						
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat						
Layanan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk						
	Pembinaan Keluarga Berencana(Kb)						
	Pemberdayaan Dan Penigkatan Keluarga Sejahtera(KS)						
Layanan Perhubungan	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (ILAJ)						
Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Informasi Dan Komunikasi Publik						
	Aplikasi Informatika						
Layanan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam						
	Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi						
	Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi						
	Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian						
	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi						
	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro						
	Pengembangan Umkm						
Layanan Kepemudaan Dan Olahraga	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan						
	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan						
	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan						
	Pengembangan Kebudayaan						
Layanan Kebudayaan	Pengembangan Kesenian						

	Tradisional						
	Pembinaan Sejarah						
	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya						
	Pengelolaan Permuseuman						
Layanan Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan						
	Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno						
Layanan Kelautan Dan Perikanan	Pengelolaan Perikanan Tangkap						
	Pengelolaan Perikanan Budidaya						
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan						
	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan						
Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata						
	Pemasaran Pariwisata						
	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual						
	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif						
Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian						
	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian						
	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						
	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian						
	Perizinan Usaha Pertanian						
	Penyuluhan Pertanian						
Perdagangan	Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan						

	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan						
	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting						
	Pengembangan Ekspor						
	Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen						
	Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri						
Perindustrian	Perencanaan Dan Pembangunan Industri						
	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota						
	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional						
Transmigrasi	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi						
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi						
Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah						
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah						
Perencanaan	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah						
Anggaran	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD						
Keuangan	Pengelolaan Keuangan Daerah						
Pengadaan Barang dan Jasa	Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa						
	Pengadaan Secara Elektronik						
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan						
Kepegawaian	Kepegawaian Daerah						

Kearsipan	Pengelolaan Arsip						
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip						
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah						
Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan						
	Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi						
Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Akuntabilitas Kinerja Organisasi						
Akuntabilitas Kinerja Pegawai	Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Daerah						
Kesatuan Bangsa dan Politik	Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						
	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik						
	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						
	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya						
	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial						
Statistik	Statistik Sektoral						
Persandian	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi						
Sekretariat Daerah	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						
	Perekonomian dan Pembangunan						
	Layanan Pengelolaan Izin Lokasi						

Sekretariat DPRD	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD						
------------------	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan:

	: Perlu optimalisasi		:Perlu Penyesuaian/Perbaikan		: Sudah Didukung
--	----------------------	--	------------------------------	--	------------------

Sel warna merah mendeskripsikan perlu optimalisasi didukung kebutuhan arsitektur layanan SPBE, sel warna kuning mendeskripsikan perlunya upaya penyesuaian atau perbaikan, dan sel warna hijau mendeskripsikan sudah terpenuhinya kebutuhan arsitektur layanan SPBE. Pemenuhan domain dan area layanan sebagai struktur tingkat 1, 2 dan 3 referensi arsitektur tingkat nasional telah terdefinisi untuk setiap kebutuhan layanan di Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Sementara, kebutuhan kategori layanan sebagai struktur tingkat 3 IPPD didefinisikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Way Kanan. Namun, kategori layanan dalam Perda tersebut belum mencakup semua kategori layanan yang dibutuhkan dalam setiap proses bisnis yang ada. Terdapat 89 sub proses utama yang belum didukung yaitu P.02.01, P.04.01, P.04.02, P.04.03, P.05.01, P.05.02, P.05.03, P.05.04, P.06.01, P.06.02, P.06.03, P.06.04, P.06.05, P.06.06, P.06.07, P.06.08, P.06.09, P.06.10, P.07.01, P.07.02, P.07.03, P.08.01, P.08.02, P.08.03, P.09.01, P.09.02, P.09.03, P.09.04, P.09.05, P.11.01, P.11.02, P.11.03, P.11.04, P.11.05, P.12.01, P.12.02, P.12.03, P.12.04, P.13.01, P.13.02, P.13.03, P.14.01, P.14.02, P.14.03, P.14.04, P.14.05, P.14.06, P.14.07, P.14.08, P.14.09, P.14.10, P.18.01, P.18.02, P.19.01, P.19.02, P.19.03, P.20.01, P.20.02, P.21.01, P.21.02, P.21.03, P.22.01, P.22.02, P.22.03, P.22.04, P.24.01, P.24.02, P.24.03, P.25.01, P.25.02, P.25.03, P.25.04, P.27.01, P.27.02, P.27.03, P.27.04, P.28.01, P.28.02, P.29.01, P.30.01, P.30.02 dan 4 sub proses pendukung belum didukung yaitu AP.07.01, AP.08.01, AP.09.01, AP.09.02.

Hal Pendefinisian sub kategori layanan ini dapat dilakukan dengan menetapkan dukungan kinerjanya dan penurunan hambatannya (*utility*), serta pendefinisian komponen asetnya (*service assets*). Kebutuhan ini dapat diwujudkan melalui pengklasifikasian layanan untuk menetapkan metadata dan tipe layanan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang dapat memenuhi seluruh fungsi yang ada di organisasi secara terintegrasi. Penetapan model ini akan dibahas pada bagian metadata dan tipe layanan dalam laporan ini.

Berdasarkan hasil analisis kesenjangan yang telah teridentifikasi, maka daftar pekerjaan solusi sebagai kumpulan kapabilitas ke depan yang dapat menjangkau banyak pemangku kepentingan SPBE, serta dimaksudkan untuk memajukan solusi dan membangun SPBE di Pemerintah Kabupaten Way Kanan adalah:

1. Pada Proses P.01 perlu direncanakan penyediaan layanan untuk pengaduan sebagai area layanan public yang bisa di akses semua masyarakat kabupaten Way Kanan.
2. Pada proses P.02, Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebaiknya membuka layanan Open Data yang bertugas untuk memberikan data berupa data statistic maupun data spasial kepada masyarakat yang membutuhkan data untuk pengetahuan dan lainnya.

3. Pada proses AP.10 dapat dikembangkan layanan Evaluasi Kinerja untuk mengukur dan mengevaluasi capaian yang sudah diperoleh melalui berbagai macam isian dan survei terhadap Kinerja Perangkat daerah tersebut.
4. Pemenuhan kategori dan sub kategori layanan sebagai struktur tingkat 3 dan 4 referensi arsitektur SPBE tingkat IPPD, dapat diidentifikasi melalui penetapan dukungan kinerja dan penurunan hambatan (*utility*), serta pengelolaan tingkat layanan (*warranty*), termasuk kebutuhan komponen asetnya (*service assets*).

Setiap ragam layanan yang ada pada proses utama dan pendukung, perlu dilakukan pengelompokan atau klasifikasi yang benar sesuai dengan struktur arsitektur layanan SPBE. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses evaluasi terhadap layanan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang didukung oleh sistem secara keseluruhan yang berada pada domain aplikasi SPBE. Selain itu, juga dapat menghilangkan duplikasi melalui berbagi pakai aplikasi dalam penyediaan layanan yang ada antar instansi berdasarkan domain proses bisnisnya masing-masing, serta perlunya ketersediaan sistem perbaikan versi layanan untuk kebutuhan layanan masa depan.

4.1.3 Metadata dan Tipe Layanan

Kapabilitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh elemen struktur aktif, seperti organisasi, orang, ataupun sistem yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk keberhasilan realisasi Layanan SPBE secara digital. Kapabilitas layanan diwujudkan dengan pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan. Bentuk konkretnya berupa klasifikasi dan identifikasi layanan berdasarkan proses utama dan pendukung di Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk mendefinisikan basis berupa kebutuhan aplikasi, fungsi aplikasi dan komponen aplikasi atau dukungan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Target dari hasil akumulasi setiap elemen dalam tahapan peta jalan adalah dapat terealisasinya Visi, Misi SPBE, arah kebijakan SPBE, tujuan SPBE, dan sasaran SPBE sebagai acuan kapabilitas serta mempengaruhi inisiatif strategis, yang berujung pada (a) Layanan Publik dan (b) Layanan Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan Cetak Biru (Blue Print) Aplikasi SPBE yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kapabilitas layanan SPBE memerlukan kombinasi organisasi dan aset yang berbeda. seperti SDM, proses, dan teknologi untuk dicapai, sehingga dapat mewujudkan tujuannya. Kapabilitas SPBE kemudian direalisasikan oleh komponen teknis yang bersifat lebih konkret. Adapun konteks penyediaan layanan di Pemerintah Kabupaten Way Kanan, kebutuhan ini dapat didefinisikan melalui pemetaan unsur organisasi dan asetnya secara rinci dan menyeluruh dalam Daftar Pekerjaan Solusi sebagai Inisiatif Strategis layanan SPBE.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan No.2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026, kategori layanan dalam standar pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan meliputi beberapa kategori, sehingga perlu dibuat kodifikasi yang disesuaikan dengan proses bisnisnya dan referensi arsitektur layanan SPBE Nasional. Rekomendasi kodifikasi layanan Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebagai penamaan konfigurasi layanan SPBE adalah sebagai berikut:

Tabel dibawah ini menunjukkan metadata layanan Pemerintah Kabupaten Way Kanan berdasarkan tingkatan struktur domain arsitektur layanan SPBE. Entitas metadata ini berisi informasi mengenai luaran atau hasil dari sebuah/beberapa urusan pemerintahan sebagai induknya. Entitas metadata arsitektur layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Way Kanan berhubungan dengan arsitektur aplikasi SPBE sebagai perangkat yang memberikan layanan tersebut.

Tabel 12 Metadata Arsitektur Layanan Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan

Kategori Layanan	ID Layanan	Nama Layanan (sub Kategori)	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	Metadata Terkait
Kenegaraan (RL.01.03)	01.03.01	Kelembagaan Negara	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengaduan Pelayanan Publik di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses Pengaduan Pelayanan Publik	Kelembagaan Negara (RL.01.03.01)	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.01.01
Informasi (RL.01.43)	01.43.03	Pelayanan Informasi	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Data Terbuka di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses Data Terbuka	Pelayanan Informasi (RL.01.43.03)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.02.01
Informasi (RL.01.43)	01.43.03	Pelayanan Informasi	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Pelayanan Informasi (RL.01.43.03)	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.03.01

Investasi (RL.01.12)	01.12.03	Pengembangan Sektor Usaha Penanaman Modal	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.08.01.01 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan Sektor Usaha Penanaman Modal (RL.01.12.03)	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.04.01
Investasi (RL.01.12)	01.12.08	Promosi Penanaman Modal	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Promosi Penanaman Modal di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.08.02.01 Program Promosi Penanaman Modal	Promosi Penanaman Modal (RL.01.12.08)	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.04.02
Investasi (RL.01.12)	01.12.04	Penanaman Modal Nasional	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pelayanan Penanaman Modal di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.08.02.02 Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal Nasional (RL.01.12.04)	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.04.03
Investasi (RL.01.12)	01.12.05	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan layanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.08.04.01 Program	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (RL.01.12.05)	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.04.04

			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Way Kanan	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal							
Investasi (RL.01.12)	01.12.06	Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.08.02.03 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal (RL.01.12.06)	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.04.05
Sosial (RL.01.26)	01.26.01	Kebijakan Jaminan Sosial	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses 04.02.01.01 Program Pemberdayaan Sosial	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.05.01

Sosial (RL.01.26)	01.26.02	Penanganan Fakir Miskin	Layanan bertujuan melaksana kan Pelayanan Layanan Penangana n Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses 04.02.01.02 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Penanganan Fakir Miskin (RL.01.26.02)	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.05.02
Sosial (RL.01.26)	01.26.01	Kebijakan Jaminan Sosial	Layanan bertujuan melaksana kan Pelayanan Layanan Rehabilitas i Sosial di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.04.02.01.03 Program Rehabilitasi Sosial	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.05.03
Sosial (RL.01.26)	01.26.01	Kebijakan Jaminan Sosial	Layanan bertujuan melaksana kan Pelayanan Layanan Perlindung an Dan Jaminan Sosial di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.04.02.03.01 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.05.04

Lingkungan Hidup (RL.01.40)	01.40.02	Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Taman Makam di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.04.02.03.02 Program Pengelolaan Taman Makam	Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem (RL.01.40.02)	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.05.05
Sosial (RL.01.26)	01.26.01	Kebijakan Jaminan Sosial	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penanganan Bencana di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.04.02.06.01 Program Penanganan Bencana	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.05.06
Kependudukan (RL.01.23)	01.23.02	Kebijakan Kependudukan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.01.08.01 Program Pendaftaran Penduduk	Kebijakan Kependudukan (RL.01.23.02)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.06.01
Kependudukan (RL.01.23)	01.23.03	Pencatatan Sipil	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.01.08.02	Pencatatan Sipil (RL.01.23.03)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.06.02

			Layanan Pencatatan Sipil di Kabupaten Way Kanan	Program Pencatatan Sipil							
Kependudukan (RL.01.23)	01.23.03	Pencatatan Sipil	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.01.08.03 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pencatatan Sipil (RL.01.23.03)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.06.03
Kependudukan (RL.01.23)	01.23.03	Pencatatan Sipil	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Profil Kependudukan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.01.08.04 Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Pencatatan Sipil (RL.01.23.03)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.06.04
Pendidikan (RL.01.31)	01.31.03	Pendidikan Dasar	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.06.01.01.01 Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Dasar (RL.01.31.03)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.07.01

			Pendidikan di Kabupaten Way Kanan								
Pendidikan (RL.01.31)	01.31.03	Pendidikan Dasar	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengembangan Kurikulum di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.06.01.01.02 Program Pengembangan Kurikulum	Pendidikan Dasar (RL.01.31.03)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.07.02
Pendidikan (RL.01.31)	01.31.01	Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.06.01.02.01 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (RL.01.31.01)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.07.03
Pendidikan (RL.01.31)	01.31.03	Pendidikan Dasar	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.06.03.04.01 Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Pendidikan Dasar (RL.01.31.03)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.07.04

			di Kabupaten Way Kanan								
Kesehatan (RL.01.25)	01.25.02	Kesehatan Masyarakat	Layanan bertujuan melaksana kan Pelayanan Layanan Pemenuha n Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.04.01.03.01 Program Upaya Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat (RL.01.25.02)	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.08.01
Kesehatan (RL.01.25)	01.25.03	Pemberdayaan Tenaga Kesehatan	Layanan bertujuan melaksana kan Pelayanan Layanan Peningkata n Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.04.01.04.01 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemberdayaan Tenaga Kesehatan (RL.01.25.03)	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.08.02

Kesehatan (RL.01.25)	01.25.01	Farmasi Dan Alat Kesehatan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses Pelayan RAB.04.01.02.01 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Farmasi Dan Alat Kesehatan (RL.01.25.01)	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.08.03
Kesehatan (RL.01.25)	01.25.02	Kesehatan Masyarakat	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses Pelayan RAB.04.01.01.01 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kesehatan Masyarakat (RL.01.25.02)	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.08.04
Pekerjaan Umum (RL.01.17)	01.17.01	Sarana Dan Prasarana Strategis	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pelayanan Pengelolaan Sumber Daya Air	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses Pelayan RAB.03.01.05.01 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.09.01

			(SDA) di Kabupaten Way Kanan								
Pekerjaan Umum (RL.01.17)	01.17.01	Sarana Dan Prasarana Strategis	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.01.05.02 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.09.02
Pekerjaan Umum (RL.01.17)	01.17.01	Sarana Dan Prasarana Strategis	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.01.01.01 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.09.03

Pekerjaan Umum (RL.01.17)	01.17.01	Sarana Dan Prasarana Strategis	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.01.04.01 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.09.04
Pekerjaan Umum (RL.01.17)	01.17.01	Sarana Dan Prasarana Strategis	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.01.02.02 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.09.05
Pekerjaan Umum (RL.01.17)	01.17.01	Sarana Dan Prasarana Strategis	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Program Penataan Bangunan Gedung di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.01.01.02 Program Penataan Bangunan Gedung	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.09.06

Pekerjaan Umum (RL.01.17)	01.17.01	Sarana Dan Prasarana Strategis	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.01.01.03 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.09.07
Pekerjaan Umum (RL.01.17)	01.17.01	Sarana Dan Prasarana Strategis	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Program Penyelenggaraan Jalan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.01.02.03 Program Penyelenggaraan Jalan	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.09.08
Pekerjaan Umum (RL.01.17)	01.17.01	Sarana Dan Prasarana Strategis	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengembangan Jasa Kontruksi di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.01.03.01 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.09.09
Pekerjaan Umum	01.17.01	Sarana Dan Prasarana Strategis	Layanan	Layanan ini	Sarana Dan Prasarana Strategis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.09.10

Umum (RL.01.17)		Prasarana Strategis	bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kabupaten Way Kanan	berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.01.01.04 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(RL.01)			
Perumahan (RL.01.20)	01.20.01	Infrastruktur Permukiman	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengembangan Perumahan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.04.05.01 Program Pengembangan Perumahan	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.10.01
Perumahan (RL.01.20)	01.20.01	Infrastruktur Permukiman	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Kawasan Permukiman di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.04.03.01 Program Kawasan Permukiman	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.10.02
Perumahan (RL.01.20)	01.20.02	Kawasan Permukiman	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.04.05.02	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.10.03

			Layanan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Way Kanan	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh							
Perumahan (RL.01.20)	01.20.01	Infrastruktur Permukiman	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.04.04.01 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.10.04
Perumahan (RL.01.20)	01.20.02	Kawasan Permukiman	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.06.05.01 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.10.05
Perumahan (RL.01.20)	01.20.01	Infrastruktur Permukiman	Layanan bertujuan	Layanan ini berfungsi untuk	Infrastruktur Permukiman	Dinas Perumahan	Dinas Perumahan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.10.06

			melaksanakan Pelayanan Layanan Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan di Kabupaten Way Kanan	mendukung proses RAB.03.06.02.01 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	(RL.01.20.01)	dan Kawasan Permukiman	dan Kawasan Permukiman				
Perumahan (RL.01.20)	01.20.02	Kawasan Permukiman	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.06.02.02 Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.10.07
Perumahan (RL.01.20)	01.20.01	Infrastruktur Permukiman	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.06.03.01 Program	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.10.08

			Penetapan Tanah Ulayat di Kabupaten Way Kanan	Penetapan Tanah Ulayat							
Perumahan (RL.01.20)	01.20.01	Infrastruktur Permukiman	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Tanah Kosong di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.06.04.01 Program Pengelolaan Tanah Kosong	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.10.09
Perumahan (RL.01.20)	01.20.02	Kawasan Permukiman	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Izin Membuka Tanah di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.06.03.02 Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.10.10
Perumahan (RL.01.20)	01.20.02	Kawasan Permukiman	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penatagunaan Tanah di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.06.04.02 Program Penatagunaan Tanah	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.10.11

Keamanan (RL.01.29)	01.29.06	Keamanan Dan Ketertiban Umum	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.05.02.01.01 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Keamanan Dan Ketertiban Umum (RL.01.29.06)	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.11.01
Lingkungan Hidup (RL.01.40)	01.40.06	Penanggulangan Bencana	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.04.02.06.01 Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana (RL.01.40.06)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.11.02
Lingkungan Hidup (RL.01.40)	01.40.07	Pencarian Dan Pertolongan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.04.02.06.02 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencarian Dan Pertolongan (RL.01.40.07)	Pemadam Kebakaran	Pemadam Kebakaran	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.11.03

			Penyelamatan Non Kebakaran di Kabupaten Way Kanan								
Ketenagakerjaan (RL.01.32)	01.32.02	Pengelolaan Ketenagakerjaan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Perencanaan Tenaga Kerja di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.06.02.02.01 Program Perencanaan Tenaga Kerja	Pengelolaan Ketenagakerjaan (RL.01.32.02)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.12.01
Ketenagakerjaan (RL.01.32)	01.32.04	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.06.02.01.02 Program Perencanaan Tenaga Kerja.	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja (RL.01.32.04)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.12.02
Ketenagakerjaan (RL.01.32)	01.32.05	Penempatan Tenaga Kerja	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penempatan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.02.01.03 Program Penempatan	Penempatan Tenaga Kerja (RL.01.32.05)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.12.03

			n Tenaga Kerja di Kabupaten Way Kanan	Tenaga Kerja							
Ketenagakerjaan (RL.01.32)	01.32.05	Penempatan Tenaga Kerja	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Hubungan Industrial di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.06.02.03.01 Program Hubungan Industrial	Penempatan Tenaga Kerja (RL.01.32.05)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.12.04
Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27)	01.27.01	Kesetaraan Gender	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.04.03.03.01 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Kesetaraan Gender (RL.01.27.01)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.13.01
Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27)	01.27.03	Perlindungan Hak Perempuan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Perlindungan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.04.03.05.01 Program Perlindungan	Perlindungan Hak Perempuan (RL.01.27.03)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.13.02

			an Perempuan di Kabupaten Way Kanan	Perempuan		Keluarga Berencana	n Penduduk dan Keluarga Berencana				
Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27)	01.27.01	Kesetaraan Gender	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.04.03.01.01 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Kesetaraan Gender (RL.01.27.01)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.13.03
Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27)	01.27.02	Perlindungan Anak	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.04.03.06.01 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Perlindungan Anak (RL.01.27.02)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.13.04
Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27)	01.27.02	Perlindungan Anak	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.04.03.04.01 Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Perlindungan Anak (RL.01.27.02)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.13.05

			di Kabupaten Way Kanan				Keluarga Berencana				
Pemberdaya an Perempuan (RL.01.27)	01.27.02	Perlindungan Anak	Layanan bertujuan melaksana kan Pelayanan Layanan Perlindung an Khusus Anak di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.04.03.04.02 Program Perlindungan Khusus Anak	Perlindungan Anak (RL.01.27.02)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdaya an Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.13.06
Pertanian (RL.01.07)	01.07.02	Ketahanan Pangan	Layanan bertujuan melaksana kan Pelayanan Layanan Pengelolaa n Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandiria n Pangan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.03.04.01 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.14.01

Pertanian (RL.01.07)	01.07.02	Ketahanan Pangan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.03.04.02 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.14.02
Pertanian (RL.01.07)	01.07.02	Ketahanan Pangan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penanganan Kerawanan Pangan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.03.04.03 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.14.03
Pertanian (RL.01.07)	01.07.02	Ketahanan Pangan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.03.04.04 Program Pengawasan Keamanan Pangan	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.14.04

Lingkungan Hidup (RL.01.40)	01.40.02	Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Perencanaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.07.05.01.01 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem (RL.01.40.02)	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.15.01
Lingkungan Hidup (RL.01.40)	01.40.04	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengendalian Pencemaran Dan/Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.07.05.02.01 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.15.02
Lingkungan Hidup (RL.01.40)	01.40.02	Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pelayanan Pengelolaan Keanekaragaman	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.07.05.05.01 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem (RL.01.40.02)	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.15.03

			Hayati (Kehati) di Kabupaten Way Kanan								
Lingkungan Hidup (RL.01.40)	01.40.04	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Layanan bertujuan melaksana kan Pelayanan Layanan Pengendali an Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.07.05.02.02 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.15.04
Lingkungan Hidup (RL.01.40)	01.40.04	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Layanan bertujuan melaksana kan Pelayanan Layanan Pembinaan Dan Pengawasa n Terhadap Izin	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.07.05.01.02 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.15.05

			Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kabupaten Way Kanan	Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)							
Lingkungan Hidup (RL.01.40)	01.40.04	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.07.05.01.03 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.15.06

Lingkungan Hidup (RL.01.40)	01.40.01	Dampak Perubahan Iklim	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses Pelayan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dampak Perubahan Iklim (RL.01.40.01)	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.15.07
Lingkungan Hidup (RL.01.40)	01.40.04	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses Pelayan Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.15.08

Lingkungan Hidup (RL.01.40)	01.40.04	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.07.05.01.06 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.15.09
Lingkungan Hidup (RL.01.40)	01.40.04	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.07.05.02.03 Program Pengelolaan Persampahan	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.15.10
Pemerintahan daerah (RL.01.24)	01.24.02	Otonomi Daerah	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penataan Desa di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.05.03.01 Program Penataan Desa	Otonomi Daerah (RL.01.24.02)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.16.01

Pemerintahan daerah (RL.01.24)	01.24.03	Administrasi Kewilayahan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Peningkatan Kerja Sama Desa di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.05.04.01 Program Peningkatan Kerjasama Desa	Administrasi Kewilayahan (RL.01.24.03)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.16.02
Pemerintahan daerah (RL.01.24)	01.24.06	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.05.03.02	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RL.01.24.06)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.16.03
Pemerintahan daerah (RL.01.24)	01.24.01	Keikutsertaan Masyarakat	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.05.04.02 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Keikutsertaan Masyarakat (RL.01.24.01)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.16.04

			Adat di Kabupaten Way Kanan								
Kependudukan (RL.01.23)	01.23.01	Pengendalian Penduduk	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengendalian Penduduk di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.07.02.01 Program Pengendalian Penduduk	Pengendalian Penduduk (RL.01.23.01)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.17.01
Kependudukan (RL.01.23)	01.23.04	Keluarga Berencana	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pembinaan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.07.03.01 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Keluarga Berencana (RL.01.23.04)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.17.02
Kependudukan (RL.01.23)	01.23.02	Kebijakan Kependudukan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) di Kabupaten	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.07.01.01 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Kebijakan Kependudukan (RL.01.23.02)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.17.03

Transportasi (RL.01.19)	01.19.02	Pelayanan Transportasi	Way Kanan Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.03.04.01 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelayanan Transportasi (RL.01.19.02)	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.18.01
Komunikasi (RL.01.44)	01.44.02	Sistem Komunikasi Publik	Way Kanan Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.03.02.01 Program Informasi dan Komunikasi Publik	Sistem Komunikasi Publik (RL.01.44.02)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.19.01
Komunikasi (RL.01.44)	01.44.02	Sistem Komunikasi Publik	Way Kanan Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Aplikasi Informatika di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.03.01.01 Program Aplikasi Informatika	Sistem Komunikasi Publik (RL.01.44.02)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.19.02

Usaha Kecil dan Menengah (RL.01.14)	01.14.01	Dukungan Bisnis	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.10.02.01 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dukungan Bisnis (RL.01.14.01)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.20.01
Koperasi (RL.01.13)	01.13.01	Koperasi Dan Usaha Mikro	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.09.04.01 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.20.02
Koperasi (RL.01.13)	01.13.01	Koperasi Dan Usaha Mikro	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.09.04.02 Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.20.03

Koperasi (RL.01.13)	01.13.01	Koperasi Dan Usaha Mikro	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.09.01.01 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.20.04
Koperasi (RL.01.13)	01.13.01	Koperasi Dan Usaha Mikro	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.09.03.01 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.20.05
Koperasi (RL.01.13)	01.13.01	Koperasi Dan Usaha Mikro	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.10.04.01 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.20.06

			(Umkm) di Kabupaten Way Kanan								
Koperasi (RL.01.13)	01.13.01	Koperasi Dan Usaha Mikro	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengembangan Umkm di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.12.10.01.01 Program Pengembangan Umkm	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.20.07
Olahraga (RL.01.35)	01.35.01	Pemberdayaan Pemuda	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.06.04.03.01 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan Pemuda (RL.01.35.01)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.21.01

Olahraga (RL.01.35)	01.35.01	Kebijakan Di Bidang Pembudayaan Olahraga	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.06.05.01.01 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Kebijakan Di Bidang Pembudayaan Olahraga (RL.01.35.01)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.21.02
Olahraga (RL.01.35)	01.35.02	Kebijakan Di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.06.05.03 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Kebijakan Di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga (RL.01.35.02)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.21.03
Kebudayaan (RL.01.42)	01.42.01	Kebijakan Kebudayaan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengembangan Kebudayaan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.08.02.04.01 Program Pengembangan Kebudayaan	Kebijakan Kebudayaan (RL.01.42.01)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.22.01

Kebudayaan (RL.01.42)	01.42.02	Perfilman Dan Kesenian	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengembangan Kesenian Tradisional di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.08.02.04.02 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Perfilman Dan Kesenian (RL.01.42.02)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.22.02
Kebudayaan (RL.01.42)	01.42.01	Kebijakan Kebudayaan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pembinaan Sejarah di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.08.02.04.03 Program Pembinaan Sejarah	Kebijakan Kebudayaan (RL.01.42.01)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.22.03
Kebudayaan (RL.01.42)	01.42.04	Cagar Budaya	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.08.02.04.04 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cagar Budaya (RL.01.42.04)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.22.04
Kebudayaan (RL.01.42)	01.42.04	Cagar Budaya	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengelolaan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.08.02.03.01 Program	Cagar Budaya (RL.01.42.04)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.22.05

			n Permuseu man di Kabupaten Way Kanan	Pengelolaan Permuseuman							
Kebudayaan (RL.01.42)	01.42.01	Kebijakan Kebudayaan	Layanan bertujuan melaksana kan Pelayanan Layanan Pembinaan Perpustaka an di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.08.02.05.01 Program Pembinaan Perpustakaan	Kebijakan Kebudayaan (RL.01.42.01)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan Daerah	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.23.01
Kebudayaan (RL.01.42)	01.42.03	Sastra Dan Bahasa Indonesia	Layanan bertujuan melaksana kan Pelayanan Layanan Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.08.02.06.01 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Sastra Dan Bahasa Indonesia (RL.01.42.03)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Dinas Perpustakaa n dan Kearsipan Daerah	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.23.02
Perikanan (RL.01.10)	01.10.01	Perikanan Budi Daya	Layanan bertujuan melaksana kan Pelayanan Layanan Pengelolaa n Perikanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.06.01.01 Pengelolaan Perikanan Tangkap	Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.24.01

			Tangkap di Kabupaten Way Kanan								
Perikanan (RL.01.10)	01.10.01	Perikanan Budi Daya	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Perikanan Budidaya di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.06.01.02 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.24.02
Perikanan (RL.01.10)	00.01.00	Benih Dan Bibit Perikanan Budi Daya	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses 02.06.01.03 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Benih Dan Bibit Perikanan Budi Daya (RL.01.10.02)	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.24.03
Perikanan (RL.01.10)	01.10.03	Kebijakan Di Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pelayanan Pengolahan Dan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.06.03.01 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil	Kebijakan Di Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya (RL.01.10.03)	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.24.04

			Pemasaran Hasil Perikanan di Kabupaten Way Kanan	Perikanan							
Pariwisata (RL.01.15)	01.15.01	Pengembangan Kepariwisataan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.11.01 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengembangan Kepariwisataan (RL.01.15.01)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.25.01
Pariwisata (RL.01.15)	01.15.02	Pengembangan Lembaga Kepariwisataan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.11.02 Program Pemasaran Pariwisata	Pengembangan Lembaga Kepariwisataan (RL.01.15.02)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.25.02
Pariwisata (RL.01.15)	01.15.03	Pengembangan Objek Wisata	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.11.03 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan	Pengembangan Objek Wisata (RL.01.15.03)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.25.03

			Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Way Kanan	Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual							
Pariwisata (RL.01.15)	01.15.03	Pengembangan Objek Wisata	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.11.04 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Objek Wisata (RL.01.15.03)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.25.04
Pertanian (RL.01.07)	01.07.01	Pertanian	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.03.01.01 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertanian (RL.01.07.01)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.26.01
Pertanian (RL.01.07)	01.07.01	Pertanian	Layanan bertujuan	Layanan ini berfungsi untuk	Pertanian (RL.01.07.01)	Dinas Tanaman	Dinas Tanaman	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.26.02

			melaksanakan Pelayanan Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian di Kabupaten Way Kanan	mendukung proses RAB.02.03.01.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Pangan, Hortikultura dan Peternakan				
Pertanian (RL.01.07)	01.07.01	Pertanian	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.03.01.03 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pertanian (RL.01.07.01)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.26.03
Pertanian (RL.01.07)	01.07.01	Pertanian	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian di Kabupaten	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.03.01.04 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pertanian (RL.01.07.01)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.26.04

			Way Kanan								
Pertanian (RL.01.07)	01.07.01	Pertanian	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Perizinan Usaha Pertanian di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.03.01.05 Program Perizinan Usaha Pertanian	Pertanian (RL.01.07.01)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.26.05
Pertanian (RL.01.07)	01.07.01	Pertanian	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.03.01.06 Program Perizinan Usaha Pertanian	Pertanian (RL.01.07.01)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.26.06
Perdagangan (RL.01.06)	01.06.04	Perdagangan Domestik	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Perizinan Dan Pendaftaran	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.02.03.01 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Perdagangan Domestik (RL.01.06.04)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.27.01

			Perusahaan di Kabupaten Way Kanan								
Perdagangan (RL.01.06)	01.06.04	Perdagangan Domestik	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.02.01.02 Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perdagangan Domestik (RL.01.06.04)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.27.02
Perdagangan (RL.01.06)	01.06.04	Perdagangan Domestik	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.02.01.03 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Perdagangan Domestik (RL.01.06.04)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.27.03

Perdagangan (RL.01.06)	01.06.01	Ekspor Dan Impor	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Ekspor di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.02.04,01 Ekspor dan Impor	Ekspor Dan Impor (RL.01.06.01)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.27.04
Perdagangan (RL.01.06)	01.06.05	Perlindungan Konsumen	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.02.01.05 Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Perlindungan Konsumen (RL.01.06.05)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.27.05
Perdagangan (RL.01.06)	01.06.02	Penggunaan Produk Dalam Negeri	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.02.03.06 Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	Penggunaan Produk Dalam Negeri (RL.01.06.02)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.27.06

Industri (RL.01.05)	01.05.08	Pengembangan Industri	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Perencanaan Dan Pembangunan Industri di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.01.01 01 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pengembangan Industri (RL.01.05.08)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.28.01
Industri (RL.01.05)	01.05.10	Pengembangan Industri Strategis	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.01.04.01 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Pengembangan Industri Strategis (RL.01.05.10)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.28.02
Industri (RL.01.05)	01.05.06	Ketahanan Industri	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.01.04.02 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Ketahanan Industri (RL.01.05.06)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.28.03

Transmigrasi (RL.01.18)	01.18.01	Layanan Transmigrasi	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Perencanaan Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.02.02.01 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Layanan Transmigrasi (RL.01.18.01)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.29.01
Transmigrasi (RL.01.18)	01.18.01	Layanan Transmigrasi	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.02.04.01 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Layanan Transmigrasi (RL.01.18.01)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Layanan Publik (RL.01)	Publik	G2C	P.29.02
Keuangan (RL.02.02)	02.02.01	Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.02.06.01 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara (RL.02.02.01)	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Publik	G2C	P.30.01
Keuangan (RL.02.02)	02.02.01	Pemeriksaan Pengelola	Layanan bertujuan	Layanan ini berfungsi untuk	Pemeriksaan Pengelola Keuangan	Badan Pengelola	Badan Pengelola	Layanan Administrasi	Publik	G2C	P.30.02

	Keuangan Negara	melaksana kan Pelayanan Layanan Pengelolaa n Pendapata n Daerah di Kabupaten Way Kanan	mendukung proses RAB.09.02.06.02 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Negara (RL.02.02.01)	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	Pemerintahan (RL.02)			
--	--------------------	--	--	-------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------	--	--	--

Tabel 13 Metadata Arsitektur Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan

Kategori Layanan	ID Layanan	Nama Layanan (sub Kategori)	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	Metadata Terkait
Perencanaan Pembangunan Nasional (RL.02.03)	02.03.02	Penyusunan Perencanaan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.05.01.01 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan (RL.02.03.02)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Satuan Kerja Perangkat Daerah	G2G	AP.01.01
Perencanaan Pembangunan Nasional (RL.02.03)	02.03.03	Koordinasi Perencanaan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.05.01.02 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan (RL.02.03.03)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Satuan Kerja Perangkat Daerah	G2G	AP.01.02

Keuangan (RL.02.02)	02.02.04	Penganggaran	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.02.05.01 Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	Penganggaran (RL.02.02.04)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Satuan Kerja Perangkat Daerah	G2G	AP.02.01
Keuangan (RL.02.02)	02.02.01	Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.01.07.01 Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara (RL.02.02.01)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Satuan Kerja Perangkat Daerah	G2G	AP.03.01

Dukungan operasional organisasi (RL.02.06)	02.02.08	Penyelenggaraa n Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.02.08.01 Penyelesaian Pengadaan	Penyelenggaraa n Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RL.02.02.08)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Satuan Kerja Perangkat Daerah	G2G	AP.04.01
Dukungan operasional organisasi (RL.02.06)	02.02.08	Penyelenggaraa n Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.02.08.02 Pengadaan Secara Elektronik	Penyelenggaraa n Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RL.02.02.08)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Satuan Kerja Perangkat Daerah	G2G	AP.04.02
Dukungan operasional organisasi (RL.02.06)	02.02.08	Penyelenggaraa n Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.02.08.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	Penyelenggaraa n Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RL.02.02.08)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Satuan Kerja Perangkat Daerah	G2G	AP.04.03
Aparatur Negara (RL.02.04)	02.04.01	Manajemen ASN	Layanan bertujuan melaksanakan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung	Manajemen ASN (RL.02.04.01)	Badan Kepegawaian dan	Badan Kepegawaian dan	Layanan Administrasi Pemerintahan	Satuan Kerja Perangkat	G2G	AP.05.01

			Pelayanan Layanan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Way Kanan	proses RAB.09.06.09.02 Program Kepegawaian Daerah		Pengembangan Sumberdaya Manusia	Pengembangan Sumberdaya Manusia	(RL.02)	Daerah		
Data dan Informasi Pemerintah (RL.02.09)	02.06.18	Dukungan Kearsipan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Arsip di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.08.02.06.02 Pengelolaan Arsip	Dukungan Kearsipan (RL.02.06.18)	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Satuan Kerja Perangkat Daerah	G2G	AP.06.01
Data dan Informasi Pemerintah (RL.02.09)	02.06.18	Dukungan Kearsipan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.08.02.06.03 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Dukungan Kearsipan (RL.02.06.18)	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Satuan Kerja Perangkat Daerah	G2G	AP.06.02
Keuangan (RL.02.02)	02.02.05	Pengelolaan Barang Milik Negara	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.02.08.01 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Negara (RL.02.02.05)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Satuan Kerja Perangkat Daerah	G2G	AP.07.01

Akuntabilitas Kinerja (RL.02.07)	02.07.02	Pengawasan Kinerja	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Penyelenggaraan Pengawasan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.07.05.01 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan Kinerja (RL.02.07.02)	Inspektorat	Inspektorat	Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Satuan Kerja Perangkat Daerah	G2G	AP.08.01
Akuntabilitas Kinerja (RL.02.07)	02.07.02	Pengawasan Kinerja	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.05.08.01 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pengawasan Kinerja (RL.02.07.02)	Inspektorat	Inspektorat	Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Satuan Kerja Perangkat Daerah	G2G	AP.08.02
Akuntabilitas Kinerja (RL.02.07)	02.07.02	Pengawasan Kinerja	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.06.04.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengawasan Kinerja (RL.02.07.02)	Inspektorat	Inspektorat	Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Satuan Kerja Perangkat Daerah	G2G	AP.09.01

Aparatur Negara (RL.02.04)	02.04.03	Pendidikan Dan Pelatihan Keahlian	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.06.04.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pendidikan Dan Pelatihan Keahlian (RL.02.04.03)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Satuan Kerja Perangkat Daerah	G2G	AP.10.01
Organisasi dan Tata Kelola (RL.02.08)	02.08.08	Pengendalian Sumber Daya Kerja Sama	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.07.06.01 Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pengendalian Sumber Daya Kerja Sama (RL.02.08.08)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Satuan Kerja Perangkat Daerah	G2G	AP.11.01

Kenegaraan (RL.01.03)	01.03.02	Nilai-Nilai Kebangsaan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.07.07.01 Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Layanan Publik (RL.01)	Satuan Kerja Perangkat Daerah	G2G	AP.12.01
Kenegaraan (RL.01.03)	01.03.02	Nilai-Nilai Kebangsaan	Layanan bertujuan melaksanakan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.07.07.02 PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Layanan Publik (RL.01)	Satuan Kerja Perangkat Daerah	G2G	AP.12.02

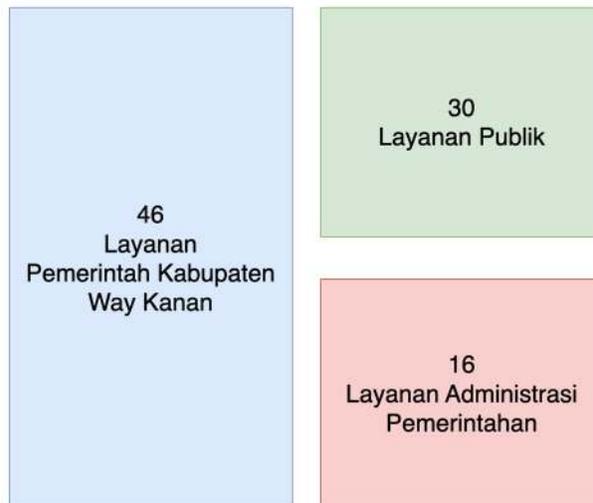
Kenegaraan (RL.01.03)	01.03.02	Nilai-Nilai Kebangsaan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pemberdayaa n Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakata n di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.07.07.03 PEMBERDAYAA N DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKAT AN	Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Layanan Publik (RL.01)	Satuan Kerja Perangkat Daerah	G2G	AP.12.03
Kenegaraan (RL.01.03)	01.03.02	Nilai-Nilai Kebangsaan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pembinaan Dan Pengembang an Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.07.07.04 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGA N KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Layanan Publik (RL.01)	Satuan Kerja Perangkat Daerah	G2G	AP.12.04

Kenegaraan (RL.01.03)	01.03.02	Nilai-Nilai Kebangsaan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.07.07.05 PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Layanan Publik (RL.01)	Satuan Kerja Perangkat Daerah	G2G	AP.12.05
Informasi (RL.01.44)	02.09.06	Statistik Sektoral	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Statistik Sektoral di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.03.03.02 Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Statistik Sektoral (RL.02.09.06)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan Publik (RL.01)	Satuan Kerja Perangkat Daerah	G2G	AP.13.01

Data dan Informasi Pemerintah (RL.02.09)	02.09.04	Pengelolaan Sistem Informasi	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses 09.03.05.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Pengelolaan Sistem Informasi (RL.02.09.04)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Satuan Kerja Perangkat Daerah	G2G	AP.14.01
Aparatur Negara (RL.02.04)	02.04.08	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.06.06.01 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penyelenggaraan Pelayanan Publik (RL.02.04.08)	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Satuan Kerja Perangkat Daerah	G2G	AP.15.01
Aparatur Negara (RL.02.04)	02.04.08	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Perekonomian dan Pembangunan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.06.01.01 Program Perekonomian dan Pembangunan	Penyelenggaraan Pelayanan Publik (RL.02.04.08)	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Satuan Kerja Perangkat Daerah	G2G	AP.15.02

Aparatur Negara (RL.02.04)	02.04.08	Penyelenggaraa n Pelayanan Publik	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Izin Lokasi di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.06.01.02 Pengelolaan Izin Lokasi	Penyelenggaraa n Pelayanan Publik (RL.02.04.08)	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Satuan Kerja Perangkat Daerah	G2G	AP.15.03
Aparatur Negara (RL.02.04)	02.04.08	Penyelenggaraa n Pelayanan Publik	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.06.03 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Penyelenggaraa n Pelayanan Publik (RL.02.04.08)	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Satuan Kerja Perangkat Daerah	G2G	AP.16.01

Layanan yang diinginkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan berdasarkan hasil kodifikasi dan klasifikasi metadata layanan pada Tabel diatas telah diarahkan untuk mencapai tujuan SPBE. Arsitektur layanan Pemerintah Kabupaten Way Kanan terdiri dari 46 layanan yang diklasifikasikan menjadi 33 area, meliputi 30 layanan publik dan 16 layanan administrasi pemerintahan. Tahapan klasifikasi tipe layanan ini mengacu pada hasil analisis pemetaan berdasarkan proses bisnis dan metadata layanan SPBE, seperti dapat dilihat pada Tabel sebelumnya. Sementara Gambar dibawah ini menyajikan hasil penetapan tipe layanan di Pemerintah Kabupaten Way Kanan.



Gambar 60 Layanan di Pemerintah Kabupaten Way Kanan

Kapabilitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan SPBE adalah layanan SPBE. Berdasarkan Perpres SPBE, kapabilitas SPBE merupakan Layanan SPBE yang diarahkan untuk peningkatan kualitas dengan melakukan pengembangan Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan. Peningkatan kualitas Layanan SPBE salah satunya dapat dicapai melalui pembangunan portal layanan publik dan portal layanan administrasi pemerintahan, integrasi Layanan SPBE, penerapan manajemen layanan, serta teknologi layanan yang tepat guna dan tepat sasaran. Semuanya merupakan upaya yang harus dilakukan untuk menciptakan kondisi yang diinginkan di Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Tabel 14 Tipe Layanan Pemerintah Kabupaten Way Kanan

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Layanan Yang Disediakan (Sub Kategori)	Penanggung Jawab Layanan	Pengguna Layanan	Metadata Terkait
Layanan Publik (RL.01)	Kenegaraan (RL.01.03)	Kelembagaan Negara (RL.01.03.01)	Pengaduan Pelayanan publik (RL.01.03.01.01)	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Publik	P.01.01
Layanan Publik (RL.01)	Informasi (RL.01.43)	Pelayanan Informasi (RL.01.43.03)	Layanan Data Terbuka (RL.01.43.03.01)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Publik	P.02.01
Layanan Publik (RL.01)	Informasi (RL.01.43)	Pelayanan Informasi (RL.01.43.03)	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) (RL.01.43.03.02)	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Publik	P.03.01
Layanan Publik (RL.01)	Investasi (RL.01.12)	Pengembangan Sektor Usaha Penanaman Modal (RL.01.12.03)	Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (RL.01.12.03.01)	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	Publik	P.04.01
Layanan Publik (RL.01)	Investasi (RL.01.12)	Promosi Penanaman Modal (RL.01.12.08)	Layanan Promosi Penanaman Modal (RL.01.12.08.01)	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	Publik	P.04.02
Layanan Publik (RL.01)	Investasi (RL.01.12)	Penanaman Modal Nasional (RL.01.12.04)	Pelayanan Penanaman Modal (RL.01.12.04.01)	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	Publik	P.04.03
Layanan Publik (RL.01)	Investasi (RL.01.12)	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (RL.01.12.05)	layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (RL.01.12.05.01)	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	Publik	P.04.04
Layanan Publik (RL.01)	Investasi (RL.01.12)	Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal (RL.01.12.06)	Layanan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal (RL.01.12.06.01)	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	Publik	P.04.05
Layanan Publik (RL.01)	Sosial (RL.01.26)	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Layanan Pemberdayaan Sosial (RL.01.26.01.01)	Dinas Sosial	Publik	P.05.01
Layanan Publik (RL.01)	Sosial (RL.01.26)	Penanganan Fakir Miskin (RL.01.26.02)	Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (RL.01.26.02.01)	Dinas Sosial	Publik	P.05.02
Layanan Publik (RL.01)	Sosial (RL.01.26)	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Layanan Rehabilitasi Sosial (RL.01.26.01.02)	Dinas Sosial	Publik	P.05.03
Layanan Publik (RL.01)	Sosial (RL.01.26)	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Layanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial (RL.01.26.01.03)	Dinas Sosial	Publik	P.05.04
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem (RL.01.40.02)	Layanan Pengelolaan Taman Makam (RL.01.40.02.01)	Dinas Sosial	Publik	P.05.05
Layanan Publik (RL.01)	Sosial (RL.01.26)	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Layanan Penanganan Bencana (RL.01.26.01.04)	Dinas Sosial	Publik	P.05.06

Layanan Publik (RL.01)	Kependudukan (RL.01.23)	Kebijakan Kependudukan (RL.01.23.02)	Layanan Pendaftaran Penduduk (RL.01.23.02.01)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Publik	P.06.01
Layanan Publik (RL.01)	Kependudukan (RL.01.23)	Pencatatan Sipil (RL.01.23.03)	Layanan Pencatatan Sipil (RL.01.23.03.01)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Publik	P.06.02
Layanan Publik (RL.01)	Kependudukan (RL.01.23)	Pencatatan Sipil (RL.01.23.03)	Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (RL.01.23.03.02)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Publik	P.06.03
Layanan Publik (RL.01)	Kependudukan (RL.01.23)	Pencatatan Sipil (RL.01.23.03)	Layanan Pengelolaan Profil Kependudukan (RL.01.23.03.03)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Publik	P.06.04
Layanan Publik (RL.01)	Pendidikan (RL.01.31)	Pendidikan Dasar (RL.01.31.03)	Layanan Pengelolaan Pendidikan (RL.01.31.03.01)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Publik	P.07.01
Layanan Publik (RL.01)	Pendidikan (RL.01.31)	Pendidikan Dasar (RL.01.31.03)	Layanan Pengembangan Kurikulum (RL.01.31.03.02)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Publik	P.07.02
Layanan Publik (RL.01)	Pendidikan (RL.01.31)	Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (RL.01.31.01)	Layanan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (RL.01.31.01.01)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Publik	P.07.03
Layanan Publik (RL.01)	Pendidikan (RL.01.31)	Pendidikan Dasar (RL.01.31.03)	Layanan Pengembangan Bahasa dan Sastra (RL.01.31.03.03)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Publik	P.07.04
Layanan Publik (RL.01)	Kesehatan (RL.01.25)	Kesehatan Masyarakat (RL.01.25.02)	Layanan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (RL.01.25.02.01)	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam	Publik	P.08.01
Layanan Publik (RL.01)	Kesehatan (RL.01.25)	Pemberdayaan Tenaga Kesehatan (RL.01.25.03)	Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (RL.01.25.03.01)	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam	Publik	P.08.02
Layanan Publik (RL.01)	Kesehatan (RL.01.25)	Farmasi Dan Alat Kesehatan (RL.01.25.01)	Layanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman (RL.01.25.01.01)	Dinas Kesehatan	Publik	P.08.03
Layanan Publik (RL.01)	Kesehatan (RL.01.25)	Kesehatan Masyarakat (RL.01.25.02)	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (RL.01.25.02.02)	Dinas Kesehatan	Publik	P.08.04
Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Layanan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (RL.01.17.01.01)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Publik	P.09.01
Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RL.01.17.01.02)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Publik	P.09.02
Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Layanan Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional (RL.01.17.01.03)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Publik	P.09.03
Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum	Sarana Dan Prasarana	Layanan Pengelolaan Dan	Dinas Pekerjaan Umum	Publik	P.09.04

	(RL.01.17)	Strategis (RL.01.17.01)	Pengembangan Sistem Air Limbah dan Penataan Ruang (RL.01.17.01.04)			
Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase (RL.01.17.01.05)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Publik	P.09.05
Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Layanan Program Penataan Bangunan Gedung (RL.01.17.01.06)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Publik	P.09.06
Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Layanan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya (RL.01.17.01.07)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Publik	P.09.07
Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Layanan Program Penyelenggaraan Jalan (RL.01.17.01.08)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Publik	P.09.08
Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Layanan Pengembangan Jasa Kontruksi (RL.01.17.01.09)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Publik	P.09.09
Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang (RL.01.17.01.10)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Publik	P.09.10
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Layanan Pengembangan Perumahan (RL.01.20.01.01)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Publik	P.10.01
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Layanan Kawasan Permukiman (RL.01.20.01.02)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Publik	P.10.02
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Layanan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh (RL.01.20.02.01)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Publik	P.10.03
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Layanan Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) (RL.01.20.01.03)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Publik	P.10.04
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Layanan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (RL.01.20.02.01)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Publik	P.10.05
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Layanan Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan (RL.01.20.01.04)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Publik	P.10.06
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Layanan Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee (RL.01.20.02.02)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Publik	P.10.07
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Layanan Penetapan Tanah Ulayat (RL.01.20.01.05)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Publik	P.10.08
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Layanan Pengelolaan Tanah Kosong (RL.01.20.01.06)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Publik	P.10.09
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Layanan Pengelolaan Izin Membuka Tanah (RL.01.20.02.03)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Publik	P.10.10

Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Layanan Penatagunaan Tanah (RL.01.20.02.04)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Publik	P.10.11
Layanan Publik (RL.01)	Keamanan (RL.01.29)	Keamanan Dan Ketertiban Umum (RL.01.29.06)	Layanan Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (RL.01.29.06.01)	Satuan Polisi Pamong Praja	Publik	P.11.01
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	Penanggulangan Bencana (RL.01.40.06)	Layanan Penanggulangan Bencana (RL.01.40.06.01)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Publik	P.11.02
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	Pencarian Dan Pertolongan (RL.01.40.07)	Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (RL.01.40.07.01)	Pemadam Kebakaran	Publik	P.11.03
Layanan Publik (RL.01)	Ketenagakerjaan (RL.01.32)	Pengelolaan Ketenagakerjaan (RL.01.32.02)	Layanan Perencanaan Tenaga Kerja (RL.01.32.02.01)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Publik	P.12.01
Layanan Publik (RL.01)	Ketenagakerjaan (RL.01.32)	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja (RL.01.32.04)	Layanan Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja (RL.01.32.04.01)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Publik	P.12.02
Layanan Publik (RL.01)	Ketenagakerjaan (RL.01.32)	Penempatan Tenaga Kerja (RL.01.32.05)	Layanan Penempatan Tenaga Kerja (RL.01.32.05.01)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Publik	P.12.03
Layanan Publik (RL.01)	Ketenagakerjaan (RL.01.32)	Penempatan Tenaga Kerja (RL.01.32.05)	Layanan Hubungan Industrial (RL.01.32.05.02)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Publik	P.12.04
Layanan Publik (RL.01)	Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27)	Kesetaraan Gender (RL.01.27.01)	Layanan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27.01.01)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Publik	P.13.01
Layanan Publik (RL.01)	Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27)	Perlindungan Hak Perempuan (RL.01.27.03)	Layanan Perlindungan Perempuan (RL.01.27.03.01)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Publik	P.13.02
Layanan Publik (RL.01)	Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27)	Kesetaraan Gender (RL.01.27.01)	Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga (RL.01.27.01.02)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Publik	P.13.03
Layanan Publik (RL.01)	Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27)	Perlindungan Anak (RL.01.27.02)	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak (RL.01.27.02.01)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	Publik	P.13.04

				Penduduk dan Keluarga Berencana		
Layanan Publik (RL.01)	Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27)	Perlindungan Anak (RL.01.27.02)	Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA) (RL.01.27.02.02)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Publik	P.13.05
Layanan Publik (RL.01)	Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27)	Perlindungan Anak (RL.01.27.02)	Program Perlindungan Khusus Anak (RL.01.27.02.03)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Publik	P.13.06
Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan (RL.01.07.02.01)	Dinas Ketahanan Pangan	Publik	P.14.01
Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Layanan Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat (RL.01.07.02.02)	Dinas Ketahanan Pangan	Publik	P.14.02
Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Layanan Penanganan Kerawanan Pangan (RL.01.07.02.03)	Dinas Ketahanan Pangan	Publik	P.14.03
Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Layanan Pengawasan Keamanan Pangan (RL.01.07.02.04)	Dinas Ketahanan Pangan	Publik	P.14.04
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem (RL.01.40.02)	Layanan Perencanaan Lingkungan Hidup (RL.01.40.02.02)	Dinas Lingkungan Hidup	Publik	P.15.01
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Layanan Pengendalian Pencemaran Dan/Kerusakan Lingkungan Hidup (RL.01.40.04.01)	Dinas Lingkungan Hidup	Publik	P.15.02
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem (RL.01.40.02)	Layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) (RL.01.40.02.03)	Dinas Lingkungan Hidup	Publik	P.15.03
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Layanan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) (RL.01.40.04.02)	Dinas Lingkungan Hidup	Publik	P.15.04
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup	Publik	P.15.05

			(RL.01.40.04.03)			
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH (RL.01.40.04.04)	Dinas Lingkungan Hidup	Publik	P.15.06
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	Dampak Perubahan Iklim (RL.01.40.01)	Layanan Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (RL.01.40.01.01)	Dinas Lingkungan Hidup	Publik	P.15.07
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Layanan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (RL.01.40.04.05)	Dinas Lingkungan Hidup	Publik	P.15.08
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Layanan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (RL.01.40.04.06)	Dinas Lingkungan Hidup	Publik	P.15.09
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Layanan Pengelolaan Persampahan (RL.01.40.04.07)	Dinas Lingkungan Hidup	Publik	P.15.10
Layanan Publik (RL.01)	Pemerintahan daerah (RL.01.24)	Otonomi Daerah (RL.01.24.02)	Layanan Penataan Desa (RL.01.24.02.01)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Publik	P.16.01
Layanan Publik (RL.01)	Pemerintahan daerah (RL.01.24)	Administrasi Kewilayahan (RL.01.24.03)	Layanan Peningkatan Kerja Sama Desa (RL.01.24.03.01)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Publik	P.16.02
Layanan Publik (RL.01)	Pemerintahan daerah (RL.01.24)	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RL.01.24.06)	Layanan Administrasi Pemerintahan Desa (RL.01.24.06.01)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Publik	P.16.03
Layanan Publik (RL.01)	Pemerintahan daerah (RL.01.24)	Keikutsertaan Masyarakat (RL.01.24.01)	Layanan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat (RL.01.24.01.01)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Publik	P.16.04
Layanan Publik (RL.01)	Kependudukan (RL.01.23)	Pengendalian Penduduk (RL.01.23.01)	Layanan Pengendalian Penduduk (RL.01.23.01.01)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Publik	P.17.01
Layanan Publik (RL.01)	Kependudukan (RL.01.23)	Keluarga Berencana (RL.01.23.04)	Layanan Pembinaan Keluarga Berencanan (KB) (RL.01.23.04.01)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Publik	P.17.02

Layanan Publik (RL.01)	Kependudukan (RL.01.23)	Kebijakan Kependudukan (RL.01.23.02)	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (RL.01.23.02.01)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Publik	P.17.03
Layanan Publik (RL.01)	Transportasi (RL.01.19)	Pelayanan Transportasi (RL.01.19.02)	Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (ILAJ) (RL.01.19.02.01)	Dinas Perhubungan	Publik	P.18.01
Layanan Publik (RL.01)	Komunikasi (RL.01.44)	Sistem Komunikasi Publik (RL.01.44.02)	Program Informasi dan Komunikasi Publik (RL.01.44.02.01)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Publik	P.19.01
Layanan Publik (RL.01)	Komunikasi (RL.01.44)	Sistem Komunikasi Publik (RL.01.44.02)	Program Aplikasi Informatika (RL.01.44.02.02)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Publik	P.19.02
Layanan Publik (RL.01)	Usaha Kecil dan Menengah (RL.01.14)	Dukungan Bisnis (RL.01.14.01)	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam (RL.01.14.01.01)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Publik	P.20.01
Layanan Publik (RL.01)	Koperasi (RL.01.13)	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Layanan Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi (RL.01.13.01.01)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Publik	P.20.02
Layanan Publik (RL.01)	Koperasi (RL.01.13)	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Layanan Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi (RL.01.13.01.02)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Publik	P.20.03
Layanan Publik (RL.01)	Koperasi (RL.01.13)	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Layanan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian (RL.01.13.01.03)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Publik	P.20.04
Layanan Publik (RL.01)	Koperasi (RL.01.13)	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Layanan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi (RL.01.13.01.04)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Publik	P.20.05
Layanan Publik (RL.01)	Koperasi (RL.01.13)	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Layanan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk) (RL.01.13.01.05)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Publik	P.20.06
Layanan Publik (RL.01)	Koperasi (RL.01.13)	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Layanan Pengembangan Umkm (RL.01.13.01.06)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Publik	P.20.07
Layanan Publik (RL.01)	Olahraga (RL.01.35)	Pemberdayaan Pemuda (RL.01.35.01)	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (RL.01.35.01.01)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Publik	P.21.01
Layanan Publik (RL.01)	Olahraga (RL.01.35)	Kebijakan Di Bidang Pembudayaan Olahraga (RL.01.35.01)	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan (RL.01.35.01.02)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Publik	P.21.02
Layanan Publik (RL.01)	Olahraga (RL.01.35)	Kebijakan Di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga (RL.01.35.02)	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (RL.01.35.02.01)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Publik	P.21.03
Layanan Publik (RL.01)	Kebudayaan (RL.01.42)	Kebijakan Kebudayaan (RL.01.42.01)	Pengembangan Kebudayaan (RL.01.42.01.01)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Publik	P.22.01

Layanan Publik (RL.01)	Kebudayaan (RL.01.42)	Perfilman Dan Kesenian (RL.01.42.02)	Pengembangan Kesenian Tradisional (RL.01.42.02.01)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Publik	P.22.02
Layanan Publik (RL.01)	Kebudayaan (RL.01.42)	Kebijakan Kebudayaan (RL.01.42.01)	Pembinaan Sejarah (RL.01.42.01.02)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Publik	P.22.03
Layanan Publik (RL.01)	Kebudayaan (RL.01.42)	Cagar Budaya (RL.01.42.04)	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya (RL.01.42.04.01)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Publik	P.22.04
Layanan Publik (RL.01)	Kebudayaan (RL.01.42)	Cagar Budaya (RL.01.42.04)	Pengelolaan Permuseuman (RL.01.42.04.02)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Publik	P.22.05
Layanan Publik (RL.01)	Kebudayaan (RL.01.42)	Kebijakan Kebudayaan (RL.01.42.01)	Layanan Pembinaan Perpustakaan (RL.01.42.01.01)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Publik	P.23.01
Layanan Publik (RL.01)	Kebudayaan (RL.01.42)	Sastra Dan Bahasa Indonesia (RL.01.42.03)	Layanan Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno (RL.01.42.03.01)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Publik	P.23.02
Layanan Publik (RL.01)	Perikanan (RL.01.10)	Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)	Layanan Pengelolaan Perikanan Tangkap (RL.01.10.01.01)	Dinas Perikanan	Publik	P.24.01
Layanan Publik (RL.01)	Perikanan (RL.01.10)	Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)	Layanan Pengelolaan Perikanan Budidaya (RL.01.10.01.02)	Dinas Perikanan	Publik	P.24.02
Layanan Publik (RL.01)	Perikanan (RL.01.10)	Benih Dan Bibit Perikanan Budi Daya (RL.01.10.02)	Layanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (RL.01.10.02.01)	Dinas Perikanan	Publik	P.24.03
Layanan Publik (RL.01)	Perikanan (RL.01.10)	Kebijakan Di Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya (RL.01.10.03)	Layanan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (RL.01.10.03.01)	Dinas Perikanan	Publik	P.24.04
Layanan Publik (RL.01)	Pariwisata (RL.01.15)	Pengembangan Kepariwisataaan (RL.01.15.01)	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (RL.01.15.01.01)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Publik	P.25.01
Layanan Publik (RL.01)	Pariwisata (RL.01.15)	Pengembangan Lembaga Kepariwisataaan (RL.01.15.02)	Pemasaran Pariwisata (RL.01.15.02.01)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Publik	P.25.02
Layanan Publik (RL.01)	Pariwisata (RL.01.15)	Pengembangan Objek Wisata (RL.01.15.03)	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (RL.01.15.03.01)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Publik	P.25.03
Layanan Publik (RL.01)	Pariwisata (RL.01.15)	Pengembangan Objek Wisata (RL.01.15.03)	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (RL.01.15.03.01)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Publik	P.25.04
Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	Pertanian (RL.01.07.01)	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (RL.01.07.01.01)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Publik	P.26.01
Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	Pertanian (RL.01.07.01)	Penyediaan Dan Pengembangan	Dinas Tanaman Pangan,	Publik	P.26.02

			Prasarana Pertanian (RL.01.07.01.02)	Hortikultura dan Peternakan		
Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	Pertanian (RL.01.07.01)	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (RL.01.07.01.03)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Publik	P.26.03
Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	Pertanian (RL.01.07.01)	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian (RL.01.07.01.04)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Publik	P.26.04
Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	Pertanian (RL.01.07.01)	Perizinan Usaha Pertanian (RL.01.07.01.05)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Publik	P.26.05
Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	Pertanian (RL.01.07.01)	Penyuluhan Pertanian (RL.01.07.01.06)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Publik	P.26.06
Layanan Publik (RL.01)	Perdagangan (RL.01.06)	Perdagangan Domestik (RL.01.06.04)	Layanan Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan (RL.01.06.04.01)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Publik	P.27.01
Layanan Publik (RL.01)	Perdagangan (RL.01.06)	Perdagangan Domestik (RL.01.06.04)	Layanan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (RL.01.06.04.02)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Publik	P.27.02
Layanan Publik (RL.01)	Perdagangan (RL.01.06)	Perdagangan Domestik (RL.01.06.04)	Layanan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (RL.01.06.04.03)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Publik	P.27.03
Layanan Publik (RL.01)	Perdagangan (RL.01.06)	Ekspor Dan Impor (RL.01.06.01)	Ekspor Impor (RL.01.06.01.01)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Publik	P.27.04
Layanan Publik (RL.01)	Perdagangan (RL.01.06)	Perlindungan Konsumen (RL.01.06.05)	Layanan Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen (RL.01.06.05.01)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Publik	P.27.05
Layanan Publik (RL.01)	Perdagangan (RL.01.06)	Penggunaan Produk Dalam Negeri (RL.01.06.02)	Layanan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (RL.01.06.02.01)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Publik	P.27.06
Layanan Publik (RL.01)	Industri (RL.01.05)	Pengembangan Industri (RL.01.05.08)	Perencanaan Dan Pembangunan Industri (RL.01.05.08.01)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Publik	P.28.01
Layanan Publik (RL.01)	Industri (RL.01.05)	Pengembangan Industri Strategis (RL.01.05.10)	Layanan Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota (RL.01.05.10.01)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Publik	P.28.02
Layanan Publik (RL.01)	Industri (RL.01.05)	Ketahanan Industri (RL.01.05.06)	Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (RL.01.05.06.01)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Publik	P.28.03
Layanan Publik (RL.01)	Transmigrasi (RL.01.18)	Layanan Transmigrasi (RL.01.18.01)	Layanan Perencanaan Kawasan Transmigrasi (RL.01.18.01.01)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Publik	P.29.01
Layanan Publik (RL.01)	Transmigrasi	Layanan Transmigrasi	Layanan Pembangunan Kawasan	Dinas Tenaga Kerja dan	Publik	P.29.02

	(RL.01.18)	(RL.01.18.01)	Transmigrasi (RL.01.18.01.02)	Transmigrasi		
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Keuangan (RL.02.02)	Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara (RL.02.02.01)	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah (RL.02.02.01.01)	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Publik	P.30.01
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Keuangan (RL.02.02)	Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara (RL.02.02.01)	Layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah (RL.02.02.01.02)	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Publik	P.30.02
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Perencanaan Pembangunan Nasional (RL.02.03)	Penyusunan Perencanaan (RL.02.03.02)	Layanan Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (RL.02.03.02.01)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	AP.01.01
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Perencanaan Pembangunan Nasional (RL.02.03)	Koordinasi Perencanaan (RL.02.03.03)	Layanan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RL.02.03.03.01)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	AP.01.02
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Keuangan (RL.02.02)	Penganggaran (RL.02.02.04)	Layanan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD (RL.02.02.04.01)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	AP.02.01
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Keuangan (RL.02.02)	Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara (RL.02.02.01)	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah (RL.02.02.01.01)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	AP.03.01
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Dukungan operasional organisasi (RL.02.06)	Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RL.02.02.08)	Layanan Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa (RL.02.02.08.01)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Satuan Kerja Perangkat Daerah	AP.04.01
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Dukungan operasional organisasi (RL.02.06)	Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RL.02.02.08)	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (RL.02.02.08.02)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Satuan Kerja Perangkat Daerah	AP.04.02
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Dukungan operasional organisasi (RL.02.06)	Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RL.02.02.08)	Layanan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan (RL.02.02.08.03)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Satuan Kerja Perangkat Daerah	AP.04.03
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Aparatur Negara (RL.02.04)	Manajemen ASN (RL.02.04.01)	Layanan Kepegawaian Daerah (RL.02.04.01.01)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Satuan Kerja Perangkat Daerah	AP.05.01

Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Data dan Informasi Pemerintah (RL.02.09)	Dukungan Kearsipan (RL.02.06.18)	Layanan Pengelolaan Arsip (RL.02.06.18.01)	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	AP.06.01
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Data dan Informasi Pemerintah (RL.02.09)	Dukungan Kearsipan (RL.02.06.18)	Layanan Perlindungan dan Penyelematan Arsip (RL.02.06.18.02)	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	AP.06.02
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Keuangan (RL.02.02)	Pengelolaan Barang Milik Negara (RL.02.02.05)	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah (RL.02.02.05.01)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	AP.07.01
Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Akuntabilitas Kinerja (RL.02.07)	Pengawasan Kinerja (RL.02.07.02)	Layanan Penyelenggaraan Pengawasan (RL.02.07.02.01)	Inspektorat	Satuan Kerja Perangkat Daerah	AP.08.01
Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Akuntabilitas Kinerja (RL.02.07)	Pengawasan Kinerja (RL.02.07.02)	Layanan Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi (RL.02.07.02.02)	Inspektorat	Satuan Kerja Perangkat Daerah	AP.08.02
Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Akuntabilitas Kinerja (RL.02.07)	Pengawasan Kinerja (RL.02.07.02)	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (RL.02.07.02.03)	Inspektorat	Satuan Kerja Perangkat Daerah	AP.09.01
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Aparatur Negara (RL.02.04)	Pendidikan Dan Pelatihan Keahlian (RL.02.04.03)	Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia (RL.02.04.03.01)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Satuan Kerja Perangkat Daerah	AP.10.01
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Organisasi dan Tata Kelola (RL.02.08)	Pengendalian Sumber Daya Kerja Sama (RL.02.08.08)	Penelitian dan Pengembangan Daerah (RL.02.08.08.01)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	AP.11.01
Layanan Publik (RL.01)	Kenegaraan (RL.01.03)	Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)	Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (RL.01.03.02.01)	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Satuan Kerja Perangkat Daerah	AP.12.01
Layanan Publik (RL.01)	Kenegaraan (RL.01.03)	Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Satuan Kerja Perangkat	AP.12.02

			Etika Serta Budaya Politik (RL.01.03.02.02)		Daerah	
Layanan Publik (RL.01)	Kenegaraan (RL.01.03)	Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (RL.01.03.02.03)	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Satuan Kerja Perangkat Daerah	AP.12.03
Layanan Publik (RL.01)	Kenegaraan (RL.01.03)	Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya (RL.01.03.02.04)	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Satuan Kerja Perangkat Daerah	AP.12.04
Layanan Publik (RL.01)	Kenegaraan (RL.01.03)	Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (RL.01.03.02.05)	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Satuan Kerja Perangkat Daerah	AP.12.05
Layanan Publik (RL.01)	Informasi (RL.01.44)	Statistik Sektoral (RL.02.09.06)	Layanan Statistik Sektoral (RL.02.09.06.01)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Satuan Kerja Perangkat Daerah	AP.13.01
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Data dan Informasi Pemerintah (RL.02.09)	Pengelolaan Sistem Informasi (RL.02.09.04)	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (RL.02.09.04.01)	Dinas Komunikasi dan Informatika	Satuan Kerja Perangkat Daerah	AP.14.01
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Aparatur Negara (RL.02.04)	Penyelenggaraan Pelayanan Publik (RL.02.04.08)	Layanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (RL.02.04.08.01)	Sekretariat Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	AP.15.01
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Aparatur Negara (RL.02.04)	Penyelenggaraan Pelayanan Publik (RL.02.04.08)	Layanan Perekonomian dan Pembangunan (RL.02.04.08.02)	Sekretariat Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	AP.15.02
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Aparatur Negara (RL.02.04)	Penyelenggaraan Pelayanan Publik (RL.02.04.08)	Layanan Pengelolaan Izin Lokasi (RL.02.04.08.03)	Sekretariat Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	AP.15.03
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Aparatur Negara (RL.02.04)	Penyelenggaraan Pelayanan Publik (RL.02.04.08)	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (RL.02.04.08.04)	Sekretariat DPRD	Satuan Kerja Perangkat Daerah	AP.16.01

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Layanan SPBE adalah serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE. Usulan Layanan Administrasi Berbasis Elektronik. Pada bagian ini identifikasi usulan layanan SPBE dibagi menjadi tiga kelompok usulan, meliputi Usulan Layanan Administrasi Berbasis Elektronik, Usulan Layanan Publik Berbasis Elektronik SPBE dan Usulan Layanan Terhadap Program.

Usulan layanan administrasi dan layanan publik berbasis elektronik ini dianalisis berdasarkan hasil Survei Kuisisioner dan Grup Diskusi Bersama Perangkat Daerah di Kabupaten Way Kanan. Usulan layanan SPBE disini membahas layanan administrasi dan layanan publik mana yang belum didukung aplikasi atau masih menggunakan aplikasi daerah atau perlu adanya pengembangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terdapat dua kelompok layanan SPBE yaitu layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik.

Aspek layanan administrasi sesuai Perpres 95/2018 terdiri dari 10 indikator layanan di dalamnya, antara lain:

1. Perencanaan
2. Penganggaran
3. Keuangan
4. Pengadaan barang dan jasa
5. Kepegawaian
6. Kearsipan Dinamis
7. Pengelolaan barang milik Daerah
8. Pengawasan Internal Pemerintah
9. Akuntabilitas kinerja organisasi
10. Kinerja Pegawai

Sedangkan aspek layanan publik berbasis elektronik yang dianalisis terdiri dari:

1. Layanan pengaduan layanan publik
2. Layanan Data Terbuka
3. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan
4. Layanan Publik Sektoral (Pendidikan, Pengajaran, Pekerjaan dan Usaha, Tempat Tinggal, Komunikasi dan Informasi, Lingkungan Hidup, Kesehatan, Jaminan Sosial, Energi, Perbankan, Perhubungan, Sumber Daya Alam, Kependudukan, Pariwisata, perizinan dst.)

Berdasarkan daftar layanan yang telah teridentifikasi, maka diusulkan rekomendasi aplikasi bagi layanan yang belum didukung aplikasi. Berikut hasil rekomendasi dari layanan administrasi dan layanan publik pada Pemkab Way Kanan dapat dilihat di table di bawah ini:

Tabel 15 Usulan Layanan Administrasi dan Layanan Publik Berbasis Elektronik

No	Jenis Layanan	Kode Referensi Layanan	Nama Aplikasi Usulan	OPD Pemilik Layanan
Layanan Publik				
1	Pengaduan Pelayanan publik	RL.01.03.01.01	Span Laporan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
2	Layanan Data Terbuka	RL.01.43.03.01	Open Data Way Kanan	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	RL.01.43.03.02	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Way Kanan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4	Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	RL.01.12.03.01	Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Penanaman Modal Terpadu	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
5	Layanan Promosi Penanaman Modal	RL.01.12.08.01	Sistem Informasi Manajemen Promosi Penanaman Modal Terpadu	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
6	Pelayanan Penanaman Modal	RL.01.12.04.01	Sistem Informasi Penanaman Modal Terpadu	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
7	layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	RL.01.12.05.01	Sistem Informasi Pengendalian Penanaman Modal Terpadu	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
8	Layanan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	RL.01.12.06.01	Sistem Informasi Penanaman Modal Terpadu	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
9	Layanan Pemberdayaan Sosial	RL.01.26.01.01	Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan Sosial Terpadu	Dinas Sosial
10	Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	RL.01.26.02.01	Sistem Informasi Manajemen Warga Negara Migran korban tindak kekerasan Terpadu	Dinas Sosial
11	Layanan Rehabilitasi Sosial	RL.01.26.01.02	Sistem Informasi Manajemen Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
12	Layanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	RL.01.26.01.03	Sistem Informasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
13	Layanan Pengelolaan Taman Makam	RL.01.40.02.01	Sistem Informasi Manajemen Taman Makam Pahlawan Terpadu	Dinas Sosial
14	Layanan Penanganan Bencana	RL.01.26.01.04	Sistem Informasi Manajemen Penanganan Bencana Terpadu	Dinas Sosial
15	Layanan Pendaftaran Penduduk	RL.01.23.02.01	Dashboard Pendaftaran penduduk Terpadu	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
16	Layanan Pencatatan Sipil	RL.01.23.03.01	Sistem Informasi Pencatatan Sipil Terpadu	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

				Sipil
17	Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	RL.01.23.03.02	Sistem Informasi Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
18	Layanan Pengelolaan Profil Kependudukan	RL.01.23.03.03	Sistem Informasi Pengelolaan Profil Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
19	Layanan Pengelolaan Pendidikan	RL.01.31.03.01	Sistem Informasi Pengelolaan Pendidikan Sekolah (SIPS)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	Layanan Pengembangan Kurikulum	RL.01.31.03.02	Sistem Informasi Manajemen Pembelajaran Pendidikan Sekolah (SIM-PPS)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21	Layanan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	RL.01.31.01.01	Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Pendidikan (SIM-PTP)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	Layanan Pengembangan Bahasa dan Sastra	RL.01.31.03.03	Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Bahasa dan Sastra (SIM-PBS)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	Layanan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RL.01.25.02.01	Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
24	Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RL.01.25.03.01	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK)	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
25	Layanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	RL.01.25.01.01	Sistem Informasi Manajemen Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SIMSPA)	Dinas Kesehatan
26	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	RL.01.25.02.02	Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Hidup Sehat	Dinas Kesehatan
27	Layanan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	RL.01.17.01.01	Sistem Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
28	Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	RL.01.17.01.02	Sistem Informasi Manajemen Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
29	Layanan Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	RL.01.17.01.03	Sistem Informasi Manajemen Persampahan Terpadu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30	Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	RL.01.17.01.04	Sistem Informasi Manajemen Layanan Pengolahan Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
31	Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	RL.01.17.01.05	Sistem Informasi Manajemen Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
32	Layanan Program Penataan Bangunan	RL.01.17.01.06	Sistem Informasi Manajemen Pemukiman Terpadu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

	Gedung			
33	Layanan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	RL.01.17.01.07	Sistem Informasi Manajemen Bangunan dan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
34	Layanan Program Penyelenggaraan Jalan	RL.01.17.01.08	Sistem Informasi Manajemen Monitoring Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
35	Layanan Pengembangan Jasa Kontruksi	RL.01.17.01.09	Sistem Informasi Pengendalian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
36	Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang	RL.01.17.01.10	Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
37	Layanan Pengembangan Perumahan	RL.01.20.01.01	Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
38	Layanan Kawasan Permukiman	RL.01.20.01.02	Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
39	Layanan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	RL.01.20.02.01	Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
40	Layanan Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	RL.01.20.01.03	Sistem Informasi Prasarana Sarana Utilitas Umum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
41	Layanan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	RL.01.20.02.01	Sistem Informasi Manajemen Sengketa Tanah Garapan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
42	Layanan Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	RL.01.20.01.04	Sistem Informasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
43	Layanan Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	RL.01.20.02.02	Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah dan Bangunan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
44	Layanan Penetapan Tanah Ulayat	RL.01.20.01.05	Sistem Informasi Manajemen Tanah Ulayat	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
45	Layanan Pengelolaan Tanah Kosong	RL.01.20.01.06	Sistem Informasi Penatagunaan Tanah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
46	Layanan Pengelolaan Izin Membuka Tanah	RL.01.20.02.03	Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah dan Bangunan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
47	Layanan Penatagunaan Tanah	RL.01.20.02.04	Sistem Informasi Penatagunaan Tanah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
48	Layanan Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	RL.01.29.06.01	Sistem Informasi Manajemen Ketenteraman dan Ketertiban Umum (SIM-KKU)	Satuan Polisi Pamong Praja
49	Layanan	RL.01.40.06.01	Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Bencana (SIM-PB)	Badan

	Penanggulangan Bencana			Penanggulanga n Bencana Daerah
50	Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	RL.01.40.07.01	Sistem Informasi Manajemen Kebakaran Terpadu (SIM-KT)	Pemadam Kebakaran
51	Layanan Perencanaan Tenaga Kerja	RL.01.32.02.01	Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Tenaga Kerja Terpadu	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
52	Layanan Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	RL.01.32.04.01	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Terpadu	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
53	Layanan Penempatan Tenaga Kerja	RL.01.32.05.01	Sistem Informasi Bursa Layanan Kerja Terpadu	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
54	Layanan Hubungan Industrial	RL.01.32.05.02	Sisem Informasi Manajemen Hubungan Industrial Terpadu	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
55	Layanan Pengarusatamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	RL.01.27.01.01	Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan Terpadu	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
56	Layanan Perlindungan Perempuan	RL.01.27.03.01	Sistem Informasi Perlindungan Perempuan Terpadu	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
57	Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	RL.01.27.01.02	Sistem Informasi Kualitas Keluarga Terpadu	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
58	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	RL.01.27.02.01	Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan Terpadu	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
59	Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	RL.01.27.02.02	Sistem Informasi Hak Anak Terpadu	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
60	Program Perlindungan Khusus Anak	RL.01.27.02.03	Sistem Informasi Khusus Anak Terpadu	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

				Penduduk dan Keluarga Berencana
61	Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	RL.01.07.02.01	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu	Dinas Ketahanan Pangan
62	Layanan Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	RL.01.07.02.02	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu	Dinas Ketahanan Pangan
63	Layanan Penanganan Kerawanan Pangan	RL.01.07.02.03	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu	Dinas Ketahanan Pangan
64	Layanan Pengawasan Keamanan Pangan	RL.01.07.02.04	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu	Dinas Ketahanan Pangan
65	Layanan Perencanaan Lingkungan Hidup	RL.01.40.02.02	Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
66	Layanan Pengendalian Pencemaran Dan/Kerusakan Lingkungan Hidup	RL.01.40.04.01	Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
67	Layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	RL.01.40.02.03	Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
68	Layanan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	RL.01.40.04.02	Sistem Informasi Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3)	Dinas Lingkungan Hidup
69	Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	RL.01.40.04.03	Sistem Informasi Manajemen dan Pengawasan Izin Lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
70	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	RL.01.40.04.04	Sistem Informasi Manajemen dan Pengawasan Izin Lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
71	Layanan Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	RL.01.40.01.01	Sistem Informasi Manajemen Pelatihan dan Penyuluhan	Dinas Lingkungan Hidup
72	Layanan Penghargaan	RL.01.40.04.05	Sistem Informasi Manajemen Penghargaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan

	Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			Hidup
73	Layanan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	RL.01.40.04.06	Sistem Informasi Manajemen Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
74	Layanan Pengelolaan Persampahan	RL.01.40.04.07	Sistem Informasi Manajemen Persampahan Terpadu	Dinas Lingkungan Hidup
75	Layanan Penataan Desa	RL.01.24.02.01	Sistem Informasi Manajemen dan Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
76	Layanan Peningkatan Kerja Sama Desa	RL.01.24.03.01	Sistem Informasi Manajemen dan Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
77	Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	RL.01.24.06.01	Sistem Informasi Administrasi Pemerintah Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
78	Layanan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	RL.01.24.01.01	Sistem Informasi Lembaga Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
79	Layanan Pengendalian Penduduk	RL.01.23.01.01	Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
80	Layanan Pembinaan Keluarga Berencanaan (KB)	RL.01.23.04.01	Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
81	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	RL.01.23.02.01	Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
82	Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (ILAJ)	RL.01.19.02.01	Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
83	Program Informasi dan Komunikasi Publik	RL.01.44.02.01	Sistem Informasi Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
84	Program Aplikasi Informatika	RL.01.44.02.02	Sistem Informasi Pengelolaan Aplikasi Informatika Terpadu	Dinas Komunikasi dan Informatika
85	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	RL.01.14.01.01	Sistem Informasi Manajemen Simpan Pinjam Koperasi (SIM-SPKOP)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
86	Layanan Pengawasan Dan	RL.01.13.01.01	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

	Pemeriksaan Koperasi			Menengah
87	Layanan Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	RL.01.13.01.02	Sistem Informasi Tingkat Kesehatan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
88	Layanan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	RL.01.13.01.03	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
89	Layanan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	RL.01.13.01.04	Sistem Informasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
90	Layanan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	RL.01.13.01.05	Sistem Informasi Manajemen UMKM (e-UMKM)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
91	Layanan Pengembangan Umkm	RL.01.13.01.06	Sistem Informasi Manajemen UMKM (e-UMKM)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
92	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	RL.01.35.01.01	Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
93	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	RL.01.35.01.02	Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
94	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	RL.01.35.02.01	Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
95	Pengembangan Kebudayaan	RL.01.42.01.01	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
96	Pengembangan Kesenian Tradisional	RL.01.42.02.01	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
97	Pembinaan Sejarah	RL.01.42.01.02	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
98	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	RL.01.42.04.01	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
99	Pengelolaan Permuseuman	RL.01.42.04.02	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
100	Layanan Pembinaan Perpustakaan	RL.01.42.01.01	Sistem Informasi Perpustakaan Terpadu	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
101	Layanan Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	RL.01.42.03.01	Sistem Informasi Pelestarian Koleksi dan Naskah Terpadu	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
102	Layanan Pengelolaan Perikanan Tangkap	RL.01.10.01.01	Sistem Informasi Manajemen Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
103	Layanan Pengelolaan Perikanan Budidaya	RL.01.10.01.02	Sistem Informasi Manajemen Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
104	Layanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	RL.01.10.02.01	Sistem Informasi Manajemen Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan

105	Layanan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	RL.01.10.03.01	Sistem Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
106	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	RL.01.15.01.01	Sistem Informasi Pariwisata Terpadu (e-Pariwisata)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
107	Pemasaran Pariwisata	RL.01.15.02.01	Sistem Informasi Pariwisata Terpadu (e-Pariwisata)	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
108	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	RL.01.15.03.01	Sistem Informasi Manajemen Ekonomi Kreatif	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
109	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	RL.01.15.03.01	Sistem Informasi Manajemen Pelatihan	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
110	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	RL.01.07.01.01	Layanan Sarana Produksi Pertanian (e-Saprotan)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
111	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	RL.01.07.01.02	Layanan Sarana Produksi Pertanian (e-Saprotan)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
112	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	RL.01.07.01.03	Layanan e-Halo MedikVet	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
113	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	RL.01.07.01.04	Layanan Asuransi (e-Asuransi)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
114	Perizinan Usaha Pertanian	RL.01.07.01.05	Sistem Informasi Perizinan Usaha Tani (e-SIPUT)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
115	Penyuluhan Pertanian	RL.01.07.01.06	Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (Simluhtan)	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
116	Layanan Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	RL.01.06.04.01	Sistem Informasi Perizinan Perusahaan Terpadu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
117	Layanan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	RL.01.06.04.02	Sistem Informasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
118	Layanan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	RL.01.06.04.03	Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
119	Ekspor Impor	RL.01.06.01.01	Sistem Informasi Ekspor Way Kanan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
120	Layanan Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	RL.01.06.05.01	Sistem Informasi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
121	Layanan Penggunaan Dan Pemasaran	RL.01.06.02.01	Sistem Informasi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	Dinas Perindustrian dan

	Produk Dalam Negeri			Perdagangan
122	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	RL.01.05.08.01	Sistem Informasi Perencanaan dan Pembangunan Industri (SIPPI)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
123	Layanan Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	RL.01.05.10.01	Sistem Informasi Perencanaan dan Pembangunan Industri (SIPPI)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
124	Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	RL.01.05.06.01	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
125	Layanan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	RL.01.18.01.01	Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
126	Layanan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	RL.01.18.01.02	Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
127	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	RL.02.02.01.01	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
128	Layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah	RL.02.02.01.02	Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIM-PD)	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Layanan Administrasi Pemerintahan				
129	Layanan Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	RL.02.03.02.01	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
130	Layanan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	RL.02.03.03.01	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
131	Layanan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	RL.02.02.04.01	Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
132	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	RL.02.02.01.01	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
133	Layanan Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa	RL.02.02.08.01	Sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
134	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	RL.02.02.08.02	Sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
135	Layanan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	RL.02.02.08.03	Sistem informasi Pembinaan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
136	Layanan Kepegawaian Daerah	RL.02.04.01.01	MySAPK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
137	Layanan Pengelolaan Arsip	RL.02.06.18.01	Sistem Informasi Kearsipan Terpadu	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
138	Layanan	RL.02.06.18.02	Sistem Informasi Perizinan Penggunaan Arsip	Dinas

	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip			Perpustakaan dan Arsip Daerah
139	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	RL.02.02.05.01	Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
140	Layanan Penyelenggaraan Pengawasan	RL.02.07.02.01	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIM-Pengawasan)	Inspektorat
141	Layanan Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	RL.02.07.02.02	Sistem Informasi Komunikasi dan Asistensi Pimpinan	Inspektorat
142	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	RL.02.07.02.03	Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (e-SAKIP)	Inspektorat
143	Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RL.02.04.03.01	e-Kinerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
144	Penelitian dan Pengembangan Daerah	RL.02.08.08.01	Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (SIPPD)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
145	Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	RL.01.03.02.01	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Publik	Badan Kesatuan bangsa dan politik
146	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	RL.01.03.02.02	Sistem Informasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Badan Kesatuan bangsa dan politik
147	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	RL.01.03.02.03	Sistem Informasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Badan Kesatuan bangsa dan politik
148	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	RL.01.03.02.04	Sistem Informasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Badan Kesatuan bangsa dan politik
149	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	RL.01.03.02.05	Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Badan Kesatuan bangsa dan politik
150	Layanan Statistik Sektoral	RL.02.09.06.01	Sistem Informasi Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
151	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	RL.02.09.04.01	Sistem Informasi Manajemen Persandian Terpadu	Dinas Komunikasi dan Informatika
152	Layanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	RL.02.04.08.01	Sistem Informasi Kesejahteraan Rakyat Terpadu	Sekretariat Daerah

153	Layanan Perekonomian dan Pembangunan	RL.02.04.08.02	Sistem Informasi Perekonomian dan pembangunan Terpadu	Sekretariat Daerah
154	Layanan Pengelolaan Izin Lokasi	RL.02.04.08.03	Sistem Informasi Pengelolaan Izin	Sekretariat Daerah
155	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	RL.02.04.08.04	Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (SIM Petuksi DPRD)	Sekretariat DPRD

Usulan Layanan Terhadap Program

Usulan layanan terhadap program ini diperoleh dari hasil Survei Kuisioner dan Grup Diskusi Bersama Perangkat Daerah di Kabupaten Way Kanan, yang mana nama program diambil berdasarkan RPJMD pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Tabel dibawah ini menjelaskan bahwa dari setiap OPD yang memiliki program diusulkan layanan guna menunjang program tersebut dan dipetakan sesuai dengan jenis layanannya.

Tabel 16 Usulan layanan Terhadap Program

OPD	Nama OPD	Nama Program	Usulan Layanan	Utama/Pendukung
A1	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Pengaduan Pelayanan Publik (P.01.01)	Layanan Pengaduan Pelayanan publik (RL.01.44.02.01)	Utama
B1	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Terbuka (P.02.01)	Layanan Data Terbuka (RL.01.43.03.01)	Utama
A1	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) (P.03.01)	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) (RL.01.43.03.02)	Utama
C1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (P.04.01)	Pengembangan Sektor Usaha Penanaman Modal (RL.01.12.03)	Utama
C1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Promosi Penanaman Modal (P.04.02)	Promosi Penanaman Modal (RL.01.12.08)	Utama
C1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Penanaman Modal (P.04.03)	Penanaman Modal Nasional (RL.01.12.04)	Utama
C1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (P.04.04)	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (RL.01.12.05)	Utama
C1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal (P.04.05)	Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal (RL.01.12.06)	Utama
D1	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial (P.05.01)	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Utama
D1	Dinas Sosial	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (P.05.02)	Penanganan Fakir Miskin (RL.01.26.02)	Utama
D1	Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial (P.05.03)	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Utama
D1	Dinas Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial (P.05.04)	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Utama
D1	Dinas Sosial	Program Pengelolaan Taman Makam (P.05.05)	Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem (RL.01.40.02)	Utama
D1	Dinas Sosial	Program Penanganan Bencana (P.05.06)	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Utama
E1	Dinas Kependudukan dan	Program Pendaftaran	Pengendalian Penduduk	Utama

	Catatan Sipil	Penduduk (P.06.01)	(RL.01.23.01)	
E1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pencatatan Sipil (P.06.02)	Pencatatan Sipil (RL.01.23.03)	Utama
E1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (P.06.03)	Kebijakan Kependudukan (RL.01.23.02)	Utama
E1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Program Pengelolaan Profil Kependudukan (P.06.04)	Kebijakan Kependudukan (RL.01.23.02)	Utama
F1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Pendidikan (P.07.01)	Pendidikan Dasar (RL.01.31.03)	Utama
F1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Kurikulum (P.07.02)	Pendidikan Dasar (RL.01.31.03)	Utama
F1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (P.07.03)	Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (RL.01.31.01)	Utama
F1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Bahasa Dan Sastra (P.07.04)	Pendidikan Dasar (RL.01.31.03)	Utama
G1;H1	Dinas Kesehatan;RSUD Zainal Abidin Pagar Alam	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (P.08.01)	Kesehatan Masyarakat (RL.01.25.02)	Utama
G1;H1	Dinas Kesehatan;RSUD Zainal Abidin Pagar Alam	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan (P.08.02)	Pemberdayaan Tenaga Kesehatan (RL.01.25.03)	Utama
H1	Dinas Kesehatan	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman (P.08.03)	Farmasi Dan Alat Kesehatan (RL.01.25.01)	Utama
H1	Dinas Kesehatan	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (P.08.04)	Kesehatan Masyarakat (RL.01.25.02)	Utama
I1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) (P.09.01)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Utama
I1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (P.09.02)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Utama
I1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional (P.09.03)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Utama
I1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah (P.09.04)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Utama
I1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase (P.09.05)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Utama
I1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan Gedung (P.09.06)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Utama
I1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya (P.09.07)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Utama
I1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan (P.09.08)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Utama
I1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembangan Jasa Konstruksi (P.09.09)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Utama
I1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang (P.09.10)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Utama
J1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengembangan Perumahan (P.10.01)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Utama
J1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman (P.10.02)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Utama
J1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh (P.10.03)	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Utama
J1	Dinas Perumahan dan	Peningkatan Prasarana,	Infrastruktur Permukiman	Utama

	Kawasan Permukiman	Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) (P.10.04)	(RL.01.20.01)	
J1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (P.10.05)	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Utama
J1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (P.10.06)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Utama
J1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee (P.10.07)	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Utama
J1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penetapan Tanah Ulayat (P.10.08)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Utama
J1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengelolaan Tanah Kosong (P.10.09)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Utama
J1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengelolaan Izin Membuka Tanah (P.10.10)	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Utama
J1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penatagunaan tanah (P.10.11)	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Utama
K1	Satuan Polisi Pamong Praja	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (P.11.01)	Keamanan Dan Ketertiban Umum (RL.01.29.06)	Utama
L1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggulangan Bencana (P.11.02)	Penanggulangan Bencana (RL.01.40.06)	Utama
M1	Pemadam Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (P.11.03)	Pencarian Dan Pertolongan (RL.01.40.07)	Utama
N1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Perencanaan Tenaga Kerja (P.12.01)	Pengelolaan Ketenagakerjaan (RL.01.32.02)	Utama
N1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (P.12.02)	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja (RL.01.32.04)	Utama
N1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penempatan Tenaga Kerja (P.12.03)	Penempatan Tenaga Kerja (RL.01.32.05)	Utama
N1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hubungan Industrial (P.12.04)	Penempatan Tenaga Kerja (RL.01.32.05)	Utama
O1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan (P.13.01)	Kesetaraan Gender (RL.01.27.01)	Utama
O1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perlindungan Perempuan (P.13.02)	Perlindungan Hak Perempuan (RL.01.27.03)	Utama
O1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peningkatan Kualitas Keluarga (P.13.03)	Kesetaraan Gender (RL.01.27.01)	Utama
O1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak (P.13.04)	Perlindungan Anak (RL.01.27.02)	Utama
O1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	Pemenuhan Hak Anak(PHA) (P.13.05)	Perlindungan Anak (RL.01.27.02)	Utama

	dan Keluarga Berencana			
O1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perlindungan Khusus Anak (P.13.06)	Perlindungan Anak (RL.01.27.02)	Utama
P1	Dinas Ketahanan Pangan	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan (P.14.01)	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Utama
P1	Dinas Ketahanan Pangan	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat (P.14.02)	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Utama
P1	Dinas Ketahanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan (P.14.03)	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Utama
P1	Dinas Ketahanan Pangan	Pengawasan Keamanan Pangan (P.14.04)	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Utama
Q1	Dinas Lingkungan Hidup	Perencanaan Lingkungan Hidup (P.15.01)	Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem (RL.01.40.02)	Utama
Q1	Dinas Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup (P.15.02)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Utama
Q1	Dinas Lingkungan Hidup	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) (P.15.03)	Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem (RL.01.40.02)	Utama
Q1	Dinas Lingkungan Hidup	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) (P.15.04)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Utama
Q1	Dinas Lingkungan Hidup	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (P.15.05)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Utama
Q1	Dinas Lingkungan Hidup	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH (P.15.06)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Utama
Q1	Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (P.15.07)	Dampak Perubahan Iklim (RL.01.40.01)	Utama
Q1	Dinas Lingkungan Hidup	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (P.15.08)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Utama
Q1	Dinas Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (P.15.09)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Utama
Q1	Dinas Lingkungan Hidup	Pengelolaan Persampahan (P.15.10)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Utama
R1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Penataan Desa (P.16.01)	Otonomi Daerah (RL.01.24.02)	Utama
R1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Peningkatan Kerja Sama Desa (P.16.02)	Administrasi Kewilayahan (RL.01.24.03)	Utama
R1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Administrasi Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RL.01.24.06)	Utama

	Kampung	(P.16.03)		
R1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat (P.16.04)	Keikutsertaan Masyarakat (RL.01.24.01)	Utama
O1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk (P.17.01)	Pengendalian Penduduk (RL.01.23.01)	Utama
O1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembinaan Keluarga Berencana(Kb) (P.17.02)	Keluarga Berencana (RL.01.23.04)	Utama
O1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera(KS) (P.17.03)	Kebijakan Kependudukan (RL.01.23.02)	Utama
S1	Dinas Perhubungan	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (ILAJ) (P.18.01)	Pelayanan Transportasi (RL.01.19.02)	Utama
B1	Dinas Komunikasi dan Informatika	Informasi Dan Komunikasi Publik (P.19.01)	Sistem Komunikasi Publik (RL.01.44.02)	Utama
B1	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi Informatika (P.19.02)	Sistem Komunikasi Publik (RL.01.44.02)	Utama
T1	Dinas Koperasi Umkm Perindustrian Dan Perdagangan	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam (P.20.01)	Dukungan Bisnis (RL.01.14.01)	Utama
T1	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi (P.20.02)	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Utama
T1	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi (P.20.03)	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Utama
T1	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian (P.20.04)	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Utama
T1	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi (P.20.05)	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Utama
T1	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (P.20.06)	Dukungan Bisnis (RL.01.14.01)	Utama
T1	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Pengembangan Umkm (P.20.07)	Dukungan Bisnis (RL.01.14.01)	Utama
U1	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (P.21.01)	Pemberdayaan Pemuda (RL.01.34.01)	Utama
U1	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan (P.21.02)	Kebijakan Di Bidang Pembudayaan Olahraga (RL.01.35.01)	Utama
U1	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (P.21.03)	Kebijakan Di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga (RL.01.35.02)	Utama
F1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan (P.22.01)	Kebijakan Kebudayaan (RL.01.42.01)	Utama
F1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional (P.22.02)	Perfilman Dan Kesenian (RL.01.42.02)	Utama
F1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sejarah (P.22.03)	Kebijakan Kebudayaan (RL.01.42.01)	Utama
F1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar	Cagar Budaya (RL.01.42.04)	Utama

		Budaya (P.22.04)		
F1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Permuseuman (P.22.05)	Cagar Budaya (RL.01.42.04)	Utama
V1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Program Pembinaan Perpustakaan (P.23.01)	Kebijakan Kebudayaan (RL.01.42.01)	Utama
V1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno (P.23.02)	Sastra Dan Bahasa Indonesia (RL.01.42.03)	Utama
W1	Dinas Perikanan	Pengelolaan Perikanan Tangkap (P.24.01)	Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)	Utama
W1	Dinas Perikanan	Pengelolaan Perikanan Budidaya (P.24.02)	Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)	Utama
W1	Dinas Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (P.24.03)	Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)	Utama
W1	Dinas Perikanan	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (P.24.04)	Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)	Utama
U1	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (P.25.01)	Pengembangan Kepariwisata (RL.01.15.01)	Utama
U1	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Pemasaran Pariwisata (P.25.02)	Pengembangan Lembaga Kepariwisata (RL.01.15.02)	Utama
U1	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (P.25.03)	Pengembangan Objek Wisata (RL.01.15.03)	Utama
U1	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (P.25.04)	Pengembangan Objek Wisata (RL.01.15.03)	Utama
X1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (P.26.01)	Pertanian (RL.01.07.01)	Utama
X1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian (P.26.02)	Pertanian (RL.01.07.01)	Utama
X1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (P.26.03)	Pertanian (RL.01.07.01)	Utama
X1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian (P.26.04)	Pertanian (RL.01.07.01)	Utama
X1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Perizinan Usaha Pertanian (P.26.05)	Pertanian (RL.01.07.01)	Utama
X1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan	Penyuluhan Pertanian (P.26.06)	Pertanian (RL.01.07.01)	Utama
Y1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (P.27.01)	Perdagangan Domestik (RL.01.06.04)	Utama
Y1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (P.27.02)	Perdagangan Domestik (RL.01.06.04)	Utama
Y1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (P.27.03)	Perdagangan Domestik (RL.01.06.04)	Utama
Y1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pengembangan Ekspor (P.27.04)	Ekspor Dan Impor (RL.01.06.01)	Utama

Y1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (P.27.05)	Perlindungan Konsumen (RL.01.06.05)	Utama
Y1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P.27.06)	Penggunaan Produk Dalam Negeri (RL.01.06.02)	Utama
Y1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Perencanaan Dan Pembangunan Industri (P.28.01)	Pengembangan Industri (RL.01.05.08)	Utama
Y1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota (P.28.02)	Pengembangan Industri Strategis (RL.01.05.10)	Utama
Y1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (P.28.03)	Ketahanan Industri (RL.01.05.06)	Utama
N1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Perencanaan kawasan Transmigrasi (P.29.01)	Layanan Transmigrasi (RL.01.18.01)	Utama
N1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P.29.02)	Layanan Transmigrasi (RL.01.18.01)	Utama
Z1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah (P.30.01)	Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara (RL.02.02.01)	Utama
Z1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah (P.30.02)	Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara (RL.02.02.01)	Utama
A2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (AP.01.01)	Layanan Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (RL.02.03.02.01)	Pendukung
A2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (AP.01.02)	Layanan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RL.02.03.03.01)	Pendukung
B2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Layanan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD (AP.02.01)	Layanan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD (RL.02.02.04.01)	Pendukung
B2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (AP.03.01)	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah (RL.02.02.01.01)	Pendukung
C2	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Penyelesaian Pengadaan (AP.04.01)	Layanan Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa (RL.02.02.08.01)	Pendukung
C2	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Secara Elektronik (AP.04.02)	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (RL.02.02.08.02)	Pendukung
C2	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan (AP.04.03)	Layanan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan (RL.02.02.08.03)	Pendukung
D2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Program Kepegawaian Daerah (AP.05.01)	Layanan Kepegawaian Daerah (RL.02.04.01.01)	Pendukung
V1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Pengelolaan Arsip (AP.06.01)	Layanan Pengelolaan Arsip (RL.02.06.18.01)	Pendukung
V1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (AP.06.02)	Layanan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (RL.02.06.18.02)	Pendukung
B2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah (AP.07.01)	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah (RL.02.02.05.01)	Pendukung
E2	Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan (AP.08.01)	Layanan Penyelenggaraan Pengawasan (RL.02.07.02.01)	Pendukung
E2	Inspektorat	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi (AP.08.02)	Layanan Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi (RL.02.07.02.02)	Pendukung
D2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Akuntabilitas Kinerja Organisasi (AP.09.01)	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (RL.02.07.02.03)	Pendukung

D2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Pengembangan Sumber Daya Manusia (AP.10.01)	Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia (RL.02.04.03.01)	Pendukung
A2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Daerah (AP.11.01)	Penelitian dan Pengembangan Daerah (RL.02.08.08.01)	Pendukung
F2	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan (AP.12.01)	Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (RL.01.03.02.01)	Pendukung
F2	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (AP.12.02)	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (RL.01.03.02.02)	Pendukung
F2	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (AP.12.03)	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (RL.01.03.02.03)	Pendukung
F2	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya (AP.12.04)	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya (RL.01.03.02.04)	Pendukung
F2	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (AP.12.05)	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (RL.01.03.02.05)	Pendukung
B1	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor (AP.13.01)	Layanan Statistik Sektor (RL.02.09.06.01)	Pendukung
B1	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (AP.14.01)	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (RL.02.09.04.01)	Pendukung
G2	Sekretariat Daerah	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (AP.15.01)	Layanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (RL.02.04.08.01)	Pendukung
G2	Sekretariat Daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan (AP.15.02)	Layanan Perekonomian dan Pembangunan (RL.02.04.08.02)	Pendukung
G2	Sekretariat Daerah	Pengelolaan Izin Lokasi (AP.15.03)	Layanan Pengelolaan Izin Lokasi (RL.02.04.08.03)	Pendukung
H2	Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (AP.16.01)	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (RL.02.04.08.04)	Pendukung

Berdasarkan Tabel sebelumnya usulan layanan terhadap program pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan diperoleh dengan **Usulan Utama dengan jumlah 128** sedangkan jumlah **Usulan Pendukung diperoleh 27 usulan**. Secara keseluruhan **terdapat 155** usulan layanan terhadap program pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

4.2.1 Penyedia Layanan

Berdasarkan Perpres No 95 tahun 2018, layanan SPBE terdiri dari dua layanan, yaitu Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan. Layanan ini merupakan perwujudan aplikasi yang didefinisikan secara eksplisit serta merepresentasikan fungsionalitas komponen terhadap lingkungannya. Fungsionalitas ini dapat diakses melalui satu atau lebih antarmuka layanan yang disediakan oleh penyedia layanan dan diatur dalam pengelolaan tingkat layanan. Model pengelolaan tingkat layanan dapat meliputi kebijakan *service level*

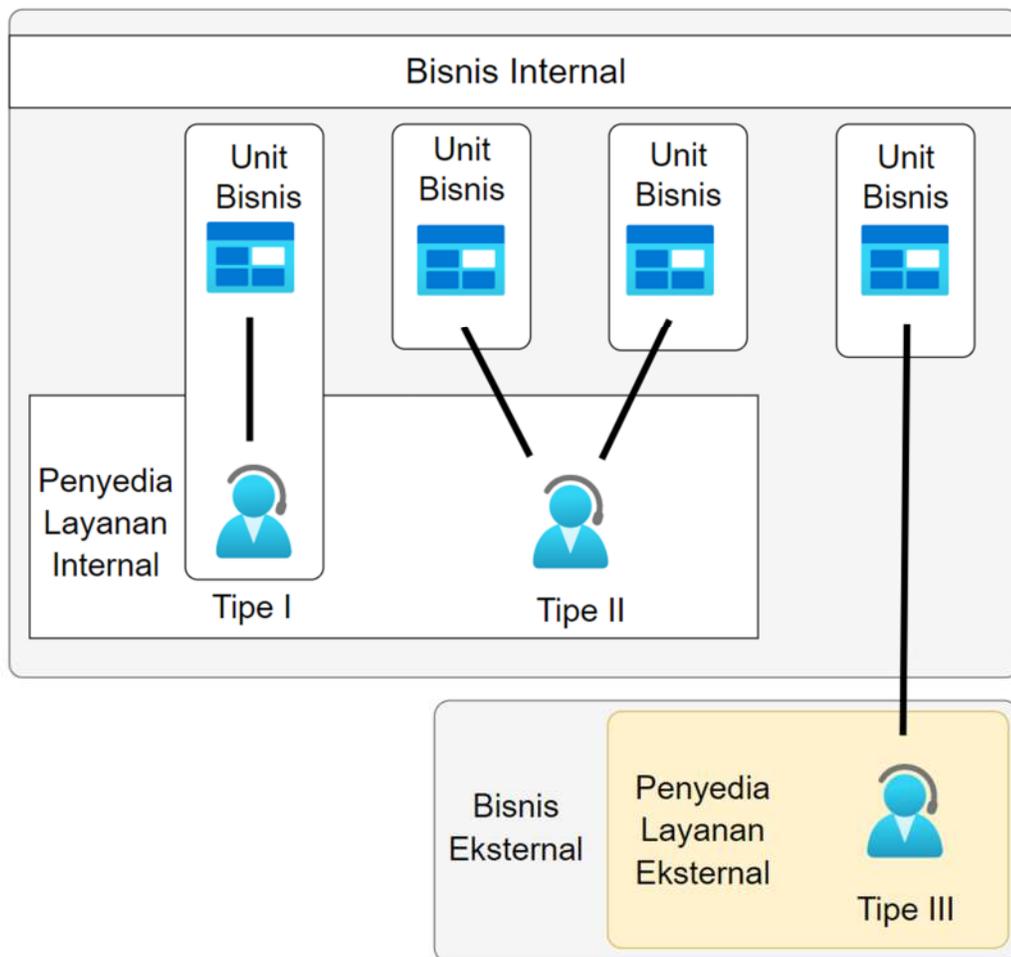
management (SLM) yang berhubungan dengan proses perencanaan, koordinasi, penyusunan, persetujuan, pemantauan, dan pelaporan, terdiri dari:

1. Pengelolaan *service level agreements* (SLA), yaitu perjanjian tertulis diantara penyedia layanan dan pelanggan, yaitu mendefinisikan target layanan utama dan tanggung jawab dari kedua belah pihak. SLM berfungsi untuk memastikan semua target dan tindakan yang telah disepakati dalam SLA dengan bisnis yang didukung oleh *operational level agreements* (OLA).
2. Pengelolaan OLA, yaitu perjanjian antara penyedia layanan dan bagian lainnya dalam organisasi yang sama, tujuannya membantu penyediaan persyaratan layanan. OLA berisi target yang mendasari SLA, memastikan target tidak dilanggar oleh kegagalan aktivitas pendukung.
3. Pengelolaan *underpinning contract* (UC), merupakan sebuah perjanjian dengan penyedia layanan eksternal dalam tingkatan tertentu.

Pengelolaan SLA, OLA dan UC diimplementasikan sebagai suatu proses pengelolaan yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan tingkat layanan di Pemerintah Kabupaten Way Kanan

Tujuan dari tahapan ini adalah mengidentifikasi tipe penyedia layanan untuk penetapan SLA, OLA dan UC, dengan cara melakukan pengelompokan penyedia layanan ke dalam 3 (tiga) tipe penyedia layanan, seperti dapat dilihat pada Gambar . Ketiga tipe penyedia layanan tersebut, adalah :

1. Tipe I, adalah penyedia layanan internal Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
2. Tipe II, adalah layanan Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang digunakan secara bersama.
3. Tipe III, adalah penyedia layanan eksternal yang terkait dengan layanan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, yaitu Kominfo (Infrastruktur dan Aplikasi), PPN/ Bappenas (Data), Badan Siber dan Sandi Negara/ BSSN (Keamanan).



Gambar 62 Pengelompokan Tipe Penyedia Layanan

Berdasarkan hasil klasifikasi tipe layanan, pengelompokan penyedia layanan untuk kebutuhan pengelolaan tingkat layanan di Pemerintah Kabupaten Way Kanan seperti dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 17 Pengelompokan Tipe Penyedia Layanan Kabupaten Way Kanan

Kategori layanan	Layanan yang disediakan (Sub Kategori)	Tipe Penyedia Layanan	Pengguna Layanan	Tingkat Layanan
Kelembagaan Negara (RL.01.03.01)	Pengaduan Pelayanan publik (RL.01.03.01.01)	Tipe I	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	SLA Antara Unit TI dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Pelayanan Informasi (RL.01.43.03)	Layanan Data Terbuka (RL.01.43.03.01)	Tipe II	Dinas Komunikasi dan Informatika	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Komunikasi dan Informatika
Pelayanan Informasi (RL.01.43.03)	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) (RL.01.43.03.02)	Tipe I	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	SLA Antara Unit TI dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Pengembangan Sektor Usaha Penanaman Modal (RL.01.12.03)	Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (RL.01.12.03.01)	Tipe II	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
Promosi Penanaman Modal (RL.01.12.08)	Layanan Promosi Penanaman Modal (RL.01.12.08.01)	Tipe II	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
Penanaman Modal Nasional (RL.01.12.04)	Pelayanan Penanaman Modal (RL.01.12.04.01)	Tipe II	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (RL.01.12.05)	Layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (RL.01.12.05.01)	Tipe II	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal (RL.01.12.06)	Layanan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal (RL.01.12.06.01)	Tipe II	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Layanan Pemberdayaan Sosial (RL.01.26.01.01)	Tipe II	Dinas Sosial	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Sosial
Penanganan Fakir Miskin (RL.01.26.02)	Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (RL.01.26.02.01)	Tipe II	Dinas Sosial	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Sosial
Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Layanan Rehabilitasi Sosial (RL.01.26.01.02)	Tipe II	Dinas Sosial	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Sosial

Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Layanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial (RL.01.26.01.03)	Tipe II	Dinas Sosial	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Sosial
Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem (RL.01.40.02)	Layanan Pengelolaan Taman Makam (RL.01.40.02.01)	Tipe II	Dinas Sosial	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Sosial
Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Layanan Penanganan Bencana (RL.01.26.01.04)	Tipe II	Dinas Sosial	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Sosial
Kebijakan Kependudukan (RL.01.23.02)	Layanan Pendaftaran Penduduk (RL.01.23.02.01)	Tipe II	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil (RL.01.23.03)	Layanan Pencatatan Sipil (RL.01.23.03.01)	Tipe II	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil (RL.01.23.03)	Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (RL.01.23.03.02)	Tipe II	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil (RL.01.23.03)	Layanan Pengelolaan Profil Kependudukan (RL.01.23.03.03)	Tipe II	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Pendidikan Dasar (RL.01.31.03)	Layanan Pengelolaan Pendidikan (RL.01.31.03.01)	Tipe II	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pendidikan Dasar (RL.01.31.03)	Layanan Pengembangan Kurikulum (RL.01.31.03.02)	Tipe II	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (RL.01.31.01)	Layanan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (RL.01.31.01.01)	Tipe II	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pendidikan Dasar (RL.01.31.03)	Layanan Pengembangan Bahasa dan Sastra (RL.01.31.03.03)	Tipe II	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kesehatan Masyarakat (RL.01.25.02)	Layanan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (RL.01.25.02.01)	Tipe II	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
Pemberdayaan Tenaga Kesehatan (RL.01.25.03)	Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (RL.01.25.03.01)	Tipe II	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
Farmasi Dan Alat	Layanan Sediaan Farmasi, Alat	Tipe II	Dinas Kesehatan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas

Kesehatan (RL.01.25.01)	Kesehatan Dan Makanan Minuman (RL.01.25.01.01)			Kesehatan
Kesehatan Masyarakat (RL.01.25.02)	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (RL.01.25.02.02)	Tipe II	Dinas Kesehatan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Kesehatan
Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Layanan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (RL.01.17.01.01)	Tipe II	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RL.01.17.01.02)	Tipe II	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Layanan Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional (RL.01.17.01.03)	Tipe II	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah (RL.01.17.01.04)	Tipe II	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase (RL.01.17.01.05)	Tipe II	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Layanan Program Penataan Bangunan Gedung (RL.01.17.01.06)	Tipe II	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Layanan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya (RL.01.17.01.07)	Tipe II	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Layanan Program Penyelenggaraan Jalan (RL.01.17.01.08)	Tipe II	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Layanan Pengembangan Jasa Kontruksi (RL.01.17.01.09)	Tipe II	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang (RL.01.17.01.10)	Tipe II	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Layanan Pengembangan Perumahan (RL.01.20.01.01)	Tipe II	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Layanan Kawasan Permukiman (RL.01.20.01.02)	Tipe II	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Layanan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh (RL.01.20.02.01)	Tipe II	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Layanan Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) (RL.01.20.01.03)	Tipe II	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Layanan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (RL.01.20.02.01)	Tipe II	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Layanan Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan (RL.01.20.01.04)	Tipe II	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Layanan Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee (RL.01.20.02.02)	Tipe II	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Layanan Penetapan Tanah Ulayat (RL.01.20.01.05)	Tipe II	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Layanan Pengelolaan Tanah Kosong (RL.01.20.01.06)	Tipe II	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Layanan Pengelolaan Izin Membuka Tanah (RL.01.20.02.03)	Tipe II	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Layanan Penatagunaan Tanah (RL.01.20.02.04)	Tipe II	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Keamanan Dan Ketertiban Umum (RL.01.29.06)	Layanan Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (RL.01.29.06.01)	Tipe II	Satuan Polisi Pamong Praja	SLA Antara Unit TI dengan Satuan Polisi Pamong Praja
Penanggulangan Bencana (RL.01.40.06)	Layanan Penanggulangan Bencana (RL.01.40.06.01)	Tipe II	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SLA Antara Unit TI dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pencarian Dan Pertolongan (RL.01.40.07)	Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (RL.01.40.07.01)	Tipe II	Pemadam Kebakaran	SLA Antara Unit TI dengan Pemadam Kebakaran
Pengelolaan Ketenagakerjaan (RL.01.32.02)	Layanan Perencanaan Tenaga Kerja (RL.01.32.02.01)	Tipe II	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja (RL.01.32.04)	Layanan Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja (RL.01.32.04.01)	Tipe II	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penempatan Tenaga Kerja (RL.01.32.05)	Layanan Penempatan Tenaga Kerja (RL.01.32.05.01)	Tipe II	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penempatan Tenaga Kerja (RL.01.32.05)	Layanan Hubungan Industrial (RL.01.32.05.02)	Tipe II	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kesetaraan Gender (RL.01.27.01)	Layanan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27.01.01)	Tipe II	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

				Keluarga Berencana
Perlindungan Hak Perempuan (RL.01.27.03)	Layanan Perlindungan Perempuan (RL.01.27.03.01)	Tipe II	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kesetaraan Gender (RL.01.27.01)	Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga (RL.01.27.01.02)	Tipe II	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Perlindungan Anak (RL.01.27.02)	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak (RL.01.27.02.01)	Tipe II	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Perlindungan Anak (RL.01.27.02)	Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA) (RL.01.27.02.02)	Tipe II	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Perlindungan Anak (RL.01.27.02)	Program Perlindungan Khusus Anak (RL.01.27.02.03)	Tipe II	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan (RL.01.07.02.01)	Tipe II	Dinas Ketahanan Pangan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Ketahanan Pangan
Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Layanan Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat (RL.01.07.02.02)	Tipe II	Dinas Ketahanan Pangan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Ketahanan Pangan
Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Layanan Penanganan Kerawanan Pangan (RL.01.07.02.03)	Tipe II	Dinas Ketahanan Pangan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Ketahanan Pangan
Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Layanan Pengawasan Keamanan Pangan (RL.01.07.02.04)	Tipe II	Dinas Ketahanan Pangan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Ketahanan Pangan
Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem (RL.01.40.02)	Layanan Perencanaan Lingkungan Hidup (RL.01.40.02.02)	Tipe II	Dinas Lingkungan Hidup	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Lingkungan Hidup
Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Layanan Pengendalian Pencemaran Dan/Kerusakan Lingkungan Hidup (RL.01.40.04.01)	Tipe II	Dinas Lingkungan Hidup	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Lingkungan Hidup
Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem	Layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Tipe II	Dinas Lingkungan Hidup	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Lingkungan Hidup

(RL.01.40.02)	(RL.01.40.02.03)			
Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Layanan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) (RL.01.40.04.02)	Tipe II	Dinas Lingkungan Hidup	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Lingkungan Hidup
Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (RL.01.40.04.03)	Tipe II	Dinas Lingkungan Hidup	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Lingkungan Hidup
Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH (RL.01.40.04.04)	Tipe II	Dinas Lingkungan Hidup	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Lingkungan Hidup
Dampak Perubahan Iklim (RL.01.40.01)	Layanan Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (RL.01.40.01.01)	Tipe II	Dinas Lingkungan Hidup	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Lingkungan Hidup
Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Layanan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (RL.01.40.04.05)	Tipe II	Dinas Lingkungan Hidup	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Lingkungan Hidup
Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Layanan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (RL.01.40.04.06)	Tipe II	Dinas Lingkungan Hidup	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Lingkungan Hidup
Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Layanan Pengelolaan Persampahan (RL.01.40.04.07)	Tipe II	Dinas Lingkungan Hidup	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Lingkungan Hidup
Otonomi Daerah (RL.01.24.02)	Layanan Penataan Desa (RL.01.24.02.01)	Tipe II	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
Administrasi Kewilayahan (RL.01.24.03)	Layanan Peningkatan Kerja Sama Desa (RL.01.24.03.01)	Tipe II	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RL.01.24.06)	Layanan Administrasi Pemerintahan Desa (RL.01.24.06.01)	Tipe II	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
Keikutsertaan Masyarakat (RL.01.24.01)	Layanan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat (RL.01.24.01.01)	Tipe II	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung

Pengendalian Penduduk (RL.01.23.01)	Layanan Pengendalian Penduduk (RL.01.23.01.01)	Tipe II	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Keluarga Berencana (RL.01.23.04)	Layanan Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (RL.01.23.04.01)	Tipe II	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kebijakan Kependudukan (RL.01.23.02)	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (RL.01.23.02.01)	Tipe II	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pelayanan Transportasi (RL.01.19.02)	Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (ILAJ) (RL.01.19.02.01)	Tipe II	Dinas Perhubungan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Perhubungan
Sistem Komunikasi Publik (RL.01.44.02)	Program Informasi dan Komunikasi Publik (RL.01.44.02.01)	Tipe II	Dinas Komunikasi dan Informatika	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Komunikasi dan Informatika
Sistem Komunikasi Publik (RL.01.44.02)	Program Aplikasi Informatika (RL.01.44.02.02)	Tipe II	Dinas Komunikasi dan Informatika	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Komunikasi dan Informatika
Dukungan Bisnis (RL.01.14.01)	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam (RL.01.14.01.01)	Tipe II	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Layanan Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi (RL.01.13.01.01)	Tipe II	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Layanan Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi (RL.01.13.01.02)	Tipe II	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Layanan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian (RL.01.13.01.03)	Tipe II	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Layanan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi (RL.01.13.01.04)	Tipe II	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Layanan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) (RL.01.13.01.05)	Tipe II	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Layanan Pengembangan Umkm (RL.01.13.01.06)	Tipe II	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Pemberdayaan Pemuda (RL.01.35.01)	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (RL.01.35.01.01)	Tipe II	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
Kebijakan Di Bidang	Pengembangan Kapasitas Daya Saing	Tipe II	Dinas Pemuda, Olahraga Dan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pemuda,

Pembudayaan Olahraga (RL.01.35.01)	Keolahragaan (RL.01.35.01.02)		Pariwisata	Olahraga Dan Pariwisata
Kebijakan Di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga (RL.01.35.02)	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (RL.01.35.02.01)	Tipe II	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
Kebijakan Kebudayaan (RL.01.42.01)	Pengembangan Kebudayaan (RL.01.42.01.01)	Tipe II	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Perfilman Dan Kesenian (RL.01.42.02)	Pengembangan Kesenian Tradisional (RL.01.42.02.01)	Tipe II	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kebijakan Kebudayaan (RL.01.42.01)	Pembinaan Sejarah (RL.01.42.01.02)	Tipe II	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Cagar Budaya (RL.01.42.04)	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya (RL.01.42.04.01)	Tipe II	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Cagar Budaya (RL.01.42.04)	Pengelolaan Permuseuman (RL.01.42.04.02)	Tipe II	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kebijakan Kebudayaan (RL.01.42.01)	Layanan Pembinaan Perpustakaan (RL.01.42.01.01)	Tipe II	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Sastra Dan Bahasa Indonesia (RL.01.42.03)	Layanan Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno (RL.01.42.03.01)	Tipe II	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)	Layanan Pengelolaan Perikanan Tangkap (RL.01.10.01.01)	Tipe II	Dinas Perikanan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Perikanan
Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)	Layanan Pengelolaan Perikanan Budidaya (RL.01.10.01.02)	Tipe II	Dinas Perikanan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Perikanan
Benih Dan Bibit Perikanan Budi Daya (RL.01.10.02)	Layanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (RL.01.10.02.01)	Tipe II	Dinas Perikanan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Perikanan
Kebijakan Di Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya (RL.01.10.03)	Layanan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (RL.01.10.03.01)	Tipe II	Dinas Perikanan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Perikanan
Pengembangan Kepariwisataan (RL.01.15.01)	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (RL.01.15.01.01)	Tipe II	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
Pengembangan Lembaga Kepariwisataan (RL.01.15.02)	Pemasaran Pariwisata (RL.01.15.02.01)	Tipe II	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
Pengembangan Objek Wisata (RL.01.15.03)	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (RL.01.15.03.01)	Tipe II	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata

Pengembangan Objek Wisata (RL.01.15.03)	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (RL.01.15.03.01)	Tipe II	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
Pertanian (RL.01.07.01)	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (RL.01.07.01.01)	Tipe II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Pertanian (RL.01.07.01)	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian (RL.01.07.01.02)	Tipe II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Pertanian (RL.01.07.01)	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (RL.01.07.01.03)	Tipe II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Pertanian (RL.01.07.01)	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian (RL.01.07.01.04)	Tipe II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Pertanian (RL.01.07.01)	Perizinan Usaha Pertanian (RL.01.07.01.05)	Tipe II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Pertanian (RL.01.07.01)	Penyuluhan Pertanian (RL.01.07.01.06)	Tipe II	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Perdagangan Domestik (RL.01.06.04)	Layanan Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan (RL.01.06.04.01)	Tipe II	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Perdagangan Domestik (RL.01.06.04)	Layanan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (RL.01.06.04.02)	Tipe II	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Perdagangan Domestik (RL.01.06.04)	Layanan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (RL.01.06.04.03)	Tipe II	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Ekspor Dan Impor (RL.01.06.01)	Ekspor Impor (RL.01.06.01.01)	Tipe II	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Perlindungan Konsumen (RL.01.06.05)	Layanan Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen (RL.01.06.05.01)	Tipe II	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Penggunaan Produk Dalam Negeri (RL.01.06.02)	Layanan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (RL.01.06.02.01)	Tipe II	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pengembangan Industri (RL.01.05.08)	Perencanaan Dan Pembangunan Industri (RL.01.05.08.01)	Tipe II	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pengembangan Industri Strategis (RL.01.05.10)	Layanan Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota (RL.01.05.10.01)	Tipe II	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Ketahanan Industri (RL.01.05.06)	Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (RL.01.05.06.01)	Tipe II	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

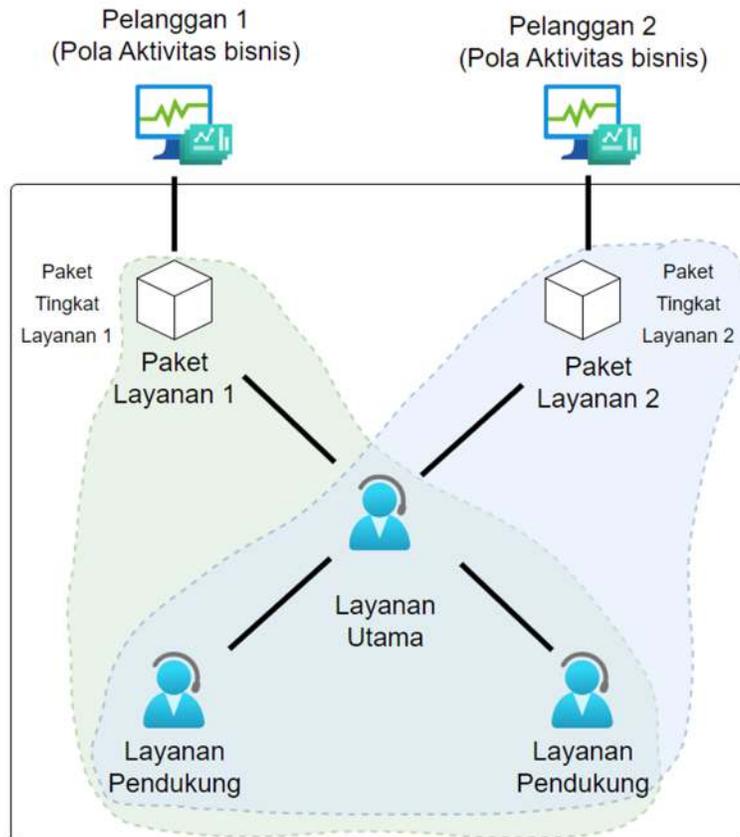
Layanan Transmigrasi (RL.01.18.01)	Layanan Perencanaan Kawasan Transmigrasi (RL.01.18.01.01)	Tipe II	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Layanan Transmigrasi (RL.01.18.01)	Layanan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (RL.01.18.01.02)	Tipe II	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara (RL.02.02.01)	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah (RL.02.02.01.01)	Tipe II	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	SLA Antara Unit TI dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara (RL.02.02.01)	Layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah (RL.02.02.01.02)	Tipe II	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	SLA Antara Unit TI dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Penyusunan Perencanaan (RL.02.03.02)	Layanan Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (RL.02.03.02.01)	Tipe I	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SLA Antara Unit TI dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Koordinasi Perencanaan (RL.02.03.03)	Layanan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RL.02.03.03.01)	Tipe I	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SLA Antara Unit TI dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penganggaran (RL.02.02.04)	Layanan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD (RL.02.02.04.01)	Tipe I	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	SLA Antara Unit TI dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara (RL.02.02.01)	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah (RL.02.02.01.01)	Tipe I	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	SLA Antara Unit TI dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RL.02.02.08)	Layanan Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa (RL.02.02.08.01)	Tipe I	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	SLA Antara Unit TI dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RL.02.02.08)	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (RL.02.02.08.02)	Tipe I	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	SLA Antara Unit TI dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RL.02.02.08)	Layanan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan (RL.02.02.08.03)	Tipe I	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	SLA Antara Unit TI dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Manajemen ASN (RL.02.04.01)	Layanan Kepegawaian Daerah (RL.02.04.01.01)	Tipe I	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	SLA Antara Unit TI dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Dukungan Kearsipan (RL.02.06.18)	Layanan Pengelolaan Arsip (RL.02.06.18.01)	Tipe I	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Dukungan Kearsipan (RL.02.06.18)	Layanan Perlindungan dan Penyelematan Arsip (RL.02.06.18.02)	Tipe I	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Pengelolaan Barang Milik Negara (RL.02.02.05)	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah (RL.02.02.05.01)	Tipe I	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	SLA Antara Unit TI dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pengawasan Kinerja (RL.02.07.02)	Layanan Penyelenggaraan Pengawasan (RL.02.07.02.01)	Tipe I	Inspektorat	SLA Antara Unit TI dengan Inspektorat
Pengawasan Kinerja (RL.02.07.02)	Layanan Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi (RL.02.07.02.02)	Tipe I	Inspektorat	SLA Antara Unit TI dengan Inspektorat
Pengawasan Kinerja (RL.02.07.02)	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (RL.02.07.02.03)	Tipe I	Inspektorat	SLA Antara Unit TI dengan Inspektorat
Pendidikan Dan Pelatihan Keahlian (RL.02.04.03)	Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia (RL.02.04.03.01)	Tipe I	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	SLA Antara Unit TI dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pengendalian Sumber Daya Kerja Sama (RL.02.08.08)	Penelitian dan Pengembangan Daerah (RL.02.08.08.01)	Tipe I	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SLA Antara Unit TI dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)	Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (RL.01.03.02.01)	Tipe I	Badan Kesatuan bangsa dan politik	SLA Antara Unit TI dengan Badan Kesatuan bangsa dan politik
Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (RL.01.03.02.02)	Tipe I	Badan Kesatuan bangsa dan politik	SLA Antara Unit TI dengan Badan Kesatuan bangsa dan politik
Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (RL.01.03.02.03)	Tipe I	Badan Kesatuan bangsa dan politik	SLA Antara Unit TI dengan Badan Kesatuan bangsa dan politik
Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya (RL.01.03.02.04)	Tipe I	Badan Kesatuan bangsa dan politik	SLA Antara Unit TI dengan Badan Kesatuan bangsa dan politik
Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (RL.01.03.02.05)	Tipe I	Badan Kesatuan bangsa dan politik	SLA Antara Unit TI dengan Badan Kesatuan bangsa dan politik
Statistik Sektor (RL.02.09.06)	Layanan Statistik Sektor (RL.02.09.06.01)	Tipe I	Dinas Komunikasi dan Informatika	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengelolaan Sistem Informasi (RL.02.09.04)	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (RL.02.09.04.01)	Tipe I	Dinas Komunikasi dan Informatika	SLA Antara Unit TI dengan Dinas Komunikasi dan Informatika
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (RL.02.04.08)	Layanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (RL.02.04.08.01)	Tipe I	Sekretariat Daerah	SLA Antara Unit TI dengan Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan Pelayanan Publik (RL.02.04.08)	Layanan Perekonomian dan Pembangunan (RL.02.04.08.02)	Tipe I	Sekretariat Daerah	SLA Antara Unit TI dengan Sekretariat Daerah
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (RL.02.04.08)	Layanan Pengelolaan Izin Lokasi (RL.02.04.08.03)	Tipe I	Sekretariat Daerah	SLA Antara Unit TI dengan Sekretariat Daerah
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (RL.02.04.08)	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (RL.02.04.08.04)	Tipe I	Sekretariat DPRD	SLA Antara Unit TI dengan Sekretariat DPRD

4.2.2 Paket Layanan

Mendefinisikan paket layanan tujuannya adalah untuk menetapkan pola layanan sebagai sebuah paket layanan. Hal ini dilakukan sebagai dukungan aktivitas dan jaminan keberlangsungan layanan (warranty) melalui pendefinisian paket tingkat layanan. Konsep dari pemaketan layanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan seperti disajikan pada Gambar dibawah ini



Gambar 63 Pemaketan Layanan Pemerintah Kabupaten Way Kanan

Berdasarkan hasil klasifikasi layanan dan tipe penyedia layanan, maka dilakukan pemaketan untuk menetapkan sub kategori layanan pendukung yang melekat kedalam kategori layanan, atau menetapkan konsolidasi layanan yang dapat digunakan secara bersama melalui paket tingkat layanan yang berbeda, sesuai dengan pola aktivitas bisnis masing-masing pengguna seperti dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel 18 Paket Layanan Kabupaten Way Kanan

No	Perangkat Daerah dan paket Layanan	Pengguna	Otoritas Akses Paket Layanan	
			Sub Kategori Layanan	Kategori Layanan
1	Bagian Hukum Sekretariat Daerah SLA-01	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Pengaduan Pelayanan publik (RL.01.03.01.01)	Kelembagaan Negara (RL.01.03.01)
2	Dinas Komunikasi dan Informatika SLA-02	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan Data Terbuka (RL.01.43.03.01)	Pelayanan Informasi (RL.01.43.03)
3	Bagian Hukum Sekretariat Daerah SLA-01	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) (RL.01.43.03.02)	Pelayanan Informasi (RL.01.43.03)
4	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu SLA-03	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (RL.01.12.03.01)	Pengembangan Sektor Usaha Penanaman Modal (RL.01.12.03)
5	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu SLA-03	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	Layanan Promosi Penanaman Modal (RL.01.12.08.01)	Promosi Penanaman Modal (RL.01.12.08)
6	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu SLA-03	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	Pelayanan Penanaman Modal (RL.01.12.04.01)	Penanaman Modal Nasional (RL.01.12.04)
7	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu SLA-03	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	Layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (RL.01.12.05.01)	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (RL.01.12.05)
8	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu SLA-03	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	Layanan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal (RL.01.12.06.01)	Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal (RL.01.12.06)
9	Dinas Sosial SLA-04	Dinas Sosial	Layanan Pemberdayaan Sosial (RL.01.26.01.01)	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)
10	Dinas Sosial SLA-04	Dinas Sosial	Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (RL.01.26.02.01)	Penanganan Fakir Miskin (RL.01.26.02)
11	Dinas Sosial SLA-04	Dinas Sosial	Layanan Rehabilitasi Sosial (RL.01.26.01.02)	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)
12	Dinas Sosial SLA-04	Dinas Sosial	Layanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial (RL.01.26.01.03)	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)
13	Dinas Sosial SLA-04	Dinas Sosial	Layanan Pengelolaan Taman Makam (RL.01.40.02.01)	Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem (RL.01.40.02)

14	Dinas Sosial SLA-04	Dinas Sosial	Layanan Penanganan Bencana (RL.01.26.01.04)	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil SLA-05	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Layanan Pendaftaran Penduduk (RL.01.23.02.01)	Kebijakan Kependudukan (RL.01.23.02)
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil SLA-05	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Layanan Pencatatan Sipil (RL.01.23.03.01)	Pencatatan Sipil (RL.01.23.03)
17	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil SLA-05	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (RL.01.23.03.02)	Pencatatan Sipil (RL.01.23.03)
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil SLA-05	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Layanan Pengelolaan Profil Kependudukan (RL.01.23.03.03)	Pencatatan Sipil (RL.01.23.03)
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SLA-06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Pengelolaan Pendidikan (RL.01.31.03.01)	Pendidikan Dasar (RL.01.31.03)
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SLA-06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Pengembangan Kurikulum (RL.01.31.03.02)	Pendidikan Dasar (RL.01.31.03)
21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SLA-06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (RL.01.31.01.01)	Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (RL.01.31.01)
22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SLA-06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Layanan Pengembangan Bahasa dan Sastra (RL.01.31.03.03)	Pendidikan Dasar (RL.01.31.03)
23	Dinas Kesehatan SLA-08; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam SLA-07	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam	Layanan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (RL.01.25.02.01)	Kesehatan Masyarakat (RL.01.25.02)
24	Dinas Kesehatan SLA-08; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam SLA-08	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam	Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (RL.01.25.03.01)	Pemberdayaan Tenaga Kesehatan (RL.01.25.03)
25	Dinas Kesehatan SLA-08	Dinas Kesehatan	Layanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman (RL.01.25.01.01)	Farmasi Dan Alat Kesehatan (RL.01.25.01)
26	Dinas Kesehatan SLA-09	Dinas Kesehatan	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (RL.01.25.02.02)	Kesehatan Masyarakat (RL.01.25.02)
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SLA-09	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) (RL.01.17.01.01)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SLA-09	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RL.01.17.01.02)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SLA-09	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional (RL.01.17.01.03)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)
30	Dinas Pekerjaan Umum dan	Dinas Pekerjaan Umum dan	Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan	Sarana Dan Prasarana Strategis

	Penataan Ruang SLA-09	Penataan Ruang	Sistem Air Limbah (RL.01.17.01.04)	(RL.01.17.01)
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SLA-09	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase (RL.01.17.01.05)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SLA-09	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Program Penataan Bangunan Gedung (RL.01.17.01.06)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SLA-09	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya (RL.01.17.01.07)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)
34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SLA-09	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Program Penyelenggaraan Jalan (RL.01.17.01.08)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SLA-09	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Pengembangan Jasa Kontruksi (RL.01.17.01.09)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)
36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SLA-09	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang (RL.01.17.01.10)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)
37	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman SLA-10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Layanan Pengembangan Perumahan (RL.01.20.01.01)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)
38	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman SLA-10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Layanan Kawasan Permukiman (RL.01.20.01.02)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)
39	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman SLA-10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Layanan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh (RL.01.20.02.01)	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)
40	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman SLA-10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Layanan Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) (RL.01.20.01.03)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)
41	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman SLA-10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Layanan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (RL.01.20.02.01)	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)
42	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman SLA-10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Layanan Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan (RL.01.20.01.04)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)
43	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman SLA-10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Layanan Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee (RL.01.20.02.02)	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)
44	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman SLA-10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Layanan Penetapan Tanah Ulayat (RL.01.20.01.05)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)
45	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman SLA-10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Layanan Pengelolaan Tanah Kosong (RL.01.20.01.06)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)
46	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman SLA-10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Layanan Pengelolaan Izin Membuka Tanah (RL.01.20.02.03)	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)
47	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman SLA-10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Layanan Penatagunaan Tanah (RL.01.20.02.04)	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)

48	Satuan Polisi Pamong Praja SLA-11	Satuan Polisi Pamong Praja	Layanan Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (RL.01.29.06.01)	Keamanan Dan Ketertiban Umum (RL.01.29.06)
49	Badan Penanggulangan Bencana Daerah SLA-12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Layanan Penanggulangan Bencana (RL.01.40.06.01)	Penanggulangan Bencana (RL.01.40.06)
50	Pemadam Kebakaran SLA-13	Pemadam Kebakaran	Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (RL.01.40.07.01)	Pencarian Dan Pertolongan (RL.01.40.07)
51	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi SLA-14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Layanan Perencanaan Tenaga Kerja (RL.01.32.02.01)	Pengelolaan Ketenagakerjaan (RL.01.32.02)
52	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi SLA-14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Layanan Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja (RL.01.32.04.01)	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja (RL.01.32.04)
53	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi SLA-14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Layanan Penempatan Tenaga Kerja (RL.01.32.05.01)	Penempatan Tenaga Kerja (RL.01.32.05)
54	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi SLA-14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Layanan Hubungan Industrial (RL.01.32.05.02)	Penempatan Tenaga Kerja (RL.01.32.05)
55	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana SLA-15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Layanan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27.01.01)	Kesetaraan Gender (RL.01.27.01)
56	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana SLA-15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Layanan Perlindungan Perempuan (RL.01.27.03.01)	Perlindungan Hak Perempuan (RL.01.27.03)
57	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana SLA-15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga (RL.01.27.01.02)	Kesetaraan Gender (RL.01.27.01)
58	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana SLA-15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak (RL.01.27.02.01)	Perlindungan Anak (RL.01.27.02)
59	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA) (RL.01.27.02.02)	Perlindungan Anak (RL.01.27.02)

	SLA-15	Penduduk dan Keluarga Berencana		
60	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana SLA-15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Perlindungan Khusus Anak (RL.01.27.02.03)	Perlindungan Anak (RL.01.27.02)
61	Dinas Ketahanan Pangan SLA-16	Dinas Ketahanan Pangan	Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan (RL.01.07.02.01)	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)
62	Dinas Ketahanan Pangan SLA-16	Dinas Ketahanan Pangan	Layanan Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat (RL.01.07.02.02)	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)
63	Dinas Ketahanan Pangan SLA-16	Dinas Ketahanan Pangan	Layanan Penanganan Kerawanan Pangan (RL.01.07.02.03)	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)
64	Dinas Ketahanan Pangan SLA-16	Dinas Ketahanan Pangan	Layanan Pengawasan Keamanan Pangan (RL.01.07.02.04)	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)
65	Dinas Lingkungan Hidup SLA-17	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan Perencanaan Lingkungan Hidup (RL.01.40.02.02)	Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem (RL.01.40.02)
66	Dinas Lingkungan Hidup SLA-17	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan Pengendalian Pencemaran Dan/Kerusakan Lingkungan Hidup (RL.01.40.04.01)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)
67	Dinas Lingkungan Hidup SLA-17	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) (RL.01.40.02.03)	Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem (RL.01.40.02)
68	Dinas Lingkungan Hidup SLA-17	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) (RL.01.40.04.02)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)
69	Dinas Lingkungan Hidup SLA-17	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (RL.01.40.04.03)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)
70	Dinas Lingkungan Hidup SLA-17	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH (RL.01.40.04.04)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)
71	Dinas Lingkungan Hidup SLA-17	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (RL.01.40.01.01)	Dampak Perubahan Iklim (RL.01.40.01)

72	Dinas Lingkungan Hidup SLA-17	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (RL.01.40.04.05)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)
73	Dinas Lingkungan Hidup SLA-17	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (RL.01.40.04.06)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)
74	Dinas Lingkungan Hidup SLA-17	Dinas Lingkungan Hidup	Layanan Pengelolaan Persampahan (RL.01.40.04.07)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)
75	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung SLA-18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Layanan Penataan Desa (RL.01.24.02.01)	Otonomi Daerah (RL.01.24.02)
76	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung SLA-18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Layanan Peningkatan Kerja Sama Desa (RL.01.24.03.01)	Administrasi Kewilayahan (RL.01.24.03)
77	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung SLA-18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Layanan Administrasi Pemerintahan Desa (RL.01.24.06.01)	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RL.01.24.06)
78	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung SLA-18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Layanan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat (RL.01.24.01.01)	Keikutsertaan Masyarakat (RL.01.24.01)
79	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana SLA-15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Layanan Pengendalian Penduduk (RL.01.23.01.01)	Pengendalian Penduduk (RL.01.23.01)
80	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana SLA-15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Layanan Pembinaan Keluarga Berencanan (KB) (RL.01.23.04.01)	Keluarga Berencana (RL.01.23.04)
81	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana SLA-15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (RL.01.23.02.01)	Kebijakan Kependudukan (RL.01.23.02)
82	Dinas Perhubungan SLA-19	Dinas Perhubungan	Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (ILAJ) (RL.01.19.02.01)	Pelayanan Transportasi (RL.01.19.02)
83	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Informasi dan Komunikasi Publik (RL.01.44.02.01)	Sistem Komunikasi Publik (RL.01.44.02)
84	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Aplikasi Informatika (RL.01.44.02.02)	Sistem Komunikasi Publik (RL.01.44.02)
85	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah SLA-20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam (RL.01.14.01.01)	Dukungan Bisnis (RL.01.14.01)
86	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan	Dinas Koperasi Usaha Kecil	Layanan Pengawasan Dan Pemeriksaan	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)

	Menengah SLA-20	dan Menengah	Koperasi (RL.01.13.01.01)	
87	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah SLA-20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Layanan Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi (RL.01.13.01.02)	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)
88	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah SLA-20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Layanan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian (RL.01.13.01.03)	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)
89	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah SLA-20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Layanan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi (RL.01.13.01.04)	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)
90	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah SLA-20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Layanan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) (RL.01.13.01.05)	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)
91	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah SLA-20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Layanan Pengembangan Umkm (RL.01.13.01.06)	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)
92	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata SLA-21	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (RL.01.35.01.01)	Pemberdayaan Pemuda (RL.01.35.01)
93	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata SLA-21	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan (RL.01.35.01.02)	Kebijakan Di Bidang Pembudayaan Olahraga (RL.01.35.01)
94	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata SLA-21	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (RL.01.35.02.01)	Kebijakan Di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga (RL.01.35.02)
95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SLA-06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Kebudayaan (RL.01.42.01.01)	Kebijakan Kebudayaan (RL.01.42.01)
96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SLA-06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengembangan Keseniaan Tradisional (RL.01.42.02.01)	Perfilman Dan Kesenian (RL.01.42.02)
97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SLA-06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembinaan Sejarah (RL.01.42.01.02)	Kebijakan Kebudayaan (RL.01.42.01)
98	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SLA-06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya (RL.01.42.04.01)	Cagar Budaya (RL.01.42.04)
99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SLA-06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengelolaan Permuseuman (RL.01.42.04.02)	Cagar Budaya (RL.01.42.04)
100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah SLA-22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Layanan Pembinaan Perpustakaan (RL.01.42.01.01)	Kebijakan Kebudayaan (RL.01.42.01)
101	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah SLA-22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Layanan Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno (RL.01.42.03.01)	Sastra Dan Bahasa Indonesia (RL.01.42.03)
102	Dinas Perikanan SLA-23	Dinas Perikanan	Layanan Pengelolaan Perikanan Tangkap (RL.01.10.01.01)	Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)
103	Dinas Perikanan SLA-23	Dinas Perikanan	Layanan Pengelolaan Perikanan Budidaya (RL.01.10.01.02)	Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)
104	Dinas Perikanan SLA-23	Dinas Perikanan	Layanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (RL.01.10.02.01)	Benih Dan Bibit Perikanan Budi Daya (RL.01.10.02)

105	Dinas Perikanan SLA-23	Dinas Perikanan	Layanan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (RL.01.10.03.01)	Kebijakan Di Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya (RL.01.10.03)
106	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata SLA-21	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (RL.01.15.01.01)	Pengembangan Kepariwisata (RL.01.15.01)
107	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata SLA-21	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Pemasaran Pariwisata (RL.01.15.02.01)	Pengembangan Lembaga Kepariwisata (RL.01.15.02)
108	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata SLA-21	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (RL.01.15.03.01)	Pengembangan Objek Wisata (RL.01.15.03)
109	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata SLA-21	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (RL.01.15.03.01)	Pengembangan Objek Wisata (RL.01.15.03)
110	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan SLA-24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (RL.01.07.01.01)	Pertanian (RL.01.07.01)
111	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan SLA-24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian (RL.01.07.01.02)	Pertanian (RL.01.07.01)
112	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan SLA-24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (RL.01.07.01.03)	Pertanian (RL.01.07.01)
113	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan SLA-24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian (RL.01.07.01.04)	Pertanian (RL.01.07.01)
114	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan SLA-24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Perizinan Usaha Pertanian (RL.01.07.01.05)	Pertanian (RL.01.07.01)
115	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan SLA-24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Penyuluhan Pertanian (RL.01.07.01.06)	Pertanian (RL.01.07.01)
116	Dinas Perindustrian dan Perdagangan SLA-25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Layanan Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan (RL.01.06.04.01)	Perdagangan Domestik (RL.01.06.04)
117	Dinas Perindustrian dan Perdagangan SLA-25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Layanan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (RL.01.06.04.02)	Perdagangan Domestik (RL.01.06.04)
118	Dinas Perindustrian dan Perdagangan SLA-25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Layanan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (RL.01.06.04.03)	Perdagangan Domestik (RL.01.06.04)
119	Dinas Perindustrian dan Perdagangan SLA-25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Ekspor Impor (RL.01.06.01.01)	Ekspor Dan Impor (RL.01.06.01)
120	Dinas Perindustrian dan	Dinas Perindustrian dan	Layanan Standardisasi Dan Perlindungan	Perlindungan Konsumen (RL.01.06.05)

	Perdagangan SLA-25	Perdagangan	Konsumen (RL.01.06.05.01)	
121	Dinas Perindustrian dan Perdagangan SLA-25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Layanan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (RL.01.06.02.01)	Penggunaan Produk Dalam Negeri (RL.01.06.02)
122	Dinas Perindustrian dan Perdagangan SLA-25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Perencanaan Dan Pembangunan Industri (RL.01.05.08.01)	Pengembangan Industri (RL.01.05.08)
123	Dinas Perindustrian dan Perdagangan SLA-25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Layanan Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota (RL.01.05.10.01)	Pengembangan Industri Strategis (RL.01.05.10)
124	Dinas Perindustrian dan Perdagangan SLA-25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (RL.01.05.06.01)	Ketahanan Industri (RL.01.05.06)
125	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi SLA-14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Layanan Perencanaan Kawasan Transmigrasi (RL.01.18.01.01)	Layanan Transmigrasi (RL.01.18.01)
126	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi SLA-14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Layanan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (RL.01.18.01.02)	Layanan Transmigrasi (RL.01.18.01)
127	Badan Pengelola Pendapatan Daerah SLA-26	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah (RL.02.02.01.01)	Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara (RL.02.02.01)
128	Badan Pengelola Pendapatan Daerah SLA-26	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah (RL.02.02.01.02)	Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara (RL.02.02.01)
129	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah SLA-27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (RL.02.03.02.01)	Penyusunan Perencanaan (RL.02.03.02)
130	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah SLA-27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RL.02.03.03.01)	Koordinasi Perencanaan (RL.02.03.03)
131	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah SLA-28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Layanan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD (RL.02.02.04.01)	Penganggaran (RL.02.02.04)
132	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah SLA-28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah (RL.02.02.01.01)	Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara (RL.02.02.01)
133	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SLA-29	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa (RL.02.02.08.01)	Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RL.02.02.08)
134	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SLA-29	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (RL.02.02.08.02)	Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RL.02.02.08)
135	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SLA-29	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan (RL.02.02.08.03)	Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RL.02.02.08)
136	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia SLA-30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Layanan Kepegawaian Daerah (RL.02.04.01.01)	Manajemen ASN (RL.02.04.01)
137	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah SLA-22	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Layanan Pengelolaan Arsip (RL.02.06.18.01)	Dukungan Kearsipan (RL.02.06.18)

138	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah SLA-22	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Layanan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (RL.02.06.18.02)	Dukungan Kearsipan (RL.02.06.18)
139	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah SLA-28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah (RL.02.02.05.01)	Pengelolaan Barang Milik Negara (RL.02.02.05)
140	Inspektorat SLA-31	Inspektorat	Layanan Penyelenggaraan Pengawasan (RL.02.07.02.01)	Pengawasan Kinerja (RL.02.07.02)
141	Inspektorat SLA-31	Inspektorat	Layanan Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi (RL.02.07.02.02)	Pengawasan Kinerja (RL.02.07.02)
142	Inspektorat SLA-31	Inspektorat	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (RL.02.07.02.03)	Pengawasan Kinerja (RL.02.07.02)
143	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia SLA-30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia (RL.02.04.03.01)	Pendidikan Dan Pelatihan Keahlian (RL.02.04.03)
144	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah SLA-27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Daerah (RL.02.08.08.01)	Pengendalian Sumber Daya Kerja Sama (RL.02.08.08)
145	Badan Kesatuan bangsa dan politik SLA-32	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (RL.01.03.02.01)	Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)
146	Badan Kesatuan bangsa dan politik SLA-32	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (RL.01.03.02.02)	Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)
147	Badan Kesatuan bangsa dan politik SLA-32	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (RL.01.03.02.03)	Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)
148	Badan Kesatuan bangsa dan politik SLA-32	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya (RL.01.03.02.04)	Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)
149	Badan Kesatuan bangsa dan politik SLA-32	Badan Kesatuan bangsa dan politik	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (RL.01.03.02.05)	Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)
150	Dinas Komunikasi dan Informatika SLA-02	Dinas Komunikasi dan Informatika	Layanan Statistik Sektoral (RL.02.09.06.01)	Statistik Sektoral (RL.02.09.06)
151	Dinas Komunikasi dan Informatika SLA-02	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (RL.02.09.04.01)	Pengelolaan Sistem Informasi (RL.02.09.04)
152	Sekretariat Daerah SLA-33	Sekretariat Daerah	Layanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (RL.02.04.08.01)	Penyelenggaraan Pelayanan Publik (RL.02.04.08)
153	Sekretariat Daerah SLA-33	Sekretariat Daerah	Layanan Perekonomian dan Pembangunan (RL.02.04.08.02)	Penyelenggaraan Pelayanan Publik (RL.02.04.08)

154	Sekretariat Daerah SLA-33	Sekretariat Daerah	Layanan Pengelolaan Izin Lokasi (RL.02.04.08.03)	Penyelenggaraan Pelayanan Publik (RL.02.04.08)
155	Sekretariat DPRD SLA-34	Sekretariat DPRD	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (RL.02.04.08.04)	Penyelenggaraan Pelayanan Publik (RL.02.04.08)

Berdasarkan pemaketan layanan yang telah terdefmisi pada Tabel diatas, diperoleh dokumen persetujuan tingkat layanan yang harus dibuat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, yaitu sejumlah 38 paket SLA. Dokumen paket tingkat layanan ini merupakan paket general yang dapat dispesifikasikan secara lebih rinci pada saat penerapan dan pembaharuan untuk kebutuhan perbaikan versi layanan. Daftar tipe dokumen tingkat layanan yang dibutuhkan seperti dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 19 Paket Layanan Kabupaten Way Kanan

No	SLA/OLA/UC	Tipe	Perangkat Daerah/Penyedia
1	SLA-01	<i>Corporate Based</i>	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
2	SLA-02	<i>Corporate Based</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	SLA-03	<i>Corporate Based</i>	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
4	SLA-04	<i>Corporate Based</i>	Dinas Sosial
5	SLA-05	<i>Corporate Based</i>	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
6	SLA-06	<i>Corporate Based</i>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	SLA-07	<i>Corporate Based</i>	RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
8	SLA-08	<i>Corporate Based</i>	Dinas Kesehatan
9	SLA-09	<i>Corporate Based</i>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	SLA-10	<i>Corporate Based</i>	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	SLA-11	<i>Corporate Based</i>	Satuan Polisi Pamong Praja
12	SLA-12	<i>Corporate Based</i>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13	SLA-13	<i>Corporate Based</i>	Pemadam Kebakaran
14	SLA-14	<i>Corporate Based</i>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15	SLA-15	<i>Corporate Based</i>	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16	SLA-16	<i>Corporate Based</i>	Dinas Ketahanan Pangan
17	SLA-17	<i>Corporate Based</i>	Dinas Lingkungan Hidup
18	SLA-18	<i>Corporate Based</i>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
19	SLA-19	<i>Corporate Based</i>	Dinas Perhubungan
20	SLA-20	<i>Corporate Based</i>	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
21	SLA-21	<i>Corporate Based</i>	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
22	SLA-22	<i>Corporate Based</i>	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
23	SLA-23	<i>Corporate Based</i>	Dinas Perikanan
24	SLA-24	<i>Corporate Based</i>	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
25	SLA-25	<i>Corporate Based</i>	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
26	SLA-26	<i>Corporate Based</i>	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
27	SLA-27	<i>Corporate Based</i>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
28	SLA-28	<i>Corporate Based</i>	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
29	SLA-29	<i>Corporate Based</i>	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
30	SLA-30	<i>Corporate Based</i>	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
31	SLA-31	<i>Corporate Based</i>	Inspektorat
32	SLA-32	<i>Corporate Based</i>	Badan Kesatuan bangsa dan politik
33	SLA-33	<i>Corporate Based</i>	Sekretariat Daerah
34	SLA-34	<i>Corporate Based</i>	Sekretariat DPRD

4.3 Detail Kondisi yang diinginkan

Detail dan kondisi yang diinginkan dideskripsikan sebagai suatu keadaan dimana setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan transformasi paradigma dan proses dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik berbasis elektronik, dukungan teknologi informasi dan komunikasi, serta sumber daya manusia. Detail kondisi yang diinginkan ini merupakan *story* atau *layer* peketaan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Lingkupnya adalah berupa layanan umum yang digunakan dan dikembangkan sesuai dengan tahapannya (rills) masing-masing (layanan umum dibagi ke dalam komponen-komponen yang saling terhubung berdasarkan teknologi *microservices*), dan layanan tersebut saling terhubung dalam komputasi awan untuk mendukung Layanan SPBE. Berdasarkan Cetak Biru (*BluePrint*) Aplikasi SPBE yang disusun Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), rincian dan kondisi yang diinginkan dan Layanan SPBE adalah kemudahan perolehan pelayanan pemerintah diwujudkan melalui (a) Akses layanan mandiri, (b) Layanan bergerak, (c) Layanan cerdas bagi masyarakat.

4.3.1 Rincian Penggunaan Layanan

Salah satu upaya untuk kemudahan dan kesinambungan penyediaan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, adalah melalui penyediaan dukungan pola aktivitas dan warranty dari setiap paket layanan yang sudah terdefinisi sebelumnya. mendeskripsikan rincian penggunaan layanan oleh setiap pengguna di seluruh organisasi Pemerintah Kabupaten Way Kanan, serta deskripsi dan setiap spesifikasi penyediaan layanan. Opsi merupakan kategori atau kelas layanan yang dipilih berdasarkan tingkat kepentingan atau pengaruh terhadap bisnis, seperti disajikan pada Tabel sebelumnya. Respon merupakan aktivitas penanganan insiden atau apabila terjadi permasalahan terkait layanan yang diberikan, serta respon terhadap permintaan pengadaan atau perbaikan versi layanan. Respon diklasifikasikan berdasarkan tingkat keseriusan insiden atau permintaan, seperti dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Spesifikasi layanan ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk mendefinisikan layanan secara formal sebagai katalog layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Tabel 20 Tingkat Opsi Layanan Pemerintah Kabupaten Way Kanan

Tipe Opsi	Nama Opsi	Ketersediaan	Pemulihan
1	Gold	> 99%	1 - 2 (Berdasarkan tingkat prioritas respon)
2	Silver	> 99%	2 - 3 (Berdasarkan tingkat prioritas respon)
3	Bronze	> 99%	3 - 4 (Berdasarkan tingkat prioritas respon)

Tabel 21 Tingkat Keseriusan Layanan Pemerintah Kabupaten Way Kanan

Tingkat Keseriusan	Waktu Respon	Target Resolusi	Deskripsi
1	15 menit	2 Jam	Insiden yang menyebabkan dampak yang sangat serius terhadap bisnis, melibatkan sistem atau layanan dan sejumlah orang, sampai fungsi bisnis yang terkena dampak dihentikan.
2	30 menit	4 Jam	Insiden yang menyebabkan dampak yang signifikan terhadap bisnis, melibatkan sistem atau layanan dan sejumlah orang, tetapi fungsi bisnis yang terkena dampak tidak dihentikan.
3	3 Jam	10 Jam	Insiden yang dapat mempengaruhi layanan pelanggan, namun memiliki dampak yang kecil untuk bisnis, misalnya single user, atau suatu komponen terkena dampak tapi permasalahannya dapat dihindari.
4	10 Jam	30 Jam	Insiden yang memiliki dampak minimal terhadap bisnis, misalnya berupa request atau permintaan informasi saja.
Akuisisi	Penetapan	Penerimaan	Deskripsi
5	30 Jam dari permintaan	15 Hari dari Persetujuan	Permintaan untuk pengadaan peralatan standar dan software standar, termasuk perbaikan versi layanan.
6	Bukan SLA	Bukan SLA	Permintaan untuk pengadaan bukan peralatan standard dan bukan software standar.

4.3.2 Katalog dan Status Layanan

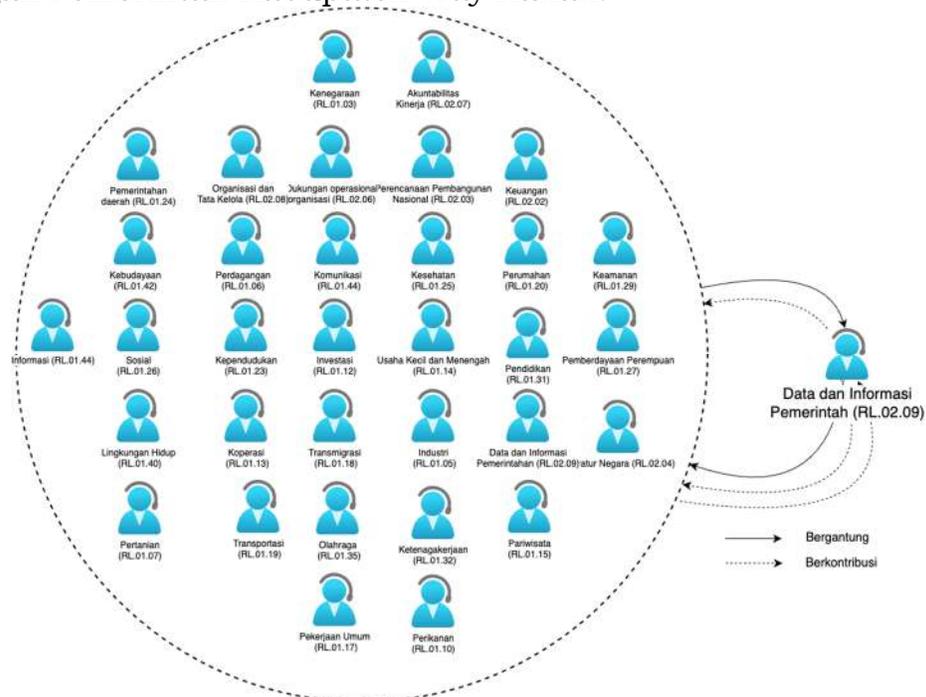
Dari basil seluruh tahapan pemodelan yang telah dianalisis, maka model katalog layanan yang direkomendasikan untuk penyediaan layanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Way Kanan diawali dari pendefinisian katalog layanan. Katalog layanan terdiri dari 48 layanan, meliputi 32 layanan publik dan 16 layanan administrasi pemerintahan. Gambaran umum dan katalog layanan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 64 Katalog Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Way Kanan

Setiap layanan memiliki ketergantungan dan kontribusi terhadap layanan yang lainnya. Ketergantungan dan kontribusi dari setiap layanan terhadap layanan lainnya dikelola melalui dokumen persetujuan tingkat layanan yang telah terdefinisi sebelumnya, yaitu sejumlah 38 paket SLA. Dokumen SLA termasuk ke dalam tipe *corporate based*, yaitu paket layanan untuk mengelola tingkat layanan berdasarkan kebutuhan operasional proses bisnis, baik untuk layanan internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Sementara, dokumen OLA dan UC sifatnya adalah *service based*, yaitu pemenuhan penyediaan layanan yang melibatkan Unit TI dan Unit terkait lainnya sebagai penanggung jawab, serta pihak eksternal Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebagai penyedia dukungan infrastruktur dan aplikasi (Kominfo), Data (PPN/ Bappenas), dan

Keamanan (Badan Siber dan Sandi Negara/ BSSN). Gambar dibawah ini mendeskripsikan kebergantungan dan kontribusi antar layanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.



Gambar 65 Ketergantungan dan Kontribusi Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Way Kanan

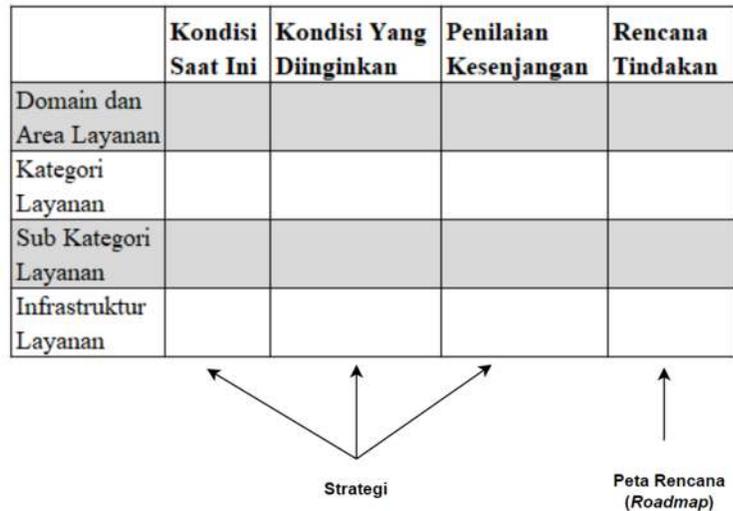
Kelompok layanan tipe *corporate based* memiliki saling kebergantungan dan kontribusi masing-masing sesuai dengan pola aktivitas dan *event* bisnisnya masing-masing. Kelompok layanan ini bergantung pada layanan yang bersifat *service based*, yaitu (a) kategori layanan Pertimbangan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus SPBE (02.09.02) yang sekaligus memberikan kontribusi untuk kebutuhan tata kelola TIK, *process automation system*, *version control system*, dan penghubung sistem untuk interoperabilitas layanan, (b) kategori layanan Data dan Informasi (02.09.01) yang bergantung pada kategori layanan 02.09.02 dan berkontribusi terhadap tipe layanan *corporate based*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018, kebergantungan dan kontribusi diantara setiap layanan SPBE dapat diwujudkan melalui sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP). SPLP adalah perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran data dan layanan. Sistem penghubung layanan pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat dideskripsikan sebagai antarmuka yang mewakili titik akses dimana layanan dapat digunakan oleh pengguna. Secara umum kebutuhan ini diwujudkan melalui dukungan (a) Komputasi Awan dan (b) Berbagai Pakai Layanan (menggunakan *microservices*) yang akan dibahas secara rinci pada Bagian Arsitektur Infrastruktur dan Keamanan dalam laporan ini.

Selain SPLP, perbaikan versi layanan merupakan kotak waktu dimana SPBE memberikan nilai tambahan dalam bentuk perangkat lunak dan sistem yang berfungsi dan teruji. Perbaikan versi layanan (*product increment*) mendeskripsikan kondisi stabil arsitektur pada jangka waktu tertentu, kondisi ini bersifat inkremental dan dapat berkembang sesuai kegiatan yang dilakukan. Perbaikan Versi Layanan dalam SPBE terdiri dan 3 versi aplikasi, yaitu Layanan Versi 0.0, Layanan Versi 1.0, dan Layanan Versi 2.0. Produk dari elemen Perbaikan Versi Layanan akan merealisasikan kebutuhan yang ada

dalam elemen daftar pekerjaan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, yaitu (a) Komputasi Awan dan (b) Berbagi Pakai Layanan.

Berdasarkan katalog layanan dan spesifikasi yang telah terdefinisi, dapat diperoleh kondisi status layanan ideal yang seharusnya ada untuk memenuhi dan mendukung kebutuhan Layanan SPBE. Terkait dengan kondisi layanan di Pemerintah Kabupaten Way Kanan saat ini, maka keberadaan dari setiap status layanan yang ada perlu dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor kesenjangan yang terjadi, serta penyesuaian dengan hasil pemodelan katalog layanan yang telah terdefinisi. Model relasi antara status layanan dalam katalog dengan status layanan yang ada saat ini, dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 66 Model Relasi Status Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Way Kanan

Kondisi saat ini dipetakan terhadap kondisi yang diinginkan sesuai dengan seluruh hasil pemodelan yang telah direkomendasikan, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap kesenjangan yang terjadi, sehingga dapat dijadikan landasan untuk menetapkan rencana tindakan sebagai daftar pekerjaan Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Unsur yang dinilai terkait dengan kebutuhan pemenuhan kriteria Layanan SPBE, yaitu domain dan area layanan sebagai tingkat 1 (pertama) dan 2 (kedua) yang menjadi struktur di tingkat nasional, kategori dan sub kategori layanan sebagai tingkat 3 (ketiga) dan 4 (keempat) yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan, serta infrastruktur layanan sebagai dukungan teknologi untuk memenuhi kriteria Arsitektur Layanan SPBE. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil analisis yang diperoleh.

Tabel 23 Analisis Kesenjangan Layanan Kabupaten Way Kanan

No	Unsur Layanan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diinginkan	Penilaian Kesenjangan	Rencana Tindakan
1	Domain dan Area Layanan (Struktur Tingkat 1 dan 2 Nasional)	Pengelompokan layanan sebagai struktur tingkat 1 dan 2 nasional berdasarkan kebutuhan proses utama dan pendukung dapat dilakukan dengan melihat pada spesifikasi prosesnya. Namun belum ada kerangka acuan baku yang spesifik di Pemerintah Way Kanan untuk kebutuhan pengelompokan layanan ini	Terdapatnya kerangka acuan baku di Pemerintah kabupaten Way Kanan yang dapat dijadikan sebagai rujukan formal untuk mengelompokkan layanan sebagai struktur tingkat 1 dan 2 nasional. Sehingga domain dan area layanan di Pemerintah kabupaten Way Kanan terdefinisi secara relevan	Model domain dan area layanan yang direkomendasikan pada katalog layanan, dapat dijadikan rujukan awal untuk merumuskan regulasi dalam pengelompokan layanan Pemerintah kabupaten Way Kanan setelah melalui tahapan analisis dan evaluasi.	Penetapan regulasi untuk pengelompokan layanan ke dalam struktur tingkat 1 dan 2 Nasional, mulai identifikasi layanan melalui pemetaan proses bisnis yang terintegrasi sampai dengan sosialisasi dan operasionalisasi layanan.
2	Kategori Layanan (Struktur Tingkat 3 IPPD)	Pemerintah kabupaten Way Kanan telah memiliki beberapa regulasi tentang layanan (misal Perbup Kabupaten Way Kanan No. 02 Tahun 2021). Namun, kategori layanan dalam peraturan tersebut belum mencakup semua kategori layanan yang dibutuhkan dalam setiap proses bisnis. Terdapat 10 sub proses yang belum didukung, yaitu P.07, P.08, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19 dan P.20, serta terdapat 3 sub proses yang harus disesuaikan, yaitu P.28.01, P.28.02 dan P.28.06, karena kategori layanan perlu disesuaikan menjadi sub kategori layanan. Hal ini berdampak pada penanggung jawab layanan yang harus disesuaikan juga	Penyesuaian regulasi-regulasi terkait untuk mendefinisikan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki Pemerintah kabupaten Way Kanan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki. Sehingga dengan adanya regulasi yang dapat memenuhi pengelompokan kategori layanan sesuai tugas, fungsi, dan seluruh proses bisnis yang ada, akan dapat dengan mudah menurunkan atau merelasikannya ke dalam area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga) atau sub kategori layanan di lingkungan Pemerintah Way Kanan	Model kategori layanan yang direkomendasikan pada katalog layanan, dapat dijadikan rujukan awal untuk menyesuaikan kembali regulasi-regulasi terkait yang telah ada untuk pengelompokan kategori layanan di lingkungan Pemerintah kabupaten Way Kanan. Peninjauan terhadap kategori layanan ini dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan domain dan area layanan sebagai struktur tingkat 1 dan 2 arsitektur SPBE nasional. Sehingga akan dengan mudah diturunkan kedalam sub kategori layanan	Penyesuaian regulasi untuk pengelompokan layanan ke dalam struktur tingkat 3 SPBE IPPD, pengelompokan layanan terdiri dari: a. Identifikasi layanan terintegrasi melalui pemetaan terhadap proses bisnis yang terintegrasi b. Identifikasi aplikasi, data dan informasi c. Integrasi layanan pemerintah dan pengembang aplikasinya d. Sosialisasi dan operasionalisasi layanan

3	Sub Kategori Layanan (Struktur Tingkat 4 IPPD)	<p>Pemerintah kabupaten Way Kanan belum memiliki regulasi atau peraturan tentang keberadaan sub-kategori layanan sebagai struktur tingkat 4 IPPD. Namun, pada kategori layanan tingkat 3 yang mengacu pada Perbup Kabupaten Way Kanan No. 2 Tahun 2021 terdapat kategori layanan yang dapat didefinisikan sebagai sub kategori layanan untuk 3 sub proses bisnis, yaitu P.28.01, P.28.02 dan P.28.06. Hal ini akan berdampak pada perlunya penyesuaian dari Perda tersebut. Selain itu, dengan tidak adanya pendefinisian sub kategori layanan secara formal, dapat menyulitkan dalam pengelompokan layanan terhadap tingkatan struktur SPBE di atasnya</p>	<p>Terdapatnya regulasi yang dapat dijadikan sebagai rujukan formal untuk mengelompokkan sub kategori layanan sebagai struktur tingkat 4 IPPD. Sub kategori layanan perlu didefinisikan dengan cara mengurai unsur kategori layanan sebagai struktur tingkat 3 IPPD secara lebih rinci. Pendefinisian sub kategori layanan ini dapat dilakukan dengan menetapkan dukungan kinerjanya dan penurunan hambatannya (utility), serta pendefinisian komponen asetnya (service assets).</p>	<p>Model sub kategori layanan yang direkomendasikan pada katalog layanan, dapat dijadikan rujukan awal untuk merumuskan regulasi dalam pendefinisian sub kategori layanan Pemerintah kabupaten Way Kanan. Kebutuhan ini dapat diwujudkan melalui pengklasifikasian layanan untuk menetapkan metadata layanan SPBE Pemerintah kabupaten Way Kanan yang dapat memenuhi seluruh fungsi yang ada di organisasi secara terintegrasi.</p>	<p>Penyesuaian dan penetapan regulasi untuk pengelompokan layanan ke dalam struktur tingkat 4 SPBE IPPD, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi layanan terintegrasi melalui pemetaan terhadap proses bisnis yang terintegrasi Identifikasi aplikasi, data dan informasi Integrasi layanan pemerintah dan pengembangan aplikasinya Sosialisasi dan operasionalisasi layanan
4	Infrastruktur Layanan (Teknologi SPBE)	<p>Pemerintah kabupaten Way Kanan memiliki sistem pendukung berupa kelompok aplikasi yang difungsikan secara terpisah. Sistem dan aplikasi-aplikasi tersebut dikembangkan oleh lebih dari satu pengembang, diantaranya Unit Internal Kepegawaian, Data dan Informasi, Inspektorat, ada juga yang dikembangkan oleh Konsultan eksternal. Aktivitas pengembangannya dibuat atas dasar kebutuhan atau permintaan masing-masing unit kerja, sehingga dampak yang terjadi pada sistem dan aplikasi tersebut dibuat dalam berbagai platform, serta belum memiliki sistem penghubung layanan yang berfungsi untuk komunikasi dan interaksi antar aplikasi baik dalam pertukaran data maupun layanan</p>	<p>Terdapatnya infrastruktur teknologi yang dapat mengintegrasikan seluruh kelompok layanan corporate based. Kelompok layanan ini didukung oleh layanan yang bersifat service based, yaitu (a) sebagai Pertimbangan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus SPBE (02.09.02) yang melingkupi kebutuhan tata kelola TIK, process automation system, version control system, dan penghubung sistem untuk interoperabilitas layanan, (b) sebagai layanan Data dan Informasi (02.09.01) yang melingkupi kebutuhan layanan</p>	<p>Model kelompok layanan corporate based dan service based yang direkomendasikan pada katalog layanan, dapat dijadikan rujukan awal untuk memenuhi kriteria Layanan SPBE di Pemerintah Way Kanan. Kebutuhan ini dapat diwujudkan melalui penerapan dokumen persetujuan tingkat layanan yang telah terdefinisi di katalog layanan, yaitu 38 paket SLA. Dokumen SLA termasuk kedalam tipe corporate based, dan dokumen OLA serta UC termasuk kedalam tipe service based</p>	<ol style="list-style-type: none"> Analisis dan penetapan status sistem pendukung. Menetapkan layanan yang bersifat corporate based beserta dokumen SLA nya, yaitu paket layanan untuk mengelola layanan berdasarkan proses bisnis

			analisa sentimen kebijakan pemerintahan dan analisa big data pemerintahan		
--	--	--	---	--	--

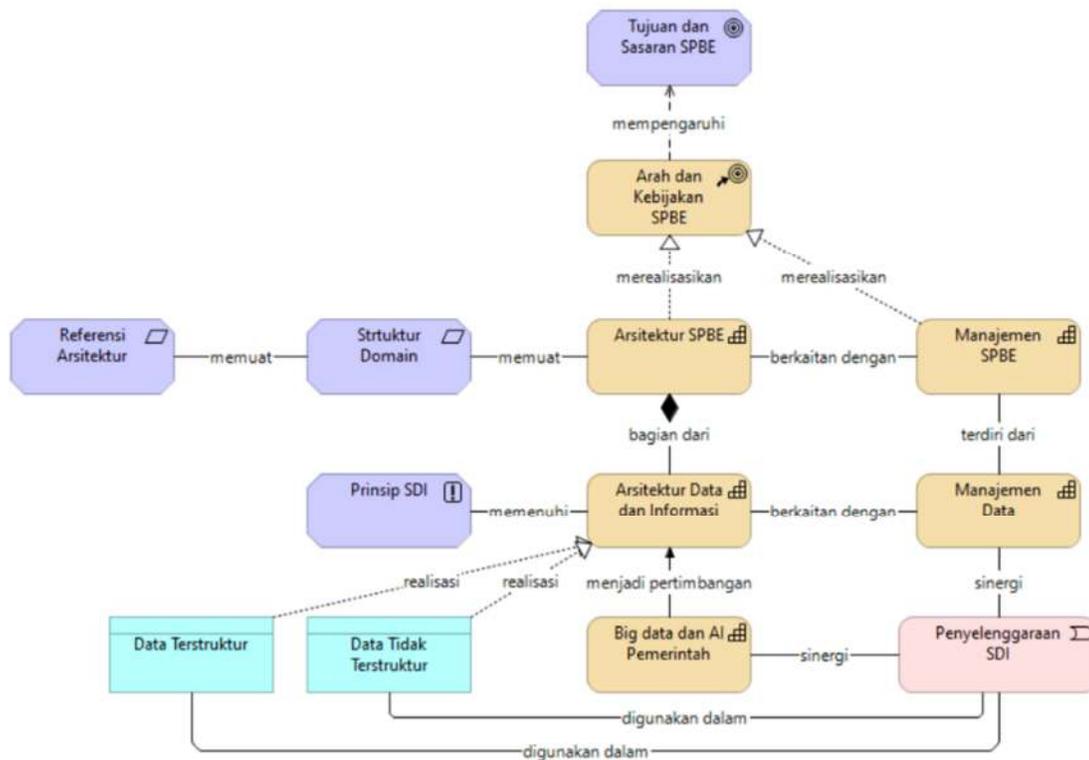
4.3.3 Daftar Pekerjaan Pemerintah Daerah Way Kanan

Daftar Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Way Kanan secara umum terdiri dari (a) Komputasi Awan dan (b) berbagai pakai layanan (mungkin menggunakan *microservices*). Berdasarkan hasil pendefinisian katalog dan status layanan yang dibutuhkan di Pemerintah Kabupaten Way Kanan, diperoleh rincian daftar pekerjaan solusi berupa layanan baru yang harus disediakan, layanan yang harus diperbarui untuk kebutuhan integrasi, serta pengelolaan tingkat layanan untuk kebutuhan berbagai pakai layanan di lingkungan pemerintah kabupaten Way Kanan, seperti disajikan pada table dibawah ini.

Tabel 24 Daftar Pekerjaan Solusi Layanan Pemerintah Kabupaten Way Kanan

No	Daftar Pekerjaan	Deskripsi
1	Manajemen Layanan	Analisis kebutuhan dan penetapan status sistem layanan untuk mengidentifikasi layanan SPBE yaitu menetapkan layanan yang bersifat corporate based beserta dokumen SLA nya
	Identifikasi Layanan terintegrasi fokus pada Layanan pemerintah berbasis arsitektur SPBE	
	Identifikasi proses bisnis terintegrasi Pemerintah Kabupaten Way Kanan berbasis arsitektur SPBE	
	identifikasi aplikasi, data dan informasi	
	Integrasi layanan administrasi pemerintahan (aplikasi Umum)	
	Pengembangan aplikasi umum untuk layanan administrasi pemerintahan	
	pengembangan layanan dengan teknologi 4.0	
2	Layanan Publik dan Layanan administrasi Pemerintahan	Penetapan dan penyesuaian regulasi untuk pengelompokan layanan ke dalam domain dan area layanan sebagai struktur tingkat 1 dan 2 SPBE Nasional, kemudian merincikan ke dalam kategori dan sub kategori layanan sebagai struktur tingkat 3 dan 4 SPBE IPPD (Pemerintah Kabupaten Way Kanan). Aktivitas proses mulai dari identifikasi kebutuhan layanan melalui pemetaan terhadap proses bisnis yang terintegrasi, sampai dengan sosialisasi dan operasionalisasi layanan.
	Identifikasi Layanan terintegrasi	
	Identifikasi proses bisnis terintegrasi Pemerintah Kabupaten Way Kanan	
	identifikasi data dan informasi	
	Sosialisasi layanan terintegrasi	
	operasional layanan terintegrasi	

BAB V ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI SPBE



Gambar 67 Keterhubungan arsitektur data dan informasi dengan tujuan dan sasaran SPBE, manajemen data, dan SDI

5.1 Arsitektur Data dan Informasi SPBE Eksisting

Arsitektur data dan informasi pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional. Hal ini dikuatkan dengan penjelasan Referensi Arsitektur Data dan informasi (RAD), bahwa RAD digunakan sebagai acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya taksonomi dalam RAD yang selaras dengan RAB, maka memberikan kemudahan dalam menentukan metode berbagi pakai data (*Data Share*) dengan menggunakan standar yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, menghindari terjadinya duplikasi atau redundansi data, sehingga dapat terwujud layanan pemerintah yang terintegrasi.

Hal ini perlu diperhatikan untuk memberikan data yang lebih akurat dan berkualitas dalam menghasilkan layanan pemerintah yang diperlukan, dimana hal ini juga menjadi tujuan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Berdasarkan hasil Identifikasi Referensi Arsitektur Data Dan Informasi Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang telah diterapkan, dapat membantu meningkatnya kualitas pengelolaan data, dan informasi pemerintah ini, selain itu akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan prioritas agenda pembangunan di semua lini, melalui pengambilan keputusan yang tepat sasaran (*Data Driven Government*).

Secara umum arsitektur data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu arsitektur data Umum dan arsitektur data Khusus.

1. Arsitektur Data Umum Berdasarkan dokumen yang diperoleh dari Sekretariat Pemerintah Kabupaten Way Kanan, data umum di Pemerintah Kabupaten Way Kanan dikelompokkan sebagai data umum yang dikelola di Sekretariat Pemerintah Kabupaten

Way Kanan. Data umum ini terdiri dari 47 data yang dikelola pada masing-masing Sekretariat. Data Umum yang dikelola di Kesekretariatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 25 Data Umum yang ada di Kesekretariatan

No	Nama Data	Unit Kerja
1	Data Perencanaan	
2	Data Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Data Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Data Anggaran	
5	Data Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6	Data Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
7	Data Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
8	Data Pengadaan Barang dan Jasa	
9	Data Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
10	Data Pengadaan Secara Elektronik	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
11	Data Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
12	Data Kepegawaian	
13	Data Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
14	Data Pengajuan Layanan Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
15	Data Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
16	Data Mutasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
17	Data Jumlah ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
18	Kearsipan	
19	Data Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
20	Data Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
21	Data Pengelolaan Aset	
22	Data Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
23	Data Inspektorat Daerah	
24	Data Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
25	Data Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Inspektorat
26	Data Akuntabilitas Kinerja Organisasi	
27	Data Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Inspektorat
28	Data Akuntabilitas Kinerja Pegawai	
29	Data Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
30	Data Penelitian dan Pengembangan	
31	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
32	Data Kesatuan Bangsa dan Politik	
33	Data Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan bangsa dan politik

34	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan bangsa dan politik
35	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan bangsa dan politik
36	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan bangsa dan politik
37	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan bangsa dan politik
38	Statistik	
39	Data Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
40	Persandian	
41	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
42	Data Sekretariat Daerah	
43	Data Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
44	Data Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
45	Data Pengelolaan Izin Lokasi	Sekretariat Daerah
46	Data Sekretariat DPRD	
47	Data Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD

Arsitektur data internal ini menggambarkan relasi dukungan layanan dan proses di umum Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Tujuan dari arsitektur data umum ini adalah terintegrasinya data dan layanan aplikasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, sehingga terwujud data yang unik untuk semua aplikasi yang saling terkait.

2. Arsitektur Data Khusus Berdasarkan dokumen yang diperoleh Setiap OPD, data khusus di Pemerintah Kabupaten Way Kanan dikelompokkan sebagai data khusus yang ada di setiap OPD. Data khusus yang ada di Setiap OPD terdiri dan 164 data dimana semua data tersebut berasal dan aplikasi yang digunakan saat ini di setiap OPD, data ini merupakan data pendukung proses bisnis utama.

Tabel 26 Data Khusus yang ada di Pemerintah Kabupaten Way Kanan

No	Nama Data	Unit Kerja
1	Data Pengaduan Pelayanan publik	
2	Data Pengaduan Pelayanan publik	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
3	Data Terbuka	
4	Data Terbuka Way Kanan	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	
6	Data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Way Kanan	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
7	Data Penanaman Modal	
8	Data Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu

9	Data Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
10	Data Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
11	Data Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
12	Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
13	Data Sosial	
14	Data Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
15	Data Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
16	Data Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
17	Data Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
18	Data Pengelolaan Taman Makam	Dinas Sosial
19	Data Penanganan Bencana	Dinas Sosial
20	Data Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
21	Data Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
22	Data Biodata Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
23	Dokumen Adminduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
24	Data Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
25	Data Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
26	Data Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27	Data Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28	Data Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; Info GTK; Dokumen Pegawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29	Data Pengembangan Bahasa dan Sastra	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30	Data Kesehatan	
31	Data Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
32	Data Pasien	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
33	Data Rekam Medis Pasien	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
34	Data Bill Pasien	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
35	Data Rekam Medis Elektronik	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
36	Data Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
37	Data Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
38	Data Logistik Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
39	Data Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
40	Data Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
41	Data Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
42	Data Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
43	Data Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
44	Data Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
45	Data Pengelolaan Dan Pengembangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

	Sistem Drainase	
46	Data Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
47	Data Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
48	Data Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
49	Data Pengembangan Jasa Kontruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
50	Data Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
51	Data Perumahan Dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
52	Data Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
53	Data Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
54	Data Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
55	Data Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
56	Data Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
57	Data Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
58	Data Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
59	Data Penetapan Tanah Ulayat	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
60	Data Pengelolaan Tanah Kosong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
61	Data Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
62	Data Penatagunaan Tanah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
63	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
64	Data Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
65	Data Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
66	Data Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pemadam Kebakaran
67	Data Tenaga Kerja	
68	Data Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
69	Data Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
70	Data Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
71	Data Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
72	Data Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
73	Data Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
74	Data Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
75	Data Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
76	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
77	Data Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

78	Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
79	Data Pangan	
80	Data Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
81	Data Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
82	Data Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
83	Data Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
84	Data Lingkungan Hidup	
85	Data Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
86	Data Pengendalian Pencemaran Dan/Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
87	Data Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
88	Data Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
89	Data Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
90	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup
91	Data Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
92	Data Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
93	Data Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
94	Data Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
95	Data Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
96	Data Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
97	Data Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
98	Data Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
99	Data Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
100	Data Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
101	Data Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
102	Data Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
103	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
104	Data Perhubungan	
105	Data Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
106	Data Informasi dan Komunikasi Publik	
107	Data Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika

108	Data Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
109	Data Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
110	Data Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
111	Data Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
112	Data Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
113	Data Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
114	Data Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
115	Data Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
116	Data Pengembangan Umkm	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
117	Data Kepemudaan Dan Olahraga	
118	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
119	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
120	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
121	Data Kebudayaan	
122	Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
123	Pengembangan Keseniaan Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
124	Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
125	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
126	Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
127	Data Perpustakaan	
128	Data Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
129	Data Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
130	Data Kelautan Dan Perikanan	
131	Data Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
132	Data Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
133	Data Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan
134	Data Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
135	Data Pariwisata	
136	Data Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
137	Data Pemasaran Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
138	Data Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
139	Data Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
140	Data Pertanian	
141	Data Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
142	Data Penyediaan Dan Data Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
143	Data Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Data Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

144	Data Pengendalian Dan Data Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
145	Data Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
146	Data Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
147	Data Perdagangan	
148	Data Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
149	Data Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
150	Data Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
151	Data Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
152	Data Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
153	Data Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
154	Data Perindustrian	
155	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
156	Data Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
157	Data Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
158	Data Transmigrasi	
159	Data Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
160	Data Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
161	Pendapatan Daerah	
162	Data Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
163	Data Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
164	Data Pajak Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Arsitektur data Khusus menggambarkan relasi dukungan layanan dan proses Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Setiap OPD, atau yang disebut layanan khusus. Arsitektur data ini nantinya akan menjadi satu data Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Tujuan dan arsitektur data khusus ini adalah terintegrasinya data dan layanan aplikasi kepada Setiap OPD Pemerintah Kabupaten Way Kanan, sehingga terwujud data yang unik untuk semua aplikasi yang saling terkait dan menuju ke satu data Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Namun demikian data yang dikelola dalam aplikasi yang saat ini digunakan di Pemerintah Kabupaten Way Kanan belum semua dikelompokkan ke dalam arsitektur data umum dan Khusus.

Tabel 27 Identifikasi Data Berdasarkan Aplikasi Saat Ini

No	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Sumber Data	Data Input	Data Output	Pengguna Data
1	Span Laporan	Aplikasi Span Laporan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengaduan Pelayanan public	Masyarakat	Data Pengaduan Pelayanan publik	Informasi Pengaduan Publik	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
2	Open Data Way Kanan	Aplikasi Open Data Way Kanan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Data Terbuka	Masyarakat	Data Terbuka		Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Way Kanan	Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Way Kanan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Masyarakat	Data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4	Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Penanaman Modal Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Penanaman Modal Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Masyarakat	Data Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Informasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
5	Sistem Informasi Manajemen Promosi Penanaman Modal Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Promosi Penanaman Modal Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Promosi Penanaman Modal	Masyarakat	Data Promosi Penanaman Modal	Informasi Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
6	Sistem Informasi Penanaman Modal Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Penanaman Modal Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pelayanan Penanaman Modal	Masyarakat	Data Pelayanan Penanaman Modal	Informasi Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
7	Sistem Informasi Pengendalian Penanaman Modal Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Penanaman Modal Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Masyarakat	Data Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Informasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
8	Sistem Informasi Penanaman Modal Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Penanaman Modal Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Masyarakat	Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Informasi lolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
9	Sistem Informasi Manajemen	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan	Masyarakat	Data	Informasi	Dinas Sosial

	Pemberdayaan Sosial Terpadu	Sosial Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pemberdayaan Sosial		Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial	
10	Sistem Informasi Manajemen Warga Negara Migran korban tindak kekerasan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Warga Negara Migran korban tindak kekerasan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Masyarakat	Data Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Informasi Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
11	Sistem Informasi Manajemen Rehabilitasi Sosial	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rehabilitasi Sosial merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Rehabilitasi Sosial	Masyarakat	Data Rehabilitasi Sosial	Informasi Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
12	Sistem Informasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Aplikasi Sistem Informasi Perlindungan dan Jaminan Sosial; Sistem Informasi Data Kemiskinan Kab. Way Kanan (SIDATUK) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Masyarakat	Data Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Informasi Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
13	Sistem Informasi Manajemen Taman Makam Pahlawan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Taman Makam Pahlawan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Taman Makam	Masyarakat	Data Pengelolaan Taman Makam	Informasi Pengelolaan Taman Makam	Dinas Sosial
14	Sistem Informasi Manajemen Penanganan Bencana Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Bencana Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penanganan Bencana	Masyarakat	Data Penanganan Bencana	Informasi Penanganan Bencana	Dinas Sosial
15	Dashboard Pendaftaran penduduk Terpadu	Aplikasi Dashboard Pendaftaran penduduk Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pendaftaran Penduduk	Masyarakat	Data Pendaftaran Penduduk	Informasi Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
16	Sistem Informasi Pencatatan Sipil Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Pencatatan Sipil Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pencatatan Sipil	Masyarakat	Data Biodata Penduduk	Informasi Biodata Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
17	Sistem Informasi Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Masyarakat	Dokumen Adminduk	Informasi en Adminduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
18	Sistem Informasi Pengelolaan Profil Kependudukan dan Catatan Sipil	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Profil Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Profil Kependudukan	Masyarakat	Data Pengelolaan Profil Kependudukan	Informasi Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

19	Sistem Informasi Pengelolaan Pendidikan Sekolah (SIPS)	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pendidikan Sekolah (SIPS) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Pendidikan	Masyarakat	Data Pengelolaan Pendidikan	Informasi Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	Sistem Informasi Manajemen Pembelajaran Pendidikan Sekolah (SIM-PPS)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembelajaran Pendidikan Sekolah (SIM-PPS) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengembangan Kurikulum	Masyarakat	Data Pengembangan Kurikulum	Informasi Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21	Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Pendidikan (SIM-PTP)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Pendidikan (SIM-PTP) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Masyarakat	Data Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; Info GTK; Dokumen Pegawai	Informasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; Info GTK; Dokumen Pegawai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Bahasa dan Sastra (SIM-PBS)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Bahasa dan Sastra (SIM-PBS) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Masyarakat	Data Pengembangan Bahasa dan Sastra	Informasi Pengembangan Bahasa dan Sastra	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Perorangan dan Masyarakat merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Masyarakat	Data Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Informasi Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
24	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK)	Aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Masyarakat	Data Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Informasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
25	Sistem Informasi Manajemen Sarana, Prasara dan Alat Kesehatan (SIMSPA)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sarana, Prasara dan Alat Kesehatan (SIMSPA) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Masyarakat	Data Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan	Informasi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan	Dinas Kesehatan

				Minuman	Makanan Minuman	
26	Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Hidup Sehat	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Hidup Sehat merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Masyarakat	Data Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Informasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
27	Sistem Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Masyarakat	Data Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
28	Sistem Informasi Manajemen Penyediaan Air Minum	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyediaan Air Minum merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Masyarakat	Data Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Informasi Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
29	Sistem Informasi Manajemen Persampahan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persampahan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Masyarakat	Data Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Informasi Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30	Sistem Informasi Manajemen Layanan Pengolahan Air Limbah	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Layanan Pengolahan Air Limbah merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Masyarakat	Data Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Informasi Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
31	Sistem Informasi Manajemen Drainase	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Drainase merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Masyarakat	Data Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Informasi Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
32	Sistem Informasi Manajemen Pemukiman Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemukiman Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Program Penataan Bangunan Gedung	Masyarakat	Data Program Penataan Bangunan Gedung	Informasi Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

33	Sistem Informasi Manajemen Bangunan dan Lingkungan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan dan Lingkungan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Masyarakat	Data Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Informasi Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
34	Sistem Informasi Manajemen Monitoring Jalan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Monitoring Jalan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Program Penyelenggaraan Jalan	Masyarakat	Data Program Penyelenggaraan Jalan	Informasi Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
35	Sistem Informasi Pengendalian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengembangan Jasa Kontruksi	Masyarakat	Data Pengembangan Jasa Kontruksi	Informasi Pengembangan Jasa Kontruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
36	Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Penataan Ruang	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Masyarakat	Data Penyelenggaraan Penataan Ruang	Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
37	Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengembangan Perumahan	Masyarakat	Data Pengembangan Perumahan	Informasi Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
38	Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Kawasan Permukiman	Masyarakat	Data Kawasan Permukiman	Informasi Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
39	Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Masyarakat	Data Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Informasi Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
40	Sistem Informasi Prasarana Sarana Utilitas Umum	Aplikasi Sistem Informasi Prasarana Sarana Utilitas Umum merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Masyarakat	Data Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Informasi Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

41	Sistem Informasi Manajemen Sengketa Tanah Garapan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sengketa Tanah Garapan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Masyarakat	Data Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Informasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
42	Sistem Informasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan	Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Masyarakat	Data Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Informasi Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
43	Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah dan Bangunan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah dan Bangunan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Masyarakat	Data Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Informasi Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
44	Sistem Informasi Manajemen Tanah Ulayat	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tanah Ulayat merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penetapan Tanah Ulayat	Masyarakat	Data Penetapan Tanah Ulayat	Informasi Penetapan Tanah Ulayat	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
45	Sistem Informasi Penatagunaan Tanah	Aplikasi Sistem Informasi Penatagunaan Tanah merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Tanah Kosong	Masyarakat	Data Pengelolaan Tanah Kosong	Informasi Pengelolaan Tanah Kosong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
46	Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah dan Bangunan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah dan Bangunan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Masyarakat	Data Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Informasi Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

47	Sistem Informasi Penatagunaan Tanah	Aplikasi Sistem Informasi Penatagunaan Tanah merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penatagunaan Tanah	Masyarakat	Data Penatagunaan Tanah	Informasi Penatagunaan Tanah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
48	Sistem Informasi Manajemen Ketentraman dan Ketertiban Umum (SIM-KKU)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Ketentraman dan Ketertiban Umum (SIM-KKU) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Masyarakat	Data Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Informasi Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
49	Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Bencana (SIM-PB)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Bencana (SIM-PB) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penanggulangan Bencana	Masyarakat	Data Penanggulangan Bencana	Informasi Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
50	Sistem Informasi Manajemen Kebakaran Terpadu (SIM-KT)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kebakaran Terpadu (SIM-KT) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Masyarakat	Data Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Informasi Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pemadam Kebakaran
51	Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Tenaga Kerja Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Tenaga Kerja Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Perencanaan Tenaga Kerja	Masyarakat	Data Perencanaan Tenaga Kerja	Informasi Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
52	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	Masyarakat	Data Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	Informasi Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

53	Sistem Informasi Bursa Layanan Kerja Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Bursa Layanan Kerja Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penempatan Tenaga Kerja	Masyarakat	Data Penempatan Tenaga Kerja	Informasi Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
54	Sisem Informasi Manajemen Hubungan Industrial Terpadu	Aplikasi Sisem Informasi Manajemen Hubungan Industrial Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Hubungan Industrial	Masyarakat	Data Hubungan Industrial	Informasi Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
55	Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengarusatamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Masyarakat	Data Pengarusatamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Informasi Pengarusatamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
56	Sistem Informasi Perlindungan Perempuan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Perlindungan Perempuan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Perlindungan Perempuan	Masyarakat	Data Perlindungan Perempuan	Informasi Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
57	Sistem Informasi Kualitas Keluarga Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Kualitas Keluarga Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Masyarakat	Data Peningkatan Kualitas Keluarga	Informasi Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

58	Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Masyarakat	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Informasi am Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
59	Sistem Informasi Hak Anak Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Hak Anak Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Masyarakat	Data Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Informasi Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
60	Sistem Informasi Khusus Anak Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Khusus Anak Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Program Perlindungan Khusus Anak	Masyarakat	Program Perlindungan Khusus Anak	Informasi am Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
61	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Masyarakat	Data Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Informasi Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan

62	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Masyarakat	Data Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Informasi Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
63	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penanganan Kerawanan Pangan	Masyarakat	Data Penanganan Kerawanan Pangan	Informasi Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
64	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengawasan Keamanan Pangan	Masyarakat	Data Pengawasan Keamanan Pangan	Informasi Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
65	Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Perencanaan Lingkungan Hidup	Masyarakat	Data Perencanaan Lingkungan Hidup	Informasi Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
66	Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengendalian Pencemaran Dan/Kerusakan Lingkungan Hidup	Masyarakat	Data Pengendalian Pencemaran Dan/Kerusakan Lingkungan Hidup	Informasi Pengendalian Pencemaran Dan/Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
67	Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Masyarakat	Data Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Informasi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup

68	Sistem Informasi Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3)	Aplikasi Sistem Informasi Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Masyarakat	Data Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Informasi Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
69	Sistem Informasi Manajemen dan Pengawasan Izin Lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Pengawasan Izin Lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Masyarakat	Data Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Informasi Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
70	Sistem Informasi Manajemen dan Pengawasan Izin Lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Pengawasan Izin Lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Masyarakat	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Informasi am Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup
71	Sistem Informasi Manajemen Pelatihan dan Penyuluhan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelatihan dan Penyuluhan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Masyarakat	Data Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Informasi Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup

72	Sistem Informasi Manajemen Penghargaan Lingkungan Hidup	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penghargaan Lingkungan Hidup merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Masyarakat	Data Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Informasi Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
73	Sistem Informasi Manajemen Pengaduan Lingkungan Hidup	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengaduan Lingkungan Hidup merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Masyarakat	Data Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Informasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
74	Sistem Informasi Manajemen Persampahan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persampahan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Persampahan	Masyarakat	Data Pengelolaan Persampahan	Informasi Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
75	Sistem Informasi Manajemen dan Penataan Desa	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Penataan Desa merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penataan Desa	Masyarakat	Data Penataan Desa	Informasi Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
76	Sistem Informasi Manajemen dan Penataan Desa	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Penataan Desa merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Peningkatan Kerja Sama Desa	Masyarakat	Data Peningkatan Kerja Sama Desa	Informasi Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
77	Sistem Informasi Administrasi Pemerintah Desa	Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pemerintah Desa merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	Masyarakat	Data Administrasi Pemerintahan Desa	Informasi Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung

78	Sistem Informasi Lembaga Masyarakat Desa	Aplikasi Sistem Informasi Lembaga Masyarakat Desa merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Masyarakat	Data Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Informasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
79	Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengendalian Penduduk	Masyarakat	Data Pengendalian Penduduk	Informasi Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
80	Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pembinaan Keluarga Berencanan (KB)	Masyarakat	Data Pembinaan Keluarga Berencanan (KB)	Informasi Pembinaan Keluarga Berencanan (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
81	Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Masyarakat	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Informasi rdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

82	Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Anggkutan Jalan (LLAJ)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Anggkutan Jalan (LLAJ) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (ILAJ)	Masyarakat	Data Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Informasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
83	Sistem Informasi Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan informasi dan komunikasi publik;Sistem Administrasi Informasi Registrasi Online Media Kabupaten Way Kanan (SARAGOM) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Program Informasi dan Komunikasi Publik	Masyarakat	Data Informasi dan Komunikasi Publik	Informasi Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
84	Sistem Informasi Pengelolaan Aplikasi Informatika Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Aplikasi Informatika Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Program Aplikasi Informatika	Masyarakat	Data Aplikasi Informatika	Informasi Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
85	Sistem Informasi Manajemen Simpan Pinjam Koperasi (SIM-SPKOP)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Simpan Pinjam Koperasi (SIM-SPKOP) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Masyarakat	Data Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Informasi Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
86	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Masyarakat	Data Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Informasi Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
87	Sistem Informasi Tingkat Kesehatan Koperasi	Aplikasi Sistem Informasi Tingkat Kesehatan Koperasi merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Masyarakat	Data Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Informasi Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

88	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Koperasi merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Masyarakat	Data Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Informasi Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
89	Sistem Informasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Aplikasi Sistem Informasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Masyarakat	Data Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Informasi Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
90	Sistem Informasi Manajemen UMKM (e-UMKM)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen UMKM (e-UMKM) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Masyarakat	Data Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Informasi Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
91	Sistem Informasi Manajemen UMKM (e-UMKM)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen UMKM (e-UMKM) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengembangan Umkm	Masyarakat	Data Pengembangan Umkm	Informasi Pengembangan Umkm	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
92	Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan	Aplikasi Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Masyarakat	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Informasi mbangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
93	Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan	Aplikasi Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Masyarakat	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Informasi mbangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
94	Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan	Aplikasi Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Masyarakat	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Informasi mbangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
95	Sistem Informasi Kebudayaan,	Aplikasi Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan	Masyarakat	Pengembangan	Informasi	Dinas

	Kesenian dan Sejarah	Sejarah merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengembangan Kebudayaan		Kebudayaan	mbangan Kebudayaan	Pendidikan dan Kebudayaan
96	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Aplikasi Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengembangan Keseniaan Tradisional	Masyarakat	Pengembangan Keseniaan Tradisional	Informasi mbangan Keseniaan Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
97	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Aplikasi Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pembinaan Sejarah	Masyarakat	Pembinaan Sejarah	Informasi naan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
98	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Aplikasi Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Masyarakat	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Informasi tarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
99	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Aplikasi Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengelolaan Permuseuman	Masyarakat	Pengelolaan Permuseuman	Informasi lolaan Permuseuman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
100	Sistem Informasi Perpustakaan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pembinaan Perpustakaan	Masyarakat	Data Pembinaan Perpustakaan	Informasi Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
101	Sistem Informasi Pelestarian Koleksi dan Naskah Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Pelestarian Koleksi dan Naskah Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Masyarakat	Data Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Informasi Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
102	Sistem Informasi Manajemen Perikanan Tangkap	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perikanan Tangkap merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Masyarakat	Data Pengelolaan Perikanan Tangkap	Informasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
103	Sistem Informasi Manajemen Perikanan Budidaya	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perikanan Budidaya merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengelolaan Perikanan Budidaya	Masyarakat	Data Pengelolaan Perikanan Budidaya	Informasi Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan

104	Sistem Informasi Manajemen Perikanan Budidaya	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perikanan Budidaya merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Masyarakat	Data Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Informasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan
105	Sistem Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Aplikasi Sistem Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Masyarakat	Data Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Informasi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
106	Sistem Informasi Pariwisata Terpadu (e-Pariwisata)	Aplikasi Sistem Informasi Pariwisata Terpadu (e-Pariwisata) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Masyarakat	Data Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Informasi Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
107	Sistem Informasi Pariwisata Terpadu (e-Pariwisata)	Aplikasi Sistem Informasi Pariwisata Terpadu (e-Pariwisata) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pariwisata	Masyarakat	Data Pemasaran Pariwisata	Informasi Pemasaran Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
108	Sistem Informasi Manajemen Ekonomi Kreatif	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Ekonomi Kreatif merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Masyarakat	Data Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Informasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
109	Sistem Informasi Manajemen Pelatihan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelatihan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Masyarakat	Data Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Informasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata

110	Layanan Sarana Produksi Pertanian (e-Saprotan)	Aplikasi Layanan Sarana Produksi Pertanian (e-Saprotan) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Masyarakat	Data Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Informasi Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
111	Layanan Sarana Produksi Pertanian (e-Saprotan)	Aplikasi Layanan Sarana Produksi Pertanian (e-Saprotan) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Masyarakat	Data Penyediaan Dan Data Pengembangan Prasarana Pertanian	Informasi Penyediaan Dan Data Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
112	Layanan e-Halo MedikVet	Aplikasi Layanan e-Halo MedikVet merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Masyarakat	Data Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Data Kesehatan Masyarakat Veteriner	Informasi Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Data Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
113	Layanan Asuransi (e-Asuransi)	Aplikasi Layanan Asuransi (e-Asuransi) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Masyarakat	Data Pengendalian Dan Data Penanggulangan Bencana Pertanian	Informasi Pengendalian Dan Data Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
114	Sistem Informasi Perizinan Usaha Tani (e-SIPUT)	Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Usaha Tani (e-SIPUT) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Perizinan Usaha Pertanian	Masyarakat	Data Perizinan Usaha Pertanian	Informasi Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
115	Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (Simluhtan)	Aplikasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (Simluhtan) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Penyuluhan Pertanian	Masyarakat	Data Penyuluhan Pertanian	Informasi Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
116	Sistem Informasi Perizinan Perusahaan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Perusahaan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Masyarakat	Data Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Informasi Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

117	Sistem Informasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Aplikasi Sistem Informasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Masyarakat	Data Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Informasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
118	Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Perdagangan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Perdagangan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Masyarakat	Data Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Informasi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
119	Sistem Informasi Ekspor Way Kanan	Aplikasi Sistem Informasi Ekspor Way Kanan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Ekspor Impor	Masyarakat	Data Ekspor	Informasi Ekspor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
120	Sistem Informasi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	Aplikasi Sistem Informasi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Masyarakat	Data Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Informasi Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
121	Sistem Informasi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	Aplikasi Sistem Informasi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Masyarakat	Data Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Informasi Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
122	Sistem Informasi Perencanaan dan Pembangunan Industri (SIPPI)	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pembangunan Industri (SIPPI) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Masyarakat	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Informasi canaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

123	Sistem Informasi Perencanaan dan Pembagunan Industri (SIPPI)	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pembagunan Industri (SIPPI) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Masyarakat	Data Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Informasi Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
124	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Masyarakat	Data Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Informasi Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
125	Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT)	Aplikasi Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Masyarakat	Data Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Informasi Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
126	Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT)	Aplikasi Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Masyarakat	Data Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Informasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
127	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Masyarakat	Data Pengelolaan Keuangan Daerah	Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
128	Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIM-PD)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIM-PD) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Masyarakat	Data Pengelolaan Pendapatan Daerah	Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah

129	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Data Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Informasi Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
130	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Data Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Informasi Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
131	Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Daerah	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Daerah merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Data Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	Informasi Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
132	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Data Pengelolaan Keuangan Daerah	Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
133	Sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu	Aplikasi Sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Data Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa	Informasi Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
134	Sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu	Aplikasi Sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Data Pengadaan Secara Elektronik	Informasi Pengadaan Secara Elektronik	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
135	Sistem informasi Pembinaan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Aplikasi Sistem informasi Pembinaan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Data Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	Informasi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
136	MySAPK	Aplikasi MySAPK merupakan Aplikasi Untuk Mendukung	Satuan Kerja	Data	Informasi	Badan

		Layanan Layanan Kepegawaian Daerah	Perangkat Daerah	Kepegawaian Daerah	Kepegawaian Daerah	Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
137	Sistem Informasi Kearsipan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Arsip	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Data Pengelolaan Arsip	Informasi Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
138	Sistem Informasi Perizinan Penggunaan Arsip	Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Penggunaan Arsip merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Perlindungan dan Penyelematan Arsip	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Data Perlindungan dan Penyelematan Arsip	Informasi Perlindungan dan Penyelematan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
139	Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Data Pengelolaan Barang Milik Daerah	Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
140	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIM-Pengawasan)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIM-Pengawasan) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penyelenggaraan Pengawasan	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Data Penyelenggaraan Pengawasan	Informasi Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
141	Sistem Informasi Komunikasi dan Asistensi Pimpinan	Aplikasi Sistem Informasi Komunikasi dan Asistensi Pimpinan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Data Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Informasi Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Inspektorat
142	Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (e-SAKIP)	Aplikasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (e-SAKIP) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Data Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Informasi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Inspektorat

143	e-Kinerja	Aplikasi e-Kinerja merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Data Pengembangan Sumber Daya Manusia	Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
144	Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (SIPPD)	Aplikasi Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (SIPPD) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Informasi itian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
145	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Publik	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Publik merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Data Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Informasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan bangsa dan politik
146	Sistem Informasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Aplikasi Sistem Informasi Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Informasi gkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan bangsa dan politik
147	Sistem Informasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Aplikasi Sistem Informasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Informasi rdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan bangsa dan politik

148	Sistem Informasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Aplikasi Sistem Informasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Informasi naan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan bangsa dan politik
149	Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Aplikasi Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Informasi gkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan bangsa dan politik
150	Sistem Informasi Statistik Sektoral	Aplikasi Sistem Informasi Statistik Sektoral merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Statistik Sektoral	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Data Statistik Sektoral	Informasi Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
151	Sistem Informasi Manajemen Persandian Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persandian Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Informasi lenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
152	Sistem Informasi Kesejahteraan Rakyat Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Rakyat Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan RAL.02.04.08.01 Layanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Data Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Informasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
153	Sistem Informasi Perekonomian dan pembangunan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Perekonomian dan pembangunan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan RAL.02.04.08.02 Layanan Perekonomian dan Pembangunan	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Data Perekonomian dan Pembangunan	Informasi Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah

154	Sistem Informasi Pengelolaan Izin	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Izin merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan RAL.02.04.08.03 Layanan Pengelolaan Izin Lokasi	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Data Pengelolaan Izin Lokasi	Informasi Pengelolaan Izin Lokasi	Sekretariat Daerah
155	Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (SIM Petuksi DPRD)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (SIM Petuksi DPRD) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Data Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Informasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD

Domain data dan informasi juga akan memiliki relasi langsung dengan domain aplikasi SPBE dan domain layanan SPBE sehingga menjadi layanan yang didasarkan data (*Data-Driven Services*). Salah satu teknologi masa depan yang mendorong perubahan SPBE adalah *Big Data Analytic*. Dengan memanfaatkan teknologi ini, layanan SPBE diharapkan mampu memberi dukungan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan bagi pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdapat aspek penilaian yang berkaitan dengan layanan yaitu Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (10 indikator) dan Layanan Publik Berbasis Elektronik (3 indikator) yang membutuhkan dukungan data yang baik. Tabel dibawah ini menggambarkan hasil pemetaan data dan informasi yang saat ini dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan domain arsitektur layanan berdasarkan Referensi Arsitektur Layanan (RAL) dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang SPBE Nasional dan Indikator Layanan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan No 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021.

Tabel 28 Pemetaan Data dan Informasi dengan Layanan

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Indikator Layanan (PermenPANRB 59 2020)	Data dan Informasi
Layanan Publik (RL.01)	Informasi (RAL.01.43)	Pengembangan Sektor Usaha Penanaman Modal (RL.01.12.03)	Layanan Pengaduan Pelayanan publik (RL.01.44.02.01)	Data Pengaduan Pelayanan publik
Layanan Publik (RL.01)	Informasi (RAL.01.43)	Promosi Penanaman Modal (RL.01.12.08)	Layanan Data Terbuka (RL.01.43.03.01)	Data Terbuka
Layanan Publik (RL.01)	Informasi (RAL.01.43)	Penanaman Modal Nasional (RL.01.12.04)	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) (RL.01.43.03.02)	Data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Layanan Publik (RL.01)	Investasi (RL.01.12)	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (RL.01.12.05)	Pengembangan Sektor Usaha Penanaman Modal (RL.01.12.03)	Data Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Layanan Publik (RL.01)	Investasi (RL.01.12)	Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal (RL.01.12.06)	Promosi Penanaman Modal (RL.01.12.08)	Data Promosi Penanaman Modal
Layanan Publik (RL.01)	Investasi (RL.01.12)	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Penanaman Modal Nasional (RL.01.12.04)	Data Pelayanan Penanaman Modal
Layanan Publik (RL.01)	Investasi (RL.01.12)	Penanganan Fakir Miskin (RL.01.26.02)	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (RL.01.12.05)	Data Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Layanan Publik (RL.01)	Investasi (RL.01.12)	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal (RL.01.12.06)	Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Layanan Publik (RL.01)	Sosial (RL.01.26)	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Data Pemberdayaan Sosial
Layanan Publik (RL.01)	Sosial (RL.01.26)	Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem (RL.01.40.02)	Penanganan Fakir Miskin (RL.01.26.02)	Data Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Layanan Publik (RL.01)	Sosial (RL.01.26)	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Data Rehabilitasi Sosial
Layanan Publik (RL.01)	Sosial (RL.01.26)	Pengendalian Penduduk (RL.01.23.01)	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Data Perlindungan Dan Jaminan Sosial
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	Pencatatan Sipil (RL.01.23.03)	Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem (RL.01.40.02)	Data Pengelolaan Taman Makam
Layanan Publik (RL.01)	Sosial (RL.01.26)	Kebijakan Kependudukan (RL.01.23.02)	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Data Penanganan Bencana
Layanan Publik (RL.01)	Kependudukan (RL.01.23)	Kebijakan Kependudukan (RL.01.23.02)	Pengendalian Penduduk (RL.01.23.01)	Data Pendaftaran Penduduk
Layanan Publik (RL.01)	Kependudukan (RL.01.23)	Pendidikan Dasar (RL.01.31.03)	Pencatatan Sipil (RL.01.23.03)	Data Biodata Penduduk
Layanan Publik (RL.01)	Kependudukan (RL.01.23)	Pendidikan Dasar (RL.01.31.03)	Kebijakan Kependudukan (RL.01.23.02)	Dokumen Admuduk
Layanan Publik (RL.01)	Kependudukan (RL.01.23)	Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (RL.01.31.01)	Kebijakan Kependudukan (RL.01.23.02)	Data Pengelolaan Profil Kependudukan
Layanan Publik (RL.01)	Pendidikan (RL.01.31)	Pendidikan Dasar (RL.01.31.03)	Pendidikan Dasar (RL.01.31.03)	Data Pengelolaan Pendidikan
Layanan Publik (RL.01)	Pendidikan (RL.01.31)	Kesehatan Masyarakat (RL.01.25.02)	Pendidikan Dasar (RL.01.31.03)	Data Pengembangan Kurikulum
Layanan Publik (RL.01)	Pendidikan (RL.01.31)	Pemberdayaan Tenaga Kesehatan (RL.01.25.03)	Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (RL.01.31.01)	Data Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; Info GTK; Dokumen Pegawai
Layanan Publik (RL.01)	Pendidikan (RL.01.31)	Farmasi Dan Alat Kesehatan (RL.01.25.01)	Pendidikan Dasar (RL.01.31.03)	Data Pengembangan Bahasa dan Sastra
Layanan Publik (RL.01)	Kesehatan (RL.01.25)	Kesehatan Masyarakat (RL.01.25.02)	Kesehatan Masyarakat (RL.01.25.02)	Data Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Layanan Publik (RL.01)	Kesehatan (RL.01.25)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Pemberdayaan Tenaga Kesehatan (RL.01.25.03)	Data Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Layanan Publik (RL.01)	Kesehatan (RL.01.25)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Farmasi Dan Alat Kesehatan (RL.01.25.01)	Data Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
Layanan Publik (RL.01)	Kesehatan (RL.01.25)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Kesehatan Masyarakat (RL.01.25.02)	Data Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Data Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Data Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Data Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Data Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Data Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Data Program Penataan Bangunan Gedung
Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Data Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Data Program Penyelenggaraan Jalan
Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Data Pengembangan Jasa Kontruksi
Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Data Penyelenggaraan Penataan Ruang
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Data Pengembangan Perumahan
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Data Kawasan Permukiman
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Data Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Data Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Data Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Data Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Data Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Data Penetapan Tanah Ulayat
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	Keamanan Dan Ketertiban Umum (RL.01.29.06)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Data Pengelolaan Tanah Kosong
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	Penanggulangan Bencana (RL.01.40.06)	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Data Pengelolaan Izin Membuka Tanah
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	Pencarian Dan Pertolongan (RL.01.40.07)	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Data Penatagunaan Tanah
Layanan Publik (RL.01)	Keamanan (RL.01.29)	Pengelolaan Ketenagakerjaan (RL.01.32.02)	Keamanan Dan Ketertiban Umum (RL.01.29.06)	Data Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja (RL.01.32.04)	Penanggulangan Bencana (RL.01.40.06)	Data Penanggulangan Bencana
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	Penempatan Tenaga Kerja (RL.01.32.05)	Pencarian Dan Pertolongan (RL.01.40.07)	Data Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non

				Kebakaran
Layanan Publik (RL.01)	Ketenagakerjaan (RL.01.32)	Penempatan Tenaga Kerja (RL.01.32.05)	Pengelolaan Ketenagakerjaan (RL.01.32.02)	Data Perencanaan Tenaga Kerja
Layanan Publik (RL.01)	Ketenagakerjaan (RL.01.32)	Kesetaraan Gender (RL.01.27.01)	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja (RL.01.32.04)	Data Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja
Layanan Publik (RL.01)	Ketenagakerjaan (RL.01.32)	Perlindungan Hak Perempuan (RL.01.27.03)	Penempatan Tenaga Kerja (RL.01.32.05)	Data Penempatan Tenaga Kerja
Layanan Publik (RL.01)	Ketenagakerjaan (RL.01.32)	Kesetaraan Gender (RL.01.27.01)	Penempatan Tenaga Kerja (RL.01.32.05)	Data Hubungan Industrial
Layanan Publik (RL.01)	Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27)	Perlindungan Anak (RL.01.27.02)	Kesetaraan Gender (RL.01.27.01)	Data Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
Layanan Publik (RL.01)	Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27)	Perlindungan Anak (RL.01.27.02)	Perlindungan Hak Perempuan (RL.01.27.03)	Data Perlindungan Perempuan
Layanan Publik (RL.01)	Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27)	Perlindungan Anak (RL.01.27.02)	Kesetaraan Gender (RL.01.27.01)	Data Peningkatan Kualitas Keluarga
Layanan Publik (RL.01)	Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27)	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Perlindungan Anak (RL.01.27.02)	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
Layanan Publik (RL.01)	Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27)	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Perlindungan Anak (RL.01.27.02)	Data Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Layanan Publik (RL.01)	Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27)	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Perlindungan Anak (RL.01.27.02)	Program Perlindungan Khusus Anak
Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Data Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem (RL.01.40.02)	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Data Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Data Penanganan Kerawanan Pangan
Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem (RL.01.40.02)	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Data Pengawasan Keamanan Pangan
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem (RL.01.40.02)	Data Perencanaan Lingkungan Hidup
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Data Pengendalian Pencemaran Dan/Kerusakan Lingkungan Hidup
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem (RL.01.40.02)	Data Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	Dampak Perubahan Iklim (RL.01.40.01)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Data Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Data Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Dampak Perubahan Iklim (RL.01.40.01)	Data Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	Otonomi Daerah (RL.01.24.02)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Data Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	Administrasi Kewilayahan (RL.01.24.03)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Data Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RL.01.24.06)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Data Pengelolaan Persampahan
Layanan Publik (RL.01)	Pemerintahan daerah (RL.01.24)	Keikutsertaan Masyarakat (RL.01.24.01)	Otonomi Daerah (RL.01.24.02)	Data Penataan Desa
Layanan Publik (RL.01)	Pemerintahan daerah (RL.01.24)	Pengendalian Penduduk (RL.01.23.01)	Administrasi Kewilayahan (RL.01.24.03)	Data Peningkatan Kerja Sama Desa
Layanan Publik (RL.01)	Pemerintahan daerah (RL.01.24)	Keluarga Berencana (RL.01.23.04)	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RL.01.24.06)	Data Administrasi Pemerintahan Desa
Layanan Publik (RL.01)	Pemerintahan daerah (RL.01.24)	Kebijakan Kependudukan (RL.01.23.02)	Keikutsertaan Masyarakat (RL.01.24.01)	Data Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
Layanan Publik (RL.01)	Kependudukan (RL.01.23)	Pelayanan Transportasi (RL.01.19.02)	Pengendalian Penduduk (RL.01.23.01)	Data Pengendalian Penduduk
Layanan Publik (RL.01)	Kependudukan (RL.01.23)	Sistem Komunikasi Publik (RL.01.44.02)	Keluarga Berencana (RL.01.23.04)	Data Pembinaan Keluarga Berencanan (KB)
Layanan Publik (RL.01)	Kependudukan (RL.01.23)	Sistem Komunikasi Publik (RL.01.44.02)	Kebijakan Kependudukan (RL.01.23.02)	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Layanan Publik (RL.01)	Transportasi (RL.01.19)	Dukungan Bisnis (RL.01.14.01)	Pelayanan Transportasi (RL.01.19.02)	Data Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Layanan Publik (RL.01)	Informasi (RL.01.44)	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Sistem Komunikasi Publik (RL.01.44.02)	Data Informasi dan Komunikasi Publik
Layanan Publik (RL.01)	Informasi (RL.01.44)	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Sistem Komunikasi Publik (RL.01.44.02)	Data Aplikasi Informatika
Layanan Publik (RL.01)	Usaha Kecil dan Menengah (RL.01.14)	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Dukungan Bisnis (RL.01.14.01)	Data Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Layanan Publik (RL.01)	Koperasi (RL.01.13)	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Data Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
Layanan Publik (RL.01)	Koperasi (RL.01.13)	Dukungan Bisnis (RL.01.14.01)	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Data Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
Layanan Publik (RL.01)	Koperasi (RL.01.13)	Dukungan Bisnis (RL.01.14.01)	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Data Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
Layanan Publik (RL.01)	Koperasi (RL.01.13)	Pemberdayaan Pemuda (RL.01.34.01)	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Data Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
Layanan Publik (RL.01)	Usaha Kecil dan Menengah (RL.01.14)	Kebijakan Di Bidang Pembudayaan Olahraga (RL.01.35.01)	Dukungan Bisnis (RL.01.14.01)	Data Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
Layanan Publik (RL.01)	Usaha Kecil dan Menengah (RL.01.14)	Kebijakan Di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga (RL.01.35.02)	Dukungan Bisnis (RL.01.14.01)	Data Pengembangan Umkm
Layanan Publik (RL.01)	Olahraga (RL.01.35)	Kebijakan Kebudayaan (RL.01.42.01)	Pemberdayaan Pemuda (RL.01.34.01)	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Layanan Publik (RL.01)	Olahraga (RL.01.35)	Perfilman Dan Kesenian (RL.01.42.02)	Kebijakan Di Bidang Pembudayaan Olahraga (RL.01.35.01)	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Layanan Publik (RL.01)	Olahraga (RL.01.35)	Kebijakan Kebudayaan (RL.01.42.01)	Kebijakan Di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga (RL.01.35.02)	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Layanan Publik (RL.01)	Kebudayaan (RL.01.42)	Cagar Budaya (RL.01.42.04)	Kebijakan Kebudayaan (RL.01.42.01)	Pengembangan Kebudayaan
Layanan Publik (RL.01)	Kebudayaan (RL.01.42)	Cagar Budaya (RL.01.42.04)	Perfilman Dan Kesenian (RL.01.42.02)	Pengembangan Kesenian Tradisional
Layanan Publik (RL.01)	Kebudayaan (RL.01.42)	Kebijakan Kebudayaan (RL.01.42.01)	Kebijakan Kebudayaan (RL.01.42.01)	Pembinaan Sejarah
Layanan Publik (RL.01)	Kebudayaan (RL.01.42)	Sastra Dan Bahasa Indonesia (RL.01.42.03)	Cagar Budaya (RL.01.42.04)	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
Layanan Publik (RL.01)	Kebudayaan (RL.01.42)	Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)	Cagar Budaya (RL.01.42.04)	Pengelolaan Permuseuman
Layanan Publik (RL.01)	Kebudayaan (RL.01.42)	Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)	Kebijakan Kebudayaan (RL.01.42.01)	Data Pembinaan Perpustakaan
Layanan Publik (RL.01)	Kebudayaan (RL.01.42)	Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)	Sastra Dan Bahasa Indonesia (RL.01.42.03)	Data Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
Layanan Publik (RL.01)	Perikanan (RL.01.10)	Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)	Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)	Data Pengelolaan Perikanan Tangkap
Layanan Publik (RL.01)	Perikanan (RL.01.10)	Pengembangan Kepariwisata (RL.01.15.01)	Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)	Data Pengelolaan Perikanan Budidaya
Layanan Publik (RL.01)	Perikanan (RL.01.10)	Pengembangan Lembaga Kepariwisata (RL.01.15.02)	Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)	Data Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
Layanan Publik (RL.01)	Perikanan (RL.01.10)	Pengembangan Objek Wisata (RL.01.15.03)	Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)	Data Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Layanan Publik (RL.01)	Pariwisata (RL.01.15)	Pengembangan Objek Wisata (RL.01.15.03)	Pengembangan Kepariwisata (RL.01.15.01)	Data Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

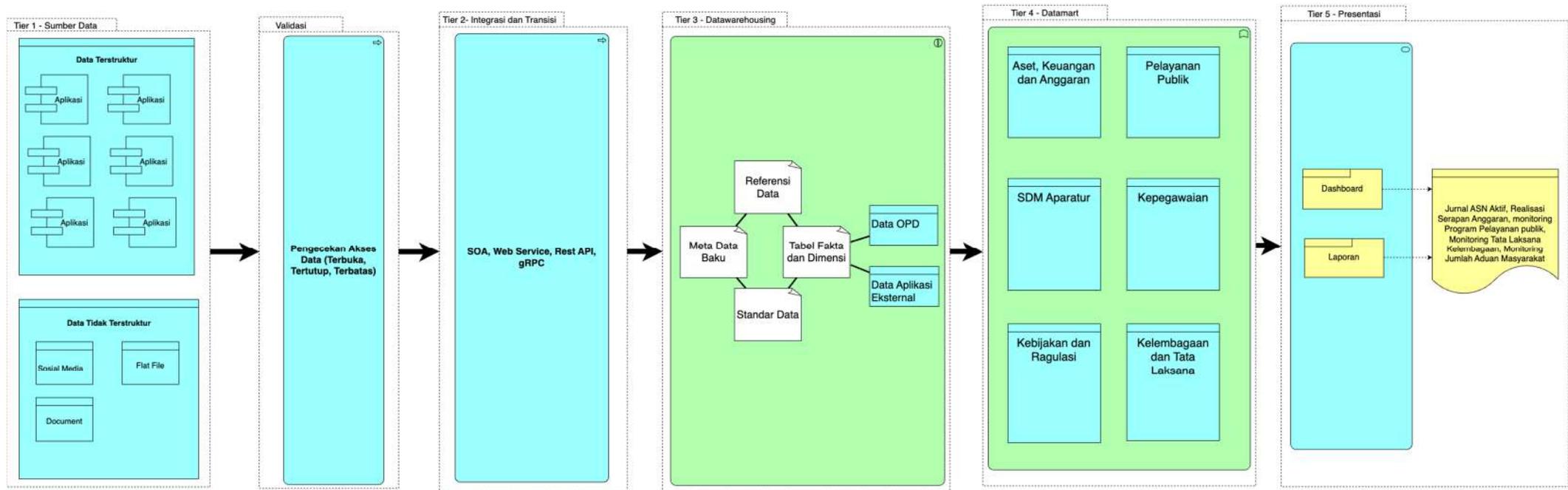
Layanan Publik (RL.01)	Pariwisata (RL.01.15)	Pertanian (RL.01.07.01)	Pengembangan Lembaga Kepariwisata (RL.01.15.02)	Data Pemasaran Pariwisata
Layanan Publik (RL.01)	Pariwisata (RL.01.15)	Pertanian (RL.01.07.01)	Pengembangan Objek Wisata (RL.01.15.03)	Data Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Layanan Publik (RL.01)	Pariwisata (RL.01.15)	Pertanian (RL.01.07.01)	Pengembangan Objek Wisata (RL.01.15.03)	Data Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	Pertanian (RL.01.07.01)	Pertanian (RL.01.07.01)	Data Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	Pertanian (RL.01.07.01)	Pertanian (RL.01.07.01)	Data Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	Pertanian (RL.01.07.01)	Pertanian (RL.01.07.01)	Data Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Data Kesehatan Masyarakat Veteriner
Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	Perdagangan Domestik (RL.01.06.04)	Pertanian (RL.01.07.01)	Data Pengendalian Dan Data Penanggulangan Bencana Pertanian
Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	Perdagangan Domestik (RL.01.06.04)	Pertanian (RL.01.07.01)	Data Perizinan Usaha Pertanian
Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	Perdagangan Domestik (RL.01.06.04)	Pertanian (RL.01.07.01)	Data Penyuluhan Pertanian
Layanan Publik (RL.01)	Perdagangan (RL.01.06)	Ekspor Dan Impor (RL.01.06.01)	Perdagangan Domestik (RL.01.06.04)	Data Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
Layanan Publik (RL.01)	Perdagangan (RL.01.06)	Perlindungan Konsumen (RL.01.06.05)	Perdagangan Domestik (RL.01.06.04)	Data Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Layanan Publik (RL.01)	Perdagangan (RL.01.06)	Penggunaan Produk Dalam Negeri (RL.01.06.02)	Perdagangan Domestik (RL.01.06.04)	Data Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
Layanan Publik (RL.01)	Perdagangan (RL.01.06)	Pengembangan Industri (RL.01.05.08)	Ekspor Dan Impor (RL.01.06.01)	Data Ekspor
Layanan Publik (RL.01)	Perdagangan (RL.01.06)	Pengembangan Industri Strategis (RL.01.05.10)	Perlindungan Konsumen (RL.01.06.05)	Data Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
Layanan Publik (RL.01)	Perdagangan (RL.01.06)	Ketahanan Industri (RL.01.05.06)	Penggunaan Produk Dalam Negeri (RL.01.06.02)	Data Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Layanan Publik (RL.01)	Industri (RL.01.05)	Layanan Transmigrasi (RL.01.18.01)	Pengembangan Industri (RL.01.05.08)	Perencanaan Dan Pembangunan Industri
Layanan Publik (RL.01)	Industri (RL.01.05)	Layanan Transmigrasi (RL.01.18.01)	Pengembangan Industri Strategis (RL.01.05.10)	Data Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota
Layanan Publik (RL.01)	Industri (RL.01.05)	Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara (RL.02.02.01)	Ketahanan Industri (RL.01.05.06)	Data Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Layanan Publik (RL.01)	Transmigrasi (RL.01.18)	Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara (RL.02.02.01)	Layanan Transmigrasi (RL.01.18.01)	Data Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Layanan Publik (RL.01)	Transmigrasi (RL.01.18)	Penyusunan Perencanaan (RL.02.03.02)	Layanan Transmigrasi (RL.01.18.01)	Data Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Keuangan (RL.02.02)	Koordinasi Perencanaan (RL.02.03.03)	Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara (RL.02.02.01)	Data Pengelolaan Keuangan Daerah
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Keuangan (RL.02.02)	Penganggaran (RL.02.02.04)	Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara (RL.02.02.01)	Data Pengelolaan Pendapatan Daerah
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Perencanaan Pembangunan Nasional (RL.02.03)	Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara (RL.02.02.01)	Layanan Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (RL.02.03.02.01)	Data Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Perencanaan Pembangunan Nasional (RL.02.03)	Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RL.02.02.08)	Layanan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RL.02.03.03.01)	Data Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Keuangan (RL.02.02)	Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RL.02.02.08)	Layanan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD (RL.02.02.04.01)	Data Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Keuangan (RL.02.02)	Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RL.02.02.08)	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah (RL.02.02.01.01)	Data Pengelolaan Keuangan Daerah
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Dukungan operasional organisasi (RL.02.06)	Manajemen ASN (RL.02.04.01)	Layanan Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa (RL.02.02.08.01)	Data Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Dukungan operasional organisasi (RL.02.06)	Dukungan Kearsipan (RL.02.06.18)	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (RL.02.02.08.02)	Data Pengadaan Secara Elektronik
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Dukungan operasional organisasi (RL.02.06)	Dukungan Kearsipan (RL.02.06.18)	Layanan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan (RL.02.02.08.03)	Data Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Aparatur Negara (RL.02.04)	Pengelolaan Barang Milik Negara (RL.02.02.05)	Layanan Kepegawaian Daerah (RL.02.04.01.01)	Data Kepegawaian Daerah
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Data dan Informasi Pemerintah (RL.02.09)	Pengawasan Kinerja (RL.02.07.02)	Layanan Pengelolaan Arsip (RL.02.06.18.01)	Data Pengelolaan Arsip
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Data dan Informasi Pemerintah (RL.02.09)	Pengawasan Kinerja (RL.02.07.02)	Layanan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (RL.02.06.18.02)	Data Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Keuangan (RL.02.02)	Pengawasan Kinerja (RL.02.07.02)	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah (RL.02.02.05.01)	Data Pengelolaan Barang Milik Daerah
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Akuntabilitas Kinerja (RL.02.07)	Pendidikan Dan Pelatihan Keahlian (RL.02.04.03)	Layanan Penyelenggaraan Pengawasan (RL.02.07.02.01)	Data Penyelenggaraan Pengawasan
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Akuntabilitas Kinerja (RL.02.07)	Pengendalian Sumber Daya Kerja Sama (RL.02.08.08)	Layanan Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi (RL.02.07.02.02)	Data Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi

Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Akuntabilitas Kinerja (RL.02.07)	Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (RL.02.07.02.03)	Data Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Aparatur Negara (RL.02.04)	Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)	Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia (RL.02.04.03.01)	Data Pengembangan Sumber Daya Manusia
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Organisasi dan Tata Kelola (RL.02.08)	Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)	Penelitian dan Pengembangan Daerah (RL.02.08.08.01)	Penelitian dan Pengembangan Daerah
Layanan Publik (RL.01)	Kenegaraan (RL.01.03)	Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)	Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (RL.01.03.02.01)	Data Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Layanan Publik (RL.01)	Kenegaraan (RL.01.03)	Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (RL.01.03.02.02)	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Layanan Publik (RL.01)	Kenegaraan (RL.01.03)	Statistik Sektoral (RL.02.09.06)	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (RL.01.03.02.03)	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Layanan Publik (RL.01)	Kenegaraan (RL.01.03)	Pengelolaan Sistem Informasi (RL.02.09.04)	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya (RL.01.03.02.04)	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
Layanan Publik (RL.01)	Kenegaraan (RL.01.03)	Penyelenggaraan Pelayanan Publik (RL.02.04.08)	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (RL.01.03.02.05)	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Layanan Publik (RL.01)	Informasi (RL.01.44)	Penyelenggaraan Pelayanan Publik (RL.02.04.08)	Layanan Statistik Sektoral (RL.02.09.06.01)	Data Statistik Sektoral
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Data dan Informasi Pemerintah (RL.02.09)	Penyelenggaraan Pelayanan Publik (RL.02.04.08)	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (RL.02.09.04.01)	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Aparatur Negara (RL.02.04)	Penyelenggaraan Pelayanan Publik (RL.02.04.08)	Layanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (RL.02.04.08.01)	Data Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Aparatur Negara (RL.02.04)	Penyelenggaraan Pelayanan Publik (RL.02.04.08)	Layanan Perekonomian dan Pembangunan (RL.02.04.08.02)	Data Perekonomian dan Pembangunan
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Aparatur Negara (RL.02.04)	Penyelenggaraan Pelayanan Publik (RL.02.04.08)	Layanan Pengelolaan Izin Lokasi (RL.02.04.08.03)	Data Pengelolaan Izin Lokasi
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Aparatur Negara (RL.02.04)	Penyelenggaraan Pelayanan Publik (RL.02.04.08)	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (RL.02.04.08.04)	Data Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

5.2 Arsitektur Data dan Informasi SPBE Target

5.2.1 Identifikasi Kebutuhan Data Pemerintah Daerah Way Kanan



Tier 1 - Sumber Data

Pada tier pertama, seluruh sumber data dijadikan kandidat dari data yang akan dipergunakan untuk menjadi masukan bagi integrasi data. Sumber-sumber data pada Tier pertama didapatkan dari basil pendataan yang dilakukan pada Arsitektur Aplikasi maupun Layanan, dimana sumber data dapat berasal dan Aplikasi yang sudah digunakan (baik umum maupun khusus), dokumen yang terstruktur seperti file excel hasil pengolahan mandiri oleh unit kerja atau data yang dikelola oleh kesekretariatan, data tidak terstruktur yang ada di media sosial, maupun data presensi sidik jari, CCTV, dsb. Data dengan berbagai sumber ini nantinya perlu dipilah melalui proses penyaringan pada berbagai level Akses Data. Data yang memiliki sifat terbuka saja yang akan diteruskan ke Tier berikutnya.

Tier 2 - Integrasi dan Transisi

Aplikasi integrasi dimulai karena adanya kebutuhan pertukaran data/informasi antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain. Tujuan dari lapisan ini adalah untuk memindahkan data dari berbagai sumber baik khusus maupun umum pada kecepatan yang berbeda, untuk tujuan:

1. memindahkan data dari sistem asal ke sistem hilir untuk mendukung proses bisnis yang terintegrasi. Hal ini memastikan data dengan akses terbuka dialirkan melalui proses yang baik dengan tujuan meningkatkan kepercayaan hasil dan kecepatan penyelesaian tugas dan proses.
2. Memindahkan data ke Tier 3 - Arsitektur Data Warehouse, di mana data disimpan untuk tujuan lain. Dalam proses migrasi data diperlukan beberapa proses seperti ETL (Extract, Transform dan Load). Tujuan dari proses ETL adalah:
 - Membersihkan data dari berbagai kemungkinan kesalahan seperti adanya typo, data yang hilang, ketidakkonsistenan
 - Menyediakan kepercayaan terhadap sumber data
 - Mengubah data transaksi kedalam granularitas waktu yang didefinisikan di data warehouse.
3. Berbagai alternatif teknologi dapat digunakan seperti Arsitektur Service Oriented Architecture, Web Service, Rest API.

Tier 3 - Data Warehousing

Data Warehousing adalah proses mengumpulkan data dari berbagai sumber ke dalam suatu tempat dengan 4 karakteristik yaitu berorientasi subyek, terintegrasi, mempunyai variasi waktu tertentu (granularitas waktu), serta tidak dapat dirubah. Data disimpan dalam bentuk dimensional modeling dengan beberapa tabel fakta dan dimensi. Penyusunan Data Warehouse pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan dibentuk dengan tetap menjalankan amanat Perpres No. 39 Tahun 2019 mengenai satu data. Dimana diatur bahwa dalam pengimplementasian data warehouse terdapat beberapa komponen standar yang diperlukan seperti:

1. Referensi Data, yaitu Data harus menggunakan kode referensi dan data induk yang tersedia di Portal Satu Data.
2. Metadata Baku, yaitu Data harus mempunyai informasi terstruktur yang berfungsi menjelaskan isi dan sumber data sehingga dapat mudah untuk ditemukan, digunakan atau dikelola kembali.

3. Standar Data, yaitu standar yang mengatur metodologi yang meliputi definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan.
4. Tabel Fakta dan Dimensi, yaitu berisi tabel fakta dan berbagai dimensi yang dimodelkan sesuai dengan orientasi subyek tertentu sesuai dengan kebutuhan. Tabel-tabel fakta dibentuk dari berbagai sumber data dari kesekretariatan, ke deputian dan eksternal.

Tier 4 - Datamarts

Datamarts adalah suatu bagian pada data warehouse yang mendukung pembuatan laporan dan analisa data pada suatu unit, bagian atau operasi pada suatu perusahaan yang berorientasi subyek. Pada data mart, Business Intelligence (BI) banyak digunakan untuk melakukan analisis. Tidak seperti Tier-3 di mana data tidak aktif, pada tingkat ini adalah tempat data bergerak kembali. Data disatukan dalam kombinasi unik untuk mendukung pelaporan, dan analitik. Implementasi dari Datamart di Pemerintahan Kabupaten Way Kanan diusulkan dibangun dari berbagai subyek yang terkait dengan proses bisnis dari Pemerintah Kabupaten Way Kanan sbb:

1. Datamart Kelembagaan dan Tata Laksana
Datamart ini berisi data kelembagaan dan pelaksanaannya meliputi indeks SPBE, Tupoksi unit, dst.
2. Datamart SDM Aparatur
Datamart ini berisi data Aparatur SDM meliputi jumlah Aparatur per periode, standar kompetensi ASN dan evaluasi kinerjanya.
3. Datamart Pelayanan Publik
Datamart ini berisi data pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan meliputi jumlah pelayanan, serta keterhubungannya dengan data dari aplikasi Span Lapor.
4. Datamart Aset, Keuangan dan Anggaran
Datamart ini berisi data terkait aset, keuangan dan anggaran meliputi rencana, realisasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Way Kanan
5. Datamart Kepegawaian serapan anggaran, serta aset-aset
Datamart ini berisi data terkait kepegawaian meliputi profil pegawai, perjanjian kinerja, kehadiran pegawai, dst.
6. Datamart Kebijakan dan regulasi
Datamart ini berisi data terkait kebijakan dan regulasi.

Tier 5 - Presentasi

Pada tier ini, data dan informasi yang ditarik dari data mart digabungkan dan diproses untuk divisualisasikan ataupun dibentuk menjadi pemodelan yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan. Presentasi data di dalam tier kelima ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu: Dashboard

Dashboard didefinisikan sebagai sebuah tampilan visual dari informasi terpenting yang dibutuhkan untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Data yang dibutuhkan untuk ditampilkan dalam dashboard berasal dari berbagai sumber data yang digabungkan dan diatur pada sebuah layar, menjadi informasi yang dibutuhkan dan dapat dilihat secara sekilas. Penyajian informasi pada dashboard biasanya berhubungan dengan grafik, warna, peta, maupun visualisasi lainnya yang menarik. Untuk mendukung penyajian informasi dashboard yang

cepat dengan tampilan yang balk, biasanya diperlukan Business Intelligence tools, seperti Tableau, Power BI, Business Intelligence, dsb. Berbagai informasi seperti jumlah pengawakan SDM aktif, realisasi dan serapan anggaran, monitoring program maupun kebijakan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, tata laksana kelembagaan, serta jumlah aduan masyarakat dapat dengan mudah ditampilkan.

Laporan adalah salah satu bentuk informasi yang ditujukan untuk diunduh dan dibagipakaikan ke pihak eksternal lain. Biasanya laporan dapat berupa file excel maupun pptx dari hasil dashboard. Selain itu laporan dalam bentuk hard copy yang dapat dicetak juga terkadang diperlukan.

5.2.2 Metadata Data dan Informasi

Berdasarkan hasil identifikasi metadata dan Informasi yang ada pada pemerintah kabupaten Way Kanan didapati 155 data yang telah dipetakan sesuai dengan taksonomi Referensi Arsitektur Data Dan Informasi yang ada pada Lampiran PERPRES tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional

Tabel 29 Metadata Data dan informasi

ID	Nama Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penanggung Jawab
1	Data Pengaduan Pelayanan publik	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengaduan Pelayanan publik	Data Informasi (RD.09.03)	Terbatas	Data Statistik	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
2	Data Terbuka	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Terbuka	Data Informasi (RD.09.03)	Terbuka	Data Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Data Informasi (RD.09.03)	Terbuka	Data Lainnya	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4	Data Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Data Investasi (RD.02.08)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
5	Data Promosi Penanaman Modal	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Promosi Penanaman Modal	Data Investasi (RD.02.08)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
6	Data Pelayanan Penanaman Modal	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pelayanan Penanaman Modal	Data Investasi (RD.02.08)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
7	Data Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Data Investasi (RD.02.08)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
8	Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang lolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Data Investasi (RD.02.08)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
9	Data Pemberdayaan Sosial	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pemberdayaan Sosial	Data Sosial (RD.04.02)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Sosial
10	Data Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Data Sosial (RD.04.02)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Sosial
11	Data Rehabilitasi Sosial	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Rehabilitasi Sosial	Data Sosial (RD.04.02)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Sosial

12	Data Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Data Sosial (RD.04.02)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Sosial
13	Data Pengelolaan Taman Makam	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengelolaan Taman Makam	Data Sosial (RD.04.02)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Sosial
14	Data Penanganan Bencana	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Penanganan Bencana	Data Sosial (RD.04.02)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Sosial
15	Data Pendaftaran Penduduk	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pendaftaran Penduduk	Data Kependudukan (RD.03.07)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
16	Data Biodata Penduduk	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Biodata Penduduk	Data Kependudukan (RD.03.07)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
17	Dokumen Adminduk	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang en Adminduk	Data Kependudukan (RD.03.07)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
18	Data Pengelolaan Profil Kependudukan	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengelolaan Profil Kependudukan	Data Kependudukan (RD.03.07)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
19	Data Pengelolaan Pendidikan	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengelolaan Pendidikan	Data Pendidikan (RD.06.01)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	Data Pengembangan Kurikulum	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengembangan Kurikulum	Data Pendidikan (RD.06.01)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21	Data Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; Info GTK; Dokumen Pegawai	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; Info GTK; Dokumen Pegawai	Data Pendidikan (RD.06.01)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	Data Pengembangan Bahasa dan Sastra	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengembangan Bahasa dan Sastra	Data Pendidikan (RD.06.01)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	Data Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data Kesehatan (RD.04.01)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
24	Data Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Data Kesehatan (RD.04.01)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
25	Data Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Data Kesehatan (RD.04.01)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Kesehatan
26	Data Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Data Kesehatan (RD.04.01)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Kesehatan
27	Data Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Data Pekerjaan Umum (RD.03.01)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
28	Data Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Data Pekerjaan Umum (RD.03.01)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

29	Data Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Data Pekerjaan Umum (RD.03.01)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30	Data Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Data Pekerjaan Umum (RD.03.01)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
31	Data Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Data Pekerjaan Umum (RD.03.01)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
32	Data Program Penataan Bangunan Gedung	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Program Penataan Bangunan Gedung	Data Pekerjaan Umum (RD.03.01)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
33	Data Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Data Pekerjaan Umum (RD.03.01)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
34	Data Program Penyelenggaraan Jalan	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Program Penyelenggaraan Jalan	Data Pekerjaan Umum (RD.03.01)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
35	Data Pengembangan Jasa Kontruksi	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengembangan Jasa Kontruksi	Data Pekerjaan Umum (RD.03.01)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
36	Data Penyelenggaraan Penataan Ruang	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Data Pekerjaan Umum (RD.03.01)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
37	Data Pengembangan Perumahan	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengembangan Perumahan	Data Perumahan (RD.03.04)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
38	Data Kawasan Permukiman	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Kawasan Permukiman	Data Perumahan (RD.03.04)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
39	Data Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal (RD.03.05)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
40	Data Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Data Perumahan (RD.03.04)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
41	Data Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Data Pertanahan (RD.03.06)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
42	Data Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Data Pertanahan (RD.03.06)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
43	Data Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Data Pertanahan (RD.03.06)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

44	Data Penetapan Tanah Ulayat	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Penetapan Tanah Ulayat	Data Pertanahan (RD.03.06)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
45	Data Pengelolaan Tanah Kosong	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengelolaan Tanah Kosong	Data Pertanahan (RD.03.06)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
46	Data Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Data Pertanahan (RD.03.06)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
47	Data Penatagunaan Tanah	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Penatagunaan Tanah	Data Pertanahan (RD.03.06)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
48	Data Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Data Keamanan (RD.05.02)	Terbatas	Data Lainnya	Satuan Polisi Pamong Praja
49	Data Penanggulangan Bencana	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Penanggulangan Bencana	Data Sosial (RD.04.02)	Terbatas	Data Lainnya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
50	Data Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Data Sosial (RD.04.02)	Terbatas	Data Lainnya	Pemadam Kebakaran
51	Data Perencanaan Tenaga Kerja	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Perencanaan Tenaga Kerja	Data Ketenagakerjaan (RD.06.02)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
52	Data Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	Data Ketenagakerjaan (RD.06.02)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
53	Data Penempatan Tenaga Kerja	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Penempatan Tenaga Kerja	Data Ketenagakerjaan (RD.06.02)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
54	Data Hubungan Industrial	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Hubungan Industrial	Data Ketenagakerjaan (RD.06.02)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
55	Data Pengarusatamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengarusatamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Data Pemberdayaan Perempuan (RD.04.03)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
56	Data Perlindungan Perempuan	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Perlindungan Perempuan	Data Pemberdayaan Perempuan (RD.04.03)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
57	Data Peningkatan Kualitas Keluarga	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Peningkatan Kualitas Keluarga	Data Pemberdayaan Perempuan (RD.04.03)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

58	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang am Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Data Pemberdayaan Perempuan (RD.04.03)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
59	Data Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Data Pemberdayaan Perempuan (RD.04.03)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
60	Program Perlindungan Khusus Anak	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang am Perlindungan Khusus Anak	Data Pemberdayaan Perempuan (RD.04.03)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
61	Data Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Data Pertanian (RD.02.03)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan
62	Data Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Data Pertanian (RD.02.03)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan
63	Data Penanganan Kerawanan Pangan	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Penanganan Kerawanan Pangan	Data Pertanian (RD.02.03)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan
64	Data Pengawasan Keamanan Pangan	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengawasan Keamanan Pangan	Data Pertanian (RD.02.03)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Ketahanan Pangan
65	Data Perencanaan Lingkungan Hidup	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Perencanaan Lingkungan Hidup	Data Lingkungan Hidup (RD.07.05)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup
66	Data Pengendalian Pencemaran Dan/Kerusakan Lingkungan Hidup	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Kerusakan Lingkungan Hidup	Data Lingkungan Hidup (RD.07.05)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup
67	Data Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Data Lingkungan Hidup (RD.07.05)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup
68	Data Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Data Lingkungan Hidup (RD.07.05)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup
69	Data Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pembinaan Dan Pengawasan	Data Lingkungan Hidup	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup

	Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	(RD.07.05)			
70	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang am Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Data Lingkungan Hidup (RD.07.05)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup
71	Data Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Data Lingkungan Hidup (RD.07.05)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup
72	Data Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Data Lingkungan Hidup (RD.07.05)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup
73	Data Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Data Lingkungan Hidup (RD.07.05)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup
74	Data Pengelolaan Persampahan	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengelolaan Persampahan	Data Lingkungan Hidup (RD.07.05)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Lingkungan Hidup
75	Data Penataan Desa	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Penataan Desa	Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal (RD.03.05)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
76	Data Peningkatan Kerja Sama Desa	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Peningkatan Kerja Sama Desa	Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal (RD.03.05)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
77	Data Administrasi Pemerintahan Desa	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Administrasi Pemerintahan Desa	Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal (RD.03.05)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
78	Data Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal (RD.03.05)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
79	Data Pengendalian Penduduk	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengendalian Penduduk	Data Kependudukan (RD.03.07)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

80	Data Pembinaan Keluarga Berencanaan (KB)	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pembinaan Keluarga Berencanaan (KB)	Data Kependudukan (RD.03.07)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
81	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang rdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Data Kependudukan (RD.03.07)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
82	Data Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Data Transportasi (RD.03.03)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Perhubungan
83	Data Informasi dan Komunikasi Publik	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Informasi dan Komunikasi Publik	Data Informasi (RD.09.03)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
84	Data Aplikasi Informatika	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Aplikasi Informatika	Data Informasi (RD.09.03)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
85	Data Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Data Koperasi (RD.02.09)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
86	Data Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Data Koperasi (RD.02.09)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
87	Data Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Data Koperasi (RD.02.09)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
88	Data Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Data Koperasi (RD.02.09)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
89	Data Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Data Koperasi (RD.02.09)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
90	Data Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Data Usaha Kecil dan Menengah (RD.02.10)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
91	Data Pengembangan Umkm	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengembangan Umkm	Data Usaha Kecil dan Menengah (RD.02.10)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
92	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang mbangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Data Olahraga (RD.06.05)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata

93	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang mbangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Data Olahraga (RD.06.05)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
94	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang mbangan Kapasitas Kepramukaan	Data Olahraga (RD.06.05)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
95	Pengembangan Kebudayaan	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang mbangan Kebudayaan	Data Kebudayaan (RD.08.02)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
96	Pengembangan Keseniaan Tradisional	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang mbangan Keseniaan Tradisional	Data Kebudayaan (RD.08.02)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
97	Pembinaan Sejarah	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang naan Sejarah	Data Kebudayaan (RD.08.02)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
98	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang tarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Data Kebudayaan (RD.08.02)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
99	Pengelolaan Permuseuman	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang lolaan Permuseuman	Data Kebudayaan (RD.08.02)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
100	Data Pembinaan Perpustakaan	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pembinaan Perpustakaan	Data Kebudayaan (RD.08.02)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
101	Data Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Data Kebudayaan (RD.08.02)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
102	Data Pengelolaan Perikanan Tangkap	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap	Data Perikanan (RD.02.06)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Perikanan
103	Data Pengelolaan Perikanan Budidaya	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengelolaan Perikanan Budidaya	Data Perikanan (RD.02.06)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Perikanan
104	Data Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Data Perikanan (RD.02.06)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Perikanan
105	Data Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Data Perikanan (RD.02.06)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Perikanan
106	Data Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Data Pariwisata (RD.02.11)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
107	Data Pemasaran Pariwisata	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pemasaran Pariwisata	Data Pariwisata (RD.02.11)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
108	Data Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Data Pariwisata (RD.02.11)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
109	Data Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Data Pariwisata (RD.02.11)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata

110	Data Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Data Pertanian (RD.02.03)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
111	Data Penyediaan Dan Data Pengembangan Prasarana Pertanian	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Penyediaan Dan Data Pengembangan Prasarana Pertanian	Data Pertanian (RD.02.03)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
112	Data Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Data Kesehatan Masyarakat Veteriner	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Data Kesehatan Masyarakat Veteriner	Data Peternakan (RD.02.05)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
113	Data Pengendalian Dan Data Penanggulangan Bencana Pertanian	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengendalian Dan Data Penanggulangan Bencana Pertanian	Data Perkebunan (RD.02.04)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
114	Data Perizinan Usaha Pertanian	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Perizinan Usaha Pertanian	Data Pertanian (RD.02.03)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
115	Data Penyuluhan Pertanian	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Penyuluhan Pertanian	Data Pertanian (RD.02.03)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
116	Data Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Data Perdagangan (RD.02.02)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
117	Data Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Data Perdagangan (RD.02.02)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
118	Data Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Data Perdagangan (RD.02.02)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
119	Data Ekspor	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Ekspor	Data Perdagangan (RD.02.02)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
120	Data Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Data Perdagangan (RD.02.02)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
121	Data Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Data Perdagangan (RD.02.02)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
122	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang canaan Dan Pembangunan Industri	Data Industri (RD.02.01)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
123	Data Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Data Industri (RD.02.01)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
124	Data Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Data Industri (RD.02.01)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

125	Data Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Data Transmigrasi (RD.03.02)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
126	Data Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Data Transmigrasi (RD.03.02)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
127	Data Pengelolaan Keuangan Daerah	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Data Dalam Negeri (RD.09.01)	Terbatas	Data Lainnya	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
128	Data Pengelolaan Pendapatan Daerah	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Data Keuangan (RD.09.02)	Terbatas	Data Lainnya	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
129	Data Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Data Perencanaan Pembangunan Nasional (RD.09.05)	Terbatas	Data Lainnya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
130	Data Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Data Perencanaan Pembangunan Nasional (RD.09.05)	Terbatas	Data Lainnya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
131	Data Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	Data Keuangan (RD.09.02)	Terbatas	Data Lainnya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
132	Data Pengelolaan Keuangan Daerah	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Data Keuangan (RD.09.02)	Terbatas	Data Lainnya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
133	Data Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa	Data Keuangan (RD.09.02)	Terbatas	Data Lainnya	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
134	Data Pengadaan Secara Elektronik	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengadaan Secara Elektronik	Data Keuangan (RD.09.02)	Terbatas	Data Lainnya	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
135	Data Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	Data Keuangan (RD.09.02)	Terbatas	Data Lainnya	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
136	Data Kepegawaian Daerah	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Kepegawaian Daerah	Data Aparatur Negara (RD.09.06)	Terbatas	Data Lainnya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
137	Data Pengelolaan Arsip	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengelolaan Arsip	Data Aparatur Negara (RD.09.06)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
138	Data Perlindungan dan Penyelematan Arsip	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Perlindungan dan Penyelematan Arsip	Data Aparatur Negara (RD.09.06)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
139	Data Pengelolaan Barang Milik Daerah	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Data Keuangan (RD.09.02)	Terbatas	Data Lainnya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
140	Data Penyelenggaraan Pengawasan	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Penyelenggaraan Pengawasan	Data Kesekretariatan Negara (RD.09.07)	Terbatas	Data Lainnya	Inspektorat

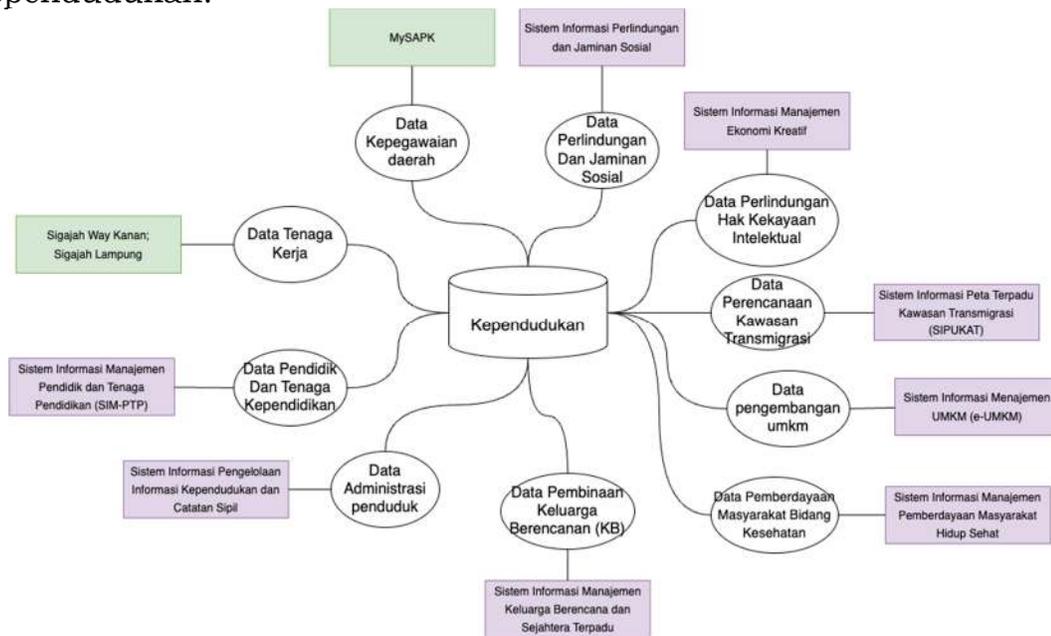
141	Data Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Data Kesekretariatan Negara (RD.09.07)	Terbatas	Data Lainnya	Inspektorat
142	Data Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Data Aparatur Negara (RD.09.06)	Terbatas	Data Lainnya	Inspektorat
143	Data Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data Aparatur Negara (RD.09.06)	Terbatas	Data Lainnya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
144	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang itian dan Pengembangan Daerah	Data Kesekretariatan Negara (RD.09.07)	Terbatas	Data Lainnya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
145	Data Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Data Kesekretariatan Negara (RD.09.07)	Terbatas	Data Lainnya	Badan Kesatuan bangsa dan politik
146	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang gkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Data Kesekretariatan Negara (RD.09.07)	Terbatas	Data Lainnya	Badan Kesatuan bangsa dan politik
147	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang rdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Data Kesekretariatan Negara (RD.09.07)	Terbatas	Data Lainnya	Badan Kesatuan bangsa dan politik
148	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang naan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Data Kesekretariatan Negara (RD.09.07)	Terbatas	Data Lainnya	Badan Kesatuan bangsa dan politik
149	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang gkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Data Kesekretariatan Negara (RD.09.07)	Terbatas	Data Lainnya	Badan Kesatuan bangsa dan politik
150	Data Statistik Sektoral	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Statistik Sektoral	Data Informasi (RD.09.03)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
151	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Data Kesekretariatan Negara (RD.09.07)	Terbatas	Data Lainnya	Dinas Komunikasi dan Informatika
152	Data Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Data Dalam Negeri (RD.09.01)	Terbatas	Data Lainnya	Sekretariat Daerah
153	Data Perekonomian dan Pembangunan	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Perekonomian dan Pembangunan	Data Dalam Negeri (RD.09.01)	Terbatas	Data Lainnya	Sekretariat Daerah
154	Data Pengelolaan Izin Lokasi	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Pengelolaan Izin Lokasi	Data Dalam Negeri (RD.09.01)	Terbatas	Data Lainnya	Sekretariat Daerah

155	Data Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Data ini bertujuan untuk memberitahukan ke user tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Data Dalam Negeri (RD.09.01)	Terbatas	Data Lainnya	Sekretariat DPRD
-----	---	--	------------------------------	----------	--------------	------------------

Integrasi data adalah proses menggabungkan atau mengombinasikan dua atau lebih set data yang berasal dari sumber yang berbeda ke dalam suatu penyimpanan seperti data warehouse. Salah satu manfaat yang didapatkan dengan melakukan integrasi data adalah terhindar dari duplikat data. Berikut merupakan usulan integrasi terhadap data yang paling utama di Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Usulan Integrasi Data Kependudukan

Data kependudukan merupakan salah satu yang dapat disebut sebagai data induk jika dirunut berdasarkan karakteristik hingga guna data tersebut. Salah satu ciri yang menunjukkan bahwa data kependudukan merupakan data set dasar adalah kode unik NIK yang dimiliki oleh setiap masyarakat di Indonesia. Dari data unik tersebut kemudian dapat diturunkan menjadi set data lain yang mampu memberikan kemudahan bagi pelayanan pemerintahan juga memberikan kemudahan bagi masyarakat. Gambar dibawah ini merupakan usulan integrasi data yang berkaitan dengan data kependudukan.

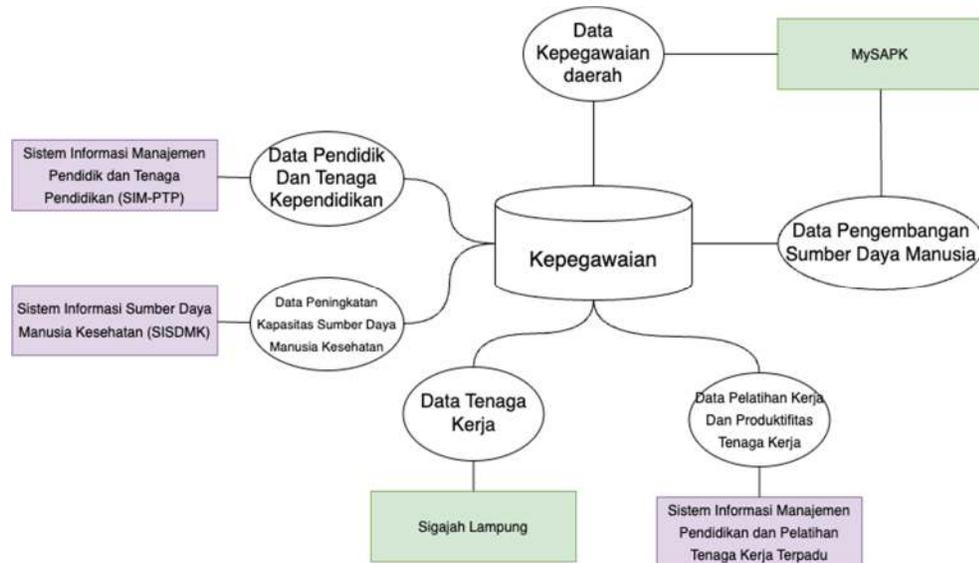


Gambar 68 Usulan Integrasi Data Kependudukan

Dari gambar diatas menunjukkan data yang pengelolaannya perlu integrasi dan/atau berkaitan dengan data kependudukan. Dari analisis yang telah dilakukan, diketahui terdapat 10 data yang memerlukan data kependudukan sebagai acuan karena bersinggungan langsung dengan data pribadi dari setiap masyarakat, Adapun jабaran dari 10 data tersebut yaitu 2 data yang telah berkaitan dan telah didukung aplikasi yang telah menggunakan data kependudukan sebagai acuannya. Sedangkan 8 data yang lain, memerlukan data kependudukan namun belum didukung oleh aplikasi dan belum berkaitan secara langsung. Maka perlu usulan mengenai integrasi dari seluruh data yang telah ditentukan dengan data kependudukan untuk mengurangi duplikasi data ataupun data bias.

Usulan Integrasi Data Kepegawaian

Data kepegawaian merupakan data unik atau dasar bagi pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Way Kanan. Setiap pegawai memiliki NIP yang unik dan merupakan salah satu yang dapat disebut sebagai data induk jika dirunut berdasarkan karakteristik hingga guna data tersebut. Dari data kepegawaian yang unik tersebut kemudian dapat diturunkan menjadi set data lain yang mampu memberikan kemudahan bagi pengelolaan data pemerintah yang bersumber berdasar data masing-masing pegawai. Gambar dibawah ini merupakan usulan integrasi data yang berkaitan dengan data kepegawaian.

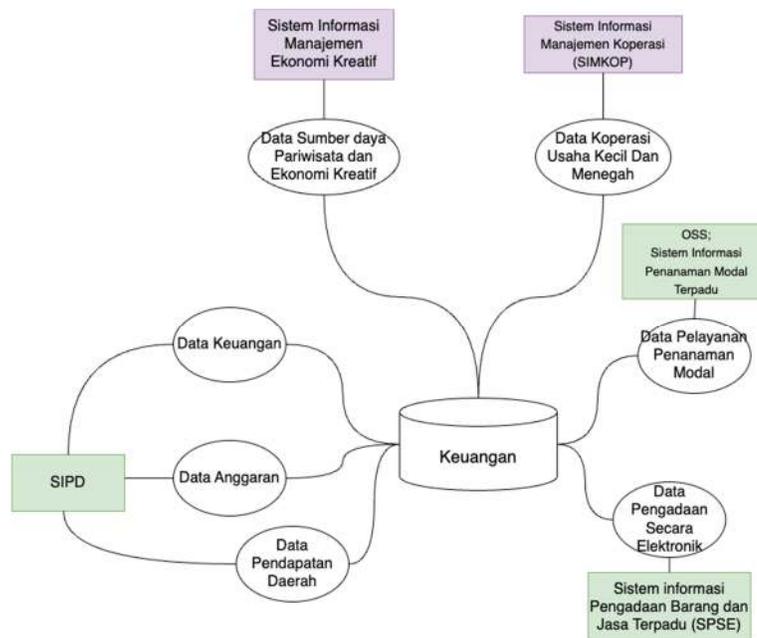


Gambar 69 Usulan Integrasi Data Kepegawaian

Dari gambar diatas menunjukkan data yang pengelolaannya perlu integrasi dan/atau berkaitan dengan data kepegawaian. Dari analisis yang telah dilakukan, diketahui terdapat 6 data yang memerlukan data kepegawaian sebagai acuan karena bersinggungan langsung dengan data pribadi dari setiap pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Way Kanan, Adapun jabaran dari 6 data tersebut yaitu 2 data yang telah berkaitan dan telah didukung aplikasi yang telah menggunakan data kepegawaian sebagai acuannya. Sedangkan 4 data yang lain, memerlukan data kepegawaian namun belum didukung oleh aplikasi dan belum berkaitan secara langsung. Maka perlu usulan mengenai integrasi dari seluruh data yang telah ditentukan dengan data kepegawaian.

Usulan Integrasi Data Keuangan

Data keuangan merupakan salah satu data krusial yang pengelolaannya melibatkan banyak pihak dan dijaga keamanannya. Dalam keterkaitan dengan data set lain, data keuangan bisa dikelola dalam bentuk perencanaan, pengadaan, pengelolaan implementasi, hingga pengawasannya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemusatan data krusial tersebut sangat penting untuk menunjang keamanan serta penurunan kemungkinan redudansi data. Maka dapat diusulkan integrasi data keuangan dari seluruh OPD yang mengelola data keuangan di Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

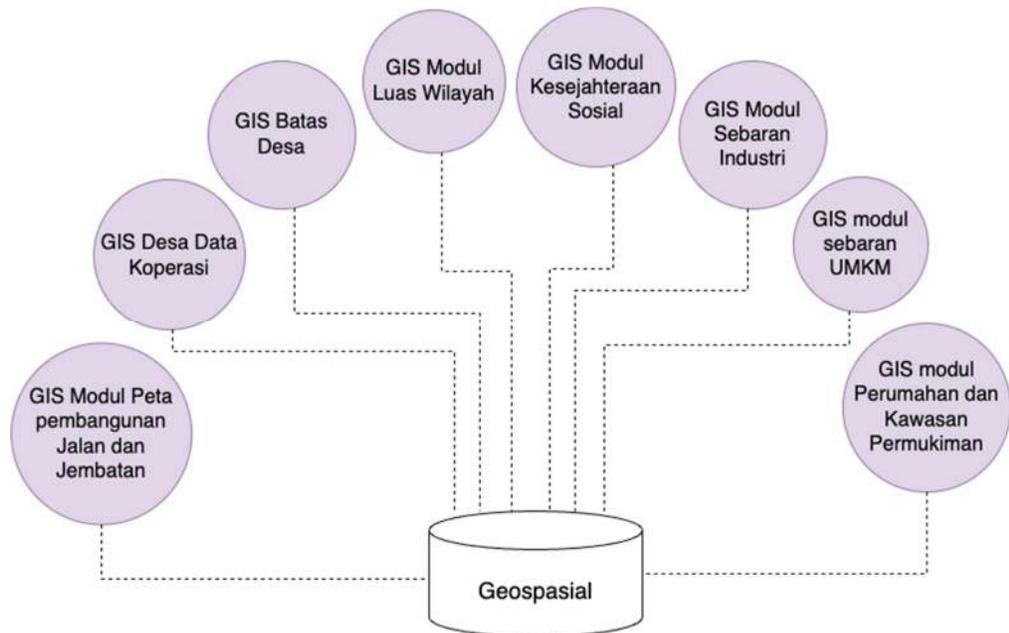


Gambar 70 Usulan Integrasi Data Keuangan

Dari gambar diatas menunjukkan data yang pengelolaannya saling terintegrasi dan/atau berkaitan dengan data keuangan. Dari analisis yang telah dilakukan, diketahui terdapat 7 data yang mengelola data yang sama yaitu berkaitan dengan keuangan. Pentingnya integrasi untuk data yang berkaitan dengan keuangan adalah untuk menjaga keamanan data tersebut, sehingga meminimalkan kesalahan pengolahan data ataupun data yang bias. Adapun jabaran dari 7 data tersebut yaitu 5 data yang telah berkaitan dan telah didukung aplikasi yang telah mengelola data keuangan. Sedangkan 2 data yang lain, mengelola data keuangan namun belum didukung oleh aplikasi dan belum berkaitan secara langsung. Maka perlu usulan mengenai integrasi dari seluruh data yang telah ditentukan dengan data keuangan.

Usulan Integrasi Data Geospasial

Web-GIS merupakan gabungan antara design grafis pemetaan, peta digital dengan analisa geografis, pemrograman komputer, dan sebuah database yang saling terhubung menjadi satu bagian web design dan web pemetaan. Kebutuhan akan keberadaan serta penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, cepat dan juga dapat dipertanggungjawabkan merupakan hal yang mampu memberikan dampak cukup signifikan terhadap pengoptimalan potensi dan pendayagunaan sumber daya wilayah Kabupaten Way Kanan. Adapun data yang diperlukan untuk dipetakan dalam Web GIS dijabarkan pada Gambar dibawah ini merupakan Usulan Integrasi Data Geospasial.



Gambar 71 Usulan Integrasi Data Geospasial

Pemetaan data yang terintegrasi terhadap Web GIS adalah data yang memerlukan detail titik lokasi per wilayah, sehingga data dapat dilihat dengan jelas di setiap titik wilayah Kabupaten Way Kanan. Adapun yang diusulkan untuk mengisi data Web GIS sejumlah 8 data dari seluruh OPD.

5.3 Analisis Gap dan Rekomendasi

Tabel 30 Rekomendasi Arsitektur Data dan informasi

Kondisi Arsitektur Data dan Informasi Saat Ini	Kondisi Arsitektur Data dan Informasi yang diharapkan	Rekomendasi
Belum terdapatnya data yang berkaitan dengan pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan, penanaman modal, administrasi kependudukan dan lainnya	Adanya data yang mendukung dan terkoordinasi dengan baik dibawah kontrol diskominfo.	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kebutuhan data yang berkaitan proses bisnis utama P.01, P.02, sampai P.30. • Pembangunan Aplikasi Manajemen Kebijakan untuk mengelola data perumusan kebijakan sampai dengan implementasi kebijakan. • Adanya layanan khusus yang berkaitan dengan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi implementasi, dan evaluasi Kebijakan.
Data yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, anggaran, pengadaan, kepegawaian, barang daerah dan sebagainya masih tersebar di beberapa aplikasi Terjadi Duplikasi entri data yang sama untuk beberapa sistem aplikasi yang berkaitan dengan P04-P.30	Adanya proses integrasi data dari aplikasi tersebut menggunakan Single Sign On (SSO)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Masterplan TIK 2024 - 2028 • Optimalisasi kebijakan integrasi antar sistem aplikasi SPBE • Integrasi sistem aplikasi SPBE terkait evaluasi kebijakan meliputi integrasi layanan, middleware dan data berdasarkan hasil pemetaan proses bisnis terintegrasi. • Pembuatan Masterplan TIK 2024 - 2028
Belum ada Metadata untuk data dan informasi yang dikelola, baik data administrasi pemerintahan dan data pelayanan publik	Adanya metadata untuk seluruh data yang dikelola sesuai dengan rancangan peraturan presiden tentang SPBE Nasional pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi metadata seluruh data yang dikelola dan akan memudahkan melakukan identifikasi terkait interoperabilitas antar data. • Adanya kebijakan tata kelola data (data Governance) yang memuat struktur organisasi pengelolaan data di Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Pengembangan/Pembangunan aplikasi belum memperhatikan Referensi Data Nasional

Pengembangan Aplikasi/Layanan harus menggunakan Referensi Data Nasional sebagai bentuk dukungan terhadap program Satu Data Indonesia (SDI)

- Perencanaan arsitektur aplikasi disesuaikan dengan rencana induk/ master plan dan sejalan dengan kebijakan SDI.
- Pembuatan Masterplan TIK 2024 - 2028

Data dan Informasi belum dipetakan terhadap referensi arsitektur data yang memuat data pokok, data tematik, data topik dan data subtopik.

data dan informasi sudah dipetakan terhadap referensi arsitektur data yang memuat data pokok, data tematik, data topik dan data subtopik.

Validasi pemetaan yang data dan informasi berdasarkan pengelompokan data pokok, data tematik, data topik, dan data subtopik

belum ditemukannya mekanisme penyelenggaraan data dan informasi yang memuat peranan wali data, produsen data dan pengguna data

adanya prosedur SOP penyelenggaraan datadan informasi, yang memuat peranan wali data, produsen data dan pengguna data

- Evaluasi proses bisnis yang berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi.
- Pembuatan SOP Penyelenggaraan Data dan Informasi

BAB VI ARSITEKTUR APLIKASI SPBE

6.1 Pendahuluan

Arsitektur aplikasi merupakan salah satu komponen utama dalam arsitektur SPBE Nasional. Arsitektur aplikasi menerjemahkan serangkaian proses bisnis dalam suatu layanan yang didukung oleh aplikasi. Aplikasi yang dibangun hendaknya memperhatikan prinsip keterpaduan, berbagi pakai, efisiensi dan optimasi layanan. Selain itu, penyusunan arsitektur aplikasi disesuaikan dengan referensi arsitektur proses bisnis dan layanan. Dalam hal penyusunan arsitektur aplikasi juga harus memperhatikan standarisasi aplikasi yang terdiri dari teknologi yang digunakan, lisensi, kode sumber terbuka dan delivery/prosesnya.

Arsitektur aplikasi menggambarkan kondisi arsitektur aplikasi saat ini, arsitektur aplikasi target, hasil gap analisis, rekomendasi serta roadmap penyusunan aplikasi itu sendiri.

6.1.1 Struktur dan Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Berdasarkan dokumen Rencana Perpres Arsitektur SPBE Nasional, domain arsitektur aplikasi SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur menjadi 4 (empat) tingkat yang dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



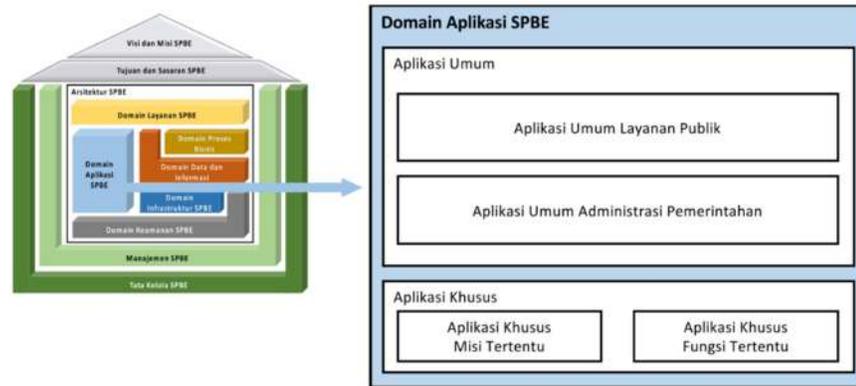
Gambar 1 Struktur Arsitektur Aplikasi SPBE

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa arsitektur aplikasi bagi Kabupaten Way Kanan ada pada tingkat 3 dan tingkat 4 dengan mengacu pada SPBE Nasional di tingkat 1 dan tingkat 2 yang akan menjadi arah kebijakan Arsitektur SPBE Nasional. Penjelasan untuk setiap tingkatan struktur domain aplikasi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Meta Data untuk Data Khusus yang Ada di Kabupaten Way Kanan.

Tabel 31 Deskripsi Struktur Domain Aplikasi

No	Tingkatan	Deskripsi
1	Domain Aplikasi	Domain aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi pemerintah ke dalam 2 (dua) domin aplikasi pemerintah, yang menjadi struktur di tingkat nasional
2	Area Aplikasi	Aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan yang menjadi struktur di tingkat nasional
3	Kategori Aplikasi	Aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh IPPD sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional.
4	Sub Kategori Aplikasi	Sub Kategori Aplikasi yang disusun oleh IPPD sesuai Aplikasi dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Domain arsitektur aplikasi SPBE memiliki beberapa komponen di dalamnya. Pembagian komponen dalam referensi aplikasi SPBE dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 72 Domain Arsitektur Aplikasi SPBE

Jika dilihat pada Gambar diatas ini, secara umum aplikasi pada arsitektur aplikasi SPBE terbagi menjadi dua bagian yaitu Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus. Aplikasi umum memiliki dua jenis aplikasi yaitu aplikasi umum layanan publik dan aplikasi umum administrasi pemerintahan. Sedangkan aplikasi khusus juga memiliki dua jenis aplikasi yaitu aplikasi khusus misi tertentu dan fungsi tertentu. Penjelasan untuk setiap referensi arsitektur dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Referensi Aplikasi SPBE (RA) Tingkat Nasional.

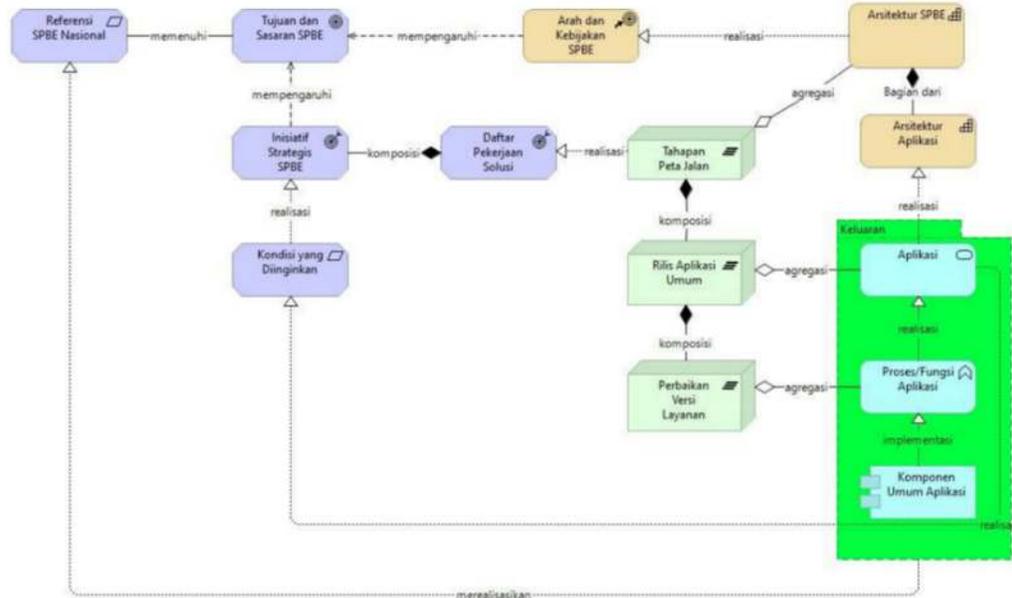
Tabel 32 Referensi Aplikasi SPBE (RA)Tingkat Nasional

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Aplikasi Umum (01)		
01.01	Aplikasi Layanan publik	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh IPPD untuk mendukung pelayanan publik. Lapisan ini merupakan lapisan presentasi dari layanan publik yang berhubungan langsung dengan melayani publik sesuai bidang dan memiliki hubungan dengan lapisan di bawahnya sebagai tidak lanjut dan sebagai presentasi ke publik dari hasil tindak lanjut. Dengan demikian, lapisan ini berhubungan dengan lapisan di bawahnya, baik lapisan aplikasi khusus maupun lapisan aplikasi umum administrasi pemerintahan.
01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh IPPD untuk mendukung administrasi pemerintahan. Dalam lapisan ini, pengelompokan bidang administrasi pemerintahan digunakan untuk mendukung atau menjadi dasar operasional dari lapisan di atasnya, dimana komponen aplikasi atau sistem integrasi dari aplikasi dapat digunakan untuk mendukung: aplikasi pada lapisan di atasnya
Aplikasi Khusus (02)		
02.01	Aplikasi Misi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh IPPD tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan IPPD lain, untuk mendukung misi tertentu, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk misi khusus pada instansi pemerintahan tertentu. Lapisan aplikasi khusus misi tertentu (RA 02.01) mendukung misi tertentu pemerintahan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan atau berkaitan dengan keadaan darurat dengan manfaat dalam jangka waktu tertentu. Hal ini digunakan secara vertikal dalam satu IPPD. Lapisan ini menggunakan lapisan di bawahnya sebagai pendukung pengembangan dan operasional aplikasi atau sebaliknya dalam hasil dapat mendukung lapisan di bawahnya.

02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh IPPD tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi IPPD lain, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk fungsi khusus pada instansi pemerintahan tertentu. Hal ini digunakan secara vertikal dalam satu IPPD. Lapisan ini menggunakan lapisan di bawahnya sebagai pendukung pengembangan dan operasional aplikasi atau sebaliknya dalam hasil dapat mendukung lapisan di bawahnya.
-------	--------------------------	--

6.1.2 Posisi Arsitektur Aplikasi dan Keterkaitan Antar Domain

Penyusunan arsitektur aplikasi bukan semata-mata melihat kebutuhan aplikasi yang ada saja, tetapi juga perlu memperhatikan keselarasan antara aplikasi yang dibangun dengan tujuan dan sasaran SPBE. Keterkaitan antara domain arsitektur aplikasi dengan tujuan dan sasaran SPBE dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



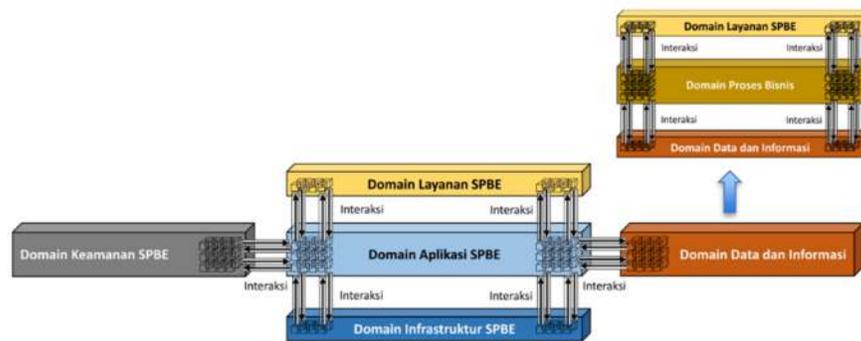
Gambar 73 Keselarasan antara aplikasi dan domain lainnya

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa Tujuan dan Sasaran SPBE harus memenuhi Referensi SPBE Nasional dalam hal ini Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuan dan Sasaran SPBE selanjutnya diturunkan menjadi Arah dan Kebijakan SPBE yang direalisasikan dalam bentuk arsitektur SPBE. Pada. Arsitektur SPBE terdapat enam domain yang disusun, salah satunya adalah arsitektur Aplikasi SPBE. Keluaran dari Arsitektur Aplikasi SPBE salah satunya adalah Rincian data aplikasi, proses/fungsi dari aplikasi dan komponen umum aplikasi. Keluaran ini merupakan bagian dan daftar aplikasi umum yang di dalamnya juga terdapat perbaikan detail layanan. Daftar aplikasi ini sebaiknya disajikan dalam bentuk peta jalan untuk periode tertentu sehingga dapat dijadikan target dan acuan untuk pengembangan aplikasi yang akan dijalankan. Selain itu daftar aplikasi juga harus diselaraskan dengan kondisi yang diharapkan oleh pengguna sehingga dapat mendukung Inisiatif Strategi SPBE dan secara tidak langsung menunjang tercapainya Tujuan dan Sasaran SPBE.

Aplikasi dalam Arsitektur SPBE dapat berupa sebuah aplikasi atau pengintegrasian dari beberapa aplikasi. Untuk mempermudah tata kelola aplikasi di lingkungan pemerintah secara nasional, maka pembangunan aplikasi wajib mengikuti kaidah pembangunan aplikasi SPBE yang terintegrasi secara lintas sektoral.

Arsitektur Aplikasi tidak dapat dirancang hanya untuk fokus pada data aplikasinya saja, tetapi harus dapat berkolaborasi dan

bersesuaian dengan domain arsitektur yang lain. Secara langsung Arsitektur Aplikasi berinteraksi dengan arsitektur data dan informasi dalam penyampaian sistem informasi yang efektif. Secara tidak langsung, domain data dan informasi berinteraksi dengan domain proses bisnis, yang akan diselaraskan dengan domain aplikasi. Arsitektur aplikasi juga berinteraksi dengan domain infrastruktur dan keamanan tentang penggunaannya pada aplikasi. Layanan SPBE yang dilakukan secara elektronik dihasilkan melalui sebuah aplikasi. Aplikasi SPBE diharapkan dapat mengakomodir fungsi-fungsi yang perlu dilakukan untuk menghasilkan layanan tersebut. Sehingga domain aplikasi harus berinteraksi dengan domain layanan. Keterkaitan domain aplikasi dengan domain lainnya dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Gambar 74 Keterkaitan Domain Aplikasi dengan Domain Lainnya

Selain berinteraksi dengan domain yang lain, Penyusunan referensi arsitektur aplikasi SPBE juga dilakukan dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:

- Disusun berdasarkan pada struktur adaptif yang memungkinkan terjadinya pengembangan dan atau pengintegrasian fungsi lain/baru dalam penyediaan kemampuan TIK;
- Aplikasi yang berorientasi pada layanan;
- Didefinisikan sebagai hierarki komponen aplikasi;
- Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- Berbasis kode sumber terbuka (*open source*).

6.1.3 Metadata Aplikasi SPBE

Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi. Berdasarkan Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang SPBE menyebutkan aturan penyusunan metadata adalah sebagai berikut

Tabel 33 Atribut Metadata Aplikasi

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.
2	Nama Aplikasi	Nama aplikasi yang digunakan atau dimiliki.
3	Uraian Aplikasi	Berisi uraian atau deskripsi secara umum dari aplikasi
4	Fungsi Aplikasi	Berisi keterangan fungsi dari aplikasi terhadap layanan yang didukung
5	Kode Model Referensi SPBE	Kode model referensi yang terkait dengan aplikasi.
6	Layanan yang Didukung	Layanan yang didukung oleh aplikasi, pilihan layanan yang didukung didapat dari metadata arsitektur layanan SPBE.

7	Data yang Digunakan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata arsitektur data dan informasi.
8	Luaran	Merupakan hasil-hasil yang diperoleh dari aplikasi yang dimiliki atau digunakan
9	Basis Aplikasi	Basis dari aplikasi (Desktop; Web; Cloud; atau Mobile).
10	Server Aplikasi	Server yang digunakan oleh aplikasi, pilihan server yang digunakan didapat dari metadata perangkat keras server.
11	Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman	Tipe lisensi dari aplikasi (Open Source/ Proprietary).
12	Bahasa Pemrograman	Bahasa pemrograman yang digunakan oleh aplikasi
13	Kerangka Pengembangan	Kerangka atau framework yang digunakan oleh aplikasi.
14	Basis Data	Basis data yang digunakan oleh aplikasi.
15	Unit Pengembang	Unit yang melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi.
16	Unit Operasional Teknologi	Unit yang melakukan operasional teknologi layanan.
17	ID Metadata Terkait	Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

Dari metadata yang telah tersusun, dapat dilihat bagaimana aplikasi yang ada telah memenuhi setiap poin metadata yang ditentukan. Salah satu poin yang cukup penting adalah bagaimana klasifikasi aplikasi terhadap Model Referensi Aplikasi. Diketahui model referensi aplikasi terdiri atas 4 kriteria beserta aplikasi pendukungnya yaitu

Tabel 34 Jumlah Aplikasi SPBE

Kode Referensi Aplikasi	Model Referensi Aplikasi	Jumlah Aplikasi
01.01	Aplikasi Layanan Publik	111 Aplikasi
01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	26 Aplikasi
02.01	Aplikasi Misi Tertentu	4 Aplikasi
02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	14 Aplikasi

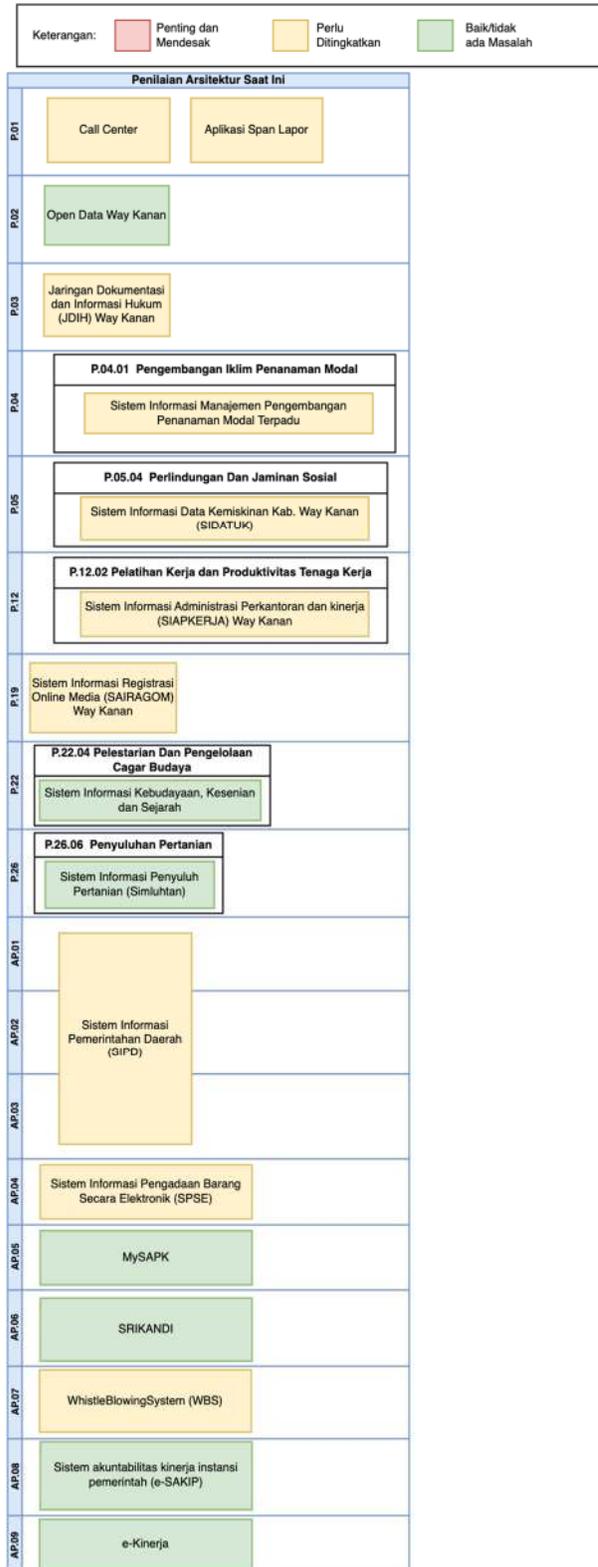
6.2 Arsitektur Aplikasi SPBE Eksisting

Daftar aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan didapatkan dari beberapa sumber dokumen dan juga melalui proses wawancara. Penyusunan referensi arsitektur pada domain aplikasi SPBE bukan hanya untuk mendata aplikasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, tetapi juga melakukan klasifikasi aplikasi dan komponennya. Melalui klasifikasi dan pemetaan aplikasi yang berkorelasi dengan arah kebijakan nasional yaitu berupa penciptaan layanan yang terintegrasi, dapat mengidentifikasi peluang ditemukannya duplikasi aplikasi dan peluang untuk berbagi pakai aplikasi Berdasarkan analisis dokumen dan hasil Survei, maka didapatkan analisis penilaian arsitektur aplikasi yang dikelompokkan berdasarkan empat bidang diantaranya:

6.2.1 Pemetaan Aplikasi terhadap Proses Bisnis

Proses bisnis yang ada di Pemerintah Kabupaten Way Kanan dibagi menjadi dua kategori utama yaitu Proses Utama dan Proses Pendukung. Pada bagian ini akan digambarkan pemetaan aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan terhadap proses bisnis utama dan pendukung. Pemetaan ini didasarkan pada dokumen RPJMD Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan

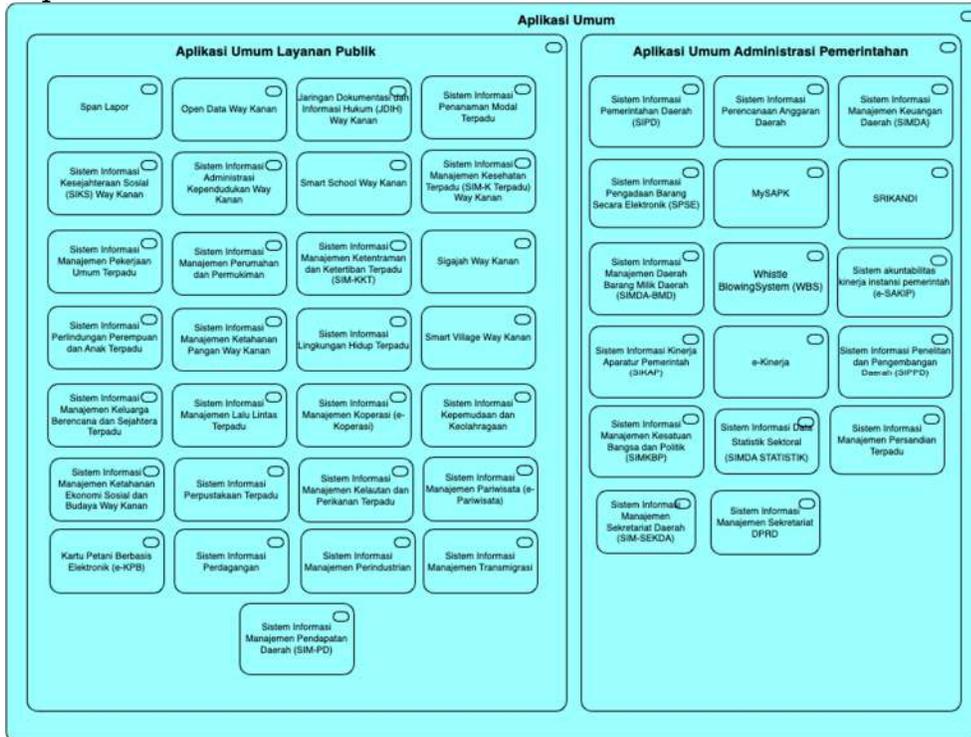
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan 2021-2026. Laporan Analisis dan Pemetaan Model Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Domain Proses Bisnis dan Domain Layanan Pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Selain itu, beberapa informasi juga digali melalui wawancara dan diskusi yang telah dilakukan dengan setiap OPD pemerintah Kabupaten Way Kanan, Sebagian besar Aplikasi yang berada di Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada tingkat penggunaan yang masih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa aplikasi belum digunakan secara optimal sehingga dibutuhkan pengembangan aplikasi atau bahkan terintegrasi dengan aplikasi lain. Pemetaan antara aplikasi dengan proses bisnis dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



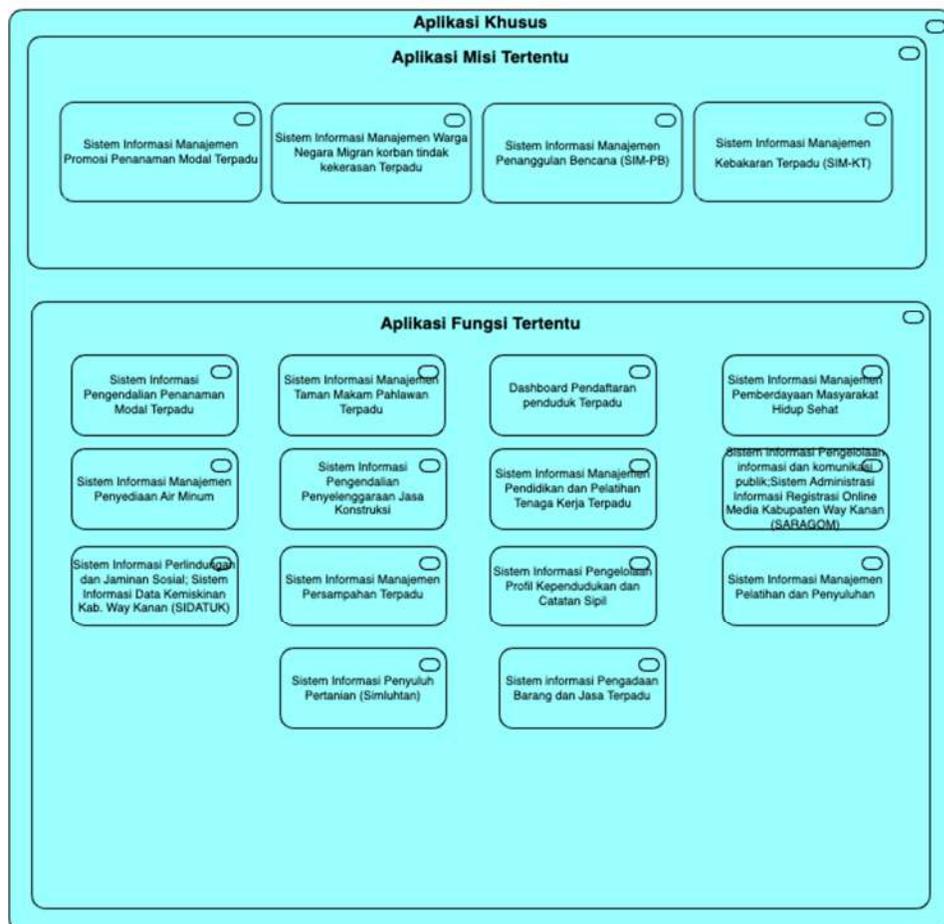
Gambar 75 Analisis Kondisi Awal Arsitektur Aplikasi

6.2.2 Pemetaan Aplikasi disesuaikan dengan Taksonomi Aplikasi

Sesuai dengan pembagian jenis aplikasi pada dokumen Rencana Perpres tentang SPBE Nasional, maka aplikasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus diidentifikasi jenis sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pemetaan aplikasi umum dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



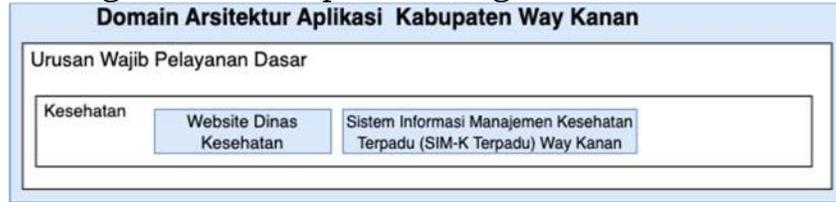
Gambar 76 Pemetaan Aplikasi Umum



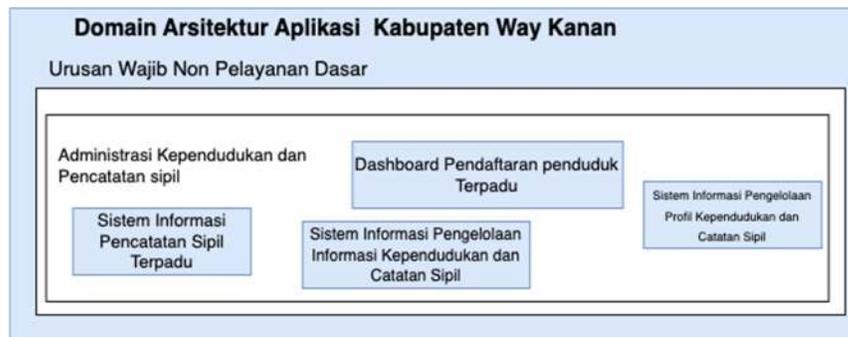
Gambar 77 Pemetaan Aplikasi Khusus

6.2.3 Pemetaan Aplikasi berdasarkan Struktur Organisasi

Berdasarkan dokumen Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026. Setiap aplikasi memiliki unit pengelola atau product owner. Berikut ini akan disajikan pemetaan aplikasi berdasarkan product owner-nya yang disesuaikan dengan struktur organisasi secara garis besar dapat dilihat gambar dibawah ini.



Gambar 78 Pemetaan Aplikasi pada Kesehatan



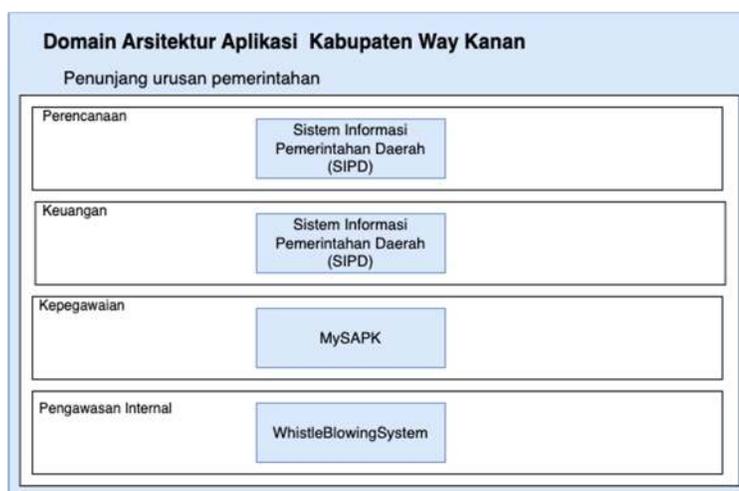
Gambar 79 Pemetaan Aplikasi pada Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil



Gambar 80 Pemetaan Aplikasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah



Gambar 81 Pemetaan Aplikasi pada Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Gambar 82 Pemetaan Aplikasi pada Bapeda dan BPKAD

6.2.4 Pemetaan Aplikasi berdasarkan Layanan

Aplikasi sangat erat kaitannya dengan layanan. Satu aplikasi bisa mendukung satu atau beberapa layanan. Pada bagian ini akan disajikan tabel dibawah ini tentang pemetaan aplikasi berdasarkan layanan:

Tabel 35 Pemetaan Aplikasi Target Berdasarkan Layanan

Domain Layanan	Area Layanan	Kategori Layanan	Layanan yang disediakan (Sub kategori)	Aplikasi
Layanan Publik (RL.01)	Informasi (RAL.01.43)	Pelayanan Informasi (RL.01.43.03)	Layanan Pengaduan Pelayanan publik (RL.01.44.02.01)	Span Lapor
Layanan Publik (RL.01)	Informasi (RAL.01.43)	Pelayanan Informasi (RL.01.43.03)	Layanan Data Terbuka (RL.01.43.03.01)	Open Data Way Kanan
Layanan Publik (RL.01)	Informasi (RAL.01.43)	Pelayanan Informasi (RL.01.43.03)	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) (RL.01.43.03.02)	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Way Kanan
Layanan Publik (RL.01)	Investasi (RL.01.12)	RL 01.12.03 Pengembangan Sektor Usaha Penanaman Modal	Pengembangan Sektor Usaha Penanaman Modal (RL.01.12.03)	Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Penanaman Modal Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Investasi (RL.01.12)	RL 01.12.08 Promosi Penanaman Modal	Promosi Penanaman Modal (RL.01.12.08)	Sistem Informasi Manajemen Promosi Penanaman Modal Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Investasi (RL.01.12)	RL 01.12.04 Penanaman Modal Nasional	Penanaman Modal Nasional (RL.01.12.04)	Sistem Informasi Penanaman Modal Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Investasi (RL.01.12)	RL 01.12.05 Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (RL.01.12.05)	Sistem Informasi Pengendalian Penanaman Modal Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Investasi (RL.01.12)	RL 01.12.06 Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal	Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal (RL.01.12.06)	Sistem Informasi Penanaman Modal Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Sosial (RL.01.26)	RL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan Sosial Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Sosial (RL.01.26)	RL 01.26.02 Penanganan Fakir Miskin	Penanganan Fakir Miskin (RL.01.26.02)	Sistem Informasi Manajemen Warga Negara Migran korban tindak kekerasan Terpadu

Layanan Publik (RL.01)	Sosial (RL.01.26)	RL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Sistem Informasi Manajemen Rehabilitasi Sosial
Layanan Publik (RL.01)	Sosial (RL.01.26)	RL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Sistem Informasi Perlindungan dan Jaminan Sosial
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	RL 01.40.02 Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem	Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem (RL.01.40.02)	Sistem Informasi Manajemen Taman Makam Pahlawan Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Sosial (RL.01.26)	RL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Sistem Informasi Manajemen Penanganan Bencana Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Kependudukan (RL.01.23)	RL 01.23.01 Pengendalian Penduduk	Pengendalian Penduduk (RL.01.23.01)	Dashboard Pendaftaran penduduk Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Kependudukan (RL.01.23)	RL 01.23.03 Pencatatan Sipil	Pencatatan Sipil (RL.01.23.03)	Sistem Informasi Pencatatan Sipil Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Kependudukan (RL.01.23)	RL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Kebijakan Kependudukan (RL.01.23.02)	Sistem Informasi Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Layanan Publik (RL.01)	Kependudukan (RL.01.23)	RL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Kebijakan Kependudukan (RL.01.23.02)	Sistem Informasi Pengelolaan Profil Kependudukan dan Catatan Sipil
Layanan Publik (RL.01)	Pendidikan (RL.01.31)	RL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Pendidikan Dasar (RL.01.31.03)	Sistem Informasi Pengelolaan Pendidikan Sekolah (SIPS)
Layanan Publik (RL.01)	Pendidikan (RL.01.31)	RL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Pendidikan Dasar (RL.01.31.03)	Sistem Informasi Manajemen Pembelajaran Pendidikan Sekolah (SIM-PPS)
Layanan Publik (RL.01)	Pendidikan (RL.01.31)	RL 01.31.01 Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (RL.01.31.01)	Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Pendidikan (SIM-PTP)
Layanan Publik (RL.01)	Pendidikan (RL.01.31)	RL 01.31.03 Pendidikan Dasar	Pendidikan Dasar (RL.01.31.03)	Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Bahasa dan Sastra (SIM-PBS)
Layanan Publik (RL.01)	Kesehatan (RL.01.25)	RL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat (RL.01.25.02)	Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Perorangan dan Masyarakat
Layanan Publik (RL.01)	Kesehatan (RL.01.25)	RL 01.25.03 Pemberdayaan Tenaga Kesehatan	Pemberdayaan Tenaga Kesehatan (RL.01.25.03)	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK)
Layanan Publik (RL.01)	Kesehatan (RL.01.25)	RL 01.25.01 Farmasi Dan Alat Kesehatan	Farmasi Dan Alat Kesehatan (RL.01.25.01)	Sistem Informasi Manajemen Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SIMSPA)
Layanan Publik (RL.01)	Kesehatan (RL.01.25)	RL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat (RL.01.25.02)	Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Hidup Sehat
Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	RL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Sistem Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	RL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Sistem Informasi Manajemen Penyediaan Air Minum
Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	RL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Sistem Informasi Manajemen Persampahan Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	RL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Sistem Informasi Manajemen Layanan Pengolahan Air Limbah
Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	RL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Sistem Informasi Manajemen Drainase
Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	RL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Sistem Informasi Manajemen Pemukiman Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	RL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Sistem Informasi Manajemen Bangunan dan Lingkungan
Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	RL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Sistem Informasi Manajemen Monitoring Jalan
Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	RL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Sistem Informasi Pengendalian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Layanan Publik (RL.01)	Pekerjaan Umum (RL.01.17)	RL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Penataan Ruang
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	RL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	RL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	RL 01.20.02 Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	RL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Sistem Informasi Prasarana Sarana Utilitas Umum
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	RL 01.20.02 Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Sistem Informasi Manajemen Sengketa Tanah Garapan
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	RL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Sistem Informasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	RL 01.20.02 Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah dan Bangunan
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	RL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Sistem Informasi Manajemen Tanah Ulayat
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	RL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Sistem Informasi Penatagunaan Tanah
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	RL 01.20.02 Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah dan Bangunan
Layanan Publik (RL.01)	Perumahan (RL.01.20)	RL 01.20.02 Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Sistem Informasi Penatagunaan Tanah

Layanan Publik (RL.01)	Keamanan (RL.01.29)	RL 01.29.06 Keamanan Dan Ketertiban Umum	Keamanan Dan Ketertiban Umum (RL.01.29.06)	Sistem Informasi Manajemen Ketentraman dan Ketertiban Umum (SIM-KKU)
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	RL 01.40.06 Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana (RL.01.40.06)	Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Bencana (SIM-PB)
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	RL 01.40.07 Pencarian Dan Pertolongan	Pencarian Dan Pertolongan (RL.01.40.07)	Sistem Informasi Manajemen Kebakaran Terpadu (SIM-KT)
Layanan Publik (RL.01)	Ketenagakerjaan (RL.01.32)	RL 01.32.02 Pengelolaan Ketenagakerjaan	Pengelolaan Ketenagakerjaan (RL.01.32.02)	Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Tenaga Kerja Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Ketenagakerjaan (RL.01.32)	RL 01.32.04 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja (RL.01.32.04)	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Ketenagakerjaan (RL.01.32)	RL 01.32.05 Penempatan Tenaga Kerja	Penempatan Tenaga Kerja (RL.01.32.05)	Sistem Informasi Bursa Layanan Kerja Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Ketenagakerjaan (RL.01.32)	RL 01.32.05 Penempatan Tenaga Kerja	Penempatan Tenaga Kerja (RL.01.32.05)	Sistem Informasi Manajemen Hubungan Industrial Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27)	RAL 01.27.01 Kesetaraan Gender	Kesetaraan Gender (RL.01.27.01)	Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27)	RAL 01.27.03 Perlindungan Hak Perempuan	Perlindungan Hak Perempuan (RL.01.27.03)	Sistem Informasi Perlindungan Perempuan Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27)	RAL 01.27.01 Kesetaraan Gender	Kesetaraan Gender (RL.01.27.01)	Sistem Informasi Kualitas Keluarga Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27)	RAL 01.27.02 Perlindungan Anak	Perlindungan Anak (RL.01.27.02)	Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27)	RAL 01.27.02 Perlindungan Anak	Perlindungan Anak (RL.01.27.02)	Sistem Informasi Hak Anak Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Pemberdayaan Perempuan (RL.01.27)	RAL 01.27.02 Perlindungan Anak	Perlindungan Anak (RL.01.27.02)	Sistem Informasi Khusus Anak Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	RAL 01.40.02 Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem	Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem (RL.01.40.02)	Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup

Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	RAL 01.40.02 Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem	Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem (RL.01.40.02)	Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Sistem Informasi Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3)
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Sistem Informasi Manajemen dan Pengawasan Izin Lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Sistem Informasi Manajemen dan Pengawasan Izin Lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	RAL 01.40.01 Dampak Perubahan Iklim	Dampak Perubahan Iklim (RL.01.40.01)	Sistem Informasi Manajemen Pelatihan dan Penyuluhan
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Sistem Informasi Manajemen Penghargaan Lingkungan Hidup
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Sistem Informasi Manajemen Pengaduan Lingkungan Hidup
Layanan Publik (RL.01)	Lingkungan Hidup (RL.01.40)	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Sistem Informasi Manajemen Persampahan Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Pemerintahan daerah (RL.01.24)	RAL 01.24.02 Otonomi Daerah	Otonomi Daerah (RL.01.24.02)	Sistem Informasi Manajemen dan Penataan Desa
Layanan Publik (RL.01)	Pemerintahan daerah (RL.01.24)	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayahan	Administrasi Kewilayahan (RL.01.24.03)	Sistem Informasi Manajemen dan Penataan Desa
Layanan Publik (RL.01)	Pemerintahan daerah (RL.01.24)	RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RL.01.24.06)	Sistem Informasi Administrasi Pemerintah Desa
Layanan Publik (RL.01)	Pemerintahan daerah (RL.01.24)	RAL 01.24.01 Keikutsertaan Masyarakat	Keikutsertaan Masyarakat (RL.01.24.01)	Sistem Informasi Lembaga Masyarakat Desa
Layanan Publik (RL.01)	Kependudukan (RL.01.23)	RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk	Pengendalian Penduduk (RL.01.23.01)	Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Kependudukan (RL.01.23)	RAL 01.23.04 Keluarga Berencana	Keluarga Berencana (RL.01.23.04)	Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Kependudukan (RL.01.23)	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	Kebijakan Kependudukan (RL.01.23.02)	Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu

Layanan Publik (RL.01)	Transportasi (RL.01.19)	RAL 01.19.02 Pelayanan Transportasi	Pelayanan Transportasi (RL.01.19.02)	Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Layanan Publik (RL.01)	Informasi (RL.01.44)	RAL 01.44.02 Sistem Komunikasi Publik	Sistem Komunikasi Publik (RL.01.44.02)	Sistem Informasi Pengelolaan informasi dan komunikasi publik
Layanan Publik (RL.01)	Informasi (RL.01.44)	RAL 01.44.02 Sistem Komunikasi Publik	Sistem Komunikasi Publik (RL.01.44.02)	Sistem Informasi Pengelolaan Aplikasi Informatika Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Usaha Kecil dan Menengah (RL.01.14)	RAL 01.14.01 Dukungan Bisnis	Dukungan Bisnis (RL.01.14.01)	Sistem Informasi Manajemen Simpan Pinjam Koperasi (SIM-SPKOP)
Layanan Publik (RL.01)	Koperasi (RL.01.13)	RAL 01.13.01 Koperasi Dan Usaha Mikro	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Layanan Publik (RL.01)	Koperasi (RL.01.13)	RAL 01.13.01 Koperasi Dan Usaha Mikro	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Sistem Informasi Tingkat Kesehatan Koperasi
Layanan Publik (RL.01)	Koperasi (RL.01.13)	RAL 01.13.01 Koperasi Dan Usaha Mikro	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Koperasi
Layanan Publik (RL.01)	Koperasi (RL.01.13)	RAL 01.13.01 Koperasi Dan Usaha Mikro	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Sistem Informasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Layanan Publik (RL.01)	Usaha Kecil dan Menengah (RL.01.14)	RAL 01.14.01 Dukungan Bisnis	Dukungan Bisnis (RL.01.14.01)	Sistem Informasi Manajemen UMKM (e-UMKM)
Layanan Publik (RL.01)	Usaha Kecil dan Menengah (RL.01.14)	RAL 01.14.01 Dukungan Bisnis	Dukungan Bisnis (RL.01.14.01)	Sistem Informasi Manajemen UMKM (e-UMKM)
Layanan Publik (RL.01)	Olahraga (RL.01.35)	RAL 01.34.01 Pemberdayaan Pemuda	Pemberdayaan Pemuda (RL.01.34.01)	Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan
Layanan Publik (RL.01)	Olahraga (RL.01.35)	RAL 01.35.01 Kebijakan Di Bidang Pembudayaan Olahraga	Kebijakan Di Bidang Pembudayaan Olahraga (RL.01.35.01)	Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan
Layanan Publik (RL.01)	Olahraga (RL.01.35)	RAL 01.35.02 Kebijakan Di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Kebijakan Di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga (RL.01.35.02)	Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan
Layanan Publik (RL.01)	Kebudayaan (RL.01.42)	RAL 01.42.01 Kebijakan Kebudayaan	Kebijakan Kebudayaan (RL.01.42.01)	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah
Layanan Publik (RL.01)	Kebudayaan (RL.01.42)	RAL 01.42.02 Perfilman Dan Kesenian	Perfilman Dan Kesenian (RL.01.42.02)	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah
Layanan Publik (RL.01)	Kebudayaan (RL.01.42)	RAL 01.42.01 Kebijakan Kebudayaan	Kebijakan Kebudayaan (RL.01.42.01)	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah
Layanan Publik (RL.01)	Kebudayaan (RL.01.42)	RAL 01.42.04 Cagar Budaya	Cagar Budaya (RL.01.42.04)	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah
Layanan Publik (RL.01)	Kebudayaan (RL.01.42)	RAL 01.42.04 Cagar Budaya	Cagar Budaya (RL.01.42.04)	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah
Layanan Publik (RL.01)	Kebudayaan (RL.01.42)	RAL 01.42.01 Kebijakan Kebudayaan	Kebijakan Kebudayaan (RL.01.42.01)	Sistem Informasi Perpustakaan Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Kebudayaan (RL.01.42)	RAL 01.42.03 Sastra Dan Bahasa Indonesia	Sastra Dan Bahasa Indonesia (RL.01.42.03)	Sistem Informasi Pelestarian Koleksi dan Naskah Terpadu

Layanan Publik (RL.01)	Perikanan (RL.01.10)	RAL 01.10.01 Perikanan Budi Daya	Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)	Sistem Informasi Manajemen Perikanan Tangkap
Layanan Publik (RL.01)	Perikanan (RL.01.10)	RAL 01.10.01 Perikanan Budi Daya	Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)	Sistem Informasi Manajemen Perikanan Budidaya
Layanan Publik (RL.01)	Perikanan (RL.01.10)	RAL 01.10.01 Perikanan Budi Daya	Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)	Sistem Informasi Manajemen Perikanan Budidaya
Layanan Publik (RL.01)	Perikanan (RL.01.10)	RAL 01.10.01 Perikanan Budi Daya	Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)	Sistem Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Layanan Publik (RL.01)	Pariwisata (RL.01.15)	RAL 01.15.01 Pengembangan Kepariwisata	Pengembangan Kepariwisata (RL.01.15.01)	Sistem Informasi Pariwisata Terpadu (e-Pariwisata)
Layanan Publik (RL.01)	Pariwisata (RL.01.15)	RAL 01.15.02 Pengembangan Lembaga Kepariwisata	Pengembangan Lembaga Kepariwisata (RL.01.15.02)	Sistem Informasi Pariwisata Terpadu (e-Pariwisata)
Layanan Publik (RL.01)	Pariwisata (RL.01.15)	RAL 01.15.03 Pengembangan Objek Wisata	Pengembangan Objek Wisata (RL.01.15.03)	Sistem Informasi Manajemen Ekonomi Kreatif
Layanan Publik (RL.01)	Pariwisata (RL.01.15)	RAL 01.15.03 Pengembangan Objek Wisata	Pengembangan Objek Wisata (RL.01.15.03)	Sistem Informasi Manajemen Pelatihan
Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	RAL 01.07.01 Pertanian	Pertanian (RL.01.07.01)	Layanan Sarana Produksi Pertanian (e-Saprotan)
Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	RAL 01.07.01 Pertanian	Pertanian (RL.01.07.01)	Layanan Sarana Produksi Pertanian (e-Saprotan)
Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	RAL 01.07.01 Pertanian	Pertanian (RL.01.07.01)	Layanan e-Halo MedikVet
Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	RAL 01.07.01 Pertanian	Pertanian (RL.01.07.01)	Layanan Asuransi (e-Asuransi)
Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	RAL 01.07.01 Pertanian	Pertanian (RL.01.07.01)	Sistem Informasi Perizinan Usaha Tani (e-SIPUT)
Layanan Publik (RL.01)	Pertanian (RL.01.07)	RAL 01.07.01 Pertanian	Pertanian (RL.01.07.01)	Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (Simluhtan)
Layanan Publik (RL.01)	Perdagangan (RL.01.06)	RAL 01.06.04 Perdagangan Domestik	Perdagangan Domestik (RL.01.06.04)	Sistem Informasi Perizinan Perusahaan Terpadu
Layanan Publik (RL.01)	Perdagangan (RL.01.06)	RAL 01.06.04 Perdagangan Domestik	Perdagangan Domestik (RL.01.06.04)	Sistem Informasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Layanan Publik (RL.01)	Perdagangan (RL.01.06)	RAL 01.06.04 Perdagangan Domestik	Perdagangan Domestik (RL.01.06.04)	Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Perdagangan
Layanan Publik (RL.01)	Perdagangan (RL.01.06)	RAL 01.06.01 Ekspor Dan Impor	Ekspor Dan Impor (RL.01.06.01)	Sistem Informasi Ekspert Way Kanan
Layanan Publik (RL.01)	Perdagangan (RL.01.06)	RAL 01.06.05 Perlindungan Konsumen	Perlindungan Konsumen (RL.01.06.05)	Sistem Informasi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri
Layanan Publik (RL.01)	Perdagangan (RL.01.06)	RAL 01.06.02 Penggunaan Produk Dalam Negeri	Penggunaan Produk Dalam Negeri (RL.01.06.02)	Sistem Informasi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri

Layanan Publik (RL.01)	Industri (RL.01.05)	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri	Pengembangan Industri (RL.01.05.08)	Sistem Informasi Perencanaan dan Pembagunan Industri (SIPPI)
Layanan Publik (RL.01)	Industri (RL.01.05)	RAL 01.05.10 Pengembangan Industri Strategis	Pengembangan Industri Strategis (RL.01.05.10)	Sistem Informasi Perencanaan dan Pembagunan Industri (SIPPI)
Layanan Publik (RL.01)	Industri (RL.01.05)	RAL 01.05.06 Ketahanan Industri	Ketahanan Industri (RL.01.05.06)	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Layanan Publik (RL.01)	Transmigrasi (RL.01.18)	RAL.01.18.01 Layanan Transmigrasi	Layanan Transmigrasi (RL.01.18.01)	Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT)
Layanan Publik (RL.01)	Transmigrasi (RL.01.18)	RAL.01.18.01 Layanan Transmigrasi	Layanan Transmigrasi (RL.01.18.01)	Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT)
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Keuangan (RL.02.02)	RAL 02.02.01 Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara	Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara (RL.02.02.01)	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Keuangan (RL.02.02)	RAL 02.02.01 Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara	Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara (RL.02.02.01)	Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIM-PD)
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Perencanaan Pembangunan Nasional (RL.02.03)	Penyusunan Perencanaan (RL.02.03.02)	Layanan Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (RL.02.03.02.01)	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Perencanaan Pembangunan Nasional (RL.02.03)	Koordinasi Perencanaan (RL.02.03.03)	Layanan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RL.02.03.03.01)	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Keuangan (RL.02.02)	Penganggaran (RL.02.02.04)	Layanan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD (RL.02.02.04.01)	Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Daerah
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Keuangan (RL.02.02)	Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara (RL.02.02.01)	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah (RL.02.02.01.01)	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Dukungan operasional organisasi (RL.02.06)	Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RL.02.02.08)	Layanan Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa (RL.02.02.08.01)	Sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Dukungan operasional organisasi (RL.02.06)	Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RL.02.02.08)	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (RL.02.02.08.02)	Sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Dukungan operasional organisasi (RL.02.06)	Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (RL.02.02.08)	Layanan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan (RL.02.02.08.03)	Sistem informasi Pembinaan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Aparatur Negara (RL.02.04)	Manajemen ASN (RL.02.04.01)	Layanan Kepegawaian Daerah (RL.02.04.01.01)	MySAPK
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Data dan Informasi Pemerintah (RL.02.09)	Dukungan Kearsipan (RL.02.06.18)	Layanan Pengelolaan Arsip (RL.02.06.18.01)	Sistem Informasi Kearsipan Terpadu

Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Data dan Informasi Pemerintah (RL.02.09)	Dukungan Kearsipan (RL.02.06.18)	Layanan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (RL.02.06.18.02)	Sistem Informasi Perizinan Penggunaan Arsip
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Keuangan (RL.02.02)	Pengelolaan Barang Milik Negara (RL.02.02.05)	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah (RL.02.02.05.01)	Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Akuntabilitas Kinerja (RL.02.07)	Pengawasan Kinerja (RL.02.07.02)	Layanan Penyelenggaraan Pengawasan (RL.02.07.02.01)	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIM-Pengawasan)
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Akuntabilitas Kinerja (RL.02.07)	Pengawasan Kinerja (RL.02.07.02)	Layanan Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi (RL.02.07.02.02)	Sistem Informasi Komunikasi dan Asistensi Pimpinan
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Akuntabilitas Kinerja (RL.02.07)	Pengawasan Kinerja (RL.02.07.02)	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (RL.02.07.02.03)	Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (e-SAKIP)
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Aparatur Negara (RL.02.04)	Pendidikan Dan Pelatihan Keahlian (RL.02.04.03)	Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia (RL.02.04.03.01)	e-Kinerja
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Organisasi dan Tata Kelola (RL.02.08)	Pengendalian Sumber Daya Kerja Sama (RL.02.08.08)	Penelitian dan Pengembangan Daerah (RL.02.08.08.01)	Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (SIPPD)
Layanan Publik (RL.01)	Kenegaraan (RL.01.03)	Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)	Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (RL.01.03.02.01)	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Publik
Layanan Publik (RL.01)	Kenegaraan (RL.01.03)	Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (RL.01.03.02.02)	Sistem Informasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Layanan Publik (RL.01)	Kenegaraan (RL.01.03)	Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (RL.01.03.02.03)	Sistem Informasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Layanan Publik (RL.01)	Kenegaraan (RL.01.03)	Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya (RL.01.03.02.04)	Sistem Informasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Layanan Publik (RL.01)	Kenegaraan (RL.01.03)	Nilai-Nilai Kebangsaan (RL.01.03.02)	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial (RL.01.03.02.05)	Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Layanan Publik (RL.01)	Informasi (RL.01.44)	Statistik Sektoral (RL.02.09.06)	Layanan Statistik Sektoral (RL.02.09.06.01)	Sistem Informasi Statistik Sektoral
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Data dan Informasi Pemerintah (RL.02.09)	Pengelolaan Sistem Informasi (RL.02.09.04)	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (RL.02.09.04.01)	Sistem Informasi Manajemen Persandian Terpadu
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Aparatur Negara (RL.02.04)	Penyelenggaraan Pelayanan Publik (RL.02.04.08)	Layanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (RL.02.04.08.01)	Sistem Informasi Kesejahteraan Rakyat Terpadu
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Aparatur Negara (RL.02.04)	Penyelenggaraan Pelayanan Publik (RL.02.04.08)	Layanan Perekonomian dan Pembangunan (RL.02.04.08.02)	Sistem Informasi Perekonomian dan pembangunan Terpadu

Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Aparatur Negara (RL.02.04)	Penyelenggaraan Pelayanan Publik (RL.02.04.08)	Layanan Pengelolaan Izin Lokasi (RL.02.04.08.03)	Sistem Informasi Pengelolaan Izin
Layanan Administrasi Pemerintahan (RL.02)	Aparatur Negara (RL.02.04)	Penyelenggaraan Pelayanan Publik (RL.02.04.08)	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (RL.02.04.08.04)	Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (SIM Petuksi DPRD)

6.3 Arsitektur Aplikasi SPBE Target

Identifikasi kondisi eksisting berdasarkan layanan SPBE dijadikan sebagai dasar pengembangan usulan aplikasi yang bersifat administrasi dan layanan publik berbasis elektronik. Berdasarkan analisis eksisting yang telah dilakukan, terdapat **2 layanan administrasi berbasis elektronik belum didukung oleh aplikasi, yaitu layanan Persandian dan Layanan Penelitian dan Pengembangan**. Selain itu, dari 3 layanan publik dan 13 layanan publik sektoral, terdapat 1 layanan publik yang dikembangkan dan 3 **layanan publik sektoral yang masih belum didukung oleh aplikasi**.

6.3.1 Metadata Arsitektur Aplikasi

Sesuai dengan yang tercantum pada rencana Peraturan Presiden tentang SPBE, maka aplikasi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus memiliki Metadata Aplikasi dengan atribut yang telah ditentukan. Metadata untuk Aplikasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 36 Metadata Arsitektur Aplikasi

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Data yang digunakan	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembangan	Basis Data
DAA.01	Span Laporan				Informasi Data Span Laporan	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.01.01	Span Laporan Way Kanan	Aplikasi Span Laporan Way Kanan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengaduan Pelayanan publik	Aplikasi Span Laporan Way Kanan merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Pengaduan Pelayanan publik	RAD.09.03.05.01 Data Pengaduan Pelayanan publik	Informasi Data Span Laporan Way Kanan	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.02	Open Data					Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.02.01	Open Data Way Kanan	Aplikasi Open Data Way Kanan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Data Terbuka	Aplikasi Open Data Way Kanan merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Data Terbuka	RAD.09.03.05.02 Data Terbuka	Informasi Data Open Data Way Kanan	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.03	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)					Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.03.01	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Way Kanan	Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Way Kanan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung	Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Way Kanan merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk	RAD.09.03.05.03 Data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Informasi Data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Way Kanan	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

		Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	mendukung layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)							
DAA.04	Sistem Informasi Penanaman Modal Terpadu					Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.04.01	Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Penanaman Modal Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Penanaman Modal Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Penanaman Modal Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	RAD.02.08.01.01 Data Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Penanaman Modal Terpadu	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.04.02	Sistem Informasi Manajemen Promosi Penanaman Modal Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Promosi Penanaman Modal Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Promosi Penanaman Modal	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Promosi Penanaman Modal Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Khusus Misi Tertentu yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Promosi Penanaman Modal	RAD.02.08.01.02 Data Promosi Penanaman Modal	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Promosi Penanaman Modal Terpadu	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.04.03	Sistem Informasi Penanaman Modal Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Penanaman Modal Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Penanaman Modal Terpadu merupakan	RAD.02.08.02.01 Data Pelayanan Penanaman	Informasi Data Sistem Informasi Penanaman	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL

		merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pelayanan Penanaman Modal	aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Pelayanan Penanaman Modal	Modal	Modal Terpadu					
DAA.04.04	Sistem Informasi Pengendalian Penanaman Modal Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Penanaman Modal Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pelayanan Pelaksanaan Penanaman Modal	Aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Penanaman Modal Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu yang berfungsi untuk mendukung layanan Pelayanan Pelaksanaan Penanaman Modal	RAD.02.08.03.01 Data Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Informasi Data Sistem Informasi Pengendalian Penanaman Modal Terpadu	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.04.05	Sistem Informasi Penanaman Modal Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Penanaman Modal Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pelayanan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Aplikasi Sistem Informasi Penanaman Modal Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Pelayanan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	RAD.02.08.02.02 Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Informasi Data Sistem Informasi Penanaman Modal Terpadu	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.05	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) Way Kanan				Informasi Data Sistem Informasi Kesejahteraan	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

					Sosial (SIKS) Way Kanan					
DAA.05.01	Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan Sosial Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan Sosial Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pemberdayaan Sosial	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan Sosial Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pemberdayaan Sosial	RAD.04.02.01 .01 Data Pemberdayaa n Sosial	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan Sosial Terpadu	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.05.02	Sistem Informasi Manajemen Warga Negara Migran korban tindak kekerasan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Warga Negara Migran korban tindak kekerasan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Warga Negara Migran korban tindak kekerasan Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Khusus Misi Tertentu yang berfungsi untuk mendukung layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	RAD.04.02.02 .01 Data Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Warga Negara Migran korban tindak kekerasan Terpadu	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.05.03	Sistem Informasi Manajemen Rehabilitasi Sosial	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rehabilitasi Sosial merupakan Aplikasi Untuk	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rehabilitasi Sosial merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang	RAD.04.02.04 .01 Data Rehabilitasi Sosial	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Rehabilitasi Sosial	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL

		Mendukung Layanan Layanan Rehabilitasi Sosial	berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Rehabilitasi Sosial							
DAA.05.04	Sistem Informasi Perlindungan dan Jaminan Sosial; Sistem Informasi Data Kemiskinan Kab. Way Kanan (SIDATUK)	Aplikasi Sistem Informasi Perlindungan dan Jaminan Sosial; Sistem Informasi Data Kemiskinan Kab. Way Kanan (SIDATUK) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Aplikasi Sistem Informasi Perlindungan dan Jaminan Sosial; Sistem Informasi Data Kemiskinan Kab. Way Kanan (SIDATUK) merupakan aplikasi Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	RAD.04.02.05.01 Data Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Informasi Data Sistem Informasi Perlindungan dan Jaminan Sosial; Sistem Informasi Data Kemiskinan Kab. Way Kanan (SIDATUK)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.05.05	Sistem Informasi Manajemen Taman Makam Pahlawan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Taman Makam Pahlawan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Taman Makam	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Taman Makam Pahlawan Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengelolaan Taman Makam	RAD.04.02.01.02 Data Pengelolaan Taman Makam	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Taman Makam Pahlawan Terpadu	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.05.06	Sistem Informasi Manajemen Penanganan Bencana Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan	RAD.04.02.06.01 Data Penanganan Bencana	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

		Bencana Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penanganan Bencana	Bencana Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Penanganan Bencana		Penanganan Bencana Terpadu					
DAA.06	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Way Kanan				Informasi Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Way Kanan	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.06.01	Dashboard Pendaftaran penduduk Terpadu	Aplikasi Dashboard Pendaftaran penduduk Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pendaftaran Penduduk	Aplikasi Dashboard Pendaftaran penduduk Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pendaftaran Penduduk	RAD.03.07.01.01 Data Pendaftaran Penduduk	Informasi Data Dashboard Pendaftaran penduduk Terpadu	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.06.02	Sistem Informasi Pencatatan Sipil Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Pencatatan Sipil Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pencatatan Sipil	Aplikasi Sistem Informasi Pencatatan Sipil Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pencatatan Sipil	RAD.03.07.01.02 Data Pencatatan Sipil	Informasi Data Sistem Informasi Pencatatan Sipil Terpadu	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.06.03	Sistem Informasi	Aplikasi Sistem	Aplikasi Sistem	RAD.03.07.01	Informasi Data	Web	<i>Open</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL

	Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Informasi Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Informasi Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	.03 Data Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sistem Informasi Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Based	Source			
DAA.06.04	Sistem Informasi Pengelolaan Profil Kependudukan dan Catatan Sipil	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Profil Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Profil Kependudukan	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Profil Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan aplikasi Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengelolaan Profil Kependudukan	RAD.03.07.01 .04 Data Pengelolaan Profil Kependudukan	Informasi Data Sistem Informasi Pengelolaan Profil Kependudukan dan Catatan Sipil	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.07	Smart School Way Kanan				Informasi Data Smart School Way Kanan	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.07.01	Sistem Informasi Pengelolaan Pendidikan Sekolah (SIPS)	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pendidikan Sekolah (SIPS) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pendidikan Sekolah (SIPS) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk	RAD.06.01.01 .01 Data Pengelolaan Pendidikan	Informasi Data Sistem Informasi Pengelolaan Pendidikan Sekolah (SIPS)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

		Layanan Pengelolaan Pendidikan	mendukung layanan Layanan Pengelolaan Pendidikan							
DAA.07.02	Sistem Informasi Manajemen Pembelajaran Pendidikan Sekolah (SIM-PPS)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembelajaran Pendidikan Sekolah (SIM-PPS) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengembangan Kurikulum	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembelajaran Pendidikan Sekolah (SIM-PPS) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengembangan Kurikulum	RAD.06.01.01.02 Data Pengembangan Kurikulum	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Pembelajaran Pendidikan Sekolah (SIM-PPS)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.07.03	Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Pendidikan (SIM-PTP)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Pendidikan (SIM-PTP) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Pendidikan (SIM-PTP) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	RAD.06.01.01.03 Data Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Pendidikan (SIM-PTP)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.07.04	Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Bahasa dan Sastra (SIM-PBS)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Bahasa dan Sastra (SIM-PBS) merupakan Aplikasi Untuk	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Bahasa dan Sastra (SIM-PBS) merupakan aplikasi Aplikasi Umum	RAD.06.01.01.04 Data Pengembangan Bahasa dan Sastra	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Bahasa dan Sastra (SIM-PBS)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

		Mendukung Layanan Layanan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengembangan Bahasa dan Sastra							
DAA.08	Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Terpadu (SIM-K Terpadu) Way Kanan				Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Terpadu (SIM-K Terpadu) Way Kanan	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.08.01	Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Perorangan dan Masyarakat merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Perorangan dan Masyarakat merupakan aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAD.04.01.03 .01 Data Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.08.02	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK)	Aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung	Aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) merupakan aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan	RAD.04.01.04 .01 Data Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Informasi Data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK)	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL

		Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan							
DAA.08.03	Sistem Informasi Manajemen Sarana, Prasara dan Alat Kesehatan (SIMSPA)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sarana, Prasara dan Alat Kesehatan (SIMSPA) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sarana, Prasara dan Alat Kesehatan (SIMSPA) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	RAD.04.01.02.01 Data Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Sarana, Prasara dan Alat Kesehatan (SIMSPA)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.08.04	Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Hidup Sehat	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Hidup Sehat merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Hidup Sehat merupakan aplikasi Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	RAD.04.01.03.02 Data Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Hidup Sehat	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.09	Sistem Informasi				Informasi Data	Web	Open	PHP	Laravel	PostgreSQL

	Manajemen Pekerjaan Umum Terpadu				Sistem Informasi Manajemen Pekerjaan Umum Terpadu	Based	Source			
DAA.09.01	Sistem Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	RAD.03.01.05 .01 Data Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Informasi Data Sistem Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.09.02	Sistem Informasi Manajemen Penyediaan Air Minum	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyediaan Air Minum merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyediaan Air Minum merupakan aplikasi Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	RAD.03.01.05 .02 Data Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Penyediaan Air Minum	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.09.03	Sistem Informasi Manajemen Persampahan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persampahan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persampahan Terpadu merupakan	RAD.03.01.02 .01 Data Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Persampahan	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

		merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	aplikasi Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persampahan Regional	Terpadu					
DAA.09.04	Sistem Informasi Manajemen Layanan Pengolahan Air Limbah	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Layanan Pengolahan Air Limbah merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Layanan Pengolahan Air Limbah merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	RAD.03.01.04.01 Data Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Layanan Pengolahan Air Limbah	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.09.05	Sistem Informasi Manajemen Drainase	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Drainase merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Drainase merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	RAD.03.01.03.01 Data Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Drainase	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.09.06	Sistem Informasi	Aplikasi Sistem	Aplikasi Sistem	RAD.03.01.01	Informasi Data	Web	Open	PHP	Laravel	PostgreSQL

	Manajemen Pemukiman Terpadu	Informasi Manajemen Pemukiman Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Program Penataan Bangunan Gedung	Informasi Manajemen Pemukiman Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Program Penataan Bangunan Gedung	.01 Data Program Penataan Bangunan Gedung	Sistem Informasi Manajemen Pemukiman Terpadu	Based	Source			
DAA.09.07	Sistem Informasi Manajemen Bangunan dan Lingkungan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan dan Lingkungan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan dan Lingkungan merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	RAD.03.01.03 .02 Data Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Bangunan dan Lingkungan	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.09.08	Sistem Informasi Manajemen Monitoring Jalan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Monitoring Jalan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Program Penyelenggaraan Jalan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Monitoring Jalan merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Program Penyelenggaraan Jalan	RAD.03.01.01 .02 Data Program Penyelenggaraan Jalan	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Monitoring Jalan	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.09.09	Sistem Informasi Pengendalian	Aplikasi Sistem Informasi	Aplikasi Sistem Informasi	RAD.03.01.03 .03 Data	Informasi Data Sistem	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengendalian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengembangan Jasa Konstruksi	Pengendalian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan aplikasi Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengembangan Jasa Konstruksi	Pengembangan Jasa Konstruksi	Informasi Pengendalian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi					
DAA.09.10	Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Penataan Ruang	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang	RAD.03.01.01 .03 Data Penyelenggaraan Penataan Ruang	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Penataan Ruang	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.10	Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman				Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.10.01	Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman merupakan Aplikasi Untuk Mendukung	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang	Data Pengembangan Perumahan	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

		Layanan Layanan Pengembangan Perumahan	berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengembangan Perumahan							
DAA.10.02	Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Kawasan Permukiman	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Kawasan Permukiman	Data Kawasan Permukiman	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.10.03	Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Data Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.10.04	Sistem Informasi Prasarana Sarana Utilitas Umum	Aplikasi Sistem Informasi Prasarana Sarana Utilitas Umum merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan	Aplikasi Sistem Informasi Prasarana Sarana Utilitas Umum merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan	Data Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Informasi Data Sistem Informasi Prasarana Sarana Utilitas Umum	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL

		Layanan Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Layanan Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)							
DAA.10.05	Sistem Informasi Manajemen Sengketa Tanah Garapan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sengketa Tanah Garapan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sengketa Tanah Garapan merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Data Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Sengketa Tanah Garapan	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.10.06	Sistem Informasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan	Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Data Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Informasi Data Sistem Informasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.10.07	Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah dan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset	Data Redistribusi Tanah, Serta	Informasi Data Sistem Informasi	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL

	Bangunan	Tanah dan Bangunan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Tanah dan Bangunan merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Manajemen Aset Tanah dan Bangunan					
DAA.10.08	Sistem Informasi Manajemen Tanah Ulayat	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tanah Ulayat merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penetapan Tanah Ulayat	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tanah Ulayat merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Penetapan Tanah Ulayat	Data Penetapan Tanah Ulayat	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Tanah Ulayat	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.10.09	Sistem Informasi Penatagunaan Tanah	Aplikasi Sistem Informasi Penatagunaan Tanah merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Tanah Kosong	Aplikasi Sistem Informasi Penatagunaan Tanah merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengelolaan Tanah Kosong	Data Pengelolaan Tanah Kosong	Informasi Data Sistem Informasi Penatagunaan Tanah	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.10.10	Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah dan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset	Data Pengelolaan Izin Membuka	Informasi Data Sistem Informasi	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL

	Bangunan	Tanah dan Bangunan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Tanah dan Bangunan merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Tanah	Manajemen Aset Tanah dan Bangunan					
DAA.10.11	Sistem Informasi Penatagunaan Tanah	Aplikasi Sistem Informasi Penatagunaan Tanah merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penatagunaan Tanah	Aplikasi Sistem Informasi Penatagunaan Tanah merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Penatagunaan Tanah	Data Penatagunaan Tanah	Informasi Data Sistem Informasi Penatagunaan Tanah	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.11	Sistem Informasi Manajemen Ketentrangan dan Ketertiban Terpadu (SIM-KKT)				Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Ketentrangan dan Ketertiban Terpadu (SIM-KKT)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.11.01	Sistem Informasi Manajemen Ketentrangan dan Ketertiban Umum (SIM-KKU)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Ketentrangan dan Ketertiban Umum (SIM-KKU) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Ketentrangan dan Ketertiban Umum (SIM-KKU) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang	RAD.05.02.01 .01 Data Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Ketentrangan dan Ketertiban Umum (SIM-KKU)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

		Layanan Layanan Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum							
DAA.11.02	Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Bencana (SIM-PB)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Bencana (SIM-PB) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penanggulangan Bencana	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Bencana (SIM-PB) merupakan aplikasi Aplikasi Khusus Misi Tertentu yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Penanggulangan Bencana	RAD.04.02.06.02 Data Penanggulangan an Bencana	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Bencana (SIM-PB)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.11.03	Sistem Informasi Manajemen Kebakaran Terpadu (SIM-KT)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kebakaran Terpadu (SIM-KT) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kebakaran Terpadu (SIM-KT) merupakan aplikasi Aplikasi Khusus Misi Tertentu yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	RAD.04.02.06.03 Data Pencegahan, Penanggulangan an, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Kebakaran Terpadu (SIM-KT)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.12	Sigajah Way Kanan				Informasi Data Sigajah Way Kanan	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

DAA.12.01	Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Tenaga Kerja Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Tenaga Kerja Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Perencanaan Tenaga Kerja	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Tenaga Kerja Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Perencanaan Tenaga Kerja	RAD.06.02.01.01 Data Perencanaan Tenaga Kerja	Informasi Data Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Tenaga Kerja Terpadu	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.12.02	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	RAD.06.02.01.02 Data Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Terpadu	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.12.03	Sistem Informasi Bursa Layanan Kerja Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Bursa Layanan Kerja Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penempatan Tenaga Kerja	Aplikasi Sistem Informasi Bursa Layanan Kerja Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Penempatan Tenaga	RAD.06.02.01.03 Data Penempatan Tenaga Kerja	Informasi Data Sistem Informasi Bursa Layanan Kerja Terpadu	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL

			Kerja							
DAA.12.04	Sisem Informasi Manajemen Hubungan Industrial Terpadu	Aplikasi Sisem Informasi Manajemen Hubungan Industrial Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Hubungan Industrial	Aplikasi Sisem Informasi Manajemen Hubungan Industrial Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Hubungan Industrial	RAD.06.02.01.04 Data Hubungan Industrial	Informasi Data Sisem Informasi Manajemen Hubungan Industrial Terpadu	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.13	Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu				Informasi Data Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.13.01	Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengarusatamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Aplikasi Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Pengarusatamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	RAD.04.03.02.01 Data Pengarusatamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Informasi Data Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan Terpadu	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.13.02	Sistem Informasi Perlindungan Perempuan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Perlindungan Perempuan	Aplikasi Sistem Informasi Perlindungan Perempuan Terpadu	RAD.04.03.05.01 Data Perlindungan Perempuan	Informasi Data Sistem Informasi Perlindungan Perempuan	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

		Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Perlindungan Perempuan	merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Perlindungan Perempuan		Perempuan Terpadu					
DAA.13.03	Sistem Informasi Kualitas Keluarga Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Kualitas Keluarga Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Aplikasi Sistem Informasi Kualitas Keluarga Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	RAD.04.03.03.01 Data Peningkatan Kualitas Keluarga	Informasi Data Sistem Informasi Kualitas Keluarga Terpadu	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.13.04	Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Aplikasi Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	RAD.04.03.03.01 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Informasi Data Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan Terpadu	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.13.05	Sistem Informasi Hak Anak Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Hak Anak Terpadu merupakan Aplikasi Untuk	Aplikasi Sistem Informasi Hak Anak Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan	RAD.04.03.06.01 Data Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Informasi Data Sistem Informasi Hak Anak Terpadu	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

		Mendukung Layanan Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA)							
DAA.13.06	Sistem Informasi Khusus Anak Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Khusus Anak Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Program Perlindungan Khusus Anak	Aplikasi Sistem Informasi Khusus Anak Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Program Perlindungan Khusus Anak	RAD.04.03.04.01 Program Perlindungan Khusus Anak	Informasi Data Sistem Informasi Khusus Anak Terpadu	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.14	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Way Kanan				Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Way Kanan	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.14.01	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	RAD.02.03.04.01 Data Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

		Kemandirian Pangan								
DAA.14.02	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	RAD.02.03.04 .02 Data Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.14.03	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penanganan Kerawanan Pangan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Penanganan Kerawanan Pangan	RAD.02.03.04 .03 Data Penanganan Kerawanan Pangan	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.14.04	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu	RAD.02.03.04 .04 Data Pengawasan Keamanan Pangan	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Ketahanan	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

	Terpadu	Masyarakat Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengawasan Keamanan Pangan	merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengawasan Keamanan Pangan		Pangan Masyarakat Terpadu					
DAA.15	Sistem Informasi Lingkungan Hidup Terpadu				Informasi Data Sistem Informasi Lingkungan Hidup Terpadu	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.15.01	Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Perencanaan Lingkungan Hidup	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Perencanaan Lingkungan Hidup	RAD.07.05.01 .01 Data Perencanaan Lingkungan Hidup	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.15.02	Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan	RAD.07.05.02 .01 Data Pengendalian Pencemaran Dan/Kerusakan Lingkungan Hidup	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL

		Pengendalian Pencemaran Dan/Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran Dan/Kerusakan Lingkungan Hidup							
DAA.15.03	Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	RAD.07.05.01 .02 Data Pengelolaan Keanekaraga man Hayati (Kehati)	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.15.04	Sistem Informasi Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3)	Aplikasi Sistem Informasi Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Aplikasi Sistem Informasi Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	RAD.07.05.02 .02 Data Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Informasi Data Sistem Informasi Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3)	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.15.05	Sistem Informasi Manajemen dan	Aplikasi Sistem Informasi	Aplikasi Sistem Informasi	RAD.07.05.01 .03 Data	Informasi Data Sistem	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL

	Pengawasan Izin Lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Manajemen dan Pengawasan Izin Lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Manajemen dan Pengawasan Izin Lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Informasi Manajemen dan Pengawasan Izin Lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)					
DAA.15.06	Sistem Informasi Manajemen dan Pengawasan Izin Lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Pengawasan Izin Lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Pengawasan Izin Lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha	RAD.07.05.02 .03 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen dan Pengawasan Izin Lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

		Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Yang Terkait Dengan PPLH							
DAA.15.07	Sistem Informasi Manajemen Pelatihan dan Penyuluhan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelatihan dan Penyuluhan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelatihan dan Penyuluhan merupakan aplikasi Khusus Fungsi Tertentu yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	RAD.07.05.02 .04 Data Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Pelatihan dan Penyuluhan	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.15.08	Sistem Informasi Manajemen Penghargaan Lingkungan Hidup	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penghargaan Lingkungan Hidup merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penghargaan Lingkungan Hidup merupakan aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	RAD.07.05.02 .05 Data Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Penghargaan Lingkungan Hidup	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.15.09	Sistem Informasi Manajemen Pengaduan Lingkungan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengaduan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengaduan	RAD.07.05.01 .04 Data Penanganan Pengaduan	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL

	Hidup	Lingkungan Hidup merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Pengaduan Lingkungan Hidup					
DAA.15.10	Sistem Informasi Manajemen Persampahan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persampahan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Persampahan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persampahan Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengelolaan Persampahan	RAD.07.05.02 .06 Data Pengelolaan Persampahan	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Persampahan Terpadu	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.16	Smart Village Way Kanan				Informasi Data Smart Village Way Kanan	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.16.01	Sistem Informasi Manajemen dan Penataan Desa	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Penataan Desa merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penataan Desa	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Penataan Desa merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Penataan Desa	RAD.03.05.03 .01 Data Penataan Desa	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen dan Penataan Desa	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.16.02	Sistem Informasi Manajemen dan	Aplikasi Sistem Informasi	Aplikasi Sistem Informasi	RAD.03.05.01 .01 Data	Informasi Data Sistem	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

	Penataan Desa	Manajemen dan Penataan Desa merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Peningkatan Kerja Sama Desa	Manajemen dan Penataan Desa merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Peningkatan Kerja Sama Desa	Peningkatan Kerja Sama Desa	Informasi Manajemen dan Penataan Desa					
DAA.16.03	Sistem Informasi Administrasi Pemerintah Desa	Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pemerintah Desa merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pemerintah Desa merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	RAD.03.05.01.02 Data Administrasi Pemerintahan Desa	Informasi Data Sistem Informasi Administrasi Pemerintah Desa	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.16.04	Sistem Informasi Lembaga Masyarakat Desa	Aplikasi Sistem Informasi Lembaga Masyarakat Desa merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kemasyarakatan lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Aplikasi Sistem Informasi Lembaga Masyarakat Desa merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kemasyarakatan lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	RAD.03.05.04.01 Data Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Informasi Data Sistem Informasi Lembaga Masyarakat Desa	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.17	Sistem Informasi Manajemen				Informasi Data Sistem	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

	Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu				Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu					
DAA.17.01	Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengendalian Penduduk	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengendalian Penduduk	RAD.03.07.02 .01 Data Pengendalian Penduduk	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.17.02	Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pembinaan Keluarga Berencanaan (KB)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pembinaan Keluarga Berencanaan (KB)	RAD.03.07.03 .01 Data Pembinaan Keluarga Berencanaan (KB)	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.17.03	Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keluarga	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan	RAD.03.07.04 .01 Pemberdayaa n Dan	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL

	Sejahtera Terpadu	Berencana dan Sejahtera Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Sejahtera Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu					
DAA.18	Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas				Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.18.01	Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pelayanan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (ILAJ)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (ILAJ)	RAD.03.03.02 .01 Data Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.19	Sistem Informasi Manajemen Informatika dan Komunikasi Publik				Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Informatika dan Komunikasi	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL

					Publik					
DAA.19.01	Sistem Informasi Pengelolaan informasi dan komunikasi publik; Sistem Administrasi Informasi Registrasi Online Media Kabupaten Way Kanan (SARAGOM)	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan informasi dan komunikasi publik; Sistem Administrasi Informasi Registrasi Online Media Kabupaten Way Kanan (SARAGOM) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Program Informasi dan Komunikasi Publik	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan informasi dan komunikasi publik; Sistem Administrasi Informasi Registrasi Online Media Kabupaten Way Kanan (SARAGOM) merupakan aplikasi Khusus Fungsi Tertentu yang berfungsi untuk mendukung layanan Program Informasi dan Komunikasi Publik	RAD.09.03.05.04 Data Informasi dan Komunikasi Publik	Informasi Data Sistem Informasi Pengelolaan informasi dan komunikasi publik; Sistem Administrasi Informasi Registrasi Online Media Kabupaten Way Kanan (SARAGOM)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.19.02	Sistem Informasi Pengelolaan Aplikasi Informatika Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Aplikasi Informatika Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Program Aplikasi Informatika	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Aplikasi Informatika Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Program Aplikasi Informatika	RAD.09.03.05.05 Data Aplikasi Informatika	Informasi Data Sistem Informasi Pengelolaan Aplikasi Informatika Terpadu	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.20	Sistem Informasi Manajemen Koperasi (e-Koperasi)				Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Koperasi (e-Koperasi)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.20.01	Sistem Informasi	Aplikasi Sistem	Aplikasi Sistem	RAD.02.09.01	Informasi Data	Web	Open	PHP	Laravel	PostgreSQL

	Manajemen Simpan Pinjam Koperasi (SIM-SPKOP)	Informasi Manajemen Simpan Pinjam Koperasi (SIM-SPKOP) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Informasi Manajemen Simpan Pinjam Koperasi (SIM-SPKOP) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	.01 Data Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Sistem Informasi Manajemen Simpan Pinjam Koperasi (SIM-SPKOP)	Based	Source			
DAA.20.02	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	RAD.02.09.04 .01 Data Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.20.03	Sistem Informasi Tingkat Kesehatan Koperasi	Aplikasi Sistem Informasi Tingkat Kesehatan Koperasi merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penilaian Kesehatan Ksp/Usp	Aplikasi Sistem Informasi Tingkat Kesehatan Koperasi merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	RAD.02.09.03 .01 Data Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Informasi Data Sistem Informasi Tingkat Kesehatan Koperasi	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

		Koperasi								
DAA.20.04	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Koperasi merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Koperasi merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	RAD.02.09.02.01 Data Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.20.05	Sistem Informasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Aplikasi Sistem Informasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Aplikasi Sistem Informasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	RAD.02.09.03.02 Data Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Informasi Data Sistem Informasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.20.06	Sistem Informasi Manajemen UMKM (e-UMKM)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen UMKM (e-UMKM) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen UMKM (e-UMKM) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang	RAD.02.10.04.01 Data Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen UMKM (e-UMKM)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

		Layanan Layanan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Mikro (Umkm)						
DAA.20.07	Sistem Informasi Manajemen UMKM (e-UMKM)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen UMKM (e-UMKM) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengembangan Umkm	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen UMKM (e-UMKM) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengembangan Umkm	RAD.02.10.01 .01 Data Pengembangan Umkm	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen UMKM (e-UMKM)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.21	Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan				Informasi Data Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.21.01	Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan	Aplikasi Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Aplikasi Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	RAD.06.05.02 .01 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Informasi Data Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

DAA.21.02	Sistem Informasi Pemuda dan Olahraga	Aplikasi Sistem Informasi Pemuda dan Olahraga merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	Aplikasi Sistem Informasi Pemuda dan Olahraga merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	RAD.06.05.02.02 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	Informasi Data Sistem Informasi Pemuda dan Olahraga	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.21.03	Sistem Informasi Pemuda dan Olahraga	Aplikasi Sistem Informasi Pemuda dan Olahraga merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Aplikasi Sistem Informasi Pemuda dan Olahraga merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	RAD.06.05.02.03 Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Informasi Data Sistem Informasi Pemuda dan Olahraga	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.22	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Way Kanan				Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Way Kanan	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.22.01	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Aplikasi Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah merupakan	Aplikasi Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah merupakan aplikasi Aplikasi	RAD.08.02.01.01 Pengembangan Kebudayaan	Informasi Data Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

		Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengembangan Kebudayaan	Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Pengembangan Kebudayaan							
DAA.22.02	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Aplikasi Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengembangan Kesenian Tradisional	Aplikasi Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Pengembangan Kesenian Tradisional	RAD.08.02.01.02 Pengembangan Kesenian Tradisional	Informasi Data Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.22.03	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Aplikasi Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pembinaan Sejarah	Aplikasi Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Pembinaan Sejarah	RAD.08.02.01.03 Pembinaan Sejarah	Informasi Data Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.22.04	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Aplikasi Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan	Aplikasi Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk	RAD.08.02.02.01 Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Informasi Data Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

		Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	mendukung layanan Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya							
DAA.22.05	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Aplikasi Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengelolaan Permuseuman	Aplikasi Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Pengelolaan Permuseuman	RAD.08.02.01.04 Pengelolaan Permuseuman	Informasi Data Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.23	Sistem Informasi Perpustakaan Terpadu				Informasi Data Sistem Informasi Perpustakaan Terpadu	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.23.01	Sistem Informasi Perpustakaan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pembinaan Perpustakaan	Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pembinaan Perpustakaan	RAD.08.02.04.01 Data Pembinaan Perpustakaan	Informasi Data Sistem Informasi Perpustakaan Terpadu	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.23.02	Sistem Informasi Pelestarian Koleksi dan Naskah Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Pelestarian Koleksi dan Naskah Terpadu merupakan Aplikasi Untuk	Aplikasi Sistem Informasi Pelestarian Koleksi dan Naskah Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang	RAD.08.02.05.01 Data Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Informasi Data Sistem Informasi Pelestarian Koleksi dan Naskah Terpadu	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL

		Mendukung Layanan Layanan Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno							
DAA.24	Sistem Informasi Manajemen Kelautan dan Perikanan Terpadu				Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Kelautan dan Perikanan Terpadu	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.24.01	Sistem Informasi Manajemen Perikanan Tangkap	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perikanan Tangkap merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perikanan Tangkap merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Pengelolaan Perikanan Tangkap	RAD.02.06.01 .01 Data Pengelolaan Perikanan Tangkap	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Perikanan Tangkap	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.24.02	Sistem Informasi Manajemen Perikanan Budidaya	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perikanan Budidaya merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengelolaan Perikanan Budidaya	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perikanan Budidaya merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Pengelolaan Perikanan Budidaya	RAD.02.06.01 .02 Data Pengelolaan Perikanan Budidaya	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Perikanan Budidaya	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL

DAA.24.03	Sistem Informasi Manajemen Perikanan Budidaya	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perikanan Budidaya merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perikanan Budidaya merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	RAD.02.06.01.03 Data Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Perikanan Budidaya	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.24.04	Sistem Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Aplikasi Sistem Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Aplikasi Sistem Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	RAD.02.06.01.04 Data Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Informasi Data Sistem Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.25	Sistem Informasi Manajemen Pariwisata (e-Pariwisata)				Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Pariwisata (e-Pariwisata)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

DAA.25.01	Sistem Informasi Pariwisata Terpadu (e-Pariwisata)	Aplikasi Sistem Informasi Pariwisata Terpadu (e-Pariwisata) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Aplikasi Sistem Informasi Pariwisata Terpadu (e-Pariwisata) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	RAD.02.11.01.01 Data Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Informasi Data Sistem Informasi Pariwisata Terpadu (e-Pariwisata)	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.25.02	Sistem Informasi Pariwisata Terpadu (e-Pariwisata)	Aplikasi Sistem Informasi Pariwisata Terpadu (e-Pariwisata) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pariwisata	Aplikasi Sistem Informasi Pariwisata Terpadu (e-Pariwisata) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Pariwisata	RAD.02.11.03.01 Data Pemasaran Pariwisata	Informasi Data Sistem Informasi Pariwisata Terpadu (e-Pariwisata)	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.25.03	Sistem Informasi Manajemen Ekonomi Kreatif	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Ekonomi Kreatif merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Ekonomi Kreatif merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	RAD.02.11.03.02 Data Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Ekonomi Kreatif	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL

DAA.25.04	Sistem Informasi Manajemen Pelatihan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelatihan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelatihan merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	RAD.02.11.02.01 Data Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Pelatihan	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.26	Kartu Petani Berbasis Elektronik (e-KPB)				Informasi Data Kartu Petani Berbasis Elektronik (e-KPB)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.26.01	Layanan Sarana Produksi Pertanian (e-Saprotan)	Aplikasi Layanan Sarana Produksi Pertanian (e-Saprotan) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Aplikasi Layanan Sarana Produksi Pertanian (e-Saprotan) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	RAD.02.03.03.01 Data Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Informasi Data Layanan Sarana Produksi Pertanian (e-Saprotan)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

DAA.26.02	Layanan Sarana Produksi Pertanian (e-Saprotan)	Aplikasi Layanan Sarana Produksi Pertanian (e-Saprotan) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Aplikasi Layanan Sarana Produksi Pertanian (e-Saprotan) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	RAD.02.03.03.02 Data Penyediaan Dan Data Pengembangan Prasarana Pertanian	Informasi Data Layanan Sarana Produksi Pertanian (e-Saprotan)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.26.03	Layanan e-Halo MedikVet	Aplikasi Layanan e-Halo MedikVet merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Aplikasi Layanan e-Halo MedikVet merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	RAD.02.05.03.01 Data Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Data Kesehatan Masyarakat Veteriner	Informasi Data Layanan e-Halo MedikVet	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.26.04	Layanan Asuransi (e-Asuransi)	Aplikasi Layanan Asuransi (e-Asuransi) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Aplikasi Layanan Asuransi (e-Asuransi) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	RAD.02.04.04.01 Data Pengendalian Dan Data Penanggulangan Bencana Pertanian	Informasi Data Layanan Asuransi (e-Asuransi)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

DAA.26.05	Sistem Informasi Perizinan Usaha Tani (e-SIPUT)	Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Usaha Tani (e-SIPUT) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Perizinan Usaha Pertanian	Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Usaha Tani (e-SIPUT) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Perizinan Usaha Pertanian	RAD.02.03.01 .01 Data Perizinan Usaha Pertanian	Informasi Data Sistem Informasi Perizinan Usaha Tani (e-SIPUT)	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.26.06	Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (Simluhtan)	Aplikasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (Simluhtan) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Penyuluhan Pertanian	Aplikasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (Simluhtan) merupakan aplikasi Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu yang berfungsi untuk mendukung layanan Penyuluhan Pertanian	RAD.02.03.01 .02 Data Penyuluhan Pertanian	Informasi Data Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (Simluhtan)	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.27	Sistem Informasi Perdagangan				Informasi Data Sistem Informasi Perdagangan	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.27.01	Sistem Informasi Perizinan Perusahaan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Perusahaan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Perusahaan Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	RAD.02.02.01 .01 Data Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Informasi Data Sistem Informasi Perizinan Perusahaan Terpadu	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL

DAA.27.02	Sistem Informasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Aplikasi Sistem Informasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Aplikasi Sistem Informasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	RAD.02.02.03 .01 Data Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Informasi Data Sistem Informasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.27.03	Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Perdagangan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Perdagangan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Perdagangan merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	RAD.02.02.02 .01 Data Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Perdagangan	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.27.04	Sistem Informasi Ekspor Way Kanan	Aplikasi Sistem Informasi Ekspor Way Kanan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Ekspor Impor	Aplikasi Sistem Informasi Ekspor Way Kanan merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Ekspor Impor	RAD.02.02.04 .01 Data Ekspor	Informasi Data Sistem Informasi Ekspor Way Kanan	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL

DAA.27.05	Sistem Informasi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	Aplikasi Sistem Informasi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Aplikasi Sistem Informasi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	RAD.02.02.06.01 Data Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Informasi Data Sistem Informasi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.27.06	Sistem Informasi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	Aplikasi Sistem Informasi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Aplikasi Sistem Informasi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	RAD.02.02.05.01 Data Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Informasi Data Sistem Informasi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.28	Sistem Informasi Manajemen Perindustrian				Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Perindustrian	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL

DAA.28.01	Sistem Informasi Perencanaan dan Pembangunan Industri (SIPPI)	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pembangunan Industri (SIPPI) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pembangunan Industri (SIPPI) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Perencanaan Dan Pembangunan Industri	RAD.02.01.02.01 Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Informasi Data Sistem Informasi Perencanaan dan Pembangunan Industri (SIPPI)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.28.02	Sistem Informasi Perencanaan dan Pembangunan Industri (SIPPI)	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pembangunan Industri (SIPPI) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pembangunan Industri (SIPPI) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	RAD.02.01.01.01 Data Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Informasi Data Sistem Informasi Perencanaan dan Pembangunan Industri (SIPPI)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.28.03	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	RAD.02.01.05.01 Data Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Informasi Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

DAA.29	Sistem Informasi Manajemen Transmigrasi				Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Transmigrasi	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.29.01	Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT)	Aplikasi Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Aplikasi Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	RAD.03.02.01 .01 Data Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Informasi Data Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT)	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.29.02	Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT)	Aplikasi Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Aplikasi Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	RAD.03.02.04 .01 Data Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Informasi Data Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT)	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.30	Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIM-PD)				Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIM-	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL

					PD)					
DAA.30.01	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	RAD.09.01.05 .01 Data Pengelolaan Keuangan Daerah	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.30.02	Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIM-PD)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIM-PD) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIM-PD) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Layanan Publik yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah	RAD.09.02.09 .01 Data Pengelolaan Pendapatan Daerah	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIM-PD)	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.31	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)				Informasi Data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL

DAA.31.01	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	RAD.09.05.01.01 Data Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Informasi Data Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.31.02	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	RAD.09.05.01.02 Data Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Informasi Data Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAP.32	Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Daerah				Informasi Data Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Daerah	Web Based	<i>Open Source</i>	PHP	Laravel	PostgreSQL

DAP.32.01	Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Daerah	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Daerah merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Daerah merupakan aplikasi Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	RAD.09.02.05.01 Data Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	Informasi Data Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Daerah	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.33	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)				Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.33.01	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	RAD.09.02.02.01 Data Pengelolaan Keuangan Daerah	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.34	Sistem Informasi Pengadaan Barang Secara Elektronik (SPSE)				Informasi Data Sistem Informasi Pengadaan Barang Secara Elektronik	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

					(SPSE)					
DAA.34.01	Sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu	Aplikasi Sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa	Aplikasi Sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.09.02.08.01 Data Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa	Informasi Data Sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.34.02	Sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu	Aplikasi Sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Aplikasi Sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	RAD.09.02.08.02 Data Pengadaan Secara Elektronik	Informasi Data Sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

DAA.34.03	Sistem informasi Pembinaan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Aplikasi Sistem informasi Pembinaan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	Aplikasi Sistem informasi Pembinaan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa merupakan aplikasi Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	RAD.09.02.08.03 Data Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	Informasi Data Sistem informasi Pembinaan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.35	MySAPK				Informasi Data MySAPK	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.35.01	MySAPK	Aplikasi MySAPK merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Kepegawaian Daerah	Aplikasi MySAPK merupakan aplikasi Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Kepegawaian Daerah	RAD.09.06.01.01 Data Kepegawaian Daerah	Informasi Data MySAPK	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.36	SRIKANDI				Informasi Data SRIKANDI	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.36.01	Sistem Informasi Kearsipan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Arsip	Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengelolaan Arsip	RAD.09.06.08.01 Data Pengelolaan Arsip	Informasi Data Sistem Informasi Kearsipan Terpadu	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

DAA.36.02	Sistem Informasi Perizinan Penggunaan Arsip	Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Penggunaan Arsip merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Perlindungan dan Penyelematan Arsip	Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Penggunaan Arsip merupakan aplikasi Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Perlindungan dan Penyelematan Arsip	RAD.09.06.08.02 Data Perlindungan dan Penyelematan Arsip	Informasi Data Sistem Informasi Perizinan Penggunaan Arsip	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.37	Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD)				Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.37.01	Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah merupakan aplikasi Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAD.09.02.08.03 Data Pengelolaan Barang Milik Daerah	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.38	WhistleBlowingSystem				Informasi Data WhistleBlowingSystem	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

DAA.38.01	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIM-Pengawasan)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIM-Pengawasan) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penyelenggaraan Pengawasan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIM-Pengawasan) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Penyelenggaraan Pengawasan	RAD.09.07.05 .01 Data Penyelenggaraan Pengawasan	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIM-Pengawasan)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.38.02	Sistem Informasi Komunikasi dan Asistensi Pimpinan	Aplikasi Sistem Informasi Komunikasi dan Asistensi Pimpinan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Aplikasi Sistem Informasi Komunikasi dan Asistensi Pimpinan merupakan aplikasi Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	RAD.09.07.05 .02 Data Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Informasi Data Sistem Informasi Komunikasi dan Asistensi Pimpinan	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.39	Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (e-SAKIP)				Informasi Data Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (e-SAKIP)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

DAA.39.01	Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (e-SAKIP)	Aplikasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (e-SAKIP) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Aplikasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (e-SAKIP) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	RAD.09.06.05.01 Data Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Informasi Data Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (e-SAKIP)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAP.40	Sistem Informasi Kinerja Aparatur Pemerintah (SIKAP)				Informasi Data Sistem Informasi Kinerja Aparatur Pemerintah (SIKAP)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.40.01	e-Kinerja	Aplikasi e-Kinerja merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi e-Kinerja merupakan aplikasi Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAD.09.06.05.02 Data Pengembangan Sumber Daya Manusia	Informasi Data e-Kinerja	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.41	Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (SIPPD)				Informasi Data Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (SIPPD)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

DAA.41.01	Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (SIPPD)	Aplikasi Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (SIPPD) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Aplikasi Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (SIPPD) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan yang berfungsi untuk mendukung layanan Penelitian dan Pengembangan Daerah	RAD.09.07.06.01 Penelitian dan Pengembangan Daerah	Informasi Data Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (SIPPD)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.42	Sistem Informasi Manajemen Kesatuan Bangsa dan Politik (SIMKBP)				Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Kesatuan Bangsa dan Politik (SIMKBP)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.42.01	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Publik	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Publik merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pelayanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Publik merupakan aplikasi Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan yang berfungsi untuk mendukung layanan Pelayanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	RAD.09.07.07.01 Data Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Publik	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

DAA.42.02	Sistem Informasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Aplikasi Sistem Informasi Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Aplikasi Sistem Informasi Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan aplikasi Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan yang berfungsi untuk mendukung layanan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	RAD.09.07.07.02 Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Informasi Data Sistem Informasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.42.03	Sistem Informasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Aplikasi Sistem Informasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Aplikasi Sistem Informasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan aplikasi Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan yang berfungsi untuk mendukung layanan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	RAD.09.07.07.03 Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Informasi Data Sistem Informasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

DAA.42.04	Sistem Informasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Aplikasi Sistem Informasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Aplikasi Sistem Informasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan merupakan aplikasi Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan yang berfungsi untuk mendukung layanan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	RAD.09.07.07.04 Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Informasi Data Sistem Informasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.42.05	Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Aplikasi Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Aplikasi Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan aplikasi Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan yang berfungsi untuk mendukung layanan Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	RAD.09.07.07.05 Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Informasi Data Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.43	Sistem Informasi Data Statistik Sektoral (SIMDA STATISTIK)				Informasi Data Sistem Informasi Data Statistik Sektoral	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

					(SIMDA STATISTIK)					
DAA.43.01	Sistem Informasi Statistik Sektoral	Aplikasi Sistem Informasi Statistik Sektoral merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Statistik Sektoral	Aplikasi Sistem Informasi Statistik Sektoral merupakan aplikasi Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Statistik Sektoral	RAD.09.03.03 .01 Data Statistik Sektoral	Informasi Data Sistem Informasi Statistik Sektoral	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.44	Sistem Informasi Manajemen Persandian Terpadu				Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Persandian Terpadu	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.44.01	Sistem Informasi Manajemen Persandian Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persandian Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persandian Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan yang berfungsi untuk mendukung layanan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	RAD.09.07.03 .01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Persandian Terpadu	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

DAA.45	Sistem Informasi Manajemen Sekretariat Daerah (SIM-SEKDA)				Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Sekretariat Daerah (SIM-SEKDA)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.45.01	Sistem Informasi Kesejahteraan Rakyat Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Rakyat Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan RAL.02.04.08.01 Layanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Rakyat Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan yang berfungsi untuk mendukung layanan RAL.02.04.08.01 Layanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	RAD.09.01.02.01 Data Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Informasi Data Sistem Informasi Kesejahteraan Rakyat Terpadu	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.45.02	Sistem Informasi Perekonomian dan pembangunan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Perekonomian dan pembangunan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan RAL.02.04.08.02 Layanan Perekonomian dan Pembangunan	Aplikasi Sistem Informasi Perekonomian dan pembangunan Terpadu merupakan aplikasi Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan yang berfungsi untuk mendukung layanan RAL.02.04.08.02 Layanan Perekonomian dan Pembangunan	RAD.09.01.05.02 Data Perekonomian dan Pembangunan	Informasi Data Sistem Informasi Perekonomian dan pembangunan Terpadu	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

DAA.45.03	Sistem Informasi Pengelolaan Izin	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Izin merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan RAL.02.04.08.03 Pengelolaan Izin Lokasi	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Izin merupakan aplikasi Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan yang berfungsi untuk mendukung layanan RAL.02.04.08.03 Layanan Pengelolaan Izin Lokasi	RAD.09.01.06.01 Data Pengelolaan Izin Lokasi	Informasi Data Sistem Informasi Pengelolaan Izin	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.46	Sistem Informasi Manajemen Sekretariat DPRD				Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Sekretariat DPRD	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL
DAA.46.01	Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (SIM Petuksi DPRD)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (SIM Petuksi DPRD) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (SIM Petuksi DPRD) merupakan aplikasi Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan yang berfungsi untuk mendukung layanan Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	RAD.09.01.02.02 Data Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Informasi Data Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (SIM Petuksi DPRD)	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL

6.3.2 Integrasi Aplikasi

Untuk memenuhi prinsip berbagi pakai, efektif, dan efisien maka aplikasi yang ada di pemerintah daerah kabupaten Way Kanan sebaiknya diintegrasikan sesuai domain masing-masing. Dibawah ini merupakan pembagian untuk integrasi aplikasi yang disarankan.

1. JDIH, mengintegrasikan proses bisnis dari P.03 diantaranya:
 - a. JDIH Lampung
 - b. JDIH Kemenkumham
 - c. JDIH BPK
2. Smart School Way Kanan, mengintegrasikan proses bisnis dari P.07 diantaranya:
 - a. Smart School Lampung
 - b. Smart School Kemedikbud
3. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Way Kanan, mengintegrasikan proses bisnis dari P.06 diantaranya:
 - a. Dukcapil kemendagri
 - b. Adminduk kemendagri
4. Sigajah Way Kanan, mengintegrasikan proses bisnis dari P.12 diantaranya:
 - a. Sigajah Lampung
 - b. SIAPKerja Kemnaker
 - c. Karirhub Kemnaker
5. Span Lapor Way Kanan, mengintegrasikan proses bisnis pada P.01 diantaranya:
 - a. Span Lapor
 - b. WBS

6.4 Analisis Gap dan Rekomendasi

Berdasarkan Arsitektur Aplikasi Saat ini dan Aplikasi Target, maka perlu dilakukan gap analisis untuk Menyusun rencana dan roadmap agar arsitektur aplikasi target dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Gap analisis dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

BAB VII ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE

Arsitektur Infrastruktur SPBE merupakan salah satu komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dalam proses penyusunan arsitektur SPBE baik oleh pusat (nasional) ataupun daerah, dikarenakan infrastruktur SPBE memiliki keterikatan lain dengan domain arsitektur lainnya seperti proses bisnis, data, informasi, aplikasi dan lain sebagainya.

Pada Perpres 95 tahun 2018 disebutkan bahwa Infrastruktur SPBE dibedakan menjadi dua, yaitu Infrastruktur SPBE Nasional, dan Infrastruktur Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah; dan
- b. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE pasal 1 angka 15 menjelaskan bahwa infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

Proses pemetaan kebutuhan infrastruktur ini dilakukan dengan mengukur dan mengategorikan kesenjangan kualitas yang mengacu pada ketersediaan infrastruktur yang sudah ada sesuai metadata infrastruktur yang dapat digunakan sebagai landasan peningkatan kualitas infrastruktur. Analisis gap ini menjadi acuan untuk perbaikan yang perlu dilakukan oleh Kabupaten Way Kanan. Pada proses ini dilakukan langkah perbandingan antara infrastruktur yang sudah ada dan infrastruktur ke depan sesuai arsitektur target. Gambaran kondisi infrastruktur (to-be) pada Kabupaten Way Kanan, diharapkan menjadi acuan untuk persiapan Kabupaten Way Kanan dalam merencanakan kebutuhan infrastruktur pada arsitektur target yang telah ditetapkan.

7.1 Identifikasi Arsitektur Infrastruktur SPBE

Infrastruktur SPBE di Kabupaten Way Kanan didasarkan pada entitas yang menginformasikan teknologi yang dipergunakan untuk mendefinisikan dan menerapkan prinsip-prinsip teknologi Arsitektur infrastruktur SPBE yang dikelompokkan menjadi platform, sistem integrasi, dan fasilitas komputasi. Dimana dalam penerapannya, ketiga entitas metadata dilakukan dekomposisi dengan atribut pada setiap komponen infrastruktur SPBE seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

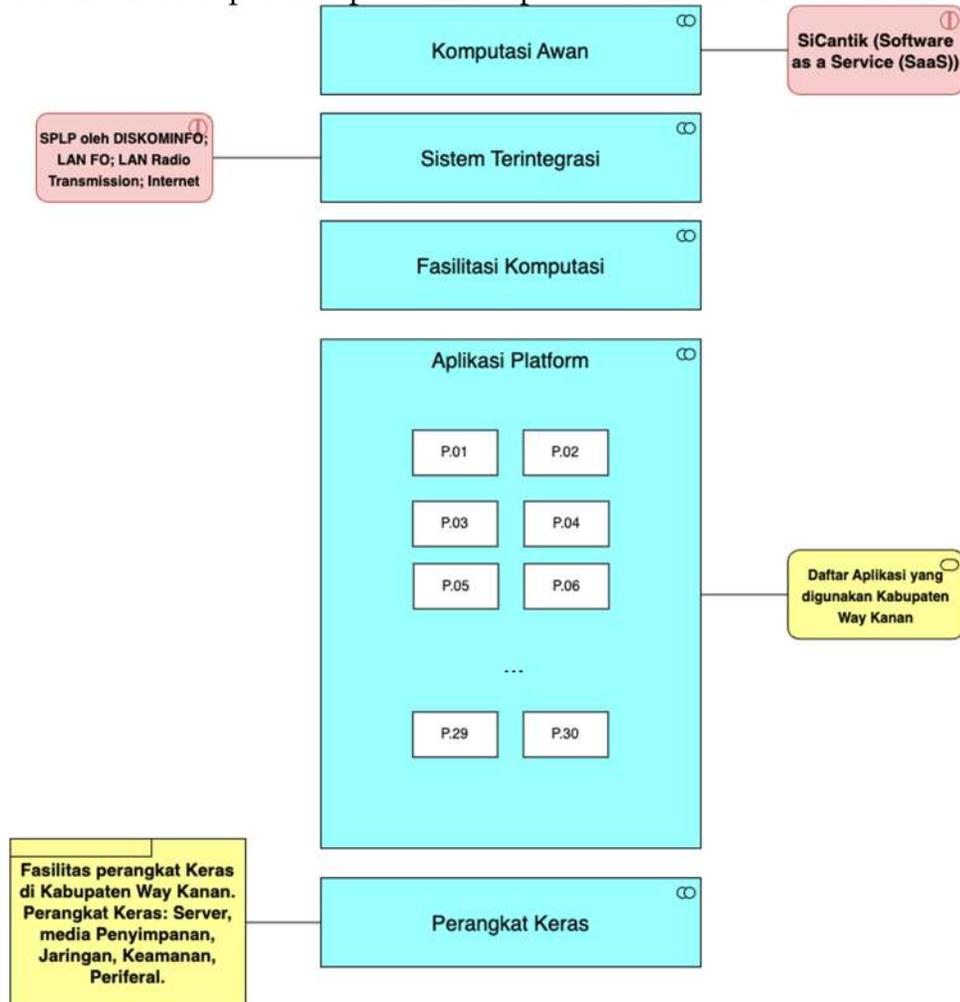


Gambar 84 Dekomposisi entitas metadata arsitektur infrastruktur Kabupaten Way Kanan

Arsitektur Infrastruktur SPBE menyediakan semua fitur teknologi yang dibutuhkan arsitektur data dan arsitektur aplikasi dengan dukungan arsitektur keamanan. Arsitektur Infrastruktur SPBE mendukung arsitektur layanan seperti akses layanan mandiri, layanan bergerak, layanan cerdas bagi masyarakat melalui aplikasi-aplikasi yang saling terhubung dalam komputasi awan. Infrastruktur SPBE dikategorikan pada platform, sistem integrasi, dan fasilitas komputasi dengan mengacu pada kondisi infrastruktur yang terdapat di Kabupaten Way Kanan.

Kondisi infrastruktur di Kabupaten Way Kanan memungkinkan pengguna dapat menyimpan data secara terpusat pada satu server berdasarkan layanan yang disediakan komputasi awan dimana penyimpanan pada layanan komputasi awan telah tersedia secara virtual. Kabupaten Way Kanan telah menggunakan layanan komputasi awan tipe Software as a Service (SaaS) dengan status kepemilikan BUMN yang dikelola Kementerian KOMINFO yaitu SiCantik Cloud. Dalam sistem integrasi, Kabupaten Way Kanan menggunakan sistem Penghubung Layanan Pemerintah dengan memanfaatkan jaringan konektivitas pada Kementerian KOMINFO dan ISP (LAN FO, LAN Radio Transmission, dan Internet) sebagai sarana perangkat integrasi yang terhubung. Jaringan intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antara sub sistem atau simpul jaringan dalam satu sistem/organisasi. Kondisi jaringan intra pemerintah di lingkungan Kabupaten Way Kanan telah berjalan dimana berbagai layanan dapat diakses secara daring melalui aplikasi yang menjadi ada layanan kepada masyarakat dan instansi terkait. Konektivitas pada Kabupaten Way Kanan (LAN FO, LAN Radio Transmission, dan Internet), terdapat bandwidth yang cukup besar (>300 Mb) yang digunakan dalam mendukung kelancaran terhadap akses layanan yang dengan integrasi akses aplikasi sistem informasi yang

menerapkan Virtual Private Network (VPN) untuk memudahkan konektivitas dan tingkat keamanan. Kondisi infrastruktur TI di Kabupaten Way Kanan saat ini dipetakan pada komponen umum infrastruktur TI seperti dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 85 Pemetaan Komponen Umum Infrastruktur TI di Kabupaten Way Kanan

Berdasarkan seluruh aktivitas koleksi data dari pemetaan komponen umum yang telah dilakukan, informasi kondisi infrastruktur yang terdapat di Kabupaten Way Kanan digambarkan ke dalam metadata arsitektur infrastruktur SPBE seperti dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 37 Deskripsi Metadata

No.	Nama Metadata	Deskripsi Fasilitas
1	Komputasi Awan	Cloud (Software as a Service (SaaS)) yang merupakan layanan cloud berbasis web yang dapat diintegrasikan dengan layanan yang terdaftar di diskominfo Way Kanan.
2	Perangkat Lunak Platform	<ul style="list-style-type: none"> Windows 11 merupakan sistem operasi yang akan diberikan pada setiap komputer di setiap unit Windows Defender merupakan Antivirus yang akan di install di setiap komputer setiap unit PostgreSQL Database merupakan database utama Office 365, setiap komputer pada unit akan mendapatkan office 365 Zoom Meeting, setiap komputer mendapatkan aplikasi zoom untuk meeting online

3	Perangkat Keras Server	<ul style="list-style-type: none"> • PostgreSQL: Database server • HPE Proliant DL380: CPU 6 core 1.7 Ghz Xeon Bronze 3104 dan memory DDR4 8GB serta tertanam pengontrol SATA • Cloudfare : DNS (<i>Domain Name Server</i>)
4	Perangkat Keras Media Penyimpanan	Perangkat yang digunakan yaitu SSD mSATA KC600 2,5" untuk penyimpan data di 23 unit pengelola data storage
5	Perangkat Keras Jaringan	<ul style="list-style-type: none"> • WMAN (<i>Wireless Metropolitan Area Network</i>) • ADSL dengan Sistem Modulasi • PC Router Mikrotik dengan Proxy Server • Router: Cisco Router 3800 Series • Proxy: Fujitsu Primergy RX100 57 • Switch: Cisco Catalyst 2950 Series.
6	Perangkat Keras Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Cisco PIX 501 • Entrust nShield® Connect hardware security modules (HSMs),
7	Perangkat Keras Peripheral	<ul style="list-style-type: none"> • Monitor Samsung S22F350H untuk setiap komputer di setiap unit • Keyboard Logitech G512 untuk setiap komputer • Mouse Logitech B100 untuk setiap komputer • Printer EPSON L121 untuk setiap unit
8	Penghubung Layanan Pemerintah	SPLP (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah) dengan status kepemilikan instansi pemerintah lain yaitu DISKOMINFO.
9	Jaringan Intra Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • LAN FO untuk Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Way Kanan • Internet di luar jangkauan intranet
10	Fasilitas Komputasi	Tersebar ke tiga layanan yang ada yaitu Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Pelayanan Urusan Pilihan dengan bandwidth intranet dan intranet sekitar 50000-140000Kbps/Unit.

7.2 Kapabilitas Infrastruktur

Kapabilitas Infrastruktur di Kabupaten Way Kanan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh elemen struktur aktif, seperti organisasi, orang, ataupun sistem. Kapabilitas infrastruktur SPBE dalam penerapannya dilakukan secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan optimalisasi penggunaan Aplikasi SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai, dan penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas sesuai dengan Cetak Biru (*BluePrint*).

Aplikasi SPBE yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo). Kapabilitas infrastruktur SPBE dilakukan dengan mengidentifikasi komponen infrastruktur yang terlibat dalam sejumlah layanan utama yang berjalan untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif berupa struktur pendukung (rincian perangkat keras, perangkat lunak) mengacu pada kualitas yang diharapkan. Pemetaan kapabilitas infrastruktur SPBE didasarkan pada identifikasi layanan berdasarkan proses bisnis di Kabupaten Way Kanan yang didukung dengan kebutuhan infrastruktur teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, seperti dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 38 Pemetaan Infrastruktur teknologi, layanan utama dan proses bisnis utama Kabupaten Way Kanan

Proses Utama	Sub Proses Utama	Sub Kategori Layanan	Aplikasi	Teknologi
Pengaduan Pelayanan Publik (P.01)	Pengaduan Pelayanan Publik (P.01.01)	Layanan Pengaduan Pelayanan publik (RL.01.44.02.01)	Span Lapor	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
Open Data (P.02)	Data Terbuka (P.02.01)	Layanan Data Terbuka (RL.01.43.03.01)	Open Data Way Kanan	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (P.03)	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) (P.03.01)	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) (RL.01.43.03.02)	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Way Kanan	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
Penanaman Modal (P.04)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal (P.04.01)	Pengembangan Sektor Usaha Penanaman Modal (RL.01.12.03)	Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Penanaman Modal Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Program Promosi Penanaman Modal (P.04.02)	Promosi Penanaman Modal (RL.01.12.08)	Sistem Informasi Manajemen Promosi Penanaman Modal Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Program Pelayanan Penanaman Modal (P.04.03)	Penanaman Modal Nasional (RL.01.12.04)	Sistem Informasi Penanaman Modal Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (P.04.04)	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (RL.01.12.05)	Sistem Informasi Pengendalian Penanaman Modal Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal (P.04.05)	Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal (RL.01.12.06)	Sistem Informasi Penanaman Modal Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
Sosial (P.05)	Program Pemberdayaan Sosial (P.05.01)	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan Sosial Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Program Penanganan Warga	Penanganan Fakir Miskin	Sistem Informasi	Platform

	Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (P.05.02)	(RL.01.26.02)	Manajemen Warga Negara Migran korban tindak kekerasan Terpadu	Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Program Rehabilitasi Sosial (P.05.03)	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Sistem Informasi Manajemen Rehabilitasi Sosial	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial (P.05.04)	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Sistem Informasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Program Pengelolaan Taman Makam (P.05.05)	Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem (RL.01.40.02)	Sistem Informasi Manajemen Taman Makam Pahlawan Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Program Penanganan Bencana (P.05.06)	Kebijakan Jaminan Sosial (RL.01.26.01)	Sistem Informasi Manajemen Penanganan Bencana Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (P.06)	Program Pendaftaran Penduduk (P.06.01)	Pengendalian Penduduk (RL.01.23.01)	Dashboard Pendaftaran penduduk Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Program Pencatatan Sipil (P.06.02)	Pencatatan Sipil (RL.01.23.03)	Sistem Informasi Pencatatan Sipil Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (P.06.03)	Kebijakan Kependudukan (RL.01.23.02)	Sistem Informasi Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan (P.06.04)	Kebijakan Kependudukan (RL.01.23.02)	Sistem Informasi Pengelolaan Profil Kependudukan dan Catatan Sipil	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
Layanan Pendidikan (P.07)	Pengelolaan Pendidikan (P.07.01)	Pendidikan Dasar (RL.01.31.03)	Sistem Informasi Pengelolaan Pendidikan Sekolah (SIPS)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pengembangan Kurikulum (P.07.02)	Pendidikan Dasar (RL.01.31.03)	Sistem Informasi Manajemen Pembelajaran Pendidikan Sekolah (SIM-PPS)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (P.07.03)	Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (RL.01.31.01)	Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Pendidikan (SIM-	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi

			PTP)	
	Pengembangan Bahasa Dan Sastra (P.07.04)	Pendidikan Dasar (RL.01.31.03)	Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Bahasa dan Sastra (SIM-PBS)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
Layanan Kesehatan (P.08)	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (P.08.01)	Kesehatan Masyarakat (RL.01.25.02)	Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan (P.08.02)	Pemberdayaan Tenaga Kesehatan (RL.01.25.03)	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman (P.08.03)	Farmasi Dan Alat Kesehatan (RL.01.25.01)	Sistem Informasi Manajemen Sarana, Prasara dan Alat Kesehatan (SIMSPA)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (P.08.04)	Kesehatan Masyarakat (RL.01.25.02)	Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Hidup Sehat	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (P.09)	Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) (P.09.01)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Sistem Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (P.09.02)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Sistem Informasi Manajemen Penyediaan Air Minum	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional (P.09.03)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Sistem Informasi Manajemen Persampahan Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah (P.09.04)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Sistem Informasi Manajemen Layanan Pengolahan Air Limbah	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase (P.09.05)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Sistem Informasi Manajemen Drainase	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Penataan Bangunan Gedung (P.09.06)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Sistem Informasi Manajemen Pemukiman Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi

	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya (P.09.07)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Sistem Informasi Manajemen Bangunan dan Lingkungan	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Penyelenggaraan Jalan (P.09.08)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Sistem Informasi Manajemen Monitoring Jalan	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Pengembangan Jasa Konstruksi (P.09.09)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Sistem Informasi Pengendalian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Penyelenggaraan Penataan Ruang (P.09.10)	Sarana Dan Prasarana Strategis (RL.01.17.01)	Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Penataan Ruang	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
Perumahan dan Kawasan Permukiman (P.10)	Pengembangan Perumahan (P.10.01)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Kawasan Permukiman (P.10.02)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh (P.10.03)	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) (P.10.04)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Sistem Informasi Prasarana Sarana Utilitas Umum	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (P.10.05)	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Sistem Informasi Manajemen Sengketa Tanah Garapan	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (P.10.06)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Sistem Informasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee (P.10.07)	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah dan Bangunan	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi

	Penetapan Tanah Ulayat (P.10.08)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Sistem Informasi Manajemen Tanah Ulayat	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Pengelolaan Tanah Kosong (P.10.09)	Infrastruktur Permukiman (RL.01.20.01)	Sistem Informasi Penatagunaan Tanah	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Pengelolaan Izin Membuka Tanah (P.10.10)	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah dan Bangunan	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Penatagunaan tanah (P.10.11)	Kawasan Permukiman (RL.01.20.02)	Sistem Informasi Penatagunaan Tanah	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (P.11)	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (P.11.01)	Keamanan Dan Ketertiban Umum (RL.01.29.06)	Sistem Informasi Manajemen Ketentraman dan Ketertiban Umum (SIM-KKU)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Penanggulangan Bencana (P.11.02)	Penanggulangan Bencana (RL.01.40.06)	Sistem Informasi Manajemen Penanggulan Bencana (SIM-PB)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (P.11.03)	Pencarian Dan Pertolongan (RL.01.40.07)	Sistem Informasi Manajemen Kebakaran Terpadu (SIM-KT)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
Tenaga Kerja (P.12)	Perencanaan Tenaga Kerja (P.12.01)	Pengelolaan Ketenagakerjaan (RL.01.32.02)	Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Tenaga Kerja Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (P.12.02)	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja (RL.01.32.04)	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Penempatan Tenaga Kerja (P.12.03)	Penempatan Tenaga Kerja (RL.01.32.05)	Sistem Informasi Bursa Layanan Kerja Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi

	Hubungan Industrial (P.12.04)	Penempatan Tenaga Kerja (RL.01.32.05)	Sisem Informasi Manajemen Hubungan Industrial Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P.13)	Pengarusatamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan (P.13.01)	Kesetaraan Gender (RL.01.27.01)	Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Perlindungan Perempuan (P.13.02)	Perlindungan Hak Perempuan (RL.01.27.03)	Sistem Informasi Perlindungan Perempuan Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Peningkatan Kualitas Keluarga (P.13.03)	Kesetaraan Gender (RL.01.27.01)	Sistem Informasi Kualitas Keluarga Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak (P.13.04)	Perlindungan Anak (RL.01.27.02)	Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pemenuhan Hak Anak(PHA) (P.13.05)	Perlindungan Anak (RL.01.27.02)	Sistem Informasi Hak Anak Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Perlindungan Khusus Anak (P.13.06)	Perlindungan Anak (RL.01.27.02)	Sistem Informasi Khusus Anak Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
Ketahanan Pangan (P.14)	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan (P.14.01)	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat (P.14.02)	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Penanganan Kerawanan Pangan (P.14.03)	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pengawasan Keamanan Pangan (P.14.04)	Ketahanan Pangan (RL.01.07.02)	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi

Lingkungan Hidup (P.15)	Perencanaan Lingkungan Hidup (P.15.01)	Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem (RL.01.40.02)	Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup (P.15.02)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) (P.15.03)	Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem (RL.01.40.02)	Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) (P.15.04)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Sistem Informasi Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (P.15.05)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Sistem Informasi Manajemen dan Pengawasan Izin Lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pengkakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH (P.15.06)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Sistem Informasi Manajemen dan Pengawasan Izin Lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (P.15.07)	Dampak Perubahan Iklim (RL.01.40.01)	Sistem Informasi Manajemen Pelatihan dan Penyuluhan	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (P.15.08)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Sistem Informasi Manajemen Penghargaan Lingkungan Hidup	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi

	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (P.15.09)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Sistem Informasi Manajemen Pengaduan Lingkungan Hidup	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pengelolaan Persampahan (P.15.10)	Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam (RL.01.40.04)	Sistem Informasi Manajemen Persampahan Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P.16)	Penataan Desa (P.16.01)	Otonomi Daerah (RL.01.24.02)	Sistem Informasi Manajemen dan Penataan Desa	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Peningkatan Kerja Sama Desa (P.16.02)	Administrasi Kewilayahan (RL.01.24.03)	Sistem Informasi Manajemen dan Penataan Desa	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Administrasi Pemerintahan Desa (P.16.03)	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RL.01.24.06)	Sistem Informasi Administrasi Pemerintah Desa	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat (P.16.04)	Keikutsertaan Masyarakat (RL.01.24.01)	Sistem Informasi Lembaga Masyarakat Desa	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P.17)	Pengendalian Penduduk (P.17.01)	Pengendalian Penduduk (RL.01.23.01)	Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pembinaan Keluarga Berencana(Kb) (P.17.02)	Keluarga Berencana (RL.01.23.04)	Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera(KS) (P.17.03)	Kebijakan Kependudukan (RL.01.23.02)	Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
Perhubungan (P.18)	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (ILAJ) (P.18.01)	Pelayanan Transportasi (RL.01.19.02)	Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
Komunikasi dan Informatika (P.19)	Informasi Dan Komunikasi Publik (P.19.01)	Sistem Komunikasi Publik (RL.01.44.02)	Sistem Informasi Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi

	Aplikasi Informatika (P.19.02)	Sistem Komunikasi Publik (RL.01.44.02)	Sistem Informasi Pengelolaan Aplikasi Informatika Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah (P.20)	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam (P.20.01)	Dukungan Bisnis (RL.01.14.01)	Sistem Informasi Manajemen Simpan Pinjam Koperasi (SIM-SPKOP)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi (P.20.02)	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi (P.20.03)	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Sistem Informasi Tingkat Kesehatan Koperasi	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian (P.20.04)	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi (P.20.05)	Koperasi Dan Usaha Mikro (RL.01.13.01)	Sistem Informasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (P.20.06)	Dukungan Bisnis (RL.01.14.01)	Sistem Informasi Manajemen UMKM (e-UMKM)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pengembangan Umkm (P.20.07)	Dukungan Bisnis (RL.01.14.01)	Sistem Informasi Manajemen UMKM (e-UMKM)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pemuda dan Olahraga (P.21)	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (P.21.01)	Pemberdayaan Pemuda (RL.01.34.01)	Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan
Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan (P.21.02)		Kebijakan Di Bidang Pembudayaan Olahraga (RL.01.35.01)	Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (P.21.03)		Kebijakan Di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga (RL.01.35.02)	Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
Kebudayaan (P.22)	Program Pengembangan Kebudayaan (P.22.01)	Kebijakan Kebudayaan (RL.01.42.01)	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Perfilman Dan Kesenian (RL.01.42.02)	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian	Platform Sistem Terintegrasi

	(P.22.02)		dan Sejarah	Fasilitas Komputasi
	Program Pembinaan Sejarah (P.22.03)	Kebijakan Kebudayaan (RL.01.42.01)	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya (P.22.04)	Cagar Budaya (RL.01.42.04)	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Pengelolaan Permuseuman (P.22.05)	Cagar Budaya (RL.01.42.04)	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
Perpustakaan (P.23)	Program Pembinaan Perpustakaan (P.23.01)	Kebijakan Kebudayaan (RL.01.42.01)	Sistem Informasi Perpustakaan Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno (P.23.02)	Sastra Dan Bahasa Indonesia (RL.01.42.03)	Sistem Informasi Pelestarian Koleksi dan Naskah Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
Kelautan dan Perikanan (P.24)	Pengelolaan Perikanan Tangkap (P.24.01)	Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)	Sistem Informasi Manajemen Perikanan Tangkap	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Pengelolaan Perikanan Budidaya (P.24.02)	Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)	Sistem Informasi Manajemen Perikanan Budidaya	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (P.24.03)	Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)	Sistem Informasi Manajemen Perikanan Budidaya	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (P.24.04)	Perikanan Budi Daya (RL.01.10.01)	Sistem Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
Pariwisata (P.25)	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (P.25.01)	Pengembangan Kepariwisata (RL.01.15.01)	Sistem Informasi Pariwisata Terpadu (e-Pariwisata)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Pemasaran Pariwisata (P.25.02)	Pengembangan Lembaga Kepariwisata (RL.01.15.02)	Sistem Informasi Pariwisata Terpadu (e-Pariwisata)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak	Pengembangan Objek Wisata (RL.01.15.03)	Sistem Informasi Manajemen Ekonomi Kreatif	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi

	Kekayaan Intelektual (P.25.03)			
	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (P.25.04)	Pengembangan Objek Wisata (RL.01.15.03)	Sistem Informasi Manajemen Pelatihan	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
Pertanian (P.26)	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (P.26.01)	Pertanian (RL.01.07.01)	Layanan Sarana Produksi Pertanian (e-Saprotan)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian (P.26.02)	Pertanian (RL.01.07.01)	Layanan Sarana Produksi Pertanian (e-Saprotan)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (P.26.03)	Pertanian (RL.01.07.01)	Layanan e-Halo MedikVet	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian (P.26.04)	Pertanian (RL.01.07.01)	Layanan Asuransi (e-Asuransi)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Perizinan Usaha Pertanian (P.26.05)	Pertanian (RL.01.07.01)	Sistem Informasi Perizinan Usaha Tani (e-SIPUT)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Penyuluhan Pertanian (P.26.06)	Pertanian (RL.01.07.01)	Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (Simluhtan)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
Perdagangan (P.27)	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (P.27.01)	Perdagangan Domestik (RL.01.06.04)	Sistem Informasi Perizinan Perusahaan Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (P.27.02)	Perdagangan Domestik (RL.01.06.04)	Sistem Informasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (P.27.03)	Perdagangan Domestik (RL.01.06.04)	Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Perdagangan	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pengembangan Ekspor (P.27.04)	Ekspor Dan Impor (RL.01.06.01)	Sistem Informasi Ekspor Way Kanan	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (P.27.05)	Perlindungan Konsumen (RL.01.06.05)	Sistem Informasi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi

			negeri	
	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P.27.06)	Penggunaan Produk Dalam Negeri (RL.01.06.02)	Sistem Informasi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
Perindustrian (P.28)	Perencanaan Dan Pembangunan Industri (P.28.01)	Pengembangan Industri (RL.01.05.08)	Sistem Informasi Perencanaan dan Pembangunan Industri (SIPPI)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota (P.28.02)	Pengembangan Industri Strategis (RL.01.05.10)	Sistem Informasi Perencanaan dan Pembangunan Industri (SIPPI)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (P.28.03)	Ketahanan Industri (RL.01.05.06)	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
Transmigrasi (P.29)	Perencanaan kawasan Transmigrasi (P.29.01)	Layanan Transmigrasi (RL.01.18.01)	Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P.29.02)	Layanan Transmigrasi (RL.01.18.01)	Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
Pendapatan Daerah (P.30)	Pengelolaan Keuangan Daerah (P.30.01)	Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara (RL.02.02.01)	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Pengelolaan Pendapatan Daerah (P.30.02)	Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara (RL.02.02.01)	Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIM-PD)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
Perencanaan (AP.01)	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (AP.01.01)	Layanan Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (RL.02.03.02.01)	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (AP.01.02)	Layanan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RL.02.03.03.01)	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitasi Komputasi
Anggaran (AP.02)	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD (AP.02.01)	Layanan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	Sistem Informasi Perencanaan Anggaran	Platform Sistem Terintegrasi

		(RL.02.02.04.01)	Daerah	Fasilitas Komputasi
Keuangan (AP.03)	Pengelolaan Keuangan Daerah (AP.03.01)	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah (RL.02.02.01.01)	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
Pengadaan Barang dan Jasa (AP.04)	Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa (AP.04.01)	Layanan Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa (RL.02.02.08.01)	Sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Pengadaan Secara Elektronik (AP.04.02)	Layanan Pengadaan Secara Elektronik (RL.02.02.08.02)	Sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan (AP.04.03)	Layanan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan (RL.02.02.08.03)	Sistem informasi Pembinaan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
Kepegawaian (AP.05)	Kepegawaian Daerah (AP.05.01)	Layanan Kepegawaian Daerah (RL.02.04.01.01)	MySAPK	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
Kearsipan (AP.06)	Pengelolaan Arsip (AP.06.01)	Layanan Pengelolaan Arsip (RL.02.06.18.01)	Sistem Informasi Kearsipan Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Perlindungan dan Penyelematan Arsip (AP.06.02)	Layanan Perlindungan dan Penyelematan Arsip (RL.02.06.18.02)	Sistem Informasi Perizinan Penggunaan Arsip	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
Pengelolaan Barang Milik Daerah (AP.07)	Pengelolaan Barang Milik Daerah (AP.07.01)	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah (RL.02.02.05.01)	Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
Pengawasan Internal (AP.08)	Penyelenggaraan Pengawasan (AP.08.01)	Layanan Penyelenggaraan Pengawasan (RL.02.07.02.01)	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIM-Pengawasan)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi (AP.08.02)	Layanan Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi (RL.02.07.02.02)	Sistem Informasi Komunikasi dan Asistensi Pimpinan	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
Akuntabilitas Kinerja Organisasi (AP.09)	Akuntabilitas Kinerja Organisasi (AP.09.01)	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (RL.02.07.02.03)	Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (e-SAKIP)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
Akuntabilitas Kinerja Pegawai	Pengembangan Sumber Daya Manusia (AP.10.01)	Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia	e-Kinerja	Platform Sistem Terintegrasi

(AP.10)		(RL.02.04.03.01)		Fasilitas Komputasi
Penelitian dan Pengembangan (AP.11)	Penelitian dan Pengembangan Daerah (AP.11.01)	Penelitian dan Pengembangan Daerah (RL.02.08.08.01)	Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (SIPPD)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
Kesatuan Bangsa dan Politik (AP.12)	Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (AP.12.01)	Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (RL.01.03.02.01)	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Publik	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (AP.12.02)	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (RL.01.03.02.02)	Sistem Informasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (AP.12.03)	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (RL.01.03.02.03)	Sistem Informasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya (AP.12.04)	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya (RL.01.03.02.04)	Sistem Informasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial (AP.12.05)	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial (RL.01.03.02.05)	Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Statistik (AP.13)	Statistik Sektoral (AP.13.01)	Layanan Statistik Sektoral (RL.02.09.06.01)	Sistem Informasi Statistik Sektoral
Persandian (AP.14)	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (AP.14.01)	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (RL.02.09.04.01)	Sistem Informasi Manajemen Persandian Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
Sekretariat Daerah (AP.15)	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (AP.15.01)	Layanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (RL.02.04.08.01)	Sistem Informasi Kesejahteraan Rakyat Terpadu	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
	Perekonomian dan Pembangunan (AP.15.02)	Layanan Perekonomian dan Pembangunan	Sistem Informasi Perekonomian dan	Platform Sistem Terintegrasi

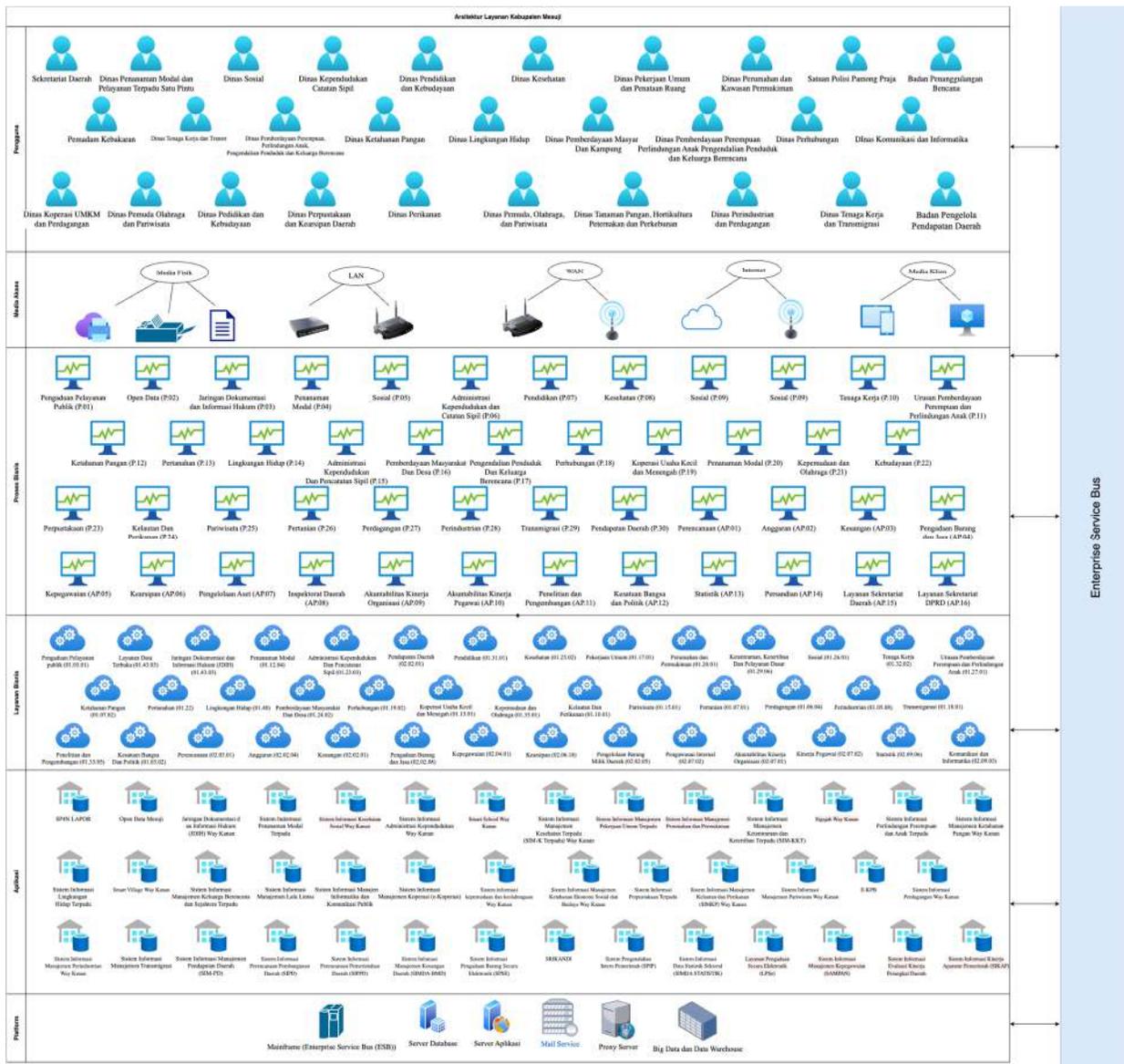
		(RL.02.04.08.02)	pembangunan Terpadu	Fasilitas Komputasi
	Layanan Pengelolaan Izin Lokasi (AP.15.03)	Layanan Pengelolaan Izin Lokasi (RL.02.04.08.03)	Sistem Informasi Pengelolaan Izin	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi
Sekretariat DPRD (AP.16)	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (AP.16.01)	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (RL.02.04.08.04)	Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (SIM Petuksi DPRD)	Platform Sistem Terintegrasi Fasilitas Komputasi

7.3 Model Arsitektur Integrasi

Model Arsitektur integrasi merupakan kebutuhan penting dalam proses bisnis di Kabupaten Way Kanan yang memiliki kompleksitas yang tinggi, dimana direkomendasikan untuk kebutuhan integrasi layanan- layanan yang telah terdefinisi dan penggunaan sistem yang berbeda dengan harapan terdapat adanya proses kontrol. Pemodelan arsitektur ini memberikan pendekatan dan strategi untuk mengintegrasikan layanan (Sub kategori layanan), aplikasi, data, dan teknologi secara menyeluruh. Pemodelan arsitektur integrasi ini diawali dengan mendeskripsikan konsep-konsep bisnis pada layanan untuk penetapan kebutuhan integrasi bagi setiap layanan untuk seluruh pengguna.

Selanjutnya, dari setiap komponen konseptual bisnis yang telah terdefinisi, diterjemahkan ke dalam komponen-komponen yang dibutuhkan, terutama kebutuhan platform fisik untuk setiap lapisan arsitektur. Mekanisme dan pengaturan layanan pada pemodelan ini mengacu pada aktivitas proses bisnis dimana pengguna menggunakan media akses tertentu untuk berinteraksi terhadap layanan tertentu. Terdapat beberapa lapisan yang ada pada arsitektur model integrasi ini, yaitu seperti tercantum pada Gambar dibawah ini.

- a. Lapisan Pengguna: merupakan Otorisasi tingkat layanan pengguna yang akan berinteraksi dengan proses dan layanan Kabupaten Way Kanan.
- b. Lapisan Media akses: media yang digunakan untuk pengguna mengakses layanan yang terdapat di Kabupaten Way Kanan.
- c. Lapisan Layanan: merupakan kumpulan kemampuan layanan yang disampaikan.
- d. Lapisan Integrasi: merupakan lapisan integrasi layanan *shared service*.
- e. Lapisan Aplikasi: merupakan tempat aplikasi dukungan.
- f. Lapisan Platform: Infrastruktur teknologi.
- g. Lapisan Proses Bisnis : Proses bisnis yang terjadi pada Kabupaten Way Kanan.



Gambar 86 Model Arsitektur Integrasi Layanan

Arsitektur integrasi merupakan kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai macam sistem yang berbeda dengan harapan memudahkan kontrol terhadap proses bisnis. Pada proses integrasi tersebut dilakukan dengan menggunakan LAN FO sebagai jaringan penghubung di dalam Kabupaten Way Kanan. Dengan memanfaatkan LAN FO diharapkan adanya solusi yang tepat untuk mendapatkan sebuah infrastruktur yang baik dengan kemampuan integrasi yang sudah terkelola, dengan memberikan kemudahan pertukaran informasi antar aplikasi, mengurangi pengaruh jika terjadi perubahan, dan adanya penekanan biaya untuk keperluan integrasi dan modifikasi aplikasi.

Setiap lapisan arsitektur mendeskripsikan hubungan dari mulai lapisan pengguna sampai dengan lapisan platform atau teknologi yang digunakan, berikut penjelasan dari strategi integrasi setiap lapisan arsitektur:

a. Lapisan Pengguna

Pada lapisan ini diidentifikasi siapa saja pengguna yang ada dan terlibat dalam mengakses layanan yang terdapat di Kabupaten Way Kanan, kewenangan dan kemudahan pengguna diberikan untuk melakukan proses tertentu sesuai dengan kapasitas dan status dari pengguna tersebut terutama untuk mendapatkan informasi. Para pengguna diidentifikasi hak aksesnya untuk berinteraksi

dengan sistem sesuai otoritas akses terhadap layanan yang diterjemahkan ke dalam peran dan hak-hak yang secara logis diterapkan di dalam otentikasi keamanan. Pengguna dengan melakukan satu kali sign in, akan mendapatkan informasi dan daftar proses sesuai kebutuhan dan kapasitasnya.

b. Lapisan Media Akses

Lapisan ini mencerminkan dimana para pengguna dapat menggunakan media akses yang berbeda untuk mendapatkan akses ke informasi atau proses yang mereka butuhkan dalam melakukan penggunaan akses layanan bisnis. Penetapan media untuk akses layanan sangat penting untuk dipertimbangkan. Berdasarkan proses bisnis yang ada, serta analisis kebutuhan informasi layanan terdapat berbagai macam media akses yang digunakan untuk menunjang operasional dengan menyesuaikan keinginan pengguna. Media akses yang dibutuhkan terdiri dari media fisik berupa perangkat perifer, media jaringan LAN, WAN, internet.

c. Lapisan Layanan Bisnis

Lapisan ini menjelaskan layanan bisnis apa saja yang terdapat dalam proses bisnis yang telah ada. Layanan bisnis merupakan kumpulan layanan yang memiliki nilai untuk proses bisnis. Lapisan ini mengacu pada permasalahan interoperabilitas pada lingkup platform yang dipecahkan melalui pengembangan teknologi- teknologi dan standar untuk integrasi dengan platform teknologi yang berbeda. Perkembangan teknologi dan standar aplikasi memungkinkan pengguna dapat berinteraksi dengan siapa saja, dimana saja dan kapan saja. Kumpulan kemampuan layanan di Kabupaten Way Kanan dihasilkan dari kategori layanan yang telah didefinisikan sebelumnya pada arsitektur layanan, yang menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan keinginan pengguna.

d. Lapisan Integrasi Layanan

Lapisan integrasi layanan merupakan macam-macam layanan integrasi yang disediakan dalam mengakses suatu layanan bisnis yang merupakan bagian-bagian dari proses bisnis yang ada di Kabupaten Way Kanan. Strategi integrasi memberikan arah tentang bagaimana aplikasi dukungan dapat mendukung arsitektur layanan, dan sistem ini memiliki nilai strategis tinggi untuk organisasi. Integrasi layanan yang direkomendasikan, dilakukan melalui LAN FO sebagai penghubung jaringan di dalam Kabupaten Way Kanan. Dalam mengintegrasikan aplikasi-aplikasi dukungan yang disajikan dibuat dalam bentuk paket-paket layanan yang secara jelas digambarkan pada domain arsitektur layanan.

e. Lapisan Aplikasi

Lapisan ini merupakan penggambaran kembali mengenai aplikasi yang telah teridentifikasi dan digunakan dalam pembentukan infrastruktur teknologinya. Lapisan ini merupakan tempat semua artefak terkait dengan aplikasi dukungan yang terintegrasi atau perlu diintegrasikan dengan arsitektur layanan. Pada lapisan ini direkomendasikan menggunakan teknologi web services, karena karakteristik dan pola dari teknologi ini sinergi dengan kebutuhan integrasi layanan aplikasi yang telah ada dan aplikasi yang baru dapat terjadi interaksi.

f. Lapisan Platform

Lapisan ini merupakan platform yang diusulkan untuk digunakan dalam pembentukan infrastruktur teknologinya. Lapisan ini

direpresentasikan pada kebutuhan teknologi yang diperlukan dalam lingkungan bisnis untuk penyediaan layanan TI, yang merupakan kebutuhan infrastruktur yang harus disediakan untuk mendukung beroperasinya layanan yang digunakan organisasi. Dalam mendefinisikan kebutuhan teknologi, terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap prinsip dan platform teknologi yang akan digunakan. Prinsip platform teknologi, yang memiliki kebutuhan pemenuhan enterprise-wide. Proses dan layanan dimungkinkan dapat diakses oleh seluruh pemakai, dimana saja, kapan saja, dan melalui media akses yang berbeda-beda. Platform yang saat ini telah ada di Kabupaten Way Kanan, perangkat lunak sistem operasi dan server (windows, linux, Zimbra, PHP apache server), perangkat database (MySQL, Ms. Access, MariaDB). Pemilihan platform harus dipertimbangkan kesesuaiannya, sebagai dukungan terhadap fungsi yang diperlukan, jaminan keberlangsungannya untuk kebutuhan bisnis di masa mendatang, serta kepatuhan terhadap kebutuhan standar implementasi, dan dukungan terhadap internal dan vendor.

g. Lapisan Proses Bisnis

Lapisan ini merupakan lapisan yang mengidentifikasi proses bisnis yang ada di Kabupaten Way Kanan ke dalam *values* (sub fungsi) dan *value streams* berupa aliran proses bisnis utama yang mengolah data dan informasi dari masing-masing sub fungsi untuk menghasilkan layanan sebagai keluaran dari proses-proses bisnis tersebut. Pengelompokan proses bisnis di Kabupaten Way Kanan mendefinisikan keterkaitan antara tujuan yang sudah selaras dengan visi dan misi Kabupaten Way Kanan yang diturunkan pada sub fungsi dalam 134 proses bisnis utama.

7.4 Arsitektur Infrastruktur SPBE Target

Proses pemetaan kebutuhan infrastruktur ini dilakukan dengan mengukur dan mengategorikan kesenjangan kualitas yang mengacu pada ketersediaan infrastruktur yang sudah ada sesuai metadata infrastruktur yang dapat digunakan sebagai landasan peningkatan kualitas infrastruktur. Analisis gap ini menjadi acuan untuk perbaikan yang perlu dilakukan oleh Kabupaten Way Kanan. Pada proses ini dilakukan langkah perbandingan antara infrastruktur yang sudah ada dan infrastruktur ke depan sesuai arsitektur target. Gambaran kondisi infrastruktur (to-be) pada Kabupaten Way Kanan, diharapkan menjadi acuan untuk persiapan Kabupaten Way Kanan dalam merencanakan kebutuhan infrastruktur pada arsitektur target yang telah ditetapkan.

7.4.1 Arsitektur Teknologi Layanan

Arsitektur ini menjelaskan elemen utama infrastruktur teknologi layanan di Pemerintah Daerah Way Kanan. Hal ini deskripsikan dalam tiga lapisan persegi panjang, yang menggambarkan elemen infrastruktur yang terdiri area pengguna, area layanan aplikasi, area server. Elemen ini digambarkan dalam diagram yang mengilustrasikan bagaimana infrastruktur fisik dipetakan ke kemampuan logis. Arsitektur infrastruktur teknologi layanan ini akan digunakan untuk merancang lingkungan target meliputi:

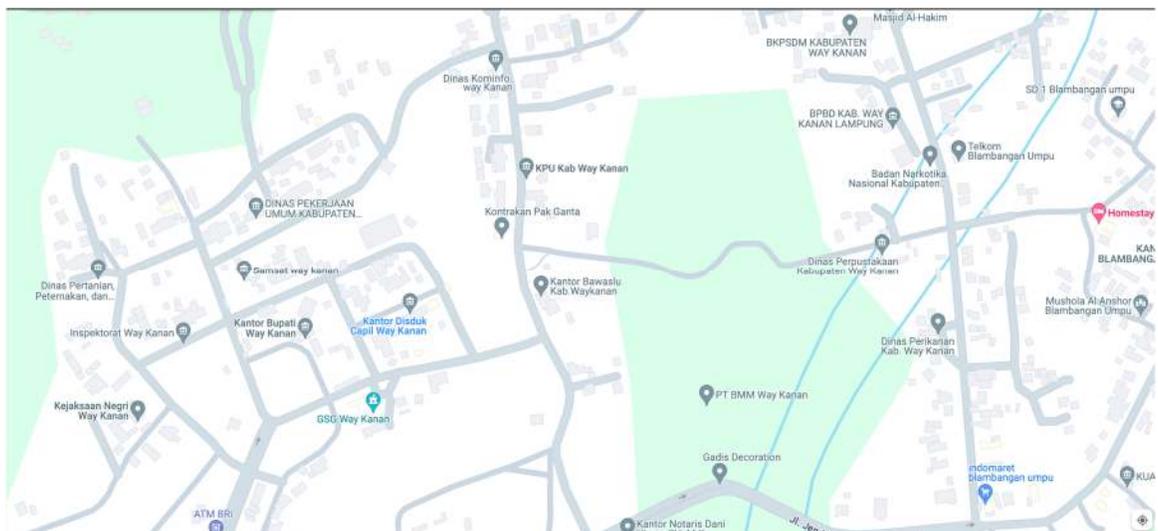
- a. Area pengguna yang terdiri dari perangkat peripheral yang menjadi media akses pengguna. Dalam hal ini pengguna terhubung pada aplikasi dengan menggunakan jaringan internet, ditunjukkan dengan panah ke area aplikasi.
- b. Area layanan aplikasi terdiri dari komponen, layanan, penanganan pesan yang mengacu proses pada aplikasi. Pada

area ini digunakan teknologi web services, untuk kebutuhan integrasi layanan aplikasi yang telah ada dan aplikasi yang baru. Pada prosesnya area ini membutuhkan load balancer untuk proses pendistribusian traffic layanan jaringan aplikasi ke beberapa server.

- c. Area server meliputi terdiri dari web server, database server, aplikasi server, big data server. Pada area ini menjelaskan penerapan teknologi komputasi awan merupakan teknologi pengelolaan data dan informasi internet tanpa terlihatnya bentuk fisik infrastruktur dan platform yang digunakan. Kemudian, teknologi berbagi pakai layanan (shared service) yang menggunakan arsitektur microservice, dimana microservice merupakan pendekatan pengembangan aplikasi dalam satuan/unit terkecil, baik dapat berupa fungsi kompleks atau fungsi terkecil. Pada area ini dijelaskan juga terkait elemen lingkungan integrasi data yang ditampilkan terhubung ke beberapa penyimpanan untuk database relasional, OLAP database, dan big data database yang dijumpai oleh aplikasi dukungan dan big data analytics.

7.4.2 Arsitektur Jaringan

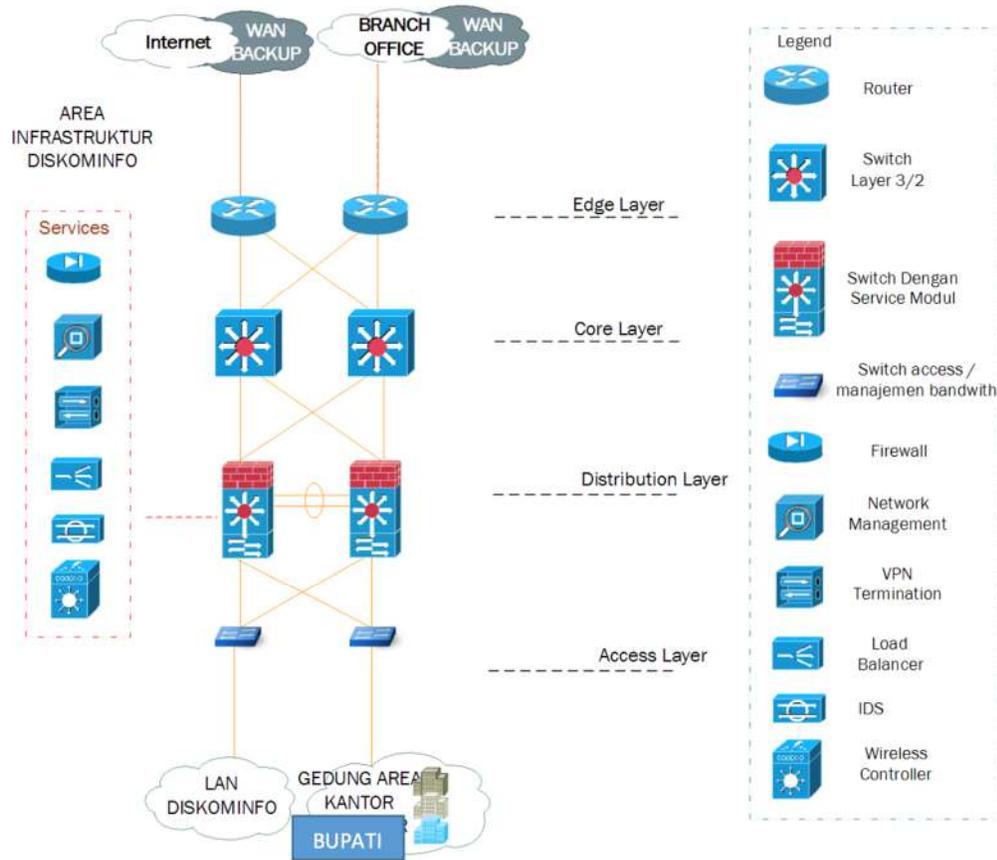
Di Komplek Pemerintah Kabupaten Way Kanan terdapat 34 Perangkat Daerah yang perlu dihubungkan melalui Jaringan Intranet. Topologi jaringan komputer merupakan metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun tanpa kabel. Di Komplek Way Kanan menggunakan FTTx fiber optik karena Jaringan ini lebih efektif dan lebih mudah dalam konfigurasi dan penambahan titik baru, jaringan ini juga sangat mudah diintegrasikan baik untuk Intranet, CCTV dll. Seperti yang digambarkan di bawah ini



Gambar 87 Denah Kompleks Pemerintah Kabupaten Way Kanan

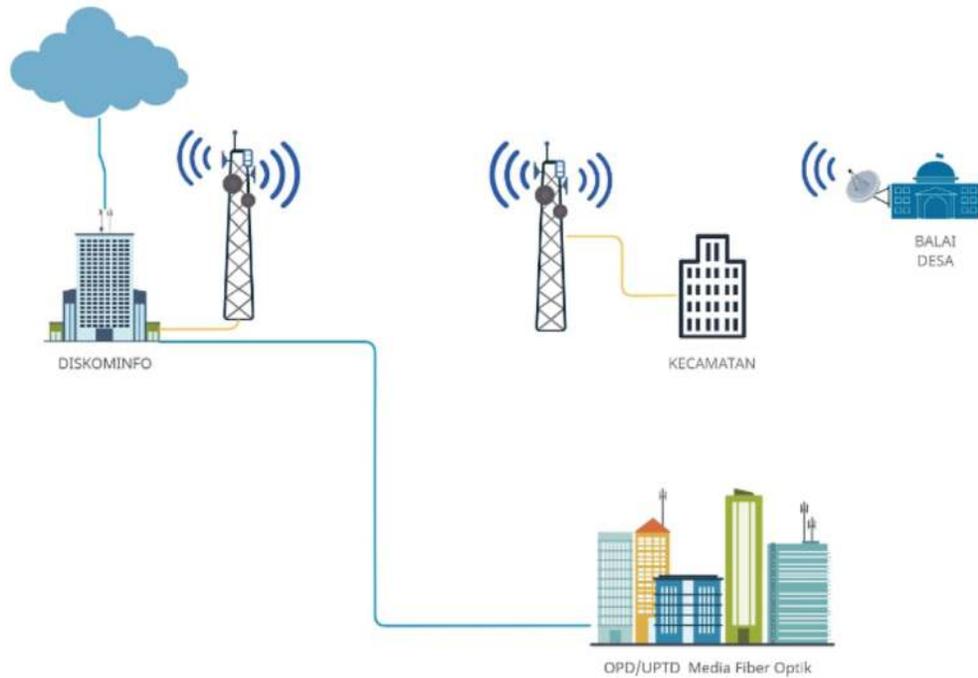
Di bawah ini adalah gambar Topologi Dinas Komunikasi dan Informatika terhubung dengan Topologi di OPD /UPTD seluruh Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Topologi Diskominfo menggunakan *Router* Utama sebagai penghubung antara Internet dengan Jaringan Lokal Kabupaten Way Kanan yang berikutnya akan dilakukan Manajemen Data melalui *Switch Managed* dan IP serta *Bandwith* melalui Router Distribusi. Jaringan Internet dikirim melalui fiber optik menggunakan GPON/GPEON dan diterima di

titik OPD menggunakan ONT/ONU yang kemudian data di *broadcast* Kembali menggunakan *switch* OPD dan OPD tersebut dapat menggunakan PC, Laptop maupun *Smartphone* untuk mendapatkan data tersebut. Untuk keamanan dari pencurian, pembajakan dan Kejahatan lainnya, Server kominfo dilindungi oleh *Firewall*.



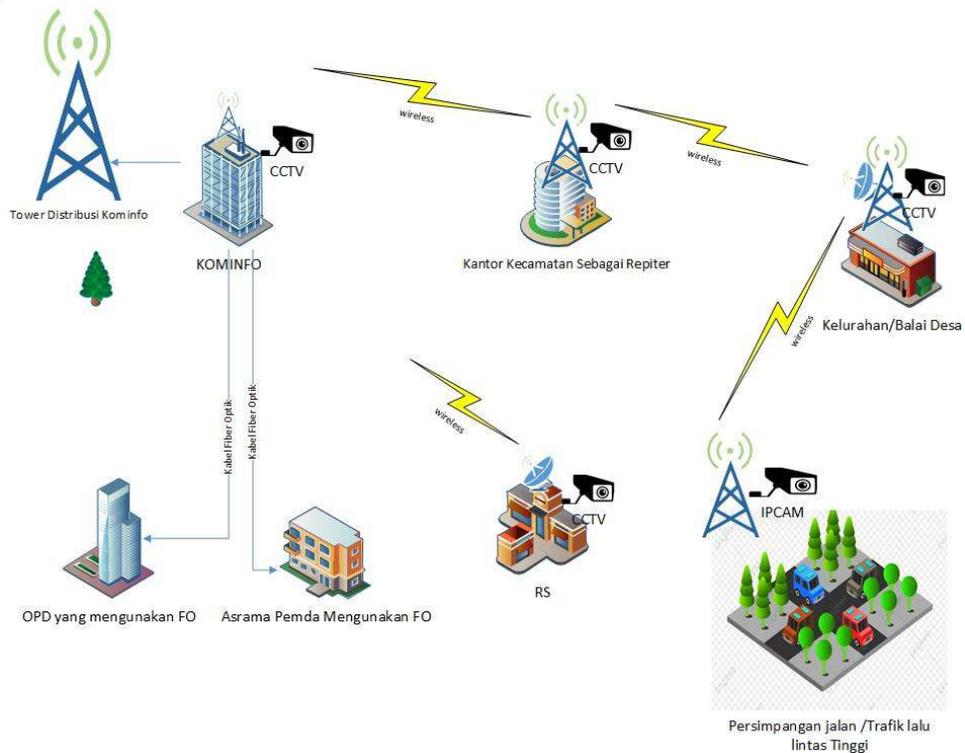
Gambar 88 Topologi Jaringan Diskominfo Menuju SKPD Lain

Opsi selain menggunakan Kabel dapat juga menggunakan Wireless jika terdapat OPD yang letaknya jauh dari Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika. Opsi Wireless ini digunakan untuk OPD seperti Kecamatan dan Balai Desa karena letaknya saling berjauhan. Opsi *wireless* juga digunakan untuk pemantauan CCTV maupun IPCAM di lingkungan Publik. Untuk Opsi ini digambarkan di bawah ini.



Gambar 89 Topologi Diskominfo dengan Kecamatan dan Balai Desa

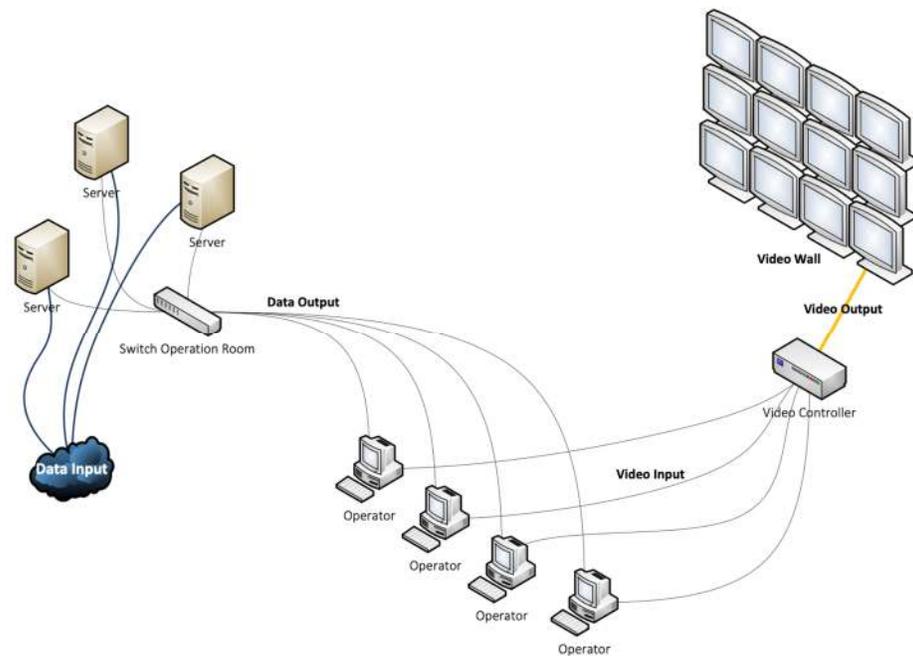
Dan ini merupakan Rincian detail dari jaringan Internet, CCTV dan IPCAM.



Gambar 90 Topologi Jaringan Intranet Antar SKPD

7.4.3 Arsitektur Command Center

Command Center atau pusat komando adalah suatu ruangan sebagai pusat visualisasi dan integrasi data yang diperoleh dari online maupun offline, internal maupun external dan disajikan secara bersamaan pada sebuah layar lebar. Fungsi dari *command center* adalah sebagai monitoring, pusat komando dan komunikasi serta koordinasi. Untuk memenuhi fungsi tersebut sebuah *command center* setidaknya harus memiliki fasilitas ruang rapat, ruang *command center*, dan ruang server.



Gambar 91 Skema Usulan Command Center

Dalam pembuatan DED atau *Detail Engineering Design* Command Center meliputi tahapan diantaranya sebagai berikut:

- Design yang berfokus pada design perangkat pendukung dan interior.
- Spesifikasi Teknis mencakup perangkat pendukung, interior ruang command center dan aplikasi command center.
- Rencana Anggaran, didalamnya perlu menghitung RAB secara tepat, bisa dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan kebutuhan.

Pada usulan Command Center akan difokuskan pada spesifikasi teknis yang akan dibagi ke dalam 4 (empat) kategori yaitu Standar Ruangan, Standar Peralatan, Standar Jaringan dan pengkabelan, dan yang terakhir Standar Sistem Operasi dan Aplikasi. Secara mendetail terkait dengan 4 (empat) kategori tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Standar Ruangan yang digunakan

Dalam kategori standar ruangan terdapat 7 hal penting yang menjadi perhatian dalam pembangunan *command center*. Berikut adalah tujuh poin dalam standar ruangan :

- **Pemilihan lokasi** command center sebaiknya berada pada kompleks pemerintahan, dapat menempati gedung tersendiri atau menjadi bagian dari gedung lain. Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah diutamakan berada dekat dengan kantor **Pejabat Pengambil Keputusan**, aman dari potensi bencana alam dan gangguan keamanan, memiliki luas bangunan / ruangan yang memadai, tersedia jaringan telekomunikasi dan sumber daya listrik yang baik serta backup, dan yang tidak kalah penting adalah memiliki aksesibilitas yang baik.
- **Konsep Interior dan Estetika** gedung atau ruangan command center dapat dirancang dengan konsep interior dan estetika yang sesuai dengan selera atau mengandung muatan local selama masih memenuhi dimensi minimum, pembagian area serta spesifikasi teknis yang akan dibahas pada poin lainnya.
- **Pembagian Ruangan** bertujuan untuk membagi ruangan

berdasarkan fungsi. Ruangan penting yang harus ada adalah Area Penerimaan Tamu, Area Peninjauan, Area Utama, Area Rapat Pimpinan, Ruang Peralatan, Area Pantry dan Toilet

- **Dimensi dan Spesifikasi Teknis Ruangan**

- **Area Penerimaan Tamu.** Luas area disesuaikan dengan ketersediaan dan kebutuhan. Tersedia counter penerima tamu yang dilengkapi unit komputer yang terhubung dengan jaringan, tersedia kursi tamu dan alat peraga visual
- **Area Peninjauan.** Luas area menyesuaikan dan memiliki visibilitas yang baik ke area utama dengan pembatas kaca. Terdapat alat peraga visual dan system tata suara yang terhubung ke Area Utama. Jika memungkinkan dilengkapi dengan kursi dengan peletakan berundak
- **Area Utama.** Dimensi area utama jika memungkinkan memiliki luas ruangan 6m x 8m dengan ketinggian dari raised floor setinggi 3m dan jarak operator ke visual sector utama 2m. Dilengkapi peralatan pendukung seperti meja pengendali, meja operator peralatan visual, video converence dan lainnya
- **Area Rapat Pimpinan.** Memiliki visibilitas yang baik ke peralatan visualisasi pada ruang utama. Dilengkapi perangkat pendukung rapat seperti video converence dan lainnya
- **Ruang peralatan.** Terletak tidak jauh dari area utama dengan ketinggian raised floor minimal 20cm, memiliki drop ceiling untuk instalasi kabel, luas area menyesuaikan dengan tetap memperhatikan penempatan perangkat dan mobilisasi perangkat, dilengkapi dengan electronic access control dan APAR
- **Area Pantry.** Pada area pantry memiliki jaringan pipa air bersih dan kotor dan jaringannya tidak melalui area utama. Dilengkapi dengan lemari penyimpanan, cabinet, dan *wash basin*, meja dan dispenser air dingin, terhubung dengan sistem tata suara ke area utama dan dilengkapi dengan APAR.
- **Toilet.** Terdapat fasilitas closet dan urinoir, serta dilengkapi wash basin, shower dan terdapat sistem tata suara yang terhubung ke area utama

- **Ergonomi.** Secara umum dari sisi ergonomi standar yang digunakan adalah TIA-942. Diantaranya adalah penggunaan raised floor, backwall dan struktur peralatan visualisasi, workdesk dan perangkat lain yang sesuai dengan kebutuhan.

- **Sistem Pendingin Ruangan.** Pendinginan ruangan command center dapat dilakukan dengan beberapa model yaitu dengan model sentralisasi atau dengan menggunakan split/multi-split system. Jika menggunakan split unit, maka perlu diperhatikan potensi kebocoran saluran pembuangan yang kemungkinan berdampak pada perangkat elektronik.

- **Sistem Keamanan.** Cakupan sistem keamanan diantaranya adalah Pengamanan Akses Fisik yang disarankan menggunakan electronic access control pada pintu masuk area utama, seperti PIN, Biometric Access, atau Contactless Access Card. Instalasi CCTV sebagai pengamanan dan pemantauan. Dan perangkat keamanan lainnya seperti Pengaman Potensi Lonjakan Arus Listrik, Antisipasi Bahaya Kebakaran seperti smoke detector dan APAR

b. Standar Peralatan

Standar peralatan memiliki 9 poin kategori diantaranya adalah:

- **Server dan Rack System.** Server yang digunakan pada command center adalah server untuk media / streaming server, video analytics server dan sms gateway server, berbeda dengan server aplikasi dan database.
 - **Peralatan Telekomunikasi dan Jaringan.** Dalam hal ini perangkat umum yang digunakan diantaranya adalah sambungan Telepon, Radio Komunikasi, SMS Gateway. Perangkat jaringan yang digunakan meliputi Modem, Routerboard, Firewall dan Switch dan perangkat pendukung jaringan lain sesuai dengan kebutuhan.
 - **Workstation.** Penggunaan workstation terbagi menjadi 3 yaitu workstation operator, pengendali dan CCTV dimana spesifikasi masing masing berbeda secara kebutuhan.
 - **Peralatan Visualisasi.** Peralatan visualisasi merupakan perangkat utama sebuah command center. Secara umum, terdapat 4 teknologi yang tersedia yaitu LCD Video Wall, Direct View LED Video Wall, Blended Projection System, Rear Project Video Wall. Dimana peletakan untuk setiap perangkat diatur sesuai dengan fungsi masing masing.
 - **Peralatan Video Conference.** Salah satu bentuk komunikasi command center adalah dalam bentuk audio visul. Sehingga peralatan video conference seperti Tele-presence Video Conferencing, Room-base Video Conferencing, dan Desktop/ Mobile Video Conferencing system.
 - **Catu Daya dan UPS.** Kelistrikan merupakan salah satu faktor penting dalam operasional sebuah command center. Yang diperlukan adalah pasokan listrik dengan kapasitas yang cukup, voltase yang stabil dan ketersediaan yang terjamin. Lebih teknis dalam hal ini perlu mempersiapkan panel distribusi, voltage stabilizer, UPS dan lainnya.
 - **Peralatan Tracking.** Peralatan ini berfungsi sebagai pelaporan posisi dari sumberdaya yang digunakan dalam operasional command center.
 - **Peralatan dan Periferal Pendukung.** Peralatan pendukung yang digunakan untuk mendukung kelancaran operasional menyesuaikan kebutuhan, seperti misalnya layer peraga, headset, pencetak jaringan all- in-one, dan lainnya.
- c. Standar Jaringan dan Pengkabelan
- Dalam konteks jaringan dan pengkabelan terdapat tiga poin utama yang menjadi fokus dalam hal jaringan dan pengkabelan
- **Diagram Jaringan** yang terdiri dari jaringan LAN/WAN, Jaringan Video Signaling.
 - **Standar penggunaan Kabel, Konektor dan Terminal Kelistrikan.** Penggunaan kabel, konektor dan terminal yang telah ditentukan akan mendukung kualitas command center yang dibangun dengan mempertimbangkan kapasitas dan kualitas setiap perangkat.
 - **Panduan Instalasi dan Labelling.** Salah satu poin yang perlu diperhatikan adalah dalam melakukan instalasi yang berkaitan dengan listrik, data, sinyal video, radio komunikasi, sambungan telepon dan system audio dikelompokkan terpisah untuk menghindari interferensi.
- d. Standar Sistem Operasi dan Aplikasi
- Operasional sebuah *command center* harus dilengkapi dengan aplikasi yang bertujuan untuk membantu dalam menjalankan tugas pelayanan dan penanganan insiden yang dilaporkan oleh

masyarakat. Aplikasi yang ada dapat dikategorikan dalam beberapa fungsi seperti misalnya, Aplikasi *Dispatching System*, Aplikasi *Incident Monitoring System*, Aplikasi *Quick Response*, dan lain sebagainya.

7.4.4 Arsitektur Disaster Recovery Planning (DRP)

Penambahan *Disaster Recovery Center* (DRC). Tujuan dari penerapan DRC adalah sebagai penyimpanan back up terhadap data dan informasi yang ada pada server utama. Sehingga jika terjadi masalah pada server utama, maka dapat diminimalisir kehilangan data dan informasi yang ada serta dapat digunakan untuk meningkatkan ketersediaan server, sehingga operasional sistem masih dapat berjalan dengan menggunakan cadangan yang ada pada DRC. Dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia, penerapan DRC dapat dilakukan dengan membangun DRC fisik yang lokasinya terpisah dari server utama ataupun dengan Kerja sama dengan pihak ketiga atau menyewa Cloud DRC. Koneksi DRC juga dihubungkan dengan jaringan intra pemerintah agar dapat menunjang fungsi *back-up* dari server utama.

7.5 Analisis Gap

Analisis gap dibuat dalam bentuk tabel dengan komponen arsitektur ke depan (to-be) yang menjelaskan kebutuhan komponen-komponen infrastruktur baru yang mendukung rencana target arsitektur yang telah ditetapkan.

Tabel 39 Pemetaan analisis gap infrastruktur Kabupaten Way Kanan

No	Infrastruktur	To-be
1	Komputasi Awan	Infrastruktur komputasi awan diharapkan diimplementasikan secara privat dengan konsep pengembangan virtualisasi server yang dikelola internal Diskominfo Way Kanan
		Implementasi komputasi awan kedepan mengadopsi pendekatan opportunistik untuk memenuhi kebutuhan layanan aplikasi baru dan yang sudah ada dengan mengacu pada kemudahan proses integrasi, kebutuhan anggaran, keamanan dan privasi.
		Pada proses pengelolaan data yang ada di Diskominfo Way Kanan disimpan secara terpusat pada satu server berdasarkan layanan yang disediakan komputasi awan.
2	Perangkat Lunak Platform	Perlunya pengembangan perangkat lunak yang mendukung tujuan dan sasaran Diskominfo Way Kanan dengan mengacu pada kebutuhan pendukung pengaplikasiannya.
		Melakukan pengecekan pada perangkat lunak yang berlisensi secara berkala.
3	Perangkat Keras Server	Perlunya peningkatan perangkat keras server yang mendukung tujuan dan sasaran Diskominfo Way Kanan yang mengacu pada dukungan kebutuhan.
4	Perangkat Keras Media Penyimpanan	Ke depannya diperlukan peninjauan terkait kebutuhan perangkat keras penyimpanan yang cukup besar (<i>terabyte</i> atau <i>petabyte</i>).

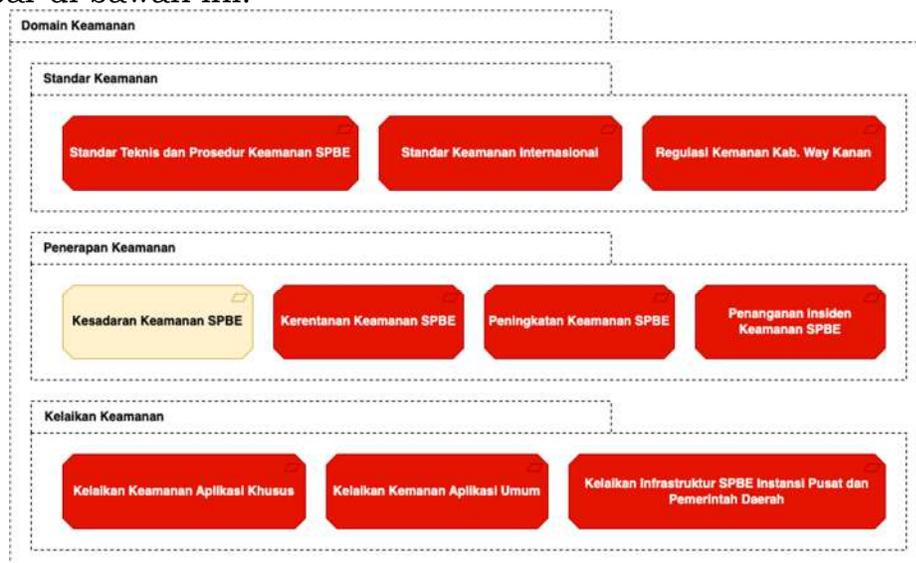
5	Perangkat Keras Jaringan	Peningkatan performansi dengan penambahan perangkat keras jaringan seiring dengan tujuan dan sasaran Diskominfo Way Kanan.
6	Perangkat Keras Keamanan	Melakukan revitalisasi sesuai dengan penerapan standar keamanan pada infrastruktur mengacu pada domain arsitektur keamanan Diskominfo Way Kanan.
7	Perangkat Keras Periferal	Optimalisasi kebutuhan perangkat periferal sebagai kebutuhan pendukung dalam ketersediaan dalam interaksi terhadap layanan aplikasi yang digunakan oleh pengguna agar lebih maksimal.
8	Penghubung Layanan Way Kanan	Penerapan teknologi sistem penghubung layanan yang mengacu pada kerangka kerja standar SOA (<i>Service Oriented Architecture</i>) dengan menggunakan teknologi <i>Enterprise service BUS (ESB)</i> .
9	Jaringan Intra Way Kanan	Peningkatan Bandwith jaringan internet
		Peningkatan dengan menggunakan kabel fiber optik untuk mengurangi loss hingga 0% dan latensi sehingga bandwith bisa tersampaikan dengan baik dibanding dengan kabel tembaga.
10	Fasilitas Komputasi	Peningkatan terkait kebutuhan fasilitas komputasi sehingga adanya pemrosesan data yang terpusat (komputasi terpusat) dimana semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di dalam suatu lokasi yang ditujukan untuk melayani semua pengguna data.

BAB VIII ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE

8.1 Pemetaan Keamanan SPBE

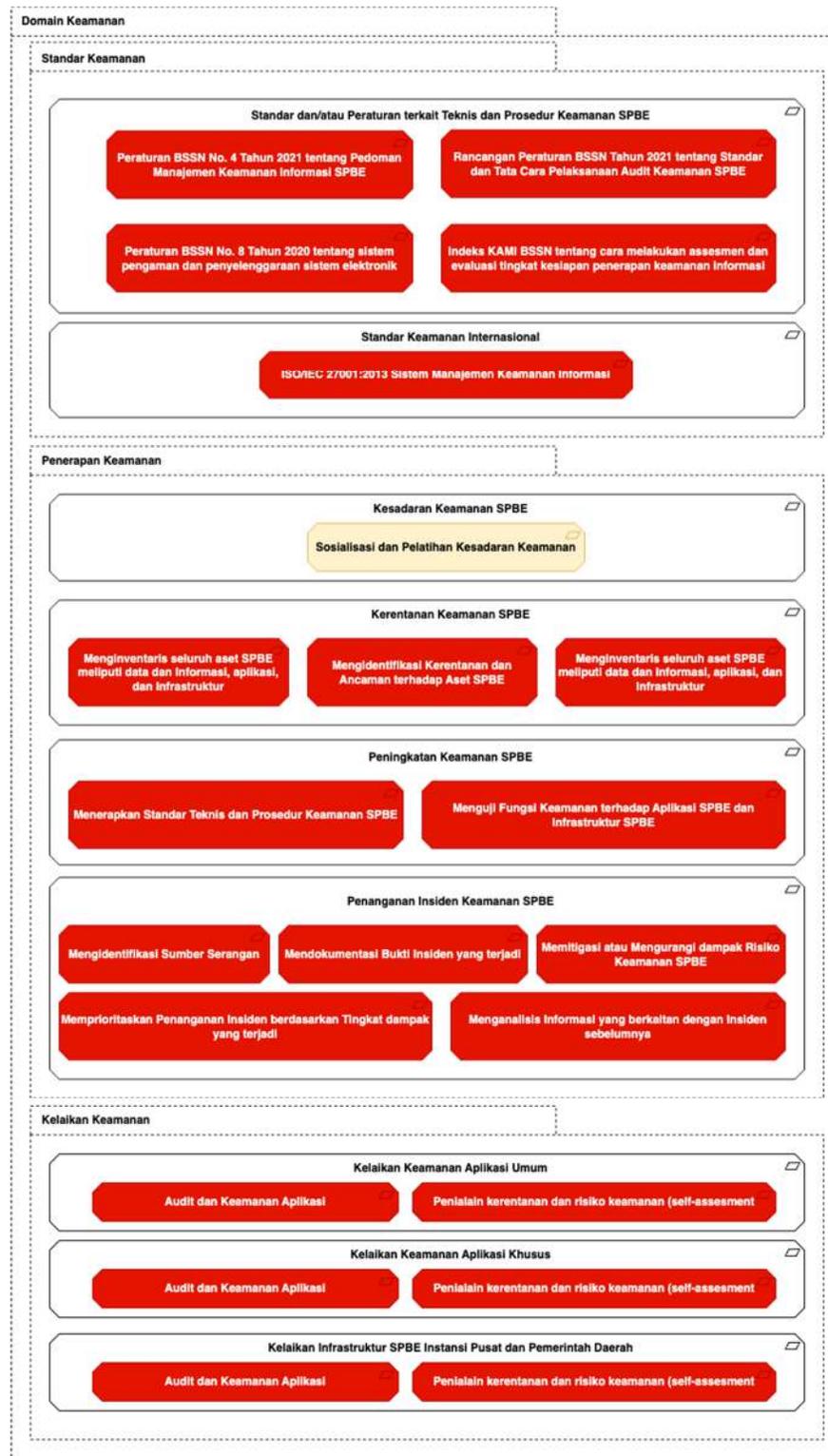
Terdapat dua tingkatan dalam pemetaan terhadap arsitektur keamanan milik Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Pertama, domain keamanan yang berisi uraian standar dan atau kebijakan keamanan, penerapan keamanan serta kelaikan keamanan. Kedua, area keamanan yang meliputi keamanan data dan informasi, keamanan aplikasi SPBE, keamanan sistem penghubung layanan, keamanan jaringan intra, dan keamanan pusat data. Diketahui bahwa, kedua tingkatan tersebut belum dikelola dengan baik oleh pihak pemerintahan setempat. Hal tersebut ditandai dengan belum adanya uraian standar dan atau kebijakan keamanan untuk mengatur pengelolaan serta fungsi-fungsi keamanan SPBE Pemerintahan Way Kanan.

Berdasarkan kondisi saat ini (existing) dari arsitektur keamanan SPBE pada Pemerintahan Way Kanan. yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya maka selanjutnya akan dilakukan pemetaan ke kondisi yang diharapkan (to-be). Pemetaan dari tiap tingkat arsitektur keamanan yaitu domain dan area keamanan ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 92 Kondisi Eksisting Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Way Kanan

Gambar diatas merupakan kondisi tingkat 1 (Domain Keamanan) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Warna kuning menunjukkan dokumen serta kegiatan sudah ada namun belum sepenuhnya diterapkan. Warna merah sama sekali belum ada dokumen atau belum ada kegiatan tentang domain arsitektur keamanan. Uraian detail dapat dilihat pada Gambar diatas dan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.



Gambar 93 Pemetaan Domain Keamanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan

8.1.1 Standar dan atau Kebijakan Keamanan

Empat standar nasional yang menjadi acuan diantaranya yaitu: Standar/kebijakan keamanan SPBE merupakan persyaratan minimal terkait arsitektur keamanan dari SPBE. Saat ini terdapat lima kebijakan keamanan yang dijadikan acuan dalam melakukan pemetaan terkait arsitektur keamanan pada SPBE Kabupaten Way Kanan. Empat diantaranya yaitu standar nasional dan satu standar internasional Standar Keamanan memastikan penerapan fungsi keamanan pada data dan informasi, infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE. Standar keamanan yang dapat diacu meliputi:

- Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Standar ini merupakan standar nasional yang mengatur

tentang bagaimana proses manajemen keamanan informasi SPBE, seperti aspek apa saja yang perlu dipenuhi dari tiap standar teknis keamanan dan prosedur apa saja yang harus diterapkan untuk dapat memenuhi tiap aspek standar teknis keamanan.

- Rancangan Peraturan BSSN tahun 2021 Standar nasional yang mengatur tentang batasan minimal bagi Regulator dan Auditor guna membantu dalam proses pendaftaran Auditor terakreditasi, pelaksanaan Audit serta prosedur yang harus dilaksanakan atau diterapkan dalam rangka pencapaian tujuan Audit
- Indeks KAMI Yakni suatu aplikasi yang digunakan untuk memeriksa seberapa matang kesiapan SPBE yang telah di buat, memberikan penilaian pada kesiapan SPBE, dan bagaimana tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu SPBE.
- Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 Standar ini merupakan standar nasional mengelola ruang lingkup pengadaan sistem elektronik, proses penilaian sistem elektronik, serta penyelenggaraan sistem manajemen pengamanan informasi.
- ISO/IEC 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi Standar internasional yang telah ditetapkan sebagai SNI yang mengatur tentang kepemimpinan, perencanaan, organisasi, sumber daya, manajemen risiko, audit, perbaikan berkelanjutan, dan lain sebagainya

8.1.2 Penerapan Keamanan

Bagian penerapan keamanan berfokus pada dua hal, yaitu edukasi kesadaran keamanan akan SPBE dan pengetahuan akan kerentanan keamanan SPBE. Perlu dilakukan kegiatan sosialisasi mengenai standar teknis dan prosedur keamanan SPBE juga kegiatan Pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi untuk keamanan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi dan keamanan aplikasi, serta melakukan bimbingan teknis mengenai standar Keamanan SPBE. Kedua hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran keamanan tentang SPBE dari berbagai lini dan mengurangi kerentanan- kerentanan yang dapat timbul yang mempengaruhi tingkat keamanan dari infrastruktur SPBE. Peningkatan keamanan SPBE harus dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan keamanan. Terdapat 3 kegiatan yang perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerentanan. Kegiatan tersebut meliputi:

- Melakukan inventarisasi atas seluruh data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur SPBE.
- Identifikasi ancaman-ancaman yang dapat mengancam keamanan dari aset SPBE.
- Melakukan pengukuran tingkat risiko yang ditimbulkan dari tiap kerentanan dan ancaman yang ada.

Peningkatan keamanan wajib dilaksanakan melalui kegiatan penerapan standar teknis dan prosedur keamanan dan pengujian kontrol keamanan yang telah diterapkan terhadap aplikasi dan infrastruktur. Apabila terjadi masalah terkait keamanan maka kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk menangani insiden keamanan tersebut yaitu:

1. Identifikasi sumber serangan.
2. Analisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya.
3. Penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi.
4. Dokumentasi bukti insiden yang terjadi.
5. Mitigasi atau pengurangan dampak risiko keamanan SPBE.
6. Penghapusan konten yang bersifat destruktif dan/atau terkait *malware*.

8.1.3 Uji Kelaikan Keamanan

Pada kelaikan keamanan dilakukan melalui proses audit dan keamanan informasi, dan penilaian kerentanan dan risiko keamanan terhadap 3 bagian, yaitu terhadap aplikasi khusus, aplikasi umum, dan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD). Proses pelaksanaan kelaikan keamanan SPBE dilakukan secara mandiri di lingkungan terkait, sehingga dihasilkan daftar Aplikasi dan infrastruktur SPBE yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan dan juga verifikasi di tingkat nasional sehingga kelaikan keamanan dari seluruh aplikasi, data, layanan, dan infrastruktur dapat dipastikan.

Audit dan keamanan informasi perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhan terkait pada keamanan aplikasi dan keamanan jaringan infrastruktur SPBE. Proses audit dan keamanan informasi dilakukan dengan mendefinisikan metrik, parameter dan proses pengukuran kinerja pengelolaan keamanan informasi yang mencakup mekanisme, waktu pengukuran, pelaksanaan, pemantauan dan eskalasi pelaporan. Dengan adanya audit dan keamanan informasi ini diharapkan agar dapat menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar keamanan yang telah ditetapkan.

Proses penilaian mandiri (*self assessment*) pada pelaksanaan kelaikan keamanan dilakukan oleh pihak independen setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) yang menjadi penggerak aplikasi umum, aplikasi khusus, dan infrastruktur SPBE nasional dengan cakupan keseluruhan aset informasi, kebijakan dan prosedur keamanan yang telah ditetapkan. Evaluasi penilaian mandiri (*self assessment*) selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap tingkat kepatuhan, konsistensi, dan efektivitas penerapan keamanan sebagai tahapan untuk mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber/BSSN.

8.1.4 Pemetaan Area Keamanan Data dan Aplikasi

a. Keamanan Data dan Informasi

Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Data dan informasi yang tercakup dalam sistem SPBE tentunya harus memenuhi beberapa aspek yang diantaranya:

- Kerahasiaan, aspek ini diterapkan melalui penetapan klasifikasi informasi, enkripsi dengan sistem kriptografi, dan menerapkan pembatasan akses terhadap data dan informasi sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang telah

ditetapkan.

- Keaslian, aspek ini diterapkan melalui penyediaan mekanisme verifikasi, penyediaan mekanisme validasi, dan penetapan sistem *hash function*.
- Keutuhan, aspek ini diterapkan melalui penetapan pendeteksian modifikasi dan penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi.
- Kenirsangkalan, penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan penjaminan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik melalui sertifikat elektronik.
- Ketersediaan, penerapan sistem pencadangan secara berkala, membuat perencanaan untuk menjamin data dan informasi dapat selalu diakses, serta menerapkan sistem pemulihan.

b. Keamanan Aplikasi SPBE

Aplikasi SPBE yang ada pada Pemerintahan Kabupaten Way Kanan terdapat dua kategori yaitu aplikasi berbasis web dan aplikasi berbasis mobile. Berikut ini merupakan Fungsi-fungsi yang harus tercakup dalam kedua kategori aplikasi tersebut sebagai berikut:

A. Keamanan Aplikasi Berbasis Web

1. **Autentikasi**, fungsi autentikasi dapat diterapkan dengan menggunakan prosedur:

- Menggunakan manajemen kata sandi untuk proses autentikasi
- Menerapkan verifikasi kata sandi pada sisi server
- Mengatur jumlah karakter, kombinasi jenis karakter, dan masa berlaku dari kata sandi
- Mengatur jumlah maksimum kesalahan dalam pemasukan kata sandi
- Mengatur mekanisme pemulihan kata sandi
- Menjaga kerahasiaan kata sandi yang disimpan melalui mekanisme kriptografi
- Menggunakan jalur komunikasi yang diamankan untuk proses autentikasi.

2. **Manajemen sesi**, Fungsi manajemen aksi dapat diterapkan dengan menggunakan beberapa prosedur seperti:

- Menggunakan pengendali sesi untuk proses manajemen sesi
- Menggunakan pengendali sesi yang disediakan oleh kerangka kerja aplikasi
- Mengatur pembuatan dan keacakan token sesi yang dihasilkan oleh pengendali sesi
- Mengatur kondisi dan jangka waktu habis sesi
- Validasi dan pencantuman session id
- Pelindungan terhadap lokasi dan pengiriman token untuk sesi terautentikasi
- Pelindungan terhadap duplikasi dan mekanisme persetujuan pengguna.

3. **Persyaratan kontrol**, fungsi persyaratan kontrol dapat diterapkan dengan menggunakan prosedur:

- Menetapkan otorisasi pengguna untuk membatasi

kontrol akses

- Mengatur peringatan terhadap bahaya serangan otomatis apabila terjadi akses yang bersamaan atau akses yang terus-menerus pada fungsi.
 - Mengatur antarmuka pada sisi administrator
 - Mengatur verifikasi kebenaran token ketika mengakses data dan informasi yang dikecualikan.
4. **Validasi input**, fungsi validasi input dapat diterapkan dengan menggunakan prosedur:
- Menerapkan fungsi validasi input pada sisi server
 - Menerapkan mekanisme penolakan input jika terjadi kesalahan validasi
 - Memastikan runtime environment aplikasi tidak rentan terhadap serangan validasi input
 - Melakukan validasi positif pada seluruh input
 - Melakukan filter terhadap data yang tidak dipercaya
 - Menggunakan fitur kode dinamis
 - Melakukan perlindungan terhadap akses yang mengandung konten skrip
 - Melakukan perlindungan dari serangan injeksi basis data.
5. **Kriptografi**, fungsi kriptografi dapat diterapkan dengan menggunakan prosedur:
- Menggunakan algoritma kriptografi, modul kriptografi, protokol kriptografi, dan kunci kriptografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Melakukan autentikasi data yang dienkripsi
 - Menerapkan manajemen kunci kriptografi
 - Membuat angka acak yang menggunakan generator angka acak kriptografi.
6. **Penanganan error**, fungsi penanganan error dapat diterapkan dengan menggunakan prosedur:
- Mengatur konten pesan yang ditampilkan ketika terjadi kesalahan
 - Menggunakan metode penanganan eror untuk mencegah kesalahan terprediksi dan tidak terduga serta menangani seluruh pengecualian yang tidak ditangani
 - Melakukan sinkronisasi sumber waktu sesuai dengan zona waktu dan waktu yang benar
7. **Pencatatan log**, fungsi pencatatan log dapat diterapkan dengan menggunakan prosedur:
- Tidak mencantumkan informasi yang dikecualikan dalam pencatatan log
 - Mengatur cakupan log yang dicatat untuk mendukung upaya penyelidikan ketika terjadi insiden
 - Mengatur perlindungan log aplikasi dari akses dan modifikasi yang tidak sah

- Melakukan enkripsi pada data yang disimpan untuk mencegah injeksi log
8. **Proteksi data**, fungsi proteksi data dapat diterapkan dengan menggunakan prosedur:
- Melakukan identifikasi dan penyimpanan salinan informasi yang dikecualikan
 - Melakukan perlindungan dari akses yang tidak sah terhadap informasi yang dikecualikan yang disimpan sementara dalam aplikasi
 - Melakukan pertukaran, penghapusan, dan audit informasi yang dikecualikan
 - Melakukan penentuan jumlah parameter
 - Memastikan data disimpan dengan aman
 - Menentukan metode untuk menghapus dan mengekspor data sesuai permintaan pengguna
 - Membersihkan memori setelah tidak diperlukan
9. **Keamanan komunikasi**, fungsi keamanan komunikasi dapat diterapkan dengan menggunakan prosedur:
- Menggunakan komunikasi terenkripsi
 - Mengatur koneksi masuk dan keluar yang aman dan terenkripsi dari sisi pengguna
 - Mengatur jenis algoritma yang digunakan dan alat pengujiannya
 - Mengatur aktivasi dan konfigurasi sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
10. **Pengendalian kode berbahaya**, fungsi pengendalian kode berbahaya dapat diterapkan dengan menggunakan prosedur:
- Menggunakan analisis kode dalam kontrol kode berbahaya
 - Memastikan kode sumber aplikasi dan pustaka tidak mengandung kode berbahaya dan fungsionalitas lain yang tidak diinginkan
 - Mengatur izin terkait fitur atau sensor terkait privasi
 - Mengatur perlindungan integritas; dan e. mengatur mekanisme fitur pembaruan.
11. **Logika bisnis**, fungsi logika bisnis dapat diterapkan dengan menggunakan prosedur:
- Memproses alur logika bisnis dalam urutan langkah dan waktu yang realistis
 - Memastikan logika bisnis memiliki batasan dan validasi
 - Memonitor aktivitas yang tidak biasa
 - Membantu dalam kontrol anti otomatisasi
 - Memberikan peringatan ketika terjadi serangan otomatis atau aktivitas yang tidak biasa.
12. **File**, fungsi file dapat diterapkan dengan menggunakan prosedur:
- Mengatur jumlah file untuk setiap pengguna dan

- kuota ukuran file yang diunggah
 - Melakukan validasi file sesuai dengan tipe konten yang diharapkan
 - Melakukan pelindungan terhadap metadata input dan metadata file
 - Melakukan pemindaian file yang diperoleh dari sumber yang tidak dipercaya
 - Melakukan konfigurasi server untuk mengunduh file sesuai ekstensi yang ditentukan.
13. **Keamanan API dan *web service***, fungsi keamanan API dan *web service* dapat diterapkan dengan menggunakan prosedur:
- Melakukan konfigurasi layanan web
 - Memverifikasi uniform resource identifier API tidak menampilkan informasi yang berpotensi sebagai celah keamanan
 - Membuat keputusan otorisasi
 - Menampilkan metode RESTful hypertext transfer protocol apabila input pengguna dinyatakan valid
 - Menggunakan validasi skema dan verifikasi sebelum menerima input
 - Menggunakan metode pelindungan layanan berbasis web
 - Menerapkan kontrol antiotomatisasi.
14. **Keamanan konfigurasi**, fungsi keamanan konfigurasi dapat diterapkan dengan menggunakan prosedur:
- Mengonfigurasi server sesuai rekomendasi server aplikasi dan kerangka kerja aplikasi yang digunakan
 - Mendokumentasi, menyalin konfigurasi, dan semua dependensi
 - Menghapus fitur, dokumentasi, sampel, dan konfigurasi yang tidak diperlukan
 - Memvalidasi integritas aset jika aset aplikasi diakses secara eksternal
 - Menggunakan respons aplikasi dan konten yang aman.

B. Keamanan Aplikasi Berbasis *Mobile*

1. **Penyimpanan Data dan persyaratan privasi**, fungsi penyimpanan data dan persyaratan privasi dapat diterapkan dengan menggunakan prosedur:
- Menyimpan seluruh data dan informasi yang dikecualikan hanya dalam fasilitas penyimpanan kredensial sistem
 - Membatasi pertukaran data dan informasi yang dikecualikan dengan third party
 - Menonaktifkan cache keyboard pada saat memasukkan data dan informasi yang dikecualikan
 - Melindungi informasi yang dikecualikan saat terjadi inter process communication
 - Melindungi data dan informasi yang dikecualikan yang dimasukkan melalui

antarmuka pengguna.

2. **Kriptografi**, fungsi kriptografi dapat diterapkan dengan menggunakan prosedur:
 - Menghindari penggunaan kriptografi simetrik dengan hardcoded key
 - Mengimplementasikan metode kriptografi yang sudah teruji sesuai kebutuhan
 - Menghindari penggunaan protokol kriptografi atau algoritme kriptografi yang obsolete
 - Menghindari penggunaan kunci kriptografi yang sama
 - Menggunakan pembangkit kunci acak yang memenuhi kriteria keacakan kunci.
3. **Autentikasi dan manajemen sesi**, fungsi Autentikasi dan manajemen sesi dapat diterapkan dengan menggunakan prosedur:
 - Menerapkan autentikasi pada remote endpoint terhadap aplikasi yang menyediakan akses pengguna untuk layanan jarak jauh
 - Menggunakan session identifier yang acak tanpa perlu mengirimkan kredensial pengguna apabila menggunakan stateful manajemen sesi
 - Memastikan server menyediakan token yang telah ditandatangani menggunakan algoritme yang aman apabila menggunakan autentikasi stateless berbasis token
 - Memastikan remote endpoint memutus sesi yang ada saat pengguna log out
 - Menerapkan pengaturan sandi pada remote endpoint
 - Membatasi jumlah percobaan log in pada remote endpoint
 - Menentukan masa berlaku sesi dan masa kedaluwarsa token pada remote endpoint
 - Melakukan otorisasi pada remote endpoint.
4. **Komunikasi Jaringan**, fungsi komunikasi jaringan dapat diterapkan dengan menggunakan prosedur:
 - Menerapkan secure socket layer atau transport layer security yang tidak obsolete secara konsisten
 - Memverifikasi sertifikat remote endpoint.
5. **Interaksi Platform**, fungsi interaksi platform dapat diterapkan dengan menggunakan prosedur:
 - Memastikan aplikasi hanya meminta akses terhadap sumber daya yang diperlukan
 - Melakukan validasi terhadap seluruh input dari sumber eksternal dan pengguna
 - Menghindari pengiriman fungsionalitas sensitif melalui skema custom uniform resource locator dan fasilitas inter process communication
 - Menghindari penggunaan JavaScript dalam WebView
 - Menggunakan protokol hypertext transfer protocol secure pada WebView
 - Mengimplementasikan penggunaan serialisasi API yang aman.
6. **Kualitas kode dan pengaturan build**, fungsi kualitas kode

dan pengaturan build dapat diterapkan dengan menggunakan prosedur:

- Menandatangani aplikasi dengan sertifikat yang valid
- Memastikan aplikasi dalam mode rilis
- Menghapus simbol debugging dari native binary
- Menghapus kode debugging dan kode bantuan pengembang
- Mengidentifikasi kelemahan seluruh komponen *third party*
- Menentukan mekanisme penanganan eror
- Mengelola memori secara aman
- Mengaktifkan fitur keamanan yang tersedia.

7. **Ketahanan**, fungsi ketahanan dapat diterapkan dengan menggunakan prosedur:

- Mencegah aplikasi berjalan pada perangkat yang telah dilakukan modifikasi yang tidak sah
- Mendeteksi dan merespons debugger
- Cencegah execuTabel file melakukan perubahan pada sumber daya perangkat
- Mendeteksi dan merespons keberadaan perangkat reverse engineering
- Mencegah aplikasi berjalan dalam emulator
- Mendeteksi perubahan kode dan data di ruang memori
- Menerapkan fungsi device binding dengan menggunakan property unik pada perangkat
- Melindungi seluruh file dan library pada aplikasi; dan i. menerapkan metode obfuscation

1. **Teknis Keamanan Sistem penghubung Layanan**

Standar teknis keamanan sistem penghubung layanan merupakan seperangkat aturan dan persyaratan yang mengatur cara kerja sistem penghubung layanan dari segi teknis, termasuk keamanan informasi didalamnya. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem penghubung layanan bekerja dengan baik serta menjamin integritas dan kerahasiaan informasi yang dikirimkan melalui sistem tersebut. Standar teknis keamanan sistem penghubung layanan ini dapat berupa pedoman, spesifikasi teknis, atau garis-garis besar yang mengatur cara kerja sistem penghubung layanan. berikut merupakan teknis- teknisnya:

1. Keamanan Interoperabilitas Data dan Informasi: Memiliki fungsi agar perangkat yang dimiliki nantinya mampu bertukar dan menginterpretasi data yang dibagikan satu sama lain untuk bekerja sama sesuai lintas batasan organisasional dengan aman.
2. Kontrol Sistem Integrasi: Merupakan kemampuan kontrol sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan *software* aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional.
3. Kontrol Perangkat Integrator: Memiliki fungsi agar perangkat-perangkat yang dimiliki dapat bekerja dengan berbagai jenis *software*, *hardware*, dan *storage product*

untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam memberikan layanan kepada pengguna,

4. Keamanan API dan *Web Service*: Memiliki fungsi untuk menjaga proses pertukaran data antara dua komponen perangkat lunak untuk saling berkomunikasi menggunakan serangkaian definisi dan protokol.
5. Keamanan Migrasi Data: Memiliki fungsi untuk menjaga proses seleksi, penyiapan, ekstraksi dan perubahan data secara permanen untuk mentransfer data dari satu sistem ke sistem lain yang umumnya bersamaan dengan mengganti *storage*, database atau aplikasi.

2. Keamanan Jaringan Intra

Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD). Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah (IPPD) agar keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah (IPPD) dapat terjaga.

Standar teknis keamanan Jaringan Intra diterapkan pada 2 area, yaitu Jaringan Intra Pemerintah, dan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD). Standar ini diterapkan untuk dapat memenuhi aspek administrasi keamanan Jaringan Intra, kontrol akses dan autentikasi, persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra, kontrol keamanan *gateway*, kontrol keamanan *access point* pada jaringan nirkabel, kontrol konfigurasi *access point* pada jaringan nirkabel.

1. Aspek Administrasi Keamanan Jaringan Intra Merupakan standar prosedur yang mengatur berbagai aspek administrasi mulai dari menyusun dan mengevaluasi dokumen arsitektur Jaringan Intra, mengidentifikasi seluruh aset infrastruktur jaringan, menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur terkait pemeliharaan keamanan Jaringan Intra, dan membuat laporan pengawasan keamanan jaringan secara periodik.
2. Kontrol Akses dan Autentikasi
Merupakan prosedur kontrol keamanan yang berfungsi untuk dapat mengatur dan menentukan pihak yang diizinkan mengakses data, aplikasi, dan sumber daya tertentu, dan dalam keadaan apa. Standar prosedur kontrol akses dan autentikasi ini mengatur mulai dari menempatkan perangkat infrastruktur jaringan yang menyediakan layanan Jaringan Intra pada zona terpisah, menggunakan autentikasi untuk mengakses Jaringan Intra, menerapkan pembatasan akses dalam Jaringan Intra, mematikan atau membatasi protokol, *port*, dan layanan yang tidak digunakan, menerapkan penyaringan tautan dan memblokir akses ke situs berbahaya,

menerapkan fungsi *honeypot* untuk menganalisis celah keamanan berdasarkan jenis serangan, menerapkan *virtual private network* dan mengaktifkan fungsi enkripsi pada jalur komunikasi yang digunakan, memberikan kewenangan hanya kepada administrator untuk menginstal perangkat lunak dan/atau mengubah konfigurasi sistem dalam Jaringan Intra, menerapkan *secure endpoints*, memblokir layanan yang tidak dikenal, menerapkan *secure socket layer* atau *transport layer security* versi terkini pada jalur akses Jaringan Intra, dan menerapkan server perantara saat *client* mengakses server *database* dalam rangka pemeliharaan.

3. Persyaratan Perangkat dan Aplikasi Keamanan Jaringan Intra

Merupakan standar prosedur yang mengatur berbagai persyaratan

penggunaan perangkat dan aplikasi pada keamanan Jaringan Intra mulai dari dengan menggunakan perangkat *security information and event management* untuk *network logging* dan *monitoring*, menerapkan sistem deteksi dini kerentanan keamanan perangkat jaringan, menggunakan perangkat *firewall*, menggunakan perangkat *intrusion detection systems* dan *intrusion prevention systems*, menerapkan *virtual private network* terenkripsi untuk penggunaan akses jarak jauh secara terbatas, menerapkan kontrol *update patching* pada infrastruktur Jaringan Intra dan sistem komputer, menggunakan perangkat *web application firewall*, menggunakan perangkat *load balancer* untuk menjaga ketersediaan akses terhadap jaringan dan aplikasi, memperbarui teknologi keamanan perangkat keras dan perangkat lunak untuk meminimalisasi celah, mengunduh perangkat lunak melalui *enterprise software distribution system*, dan menerapkan sertifikat elektronik.

4. Kontrol Keamanan *Gateway*

Merupakan prosedur kontrol keamanan yang berfungsi untuk dapat melindungi aset yang dimiliki dengan menempatkan kontrol pada lalu lintas jaringan. Standar prosedur kontrol keamanan *gateway* ini mengatur mulai dari dengan menerapkan *content filtering*, menerapkan *inspection packet filtering* untuk memeriksa *packet* yang masuk pada Jaringan Intra, menerapkan kontrol keamanan pada fitur akses jarak jauh perangkat *gateway*, memastikan perangkat *gateway* yang menghubungkan antar Jaringan Intra tidak terkoneksi langsung dengan jaringan publik, melaksanakan manajemen *traffic gateway*, dan memastikan *port* tidak dibuka secara *default*.

5. Kontrol Keamanan *Access Point* pada Jaringan Nirkabel

Merupakan prosedur kontrol keamanan yang berfungsi untuk dapat mengatur dan menentukan pihak pengguna yang berusaha membangun koneksi ke jaringan tersebut memiliki hak akses atau tidak dan juga berusaha agar komunikasi dengan pengguna dilakukan secara aman. Standar prosedur kontrol keamanan *access point* pada

jaringan nirkabel ini mengatur mulai dari menerapkan protokol keamanan *access point* nirkabel dan teknologi enkripsi terkini, menerapkan media *access control* pada *address filtering*, menerapkan *dedicated service set identifier*, menerapkan pembatasan jangkauan radio transmisi dan pengguna jaringan, menerapkan pembatasan terkait penambahan perangkat nirkabel yang dipasang secara tidak sah, menerapkan manajemen *vulnerability* secara berkala dan berkelanjutan, dan melakukan *patching firmware* secara rutin.

6. Kontrol Konfigurasi *Access Point* pada Jaringan Nirkabel
Merupakan prosedur kontrol konfigurasi dari keamanan *access point* pada jaringan nirkabel. Standar prosedur kontrol konfigurasi *access point* pada jaringan nirkabel ini mengatur mulai dari dengan menggunakan kata sandi yang kuat, menggunakan protokol model *authentication authorization* dan *accounting* pada perangkat infrastruktur jaringan untuk *management user* atau otentikasi administrator *access point*, memastikan fitur akses konfigurasi jarak jauh hanya dapat digunakan dalam kondisi darurat dengan menerapkan kontrol keamanan, mengisolasi atau melakukan segmentasi jaringan area lokal nirkabel, dan menonaktifkan antarmuka nirkabel, layanan, dan aplikasi yang tidak digunakan

3. Keamanan Pusat Data

Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data. Agar data dapat diakses dengan aman dan mudah oleh pihak-pihak yang membutuhkannya maka pusat data harus memenuhi persyaratan:

1. Persyaratan keamanan fisik dan manajemen pusat data.
Persyaratan ini dapat terpenuhi dengan menjalankan prosedur sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang terkait dengan pusat data
2. Persyaratan koneksi perangkat ke Pusat Data Nasional.
Prosedur yang dapat dilakukan untuk memenuhi persyaratan tersebut, terdiri dari:
 - a. Memastikan keamanan perangkat yang terkoneksi ke infrastruktur Pusat Data Nasional
 - b. Memutus akses fisik atau *logic* dari perangkat yang tidak ter otorisasi
 - c. Memastikan akses tingkat administrator ke server dan perangkat jaringan utama tidak boleh dilakukan secara *remote*
 - d. Memastikan hanya personil yang berwenang yang boleh menggunakan komputer di area Pusat Data Nasional;
 - e. Melakukan *backup* informasi dan perangkat lunak yang berada di Pusat Data Nasional secara berkala
 - f. Memastikan perangkat komputer pusat data terbebas dari virus dan *malware*
 - g. Melakukan pembatasan akses pemanfaatan *removable media* di area pusat data
 - h. Memastikan pengaktifan konfigurasi *port universal*

serial bus telah mendapatkan izin dari personil yang berwenang

- i. Memastikan setiap perangkat yang akan terkoneksi ke infrastruktur Pusat Data Nasional menggunakan *internet protocol address* dan *hostname* yang telah ditentukan
- j. Menerapkan server perantara saat *client* mengakses server *database* dalam rangka pemeliharaan.

8.2 Analisis Kesenjangan

Analisis Kesenjangan membahas Domain keamanan Tingkat 1, Area Keamanan sebagai Tingkat 2 dan Kondisi yang Diinginkan Arsitektur Keamanan SPBE.

8.2.1 Domain Keamanan

Warna merah mendeskripsikan belum didukungnya kebutuhan arsitektur keamanan SPBE, warna putih mendeskripsikan perlunya penambahan, warna kuning mendeskripsikan perlunya upaya penyesuaian atau perbaikan, dan sel warna hijau mendeskripsikan sudah terpenuhinya kebutuhan arsitektur keamanan SPBE. Pemenuhan domain keamanan sebagai struktur tingkat 1 referensi arsitektur tingkat nasional telah terdefinisi untuk setiap kebutuhan keamanan di Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

8.2.2 Area Keamanan

Berdasarkan hasil pemetaan arsitektur keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan terhadap kebutuhan Metadata Arsitektur Keamanan SPBE, diperoleh keadaan yang menunjukkan bahwa masih terdapat 22 kesenjangan, diantaranya adalah:

1. Standar Keamanan

Standar keamanan serta peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sudah ada namun belum diketahui dan dipetakan sebagai acuan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD). Sementara untuk standar keamanan internasional yang digunakan sebagai pendukung peningkatan penerapan keamanan SPBE belum ditemukan. Regulasi lainnya dari beberapa peraturan pemerintah terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sudah ada namun belum diketahui sejauh mana penerapannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

2. Penerapan Keamanan

Informasi kegiatan penerapan keamanan hanya ditemukan dua kegiatan pada sosialisasi edukasi kesadaran keamanan dan kerentanan keamanan SPBE. Belum ditemukan bentuk kegiatan lain untuk meningkatkan keamanan serta penanganan insiden keamanan SPBE.

3. Kelaikan Keamanan

a. Kelaikan Keamanan Aplikasi

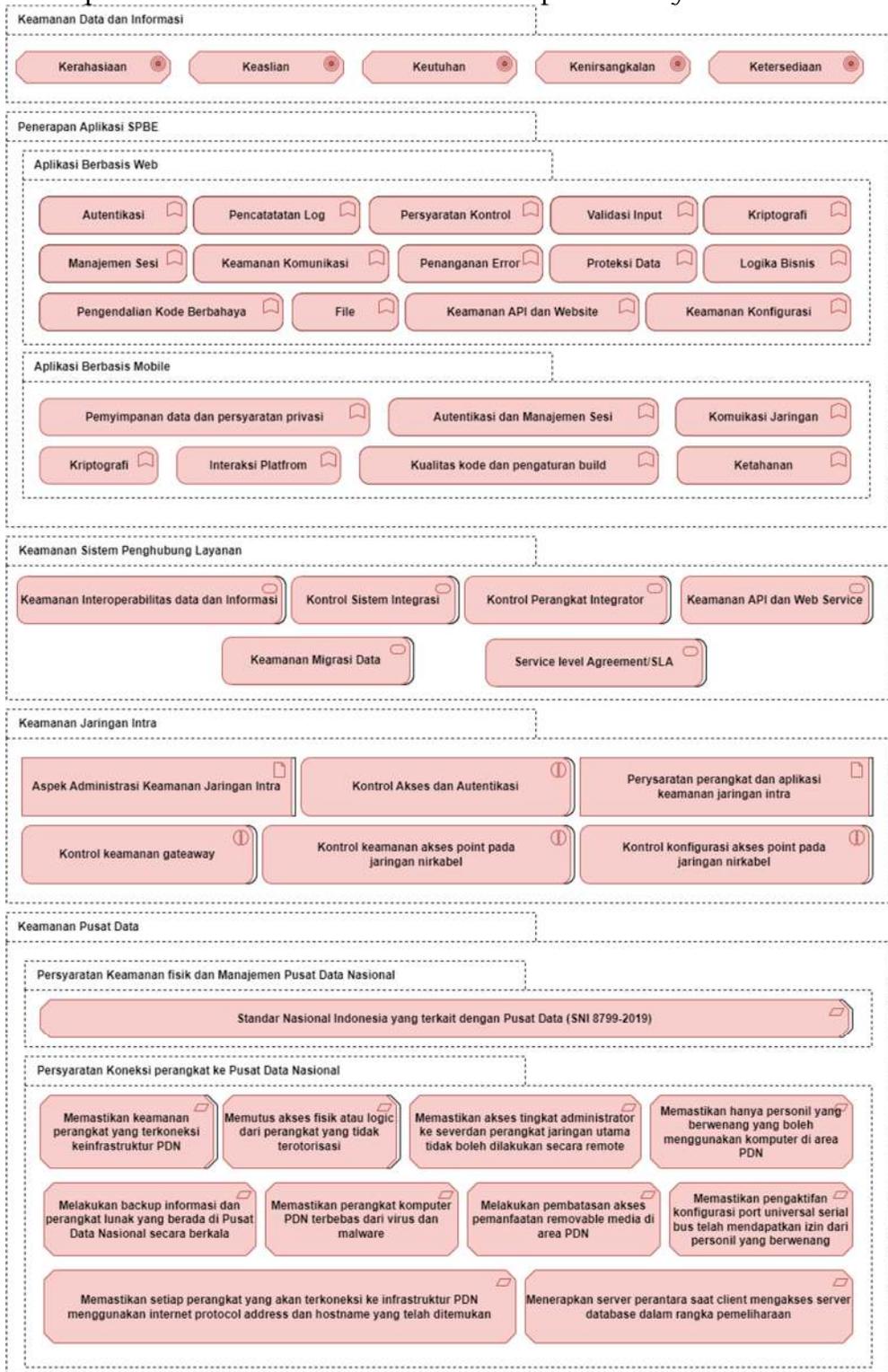
Belum ditemukan penilaian kerentanan secara mandiri di IPPD dan verifikasi di tingkat nasional sehingga belum dapat dipastikan kelaikan keamanan dari seluruh aplikasi, data dan layanan yang ada.

b. Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional

Begitu pun dengan kelaikan keamanan infrastruktur tidak dilakukan penilaian kerentanan secara mandiri di IPPD sehingga belum dapat dipastikan kelaikan keamanan infrastruktur SPBE Nasional.

8.3 Arsitektur Keamanan SPBE Target

Gambar di bawah ini merupakan gambaran gap analisis area keamanan pada tingkat 2, warna merah mendeskripsikan belum didukungnya kebutuhan arsitektur keamanan SPBE, warna putih mendeskripsikan perlunya penambahan, warna kuning mendeskripsikan perlunya upaya penyesuaian atau perbaikan, dan sel warna hijau mendeskripsikan sudah terpenuhinya kebutuhan arsitektur keamanan SPBE. Pemenuhan area keamanan sebagai struktur tingkat 2 referensi arsitektur tingkat nasional telah terdefinisi untuk setiap kebutuhan keamanan di Kabupaten Way Kanan.



Gambar 94 Gap Analisa Area Keamanan Tingkat 2

Berdasarkan hasil analisis kesenjangan yang telah teridentifikasi, maka daftar pekerjaan solusi sebagai kumpulan kapabilitas ke depan yang dapat menjangkau banyak pemangku kepentingan SPBE, serta dimaksudkan untuk memajukan solusi dan membangun SPBE di Pemerintah Kabupaten Way Kanan adalah:

1. Perlu adanya pemetaan standar keamanan pada setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD)
2. Rujukan standar Internasional sebaiknya tetap harus ada walaupun sudah dirujuk pada standar keamanan atau peraturan yang ada
3. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang edukasi keamanan sebagai bentuk penerapan keamanan perlu dilakukan di setiap level baik di tingkat nasional maupun IPPD
4. Uji mandiri dan penilaian kerentanan perlu dilakukan di setiap IPPD dan diverifikasi tingkat nasional sehingga kelaikan keamanan dari seluruh aplikasi, data dan layanan dapat dipastikan
5. Begitu juga untuk kelaikan keamanan infrastruktur SPBE perlu adanya *self-assessment* untuk menilai kerentanan dan dipastikan kelaikan keamanan infrastruktur SPBE Nasional.

Kondisi yang diinginkan adalah variabel-variabel yang dapat menunjukkan ataupun mengindikasikan tentang kondisi keamanan SPBE. Kondisi keamanan yang diinginkan di Pemerintah Kabupaten Way Kanan didefinisikan untuk mewujudkan inisiatif strategis SPBE, yaitu direalisasikan melalui daftar pekerjaan berupa penjaminan keamanan dan operasional manajemen keamanan informasi, teknologi keamanan informasi dan budaya keamanan informasi. Targetnya adalah tercapainya penjaminan keamanan aplikasi SPBE, infrastruktur serta domain pendukung terkait baik di level nasional, dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Sehingga pembangunan Sistem Keamanan Informasi Nasional dapat tercapai dengan acuan manajemen keamanan informasi, teknologi keamanan informasi serta budaya keamanan informasi.

Arsitektur keamanan merupakan aspek vital dalam melakukan layanan organisasi untuk melindungi aset-aset penting yang dimilikinya. Arsitektur keamanan menjelaskan bagaimana struktur, komponen-komponen, hubungan antar komponen dan peta kontrol-kontrol keamanan yang diterapkan pada infrastruktur TI organisasi. Arsitektur keamanan mengilustrasikan bagaimana sebuah organisasi menerapkan pertahanan mendalam, serta bagaimana lapisan-lapisan kontrolnya berhubungan satu dengan lainnya. Desain dan implementasi kontrol-kontrol keamanan yang berlapis ini sangat penting terutama untuk lingkungan yang cukup kompleks.

Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Pembangunan Sistem Keamanan Informasi ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Keamanan SPBE mencakup sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE yang meliputi: a.

Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya, b. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi, c. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan, d. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanis memverifikasi dan validasi, dan e. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tandatangan digital dan jaminan oleh Satuan Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang TIK, melalui penggunaan sertifikat digital.

Dalam menerapkan Keamanan SPBE, maka Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan berkewajiban melaporkan setiap permasalahan keamanan SPBE ke Satuan Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang TIK untuk diselesaikan. Jika ada permasalahan terkait keamanan maka penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE berdasarkan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8.3.1 Domain Keamanan

a. Standar Keamanan

Standar keamanan merupakan acuan persyaratan minimal keamanan dalam bentuk standar nasional, internasional serta regulasi peraturan terkait keamanan SPBE. Standar Keamanan memastikan penerapan fungsi keamanan pada data dan informasi, infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE sesuai dengan persyaratan keamanan yang telah ditetapkan secara nasional ataupun internasional. Standar keamanan yang dapat diacu meliputi:

- 1) standar dan/atau Peraturan terkait teknis dan prosedur keamanan; Beberapa diantaranya adalah Peraturan BSSN no. 4 tahun 2021 dan Indeks KAMI.
- 2) standar internasional terkait keamanan informasi; Diantaranya adalah ISO 27001.
- 3) regulasi lainnya.

Selain itu untuk mendefinisikan dan mengetahui kebijakan keamanan apa yang telah diterapkan, setiap instansi harus mengidentifikasi standar keamanan yang menjadi acuan saat ini dalam penerapan fungsi keamanan pada aplikasi, data dan informasi, serta infrastruktur.

b. Penerapan Keamanan

Edukasi kesadaran keamanan SPBE harus dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi serta meningkatkan keahlian dalam penerapan keamanan aplikasi SPBE dan keamanan infrastruktur SPBE.

Penilaian kerentanan keamanan SPBE harus dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi seluruh aset SPBE dengan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE serta pengukuran tingkat risiko keamanan SPBE.

Peningkatan keamanan SPBE harus dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan keamanan.

Peningkatan keamanan wajib dilaksanakan melalui kegiatan penerapan standar teknis dan prosedur keamanan dan pengujian kontrol keamanan yang telah diterapkan terhadap aplikasi dan infrastruktur.

Penanganan insiden keamanan yang wajib dilaksanakan adalah:

- 1) identifikasi sumber serangan;
- 2) analisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya;
- 3) penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi;
- 4) dokumentasi bukti insiden yang terjadi;
- 5) mitigasi atau pengurangan dampak risiko keamanan SPBE;
- 6) penghapusan konten yang bersifat destruktif dan/atau terkait malware.

c. Kelaikan Keamanan

Kelaikan keamanan dilakukan melalui proses penilaian kerentanan dan risiko keamanan terhadap aplikasi umum dan infrastruktur SPBE nasional. Proses pelaksanaan kelaikan keamanan dilakukan secara self assessment (penilaian mandiri) oleh setiap IPPD yang menjadi penggerak aplikasi umum dan infrastruktur SPBE nasional yang akan ditetapkan. Selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap self assessment tersebut sebagai tahapan untuk mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber/BSSN.

8.3.2 Area Keamanan

- a. Data dan informasi, yaitu harus terpenuhinya aspek: kerahasiaan; keaslian; keutuhan; kenirsangkalan; ketersediaan untuk data dan informasi.
- b. Aplikasi SPBE, yaitu diterapkannya keamanan pada:
 - 1) Aplikasi berbasis web, yaitu dalam Aplikasi SPBE berbasis web harus memiliki fungsi autentikasi, manajemen sesi, persyaratan kontrol akses, validasi input, kriptografi pada verifikasi statis, penanganan error dan pencatatan log, proteksi data, keamanan komunikasi, pengendalian kode berbahaya, logika bisnis, file, keamanan API dan web service, dan keamanan konfigurasi.
 - 2) Aplikasi berbasis mobile, yaitu pada aplikasi SPBE berbasis mobile harus terpenuhi fungsi penyimpanan data dan persyaratan privasi, kriptografi, autentikasi dan manajemen sesi, komunikasi jaringan, interaksi platform, kualitas kode dan pengaturan build dan ketahanan.
 - 3) Keamanan Server (application layer), yaitu berfungsi sebagai keamanan pada lapisan aplikasi dalam hal ini penjaminan terhadap isi atau data permintaan dari client benar-benar data yang benar, bukan berisi virus, trojan atau ancaman lainnya.
- c. Sistem Penghubung Layanan, yaitu adanya keamanan interoperabilitas data dan informasi, kontrol sistem integrasi, kontrol perangkat integrator, keamanan API dan web service, dan keamanan migrasi data.
- d. Jaringan Intra, yaitu terpenuhinya aspek-aspek administrasi keamanan Jaringan Intra, kontrol akses dan autentikasi, persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra, kontrol keamanan gateway, kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel, dan kontrol konfigurasi access point pada jaringan nirkabel.
- e. Pusat Data Nasional,
Pusat Data nasional terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau

Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu. Penggunaan Pusat Data nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data nasional oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penjelasan pada Perpres Nomor 95 tahun 2018, maka Pusat Data nasional harus:

- 1) memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data;
- 2) menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain;

Secara detail Pusat Data Nasional harus memenuhi:

- 1) Persyaratan keamanan fisik dan manajemen Pusat Data Nasional sesuai Standar Nasional Indonesia terkait dengan Pusat Data.
- 2) persyaratan koneksi perangkat ke Pusat Data Nasional dengan mencakup prosedur:
 - memastikan keamanan perangkat yang terkoneksi ke infrastruktur Pusat Data Nasional;
 - memutus akses fisik atau logic dari perangkat yang tidak terotorisasi;
 - memastikan akses tingkat administrator ke server dan perangkat jaringan utama tidak boleh dilakukan secara remote;
 - memastikan hanya personil yang berwenang yang boleh menggunakan komputer di area Pusat Data Nasional;
 - melakukan backup informasi dan perangkat lunak yang berada di Pusat Data Nasional secara berkala;
 - memastikan perangkat komputer Pusat Data Nasional terbebas dari virus dan malware;
 - melakukan pembatasan akses pemanfaatan removable media di area Pusat Data Nasional;
 - memastikan pengaktifan konfigurasi port universal serial bus telah mendapatkan izin dari personil yang berwenang;
 - memastikan setiap perangkat yang akan terkoneksi ke infrastruktur Pusat Data Nasional menggunakan internet protocol address dan hostname yang telah ditentukan;
 - menerapkan server perantara saat client mengakses server database dalam rangka pemeliharaan.

Implementasi domain arsitektur keamanan SPBE akan mempengaruhi pelaksanaan SPBE secara keseluruhan, utamanya terhadap pencegahan insiden keamanan. Di dalam Container terdapat Container Security yang merupakan proses penerapan alat dan kebijakan keamanan untuk memastikan bahwa semua yang ada di dalam Container berjalan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

I. Lampiran Summary Arsitektur 4 Domian

Tabel 40 Summary 4 Domain Abacus

ID	Nama Proses Bisnis	RAB	Nama Layanan	RAL	Nama Data dan Informasi	RAD	Nama Aplikasi	RAA	Instansi
DAP.01	Pengaduan Pelayanan Publik	RAB.09.03.05.01 Pengaduan Pelayanan Publik	Pengaduan Pelayanan publik	RAL 01.03.01.01 Pengaduan Pelayanan publik	Data Pengaduan Pelayanan publik	RAD.09.03.05.01 Data Pengaduan Pelayanan publik	Span Laport	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	
DAP.02	Data Terbuka	RAB.09.03.03.01 Data Terbuka	Layanan Data Terbuka	RAL 01.43.03.01 Layanan Data Terbuka	Data Terbuka	RAD.09.03.05.02 Data Terbuka	Open Data Way Kanan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	
DAP.03	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	RAB.09.03.05.02 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	RAL 01.43.03.02 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	RAD.09.03.05.03 Data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Way Kanan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	
DAP.04	Penanaman Modal		Penanaman Modal		Data Penanaman Modal		Sistem Informasi Penanaman Modal		Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
DAP.04.01	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	RAB.02.08.01.01 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	RAL 01.12.03.01 Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Data Pengembangan Iklim Penanaman Modal	RAD.02.08.01.01 Data Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Penanaman Modal	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
DAP.04.02	Program Promosi Penanaman Modal	RAB.02.08.02.01 Program Promosi Penanaman Modal	Layanan Promosi Penanaman Modal	RAL 01.12.08.01 Layanan Promosi Penanaman Modal	Data Promosi Penanaman Modal	RAD.02.08.01.02 Data Promosi Penanaman Modal	Sistem Informasi Manajemen Promosi Penanaman Modal	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
DAP.04.03	Program Pelayanan Penanaman Modal	RAB.02.08.02.02 Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Penanaman Modal	RAL 01.12.04.01 Pelayanan Penanaman Modal	Data Pelayanan Penanaman Modal	RAD.02.08.02.01 Data Pelayanan Penanaman Modal	Sistem Informasi Penanaman Modal	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu

DAP.04.04	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	RAB.02.08.04.01 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	RAL 01.12.05.01 layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Data Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	RAD.02.08.03.01 Data Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Sistem Informasi Pengendalian Penanaman Modal	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
DAP.04.05	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	RAB.02.08.02.03 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Layanan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	RAL 01.12.06.01 Layanan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	RAD.02.08.02.02 Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Sistem Informasi Penanaman Modal	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
DAP.05	Sosial		Layanan Sosial		Data Sosial		Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) Way Kanan		
DAP.05.01	Program Pemberdayaan Sosial	04.02.01.01 Program Pemberdayaan Sosial	Layanan Pemberdayaan Sosial	RAL 01.26.01.01 Layanan Pemberdayaan Sosial	Data Pemberdayaan Sosial	RAD.04.02.01.01 Data Pemberdayaan Sosial	Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan Sosial	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Sosial
DAP.05.02	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	04.02.01.02 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	RAL 01.26.02.01 Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Data Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	RAD.04.02.02.01 Data Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Sistem Informasi Manajemen Warga Negara Migran korban tindak kekerasan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Sosial
DAP.05.03	Program Rehabilitasi Sosial	RAB.04.02.01.03 Program Rehabilitasi Sosial	Layanan Rehabilitasi Sosial	RAL 01.26.01.02 Layanan Rehabilitasi Sosial	Data Rehabilitasi Sosial	RAD.04.02.04.01 Data Rehabilitasi Sosial	Sistem Informasi Manajemen Rehabilitasi Sosial	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Sosial
DAP.05.04	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	RAB.04.02.03.01 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Layanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	RAL 01.26.01.03 Layanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Data Perlindungan Dan Jaminan Sosial	RAD.04.02.05.01 Data Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Sistem Informasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Sosial
DAP.05.05	Program Pengelolaan Taman Makam	RAB.04.02.03.02 Program Pengelolaan Taman Makam	Layanan Pengelolaan Taman Makam	RAL 01.40.02.01 Layanan Pengelolaan Taman Makam	Data Pengelolaan Taman Makam	RAD.04.02.01.02 Data Pengelolaan Taman Makam	Sistem Informasi Manajemen Rehabilitasi Sosial	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Sosial

DAP.05.06	Program Penanganan Bencana	RAB.04.02.06.01 Program Penanganan Bencana	Layanan Penanganan Bencana	RAL 01.26.01.04 Layanan Penanganan Bencana	Data Penanganan Bencana	RAD.04.02.06.01 Data Penanganan Bencana	Sistem Informasi Manajemen Penanganan Bencana Terpadu	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Sosial
DAP.06	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		Data Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Way Kanan		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
DAP.06.01	Program Pendaftaran Penduduk	RAB.09.01.08.01 Program Pendaftaran Penduduk	Layanan Pendaftaran Penduduk	RAL 01.23.02.01 Layanan Pendaftaran Penduduk	Data Pendaftaran Penduduk	RAD.03.07.01.01 Data Pendaftaran Penduduk	Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dan Catatan Sipil	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
DAP.06.02	Program Pencatatan Sipil	RAB.09.01.08.02 Program Pencatatan Sipil	Layanan Pencatatan Sipil	RAL 01.23.03.01 Layanan Pencatatan Sipil	Data Pencatatan Sipil	RAD.03.07.01.02 Data Pencatatan Sipil	Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dan Catatan Sipil	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
DAP.06.03	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	RAB.09.01.08.03 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	RAL 01.23.03.02 Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Data Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	RAD.03.07.01.03 Data Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dan Catatan Sipil	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
DAP.06.04	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	RAB.09.01.08.04 Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Layanan Pengelolaan Profil Kependudukan	RAL 01.23.03.03 Layanan Pengelolaan Profil Kependudukan	Data Pengelolaan Profil Kependudukan	RAD.03.07.01.04 Data Pengelolaan Profil Kependudukan	Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dan Catatan Sipil	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
DAP.07	Pendidikan		Layanan Pendidikan		Data Pendidikan		Smart School Way Kanan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAP.07.01	Program Pengelolaan Pendidikan	RAB.06.01.01.01 Program Pengelolaan Pendidikan	Layanan Pengelolaan Pendidikan	RAL 01.31.03.01 Layanan Pengelolaan Pendidikan	Data Pengelolaan Pendidikan	RAD.06.01.01.01 Data Pengelolaan Pendidikan	Sistem Informasi Pengelolaan Pendidikan Sekolah (SIPS)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

DAP.07.02	Program Pengembangan Kurikulum	RAB.06.01.01.02 Program Pengembangan Kurikulum	Layanan Pengembangan Kurikulum	RAL 01.31.03.02 Layanan Pengembangan Kurikulum	Data Pengembangan Kurikulum	RAD.06.01.01.02 Data Pengembangan Kurikulum	Sistem Informasi Manajemen Pembelajaran Pendidikan Sekolah (SIM-PPS)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAP.07.03	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	RAB.06.01.02.01 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Layanan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	RAL 01.31.01.01 Layanan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Data Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	RAD.06.01.01.03 Data Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Pendidikan (SIM-PTP)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAP.07.04	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	RAB.06.03.04.01 Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Layanan Pengembangan Bahasa dan Sastra	RAL 01.31.03.03 Layanan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Data Pengembangan Bahasa dan Sastra	RAD.06.01.01.04 Data Pengembangan Bahasa dan Sastra	Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Bahasa dan Sastra (SIM-PBS)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAP.08	Kesehatan		Layanan Kesehatan		Data Kesehatan		Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Terpadu (SIM-K Terpadu) Way Kanan		Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
DAP.08.01	Upaya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAB.04.01.03.01 Program Upaya Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAL 01.25.02.01 Layanan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Data Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAD.04.01.03.01 Data Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
DAP.08.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RAB.04.01.04.01 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RAL 01.25.03.01 Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Data Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RAD.04.01.04.01 Data Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
DAP.08.03	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	RAB.04.01.02.01 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan	Layanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan	RAL 01.25.01.01 Layanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan	Data Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan	RAD.04.01.02.01 Data Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan	Sistem Informasi Manajemen Sarana, Prasara dan Alat	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Kesehatan

		Makanan Minuman	Minuman	Makanan Minuman	Minuman	Makanan Minuman	Kesehatan (SIMSPA)		
DAP.08.04	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	RAB.04.01.01.01 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	RAL 01.25.02.02 Layanan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Data Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	RAD.04.01.03.02 Data Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Hidup Sehat	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Kesehatan
DAP.09	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Layanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Data Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Sistem Informasi Manajemen Pekerjaan Umum Terpadu		Dinas PU
DAP.09.01	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	RAB.03.01.05.01 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Layanan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	RAL 01.17.01.01 Layanan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Data Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	RAD.03.01.05.01 Data Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Sistem Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas PU
DAP.09.02	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	RAB.03.01.05.02 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	RAL 01.17.01.02 Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Data Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	RAD.03.01.05.02 Data Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Sistem Informasi Manajemen Penyediaan Air Minum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas PU
DAP.09.03	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	RAB.03.01.01.01 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Layanan Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	RAL 01.17.01.03 Layanan Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Data Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	RAD.03.01.02.01 Data Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Sistem Informasi Manajemen Persampahan Terpadu	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas PU
DAP.09.04	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	RAB.03.01.04.01 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	RAL 01.17.01.01.04 Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Data Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	RAD.03.01.04.01 Data Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Sistem Informasi Manajemen Layanan Pengolahan Air Limbah	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas PU

DAP.09.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	RAB.03.01.02.02 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	RAL 01.17.01.01.05 Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Data Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	RAD.03.01.03.01 Data Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Sistem Informasi Manajemen Drainase	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas PU
DAP.09.06	Program Penataan Bangunan Gedung	RAB.03.01.01.02 Program Penataan Bangunan Gedung	Layanan Program Penataan Bangunan Gedung	RAL 01.17.01.01.06 Layanan Program Penataan Bangunan Gedung	Data Program Penataan Bangunan Gedung	RAD.03.01.01.01 Data Program Penataan Bangunan Gedung	Sistem Informasi Manajemen Pemukiman Terpadu	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas PU
DAP.09.07	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	RAB.03.01.01.03 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Layanan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	RAL 01.17.01.01.07 Layanan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Data Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	RAD.03.01.03.02 Data Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Sistem Informasi Manajemen Bangunan dan Lingkungan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas PU
DAP.09.08	Program Penyelenggaraan Jalan	RAB.03.01.02.03 Program Penyelenggaraan Jalan	Layanan Program Penyelenggaraan Jalan	RAL 01.17.01.01.08 Layanan Program Penyelenggaraan Jalan	Data Program Penyelenggaraan Jalan	RAD.03.01.01.02 Data Program Penyelenggaraan Jalan	Sistem Informasi Manajemen Monitoring Jalan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas PU
DAP.09.09	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	RAB.03.01.03.01 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Layanan Pengembangan Jasa Konstruksi	RAL 01.17.01.01.09 Layanan Pengembangan Jasa Konstruksi	Data Pengembangan Jasa Konstruksi	RAD.03.01.03.03 Data Pengembangan Jasa Konstruksi	Sistem Informasi Pengendalian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas PU
DAP.09.10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	RAB.03.01.01.04 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang	RAL 01.17.01.01.10 Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Data Penyelenggaraan Penataan Ruang	RAD.03.01.01.03 Data Penyelenggaraan Penataan Ruang	Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Penataan Ruang	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas PU
DAP.10	Perumahan Dan Kawasan Permukiman		Layanan Perumahan Dan Permukiman		Data Perumahan Dan Permukiman		Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman		
DAP.10.01	Program Pengembangan Perumahan	RAB.03.04.05.01 Program Pengembangan Perumahan	Layanan Pengembangan Perumahan	RAL 01.20.01.01 Layanan Pengembangan Perumahan	Data Pengembangan Perumahan	Data Pengembangan Perumahan	Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas PU

DAP.10.02	Program Kawasan Permukiman	RAB.03.04.03.01 Program Kawasan Permukiman	Layanan Kawasan Permukiman	RAL 01.20.01.02 Layanan Kawasan Permukiman	Data Kawasan Permukiman	Data Kawasan Permukiman	Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas PU
DAP.10.03	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	RAB.03.04.05.02 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Layanan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Layanan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Data Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Data Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas PU
DAP.10.04	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	RAB.03.04.04.01 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Layanan Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	RAL 01.20.01.03 Layanan Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Data Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Data Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Sistem Informasi Prasarana Sarana Utilitas Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas PU
DAP.10.05	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	RAB.03.06.05.01 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Layanan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	RAL 01.20.02.01 Layanan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Data Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Data Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Sistem Informasi Manajemen Sengketa Tanah Garapan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	OPD yang membidangi Pertanahan
DAP.10.06	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	RAB.03.06.02.01 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Layanan Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	RAL 01.20.01.04 Layanan Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Data Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Data Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Sistem Informasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Pekerjaan Umum
DAP.10.07	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	RAB.03.06.02.02 Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Layanan Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	RAL 01.20.02.02 Layanan Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Data Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Data Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah dan Bangunan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Pekerjaan Umum
DAP.10.08	Program Penetapan Tanah Ulayat	RAB.03.06.03.01 Program Penetapan Tanah Ulayat	Layanan Penetapan Tanah Ulayat	RAL 01.20.01.05 Layanan Penetapan Tanah Ulayat	Data Penetapan Tanah Ulayat	Data Penetapan Tanah Ulayat	Sistem Informasi Manajemen Tanah Ulayat	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Pekerjaan Umum
DAP.10.09	Program Pengelolaan Tanah Kosong	RAB.03.06.04.01 Program Pengelolaan Tanah	Layanan Pengelolaan Tanah Kosong	RAL 01.20.01.06 Layanan Pengelolaan Tanah	Data Pengelolaan Tanah Kosong	Data Pengelolaan Tanah Kosong	Sistem Informasi Penatagunaan Tanah	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Pekerjaan Umum

		Kosong		Kosong					
DAP.10.10	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	RAB.03.06.03.02 Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Layanan Pengelolaan Izin Membuka Tanah	RAL 01.20.02.03 Layanan Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Data Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Data Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah dan Bangunan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Pekerjaan Umum
DAP.10.11	Program Penatagunaan Tanah	01.01.04.07 Program Penatagunaan Tanah	Layanan Penatagunaan Tanah	RAL 01.20.02.04 Layanan Penatagunaan Tanah	Data Penatagunaan Tanah	Data Penatagunaan Tanah	Sistem Informasi Penatagunaan Tanah	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Pekerjaan Umum
DAP.11	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		Sistem Informasi Manajemen Ketentraman dan Ketertiban Terpadu (SIM-KKT)		
DAP.11.01	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	RAB.05.02.01.01 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Layanan Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	RAL 01.29.06.01 Layanan Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Data Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	RAD.05.02.01.01 Data Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Sistem Informasi Manajemen Ketentraman dan Ketertiban Umum (SIM-KKU)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Satpol PP
DAP.11.02	Program Penanggulangan Bencana	RAB.04.02.06.01 Penanggulangan Bencana	Layanan Penanggulangan Bencana	RAL 01.40.06.01 Layanan Penanggulangan Bencana	Data Penanggulangan Bencana	RAD.04.02.06.02 Data Penanggulangan Bencana	Sistem Informasi Manajemen Penanggulan Bencana (SIM-PB)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	BPBD
DAP.11.03	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	RAB.04.02.06.02 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	RAL 01.40.07.01 Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Data Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	RAD.04.02.06.03 Data Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Sistem Informasi Manajemen Kebakaran Terpadu (SIM-KT)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
DAP.12	Tenaga Kerja		Layanan Tenaga Kerja		Data Tenaga Kerja		Sistem Informasi Kartu Pencari Kerja Online (KPKO)		

DAP.12.01	Program Perencanaan Tenaga Kerja	RAB.06.02.02.01 Program Perencanaan Tenaga Kerja	Layanan Perencanaan Tenaga Kerja	RAL 01.32.02.01 Layanan Perencanaan Tenaga Kerja	Data Perencanaan Tenaga Kerja	RAD.06.02.01.01 Data Perencanaan Tenaga Kerja	Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Tenaga Kerja	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Nakertrans
DAP.12.02	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	RAB.06.02.01.02 Program Perencanaan Tenaga Kerja.	Layanan Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	RAL 01.32.04.01 Layanan Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	Data Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	RAD.06.02.01.02 Data Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Nakertrans
DAP.12.03	Program Penempatan Tenaga Kerja	RAB.02.02.01.03 Program Penempatan Tenaga Kerja	Layanan Penempatan Tenaga Kerja	RAL 01.32.05.01 Layanan Penempatan Tenaga Kerja	Data Penempatan Tenaga Kerja	RAD.06.02.01.03 Data Penempatan Tenaga Kerja	Sistem Informasi Bursa Layanan Kerja	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Nakertrans
DAP.12.04	Program Hubungan Industrial	RAB.06.02.03.01 Program Hubungan Industrial	Layanan Hubungan Industrial	RAL 01.32.05.02 Layanan Hubungan Industrial	Data Hubungan Industrial	RAD.06.02.01.04 Data Hubungan Industrial	Sistem Informasi Manajemen Hubungan Industrial	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Nakertrans
DAP.13	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		Layanan Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		Data Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak		
DAP.13.01	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.03.01 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Layanan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	RAL 01.27.01.01 Layanan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Data Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	RAD.04.03.02.01 Data Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas PPPA DALDUKKB
DAP.13.02	Program Perlindungan Perempuan	RAB.04.03.05.01 Program Perlindungan Perempuan	Layanan Perlindungan Perempuan	RAL 01.27.03.01 Layanan Perlindungan Perempuan	Data Perlindungan Perempuan	RAD.04.03.05.01 Data Perlindungan Perempuan	Sistem Informasi Perlindungan Perempuan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas PPPA DALDUKKB
DAP.13.03	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	RAB.04.03.01.01 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	RAL 01.27.01.02 Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Data Peningkatan Kualitas Keluarga	RAD.04.03.03.01 Data Peningkatan Kualitas Keluarga	Sistem Informasi Kualitas Keluarga	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas PPPA DALDUKKB
DAP.13.04	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	RAB.04.03.06.01 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Layanan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	RAL 01.27.02.01 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	RAD.04.03.03.01 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas PPPA DALDUKKB

DAP.13.05	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	RAB.04.03.04.01 Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	RAL 01.27.02.02 Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Data Pemenuhan Hak Anak (PHA)	RAD.04.03.06.01 Data Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Sistem Informasi Hak Anak	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas PPPA DALDUKKB
DAP.13.06	Program Perlindungan Khusus Anak	RAB.04.03.04.02 Program Perlindungan Khusus Anak	Layanan Perlindungan Khusus Anak	RAL 01.27.02.03 Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	RAD.04.03.04.01 Program Perlindungan Khusus Anak	Sistem Informasi Khusus Anak	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas PPPA DALDUKKB
DAP.14	Pangan		Layanan Pangan		Data Pangan		Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Way Kanan		Dinas Ketahanan Pangan
DAP.14.01	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	RAB.02.03.04.01 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	RAL 01.07.02.01 Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Data Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	RAD.02.03.04.01 Data Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Ketahanan Pangan
DAP.14.02	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	RAB.02.03.04.02 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Layanan Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	RAL 01.07.02.02 Layanan Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Data Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	RAD.02.03.04.02 Data Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Ketahanan Pangan
DAP.14.03	Program Penanganan Kerawanan Pangan	RAB.02.03.04.03 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Layanan Penanganan Kerawanan Pangan	RAL 01.07.02.03 Layanan Penanganan Kerawanan Pangan	Data Penanganan Kerawanan Pangan	RAD.02.03.04.03 Data Penanganan Kerawanan Pangan	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Ketahanan Pangan
DAP.14.04	Program Pengawasan Keamanan Pangan	RAB.02.03.04.04 Program Pengawasan Keamanan Pangan	Layanan Pengawasan Keamanan Pangan	RAL 01.07.02.04 Layanan Pengawasan Keamanan Pangan	Data Pengawasan Keamanan Pangan	RAD.02.03.04.04 Data Pengawasan Keamanan Pangan	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Ketahanan Pangan
DAP.15	Lingkungan Hidup		Layanan Lingkungan Hidup		Data Lingkungan Hidup		Sistem Informasi Lingkungan Hidup Terpadu		Dinas Lingkungan Hidup

DAP.15.01	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01.01 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Layanan Perencanaan Lingkungan Hidup	RAL 01.40.02.02 Layanan Perencanaan Lingkungan Hidup	Data Perencanaan Lingkungan Hidup	RAD.07.05.01.01 Data Perencanaan Lingkungan Hidup	Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup
DAP.15.02	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	RAB.07.05.02.01 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Layanan Pengendalian Pencemaran Dan/Kerusakan Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04.01 Layanan Pengendalian Pencemaran Dan/Kerusakan Lingkungan Hidup	Data Pengendalian Pencemaran Dan/Kerusakan Lingkungan Hidup	RAD.07.05.02.01 Data Pengendalian Pencemaran Dan/Kerusakan Lingkungan Hidup	Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup
DAP.15.03	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	RAB.07.05.05.01 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	RAL 01.40.02.03 Layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Data Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	RAD.07.05.01.02 Data Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup
DAP.15.04	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	RAB.07.05.02.02 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Layanan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	RAL 01.40.04.02 Layanan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Data Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	RAD.07.05.02.02 Data Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Sistem Informasi Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup
DAP.15.05	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	RAB.07.05.01.02 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	RAL 01.40.04.03 Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Data Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	RAD.07.05.01.03 Data Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Sistem Informasi Manajemen dan Pengawasan Izin Lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup

DAP.15.06	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	RAB.07.05.01.03 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Layanan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	RAL 01.40.04.04 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	RAD.07.05.02.03 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Sistem Informasi Manajemen dan Pengawasan Izin Lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup
DAP.15.07	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	RAB.07.05.01.04 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Layanan Peningkatan Pendidikan Dan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	RAL 01.40.01.01 Layanan Peningkatan Pendidikan Dan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Data Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	RAD.07.05.02.04 Data Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Sistem Informasi Manajemen Pelatihan dan Penyuluhan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup
DAP.15.08	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	RAB.07.05.01.05 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Layanan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	RAL 01.40.04.05 Layanan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Data Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	RAD.07.05.02.05 Data Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Sistem Informasi Manajemen Penghargaan Lingkungan Hidup	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup
DAP.15.09	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01.06 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Layanan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04.06 Layanan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Data Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	RAD.07.05.01.04 Data Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Sistem Informasi Manajemen Pengaduan Lingkungan Hidup	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup
DAP.15.10	Program Pengelolaan Persampahan	RAB.07.05.02.03 Program Pengelolaan Persampahan	Layanan Pengelolaan Persampahan	RAL 01.40.04.07 Layanan Pengelolaan Persampahan	Data Pengelolaan Persampahan	RAD.07.05.02.06 Data Pengelolaan Persampahan	Sistem Informasi Manajemen Persampahan Terpadu	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Lingkungan Hidup
DAP.16	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		Layanan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		Data Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		Smart Village Way Kanan		
DAP.16.01	Program Penataan Desa	RAB.03.05.03.01 Program Penataan Desa	Layanan Penataan Desa	RAL 01.24.02.01 Layanan Penataan Desa	Data Penataan Desa	RAD.03.05.03.01 Data Penataan Desa	Sistem Informasi Manajemen dan Penataan Desa	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

DAP.16.02	Program Peningkatan Kerjasama Desa	RAB.03.05.04.01 Program Peningkatan Kerjasama Desa	Layanan Peningkatan Kerja Sama Desa	RAL 01.24.03.01 Layanan Peningkatan Kerja Sama Desa	Data Peningkatan Kerja Sama Desa	RAD.03.05.01.01 Data Peningkatan Kerja Sama Desa	Sistem Informasi Manajemen dan Penataan Desa	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
DAP.16.03	Program Administrasi Pemerintahan Desa	RAB.03.05.03.02	Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	RAL 01.24.06.01 Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	Data Administrasi Pemerintahan Desa	RAD.03.05.01.02 Data Administrasi Pemerintahan Desa	Sistem Informasi Administrasi Pemerintah Desa	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
DAP.16.04	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	RAB.03.05.04.02 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Layanan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	RAL 01.24.01.01 Layanan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Data Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	RAD.03.05.04.01 Data Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Sistem Informasi Lembaga Masyarakat Desa	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
DAP.17	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		Layanan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		Data Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu		Dinas PPPADALDUKKB
DAP.17.01	Program Pengendalian Penduduk	RAB.03.07.02.01 Program Pengendalian Penduduk	Layanan Pengendalian Penduduk	RAL 01.23.01.01 Layanan Pengendalian Penduduk	Data Pengendalian Penduduk	RAD.03.07.02.01 Data Pengendalian Penduduk	Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas PPPADALDUKKB
DAP.17.02	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	RAB.03.07.03.01 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Layanan Pembinaan Keluarga Berencanaan (KB)	RAL 01.23.04.01 Layanan Pembinaan Keluarga Berencanaan (KB)	Data Pembinaan Keluarga Berencanaan (KB)	RAD.03.07.03.01 Data Pembinaan Keluarga Berencanaan (KB)	Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas PPPADALDUKKB
DAP.17.03	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	RAB.03.07.01.01 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	RAL 01.23.02.01 Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	RAD.03.07.04.01 Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas PPPADALDUKKB
DAP.18	Perhubungan		Layanan Perhubungan		Data Perhubungan		Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas		Dinas Perhubungan

DAP.18.01	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	RAB.03.03.04.01 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	RAL 01.19.02.01 Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Data Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	RAD.03.03.02.01 Data Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Perhubungan
DAP.19	Informasi dan Komunikasi Publik		Layanan Informasi dan Komunikasi Publik		Data Informasi dan Komunikasi Publik		Sistem Informasi Manajemen Informatika dan Komunikasi Publik		
DAP.19.01	Program Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09.03.02.01 Program Informasi dan Komunikasi Publik	Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	RAL 01.44.02.01 Program Informasi dan Komunikasi Publik	Data Informasi dan Komunikasi Publik	RAD.09.03.05.04 Data Informasi dan Komunikasi Publik	Sistem Informasi Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Kominfo
DAP.19.02	Program Aplikasi Informatika	RAB.09.03.01.01 Program Aplikasi Informatika	Layanan Aplikasi Informatika	RAL 01.44.02.02 Program Aplikasi Informatika	Data Aplikasi Informatika	RAD.09.03.05.05 Data Aplikasi Informatika	Sistem Informasi Pengelolaan Aplikasi Informatika Terpadu	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Kominfo
DAP.20	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah		Layanan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah		Data Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah		Sistem Informasi Manajemen Koperasi (e-Koperasi)		Dinas Koperasi Umkm Perindustrian Dan Perdagangan
DAP.20.01	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	RAB.02.10.02.01 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	RAL 01.14.01.01 Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Data Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	RAD.02.09.01.01 Data Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Sistem Informasi Manajemen Simpan Pinjam Koperasi (SIM-SPKOP)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Koperasi Umkm Perindustrian Dan Perdagangan
DAP.20.02	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	RAB.02.09.04.01 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Layanan Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	RAL 01.13.01.01 Layanan Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Data Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	RAD.02.09.04.01 Data Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Koperasi Umkm Perindustrian Dan Perdagangan
DAP.20.03	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	RAB.02.09.04.02 Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Layanan Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	RAL 01.13.01.02 Layanan Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Data Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	RAD.02.09.03.01 Data Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Sistem Informasi Tingkat Kesehatan Koperasi	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Koperasi Umkm Perindustrian Dan Perdagangan

DAP.20.04	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	RAB.02.09.01.01 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Layanan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	RAL 01.13.01.03 Layanan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Data Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	RAD.02.09.02.01 Data Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Koperasi Umkm Perindustrian Dan Perdagangan
DAP.20.05	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	RAB.02.09.03.01 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Layanan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	RAL 01.13.01.04 Layanan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Data Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	RAD.02.09.03.02 Data Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Sistem Informasi dan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Koperasi Umkm Perindustrian Dan Perdagangan
DAP.20.06	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	RAB.02.10.04.01 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Layanan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	RAL 01.13.01.05 Layanan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Data Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	RAD.02.10.04.01 Data Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Sistem Informasi Manajemen UMKM (e-UMKM)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Koperasi Umkm Perindustrian Dan Perdagangan
DAP.20.07	Program Pengembangan Umkm	RAB.12.10.01.01 Program Pengembangan Umkm	Layanan Pengembangan Umkm	RAL 01.13.01.06 Layanan Pengembangan Umkm	Data Pengembangan Umkm	RAD.02.10.01.01 Data Pengembangan Umkm	Sistem Informasi Manajemen UMKM (e-UMKM)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Koperasi Umkm Perindustrian Dan Perdagangan
DAP.21	Kepemudaan Dan Olahraga		Layanan Kepemudaan Dan Olahraga		Data Kepemudaan Dan Olahraga		Sistem Informasi dan Kepemudaan dan Keolahragaan		Dinas Porapar
DAP.21.01	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	RAB.06.04.03.01 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	RAL 01.34.01.01 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	RAD.06.05.02.01 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Sistem Informasi dan Kepemudaan dan Keolahragaan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Porapar
DAP.21.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	RAB.06.05.01.01 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	RAL 01.35.01.02 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	RAD.06.05.02.02 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Sistem Informasi dan Kepemudaan dan Keolahragaan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Porapar
DAP.21.03	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	RAB.06.05.03 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	RAL 01.35.02.01 Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	RAD.06.05.02.03 Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Sistem Informasi dan Kepemudaan dan Keolahragaan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Porapar

DAP.22	Kebudayaan		Layanan Kebudayaan		Data Kebudayaan		Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Way Kanan		Dinas P&K
DAP.22.01	Program Pengembangan Kebudayaan	RAB.08.02.04.01 Program Pengembangan Kebudayaan	Pengembangan Kebudayaan	RAL 01.42.01.01 Pengembangan Kebudayaan	Pengembangan Kebudayaan	RAD.08.02.01.01 Pengembangan Kebudayaan	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas P&K
DAP.22.02	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	RAB.08.02.04.02 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pengembangan Kesenian Tradisional	RAL 01.42.02.01 Pengembangan Kesenian Tradisional	Pengembangan Kesenian Tradisional	RAD.08.02.01.02 Pengembangan Kesenian Tradisional	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas P&K
DAP.22.03	Program Pembinaan Sejarah	RAB.08.02.04.03 Program Pembinaan Sejarah	Pembinaan Sejarah	RAL 01.42.01.02 Pembinaan Sejarah	Pembinaan Sejarah	RAD.08.02.01.03 Pembinaan Sejarah	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas P&K
DAP.22.04	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	RAB.08.02.04.04 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	RAL 01.42.04.01 Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	RAD.08.02.02.01 Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas P&K
DAP.22.05	Pengelolaan Permuseuman	RAB.08.02.03.01 Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Permuseuman	RAL 01.42.04.02 Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Permuseuman	RAD.08.02.01.04 Pengelolaan Permuseuman	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas P&K
DAP.23	Perpustakaan		Layanan Perpustakaan		Data Perpustakaan		Sistem Informasi Perpustakaan Terpadu		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
DAP.23.01	Program Pembinaan Perpustakaan	RAB.08.02.05.01 Program Pembinaan Perpustakaan	Layanan Pembinaan Perpustakaan	RAL 01.42.01.01 Layanan Pembinaan Perpustakaan	Data Pembinaan Perpustakaan	RAD.08.02.04.01 Data Pembinaan Perpustakaan	Sistem Informasi Perpustakaan Terpadu	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
DAP.23.02	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	RAB.08.02.06.01 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Layanan Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	RAL 01.42.03.01 Layanan Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Data Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	RAD.08.02.05.01 Data Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Sistem Informasi Pelestarian Koleksi dan Naskah Terpadu	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
DAP.24	Kelautan Dan Perikanan		Layanan Kelautan Dan Perikanan		Data Kelautan Dan Perikanan		Sistem Informasi Manajemen Kelautan dan		Dinas Perikanan

							Perikanan Terpadu		
DAP.24.01	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	RAB.02.06.01.01 Pengelolaan Perikanan Tangkap	Layanan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Layanan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Data Pengelolaan Perikanan Tangkap	RAD.02.06.01.01 Data Pengelolaan Perikanan Tangkap	Sistem Informasi Manajemen Perikanan Tangkap	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Perikanan
DAP.24.02	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	RAB.02.06.01.02 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Layanan Pengelolaan Perikanan Budidaya	Layanan Pengelolaan Perikanan Budidaya	Data Pengelolaan Perikanan Budidaya	RAD.02.06.01.02 Data Pengelolaan Perikanan Budidaya	Sistem Informasi Manajemen Perikanan Budidaya	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Perikanan
DAP.24.03	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	02.06.01.03 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Layanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Layanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Data Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	RAD.02.06.01.03 Data Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Sistem Informasi Manajemen Perikanan Budidaya	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Perikanan
DAP.24.04	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	RAB.02.06.03.01 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Layanan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Layanan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Data Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	RAD.02.06.01.04 Data Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Sistem Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Perikanan
DAP.25	Pariwisata		Layanan Pariwisata		Data Pariwisata		Sistem Informasi Manajemen Pariwisata (e-Pariwisata)		Dinas Porapar
DAP.25.01	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	RAB.02.11.01 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Data Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	RAD.02.11.01.01 Data Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Sistem Informasi Pariwisata Terpadu (e-Pariwisata)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Porapar
DAP.25.02	Program Pemasaran Pariwisata	RAB.02.11.02 Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata	Data Pemasaran Pariwisata	RAD.02.11.03.01 Data Pemasaran Pariwisata	Sistem Informasi Pariwisata Terpadu (e-Pariwisata)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Porapar

DAP.25.03	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	RAB.02.11.03 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Data Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	RAD.02.11.03.02 Data Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Sistem Informasi Manajemen Ekonomi Kreatif	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Porapar
DAP.25.04	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	RAB.02.11.04 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Data Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	RAD.02.11.02.01 Data Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Sistem Informasi Manajemen Pelatihan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Porapar
DAP.26	Pertanian		Layanan Pertanian		Data Pertanian		Kartu Petani Berbasis Elektronik (e-KPB)		
DAP.26.01	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	RAB.02.03.01.01 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	RAL 01.07.01.01 Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Data Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	RAD.02.03.03.01 Data Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Layanan Sarana Produksi Pertanian (e-Saprotan)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas TPHP dan Perkebunan
DAP.26.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	RAB.02.03.01.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	RAL 01.07.01.02 Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Data Penyediaan Dan Data Pengembangan Prasarana Pertanian	RAD.02.03.03.02 Data Penyediaan Dan Data Pengembangan Prasarana Pertanian	Layanan Sarana Produksi Pertanian (e-Saprotan)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas TPHP dan Perkebunan
DAP.26.03	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	RAB.02.03.01.03 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	RAL 01.07.01.03 Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Data Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Data Kesehatan Masyarakat Veteriner	RAD.02.05.03.01 Data Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Data Kesehatan Masyarakat Veteriner	Layanan e-Halo MedikVet	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas TPHP dan Perkebunan

DAP.26.04	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	RAB.02.03.01.04 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	RAL 01.07.01.04 Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Data Pengendalian Dan Data Penanggulangan Bencana Pertanian	RAD.02.04.04.01 Data Pengendalian Dan Data Penanggulangan Bencana Pertanian	Layanan Asuransi (e-Asuransi)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas TPHP dan Perkebunan
DAP.26.05	Program Perizinan Usaha Pertanian	RAB.02.03.01.05 Program Perizinan Usaha Pertanian	Perizinan Usaha Pertanian	RAL 01.07.01.05 Perizinan Usaha Pertanian	Data Perizinan Usaha Pertanian	RAD.02.03.01.01 Data Perizinan Usaha Pertanian	Sistem Informasi Perizinan Usaha Tani (e-SIPUT)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas TPHP dan Perkebunan
DAP.26.06	Program Penyuluhan Pertanian	RAB.02.03.01.06 Program Perizinan Usaha Pertanian	Penyuluhan Pertanian	RAL 01.07.01.06 Penyuluhan Pertanian	Data Penyuluhan Pertanian	RAD.02.03.01.02 Data Penyuluhan Pertanian	Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (Simluhtan)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas TPHP dan Perkebunan
DAP.27	Perdagangan		Layanan Perdagangan		Data Perdagangan		Sistem Informasi Perdagangan		Dinas Indag
DAP.27.01	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	RAB.02.02.03.01 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Layanan Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	RAL 01.06.04.01 Layanan Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Data Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	RAD.02.02.01.01 Data Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Sistem Informasi Perizinan Perusahaan Terpadu	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Indag
DAP.27.02	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	RAB.02.02.01.02 Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Layanan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	RAL 01.06.04.02 Layanan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Data Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	RAD.02.02.03.01 Data Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Sistem Informasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Indag
DAP.27.03	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	RAB.02.02.01.03 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Layanan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	RAL 01.06.04.03 Layanan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Data Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	RAD.02.02.02.01 Data Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Perdagangan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Indag
DAP.27.04	Program Pengembangan Ekspor	RAB.02.02.04.01 Ekspor dan Impor	Layanan Ekspor	RAL 01.06.01.01 Ekspor Impor	Data Ekspor	RAD.02.02.04.01 Data Ekspor	Sistem Informasi Ekspor Way Kanan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Indag
DAP.27.05	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	RAB.02.02.01.05 Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Layanan Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	RAL 01.06.05.01 Layanan Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Data Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	RAD.02.02.06.01 Data Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Sistem Informasi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Indag

DAP.27.06	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	RAB.02.02.03.06 Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	Layanan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	RAL 01.06.02.01 Layanan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Data Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	RAD.02.02.05.01 Data Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Sistem Informasi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Indag
DAP.28	Perindustrian		Layanan Perindustrian		Data Perindustrian		Sistem Informasi Manajemen Perindustrian		Dinas Indag
DAP.28.01	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	RAB.02.01.01 01 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	RAL 01.05.08.01 Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	RAD.02.01.02.01 Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Sistem Informasi Perencanaan dan Pembangunan Industri (SIPPI)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Indag
DAP.28.02	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	RAB.02.01.04.01 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Layanan Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	RAL 01.05.10.01 Layanan Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Data Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	RAD.02.01.01.01 Data Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Sistem Informasi Perencanaan dan Pembangunan Industri (SIPPI)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Indag
DAP.28.03	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	RAB.02.01.04.02 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	RAL 01.05.06.01 Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Data Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	RAD.02.01.05.01 Data Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinas Indag
DAP.29	Transmigrasi		Layanan Transmigrasi		Data Transmigrasi		Sistem Informasi Manajemen Transmigrasi		Dinasa Nakertrans
DAP.29.01	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	RAB.03.02.02.01 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Layanan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	RAL.01.18.01.01 Layanan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Data Perencanaan Kawasan Transmigrasi	RAD.03.02.01.01 Data Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinasa Nakertrans
DAP.29.02	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	RAB.03.02.04.01 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Layanan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	RAL.01.18.01.02 Layanan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Data Pembangunan Kawasan Transmigrasi	RAD.03.02.04.01 Data Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Dinasa Nakertrans

DAP.30	Pendapatan Daerah		Pendapatan Daerah		Pendapatan Daerah		Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIM-PD)		Badan Pengelola Pendapatan Daerah
DAP.30.01	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	RAB.09.02.06.01 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	RAL 02.02.01.01 Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Data Pengelolaan Keuangan Daerah	RAD.09.01.05.01 Data Pengelolaan Keuangan Daerah	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
DAP.30.02	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	RAB.09.02.06.02 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah	RAL 02.02.01.02 Layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Data Pengelolaan Pendapatan Daerah	RAD.09.02.09.01 Data Pengelolaan Pendapatan Daerah	Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIM-PD)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
DAP.31	Perencanaan		Layanan Perencanaan		Data Perencanaan		Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
DAP.31.01	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	RAB.09.05.01.01 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Layanan Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	RAL 02.03.02.01 Layanan Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Data Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	RAD.09.05.01.01 Data Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
DAP.31.02	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	RAB.09.05.01.02 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	RAL 02.03.03.01 Layanan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Data Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	RAD.09.05.01.02 Data Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
DAP.32	Anggaran		Layanan Anggaran		Data Anggaran		Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Daerah		
DAP.32.01	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	RAB.09.02.05.01 Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	Layanan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	RAL 02.02.01.01 Layanan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	Data Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	RAD.09.02.05.01 Data Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Daerah	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

DAP.33	Keuangan		Layanan Keuangan		Data Keuangan		Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DAP.33.01	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	RAB.09.01.07.01 Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	RAL 02.02.01.02 Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Data Pengelolaan Keuangan Daerah	RAD.09.02.02.01 Data Pengelolaan Keuangan Daerah	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)	RAA.01.02 Aplikasi Umum Pemerintahan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DAP.34	Pengadaan Barang dan Jasa		Layanan Pengadaan Barang dan Jasa		Data Pengadaan Barang dan Jasa		Sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu		Sekretariat Daerah
DAP.34.01	Penyelesaian Pengadaan	RAB.09.02.08.01 Penyelesaian Pengadaan	Layanan Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa	RAL 02.02.08.01 Layanan Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa	Data Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.09.02.08.01 Data Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa	Sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah
DAP.34.02	Pengadaan Secara Elektronik	RAB.09.02.08.02 Pengadaan Secara Elektronik	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	RAL 02.02.08.02 Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Data Pengadaan Secara Elektronik	RAD.09.02.08.02 Data Pengadaan Secara Elektronik	Sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah
DAP.34.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	RAB.09.02.08.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	Layanan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	RAL 02.02.08.03 Layanan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	Data Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	RAD.09.02.08.03 Data Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	Sistem informasi Pembinaan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah
DAP.35	Kepegawaian		Layanan Kepegawaian		Data Kepegawaian		Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
DAP.35.01	Program Kepegawaian Daerah	RAB.09.06.09.02 Program Kepegawaian Daerah	Layanan Kepegawaian Daerah	RAL 02.04.01.01 Layanan Kepegawaian Daerah	Data Kepegawaian Daerah	RAD.09.06.01.01 Data Kepegawaian Daerah	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SAMPAN)	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
DAP.36	Kearsipan		Kearsipan		Kearsipan		Sistem Informasi Penyimpanan Arsip (SIPA)		

DAP.36.01	Pengelolaan Arsip	RAB.08.02.06.02 Pengelolaan Arsip	Layanan Pengelolaan Arsip	RAL 02.06.18.01 Layanan Pengelolaan Arsip	Data Pengelolaan Arsip	RAD.09.06.08.01 Data Pengelolaan Arsip	Sistem Informasi Kearsipan Terpadu	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
DAP.36.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	RAB.08.02.06.03 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Layanan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	RAL 02.06.18.02 Layanan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Data Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	RAD.09.06.08.02 Data Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Sistem Informasi Perizinan Penggunaan Arsip	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
DAP.37	Pengelolaan Aset		Layanan Pengelolaan Aset		Data Pengelolaan Aset		Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD)		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DAP.37.01	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAB.09.02.08.01 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAL 02.02.05.01 Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Data Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAD.09.02.08.03 Data Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DAP.38	Inspektorat Daerah		Layanan Inspektorat Daerah		Data Inspektorat Daerah		Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIM- Pengawasan)		Inspektorat
DAP.38.01	Program Penyelenggaraan Pengawasan	RAB.09.07.05.01 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Penyelenggaraan Pengawasan	RAL 02.07.02.01 Layanan Penyelenggaraan Pengawasan	Data Penyelenggaraan Pengawasan	RAD.09.07.05.01 Data Penyelenggaraan Pengawasan	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIM- Pengawasan)	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Inspektorat
DAP.38.02	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	RAB.09.05.08.01 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Layanan Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	RAL 02.07.02.02 Layanan Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Data Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	RAD.09.07.05.02 Data Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Sistem Informasi Komunikasi dan Asistensi Pimpinan	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Inspektorat
DAP.39	Akuntabilitas Kinerja Organisasi	RAB.09.06.05.01 Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	RAL 02.07.02.02.03 Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Data Akuntabilitas Kinerja Organisasi	RAD.09.06.05.01 Data Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (e- SAKIP)	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Inspektorat

DAP.40	Akuntabilitas Kinerja Pegawai	RAB.09.06.05.02 Akuntabilitas Kinerja Pegawai	Layanan Akuntabilitas Kinerja Pegawai		Data Akuntabilitas Kinerja Pegawai		Sistem Informasi Kinerja Aparatur Pemerintah (SIKAP)		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
DAP.40.01	Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAB.09.06.04.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL 02.04.03.01 Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAD.09.06.05.02 Data Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sistem Informasi Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
DAP.41	Penelitian dan Pengembangan		Layanan Penelitian dan Pengembangan		Data Penelitian dan Pengembangan		Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (SIPPD)		
DAP.41.01	Penelitian dan Pengembangan Daerah	RAB.09.07.06.01 Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Daerah	RAL 02.08.08.01 Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Daerah	RAD.09.07.06.01 Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (SIPPD)	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Bappeda
DAP.42	Kesatuan Bangsa Dan Politik		Layanan Kesatuan Bangsa dan Politik		Data Kesatuan Bangsa dan Politik		Sistem Informasi Manajemen Kesatuan Bangsa dan Politik (SIMKBP)		
DAP.42.01	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	RAB.09.07.07.01 Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	RAL 01.03.02.01 Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Data Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	RAD.09.07.07.01 Data Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Publik	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Kesbangpol
DAP.42.02	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	RAB.09.07.07.02 PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	RAL 01.03.02.02 Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	RAD.09.07.07.02 Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Sistem Informasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Kesbangpol

DAP.42.03	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	RAB.09.07.07.03 PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	RAL 01.03.02.03 Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	RAD.09.07.07.03 Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Sistem Informasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Kesbangpol
DAP.42.04	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	RAB.09.07.07.04 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	RAL 01.03.02.04 Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	RAD.09.07.07.04 Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Sistem Informasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Kesbangpol
DAP.42.05	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	RAB.09.07.07.05 PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	RAL 01.03.02.05 Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	RAD.09.07.07.05 Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Kesbangpol
DAP.43	Statistik		Statistik		Statistik		Sistem Informasi Data Statistik Sektoral (SIMDA STATISTIK)		Dinas Kominfo
DAP.43.01	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	RAB.09.03.03.02 Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Layanan Statistik Sektoral	RAL 02.09.06.01 Layanan Statistik Sektoral	Data Statistik Sektoral	RAD.09.03.03.01 Data Statistik Sektoral	Sistem Informasi Statistik Sektoral	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Dinas Kominfo
DAP.44	Persandian		Persandian		Persandian		Sistem Informasi Manajemen Persandian Terpadu		Dinas Kominfo
DAP.44.01	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	09.03.05.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	RAL 02.09.04.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	RAD.09.07.03.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Sistem Informasi Manajemen Persandian Terpadu	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Dinas Kominfo

DAP.45	Sekretariat Daerah		Layanan Sekretariat Daerah		Data Sekretariat Daerah		Sistem Informasi Manajemen Sekretariat Daerah (SIM-SEKDA)		Sekretariat Daerah; Sekretariat Daerah (Tapem); Sekretariat Daerah (Kesra); Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama); Sekretariat Daerah (Kesra); Sekretariat Daerah (Perekonomian)
DAP.45.01	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	RAB.09.06.06.01 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Layanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	RAL 02.04.08.01 Layanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Data Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	RAD.09.01.02.01 Data Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sistem Informasi Kesejahteraan Rakyat Terpadu	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah; Sekretariat Daerah (Tapem); Sekretariat Daerah (Kesra); Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama); Sekretariat Daerah (Kesra); Sekretariat Daerah (Perekonomian)
DAP.45.02	Program Perekonomian dan Pembangunan	RAB.09.06.01.01 Program Perekonomian dan Pembangunan	Layanan Perekonomian dan Pembangunan	RAL 02.04.08.02 Layanan Perekonomian dan Pembangunan	Data Perekonomian dan Pembangunan	RAD.09.01.05.02 Data Perekonomian dan Pembangunan	Sistem Informasi Perekonomian dan pembangunan Terpadu	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah; Sekretariat Daerah (SDA); Sekretariat Daerah (Tapem); Sekretariat Daerah (Perekonomian)
DAP.45.03	Pengelolaan Izin Lokasi	RAB.09.06.01.02 Pengelolaan Izin Lokasi	Layanan Pengelolaan Izin Lokasi	RAL 02.04.08.03 Layanan Pengelolaan Izin Lokasi	Data Pengelolaan Izin Lokasi	RAD.09.01.06.01 Data Pengelolaan Izin Lokasi	Sistem Informasi Pengelolaan Izin	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah (Tapem)
DAP.46	Sekretariat DPRD		Layanan Sekretariat DPRD		Data Sekretariat DPRD		Sistem Informasi Manajemen		Sekwan; Sekretariat DPRD

							Sekretariat DPRD		
DAP.46.01	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	RAB.09.06.03 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	RAL 02.04.08.03.04 Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Data Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	RAD.09.01.02.02 Data Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (SIM Petuksi DPRD)	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Sekwan; Sekretariat DPRD

II. Lampiran Arsitektur Proses Bisnis Abacus

Tabel 41 Arsitektur Proses Bisnis Abacus

ID	pemerintahan yang diselenggarakan hingga proses bisnis level- n)	Bisnis/Urusan (Merupakan deskripsi dari urusan pemerintahan yang diselenggarakan)	Indikator Kinerja Utama (IKU) -- (Tuliskan indikator yang menjadi ukuran	Nilai Target (Nilai IKU yang ditargetkan)	Terealisasi (Nilai realisasi IKU yang dicapai)	Unit Kerja (Dependency)	RAB Level 1 Nasional (Dependency)	RAB Level 2 (Dependency)	RAB Level 3 (Dependency)	RAB Level 4 (Dependency)	Instansi (Dependency)
DAP.01	Pengaduan Pelayanan Publik						RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi			
DAP.01.01	Program Pengaduan Pelayanan Publik	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengaduan Pelayanan Publik					RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.05 Pengelolaan Informasi Publik	RAB.09.03.05.01 Pengaduan Pelayanan Publik	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
DAP.02	Data Terbuka						RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi			
DAP.02.01	Program Data Terbuka	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Data Terbuka					RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.03 Pengelolaan Data Statistik	RAB.09.03.03.01 Data Terbuka	Dinas Komunikasi dan Informatika
DAP.03	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)						RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi			
DAP.03.01	Program Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)					RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.05 Pengelolaan Informasi Publik	RAB.09.03.05.02 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
DAP.04	Penanaman Modal	Proses Bisnis ini mencakup proses Penanaman Modal				Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 Investasi			
DAP.04.01	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi	25%	25%	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 Investasi	RAB.02.08.01 Pembinaan Penanaman Modal Regional	RAB.02.08.01.01 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
DAP.04.02	Program Promosi Penanaman Modal	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi	25%	25%	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 Investasi	RAB.02.08.02 Manajemen Penanaman Modal	RAB.02.08.02.01 Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu

DAP.04.03	Program Pelayanan Penanaman Modal	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	84,15 Poin	90 Poin	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 Investasi	RAB.02.08.02 Manajemen Penanaman Modal	RAB.02.08.02.02 Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
DAP.04.04	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	0%	1%	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 Investasi	RAB.02.08.04 Litigasi Penanaman Modal	RAB.02.08.04.01 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
DAP.04.05	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	0%	1%	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 Investasi	RAB.02.08.02 Manajemen Penanaman Modal	RAB.02.08.02.03 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
DAP.05	Sosial	Proses Bisnis ini mencakup proses Sosial					RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial			
DAP.05.01	Program Pemberdayaan Sosial	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan ijin sumbangan Persentase Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah	100% 15%	100% 20%	Dinas Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	04.02.01.01 Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
DAP.05.02	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Cakupan Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	6,04%	3,04%	Dinas Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	04.02.01.02 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial
DAP.05.03	Program Rehabilitasi Sosial	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Rehabilitasi Sosial	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Di Lingkup Dinas Sosial Cakupan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial	96 Poin 20,41% 7,8% 4,54% 4,21% 4,52% 3% 4,75% 15,54% 3,02%	100 Poin 23,41% 10,8% 7,54% 7,21% 7,52% 6% 7,75% 18,54% 6,02%	Dinas Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	RAB.04.02.01.03 Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

			<p>Cakupan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Sosial</p> <p>Cakupan Rehabilitasi Sosial Pengemis Di Luar Panti Sosial</p> <p>Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Balita Terlantar Di Luar Panti Sosial</p> <p>Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Di Luar Panti Sosial</p> <p>Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan perlindungan khusus Di Luar Panti Sosial</p> <p>Cakupan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Di Luar Panti Sosial</p> <p>Cakupan Rehabilitasi Sosial gelandangan Di Luar Panti Sosial</p>								
DAP.05.04	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	<p>Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial</p> <p>Persentase Data Fakir Miskin Yang Di Verifikasi dan Validasi</p> <p>Cakupan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)</p> <p>Cakupan Bantuan Sosial Tunai (BST)</p>	<p>11,7%</p> <p>9,7%</p> <p>7,02%</p> <p>7,39%</p> <p>6,04%</p> <p>47,28%</p> <p>0,15%</p>		Dinas Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.03 Manajemen Sosial	RAB.04.02.03.01 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial

			Cakupan Bantuan Sosial Bedah Rumah Cakupan Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional Cakupan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin								
DAP.05.05	Program Pengelolaan Taman Makam	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengelolaan Taman Makam	Cakupan Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya	100%	100%	Dinas Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.03 Manajemen Sosial	RAB.04.02.03.02 Program Pengelolaan Taman Makam	Dinas Sosial
DAP.05.06	Program Penanganan Bencana	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Penanganan Bencana	Cakupan Perlindungan Sosial Bencana Alam Dan Bencana Sosial Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	64.44% 5%	67,44% 8%	Dinas Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	RAB.04.02.06.01 Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
DAP.06	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Proses Bisnis ini mencakup proses Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri			
DAP.06.01	Program Pendaftaran Penduduk	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pendaftaran Penduduk	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik terhadap pembuatan KK, KTP, KIA	100 Poin	100 Poin	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.08 Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	RAB.09.01.08.01 Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
DAP.06.02	Program Pencatatan Sipil	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pencatatan Sipil	Nilai Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik terhadap Pembuatan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan	100 Poin	100 Poin	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.08 Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	RAB.09.01.08.02 Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
DAP.06.03	Program Pengelolaan Informasi	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengelolaan	Persentase Pemanfaatan Data	100%	60%	Dinas Kependudukan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.08 Kependudukan Dan Pencatatan	RAB.09.01.08.03 Program Pengelolaan Informasi	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

	Administrasi Kependudukan	Informasi Administrasi Kependudukan	Kependudukan			Dan Pencatatan Sipil			Sipil	Administrasi Kependudukan	Sipil
DAP.06.04	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Presentase Peningkatan Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	100%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.08 Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	RAB.09.01.08.04 Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
DAP.07	Pendidikan	Proses Bisnis ini mencakup proses Pendidikan	Nilai SAKIP DIKBUD Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pendidikan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan	63,53 Poin 85,56 Poin 100 %	68,03 Poin 87,56 Poin 100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAP.07.01	Program Pengelolaan Pendidikan	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai SAKIP DIKBUD Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pendidikan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendidikan	62,03 Poin 84,56 Poin 100 %		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.01 Pembinaan Pendidikan Regional	RAB.06.01.01.01 Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAP.07.02	Program Pengembangan Kurikulum	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengembangan Kurikulum	Cakupan Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Dasar	87,58%	76,43%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.01 Pembinaan Pendidikan Regional	RAB.06.01.01.02 Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAP.07.03	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan Distribusi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.02 Manajemen Tenaga Pendidikan	RAB.06.01.02.01 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAP.07.04	Program Pengembagan Bahasa dan Sastra	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengembagan Bahasa dan Sastra	Cakupan Pembinaan Bahasa Dan Sastra Yang Penuturannya di Way Kanan	60	30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.03.04 Pengkajian Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Sektor Tertentu	RAB.06.03.04.01 Program Pengembagan Bahasa dan Sastra	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAP.08	Kesehatan	Proses Bisnis ini mencakup proses Kesehatan	Nilai SAKIP DINKES Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kesehatan Persentase Puskesmas dengan	65,22 Poin 79,71 Poin 100 % 100 %	69,72 Poin 81,71 Poin 100 % 100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan			

			Pengeolaan Keuangan BLUD								
DAP.08.01	Upaya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Proses Bisnis ini mencakup proses Upaya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				Dinas Kesehatan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.03 Kesehatan Masyarakat	RAB.04.01.03.01 Program Upaya Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
DAP.08.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Proses Bisnis ini mencakup proses Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas Terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas	50 %	70 %	Dinas Kesehatan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	RAB.04.01.04.01 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
DAP.08.03	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Proses Bisnis ini mencakup proses Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman				Dinas Kesehatan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.02 Kefarmasian Dan Alat Kesehatan	RAB.04.01.02.01 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
DAP.08.04	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	#NAME?				Dinas Kesehatan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.01 Pembinaan Kesehatan Regional	RAB.04.01.01.01 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
DAP.09	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proses Bisnis ini mencakup proses Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rusunawa) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih Rusunawa) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penjualan Air Bersih) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Alat Berat) Indeks Profesionalitas ASN Dinas Pekerjaan Umum Cakupan Pelayanan	56,07 Poin Rp. 182.147.864 Rp. 7.437.913 Rp. 28.764.753 Rp. 23.000.000 79,47 Poin 100 %	61,07 Poin Rp. 201.992.424 Rp. 8.408.076 Rp. 30.764.753 Rp. 26.000.000 81,47 Poin 100 %	Dinas PU	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum			

			Administrasi Perkantoran Dinas PU								
DAP.09.01	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)				Dinas PU	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.05 Pengelolaan Sumber Daya Air	RAB.03.01.05.01 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DAP.09.02	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Layanan SPAM	6%	3%	Dinas PU	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.05 Pengelolaan Sumber Daya Air	RAB.03.01.05.02 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DAP.09.03	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang terangku	100%	94%	Dinas PU	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.01 Pembinaan Pekerjaan Umum Regional	RAB.03.01.01.01 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DAP.09.04	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	6%	2%	Dinas PU	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.04 Pengelolaan Air Limbah Domestik	RAB.03.01.04.01 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DAP.09.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	21,44%	23,58%	Dinas PU	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02.02 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DAP.09.06	Program Penataan Bangunan Gedung	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Penataan Bangunan Gedung				Dinas PU	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.01 Pembinaan Pekerjaan Umum Regional	RAB.03.01.01.02 Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DAP.09.07	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Proporsi Bangunan Dan Lingkungan Dalam Kondisi Baik	65%	62%	Dinas PU	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.01 Pembinaan Pekerjaan Umum Regional	RAB.03.01.01.03 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DAP.09.08	Program Penyelenggaraan Jalan	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Penyelenggaraan Jalan				Dinas PU	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02.03 Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DAP.09.09	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Proses Bisnis ini mencakup proses Program				Dinas PU	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.03 Pembinaan Jasa Kontruksi	RAB.03.01.03.01 Program Pengembangan Jasa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

		Pengembangan Jasa Konstruksi								Konstruksi	
DAP.09.10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Penyelenggaraan Penataan Ruang				Dinas PU	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.01 Pembinaan Pekerjaan Umum Regional	RAB.03.01.01.04 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DAP.10	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Proses Bisnis ini mencakup proses Perumahan Dan Kawasan Permukiman					RAB.03 Pembangunan Kewilayahan				
DAP.10.01	Program Pengembangan Perumahan	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Rumah Korban Bencana yang dibangun/rehabilitasi	5 Rumah	2 Rumah	Dinas PU	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.04 Perumahan	RAB.03.04.05 Penyelenggaraan Perumahan	RAB.03.04.05.01 Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DAP.10.02	Program Kawasan Permukiman	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Kawasan Permukiman				Dinas PU	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.04 Perumahan	RAB.03.04.03 Pengembangan Kawasan Permukiman	RAB.03.04.03.01 Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DAP.10.03	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh				Dinas PU	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.04 Perumahan	RAB.03.04.05 Penyelenggaraan Perumahan	RAB.03.04.05.02 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DAP.10.04	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Bantuan Sosial Prosentase perumahan yang dilengkapi PSU	80%	40%	Dinas PU	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.04 Perumahan	RAB.03.04.04 Pengembangan Sarana Dan Prasarana Strategis	RAB.03.04.04.01 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DAP.10.05	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%	40%	OPD yang membidangi Pertanahan	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.05 Litigasi Pertanahan	RAB.03.06.05.01 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DAP.10.06	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan santunan tanah	4,00%	1,00%	Dinas Pekerjaan Umum	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.02 Kebijakan Hukum Pertanahan	RAB.03.06.02.01 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DAP.10.07	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan	Persentase Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	4,00%	1,00%	Dinas Pekerjaan Umum	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.02 Kebijakan Hukum Pertanahan	RAB.03.06.02.02 Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

	Tanah Absentee	Tanah Absentee									
DAP.10.08	Program Penetapan Tanah Ulayat	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Penetapan Tanah Ulayat	8,00%	2,00%	Dinas Pekerjaan Umum	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.03 Kebijakan Pengadaan Tanah	RAB.03.06.03.01 Program Penetapan Tanah Ulayat	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DAP.10.09	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Peningkatan Pengelolaan Tanah Kosong	8,00%	2,00%	Dinas Pekerjaan Umum	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah	RAB.03.06.04.01 Program Pengelolaan Tanah Kosong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DAP.10.10	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Penerbitan Izin membuka tanah	100%	100%	Dinas Pekerjaan Umum	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.03 Kebijakan Pengadaan Tanah	RAB.03.06.03.02 Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DAP.10.11	Program Penatagunaan Tanah	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Penatagunaan Tanah	Persentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam suatu daerah kabupate	8,00%	2,00%	Dinas Pekerjaan Umum	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah	RAB.03.06.04.02 Program Penatagunaan Tanah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DAP.11	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Proses Bisnis ini mencakup proses Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 Keamanan	RAB.05.02.01 Ketentraman, Ketertiban Umum		
DAP.11.01	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum				Satpol PP	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 Keamanan	RAB.05.02.01 Ketentraman, Ketertiban Umum	RAB.05.02.01.01 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
DAP.11.02	Program Penanggulangan Bencana	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Penanggulangan Bencana				BPBD	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	RAB.04.02.06.01 Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
DAP.11.03	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	30 Menit	30 Menit	Satpol PP	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 Keamanan	RAB.05.02.01.01 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	RAB.04.02.06.02 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pemadam Kebakaran
DAP.12	Tenaga Kerja	Proses Bisnis ini mencakup proses Tenaga Kerja					RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan			

DAP.12.01	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Perencanaan Tenaga Kerja	Cakupan Perencanaan Ketenagakerjaan	100%	50%	Dinas Nakertrans	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.02 Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	RAB.06.02.02.01 Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DAP.12.02	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja				Dinas Nakertrans	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja Serta Produktifitas	RAB.06.02.01.02 Program Perencanaan Tenaga Kerja.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DAP.12.03	Program Penempatan Tenaga Kerja	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Penempatan Tenaga Kerja				Dinas Nakertrans	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.02 Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	RAB.02.02.01.03 Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DAP.12.04	Program Hubungan Industrial	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Hubungan Industrial	Persentase angka perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan	100%	100%	Dinas Nakertrans	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.03 Peningkatan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	RAB.06.02.03.01 Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DAP.13	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Proses Bisnis ini mencakup proses Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan			
DAP.13.01	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan				Dinas PPPA DALDUKKB	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.03 Kesetaraan Gender	RAB.04.03.03.01 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DAP.13.02	Program Perlindungan Perempuan	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Perlindungan Perempuan	Persentase penanganan kasus Kekerasan pada Perempuan	100%	100%	Dinas PPPA DALDUKKB	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.05 Perlindungan Hak Perempuan	RAB.04.03.05.01 Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

DAP.13.03	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga Yang Telah Dibina Tentang Hak Anak	25%	15%	Dinas PPPA DALDUKKB	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.01 Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Regional	RAB.04.03.01.01 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DAP.13.04	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Data Gender Dan Anak Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	15%	15%	Dinas PPPA DALDUKKB	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.06 Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak	RAB.04.03.06.01 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DAP.13.05	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)				Dinas PPPA DALDUKKB	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.04 Perlindungan Anak	RAB.04.03.04.01 Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DAP.13.06	Program Perlindungan Khusus Anak	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Perlindungan Khusus Anak				Dinas PPPA DALDUKKB	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.04 Perlindungan Anak	RAB.04.03.04.02 Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DAP.14	Pangan	Proses Bisnis ini mencakup proses Pangan				Dinas Ketahanan Pangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian			
DAP.14.01	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Kelompok Pengelola Lumbung yang memiliki cadangan pangan	35,29%	26,47%	Dinas Ketahanan Pangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.04 Ketahanan Pangan	RAB.02.03.04.01 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
DAP.14.02	Program Peningkatan Diversifikasi Dan	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Peningkatan				Dinas Ketahanan Pangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.04 Ketahanan Pangan	RAB.02.03.04.02 Program Peningkatan Diversifikasi Dan	Dinas Ketahanan Pangan

	Ketahanan Pangan Masyarakat	Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat								Ketahanan Pangan Masyarakat	
DAP.14.03	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	3,52%	6,17%	Dinas Ketahanan Pangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.04 Ketahanan Pangan	RAB.02.03.04.03 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
DAP.14.04	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Daerah	87,8%	80%	Dinas Ketahanan Pangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.04 Ketahanan Pangan	RAB.02.03.04.04 Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
DAP.15	Lingkungan Hidup	Proses Bisnis ini mencakup proses Lingkungan Hidup				Dinas Lingkungan Hidup	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup			
DAP.15.01	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Perencanaan Lingkungan Hidup				Dinas Lingkungan Hidup	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	RAB.07.05.01.01 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
DAP.15.02	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup				Dinas Lingkungan Hidup	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.02 Pelestarian Lingkungan Hidup	RAB.07.05.02.01 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
DAP.15.03	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Keanekaragaman Hayati Yang Dikelola	30%	30%	Dinas Lingkungan Hidup	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.05 Sumber Daya Alam Dan Ekosistem	RAB.07.05.05.01 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
DAP.15.04	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	100%	67,86%	Dinas Lingkungan Hidup	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.02 Pelestarian Lingkungan Hidup	RAB.07.05.02.02 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
DAP.15.05	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Perusahaan/Instansi/Jasa/Usaha Kecil Yang Sudah Mengelola Lingkungan	100%	69,81%	Dinas Lingkungan Hidup	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	RAB.07.05.01.02 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Dinas Lingkungan Hidup

DAP.15.06	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH				Dinas Lingkungan Hidup	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	RAB.07.05.01.03 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup
DAP.15.07	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				Dinas Lingkungan Hidup	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	RAB.07.05.01.04 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
DAP.15.08	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				Dinas Lingkungan Hidup	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	RAB.07.05.01.05 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
DAP.15.09	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	100%	Dinas Lingkungan Hidup	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	RAB.07.05.01.06 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
DAP.15.10	Program Pengelolaan Persampahan	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Penurunan Volume Sampah	2,02%	1,03%	Dinas Lingkungan Hidup	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.02 Pelestarian Lingkungan Hidup	RAB.07.05.02.03 Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
DAP.16	Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	Proses Bisnis ini mencakup proses Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung					RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal			
DAP.16.01	Program Penataan Desa	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Penataan Desa	Cakupan Penataan Kampung	23%	16%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.03 Pembangunan Desa Dan Kawasan Pedesaan	RAB.03.05.03.01 Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
DAP.16.02	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan Kerjasama Kampung	25%	14%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.04 Pemberdayaan Masyarakat Desa	RAB.03.05.04.01 Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
DAP.16.03	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Administrasi Pemerintahan Desa				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah	RAB.03.05.03 Pembangunan Desa Dan Kawasan Pedesaan	RAB.03.05.03.02	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung

								Tertinggal			
DAP.16.04	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.03.05.04 Pemberdayaan Masyarakat Desa	RAB.03.05.04.02 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
DAP.17	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Proses Bisnis ini mencakup proses Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan			
DAP.17.01	Program Pengendalian Penduduk	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengendalian Penduduk	Presentase laju pertumbuhan Penduduk	0,9%	0,9%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.02 Pendampingan Hukum Dalam Rangka Pengendalian Penduduk	RAB.03.07.02.01 Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DAP.17.02	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Presentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeetned)	8%	9.5%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.03 Keluarga Berencana	RAB.03.07.03.01 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DAP.17.03	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	RAB.03.07.01.01 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DAP.18	Perhubungan	Proses Bisnis ini mencakup proses Perhubungan					RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi			
DAP.18.01	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan	Proses Bisnis ini mencakup proses Program				Dinas Perhubungan	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.04 Pengelolaan Sarana Dan Prasarana	RAB.03.03.04.01 Program Penyelenggaraan	Dinas Perhubungan

	Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)							Transportasi	Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
DAP.19	Informasi dan Komunikasi Publik	Proses Bisnis ini mencakup proses Informasi dan Komunikasi Publik					RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi			
DAP.19.01	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Pelayanan Informasi Publik Yang Dikelola	86%	83%	Dinas Kominfo	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.02 Pengelolaan Komunikasi; RAB.09.03.05 Pengelolaan Informasi Publik	RAB.09.03.02.01 Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
DAP.19.02	Program Aplikasi Informatika	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Aplikasi Informatika				Dinas Kominfo	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.01 Pengelolaan Informatika	RAB.09.03.01.01 Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
DAP.20	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Proses Bisnis ini mencakup proses Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah				Dinas Koperasi Umkm Perindustrian Dan Perdagangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 Usaha Kecil dan Menengah RAB.02.09 Koperasi			
DAP.20.01	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi Tertib Administrasi dan Perizinan Usaha	20%	40%	Dinas Koperasi Umkm Perindustrian Dan Perdagangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 Usaha Kecil dan Menengah RAB.02.09 Koperasi	RAB.02.10.02 Kelembagaan Usaha Kecil Dan Menengah	RAB.02.10.02.01 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
DAP.20.02	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	100%	15%	Dinas Koperasi Umkm Perindustrian Dan Perdagangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 Usaha Kecil dan Menengah RAB.02.09 Koperasi	RAB.02.09.04 Pengawasan Koperasi	RAB.02.09.04.01 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
DAP.20.03	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Penilaian Derajat Kesehatan Perkoperasian	18%	35%	Dinas Koperasi Umkm Perindustrian Dan Perdagangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 Usaha Kecil dan Menengah RAB.02.09 Koperasi	RAB.02.09.04 Pengawasan Koperasi	RAB.02.09.04.02 Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
DAP.20.04	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	76%	45%	Dinas Koperasi Umkm Perindustrian Dan Perdagangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 Usaha Kecil dan Menengah RAB.02.09 Koperasi	RAB.02.09.01 Pembinaan Koperasi	RAB.02.09.01.01 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

DAP.20.05	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Koperasi			Dinas Koperasi Umkm Perindustrian Dan Perdagangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 Usaha Kecil dan Menengah RAB.02.09 Koperasi	RAB.02.09.03 Pemberdayaan Dan Pembiayaan Koperasi	RAB.02.09.03.01 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
DAP.20.06	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Koperasi			Dinas Koperasi Umkm Perindustrian Dan Perdagangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 Usaha Kecil dan Menengah RAB.02.09 Koperasi	RAB.02.10.04 Pemberdayaan Dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	RAB.02.10.04.01 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
DAP.20.07	Program Pengembangan Umkm	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengembangan Umkm	Persentase Usaha Mikro Yang Meningkatkan Menjadi Usaha Kecil	41,67%	100%	Dinas Koperasi Umkm Perindustrian Dan Perdagangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 Usaha Kecil dan Menengah RAB.02.09 Koperasi	RAB.02.10.01 Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah	RAB.12.10.01.01 Program Pengembangan Umkm	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
DAP.21	Kepemudaan Dan Olahraga	Proses Bisnis ini mencakup proses Kepemudaan Dan Olahraga				Dinas Porapar	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja				
DAP.21.01	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				Dinas Porapar	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 Pemuda;	RAB.06.04.03 Pengembangan Pemuda	RAB.06.04.03.01 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
DAP.21.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				Dinas Porapar	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.05 Olahraga	RAB.06.05.01 Pembinaan Olahraga Regional	RAB.06.05.01.01 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
DAP.21.03	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Peningkatan Pembinaan Gugus depan	3,97%	4,13%	Dinas Porapar	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.05 Olahraga	RAB.06.05.03 Peningkatan Prestasi Olahraga	RAB.06.05.03 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
DAP.22	Kebudayaan	Proses Bisnis ini mencakup proses Kebudayaan				Dinas P&K	RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 Kebudayaan			
DAP.22.01	Program Pengembangan Kebudayaan	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengembangan Kebudayaan				Dinas P&K	RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.04 Pembinaan Kebudayaan Regional	RAB.08.02.04.01 Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

DAP.22.02	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan Pelestarian Kesenian Tradisional	70%	80%	Dinas P&K	RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.04 Pembinaan Kebudayaan Regional	RAB.08.02.04.02 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAP.22.03	Program Pembinaan Sejarah	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pembinaan Sejarah	Cakupan Pembinaan sejarah Lokal	65%	75%	Dinas P&K	RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.04 Pembinaan Kebudayaan Regional	RAB.08.02.04.03 Program Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAP.22.04	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	83,33%	88,10%	Dinas P&K	RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.04 Pembinaan Kebudayaan Regional	RAB.08.02.04.04 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAP.22.05	Pengelolaan Permuseuman	Proses Bisnis ini mencakup proses Pengelolaan Permuseuman				Dinas P&K	RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.03 Manajemen Budaya	RAB.08.02.03.01 Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAP.23	Perpustakaan	Proses Bisnis ini mencakup proses Perpustakaan				Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 Kebudayaan			
DAP.23.01	Perpustakaan	Proses Bisnis ini mencakup proses Perpustakaan				Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan	RAB.08.02.05.01 Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
DAP.23.02	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno				Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.06 Pembinaan Kepustakaan Dan Arsip Nasional	RAB.08.02.06.01 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
DAP.24	Kelautan Dan Perikanan	Proses Bisnis ini mencakup proses Kelautan Dan Perikanan				Dinas Perikanan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 Perikanan			
DAP.24.01	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Ikan Tangkap	201,65 Ton	204,8 Ton	Dinas Perikanan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 Perikanan	RAB.02.06.01 Pembinaan Perikanan	RAB.02.06.01.01 Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
DAP.24.02	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				Dinas Perikanan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 Perikanan	RAB.02.06.02 Pembinaan Perikanan	RAB.02.06.01.02 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
DAP.24.03	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan				Dinas Perikanan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 Perikanan	RAB.02.06.03 Pembinaan Perikanan Regional	02.06.01.03 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan

DAP.24.04	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan				Dinas Perikanan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 Perikanan	RAB.02.06.04 Pengelolaan Hasil Perikanan	RAB.02.06.03.01 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
DAP.25	Pariwisata	Proses Bisnis ini mencakup proses Pariwisata				Dinas Porapar	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 Pariwisata			
DAP.25.01	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				Dinas Porapar	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 Pariwisata	RAB.02.11.01 Pembinaan Pariwisata Regional	RAB.02.11.01 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
DAP.25.02	Program Pemasaran Pariwisata	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata	20%	20%	Dinas Porapar	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 Pariwisata	RAB.02.11.01 Pembinaan Pariwisata Regional	RAB.02.11.02 Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
DAP.25.03	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif	20%	100%	Dinas Porapar	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 Pariwisata	RAB.02.11.01 Pembinaan Pariwisata Regional	RAB.02.11.03 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
DAP.25.04	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Sumberdaya Pariwisata	20%	20%	Dinas Porapar	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 Pariwisata	RAB.02.11.01 Pembinaan Pariwisata Regional	RAB.02.11.04 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
DAP.26	Pertanian	Proses Bisnis ini mencakup proses Pertanian					RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian			
DAP.26.01	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian				Dinas TPHP dan Perkebunan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.01 Pembinaan Pertanian Regional	RAB.02.03.01.01 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
DAP.26.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian				Dinas TPHP dan Perkebunan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.01 Pembinaan Pertanian Regional	RAB.02.03.01.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
DAP.26.03	Program Pengendalian Kesehatan Hewan	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengendalian				Dinas TPHP dan Perkebunan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.01 Pembinaan Pertanian Regional	RAB.02.03.01.03 Program Pengendalian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

	Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner								Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peternakan
DAP.26.04	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian				Dinas TPHP dan Perkebunan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.01 Pembinaan Pertanian Regional	RAB.02.03.01.04 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
DAP.26.05	Program Perizinan Usaha Pertanian	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Perizinan Usaha Pertanian				Dinas TPHP dan Perkebunan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.01 Pembinaan Pertanian Regional	RAB.02.03.01.05 Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
DAP.26.06	Program Penyuluhan Pertanian	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Penyuluhan Pertanian				Dinas TPHP dan Perkebunan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.01 Pembinaan Pertanian Regional	RAB.02.03.01.06 Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
DAP.27	Perdagangan	Proses Bisnis ini mencakup proses Perdagangan				Dinas Indag	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan			
DAP.27.01	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	100%	100%	Dinas Indag	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan	RAB.02.02.03 Perdagangan Dalam Negeri	RAB.02.02.03.01 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DAP.27.02	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan pembinaan sarana distribusi	10,3%	15,5%	Dinas Indag	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan	RAB.02.02.01 Pembinaan Perdagangan Regional	RAB.02.02.01.02 Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DAP.27.03	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Cakupan Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi	100%	100%	Dinas Indag	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan	RAB.02.02.01 Pembinaan Perdagangan Regional	RAB.02.02.01.03 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DAP.27.04	Program Pengembangan Ekspor	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengembangan Ekspor	Persentase Promosi Produk Ekspor	50%	67%	Dinas Indag	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan	RAB.02.02.04 Ekspor Impor	RAB.02.02.04.01 Ekspor dan Impor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DAP.27.05	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Peningkatan Pengawasan Tera, Dan Tera Ulang	32,1%	39,3%	Dinas Indag	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan	RAB.02.02.01 Pembinaan Perdagangan Regional	RAB.02.02.01.05 Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

DAP.27.06	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Promosi Produk Dalam Negeri	100%	100%	Dinas Indag	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan	RAB.02.02.01 Pembinaan Perdagangan Regional	RAB.02.02.03.06 Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DAP.28	Perindustrian	Proses Bisnis ini mencakup proses Perindustrian				Dinas Indag	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri			
DAP.28.01	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri				Dinas Indag	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.01 Pembinaan Industri Regional	RAB.02.01.01 01 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DAP.28.02	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri	100%	100%	Dinas Indag	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.04 Pengelolaan Struktur Industri	RAB.02.01.04.01 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DAP.28.03	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Penerapan Sistem Informasi Industri Nasional	30%	50%	Dinas Indag	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.04 Pengelolaan Struktur Industri	RAB.02.01.04.02 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DAP.29	Transmigrasi	Proses Bisnis ini mencakup proses Transmigrasi				Dinas Nakertrans	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.02 Transmigrasi			
DAP.29.01	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi				Dinas Nakertrans	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.02 Transmigrasi	RAB.03.02.02 Bidang Transmigrasi	RAB.03.02.02.01 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DAP.29.02	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi				Dinas Nakertrans	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.02 Transmigrasi	RAB.03.02.04 Pengembangan Kawasan Transmigrasi	RAB.03.02.04.01 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DAP.30	Pendapatan Daerah	Proses Bisnis ini mencakup proses Pendapatan Daerah				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan			
DAP.30.01	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengelolaan Keuangan Daerah				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.06 Perbendaharaan	RAB.09.02.06.01 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
DAP.30.02	Program Pengelolaan	Proses Bisnis ini mencakup proses				Badan Pengelola	RAB.09 Pemerintahan	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.06 Perbendaharaan	RAB.09.02.06.02 Program Pengelolaan	Badan Pengelola Pendapatan

	Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				Keuangan dan Aset Daerah	Umum			Pendapatan Daerah	Daerah
DAP.31	Perencanaan	Proses Bisnis ini mencakup proses Perencanaan				Bappeda	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional			
DAP.31.01	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah				Bappeda	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01.01 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
DAP.31.02	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				Bappeda	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01.02 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
DAP.32	Anggaran	Proses Bisnis ini mencakup proses Anggaran				Badan Pendapatan Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.05 Penganggaran		
DAP.32.01	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	Proses Bisnis ini mencakup proses Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Badan Pendapatan Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.05 Penganggaran	RAB.09.02.05.01 Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DAP.33	Keuangan	Proses Bisnis ini mencakup proses Keuangan				Badan Pendapatan Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.01.07 Keuangan Daerah		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DAP.33.01	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengelolaan Keuangan Daerah				Badan Pendapatan Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.01.07 Keuangan Daerah	RAB.09.01.07.01 Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DAP.34	Pengadaan Barang dan Jasa	Proses Bisnis ini mencakup proses Pengadaan Barang dan Jasa				Sekretariat Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan			
DAP.34.01	Penyelesaian Pengadaan	Proses Bisnis ini mencakup proses Penyelesaian Pengadaan				Sekretariat Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan Dan Manajemen Aset	RAB.09.02.08.01 Penyelesaian Pengadaan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
DAP.34.02	Pengadaan Secara Elektronik	Proses Bisnis ini mencakup proses Pengadaan Secara Elektronik				Sekretariat Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan Dan Manajemen Aset	RAB.09.02.08.02 Pengadaan Secara Elektronik	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
DAP.34.03	Pembinaan dan Advokasi	Proses Bisnis ini mencakup proses				Sekretariat Daerah	RAB.09 Pemerintahan	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan Dan	RAB.09.02.08.03 Pembinaan dan	Bagian Pengadaan

	Pengadaan	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan					Umum		Manajemen Aset	Advokasi Pengadaan	Barang dan Jasa
DAP.35	Kepegawaian	Proses Bisnis ini mencakup proses Kepegawaian				BKPSDM	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara			
DAP.35.01	Program Kepegawaian Daerah	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Tertib Administrasi Kepegawaian	90	90	BKPSDM	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.09 Pengawasan Aparatur Negara	RAB.09.06.09.02 Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
DAP.36	Kearsipan	Proses Bisnis ini mencakup proses Kearsipan				Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 Kebudayaan			
DAP.36.01	Pengelolaan Arsip	Proses Bisnis ini mencakup proses Pengelolaan Arsip				Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.06 Pembinaan Perpustakaan Dan Arsip Nasional	RAB.08.02.06.02 Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
DAP.36.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Proses Bisnis ini mencakup proses Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip yang telah dilindung dan diselamatkan	15%	30%	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.06 Pembinaan Perpustakaan Dan Arsip Nasional	RAB.08.02.06.03 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
DAP.37	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Proses Bisnis ini mencakup proses Pengelolaan Barang Milik Daerah					RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan Dan Manajemen Aset		
DAP.37.01	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	70%	85%	BPKAD	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan Dan Manajemen Aset	RAB.09.02.08.01 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DAP.38	Pengawasan Internal	Proses Bisnis ini mencakup proses Pengawasan Internal				Inspektorat	RAB.09 Pemerintahan Umum	09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.05 Pengawasan Pemerintahan		
DAP.38.01	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Penyelenggaraan Pengawasan				Inspektorat	RAB.09 Pemerintahan Umum	09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.05 Pengawasan Pemerintahan	RAB.09.07.05.01 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
DAP.38.02	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi				Inspektorat	RAB.09 Pemerintahan Umum	09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.05 Pengawasan Pemerintahan	RAB.09.05.08.01 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
DAP.39	Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Proses Bisnis ini mencakup proses Akuntabilitas Kinerja Organisasi				Inspektorat	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.05 Akuntabilitas Kinerja		

DAP.39.01	Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Proses Bisnis ini mencakup proses Akuntabilitas Kinerja Organisasi				Inspektorat	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.05 Akuntabilitas Kinerja	RAB.09.06.05.01 Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Inspektorat
DAP.40	Akuntabilitas Kinerja Pegawai	Proses Bisnis ini mencakup proses Akuntabilitas Kinerja Pegawai				BKPSDM	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.05 Akuntabilitas Kinerja		
DAP.40.01	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Proses Bisnis ini mencakup proses Pengembangan Sumber Daya Manusia				BKPSDM	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.04 Pembinaan Reformasi Birokrasi	RAB.09.06.04.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
DAP.41	Penelitian dan Pengembangan	Proses Bisnis ini mencakup proses Penelitian dan Pengembangan					RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.06 Pengkajian Strategis		
DAP.41.01	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Proses Bisnis ini mencakup proses Penelitian dan Pengembangan Daerah				Bappeda	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.06 Pengkajian Strategis	RAB.09.07.06.01 Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
DAP.42	Kesatuan Bangsa Dan Politik	Proses Bisnis ini mencakup proses Kesatuan Bangsa Dan Politik					RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.07 Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan		
DAP.42.01	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Proses Bisnis ini mencakup proses Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan				Kesbangpol	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.07 Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan	RAB.09.07.07.01 Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan bangsa dan politik
DAP.42.02	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Proses Bisnis ini mencakup proses Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				Kesbangpol	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.07 Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan	RAB.09.07.07.02 PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan bangsa dan politik
DAP.42.03	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Proses Bisnis ini mencakup proses Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi				Kesbangpol	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.07 Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan	RAB.09.07.07.03 PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan bangsa dan politik

		Kemasyarakatan									
DAP.42.04	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Proses Bisnis ini mencakup proses Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya				Kesbangpol	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.07 Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan	RAB.09.07.07.04 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan bangsa dan politik
DAP.42.05	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Proses Bisnis ini mencakup proses Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial				Kesbangpol	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.07 Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan	RAB.09.07.07.05 PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan bangsa dan politik
DAP.43	Statistik	Proses Bisnis ini mencakup proses Statistik					RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi			
DAP.43.01	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Sektoral Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	15%	15%	Dinas Kominfo	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.03 Pengelolaan Data Statistik	RAB.09.03.03.02 Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
DAP.44	Persandian	Proses Bisnis ini mencakup proses Persandian					RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi			
DAP.44.01	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi	250 Poin	350 Poin	Dinas Kominfo	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.05 Pengelolaan Informasi Publik	09.03.05.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
DAP.45	Sekretariat Daerah	Proses Bisnis ini mencakup proses Sekretariat Daerah					RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara			

DAP.45.01	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Proses Bisnis ini mencakup proses Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				Sekretariat Daerah; Sekretariat Daerah (Tapem); Sekretariat Daerah (Kesra); Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama); Sekretariat Daerah (Kesra); Sekretariat Daerah (Perekonomian)	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.06 Manajemen Pelayanan Publik	RAB.09.06.06.01 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
DAP.45.02	Program Perekonomian dan Pembangunan	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Perekonomian dan Pembangunan				Sekretariat Daerah; Sekretariat Daerah (SDA); Sekretariat Daerah (Tapem); Sekretariat Daerah (Perekonomian)	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara	RAB.09.06.01.01 Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
DAP.45.03	Pengelolaan Izin Lokasi	Proses Bisnis ini mencakup proses Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase Pemberian Izin Lokasi	100%	100%	Sekretariat Daerah (Tapem)			RAB.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara	RAB.09.06.01.02 Pengelolaan Izin Lokasi	Sekretariat Daerah
DAP.46	Sekretariat DPRD	Proses Bisnis ini mencakup proses Sekretariat DPRD				Sekwan; Sekretariat DPRD	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara			
DAP.46.01	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Proses Bisnis ini mencakup proses Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				Sekwan; Sekretariat DPRD	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara	RAB.09.06.03 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD

III. Lampiran Arsitektur Layanan Abacus

Tabel 42 Arsitektur Layanan Abacus

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	→ RAL Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
DAL.01	Pengaduan Pelayanan publik	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengaduan Pelayanan publik di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.03 Kenegaraan	RAL 01.03.01 Kelembagaan Negara	RAL 01.03.01.01 Pengaduan Pelayanan publik	
DAL.01.01	Pengaduan Pelayanan Publik	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengaduan Pelayanan Publik di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.03.05.01 Pengaduan Pelayanan Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.03 Kenegaraan	RAL 01.03.01 Kelembagaan Negara	RAL 01.03.01.01 Pengaduan Pelayanan publik	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
DAL.02	Layanan Data Terbuka	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Data Terbuka di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	RAL 01.43.03.01 Layanan Data Terbuka	
DAL.02.01	Pelayanan Data Terbuka	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pelayanan Data Terbuka di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.03.03.01 Data Terbuka	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	RAL 01.43.03.01 Layanan Data Terbuka	Dinas Komunikasi dan Informatika
DAL.03	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	RAL 01.43.03.02 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	

		Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Way Kanan					(JDIH)	
DAL.03.01	Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.03.05.02 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL 01.43.03 Pelayanan Informasi	RAL 01.43.03.02 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
DAL.04	Layanan Penanaman Modal	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penanaman Modal di Kabupaten Way Kanan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi			
DAL.04.01	Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.08.01.01 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.03 Pengembangan Sektor Usaha Penanaman Modal	RAL 01.12.03.01 Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
DAL.04.02	Layanan Promosi Penanaman Modal	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Promosi Penanaman Modal di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.08.02.01 Program Promosi Penanaman Modal	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.08 Promosi Penanaman Modal	RAL 01.12.08.01 Layanan Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
DAL.04.03	Pelayanan Penanaman Modal	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pelayanan Penanaman Modal di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.08.02.02 Program Pelayanan Penanaman Modal	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.04 Penanaman Modal Nasional	RAL 01.12.04.01 Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu

DAL.04.04	Layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.08.04.01 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.05 Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	RAL 01.12.05.01 layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
DAL.04.05	Layanan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.08.02.03 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.12 Investasi	RAL 01.12.06 Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal	RAL 01.12.06.01 Layanan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
DAL.05	Layanan Sosial	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Sosial di Kabupaten Way Kanan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial			
DAL.05.01	Layanan Pemberdayaan Sosial	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pemberdayaan Sosial di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses 04.02.01.01 Program Pemberdayaan Sosial	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial	RAL 01.26.01.01 Layanan Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
DAL.05.02	Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses 04.02.01.02 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.02 Penanganan Fakir Miskin	RAL 01.26.02.01 Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial

DAL.05.03	Layanan Rehabilitasi Sosial	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Rehabilitasi Sosial di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.04.02.01.03 Program Rehabilitasi Sosial	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial	RAL 01.26.01.02 Layanan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
DAL.05.04	Layanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.04.02.03.01 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial	RAL 01.26.01.03 Layanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
DAL.05.05	Layanan Pengelolaan Taman Makam	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Taman Makam di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.04.02.03.02 Program Pengelolaan Taman Makam	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.02 Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem	RAL 01.40.02.01 Layanan Pengelolaan Taman Makam	Dinas Sosial
DAL.05.06	Layanan Penanganan Bencana	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penanganan Bencana di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.04.02.06.01 Program Penanganan Bencana	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.26 Sosial	RAL 01.26.01 Kebijakan Jaminan Sosial	RAL 01.26.01.04 Layanan Penanganan Bencana	Dinas Sosial
DAL.06	Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Way Kanan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan			

DAL.06.01	Layanan Pendaftaran Penduduk	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.01.08.01 Program Pendaftaran Penduduk	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	RAL 01.23.02.01 Layanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
DAL.06.02	Layanan Pencatatan Sipil	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pencatatan Sipil di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.01.08.02 Program Pencatatan Sipil	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.03 Pencatatan Sipil	RAL 01.23.03.01 Layanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
DAL.06.03	Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.01.08.03 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.03 Pencatatan Sipil	RAL 01.23.03.02 Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
DAL.06.04	Layanan Pengelolaan Profil Kependudukan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Profil Kependudukan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.01.08.04 Program Pengelolaan Profil Kependudukan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.03 Pencatatan Sipil	RAL 01.23.03.03 Layanan Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
DAL.07	Layanan Pendidikan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pendidikan di Kabupaten Way Kanan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

DAL.07.01	Layanan Pengelolaan Pendidikan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.06.01.01.01 Program Pengelolaan Pendidikan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar	RAL 01.31.03.01 Layanan Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAL.07.02	Layanan Pengembangan Kurikulum	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengembangan Kurikulum di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.06.01.01.02 Program Pengembangan Kurikulum	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar	RAL 01.31.03.02 Layanan Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAL.07.03	Layanan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.06.01.02.01 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.01 Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	RAL 01.31.01.01 Layanan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAL.07.04	Layanan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengembangan Bahasa dan Sastra di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.06.03.04.01 Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.31 Pendidikan	RAL 01.31.03 Pendidikan Dasar	RAL 01.31.03.03 Layanan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAL.08	Layanan Kesehatan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Kesehatan di Kabupaten Way Kanan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan			

DAL.08.01	Layanan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.04.01.03.01 Program Upaya Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	RAL 01.25.02.01 Layanan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
DAL.08.02	Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.04.01.04.01 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.03 Pemberdayaan Tenaga Kesehatan	RAL 01.25.03.01 Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
DAL.08.03	Layanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.04.01.02.01 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.01 Farmasi Dan Alat Kesehatan	RAL 01.25.01.01 Layanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
DAL.08.04	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.04.01.01.01 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.25 Kesehatan	RAL 01.25.02 Kesehatan Masyarakat	RAL 01.25.02.02 Layanan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan

DAL.09	Layanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Way Kanan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum			
DAL.09.01	Layanan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.01.05.01 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	RAL 01.17.01.01 Layanan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DAL.09.02	Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.01.05.02 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	RAL 01.17.01.02 Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DAL.09.03	Layanan Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.01.01.01 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	RAL 01.17.01.03 Layanan Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DAL.09.04	Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah di	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.01.04.01 Program Pengelolaan Dan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	RAL 01.17.01.04 Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

		Kabupaten Way Kanan	Pengembangan Sistem Air Limbah					
DAL.09.05	Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.01.02.02 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	RAL 01.17.01.05 Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DAL.09.06	Layanan Program Penataan Bangunan Gedung	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Program Penataan Bangunan Gedung di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.01.01.02 Program Penataan Bangunan Gedung	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	RAL 01.17.01.06 Layanan Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DAL.09.07	Layanan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.01.01.03 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	RAL 01.17.01.07 Layanan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DAL.09.08	Layanan Program Penyelenggaraan Jalan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Program Penyelenggaraan Jalan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.01.02.03 Program Penyelenggaraan Jalan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	RAL 01.17.01.08 Layanan Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

DAL.09.09	Layanan Pengembangan Jasa Kontruksi	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengembangan Jasa Kontruksi di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.01.03.01 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	RAL 01.17.01.09 Layanan Pengembangan Jasa Kontruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DAL.09.10	Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.01.01.04 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL 01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	RAL 01.17.01.10 Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DAL.10	Layanan Perumahan Dan Permukiman	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Perumahan Dan Permukiman di Kabupaten Way Kanan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan			
DAL.10.01	Layanan Pengembangan Perumahan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengembangan Perumahan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.04.05.01 Program Pengembangan Perumahan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman	RAL 01.20.01.01 Layanan Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DAL.10.02	Layanan Kawasan Permukiman	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Kawasan Permukiman di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.04.03.01 Program Kawasan Permukiman	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman	RAL 01.20.01.02 Layanan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

DAL.10.03	Layanan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.04.05.02 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.02 Kawasan Permukiman	RAL.01.20.02.01 Layanan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DAL.10.04	Layanan Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.04.04.01 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman	RAL 01.20.01.03 Layanan Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DAL.10.05	Layanan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.06.05.01 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.02 Kawasan Permukiman	RAL 01.20.02.01 Layanan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DAL.10.06	Layanan Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.06.02.01 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman	RAL 01.20.01.04 Layanan Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

DAL.10.07	Layanan Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.06.02.02 Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.02 Kawasan Permukiman	RAL 01.20.02.02 Layanan Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DAL.10.08	Layanan Penetapan Tanah Ulayat	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penetapan Tanah Ulayat di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.06.03.01 Program Penetapan Tanah Ulayat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman	RAL 01.20.01.05 Layanan Penetapan Tanah Ulayat	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DAL.10.09	Layanan Pengelolaan Tanah Kosong	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Tanah Kosong di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.06.04.01 Program Pengelolaan Tanah Kosong	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.01 Infrastruktur Permukiman	RAL 01.20.01.06 Layanan Pengelolaan Tanah Kosong	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DAL.10.10	Layanan Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Izin Membuka Tanah di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.06.03.02 Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.02 Kawasan Permukiman	RAL 01.20.02.03 Layanan Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DAL.10.11	Layanan Penatagunaan Tanah	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penatagunaan Tanah di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.06.04.02 Program Penatagunaan Tanah	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL 01.20.02 Kawasan Permukiman	RAL 01.20.02.04 Layanan Penatagunaan Tanah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

DAL.11	Layanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan			
DAL.11.01	Layanan Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.05.02.01.01 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.29 Keamanan	RAL 01.29.06 Keamanan Dan Ketertiban Umum	RAL 01.29.06.01 Layanan Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
DAL.11.02	Layanan Penanggulangan Bencana	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.04.02.06.01 Penanggulangan Bencana	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.06 Penanggulangan Bencana	RAL 01.40.06.01 Layanan Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
DAL.11.03	Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.04.02.06.02 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.07 Pencarian Dan Pertolongan	RAL 01.40.07.01 Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pemadam Kebakaran
DAL.12	Layanan Tenaga Kerja	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Tenaga Kerja di		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan			

		Kabupaten Way Kanan						
DAL.12.01	Layanan Perencanaan Tenaga Kerja	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Perencanaan Tenaga Kerja di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.06.02.02.01 Program Perencanaan Tenaga Kerja	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL 01.32.02 Pengelolaan Ketenagakerjaan	RAL 01.32.02.01 Layanan Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DAL.12.02	Layanan Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.06.02.01.02 Program Perencanaan Tenaga Kerja.	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL 01.32.04 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	RAL 01.32.04.01 Layanan Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DAL.12.03	Layanan Penempatan Tenaga Kerja	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.02.01.03 Program Penempatan Tenaga Kerja	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL 01.32.05 Penempatan Tenaga Kerja	RAL 01.32.05.01 Layanan Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DAL.12.04	Layanan Hubungan Industrial	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Hubungan Industrial di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.06.02.03.01 Program Hubungan Industrial	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL 01.32.05 Penempatan Tenaga Kerja	RAL 01.32.05.02 Layanan Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DAL.13	Layanan Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Kabupaten Way		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan			

		Kanan						
DAL.13.01	Layanan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.04.03.03.01 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan	RAL 01.27.01 Kesetaraan Gender	RAL 01.27.01.01 Layanan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DAL.13.02	Layanan Perlindungan Perempuan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.04.03.05.01 Program Perlindungan Perempuan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan	RAL 01.27.03 Perlindungan Hak Perempuan	RAL 01.27.03.01 Layanan Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DAL.13.03	Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.04.03.01.01 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan	RAL 01.27.01 Kesetaraan Gender	RAL 01.27.01.02 Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DAL.13.04	Layanan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak di Kabupaten	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.04.03.06.01 Program Pengelolaan Sistem	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan	RAL 01.27.02 Perlindungan Anak	RAL 01.27.02.01 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

		Way Kanan	Data Gender Dan Anak					Penduduk dan Keluarga Berencana
DAL.13.05	Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA) di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.04.03.04.01 Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan	RAL 01.27.02 Perlindungan Anak	RAL 01.27.02.02 Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DAL.13.06	Layanan Perlindungan Khusus Anak	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Perlindungan Khusus Anak di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.04.03.04.02 Program Perlindungan Khusus Anak	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan	RAL 01.27.02 Perlindungan Anak	RAL 01.27.02.03 Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DAL.14	Layanan Pangan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pangan di Kabupaten Way Kanan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian			
DAL.14.01	Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.03.04.01 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	RAL 01.07.02.01 Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan

DAL.14.02	Layanan Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.03.04.02 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	RAL 01.07.02.02 Layanan Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
DAL.14.03	Layanan Penanganan Kerawanan Pangan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penanganan Kerawanan Pangan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.03.04.03 Program Penanganan Kerawanan Pangan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	RAL 01.07.02.03 Layanan Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
DAL.14.04	Layanan Pengawasan Keamanan Pangan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.03.04.04 Program Pengawasan Keamanan Pangan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.02 Ketahanan Pangan	RAL 01.07.02.04 Layanan Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
DAL.15	Layanan Lingkungan Hidup	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Lingkungan Hidup di Kabupaten Way Kanan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup			
DAL.15.01	Layanan Perencanaan Lingkungan Hidup	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Perencanaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.07.05.01.01 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.02 Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem	RAL 01.40.02.02 Layanan Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

DAL.15.02	Layanan Pengendalian Pencemaran Dan/Kerusakan Lingkungan Hidup	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengendalian Pencemaran Dan/Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.07.05.02.01 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	RAL 01.40.04.01 Layanan Pengendalian Pencemaran Dan/Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
DAL.15.03	Layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.07.05.05.01 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.02 Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem	RAL 01.40.02.03 Layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
DAL.15.04	Layanan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.07.05.02.02 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	RAL 01.40.04.02 Layanan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
DAL.15.05	Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.07.05.01.02 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	RAL 01.40.04.03 Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup

		(PPLH) di Kabupaten Way Kanan	Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)					
DAL.15.06	Layanan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.07.05.01.03 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	RAL 01.40.04.04 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Dinas Lingkungan Hidup
DAL.15.07	Layanan Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.07.05.01.04 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.01 Dampak Perubahan Iklim	RAL 01.40.01.01 Layanan Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
DAL.15.08	Layanan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.07.05.01.05 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	RAL 01.40.04.05 Layanan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup

DAL.15.09	Layanan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.07.05.01.06 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	RAL 01.40.04.06 Layanan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
DAL.15.10	Layanan Pengelolaan Persampahan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.07.05.02.03 Program Pengelolaan Persampahan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.40 Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04 Pengawasan Dan Keamanan Sumber Daya Alam	RAL 01.40.04.07 Layanan Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
DAL.16	Layanan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa di Kabupaten Way Kanan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah			
DAL.16.01	Layanan Penataan Desa	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penataan Desa di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.05.03.01 Program Penataan Desa	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.02 Otonomi Daerah	RAL 01.24.02.01 Layanan Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
DAL.16.02	Layanan Peningkatan Kerja Sama Desa	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Peningkatan Kerja Sama Desa di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.05.04.01 Program Peningkatan Kerjasama Desa	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.03 Administrasi Kewilayahan	RAL 01.24.03.01 Layanan Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung

DAL.16.03	Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.05.03.02	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	RAL 01.24.06.01 Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
DAL.16.04	Layanan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.05.04.02 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.24 Pemerintahan daerah	RAL 01.24.01 Keikutsertaan Masyarakat	RAL 01.24.01.01 Layanan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
DAL.17	Layanan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana di Kabupaten Way Kanan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan			
DAL.17.01	Layanan Pengendalian Penduduk	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengendalian Penduduk di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.07.02.01 Program Pengendalian Penduduk	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.01 Pengendalian Penduduk	RAL 01.23.01.01 Layanan Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

DAL.17.02	Layanan Pembinaan Keluarga Berencanaan (KB)	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pembinaan Keluarga Berencanaan (KB) di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.07.03.01 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.04 Keluarga Berencana	RAL 01.23.04.01 Layanan Pembinaan Keluarga Berencanaan (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DAL.17.03	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.07.01.01 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.23 Kependudukan	RAL 01.23.02 Kebijakan Kependudukan	RAL 01.23.02.01 Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DAL.18	Layanan Perhubungan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Perhubungan di Kabupaten Way Kanan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.19 Transportasi			
DAL.18.01	Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.03.04.01 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.19 Transportasi	RAL 01.19.02 Pelayanan Transportasi	RAL 01.19.02.01 Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
DAL.19	Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik di Kabupaten Way		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.44 Komunikasi	RAL 01.44.02 Sistem Komunikasi Publik		

		Kanan						
DAL.19.01	Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.03.02.01 Program Informasi dan Komunikasi Publik	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.44 Komunikasi	RAL 01.44.02 Sistem Komunikasi Publik	RAL 01.44.02.01 Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
DAL.19.02	Layanan Aplikasi Informatika	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Aplikasi Informatika di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.03.01.01 Program Aplikasi Informatika	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.44 Komunikasi	RAL 01.44.02 Sistem Komunikasi Publik	RAL 01.44.02.02 Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
DAL.20	Layanan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah di Kabupaten Way Kanan		RAL.01 Layanan Publik				
DAL.20.01	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.10.02.01 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.14 Usaha Kecil dan Menengah	RAL 01.14.01 Dukungan Bisnis	RAL 01.14.01.01 Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
DAL.20.02	Layanan Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.09.04.01 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.13 Koperasi	RAL 01.13.01 Koperasi Dan Usaha Mikro	RAL 01.13.01.01 Layanan Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

			Koperasi					
DAL.20.03	Layanan Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.09.04.02 Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.13 Koperasi	RAL 01.13.01 Koperasi Dan Usaha Mikro	RAL 01.13.01.02 Layanan Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
DAL.20.04	Layanan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.09.01.01 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.13 Koperasi	RAL 01.13.01 Koperasi Dan Usaha Mikro	RAL 01.13.01.03 Layanan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
DAL.20.05	Layanan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.09.03.01 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.13 Koperasi	RAL 01.13.01 Koperasi Dan Usaha Mikro	RAL 01.13.01.04 Layanan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
DAL.20.06	Layanan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.10.04.01 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.13 Koperasi	RAL 01.13.01 Koperasi Dan Usaha Mikro	RAL 01.13.01.05 Layanan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

DAL.20.07	Layanan Pengembangan Umkm	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengembangan Umkm di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.12.10.01.01 Program Pengembangan Umkm	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.13 Koperasi	RAL 01.13.01 Koperasi Dan Usaha Mikro	RAL 01.13.01.06 Layanan Pengembangan Umkm	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
DAL.21	Layanan Kepemudaan Dan Olahraga	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Kepemudaan Dan Olahraga di Kabupaten Way Kanan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.35 Olahraga			
DAL.21.01	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.06.04.03.01 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.35 Olahraga	RAL 01.35.01 Pemberdayaan Pemuda	RAL 01.35.01.01 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
DAL.21.02	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.06.05.01.01 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.35 Olahraga	RAL 01.35.01 Kebijakan Di Bidang Pembudayaan Olahraga	RAL 01.35.01.02 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
DAL.21.03	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.06.05.03 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.35 Olahraga	RAL 01.35.02 Kebijakan Di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	RAL 01.35.02.01 Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata

DAL.22	Layanan Kebudayaan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Kebudayaan di Kabupaten Way Kanan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.42 Kebudayaan			
DAL.22.01	Pengembangan Kebudayaan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengembangan Kebudayaan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.08.02.04.01 Program Pengembangan Kebudayaan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.42 Kebudayaan	RAL 01.42.01 Kebijakan Kebudayaan	RAL 01.42.01.01 Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAL.22.02	Pengembangan Keseniaan Tradisional	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengembangan Keseniaan Tradisional di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.08.02.04.02 Program Pengembangan Keseniaan Tradisional	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.42 Kebudayaan	RAL 01.42.02 Perfilman Dan Kesenian	RAL 01.42.02.01 Pengembangan Keseniaan Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAL.22.03	Pembinaan Sejarah	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pembinaan Sejarah di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.08.02.04.03 Program Pembinaan Sejarah	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.42 Kebudayaan	RAL 01.42.01 Kebijakan Kebudayaan	RAL 01.42.01.02 Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAL.22.04	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.08.02.04.04 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.42 Kebudayaan	RAL 01.42.04 Cagar Budaya	RAL 01.42.04.01 Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAL.22.05	Pengelolaan Permuseuman	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengelolaan Permuseuman di	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.08.02.03.01 Program	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.42 Kebudayaan	RAL 01.42.04 Cagar Budaya	RAL 01.42.04.02 Pengelolaan Permuseuman	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		Kabupaten Way Kanan	Pengelolaan Permuseuman					
DAL.23	Layanan Perpustakaan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Perpustakaan di Kabupaten Way Kanan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.42 Kebudayaan			
DAL.23.01	Layanan Pembinaan Perpustakaan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pembinaan Perpustakaan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.08.02.05.01 Program Pembinaan Perpustakaan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.42 Kebudayaan	RAL 01.42.01 Kebijakan Kebudayaan	RAL 01.42.01.01 Layanan Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
DAL.23.02	Layanan Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.08.02.06.01 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.42 Kebudayaan	RAL 01.42.03 Sastra Dan Bahasa Indonesia	RAL 01.42.03.01 Layanan Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
DAL.24	Layanan Kelautan Dan Perikanan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Kelautan Dan Perikanan di Kabupaten Way Kanan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.10 Perikanan			
DAL.24.01	Layanan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Perikanan Tangkap di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.06.01.01 Pengelolaan Perikanan Tangkap	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.10 Perikanan	RAL 01.10.01 Perikanan Budi Daya	RAL.01.10.01.01 Layanan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan

DAL.24.02	Layanan Pengelolaan Perikanan Budidaya	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Perikanan Budidaya di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.06.01.02 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.10 Perikanan	RAL 01.10.01 Perikanan Budi Daya	RAL.01.10.01.02 Layanan Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
DAL.24.03	Layanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses 02.06.01.03 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.10 Perikanan	RAL 01.10.02 Benih Dan Bibit Perikanan Budi Daya	RAL.01.10.02.01 Layanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan
DAL.24.04	Layanan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.06.03.01 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.10 Perikanan	RAL 01.10.03 Kebijakan Di Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya	RAL.01.10.03.01 Layanan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
DAL.25	Layanan Pariwisata	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pariwisata di Kabupaten Way Kanan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata			
DAL.25.01	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.11.01 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	RAL 01.15.01 Pengembangan Kepariwisata	RAL.01.15.01.01 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata

DAL.25.02	Pemasaran Pariwisata	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.11.02 Program Pemasaran Pariwisata	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	RAL 01.15.02 Pengembangan Lembaga Kepariwisata	RAL.01.15.02.01 Pemasaran Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
DAL.25.03	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.11.03 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	RAL 01.15.03 Pengembangan Objek Wisata	RAL.01.15.03.01 Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
DAL.25.04	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.11.04 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.15 Pariwisata	RAL 01.15.03 Pengembangan Objek Wisata	RAL.01.15.03.01 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
DAL.26	Layanan Pertanian	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pertanian di Kabupaten Way Kanan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian			
DAL.26.01	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.03.01.01 Program Penyediaan Dan Pengembangan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.01 Pertanian	RAL 01.07.01.01 Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

		Kanan	Sarana Pertanian					
DAL.26.02	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.03.01.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.01 Pertanian	RAL 01.07.01.02 Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
DAL.26.03	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.03.01.03 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.01 Pertanian	RAL 01.07.01.03 Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
DAL.26.04	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.03.01.04 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.01 Pertanian	RAL 01.07.01.04 Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
DAL.26.05	Perizinan Usaha Pertanian	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Perizinan Usaha Pertanian di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.03.01.05 Program Perizinan Usaha Pertanian	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.01 Pertanian	RAL 01.07.01.05 Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

DAL.26.06	Penyuluhan Pertanian	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.03.01.06 Program Perizinan Usaha Pertanian	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.07 Pertanian	RAL 01.07.01 Pertanian	RAL 01.07.01.06 Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
DAL.27	Layanan Perdagangan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Perdagangan di Kabupaten Way Kanan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.06 Perdagangan			
DAL.27.01	Layanan Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.02.03.01 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.06 Perdagangan	RAL 01.06.04 Perdagangan Domestik	RAL 01.06.04.01 Layanan Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DAL.27.02	Layanan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.02.01.02 Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.06 Perdagangan	RAL 01.06.04 Perdagangan Domestik	RAL 01.06.04.02 Layanan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DAL.27.03	Layanan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.02.01.03 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.06 Perdagangan	RAL 01.06.04 Perdagangan Domestik	RAL 01.06.04.03 Layanan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

DAL.27.04	Layanan Ekspor	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Ekspor di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.02.04,01 Ekspor dan Impor	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.06 Perdagangan	RAL 01.06.01 Ekspor Dan Impor	RAL 01.06.01.01 Ekspor Impor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DAL.27.05	Layanan Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.02.01.05 Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.06 Perdagangan	RAL 01.06.05 Perlindungan Konsumen	RAL 01.06.05.01 Layanan Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DAL.27.06	Layanan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.02.03.06 Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.06 Perdagangan	RAL 01.06.02 Penggunaan Produk Dalam Negeri	RAL 01.06.02.01 Layanan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DAL.28	Layanan Perindustrian	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Perindustrian di Kabupaten Way Kanan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri			
DAL.28.01	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Perencanaan Dan Pembangunan Industri di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.01.01 01 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.08 Pengembangan Industri	RAL 01.05.08.01 Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

DAL.28.02	Layanan Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.01.04.01 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.10 Pengembangan Industri Strategis	RAL 01.05.10.01 Layanan Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DAL.28.03	Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.02.01.04.02 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.05 Industri	RAL 01.05.06 Ketahanan Industri	RAL 01.05.06.01 Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DAL.29	Layanan Transmigrasi	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Transmigrasi di Kabupaten Way Kanan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.18 Transmigrasi	RAL.01.18.01 Layanan Transmigrasi		
DAL.29.01	Layanan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Perencanaan Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.02.02.01 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.18 Transmigrasi	RAL.01.18.01 Layanan Transmigrasi	RAL.01.18.01.01 Layanan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DAL.29.02	Layanan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.03.02.04.01 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.18 Transmigrasi	RAL.01.18.01 Layanan Transmigrasi	RAL.01.18.01.02 Layanan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

DAL.30	Pendapatan Daerah	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pendapatan Daerah di Kabupaten Way Kanan		RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	RAL 02.02.01 Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara		
DAL.30.01	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.02.06.01 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	RAL 02.02.01 Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara	RAL 02.02.01.01 Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
DAL.30.02	Layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.02.06.02 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	RAL 02.02.01 Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara	RAL 02.02.01.02 Layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
DAL.31	Layanan Perencanaan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Perencanaan di Kabupaten Way Kanan		RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional			
DAL.31.01	Layanan Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.05.01.01 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAL 02.03.02 Penyusunan Perencanaan	RAL 02.03.02.01 Layanan Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

DAL.31.02	Layanan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.05.01.02 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAL 02.03.03 Koordinasi Perencanaan	RAL 02.03.03.01 Layanan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
DAL.32	Layanan Anggaran	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Anggaran di Kabupaten Way Kanan		RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan			
DAL.32.01	Layanan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.02.05.01 Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	RAL 02.02.04 Penganggaran	RAL 02.02.04.01 Layanan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DAL.33	Layanan Keuangan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Keuangan di Kabupaten Way Kanan		RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DAL.33.01	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.01.07.01 Pengelolaan Keuangan Daerah	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	RAL 02.02.01 Pemeriksaan Pengelola Keuangan Negara	RAL 02.02.01.01 Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

DAL.34	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Way Kanan		RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.06 Dukungan operasional organisasi	RAL 02.02.08 Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		
DAL.34.01	Layanan Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.02.08.01 Penyelesaian Pengadaan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.06 Dukungan operasional organisasi	RAL 02.02.08 Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	RAL 02.02.08.01 Layanan Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
DAL.34.02	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.02.08.02 Pengadaan Secara Elektronik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.06 Dukungan operasional organisasi	RAL 02.02.08 Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	RAL 02.02.08.02 Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
DAL.34.03	Layanan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.02.08.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.06 Dukungan operasional organisasi	RAL 02.02.08 Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	RAL 02.02.08.03 Layanan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
DAL.35	Layanan Kepegawaian	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Kepegawaian di Kabupaten Way Kanan		RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara			

DAL.35.01	Layanan Kepegawaian Daerah	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.06.09.02 Program Kepegawaian Daerah	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.01 Manajemen ASN	RAL 02.04.01.01 Layanan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
DAL.36	Layanan Kearsipan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Kearsipan di Kabupaten Way Kanan		RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintah			
DAL.36.01	Layanan Pengelolaan Arsip	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Arsip di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.08.02.06.02 Pengelolaan Arsip	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintah	RAL 02.06.18 Dukungan Kearsipan	RAL 02.06.18.01 Layanan Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
DAL.36.02	Layanan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.08.02.06.03 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintah	RAL 02.06.18 Dukungan Kearsipan	RAL 02.06.18.02 Layanan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
DAL.37	Layanan Pengelolaan Aset	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Aset di Kabupaten Way Kanan		RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan			
DAL.37.01	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.02.08.01 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	RAL 02.02.05 Pengelolaan Barang Milik Negara	RAL 02.02.05.01 Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

DAL.38	Layanan Inspektorat Daerah	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Inspektorat Daerah di Kabupaten Way Kanan		RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.07 Akuntabilitas Kinerja	RAL 02.07.02 Pengawasan Kinerja		Inspektorat
DAL.38.01	Layanan Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penyelenggaraan Pengawasan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.07.05.01 Program Penyelenggaraan Pengawasan	RAL.02 Administrasi Pemerintahan	RAL.02.07 Akuntabilitas Kinerja	RAL 02.07.02 Pengawasan Kinerja	RAL 02.07.02.01 Layanan Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
DAL.38.02	Layanan Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.05.08.01 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	RAL.02 Administrasi Pemerintahan	RAL.02.07 Akuntabilitas Kinerja	RAL 02.07.02 Pengawasan Kinerja	RAL 02.07.02.02 Layanan Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Inspektorat
DAL.39	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses	RAL.02 Administrasi Pemerintahan	RAL.02.07 Akuntabilitas Kinerja	RAL 02.07.02 Pengawasan Kinerja		Inspektorat
DAL.39.01	Pelayanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pelayanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi di Kabupaten Way Kanan		RAL.02 Administrasi Pemerintahan	RAL.02.07 Akuntabilitas Kinerja	RAL 02.07.02 Pengawasan Kinerja	RAL 02.07.02.03 Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Inspektorat

DAL.40	Layanan Akuntabilitas Kinerja Pegawai	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Akuntabilitas Kinerja Pegawai di Kabupaten Way Kanan		RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.03 Pendidikan Dan Pelatihan Keahlian		
DAL.40.01	Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.06.04.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.03 Pendidikan Dan Pelatihan Keahlian	RAL 02.04.03.01 Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
DAL.41	Layanan Penelitian dan Pengembangan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Way Kanan		RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	RAL 02.08.08 Pengendalian Sumber Daya Kerja Sama		
DAL.41.01	Layanan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.07.06.01 Penelitian dan Pengembangan Daerah	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola	RAL 02.08.08 Pengendalian Sumber Daya Kerja Sama	RAL 02.08.08.01 Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
DAL.42	Layanan Kesatuan Bangsa dan Politik	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Way Kanan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.03 Kenegaraan	RAL 01.03.02 Nilai-Nilai Kebangsaan		

DAL.42.01	Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.07.07.01 Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.03 Kenegaraan	RAL 01.03.02 Nilai-Nilai Kebangsaan	RAL 01.03.02.01 Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan bangsa dan politik
DAL.42.02	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.07.07.02 PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.03 Kenegaraan	RAL 01.03.02 Nilai-Nilai Kebangsaan	RAL 01.03.02.02 Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan bangsa dan politik
DAL.42.03	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.07.07.03 PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.03 Kenegaraan	RAL 01.03.02 Nilai-Nilai Kebangsaan	RAL 01.03.02.03 Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan bangsa dan politik
DAL.42.04	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.07.07.04 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.03 Kenegaraan	RAL 01.03.02 Nilai-Nilai Kebangsaan	RAL 01.03.02.04 Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Badan Kesatuan bangsa dan politik

		Kanan	EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
DAL.42.05	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.07.07.05 PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.03 Kenegaraan	RAL 01.03.02 Nilai-Nilai Kebangsaan	RAL 01.03.02.05 Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan bangsa dan politik
DAL.43	Layanan Statistik	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Statistik di Kabupaten Way Kanan		RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.44 - Informasi	RAL 02.09.06 Statistik Sektoral		
DAL.43.01	Layanan Statistik Sektoral	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Statistik Sektoral di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.03.03.02 Penyelenggaraan Statistik Sektoral	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.44 - Informasi	RAL 02.09.06 Statistik Sektoral	RAL 02.09.06.01 Layanan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
DAL.44	Layanan Persandian	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Persandian di Kabupaten Way Kanan		RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintah	RAL 02.09.04 Pengelolaan Sistem Informasi		

DAL.44.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses 09.03.05.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintah	RAL 02.09.04 Pengelolaan Sistem Informasi	RAL 02.09.04.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
DAL.45	Layanan Sekretariat Daerah	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Sekretariat Daerah di Kabupaten Way Kanan		RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.08 Penyelenggaraan Pelayanan Publik		
DAL.45.01	Layanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.06.06.01 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.08 Penyelenggaraan Pelayanan Publik	RAL 02.04.08.01 Layanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
DAL.45.02	Layanan Perekonomian dan Pembangunan	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Perekonomian dan Pembangunan di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.06.01.01 Program Perekonomian dan Pembangunan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.08 Penyelenggaraan Pelayanan Publik	RAL 02.04.08.02 Layanan Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
DAL.45.03	Layanan Pengelolaan Izin Lokasi	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Pengelolaan Izin Lokasi di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.06.01.02 Pengelolaan Izin Lokasi	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.08 Penyelenggaraan Pelayanan Publik	RAL 02.04.08.03 Layanan Pengelolaan Izin Lokasi	Sekretariat Daerah
DAL.46	Layanan Sekretariat DPRD	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Sekretariat DPRD di		RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.08 Penyelenggaraan Pelayanan Publik		

		Kabupaten Way Kanan						
DAL.46.01	Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Layanan bertujuan melaksanakan Pelayanan Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD di Kabupaten Way Kanan	Layanan ini berfungsi untuk mendukung proses RAB.09.06.03 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL 02.04.08 Penyelenggaraan Pelayanan Publik	RAL 02.04.08.04 Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD

DAL.04.01	Data Pengembangan Iklim Penanaman Modal	RAB.02.08.01.01 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	RAL 01.12.03.01 Data Pengembangan Iklim Penanaman Modal	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	RAD.02.08.01 Pembinaan Penanaman Modal Regional	RAD.02.08.01.01 Data Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
DAL.04.02	Data Promosi Penanaman Modal	RAB.02.08.02.01 Program Promosi Penanaman Modal	RAL 01.12.08.01 Data Promosi Penanaman Modal	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	RAD.02.08.01 Pembinaan Penanaman Modal Regional	RAD.02.08.01.02 Data Promosi Penanaman Modal		Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
DAL.04.03	Data Pelayanan Penanaman Modal	RAB.02.08.02.02 Program Pelayanan Penanaman Modal	RAL 01.12.04.01 Pelayanan Penanaman Modal	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	RAD.02.08.02 Manajemen Penanaman Modal	RAD.02.08.02.01 Data Pelayanan Penanaman Modal		Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
DAL.04.04	Data Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	RAB.02.08.04.01 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	RAL 01.12.05.01 layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	RAD.02.08.03 Manajemen Perizinan Penanaman Modal	RAD.02.08.03.01 Data Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
DAL.04.05	Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	RAB.02.08.02.03 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	RAL 01.12.06.01 Data Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	RAD.02.08.02 Manajemen Penanaman Modal	RAD.02.08.02.02 Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
DAL.05	Data Sosial								
DAL.05.01	Data Pemberdayaan Sosial	RAB.04.02.01.01 Pemberdayaan Sosial	RAL 01.26.01.01 Data Pemberdayaan Sosial	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	RAD.04.02.01.01 Data Pemberdayaan Sosial		Dinas Sosial
DAL.05.02	Data Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	RAB.04.02.01.02 Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	RAL 01.26.02.01 Data Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.02 Manajemen Pencarian Dan Pertolongan	RAD.04.02.02.01 Data Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		Dinas Sosial

DAL.05.03	Data Rehabilitasi Sosial	RAB.04.02.01.03 Rehabilitasi Sosial	RAL 01.26.01.02 Data Rehabilitasi Sosial	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.04 Pembangunan Manusia	RAD.04.02.04.01 Data Rehabilitasi Sosial		Dinas Sosial
DAL.05.04	Data Perlindungan Dan Jaminan Sosial	RAB.04.02.01.04 Perlindungan Dan Jaminan Sosial	RAL 01.26.01.03 Data Perlindungan Dan Jaminan Sosial	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.05 Penanganan Fakir Miskin	RAD.04.02.05.01 Data Perlindungan Dan Jaminan Sosial		Dinas Sosial
DAL.05.05	Data Pengelolaan Taman Makam	RAB.04.02.03.02 Program Pengelolaan Taman Makam	RAL 01.40.02.01 Data Pengelolaan Taman Makam	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	RAD.04.02.01.02 Data Pengelolaan Taman Makam		Dinas Sosial
DAL.05.06	Data Penanganan Bencana	RAB.04.02.01.05 Penanganan Bencana	RAL 01.26.01.04 Data Penanganan Bencana	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.06 Penanggulangan Bencana	RAD.04.02.06.01 Data Penanganan Bencana		Dinas Sosial
DAL.06	Data Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil								
DAL.06.01	Data Pendaftaran Penduduk	RAB.09.01.08.01 Program Pendaftaran Penduduk	RAL 01.23.02.01 Data Pendaftaran Penduduk	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.07 Data Kependudukan	RAD.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	RAD.03.07.01.01 Data Pendaftaran Penduduk		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
DAL.06.02	Data Biodata Penduduk	RAB.09.01.08.02 Program Pencatatan Sipil	RAL 01.23.03.01 Data Pencatatan Sipil	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.07 Data Kependudukan	RAD.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	RAD.03.07.01.02 Data Pencatatan Sipil		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
DAL.06.03	Dokumen Adminduk	RAB.09.01.08.03 Program Pengelolaan Informasi	RAL 01.23.03.02 Data Pengelolaan Informasi Administrasi	RAD.03 Informasi Pembangunan	RAD.03.07 Data Kependudukan	RAD.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	RAD.03.07.01.03 Data Pengelolaan Informasi Administrasi		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

		Administrasi Kependudukan	Kependudukan	Kewilayahan			Kependudukan		
DAL.06.04	Data Pengelolaan Profil Kependudukan	RAB.09.01.08.04 Program Pengelolaan Profil Kependudukan	RAL 01.23.03.03 Data Pengelolaan Profil Kependudukan	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.07 Data Kependudukan	RAD.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	RAD.03.07.01.04 Data Pengelolaan Profil Kependudukan		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
DAL.07	Data Pendidikan								Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAL.07.01	Data Pengelolaan Pendidikan	RAB.06.01.01.01 Pengelolaan Pendidikan	RAL 01.31.03.01 Data Pengelolaan Pendidikan	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidikan	RAD.06.01.01 Pembinaan Pendidikan Regional	RAD.06.01.01.01 Data Pengelolaan Pendidikan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAL.07.02	Data Pengembangan Kurikulum	RAB.06.01.01.02 Pengembangan Kurikulum	RAL 01.31.03.02 Data Pengembangan Kurikulum	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidikan	RAD.06.01.01 Pembinaan Pendidikan Regional	RAD.06.01.01.02 Data Pengembangan Kurikulum		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAL.07.03	Data Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; Info GTK; Dokumen Pegawai	RAB.06.01.02.01 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	RAL 01.31.01.01 Data Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidikan	RAD.06.01.01 Pembinaan Pendidikan Regional	RAD.06.01.01.03 Data Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAL.07.04	Data Pengembangan Bahasa dan Sastra	RAB.06.03.04.01 Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	RAL 01.31.03.03 Data Pengembangan Bahasa dan Sastra	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.01 Data Pendidikan	RAD.06.01.01 Pembinaan Pendidikan Regional	RAD.06.01.01.04 Data Pengembangan Bahasa dan Sastra		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAL.08	Data Kesehatan								
DAL.08.01	Data Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAB.04.01.03.01 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAL 01.25.02.01 Data Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.03 Kesehatan Masyarakat	RAD.04.01.03.01 Data Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam

DAP.08.01.0 1	Data Pasien	RAB.04.01.03.01 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAL 01.25.02.01 Data Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.03 Kesehatan Masyarakat	RAD.04.01.03.01 Data Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAD.04.01.03.01.01 Data Pasien	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
DAP.08.01.0 2	Data Rekam Medis Pasien	RAB.04.01.03.01 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAL 01.25.02.01 Data Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.03 Kesehatan Masyarakat	RAD.04.01.03.01 Data Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAD.04.01.03.01.01 Data Rekam Medis Pasien	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
DAP.08.01.0 3	Data Bill Pasien	RAB.04.01.03.01 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAL 01.25.02.01 Data Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.03 Kesehatan Masyarakat	RAD.04.01.03.01 Data Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAD.04.01.03.01.02 Data Bill Pasien	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
DAP.08.01.0 4	Data Rekam Medis Elektronik	RAB.04.01.03.01 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAL 01.25.02.01 Data Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.03 Kesehatan Masyarakat	RAD.04.01.03.01 Data Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RAD.04.01.03.01.02.0 4 Data Rekam Medis Elektronik	Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
DAL.08.02	Data Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RAB.04.01.04.01 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RAL 01.25.03.01 Data Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	RAD.04.01.04.01 Data Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Dinas Kesehatan; RSUD Zainal Abidin Pagar Alam
DAL.08.03	Data Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	RAB.04.01.02.01 Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	RAL 01.25.01.01 Data Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.02 Kefarmasian Dan Alat Kesehatan	RAD.04.01.02.01 Data Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		Dinas Kesehatan

DAP.08.03.01	Data Logistik Rumah Sakit	RAB.04.01.02.01 Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	RAL 01.25.01.01 Data Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.02 Kefarmasian Dan Alat Kesehatan	RAD.04.01.02.01 Data Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	RAD.04.01.02.01.01 Data Logistik Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
DAL.08.04	Data Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	RAB.04.01.01.01 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	RAL 01.25.02.02 Data Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.01 Data Kesehatan	RAD.04.01.03 Kesehatan Masyarakat	RAD.04.01.03.02 Data Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Dinas Kesehatan
DAL.09	Data Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DAL.09.01	Data Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	RAB.03.01.01.01 Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	RAL 01.17.01.01 Data Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.05 Pengelolaan Sumber Daya Air	RAD.03.01.05.01 Data Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DAL.09.02	Data Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	RAB.03.01.05.01 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	RAL 01.17.01.02 Data Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.05 Pengelolaan Sumber Daya Air	RAD.03.01.05.02 Data Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DAL.09.03	Data Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	RAB.03.01.01.01 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	RAL 01.17.01.03 Data Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	RAD.03.01.02.01 Data Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

DAL.09.04	Data Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	RAB.03.01.04.01 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	RAL 01.17.01.01.04 Data Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.04 Pengelolaan Air Limbah Domestik	RAD.03.01.04.01 Data Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DAL.09.05	Data Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	RAB.03.01.02.02 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	RAL 01.17.01.01.05 Data Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.03 Pembinaan Jasa Kontruksi	RAD.03.01.03.01 Data Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DAL.09.06	Data Program Penataan Bangunan Gedung	RAB.03.01.01.02 Program Penataan Bangunan Gedung	RAL 01.17.01.01.06 Data Program Penataan Bangunan Gedung	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.01 Pembinaan Pekerjaan Umum Regional	RAD.03.01.01.01 Data Program Penataan Bangunan Gedung		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DAL.09.07	Data Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	RAB.03.01.01.03 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	RAL 01.17.01.01.07 Data Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.03 Pembinaan Jasa Kontruksi	RAD.03.01.03.02 Data Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DAL.09.08	Data Program Penyelenggaraan Jalan	RAB.03.01.02.03 Program Penyelenggaraan Jalan	RAL 01.17.01.01.08 Data Program Penyelenggaraan Jalan	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.01 Pembinaan Pekerjaan Umum Regional	RAD.03.01.01.02 Data Program Penyelenggaraan Jalan		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DAL.09.09	Data Pengembangan Jasa Kontruksi	RAB.03.01.03.01 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	RAL 01.17.01.01.09 Data Pengembangan Jasa Kontruksi	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.03 Pembinaan Jasa Kontruksi	RAD.03.01.03.03 Data Pengembangan Jasa Kontruksi		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

DAL.09.10	Data Penyelenggaraan Penataan Ruang	RAB.03.01.01.04 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	RAL 01.17.01.01.10 Data Penyelenggaraan Penataan Ruang	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.01 Pembinaan Pekerjaan Umum Regional	RAD.03.01.01.03 Data Penyelenggaraan Penataan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DAL.10	Data Perumahan Dan Permukiman								Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DAL.10.01	Data Pengembangan Perumahan	RAB.03.04.05.01 Program Pengembangan Perumahan	RAL 01.20.01.01 Data Pengembangan Perumahan	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.04 Data Perumahan	RAD.03.04.03 Pengembangan Kawasan Permukiman	RAD.03.04.03.01 Data Pengembangan Perumahan		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DAL.10.02	Data Kawasan Permukiman	RAB.03.04.03.01 Program Kawasan Permukiman	RAL 01.20.01.02 Data Kawasan Permukiman	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.04 Data Perumahan	RAD.03.04.05 Penyelenggaraan Perumahan	RAD.03.04.05.01 Data Kawasan Permukiman		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DAL.10.03	Data Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	RAB.03.04.05.02 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Data Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAD.03.05.02 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAD.03.05.02.01 Data Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DAL.10.04	Data Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	RAB.03.04.04.01 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	RAL 01.20.01.03 Data Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.04 Data Perumahan	RAD.03.04.02 Pengelolaan Infrastruktur Dan Lingkungan Pemerintahan	RAD.03.04.02.01 Data Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DAL.10.05	Data Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	RAB.03.06.05.01 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	RAL 01.20.02.01 Data Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.06 Data Pertanahan	RAD.03.06.02 Kebijakan Hukum Pertanahan	RAD.03.06.02.01 Data Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

DAL.10.06	Data Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	RAB.03.06.02.01 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	RAL 01.20.01.04 Data Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.06 Data Pertanahan	RAD.03.06.01 Pembinaan Pertanahan Regional	RAD.03.06.01.01 Data Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DAL.10.07	Data Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	RAB.03.06.02.02 Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	RAL 01.20.02.02 Data Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.06 Data Pertanahan	RAD.03.06.01 Pembinaan Pertanahan Regional	RAD.03.06.01.02 Data Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DAL.10.08	Data Penetapan Tanah Ulayat	RAB.03.06.03.01 Program Penetapan Tanah Ulayat	RAL 01.20.01.05 Data Penetapan Tanah Ulayat	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.06 Data Pertanahan	RAD.03.06.04 Tata Ruang Tanah	RAD.03.06.04.01 Data Penetapan Tanah Ulayat		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DAL.10.09	Data Pengelolaan Tanah Kosong	RAB.03.06.04.01 Program Pengelolaan Tanah Kosong	RAL 01.20.01.06 Data Pengelolaan Tanah Kosong	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.06 Data Pertanahan	RAD.03.06.04 Tata Ruang Tanah	RAD.03.06.04.01 Data Pengelolaan Tanah Kosong		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DAL.10.10	Data Pengelolaan Izin Membuka Tanah	RAB.03.06.03.02 Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	RAL 01.20.02.03 Data Pengelolaan Izin Membuka Tanah	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.06 Data Pertanahan	RAD.03.06.01 Pembinaan Pertanahan Regional	RAD.03.06.01.01 Data Pengelolaan Izin Membuka Tanah		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
DAL.10.11	Data Penatagunaan Tanah	01.01.04.07 Program Penatagunaan Tanah	RAL 01.20.02.04 Data Penatagunaan Tanah	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.06 Data Pertanahan	RAD.03.06.06 Pengelolaan Infrastruktur Pertanahan	RAD.03.06.06.01 Data Penatagunaan Tanah		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

DAL.11	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat								Satuan Polisi Pamong Praja
DAL.11.01	Data Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	RAB.05.02.01.01 Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	RAL 01.29.06.01 Data Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAD.05.02 Data Keamanan	RAD.05.02.01 Ketentraman, Ketertiban Umum	RAD.05.02.01.01 Data Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		Satuan Polisi Pamong Praja
DAL.11.02	Data Penanggulangan Bencana	RAB.05.02.01.02 Penanggulangan Bencana	RAL 01.40.06.01 Data Penanggulangan Bencana	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.06 Penanggulangan Bencana	RAD.04.02.06.02 Data Penanggulangan Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
DAL.11.03	Data Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	RAB.05.02.01.03 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	RAL 01.40.07.01 Data Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.06 Penanggulangan Bencana	RAD.04.02.06.03 Data Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		Pemadam Kebakaran
DAL.12	Data Tenaga Kerja								
DAL.12.01	Data Perencanaan Tenaga Kerja	RAB.06.02.02.01 Perencanaan Tenaga Kerja	RAL 01.32.02.01 Data Perencanaan Tenaga Kerja	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	RAD.06.02.01 Pembinaan Ketenagakerjaan Regional	RAD.06.02.01.01 Data Perencanaan Tenaga Kerja		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

DAL.12.02	Data Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	RAB.06.02.02.02 Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	RAL 01.32.04.01 Data Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	RAD.06.02.01 Pembinaan Ketenagakerjaan Regional	RAD.06.02.01.02 Data Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DAL.12.03	Data Penempatan Tenaga Kerja	RAB.06.02.02.03 Penempatan Tenaga Kerja	RAL 01.32.05.01 Data Penempatan Tenaga Kerja	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	RAD.06.02.01 Pembinaan Ketenagakerjaan Regional	RAD.06.02.01.03 Data Penempatan Tenaga Kerja		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DAL.12.04	Data Hubungan Industrial	RAB.06.02.02.04 Hubungan Industrial	RAL 01.32.05.02 Data Hubungan Industrial	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	RAD.06.02.01 Pembinaan Ketenagakerjaan Regional	RAD.06.02.01.04 Data Hubungan Industrial		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DAL.13	Data Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak								
DAL.13.01	Data Pengarusatamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.03.01 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	RAL 01.27.01.01 Data Pengarusatamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan	RAD.04.03.02 Pemberdayaan Perempuan	RAD.04.03.02.01 Data Pengarusatamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

DAL.13.02	Data Perlindungan Perempuan	RAB.04.03.05.01 Program Perlindungan Perempuan	RAL 01.27.03.01 Data Perlindungan Perempuan	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan	RAD.04.03.05 Perlindungan Hak Perempuan	RAD.04.03.05.01 Data Perlindungan Perempuan		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DAL.13.03	Data Peningkatan Kualitas Keluarga	RAB.04.03.01.01 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	RAL 01.27.01.02 Data Peningkatan Kualitas Keluarga	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan	RAD.04.03.03 Kesetaraan Gender	RAD.04.03.03.01 Data Peningkatan Kualitas Keluarga		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DAL.13.04	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	RAB.04.03.06.01 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	RAL 01.27.02.01 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan	RAD.04.03.03 Kesetaraan Gender	RAD.04.03.03.01 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DAL.13.05	Data Pemenuhan Hak Anak (PHA)	RAB.04.03.04.01 Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	RAL 01.27.02.02 Data Pemenuhan Hak Anak (PHA)	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan	RAD.04.03.06 Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak	RAD.04.03.06.01 Data Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

DAL.13.06	Program Perlindungan Khusus Anak	RAB.04.03.04.02 Program Perlindungan Khusus Anak	RAL 01.27.02.03 Program Perlindungan Khusus Anak	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan	RAD.04.03.04 Perlindungan Anak	RAD.04.03.04.01 Program Perlindungan Khusus Anak		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DAL.14	Data Pangan								
DAL.14.01	Data Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	RAB.02.03.04.01 Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	RAL 01.07.02.01 Data Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	RAD.02.03.04 Ketahanan Pangan	RAD.02.03.04.01 Data Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan		Dinas Ketahanan Pangan
DAL.14.02	Data Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	RAB.02.03.04.02 Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	RAL 01.07.02.02 Data Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	RAD.02.03.04 Ketahanan Pangan	RAD.02.03.04.02 Data Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Dinas Ketahanan Pangan
DAL.14.03	Data Penanganan Kerawanan Pangan	RAB.02.03.04.03 Penanganan Kerawanan Pangan	RAL 01.07.02.03 Data Penanganan Kerawanan Pangan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	RAD.02.03.04 Ketahanan Pangan	RAD.02.03.04.03 Data Penanganan Kerawanan Pangan		Dinas Ketahanan Pangan
DAL.14.04	Data Pengawasan Keamanan Pangan	RAB.02.03.04.04 Pengawasan Keamanan Pangan	RAL 01.07.02.04 Data Pengawasan Keamanan Pangan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	RAD.02.03.04 Ketahanan Pangan	RAD.02.03.04.04 Data Pengawasan Keamanan Pangan		Dinas Ketahanan Pangan

DAL.15	Data Lingkungan Hidup								
DAL.15.01	Data Perencanaan Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01.01 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	RAL 01.40.02.02 Data Perencanaan Lingkungan Hidup	RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	RAD.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	RAD.07.05.01.01 Data Perencanaan Lingkungan Hidup		Dinas Lingkungan Hidup
DAL.15.02	Data Pengendalian Pencemaran Dan/Kerusakan Lingkungan Hidup	RAB.07.05.02.01 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04.01 Data Pengendalian Pencemaran Dan/Kerusakan Lingkungan Hidup	RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	RAD.07.05.02 Pelestarian Lingkungan Hidup	RAD.07.05.02.01 Data Pengendalian Pencemaran Dan/Kerusakan Lingkungan Hidup		Dinas Lingkungan Hidup
DAL.15.03	Data Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	RAB.07.05.05.01 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	RAL 01.40.02.03 Data Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	RAD.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	RAD.07.05.01.02 Data Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		Dinas Lingkungan Hidup
DAL.15.04	Data Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	RAB.07.05.02.02 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	RAL 01.40.04.02 Data Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	RAD.07.05.02 Pelestarian Lingkungan Hidup	RAD.07.05.02.02 Data Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)		Dinas Lingkungan Hidup

DAL.15.05	Data Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	RAB.07.05.01.02 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	RAL 01.40.04.03 Data Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	RAD.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	RAD.07.05.01.03 Data Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Dinas Lingkungan Hidup
DAL.15.06	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	RAB.07.05.01.03 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	RAL 01.40.04.04 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	RAD.07.05.02 Pelestarian Lingkungan Hidup	RAD.07.05.02.03 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH		Dinas Lingkungan Hidup
DAL.15.07	Data Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	RAB.07.05.01.04 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	RAL 01.40.01.01 Data Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	RAD.07.05.02 Pelestarian Lingkungan Hidup	RAD.07.05.02.04 Data Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Dinas Lingkungan Hidup
DAL.15.08	Data Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	RAB.07.05.01.05 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	RAL 01.40.04.05 Data Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	RAD.07.05.02 Pelestarian Lingkungan Hidup	RAD.07.05.02.05 Data Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		Dinas Lingkungan Hidup

DAL.15.09	Data Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01.06 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	RAL 01.40.04.06 Data Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	RAD.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	RAD.07.05.01.04 Data Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		Dinas Lingkungan Hidup
DAL.15.10	Data Pengelolaan Persampahan	RAB.07.05.02.03 Program Pengelolaan Persampahan	RAL 01.40.04.07 Data Pengelolaan Persampahan	RAD.07 Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAD.07.05 Data Lingkungan Hidup	RAD.07.05.02 Pelestarian Lingkungan Hidup	RAD.07.05.02.06 Data Pengelolaan Persampahan		Dinas Lingkungan Hidup
DAL.16	Data Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa								
DAL.16.01	Data Penataan Desa	RAB.03.05.03.01 Program Penataan Desa	RAL 01.24.02.01 Data Penataan Desa	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAD.03.05.03 Pembangunan Desa Dan Kawasan Pedesaan	RAD.03.05.03.01 Data Penataan Desa		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
DAL.16.02	Data Peningkatan Kerja Sama Desa	RAB.03.05.04.01 Program Peningkatan Kerjasama Desa	RAL 01.24.03.01 Data Peningkatan Kerja Sama Desa	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAD.03.05.01 Pembinaan Pembangunan Regional	RAD.03.05.01.01 Data Peningkatan Kerja Sama Desa		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
DAL.16.03	Data Administrasi Pemerintahan Desa	RAB.03.05.03.02 Program Administrasi Pemerintahan Desa	RAL 01.24.06.01 Data Administrasi Pemerintahan Desa	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAD.03.05.01 Pembinaan Pembangunan Regional	RAD.03.05.01.02 Data Administrasi Pemerintahan Desa		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
DAL.16.04	Data Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	RAB.03.05.04.02 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	RAL 01.24.01.01 Data Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAD.03.05.04 Pemberdayaan Masyarakat Desa	RAD.03.05.04.01 Data Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung

DAL.17	Data Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana								
DAL.17.01	Data Pengendalian Penduduk	RAB.03.07.03.01 Pengendalian Penduduk	RAL 01.23.01.01 Data Pengendalian Penduduk	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.07 Data Kependudukan	RAD.03.07.02 Pendampingan Hukum Dalam Rangka Pengendalian Penduduk	RAD.03.07.02.01 Data Pengendalian Penduduk		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DAL.17.02	Data Pembinaan Keluarga Berencanan (KB)	RAB.03.07.03.02 Pembinaan Keluarga Berencanan(Kb)	RAL 01.23.04.01 Data Pembinaan Keluarga Berencanan (KB)	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.07 Data Kependudukan	RAD.03.07.03 Keluarga Berencana	RAD.03.07.03.01 Data Pembinaan Keluarga Berencanan (KB)		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DAL.17.03	Pemberdayaan Dan Penigkatan Keluarga Sejahtera (KS)	RAB.03.07.03.03 Pemberdayaan Dan Penigkatan Keluarga Sejahtera(Ks)	RAL 01.23.02.01 Pemberdayaan Dan Penigkatan Keluarga Sejahtera (KS)	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.07 Data Kependudukan	RAD.03.07.04 Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat	RAD.03.07.04.01 Pemberdayaan Dan Penigkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DAL.18	Data Perhubungan								

DAL.18.01	Data Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	RAB.03.03.04.01 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	RAL 01.19.02.01 Data Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 Data Transportasi	RAD.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	RAD.03.03.02.01 Data Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Dinas Perhubungan
DAL.19	Data Informasi dan Komunikasi Publik								
DAL.19.01	Data Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09.03.02.01 Program Informasi dan Komunikasi Publik	RAL 01.44.02.01 Program Informasi dan Komunikasi Publik	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.05 Pengelolaan Informasi Publik	RAD.09.03.05.04 Data Informasi dan Komunikasi Publik		Dinas Komunikasi dan Informatika
DAL.19.02	Data Aplikasi Informatika	RAB.09.03.01.01 Program Aplikasi Informatika	RAL 01.44.02.02 Program Aplikasi Informatika	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.05 Pengelolaan Informasi Publik	RAD.09.03.05.05 Data Aplikasi Informatika		Dinas Komunikasi dan Informatika
DAL.20	Data Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	RAB.02.09.01.01 Data Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah							
DAL.20.01	Data Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	RAB.02.10.02.01 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	RAL 01.14.01.01 Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.09 Data Koperasi	RAD.02.09.01 Pembinaan Koperasi	RAD.02.09.01.01 Data Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
DAL.20.02	Data Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	RAB.02.09.04.01 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	RAL 01.13.01.01 Data Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.09 Data Koperasi	RAD.02.09.04 Pengawasan Koperasi	RAD.02.09.04.01 Data Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
DAL.20.03	Data Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	RAB.02.09.04.02 Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	RAL 01.13.01.02 Data Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.09 Data Koperasi	RAD.02.09.03 Pemberdayaan Dan Pembiayaan Koperasi	RAD.02.09.03.01 Data Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

DAL.20.04	Data Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	RAB.02.09.01.01 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	RAL 01.13.01.03 Data Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.09 Data Koperasi	RAD.02.09.02 Pengelolaan Produksi Dan Pemasaran Koperasi	RAD.02.09.02.01 Data Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
DAL.20.05	Data Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	RAB.02.09.03.01 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	RAL 01.13.01.04 Data Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.09 Data Koperasi	RAD.02.09.03 Pemberdayaan Dan Pembiayaan Koperasi	RAD.02.09.03.02 Data Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
DAL.20.06	Data Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	RAB.02.10.04.01 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	RAL 01.13.01.05 Data Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.10 Data Usaha Kecil dan Menengah	RAD.02.10.04 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	RAD.02.10.04.01 Data Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
DAL.20.07	Data Pengembangan Umkm	RAB.12.10.01.01 Program Pengembangan Umkm	RAL 01.13.01.06 Data Pengembangan Umkm	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.10 Data Usaha Kecil dan Menengah	RAD.02.10.01 Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah	RAD.02.10.01.01 Data Pengembangan Umkm		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
DAL.21	Data Kepemudaan Dan Olahraga								
DAL.21.01	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	RAB.06.04.03.01 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	RAL 01.34.01.01 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.05 Data Olahraga	RAD.06.05.02 Pengembangan Pemuda	RAD.06.05.02.01 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
DAL.21.02	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	RAB.06.05.01.01 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	RAL 01.35.01.02 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.05 Data Olahraga	RAD.06.05.02 Pengembangan Pemuda	RAD.06.05.02.02 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata

DAL.21.03	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	RAB.06.05.03 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	RAL 01.35.02.01 Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.05 Data Olahraga	RAD.06.05.02 Pengembangan Pemuda	RAD.06.05.02.03 Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
DAL.22	Data Kebudayaan								
DAL.22.01	Pengembangan Kebudayaan	RAB.08.02.04.01 Program Pengembangan Kebudayaan	RAL 01.42.01.01 Pengembangan Kebudayaan	RAD.08 Informasi Budaya dan agama	RAD.08.02 Data Kebudayaan	RAD.08.02.01 Pembinaan Kebudayaan Regional	RAD.08.02.01.01 Pengembangan Kebudayaan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAL.22.02	Pengembangan Keseniaan Tradisional	RAB.08.02.04.02 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	RAL 01.42.02.01 Pengembangan Keseniaan Tradisional	RAD.08 Informasi Budaya dan agama	RAD.08.02 Data Kebudayaan	RAD.08.02.01 Kesejarahan	RAD.08.02.01.02 Pengembangan Keseniaan Tradisional		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAL.22.03	Pembinaan Sejarah	RAB.08.02.04.03 Program Pembinaan Sejarah	RAL 01.42.01.02 Pembinaan Sejarah	RAD.08 Informasi Budaya dan agama	RAD.08.02 Data Kebudayaan	RAD.08.02.01 Pembinaan Kebudayaan Regional	RAD.08.02.01.03 Pembinaan Sejarah		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAL.22.04	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	RAB.08.02.04.04 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	RAL 01.42.04.01 Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	RAD.08 Informasi Budaya dan agama	RAD.08.02 Data Kebudayaan	RAD.08.02.02 Pelestarian Cagar Budaya	RAD.08.02.02.01 Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAL.22.05	Pengelolaan Permuseuman	08.02.03.01 Program Pengelolaan Permuseuman	RAL 01.42.04.02 Pengelolaan Permuseuman	RAD.08 Informasi Budaya dan agama	RAD.08.02 Data Kebudayaan	RAD.08.02.01 Pembinaan Kebudayaan Regional	RAD.08.02.01.04 Pengelolaan Permuseuman		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DAL.23	Data Perpustakaan								
DAL.23.01	Data Pembinaan Perpustakaan	RAB.08.02.05.01 Pembinaan Perpustakaan	RAL 01.42.01.01 Data Pembinaan Perpustakaan	RAD.08 Informasi Budaya dan agama	RAD.08.02 Data Kebudayaan	RAD.08.02.04 Pembinaan Kepustakaan	RAD.08.02.04.01 Data Pembinaan Perpustakaan		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

DAL.23.02	Data Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	RAB.08.02.06.01 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	RAL 01.42.03.01 Data Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	RAD.08 Informasi Budaya dan agama	RAD.08.02 Data Kebudayaan	RAD.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan Dan Arsip Nasional	RAD.08.02.05.01 Data Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
DAL.24	Data Kelautan Dan Perikanan								
DAL.24.01	Data Pengelolaan Perikanan Tangkap	RAB.02.06.01.01 Pengelolaan Perikanan Tangkap	Data Pengelolaan Perikanan Tangkap	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 Data Perikanan	RAD.02.06.01 Pembinaan Perikanan Regional	RAD.02.06.01.01 Data Pengelolaan Perikanan Tangkap		Dinas Perikanan
DAL.24.02	Data Pengelolaan Perikanan Budidaya	RAB.02.06.01.02 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Data Pengelolaan Perikanan Budidaya	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 Data Perikanan	RAD.02.06.01 Pembinaan Perikanan Regional	RAD.02.06.01.02 Data Pengelolaan Perikanan Budidaya		Dinas Perikanan
DAL.24.03	Data Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	02.06.01.03 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Data Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 Data Perikanan	RAD.02.06.05 Pengelolaan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	RAD.02.06.01.03 Data Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan		Dinas Perikanan
DAL.24.04	Data Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	RAB.02.06.03.01 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Data Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.06 Data Perikanan	RAD.02.06.03 Pengelolaan Hasil Perikanan	RAD.02.06.01.04 Data Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		Dinas Perikanan
DAL.25	Data Pariwisata								
DAL.25.01	Data Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	RAB.02.11.01 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 Data Pariwisata	RAD.02.11.01 Pembinaan Pariwisata Regional	RAD.02.11.01.01 Data Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata

DAL.25.02	Data Pemasaran Pariwisata	RAB.02.11.02 Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 Data Pariwisata	RAD.02.11.03 Pengelolaan Faktor Pendukung Kepariwisataaan	RAD.02.11.03.01 Data Pemasaran Pariwisata		Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
DAL.25.03	Data Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	RAB.02.11.03 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 Data Pariwisata	RAD.02.11.03 Pengelolaan Faktor Pendukung Kepariwisataaan	RAD.02.11.03.02 Data Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
DAL.25.04	Data Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	RAB.02.11.04 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 Data Pariwisata	RAD.02.11.02 Kepariwisataaan	RAD.02.11.02.01 Data Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
DAL.26	Data Pertanian								
DAL.26.01	Data Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	RAB.02.03.01.01 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	RAL 01.07.01.01 Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	RAD.02.03.03 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pertanian	RAD.02.03.03.01 Data Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
DAL.26.02	Data Penyediaan Dan Data Pengembangan Prasarana Pertanian	RAB.02.03.01.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	RAL 01.07.01.02 Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	RAD.02.03.03 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pertanian	RAD.02.03.03.02 Data Penyediaan Dan Data Pengembangan Prasarana Pertanian		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

DAL.26.03	Data Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Data Kesehatan Masyarakat Veteriner	RAB.02.03.01.03 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	RAL 01.07.01.03 Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 Data Peternakan	RAD.02.05.03 Kesehatan Masyarakat Veteriner	RAD.02.05.03.01 Data Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Data Kesehatan Masyarakat Veteriner		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
DAL.26.04	Data Pengendalian Dan Data Penanggulangan Bencana Pertanian	RAB.02.03.01.04 Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	RAL 01.07.01.04 Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.04 Data Perkebunan	RAD.02.04.04 Pengendalian Hama Penyakit Dan Perlindungan Perkebunan	RAD.02.04.04.01 Data Pengendalian Dan Data Penanggulangan Bencana Pertanian		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
DAL.26.05	Data Perizinan Usaha Pertanian	RAB.02.03.01.05 Program Perizinan Usaha Pertanian	RAL 01.07.01.05 Perizinan Usaha Pertanian	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	RAD.02.03.01 Pembinaan Pertanian Regional	RAD.02.03.01.01 Data Perizinan Usaha Pertanian		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
DAL.26.06	Data Penyuluhan Pertanian	RAB.02.03.01.06 Program Perizinan Usaha Pertanian	RAL 01.07.01.06 Penyuluhan Pertanian	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.03 Data Pertanian	RAD.02.03.01 Pembinaan Pertanian Regional	RAD.02.03.01.02 Data Penyuluhan Pertanian		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
DAL.27	Data Perdagangan								
DAL.27.01	Data Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	RAB.02.02.03.01 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	RAL 01.06.04.01 Data Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 Data Perdagangan	RAD.02.02.01 Pembinaan Perdagangan Regional	RAD.02.02.01.01 Data Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DAL.27.02	Data Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	RAB.02.02.01.02 Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	RAL 01.06.04.02 Data Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 Data Perdagangan	RAD.02.02.03 Perdagangan Dalam Negeri	RAD.02.02.03.01 Data Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		Dinas Perindustrian dan Perdagangan

DAL.27.03	Data Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	RAB.02.02.01.03 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	RAL 01.06.04.03 Data Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 Data Perdagangan	RAD.02.02.02 Pengelolaan Perdagangan	RAD.02.02.02.01 Data Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DAL.27.04	Data Ekspor	RAB.02.02.04.01 Ekspor dan Impor	RAL 01.06.01.01 Ekspor Impor	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 Data Perdagangan	RAD.02.02.04 Ekspor Impor	RAD.02.02.04.01 Data Ekspor		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DAL.27.05	Data Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	RAB.02.02.01.05 Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	RAL 01.06.05.01 Data Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 Data Perdagangan	RAD.02.02.06 Standardisasi Dan Pengendalian Mutu	RAD.02.02.06.01 Data Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DAL.27.06	Data Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	RAB.02.02.03.06 Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	RAL 01.06.02.01 Data Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 Data Perdagangan	RAD.02.02.05 Pemberdayaan Konsumen	RAD.02.02.05.01 Data Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DAL.28	Data Perindustrian								
DAL.28.01	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	RAB.02.01.01 01 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	RAL 01.05.08.01 Perencanaan Dan Pembangunan Industri	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.01 Data Industri	RAD.02.01.02 Penumbuh-Kembangan Industri Dalam Negeri	RAD.02.01.02.01 Perencanaan Dan Pembangunan Industri		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DAL.28.02	Data Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	RAB.02.01.04.01 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	RAL 01.05.10.01 Data Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.01 Data Industri	RAD.02.01.01 Pembinaan Industri Regional	RAD.02.01.01.01 Data Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota		Dinas Perindustrian dan Perdagangan

DAL.28.03	Data Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	RAB.02.01.04.02 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	RAL 01.05.06.01 Data Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.01 Data Industri	RAD.02.01.05 Pengelolaan Standar Nasional	RAD.02.01.05.01 Data Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DAL.29	Data Transmigrasi								
DAL.29.01	Data Perencanaan Kawasan Transmigrasi	RAB.03.02.01.01 Pengembangan Kawasan Transmigrasi	RAL.01.18.01.01 Data Perencanaan Kawasan Transmigrasi	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.02 Data Transmigrasi	RAD.03.02.01 Pembinaan Transmigrasi Regional	RAD.03.02.01.01 Data Perencanaan Kawasan Transmigrasi		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DAL.29.02	Data Pembangunan Kawasan Transmigrasi	RAB.03.02.04.01 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	RAL.01.18.01.02 Data Pembangunan Kawasan Transmigrasi	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.02 Data Transmigrasi	RAD.03.02.04 Pengembangan Kawasan Transmigrasi	RAD.03.02.04.01 Data Pembangunan Kawasan Transmigrasi		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DAL.30	Pendapatan Daerah								
DAL.30.01	Data Pengelolaan Keuangan Daerah	RAB.09.02.06.01 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	RAL 02.02.01.01 Data Pengelolaan Keuangan Daerah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.01 Data Dalam Negeri	RAD.09.01.05 Pembinaan Keuangan Daerah	RAD.09.01.05.01 Data Pengelolaan Keuangan Daerah		Badan Pengelola Pendapatan Daerah
DAL.30.02	Data Pengelolaan Pendapatan Daerah	RAB.09.02.06.02 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	RAL 02.02.01.02 Data Pengelolaan Pendapatan Daerah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.09 Pengelolaan Pajak	RAD.09.02.09.01 Data Pengelolaan Pendapatan Daerah		Badan Pengelola Pendapatan Daerah
DAP.30.02.01	Data Pajak Daerah	RAB.09.02.06.02 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	RAL 02.02.01.02 Data Pengelolaan Pendapatan Daerah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.09 Pengelolaan Pajak	RAD.09.02.09.01 Data Pengelolaan Pendapatan Daerah	RAD.09.02.09.01.01 Data Pajak Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
DAL.31	Data Perencanaan								

DAL.31.01	Data Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	RAB.09.05.01.01 Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	RAL 02.03.02.01 Data Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	RAD.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAD.09.05.01.01 Data Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
DAL.31.02	Data Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	RAB.09.05.01.02 Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	RAL 02.03.03.01 Data Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional	RAD.09.05.02 Pengawasan Penyimpangan Pembangunan	RAD.09.05.01.02 Data Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
DAP.32	Data Anggaran								
DAP.32.01	Data Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	RAB.09.02.05.01 Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	RAL 02.02.01.01 Data Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.05 Penganggaran	RAD.09.02.05.01 Data Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DAL.33	Data Keuangan								Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DAL.33.01	Data Pengelolaan Keuangan Daerah	RAB.09.01.07.01 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	RAL 02.02.01.02 Data Pengelolaan Keuangan Daerah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.02 Keuangan Negara	RAD.09.02.02.01 Data Pengelolaan Keuangan Daerah		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DAL.34	Data Pengadaan Barang dan Jasa								

DAL.34.01	Data Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa	RAB.09.02.08.01 Penyelesaian Pengadaan	RAL 02.02.08.01 Data Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.08 Pengadaan Dan Manajemen Aset	RAD.09.02.08.01 Data Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
DAL.34.02	Data Pengadaan Secara Elektronik	RAB.09.02.08.02 Pengadaan Secara Elektronik	RAL 02.02.08.02 Data Pengadaan Secara Elektronik	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.08 Pengadaan Dan Manajemen Aset	RAD.09.02.08.02 Data Pengadaan Secara Elektronik		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
DAL.34.03	Data Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	RAB.09.02.08.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	RAL 02.02.08.03 Data Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.08 Pengadaan Dan Manajemen Aset	RAD.09.02.08.03 Data Pembinaan dan Advokasi Pengadaan		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
DAL.35	Data Kepegawaian								
DAL.35.01	Data Kepegawaian Daerah	RAB.09.06.09.02 Program Kepegawaian Daerah	RAL 02.04.01.01 Data Kepegawaian Daerah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara	RAD.09.06.01.01 Data Kepegawaian Daerah		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
DAP.37.01.0 1	Data Pengajuan Layanan Kepegawaian	RAB.09.06.09.02 Program Kepegawaian Daerah	RAL 02.04.01.01 Data Kepegawaian Daerah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara	RAD.09.06.01.01 Data Kepegawaian Daerah	RAD.09.06.01.01.01 Data Pengajuan Layanan Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
DAP.37.01.0 2	Data Kepegawaian	RAB.09.06.09.02 Program Kepegawaian Daerah	RAL 02.04.01.01 Data Kepegawaian Daerah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara	RAD.09.06.01.01 Data Kepegawaian Daerah	RAD.09.06.01.01.02 Data Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

DAP.37.01.03	Data Mutasi	RAB.09.06.09.02 Program Kepegawaian Daerah	RAL 02.04.01.01 Data Kepegawaian Daerah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara	RAD.09.06.01.01 Data Kepegawaian Daerah	RAD.09.06.01.01.03 Data Mutasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
DAP.37.01.04	Data Jumlah ASN	RAB.09.06.09.02 Program Kepegawaian Daerah	RAL 02.04.01.01 Data Kepegawaian Daerah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara	RAD.09.06.01.01 Data Kepegawaian Daerah	RAD.09.06.01.01.04 Data Jumlah ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
DAL.36	Kearsipan								
DAL.36.01	Data Pengelolaan Arsip	RAB.08.02.06.02 Pengelolaan Arsip	RAL 02.06.18.01 Data Pengelolaan Arsip	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.08 Kearsipan Nasional	RAD.09.06.08.01 Data Pengelolaan Arsip		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
DAL.36.02	Data Perlindungan dan Penyelematan Arsip	RAB.08.02.06.02 Pengelolaan Arsip	RAL 02.06.18.02 Data Perlindungan dan Penyelematan Arsip	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.08 Kearsipan Nasional	RAD.09.06.08.02 Data Perlindungan dan Penyelematan Arsip		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
DAL.37	Data Pengelolaan Aset								
DAL.37.01	Data Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAB.09.02.08.01 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAL 02.02.05.01 Data Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data Keuangan	RAD.09.02.08 Pengadaan Dan Manajemen Aset	RAD.09.02.08.03 Data Pengelolaan Barang Milik Daerah		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DAL.38	Data Inspektorat Daerah								

DAL.38.01	Data Penyelenggaraan Pengawasan	RAB.09.07.05.01 Program Penyelenggaraan Pengawasan	RAL 02.07.02.01 Data Penyelenggaraan Pengawasan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07 Data Kesekretariatan Negara	RAD.09.07.05 Pengawasan Pemerintahan	RAD.09.07.05.01 Data Penyelenggaraan Pengawasan		Inspektorat
DAL.38.02	Data Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	RAB.09.05.08.01 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	RAL 02.07.02.02 Data Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07 Data Kesekretariatan Negara	RAD.09.07.05 Pengawasan Pemerintahan	RAD.09.07.05.02 Data Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi		Inspektorat
DAL.39	Data Akuntabilitas Kinerja Organisasi								
DAL.39.01	Data Akuntabilitas Kinerja Organisasi	RAB.09.06.05.01 Akuntabilitas Kinerja Organisasi	RAL 02.07.02.02.03 Data Akuntabilitas Kinerja Organisasi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.05 Akuntabilitas Kinerja	RAD.09.06.05.01 Data Akuntabilitas Kinerja Organisasi		Inspektorat
DAP.40	Data Akuntabilitas Kinerja Pegawai								
DAL.40.01	Data Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAB.09.06.04.01 Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAL 02.04.03.01 Data Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.05 Akuntabilitas Kinerja	RAD.09.06.05.02 Data Pengembangan Sumber Daya Manusia		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
DAL.41	Data Penelitian dan Pengembangan								
DAL.41.01	Penelitian dan Pengembangan Daerah	RAB.09.07.06.01 Penelitian dan Pengembangan Daerah	RAL 02.08.08.01 Penelitian dan Pengembangan Daerah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07 Data Kesekretariatan Negara	RAD.09.07.06 Pengkajian Strategis	RAD.09.07.06.01 Penelitian dan Pengembangan Daerah		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

DAL.42	Data Kesatuan Bangsa dan Politik								
DAL.42.01	Data Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	RAB.09.07.07.01 Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	RAL 01.03.02.01 Data Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07 Data Kesekretariatan Negara	RAD.09.07.07 Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan	RAD.09.07.07.01 Data Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Badan Kesatuan bangsa dan politik
DAL.42.02	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	RAB.09.07.07.02 PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	RAL 01.03.02.02 Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07 Data Kesekretariatan Negara	RAD.09.07.07 Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan	RAD.09.07.07.02 Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		Badan Kesatuan bangsa dan politik
DAL.42.03	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	RAB.09.07.07.03 PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	RAL 01.03.02.03 Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07 Data Kesekretariatan Negara	RAD.09.07.07 Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan	RAD.09.07.07.03 Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Badan Kesatuan bangsa dan politik
DAL.42.04	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	RAB.09.07.07.04 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	RAL 01.03.02.04 Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07 Data Kesekretariatan Negara	RAD.09.07.07 Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan	RAD.09.07.07.04 Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		Badan Kesatuan bangsa dan politik

DAL.42.05	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	RAB.09.07.07.05 PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	RAL 01.03.02.05 Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07 Data Kesekretariatan Negara	RAD.09.07.07 Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan	RAD.09.07.07.05 Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Badan Kesatuan bangsa dan politik
DAL.43	Statistik								
DAL.43.01	Data Statistik Sektoral	RAB.09.03.03.02 Penyelenggaraan Statistik Sektoral	RAL 02.09.06.01 Data Statistik Sektoral	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.03 Pengelolaan Data Statistik	RAD.09.03.03.01 Data Statistik Sektoral		Dinas Komunikasi dan Informatika
DAL.44	Persandian								
DAL.44.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	09.03.05.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	RAL 02.09.04.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.07 Data Kesekretariatan Negara	RAD.09.07.03 Ketahanan Nasional	RAD.09.07.03.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		Dinas Komunikasi dan Informatika
DAL.45	Data Sekretariat Daerah								
DAL.45.01	Data Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	RAB.09.06.06.01 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	RAL 02.04.08.01 Data Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.01 Data Dalam Negeri	RAD.09.01.02 Kebijakan Politik Dan Pemerintahan Umum	RAD.09.01.02.01 Data Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Sekretariat Daerah
DAL.45.02	Data Perekonomian dan Pembangunan	RAB.09.06.01.01 Program Perekonomian dan Pembangunan	RAL 02.04.08.02 Data Perekonomian dan Pembangunan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.01 Data Dalam Negeri	RAD.09.01.05 Pembinaan Keuangan Daerah	RAD.09.01.05.02 Data Perekonomian dan Pembangunan		Sekretariat Daerah

DAL.45.03	Data Pengelolaan Izin Lokasi	RAB.09.06.01.02 Pengelolaan Izin Lokasi	RAL 02.04.08.03 Data Pengelolaan Izin Lokasi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.01 Data Dalam Negeri	RAD.09.01.06 Pelaksanaan Program Prioritas Nasional	RAD.09.01.06.01 Data Pengelolaan Izin Lokasi		Sekretariat Daerah
DAL.46	Data Sekretariat DPRD								
DAL.46.01	Data Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	RAB.09.06.03 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	RAL 02.04.08.03.04 Data Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.01 Data Dalam Negeri	RAD.09.01.02 Kebijakan Politik Dan Pemerintahan Umum	RAD.09.01.02.02 Data Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Sekretariat DPRD

V. Lampiran Arsitektur Aplikasi Abacus

Tabel 44 Arsitektur Aplikasi Abacus

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	Uraian Aplikasi (Uraikan definisi dari aplikasi)	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Pengembangan (Dependency)	Merupakan unit yang melakukan pengelolaan terhadap operasional teknologi layanan	↑ RAA Level 1 (Dependency)	↑ RAA Level 2 (Dependency)
DAA.01	Span Lapor		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.01.01	Span Lapor Way Kanan	Aplikasi Span Lapor Way Kanan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengaduan Pelayanan publik	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.02	Open Data		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.02.01	Open Data Way Kanan	Aplikasi Open Data Way Kanan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Data Terbuka	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.03	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.03.01	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Way Kanan	Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Way Kanan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.04	Sistem Informasi		Open	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas	Dinas		

	Penanaman Modal Terpadu		Source				Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika		
DAA.04.01	Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Penanaman Modal Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Penanaman Modal Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.04.02	Sistem Informasi Manajemen Promosi Penanaman Modal Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Promosi Penanaman Modal Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Promosi Penanaman Modal	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu
DAA.04.03	Sistem Informasi Penanaman Modal Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Penanaman Modal Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pelayanan Penanaman Modal	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.04.04	Sistem Informasi Pengendalian Penanaman Modal Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Penanaman Modal Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
DAA.04.05	Sistem Informasi Penanaman Modal Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Penanaman Modal Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.05	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) Way Kanan		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.05.01	Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan Sosial Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan Sosial Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pemberdayaan Sosial	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.05.02	Sistem Informasi	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen	Open	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas	Dinas	RAA.02	RAA.02.01

	Manajemen Warga Negara Migran korban tindak kekerasan Terpadu	Warga Negara Migran korban tindak kekerasan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Source				Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	Aplikasi Khusus	Aplikasi Khusus Misi Tertentu
DAA.05.03	Sistem Informasi Manajemen Rehabilitasi Sosial	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rehabilitasi Sosial merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Rehabilitasi Sosial	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.05.04	Sistem Informasi Perlindungan dan Jaminan Sosial; Sistem Informasi Data Kemiskinan Kab. Way Kanan (SIDATUK)	Aplikasi Sistem Informasi Perlindungan dan Jaminan Sosial; Sistem Informasi Data Kemiskinan Kab. Way Kanan (SIDATUK) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
DAA.05.05	Sistem Informasi Manajemen Taman Makam Pahlawan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Taman Makam Pahlawan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Taman Makam	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
DAA.05.06	Sistem Informasi Manajemen Penanganan Bencana Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Bencana Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penanganan Bencana	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.06	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Way Kanan		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.06.01	Dashboard Pendaftaran penduduk Terpadu	Aplikasi Dashboard Pendaftaran penduduk Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pendaftaran Penduduk	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
DAA.06.02	Sistem Informasi Pencatatan Sipil Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Pencatatan Sipil Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pencatatan Sipil	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.06.03	Sistem Informasi	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan	Open	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas	Dinas	RAA.01	RAA.01.01

	Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Source					Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	Aplikasi Umum	Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.06.04	Sistem Informasi Pengelolaan Profil Kependudukan dan Catatan Sipil	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Profil Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Profil Kependudukan	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	
DAA.07	Smart School Way Kanan		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika			
DAA.07.01	Sistem Informasi Pengelolaan Pendidikan Sekolah (SIPS)	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pendidikan Sekolah (SIPS) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Pendidikan	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	
DAA.07.02	Sistem Informasi Manajemen Pembelajaran Pendidikan Sekolah (SIM-PPS)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembelajaran Pendidikan Sekolah (SIM-PPS) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengembangan Kurikulum	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	
DAA.07.03	Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Pendidikan (SIM-PTP)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Pendidikan (SIM-PTP) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	
DAA.07.04	Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Bahasa dan Sastra (SIM-PBS)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Bahasa dan Sastra (SIM-PBS) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	
DAA.08	Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Terpadu (SIM-K Terpadu) Way Kanan		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika			
DAA.08.01	Sistem Informasi	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen	Open	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas	Dinas	RAA.01	RAA.01.01	

	Manajemen Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Kesehatan Perorangan dan Masyarakat merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Source				Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	Aplikasi Umum	Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.08.02	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK)	Aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.08.03	Sistem Informasi Manajemen Sarana, Prasara dan Alat Kesehatan (SIMSPA)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sarana, Prasara dan Alat Kesehatan (SIMSPA) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.08.04	Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Hidup Sehat	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Hidup Sehat merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
DAA.09	Sistem Informasi Manajemen Pekerjaan Umum Terpadu		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.09.01	Sistem Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.09.02	Sistem Informasi Manajemen Penyediaan Air Minum	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyediaan Air Minum merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu

DAA.09.03	Sistem Informasi Manajemen Persampahan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persampahan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
DAA.09.04	Sistem Informasi Manajemen Layanan Pengolahan Air Limbah	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Layanan Pengolahan Air Limbah merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.09.05	Sistem Informasi Manajemen Drainase	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Drainase merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.09.06	Sistem Informasi Manajemen Pemukiman Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemukiman Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Program Penataan Bangunan Gedung	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.09.07	Sistem Informasi Manajemen Bangunan dan Lingkungan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan dan Lingkungan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.09.08	Sistem Informasi Manajemen Monitoring Jalan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Monitoring Jalan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Program Penyelenggaraan Jalan	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.09.09	Sistem Informasi Pengendalian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Aplikasi Sistem Informasi Pengendalian Penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengembangan Jasa Kontruksi	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
DAA.09.10	Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan Aplikasi Untuk	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan	Dinas Komunikasi dan	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

	Penataan Ruang	Mendukung Layanan Layanan Penyelenggaraan Penataan Ruang					Informatika	Informatika		
DAA.10	Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.10.01	Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengembangan Perumahan	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.10.02	Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Kawasan Permukiman	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.10.03	Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perumahan dan Permukiman merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.10.04	Sistem Informasi Prasarana Sarana Utilitas Umum	Aplikasi Sistem Informasi Prasarana Sarana Utilitas Umum merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.10.05	Sistem Informasi Manajemen Sengketa Tanah Garapan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sengketa Tanah Garapan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.10.06	Sistem Informasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan	Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.10.07	Sistem Informasi	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen	Open	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas	Dinas	RAA.01	RAA.01.01

	Manajemen Aset Tanah dan Bangunan	Aset Tanah dan Bangunan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Source				Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	Aplikasi Umum	Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.10.08	Sistem Informasi Manajemen Tanah Ulayat	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tanah Ulayat merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penetapan Tanah Ulayat	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.10.09	Sistem Informasi Penatagunaan Tanah	Aplikasi Sistem Informasi Penatagunaan Tanah merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Tanah Kosong	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.10.10	Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah dan Bangunan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Tanah dan Bangunan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.10.11	Sistem Informasi Penatagunaan Tanah	Aplikasi Sistem Informasi Penatagunaan Tanah merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penatagunaan Tanah	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.11	Sistem Informasi Manajemen Ketentraman dan Ketertiban Terpadu (SIM-KKT)		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.11.01	Sistem Informasi Manajemen Ketentraman dan Ketertiban Umum (SIM-KKU)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Ketentraman dan Ketertiban Umum (SIM-KKU) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.11.02	Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Bencana (SIM-PB)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Bencana (SIM-PB) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penanggulangan Bencana	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu

DAA.11.03	Sistem Informasi Manajemen Kebakaran Terpadu (SIM-KT)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kebakaran Terpadu (SIM-KT) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu
DAA.12	Sigajah Way Kanan		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.12.01	Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Tenaga Kerja Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Tenaga Kerja Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Perencanaan Tenaga Kerja	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.12.02	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
DAA.12.03	Sistem Informasi Bursa Layanan Kerja Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Bursa Layanan Kerja Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penempatan Tenaga Kerja	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.12.04	Sistem Informasi Manajemen Hubungan Industrial Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Hubungan Industrial Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Hubungan Industrial	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.13	Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.13.01	Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

		Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan								
DAA.13.02	Sistem Informasi Perlindungan Perempuan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Perlindungan Perempuan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Perlindungan Perempuan	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.13.03	Sistem Informasi Kualitas Keluarga Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Kualitas Keluarga Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.13.04	Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Pemberdayaan Perempuan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.13.05	Sistem Informasi Hak Anak Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Hak Anak Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.13.06	Sistem Informasi Khusus Anak Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Khusus Anak Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Program Perlindungan Khusus Anak	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.14	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Way Kanan		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.14.01	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.14.02	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu merupakan Aplikasi Untuk	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan	Dinas Komunikasi dan	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

	Masyarakat Terpadu	Mendukung Layanan Layanan Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat					Informatika	Informatika		
DAA.14.03	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penanganan Kerawanan Pangan	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.14.04	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan Masyarakat Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengawasan Keamanan Pangan	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.15	Sistem Informasi Lingkungan Hidup Terpadu		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.15.01	Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Perencanaan Lingkungan Hidup	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.15.02	Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengendalian Pencemaran Dan/Kerusakan Lingkungan Hidup	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.15.03	Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Lingkungan Hidup merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.15.04	Sistem Informasi Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3)	Aplikasi Sistem Informasi Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

DAA.15.05	Sistem Informasi Manajemen dan Pengawasan Izin Lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Pengawasan Izin Lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.15.06	Sistem Informasi Manajemen dan Pengawasan Izin Lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Pengawasan Izin Lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.15.07	Sistem Informasi Manajemen Pelatihan dan Penyuluhan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelatihan dan Penyuluhan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
DAA.15.08	Sistem Informasi Manajemen Penghargaan Lingkungan Hidup	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penghargaan Lingkungan Hidup merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.15.09	Sistem Informasi Manajemen Pengaduan Lingkungan Hidup	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengaduan Lingkungan Hidup merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.15.10	Sistem Informasi Manajemen Persampahan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persampahan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

	Terpadu	Layanan Pengelolaan Persampahan					Informatika	Informatika		
DAA.16	Smart Village Way Kanan		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.16.01	Sistem Informasi Manajemen dan Penataan Desa	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Penataan Desa merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penataan Desa	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.16.02	Sistem Informasi Manajemen dan Penataan Desa	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Penataan Desa merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Peningkatan Kerja Sama Desa	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.16.03	Sistem Informasi Administrasi Pemerintah Desa	Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pemerintah Desa merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.16.04	Sistem Informasi Lembaga Masyarakat Desa	Aplikasi Sistem Informasi Lembaga Masyarakat Desa merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.17	Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.17.01	Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengendalian Penduduk	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.17.02	Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

	Terpadu	Pembinaan Keluarga Berencanaan (KB)								
DAA.17.03	Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keluarga Berencana dan Sejahtera Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.18	Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.18.01	Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.19	Sistem Informasi Manajemen Informatika dan Komunikasi Publik		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.19.01	Sistem Informasi Pengelolaan informasi dan komunikasi publik;Sistem Administrasi Informasi Registrasi Online Media Kabupaten Way Kanan (SARAGOM)	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan informasi dan komunikasi publik;Sistem Administrasi Informasi Registrasi Online Media Kabupaten Way Kanan (SARAGOM) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Program Informasi dan Komunikasi Publik	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
DAA.19.02	Sistem Informasi Pengelolaan Aplikasi Informatika Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Aplikasi Informatika Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Program Aplikasi Informatika	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.20	Sistem Informasi Manajemen Koperasi (e-		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan	Dinas Komunikasi dan		

	Koperasi)						Informatika	Informatika		
DAA.20.01	Sistem Informasi Manajemen Simpan Pinjam Koperasi (SIM-SPKOP)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Simpan Pinjam Koperasi (SIM-SPKOP) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.20.02	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.20.03	Sistem Informasi Tingkat Kesehatan Koperasi	Aplikasi Sistem Informasi Tingkat Kesehatan Koperasi merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.20.04	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Koperasi merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

DAA.20.05	Sistem Informasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Aplikasi Sistem Informasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.20.06	Sistem Informasi Manajemen UMKM (e-UMKM)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen UMKM (e-UMKM) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.20.07	Sistem Informasi Manajemen UMKM (e-UMKM)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen UMKM (e-UMKM) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengembangan Umkm	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.21	Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.21.01	Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan	Aplikasi Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

DAA.21.02	Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan	Aplikasi Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.21.03	Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan	Aplikasi Sistem Informasi Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.22	Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Way Kanan		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.22.01	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Aplikasi Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengembangan Kebudayaan	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.22.02	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Aplikasi Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengembangan Keseniaan Tradisional	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

DAA.22.03	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Aplikasi Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pembinaan Sejarah	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.22.04	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Aplikasi Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.22.05	Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah	Aplikasi Sistem Informasi Kebudayaan, Kesenian dan Sejarah merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengelolaan Permuseuman	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.23	Sistem Informasi Perpustakaan Terpadu		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.23.01	Sistem Informasi Perpustakaan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pembinaan Perpustakaan	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

DAA.23.02	Sistem Informasi Pelestarian Koleksi dan Naskah Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Pelestarian Koleksi dan Naskah Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.24	Sistem Informasi Manajemen Kelautan dan Perikanan Terpadu		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.24.01	Sistem Informasi Manajemen Perikanan Tangkap	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perikanan Tangkap merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.24.02	Sistem Informasi Manajemen Perikanan Budidaya	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perikanan Budidaya merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengelolaan Perikanan Budidaya	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.24.03	Sistem Informasi Manajemen Perikanan Budidaya	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perikanan Budidaya merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

DAA.24.04	Sistem Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Aplikasi Sistem Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.25	Sistem Informasi Manajemen Pariwisata (e-Pariwisata)		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.25.01	Sistem Informasi Pariwisata Terpadu (e-Pariwisata)	Aplikasi Sistem Informasi Pariwisata Terpadu (e-Pariwisata) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.25.02	Sistem Informasi Pariwisata Terpadu (e-Pariwisata)	Aplikasi Sistem Informasi Pariwisata Terpadu (e-Pariwisata) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pariwisata	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.25.03	Sistem Informasi Manajemen Ekonomi Kreatif	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Ekonomi Kreatif merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

DAA.25.04	Sistem Informasi Manajemen Pelatihan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelatihan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.26	Kartu Petani Berbasis Elektronik (e-KPB)		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.26.01	Layanan Sarana Produksi Pertanian (e-Saprotan)	Aplikasi Layanan Sarana Produksi Pertanian (e-Saprotan) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.26.02	Layanan Sarana Produksi Pertanian (e-Saprotan)	Aplikasi Layanan Sarana Produksi Pertanian (e-Saprotan) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.26.03	Layanan e-Halo MedikVet	Aplikasi Layanan e-Halo MedikVet merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.26.04	Layanan Asuransi (e-Asuransi)	Aplikasi Layanan Asuransi (e-Asuransi) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

DAA.26.05	Sistem Informasi Perizinan Usaha Tani (e-SIPUT)	Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Usaha Tani (e-SIPUT) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Perizinan Usaha Pertanian	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.26.06	Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (Simluhtan)	Aplikasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian (Simluhtan) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Penyuluhan Pertanian	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
DAA.27	Sistem Informasi Perdagangan		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.27.01	Sistem Informasi Perizinan Perusahaan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Perusahaan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.27.02	Sistem Informasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Aplikasi Sistem Informasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

DAA.27.03	Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Perdagangan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Perdagangan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.27.04	Sistem Informasi Ekspor Way Kanan	Aplikasi Sistem Informasi Ekspor Way Kanan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Ekspor Impor	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.27.05	Sistem Informasi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	Aplikasi Sistem Informasi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.27.06	Sistem Informasi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri	Aplikasi Sistem Informasi Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.28	Sistem Informasi Manajemen Perindustrian		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		

DAA.28.01	Sistem Informasi Perencanaan dan Pembangunan Industri (SIPPI)	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pembangunan Industri (SIPPI) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.28.02	Sistem Informasi Perencanaan dan Pembangunan Industri (SIPPI)	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pembangunan Industri (SIPPI) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.28.03	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.29	Sistem Informasi Manajemen Transmigrasi		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.29.01	Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT)	Aplikasi Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik

DAA.29.02	Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT)	Aplikasi Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.30	Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIM-PD)		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.30.01	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.30.02	Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIM-PD)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIM-PD) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik
DAA.31	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		

DAA.31.01	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
DAA.31.02	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
DAP.32	Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Daerah		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAP.32.01	Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Daerah	Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Daerah merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
DAA.33	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		

DAA.33.01	Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
DAA.34	Sistem Informasi Pengadaan Barang Secara Elektronik (SPSE)		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.34.01	Sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu	Aplikasi Sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penyelesaian Pengadaan Barang dan Jasa	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
DAA.34.02	Sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu	Aplikasi Sistem informasi Pengadaan Barang dan Jasa Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu
DAA.34.03	Sistem informasi Pembinaan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Aplikasi Sistem informasi Pembinaan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan

DAA.35	MySAPK		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.35.01	MySAPK	Aplikasi MySAPK merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Kepegawaian Daerah	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
DAA.36	SRIKANDI		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.36.01	Sistem Informasi Kearsipan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Arsip	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
DAA.36.02	Sistem Informasi Perizinan Penggunaan Arsip	Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Penggunaan Arsip merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Perlindungan dan Penyelematan Arsip	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
DAA.37	Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD)		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		

DAA.37.01	Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
DAA.38	WhistleBlowingSystem		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.38.01	Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIM-Pengawasan)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIM-Pengawasan) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penyelenggaraan Pengawasan	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
DAA.38.02	Sistem Informasi Komunikasi dan Asistensi Pimpinan	Aplikasi Sistem Informasi Komunikasi dan Asistensi Pimpinan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
DAA.39	Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (e-SAKIP)		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		

DAA.39.01	Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (e-SAKIP)	Aplikasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (e-SAKIP) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
DAP.40	Sistem Informasi Kinerja Aparatur Pemerintah (SIKAP)		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.40.01	e-Kinerja	Aplikasi e-Kinerja merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
DAA.41	Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (SIPPD)		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.41.01	Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (SIPPD)	Aplikasi Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan Daerah (SIPPD) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
DAA.42	Sistem Informasi Manajemen Kesatuan Bangsa dan Politik (SIMKBP)		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		

DAA.42.01	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Publik	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Publik merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
DAA.42.02	Sistem Informasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Aplikasi Sistem Informasi Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
DAA.42.03	Sistem Informasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Aplikasi Sistem Informasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
DAA.42.04	Sistem Informasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Aplikasi Sistem Informasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan

DAA.42.05	Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Aplikasi Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
DAA.43	Sistem Informasi Data Statistik Sektoral (SIMDA STATISTIK)		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.43.01	Sistem Informasi Statistik Sektoral	Aplikasi Sistem Informasi Statistik Sektoral merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Statistik Sektoral	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
DAA.44	Sistem Informasi Manajemen Persandian Terpadu		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.44.01	Sistem Informasi Manajemen Persandian Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persandian Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
DAA.45	Sistem Informasi Manajemen Sekretariat Daerah (SIM-SEKDA)		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		

DAA.45.01	Sistem Informasi Kesejahteraan Rakyat Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Rakyat Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan RAL.02.04.08.01 Layanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
DAA.45.02	Sistem Informasi Perekonomian dan pembangunan Terpadu	Aplikasi Sistem Informasi Perekonomian dan pembangunan Terpadu merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan RAL.02.04.08.02 Layanan Perekonomian dan Pembangunan	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
DAA.45.03	Sistem Informasi Pengelolaan Izin	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Izin merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan RAL.02.04.08.03 Layanan Pengelolaan Izin Lokasi	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan
DAA.46	Sistem Informasi Manajemen Sekretariat DPRD		Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		
DAA.46.01	Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (SIM Petuksi DPRD)	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (SIM Petuksi DPRD) merupakan Aplikasi Untuk Mendukung Layanan Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Open Source	PHP	Laravel	PostgreSQL	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan


 BUPATI WAY KANAN,
 EDEN ABIPATI SURYA